

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN / SKPD	NOMOR HALAMAN
1	<i>Daftar Isi</i>	2
	Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Selatan	
	Merkul Penyeempunaan Rancangan Peraturan Daerah	
	Barang Tubuh Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2024	1 - 10
	LAMPIRAN	
	Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran	12 - 14
	Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	15 - 22
	Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	23 - 24
	Lampiran I.3 Rincian Realisasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	25 - 178
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah raga	25 - 32
2	Dinas Kesehatan	33 - 41
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	42 - 49
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	50 - 57
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	58 - 61
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62 - 65
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66 - 70
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	71 - 73
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	74 - 78
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79 - 84
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	85 - 88
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	89 - 92
13	Dinas Pustaka dan Arsip	93 - 96
14	Dinas Pariwisata Kebudayaan	97 - 102
15	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	103 - 111
16	Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	112 - 117
17	Setretariat Daerah	118 - 123
18	Setretariat DPRD	124 - 127
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	128 - 132
20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	133 - 138
21	Badan Kepegawai Daerah dan SDM	139 - 142
22	Inspektorat	143 - 146
23	Kecamatan Sungul Pegu	147 - 150
24	Kecamatan Pauh Duo	151 - 154
25	Kecamatan Sangat Balai Jango	155 - 158
26	Kecamatan Sangat Batang Hari	159 - 162
27	Kecamatan Sangat Jiphan	163 - 166
28	Kecamatan KPGD	167 - 170
29	Kecamatan Sangir	171 - 174
30	Kantor Kesehatan Bangsa dan Politik	175 - 178
	Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	179 - 257
	Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	258
	Lampiran III Laporan Operasional	259 - 261

NO	URAIAN / SKPD	NOMOR HALAMAN
1		3
	Lampiran IV LPE	262
	Lampiran V Neraca	263 - 265
	Lampiran VI Laporan Arus Kas	266 - 268
	Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	269 - 496
	Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	497
	Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	498
	Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	499
	Lampiran XI Daftar Penyerahan Modal (Investasi) Daerah	500
	Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	501
	Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	502
	Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Kontribusi Dalam Pekerjaan	503
	Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	504
	Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah	505
	Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek	506
	Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang	507
	Lampiran XIX Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya	508
	Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca, Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah)	509
	Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah	510



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 BERDASARKAN HASIL EVALUASI
DALAM KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 903 – 501 – 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah keluarnya hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 – 501 – 2024, telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi Dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 – 501 – 2024;

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Memperhatikan :

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-501-2024 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi Dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903 – 501 – 2024.

KEDUA : Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dan disempurnakan sebagaimana Hasil Evaluasi dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903 – 501 – 2024.

- KETIGA** : Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 19 Juli 2024

**KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN,**



ZIGO ROLANDA

Terbaca:

1. Yth. Sdr. Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Yth. Sdr. Kepala DPRD Kab Solok Selatan di Padang Aro.
3. Yth. Sdr. Inspektur Kab Solok Selatan di Padang Aro.
4. Yth. Sdr. Kepala Rappeda Solok Selatan di Padang Aro.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK
SELATAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 BERDASARKAN HASIL EVALUASI DALAM KEPUTUSAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 903 – 501 – 2024.

PENDAPATAN DAERAH		Rp. 840.018.798.191,79
Pendapatan Asli Daerah		Rp. 88.875.590.931,79
- Pajak Daerah		Rp. 11.176.289.565,00
- Retribusi Daerah		Rp. 2.000.096.422,70
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Rp. 2.796.556.717,00
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		Rp. 72.902.648.227,09
Pendapatan Transfer		Rp. 741.131.287.237,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Rp. 653.253.740.634,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		Rp. 41.852.235.000,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		Rp. 39.025.311.603,00
- Bantuan Keuangan		Rp. 7.000.000.000,00
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah		Rp. 10.011.920.023,00
- Pendapatan Hibah		Rp. 0
- Pendapatan Lainnya		Rp. 10.011.920.023,00
BELANJA		Rp. 785.417.181.448,28
Belanja Operasi		Rp. 645.554.117.010,28
- Belanja Pegawai		Rp. 375.400.727.878,95
- Belanja Barang dan Jasa		Rp. 249.419.979.153,33
- Belanja Hibah		Rp. 20.733.409.978,00
- Belanja Bantuan Sosial		Rp. 0
Belanja Modal		Rp. 139.713.064.438,00
- Belanja Modal Tanah		Rp. 19.108.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp. 26.339.182.991,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Rp. 33.431.528.257,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp. 77.154.111.140,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		Rp. 2.769.134.050,00
Belanja Tak Terduga		Rp. 150.000.000,00
- Belanja Tak Terduga		Rp. 150.000.000,00
TRANSFER		Rp. 92.627.871.216,00
- Transfer Bagi Hasil Pendapatan		Rp. 1.429.609.216,00
- Transfer Bantuan Keuangan		Rp. 91.198.262.000,00
Surplus/ (Defisit)		Rp. (38.026.254.472,49)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- Penggunaan SILPA

Rp. 92.755.029.657,27
Rp. 92.755.029.657,27

Pengeluaran Pembiayaan

- Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Rp. 729.000.000,00
Rp. 729.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp 92.026.029.657,27

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 53.999.775.184,78

KETUA DPRD

KABUPATEN SLDK SEIATAN,



BERITA ACARA

Nomor : 5 / 8A / VI / DPRD - 2024

Nomor : 130.05 / 8A / 8A/P-SS / VII / 2024

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SOLOK SELATAN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 BERDASARKAN HASIL EVALUASI DALAM KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 903-501-2024

Pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. KHAIRUNAS**
Jabatan : Bupati Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ZIGO ROLANDA, SE, MM.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro

Nama : **YENDRI SUSANTO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro

Nama : **ARMEN SYAHJOHAN, S.IP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Padang Aro

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 - 501 - 2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama telah melakukan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah kami sempurnakan bersama, dan seluruh Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

BUPATI SOLOK SELATAN,



H. KHAIRUNAS

PIHAK KEDUA

**KETUA DPRD
 KABUPATEN SOLOK SELATAN,**



ZIGO ROLANDA, SE., MM.

**WAKIL KETUA DPRD
 KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

YENDRI SUSANTO

**WAKIL KETUA DPRD
 KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

ARMEN SYAHJAHAN, S.IP

MATRIK PENYEMPURNAAN TERHADAP KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 903-501-2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK

SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH/RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	MASUKAN/SARAN	KETERANGAN	TANGGAPAN
	RANCANGAN PERATURAN DAERAH			
1.	Dasar hukum "Mengingat"	Angka 5 dan angka 7, dihapus		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
2.	Pasal 1 ayat (1) dan pasal-pasal lainnya	Rumusan diubah menjadi: Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat: • laporan realisasi anggaran; • neraca; • laporan arus kas;	• Kata/istilah yang tidak dimuat dalam ketentuan umum serta yang tidak termasuk dalam	Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH/RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	MASUKAN/SARAN	KETERANGAN	TANGGAPAN
	RANCANGAN PERATURAN DAERAH			
		<ul style="list-style-type: none"> • laporan oprasional; • laporan perubahan saldo anggaran lebih; • laporan perubahan ekuitas; dan • catatan atas laporan keuangan. 	<p>kategori sebagaimana angka 243 huruf g Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, ditulis dengan awalan huruf kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> • setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil 	
3.	Pasal 1 ayat (2)	Rumusan diubah menjadi: Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
4.	Pasal 2 dan pasal-pasal lainnya	Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut: a. pendapatan sebesar Rp840.018.798.191,79 (delapan ratus	Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat	Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH/RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	MASUKAN/SARAN	KETERANGAN	TANGGAPAN
	RANCANGAN PERATURAN DAERAH			
		<p>empat puluh miliar delapan belas juta tujuh ratus ... dst)</p> <p>b. belanja dan transfer sebesar Rp878.045.052.664,28 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar empat puluh lima juta ... dst);</p> <p>c. ... dst</p>	selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung	perbaiki sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
5.	Pasal 2 dan Pasal 4	Singkatan "SiLPA" agar dipanjangkan		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
6.	Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri; Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca, <p>sehingga diubah menjadi:</p>		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
1.	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD</p> <p>Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.</p> <p>Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :</p>		
A.	KONSISTENSI		
	<p>Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.</p> <p>Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :</p> <p>1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp841.160.510.684,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp933.186.620.627,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp841.160.510.684,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp933.186.620.627,00 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan</p>		

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.</p> <p>2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023.</p> <p>3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023.</p> <p>Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.</p>	<p>Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.</p>	
B.	<p>LEGALITAS</p> <p>Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.</p> <p>Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain :</p>		
	<p>1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati Solok</p>		

NO	HASIL EVALUASI			TANGGAPAN	KET																									
2.	<p>Selatan dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :</p> <p style="text-align: center;">Tabel. 1 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p> <table border="1" data-bbox="326 553 1604 1331"> <thead> <tr> <th data-bbox="326 553 401 646">No.</th> <th data-bbox="401 553 737 646">Uraian</th> <th colspan="2" data-bbox="737 553 1265 602">Penetapan/Persetujuan/Surat</th> <th data-bbox="1265 553 1604 646">Ket.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th data-bbox="737 602 1031 646">Nomor</th> <th data-bbox="1031 602 1265 646">Tanggal</th> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="326 646 401 878">1</td> <td data-bbox="401 646 737 878">Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD</td> <td data-bbox="737 646 1031 878">900/214/BPKD-2024</td> <td data-bbox="1031 646 1265 878">Diterima tanggal 16 Mei 2024</td> <td data-bbox="1265 646 1604 878">Sesuai, (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 878 401 1175">2</td> <td data-bbox="401 878 737 1175">Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</td> <td data-bbox="737 878 1031 1175">130.7/NK/BUP-SS/VI/2024 dan 1/NK/DPRD-2024</td> <td data-bbox="1031 878 1265 1175">21 Juni 2024</td> <td data-bbox="1265 878 1604 1175">Sesuai, (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun persetujuan bersama belum memenuhi 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 1175 401 1331">3</td> <td data-bbox="401 1175 737 1331">Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan</td> <td data-bbox="737 1175 1031 1331">900/173/BPKD-2024</td> <td data-bbox="1031 1175 1265 1331">Diterima tanggal 25 Juni 2024</td> <td data-bbox="1265 1175 1604 1331">Sesuai, (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.			Nomor	Tanggal		1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/214/BPKD-2024	Diterima tanggal 16 Mei 2024	Sesuai, (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)	2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	130.7/NK/BUP-SS/VI/2024 dan 1/NK/DPRD-2024	21 Juni 2024	Sesuai, (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun persetujuan bersama belum memenuhi 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)	3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan	900/173/BPKD-2024	Diterima tanggal 25 Juni 2024	Sesuai, (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan		
No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.																										
		Nomor	Tanggal																											
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/214/BPKD-2024	Diterima tanggal 16 Mei 2024	Sesuai, (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)																										
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	130.7/NK/BUP-SS/VI/2024 dan 1/NK/DPRD-2024	21 Juni 2024	Sesuai, (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun persetujuan bersama belum memenuhi 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)																										
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan	900/173/BPKD-2024	Diterima tanggal 25 Juni 2024	Sesuai, (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan																										

NO	HASIL EVALUASI				TANGGAPAN	KET
	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur			Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)	Terimakasih, ke depannya, Bupati Solok Selatan dan DPRD akan tetap konsisten mematuhi tahapan dan jadwal	
<p>a. Bupati Solok Selatan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk dibahas bersama melalui surat Bupati Nomor 900/214/BPKD-2024, diterima oleh DPRD pada tanggal 16 Mei 2024. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 16 Mei 2024 dan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 21 Juni 2024, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun belum memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan</p>						

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD).</p> <p>c. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ditandatangani tanggal 21 Juni 2024, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 25 Juni 2024, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>Ke depannya, Bupati Solok Selatan dan DPRD harus tetap konsisten mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p>	
	<p>Kelengkapan Dokumen</p> <p>Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Kcud tanggal 30 April 2024 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 yang terdiri atas :</p> <p>a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; <ol style="list-style-type: none"> a) Lampiran 1.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; b) Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 	<p>Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap konsisten memenuhi kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;</p> <p>d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;</p> <p>2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;</p> <p>3) Lampiran III : Laporan operasional;</p> <p>4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;</p> <p>5) Lampiran V : Neraca;</p> <p>6) Lampiran VI : Laporan arus kas;</p> <p>7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;</p> <p>8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;</p> <p>9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;</p> <p>10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;</p> <p>11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;</p> <p>12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;</p> <p>13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;</p> <p>14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;</p> <p>15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;</p> <p>16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;</p> <p>17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;</p> <p>18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;</p> <p>19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;</p> <p>20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;</p> <p>a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah</p>		

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah</p> <p>b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. <p>c. Dokumen lain yang disyaratkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk kesclarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. 2) Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending). 3) Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 4) Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 5) Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri; 6) Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah; 7) Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota; 8) Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting; 9) Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 10) Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PB.J) melalui e-purchasing; dan 11) Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD). 		
	<p>Kelengkapan Dokumen</p> <p>Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang</p>	Terimakasih, kedepannya	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :</p> <p>d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 21) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; <ol style="list-style-type: none"> e) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; f) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; g) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; h) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; 22) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 23) Lampiran III : Laporan operasional; 24) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 25) Lampiran V : Neraca; 26) Lampiran VI : Laporan arus kas; 27) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 28) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 29) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 30) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; 	<p>Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap konsisten memenuhi kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>31) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;</p> <p>32) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;</p> <p>33) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;</p> <p>34) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;</p> <p>35) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;</p> <p>36) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;</p> <p>37) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;</p> <p>38) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;</p> <p>39) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;</p> <p>40) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;</p> <p>c) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah</p> <p>d) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah</p> <p>c. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :</p> <p>3) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;</p> <p>Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.</p>		
C.	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>		

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :		
	1: LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)		
	<p>a. PENDAPATAN DAERAH Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp840.018.798.191,79 atau 99,86% dari target yang dianggarkan sebesar Rp841.160.510.684,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih rendah sebesar Rp(43.495.388.355,10) atau turun (4,92%) dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp884.655.899.039,10 . Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :</p> <p>1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp88.875.590.931,79 atau 113,75% dari target yang dianggarkan sebesar Rp78.133.896.833,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih rendah Rp(13.987.151.213,10) dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp92.121.048.046,10 atau turun sebesar (15,18%). Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :</p> <p>a) Pajak Daerah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.176.289.565,00 atau 88,50% dari target yang dianggarkan sebesar Rp12.627.963.123,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi sebesar Rp1.621.248.252,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp11.006.714.870,10 atau naik 14,73%. Beberapa objek Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :</p> <p>(1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp140.967.113,00 atau 140,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.</p>		

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET																								
	<p>(2) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp2.528.210.675,00 atau 126,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.</p> <p>(3) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp355.151.708,00 atau 177,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.</p> <p>(4) Pajak Pencerangan Jalan, realisasi sebesar Rp5.650.671.965,00 atau 105,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.357.965.943,00.</p> <p>Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :</p> <p>(1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasi sebesar Rp925.642.685,00 atau 52,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00.</p> <p>(2) PBB Pedesaan dan Perkotaan realisasi sebesar Rp1.211.031.597,00 atau 44,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.719.997.180,00.</p> <p>(3) BPHTB realisasi sebesar Rp364.613.822,00 atau 72,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.</p> <p>Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2019 s.d 2023), sebagaimana tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="468 894 1525 1247"> <thead> <tr> <th data-bbox="468 894 618 987">TA 1</th> <th data-bbox="618 894 1004 987">Anggaran (Rp) 2</th> <th data-bbox="1004 894 1390 987">Rcalisasi (Rp) 3</th> <th data-bbox="1390 894 1525 987">% 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="468 987 618 1036">2019</td> <td data-bbox="618 987 1004 1036">12.908.000.000,00</td> <td data-bbox="1004 987 1390 1036">8.435.031.570,50</td> <td data-bbox="1390 987 1525 1036">65,35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="468 1036 618 1084">2020</td> <td data-bbox="618 1036 1004 1084">6.599.221.993,00</td> <td data-bbox="1004 1036 1390 1084">6.800.569.113,50</td> <td data-bbox="1390 1036 1525 1084">103,05</td> </tr> <tr> <td data-bbox="468 1084 618 1133">2021</td> <td data-bbox="618 1084 1004 1133">18.526.000.000,00</td> <td data-bbox="1004 1084 1390 1133">16.500.169.327,00</td> <td data-bbox="1390 1084 1525 1133">89,06</td> </tr> <tr> <td data-bbox="468 1133 618 1182">2022</td> <td data-bbox="618 1133 1004 1182">12.218.945.000,00</td> <td data-bbox="1004 1133 1390 1182">11.006.714.870,10</td> <td data-bbox="1390 1133 1525 1182">90,08</td> </tr> <tr> <td data-bbox="468 1182 618 1247">2023</td> <td data-bbox="618 1182 1004 1247">12.627.963.123,00</td> <td data-bbox="1004 1182 1390 1247">11.176.289.565,00</td> <td data-bbox="1390 1182 1525 1247">88,50</td> </tr> </tbody> </table>	TA 1	Anggaran (Rp) 2	Rcalisasi (Rp) 3	% 4	2019	12.908.000.000,00	8.435.031.570,50	65,35	2020	6.599.221.993,00	6.800.569.113,50	103,05	2021	18.526.000.000,00	16.500.169.327,00	89,06	2022	12.218.945.000,00	11.006.714.870,10	90,08	2023	12.627.963.123,00	11.176.289.565,00	88,50	<p>Terimakasih pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap cermat dalam menetapkan target anggaran sctiap objek Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga</p>	
TA 1	Anggaran (Rp) 2	Rcalisasi (Rp) 3	% 4																								
2019	12.908.000.000,00	8.435.031.570,50	65,35																								
2020	6.599.221.993,00	6.800.569.113,50	103,05																								
2021	18.526.000.000,00	16.500.169.327,00	89,06																								
2022	12.218.945.000,00	11.006.714.870,10	90,08																								
2023	12.627.963.123,00	11.176.289.565,00	88,50																								

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Berdasarkan tabel di atas, hanya pada tahun 2020 Pendapatan Pajak Daerah realisasinya mencapai target yang ditetapkan. Secara nominal, realisasi Pendapatan Pajak Daerah cenderung meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Secara persentase pada Tahun 2023 capaian realisasi Pajak Daerah mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya karena tidak memenuhi target yang ditetapkan.</p> <p>Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam menetapkan target anggaran setiap objek Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.</p> <p>b) Retribusi Daerah</p> <p>Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.000.096.422,70 masih sangat jauh dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.404.500.000,00 atau 83,26%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp50.284.872,00 naik sebesar Rp2.354.215.128,00 atau 2,14%.</p> <p>Belum optimalnya pencapaian realisasi Retribusi Daerah disebabkan karena hampir semua objek retribusi daerah realisasinya tidak mencapai target, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp136.175.000,00 atau 59,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp228.500.000,00. (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan terealisasi sebesar Rp110.627.000,00 atau 40,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00. 	<p>perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.</p> <p>Terimakasih</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET																				
	<p>(3) Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp367.480.400,00 atau 79,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp461.000.000,00.</p> <p>(4) Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp35.916.000,00 atau 47,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.</p> <p>(5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp219.352.000,00 atau 73,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.</p> <p>(6) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp27.566.777,70 atau 27,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.</p> <p>Beberapa objek Pendapatan Retribusi Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain :</p> <p>(1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp51.339.000,00 atau 102,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.</p> <p>(2) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp321.945.312,00 atau 128,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.</p> <p>(3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp729.694.933,00 atau 109,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp665.000.000,00.</p> <p>Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2019 s.d 2023), sebagaimana tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="483 1084 1515 1308"> <thead> <tr> <th data-bbox="483 1084 642 1141">TA</th> <th data-bbox="642 1084 999 1141">Anggaran (Rp)</th> <th data-bbox="999 1084 1373 1141">Realisasi (Rp)</th> <th data-bbox="1373 1084 1515 1141">%</th> </tr> <tr> <th data-bbox="483 1141 642 1182">1</th> <th data-bbox="642 1141 999 1182">2</th> <th data-bbox="999 1141 1373 1182">3</th> <th data-bbox="1373 1141 1515 1182">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 1182 642 1222">2019</td> <td data-bbox="642 1182 999 1222">5.463.652.186,00</td> <td data-bbox="999 1182 1373 1222">4.624.073.616,67</td> <td data-bbox="1373 1182 1515 1222">84,63</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1222 642 1263">2020</td> <td data-bbox="642 1222 999 1263">2.940.000.000,00</td> <td data-bbox="999 1222 1373 1263">1.362.801.219,00</td> <td data-bbox="1373 1222 1515 1263">46,35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1263 642 1308">2021</td> <td data-bbox="642 1263 999 1308">996.875.000,00</td> <td data-bbox="999 1263 1373 1308">1.199.290.189,50</td> <td data-bbox="1373 1263 1515 1308">120,30</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	2019	5.463.652.186,00	4.624.073.616,67	84,63	2020	2.940.000.000,00	1.362.801.219,00	46,35	2021	996.875.000,00	1.199.290.189,50	120,30	<p>kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan kinerja Pendapatan dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-</p>	
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																				
1	2	3	4																				
2019	5.463.652.186,00	4.624.073.616,67	84,63																				
2020	2.940.000.000,00	1.362.801.219,00	46,35																				
2021	996.875.000,00	1.199.290.189,50	120,30																				

NO	HASIL EVALUASI				TANGGAPAN	KET
	2022	1.458.750.000,00	1.235.018.343,00	84,66	tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan	
	2023	2.404.500.000,00	2.000.096.422,70	83,18		
	<p>Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2021. Di tahun 2023, terjadi penurunan atas persentase capaian Retribusi Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah belum dilakukan secara cermat sehingga tidak realistis karena tidak mempertimbangkan data historis realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya dan tidak memperhitungkan potensi yang sesungguhnya.</p> <p>Untuk itu tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan kinerja Pendapatan dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.</p>					
	<p>c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</p> <p>Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.796.556.717,00 atau 106,41% dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.628.000.000,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp212237050,00 atau naik 8,79% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.415.762.950,00.</p> <p>Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini sepenuhnya berasal dari Hasil Dividen saham dari PT. Bank Nagari sebesar Rp2.796.556.717,00.</p> <p>Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima)</p>					

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET																												
	<p>tahun terakhir (Tahun Anggaran 2019 s.d 2023), sebagaimana tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="475 326 1530 626"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 326 593 367">TA</th> <th data-bbox="593 326 991 367">Anggaran (Rp)</th> <th data-bbox="991 326 1378 367">Realisasi (Rp)</th> <th data-bbox="1378 326 1530 367">%</th> </tr> <tr> <th data-bbox="475 367 593 407">1</th> <th data-bbox="593 367 991 407">2</th> <th data-bbox="991 367 1378 407">3</th> <th data-bbox="1378 367 1530 407">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 407 593 448">2019</td> <td data-bbox="593 407 991 448">2.500.000.000,00</td> <td data-bbox="991 407 1378 448">1.677.244.574,00</td> <td data-bbox="1378 407 1530 448">67,09</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 448 593 488">2020</td> <td data-bbox="593 448 991 488">1.843.023.859,00</td> <td data-bbox="991 448 1378 488">1.843.023.859,00</td> <td data-bbox="1378 448 1530 488">100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 488 593 529">2021</td> <td data-bbox="593 488 991 529">1.700.551.019,00</td> <td data-bbox="991 488 1378 529">1.700.551.019,00</td> <td data-bbox="1378 488 1530 529">100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 529 593 570">2022</td> <td data-bbox="593 529 991 570">2.400.000.000,00</td> <td data-bbox="991 529 1378 570">2.415.762.950,00</td> <td data-bbox="1378 529 1530 570">100,66</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 570 593 626">2023</td> <td data-bbox="593 570 991 626">2.628.000.000,00</td> <td data-bbox="991 570 1378 626">2.796.556.717,00</td> <td data-bbox="1378 570 1530 626">106,41</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="451 626 1814 938">Dari tabel di atas terlihat persentase realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun mendatang agar menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.</p> <p data-bbox="393 984 1814 1295">d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.902.648.227,09 atau 120,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.473.433.710,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah sebesar Rp(15.870.921.388,00) atau turun (20,79%) bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp76.344.355.098,00. Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2023 yang sudah memenuhi dan melebihi target yang dianggarkan antara lain :</p>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	2019	2.500.000.000,00	1.677.244.574,00	67,09	2020	1.843.023.859,00	1.843.023.859,00	100,00	2021	1.700.551.019,00	1.700.551.019,00	100,00	2022	2.400.000.000,00	2.415.762.950,00	100,66	2023	2.628.000.000,00	2.796.556.717,00	106,41	<p data-bbox="1826 854 2163 1299">Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun mendatang dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, akan tetap</p>	
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																												
1	2	3	4																												
2019	2.500.000.000,00	1.677.244.574,00	67,09																												
2020	1.843.023.859,00	1.843.023.859,00	100,00																												
2021	1.700.551.019,00	1.700.551.019,00	100,00																												
2022	2.400.000.000,00	2.415.762.950,00	100,66																												
2023	2.628.000.000,00	2.796.556.717,00	106,41																												

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET																								
	<p>(1) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, realisasi sebesar Rp17.965.774.341,46 atau 232,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.721.055.081,00.</p> <p>(2) Pendapatan BLUD sebesar Rp50.848.574.198,00 atau 117,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.234.000.000,00.</p> <p>Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2023 belum mencapai target antara lain : :</p> <p>(1) Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan, realisasi sebesar Rp21.050.000,00 atau 4,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.</p> <p>(2) Jasa Giro sebesar Rp3.738.881.518,00 atau 74,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.</p> <p>(3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp328.368.169,63 atau 21,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.561.733.764,00.</p> <p>Namun terdapat juga realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah yang dianggarkan namun tidak terealisasi pada APBD TA.2023, yaitu Pendapatan dari Pengembalian, tidak terealisasi atau sebesar Rp0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.456.644.865,00.</p> <p>Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2019 s.d 2023), sebagaimana tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="485 1031 1520 1307"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>58.081.704.083,00</td> <td>56.367.708.480,53</td> <td>97,05</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>60.894.228.405,00</td> <td>67.021.427.677,81</td> <td>110,06</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>63.646.859.275,00</td> <td>61.024.115.158,00</td> <td>95,88</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>57.181.580.000,00</td> <td>76.344.355.098,00</td> <td>133,51</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	2019	58.081.704.083,00	56.367.708.480,53	97,05	2020	60.894.228.405,00	67.021.427.677,81	110,06	2021	63.646.859.275,00	61.024.115.158,00	95,88	2022	57.181.580.000,00	76.344.355.098,00	133,51	<p>memperhatikan rasionalitas dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>Terimakasih, Kedepannya Pemerintah</p>	
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																								
1	2	3	4																								
2019	58.081.704.083,00	56.367.708.480,53	97,05																								
2020	60.894.228.405,00	67.021.427.677,81	110,06																								
2021	63.646.859.275,00	61.024.115.158,00	95,88																								
2022	57.181.580.000,00	76.344.355.098,00	133,51																								

NO	HASIL EVALUASI				TANGGAPAN	KET
	2023	60.473.433.710,00	72.902.648.227,09	120,55	Kabupaten Solok Selatan akan tetap rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.	
<p>Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 realisasi Lain-lain PAD yang Sah terlibat fluktuatif. Pada tahun 2023 realisasinya lebih rendah dari tahun sebelumnya.</p>						
<p>Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki. Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Solok Selatan karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kabupaten Solok Selatan dan apabila tidak terealisasi secara optimal akan berpengaruh pada ketersediaan kas untuk pemenuhan belanja daerah.</p>						
<p>2) Pendapatan Transfer</p>						
<p>Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp741.131.287.237,00 atau 98,40% dari yang dianggarkan Rp753.151.463.851,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp784.706.642.887,00 mengalami penurunan sebesar Rp(31.555.179.036,00) atau (4,02%).</p>						
<p>Pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Solok Selatan berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat yang diberikan pada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Pada tahun 2023, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp695.105.975.634,00 atau 100,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp691.504.784.241,00 yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal).</p>						
<p>Sementara itu Pendapatan Transfer dari Provinsi merupakan pendapatan transfer daerah yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi. Pada akhir tahun 2023</p>						

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>pendapatan bagi hasil pajak itu terealisasi sebesar Rp46.025.311.603,00 atau 74,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.646.679.610,00.</p> <p>3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.011.920.023,00 atau 101,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.875.150.000,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.828.208.106,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp2.046.941.894,00 atau 26,158%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dan rasional dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.</p> <p>4) Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain: a) Realisasi Pendapatan yang telah mencapai target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada: (1) Dinas Kesehatan, yaitu Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp50.848.574.198,00 atau 117,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.234.000.000,00. (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi realisasi sebesar Rp321.945.312,00 atau 128,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00. (3) Badan Pengelola Keuangan Daerah antara lain pada: (a) Pajak Hotel realisasi sebesar Rp140.967.113,00 atau 140,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00. (b) Pajak Restoran realisasi sebesar Rp2.528.210.675,00 atau 126,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.</p>	<p>Terima kasih atas sarannya, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>(c) Pajak Reklame realisasi sebesar Rp355.151.708,00 atau 177,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.</p> <p>(d) Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp5.650.671.965,00 atau 105,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.357.965.943,00.</p> <p>(e) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp729.694.933,00 atau 109,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp665.000.000,00.</p> <p>b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :</p> <p>(1) Dinas Kesehatan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp136.175.000,00 atau 59,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp228.500.000,00.</p> <p>(2) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan realisasi sebesar Rp110.627.000,00 atau 40,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00.</p> <p>(3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp27.566.777,70 atau 27,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.</p> <p>(4) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, yaitu Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp219.352.000,00 atau 73,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.</p> <p>(5) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Retribusi Pelayanan Pasar realisasi sebesar Rp367.480.400,00 atau 79,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp461.000.000,00.</p> <p>(6) Badan Pengelola Keuangan Daerah antara lain pada :</p> <p>(a) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya realisasi sebesar Rp925.642.685,00 atau 52,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00.</p> <p>(b) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) realisasi sebesar Rp1.211.031.597,00 atau 44,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.719.997.180,00.</p>	<p>Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan upaya</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>(c) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasi sebesar 364.613.822,00 atau 72,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00. Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya dapat terus mengalami peningkatan signifikan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan.</p> <p>Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak stabil secara tidak langsung berimbas pada perekonomian Kabupaten Solok Selatan. 2) Penetapan target pendapatan retribusi daerah terlalu tinggi dan memperhatikan kesiapan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. 3) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2021. 4) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak dan/atau retribusi secara tepat waktu. 5) Masih belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah. <p>Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah dan upaya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah didukung dengan basis data dan update data yang terintegrasi serta akurasi data yang memadai, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 	<p>optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan.</p> <p>Terimakasih, kedepannya Pemerintah</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain-lain PAD yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.</p> <p>3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.</p> <p>4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.</p> <p>5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.</p> <p>6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.</p> <p>7) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.</p> <p>8) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, seperti : ATM, SMS banking, mobile banking dan chanel layanan (e-commerce).</p> <p>9) Membuat prioritas pemeliharaan terhadap BMD atau sarana pendukung peningkatan layanan atau produksi yang mengalami kerusakan, sehingga produksi dan layanan tidak terhambat dan bisa dilakukan secara optimal.</p> <p>10) Mengevaluasi jenis pelayanan dan melakukan perubahan terhadap tarif pemungutan</p>	<p>Kabupaten Solok Selatan akan melakukan langkah-langkah yang disarankan agar realisasi pendapatan daerah dapat tercapai secara maksimal.</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET												
	<p>pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>11) Peningkatan pengamanan dan pengendalian penerimaan daerah.</p> <p>b. Belanja Daerah</p> <p>1) Belanja Daerah</p> <p>Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp785.417.181.448,28 atau 93,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp840.407.648.873,00. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :</p> <p>a) Belanja Operasi Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp645.554.117.010,28 atau 93,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp690.532.104.284,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :</p> <p>(1) Belanja Pegawai</p> <p>Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp375.400.727.878,95 atau 95,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp392.114.314.229,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp375.198.145.727,83 target belanja pegawai tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp18.472.948.322,17 atau 4,92%.</p> <p>Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 s.d 2023, sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="505 1182 1542 1307"> <thead> <tr> <th data-bbox="505 1182 625 1222">TA</th> <th data-bbox="625 1182 1029 1222">Anggaran (Rp)</th> <th data-bbox="1029 1182 1410 1222">Realisasi (Rp)</th> <th data-bbox="1410 1182 1542 1222">%</th> </tr> <tr> <th data-bbox="505 1222 625 1263">1</th> <th data-bbox="625 1222 1029 1263">2</th> <th data-bbox="1029 1222 1410 1263">3</th> <th data-bbox="1410 1222 1542 1263">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="505 1263 625 1307">2019</td> <td data-bbox="625 1263 1029 1307">360.438.357.095,00</td> <td data-bbox="1029 1263 1410 1307">341.301.328.489,01</td> <td data-bbox="1410 1263 1542 1307">94,69</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	2019	360.438.357.095,00	341.301.328.489,01	94,69		
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%												
1	2	3	4												
2019	360.438.357.095,00	341.301.328.489,01	94,69												

NO	HASIL EVALUASI				TANGGAPAN	KET
2020	365.112.375.936,00	348.620.480.143,00	93,51			
2021	380.470.171.065,00	372.832.719.871,00	97,99			
2022	389.819.286.181,00	375.198.145.727,83	96,25			
2023	392.114.314.229,00	375.400.727.878,95	95,35			
<p>Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung berfluktuasi, begitu juga dengan nominal alokasi anggaran dan realisasinya.</p>						
<p>Rasio realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 terhadap realisasi total belanja daerah sebesar 35,37% lebih kecil dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar 39,014%. Memperhatikan porsi belanja pegawai diatas, maka pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengupayakan dengan serius untuk menurunkan rasio belanja pegawai paling besar 30,00% dari total belanja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>						
(2) Belanja Barang dan Jasa						
<p>Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp249.419.979.153,33 atau 90,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp276.187.796.290,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi belanja :</p>						
(a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp99.475.775.928,33 atau 89,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.710.759.459,00.						
(b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp107.748.274.134,00 atau 93,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp115.425.072.199,00.						
(c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp2.575.207.859,00 atau 94,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.736.547.720,00.						

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET																												
	<p>(d) Belanja Perjalanan Dinas tercalisasi sebesar Rp35.500.721.399,00 atau 83,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.470.871.629,00.</p> <p>(e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp4.119.999.833,00 atau 85,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.844.545.283,00.</p> <p>Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 s.d 2023, sebagaimana tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="510 820 1540 1133"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>227.031.473.180,00</td> <td>208.116.228.520,01</td> <td>91,67</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>213.988.202.113,00</td> <td>200.105.481.056,00</td> <td>93,51</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>262.567.458.456,00</td> <td>221.928.878.307,95</td> <td>84,52</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>252.797.163.246,00</td> <td>224.250.350.259,27</td> <td>88,71</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>276.187.796.290,00</td> <td>249.419.979.153,33</td> <td>90,30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 cukup fluktuatif, pada tahun 2023 realisasi anggaran dan persentase capaiannya mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya namun masih belum memenuhi target. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam merencanakan dan melisasikan belanja barang dan jasa.</p>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	2019	227.031.473.180,00	208.116.228.520,01	91,67	2020	213.988.202.113,00	200.105.481.056,00	93,51	2021	262.567.458.456,00	221.928.878.307,95	84,52	2022	252.797.163.246,00	224.250.350.259,27	88,71	2023	276.187.796.290,00	249.419.979.153,33	90,30	<p>Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Sesuai aturan yang berlaku.</p>	
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																												
1	2	3	4																												
2019	227.031.473.180,00	208.116.228.520,01	91,67																												
2020	213.988.202.113,00	200.105.481.056,00	93,51																												
2021	262.567.458.456,00	221.928.878.307,95	84,52																												
2022	252.797.163.246,00	224.250.350.259,27	88,71																												
2023	276.187.796.290,00	249.419.979.153,33	90,30																												

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>(3) Belanja Hibah Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.733.409.978,00 atau 100,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.673.213.944,00 dengan rincian :</p> <p>(a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp17.661.571.345,00 atau 100,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.596.985.000,00.</p> <p>(b) Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp2.241.589.689,00 atau 99,0% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.245.980.000,00.</p> <p>(c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp830.248.944,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp830.248.944,00.</p> <p>b) Belanja Modal Realisasi Belanja Modal sebesar Rp139.713.064.438,00 atau 93,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.875.544.589,00. Target Belanja Modal yang dianggarkan Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp202.072.297.511,67 atau mengalami penurunan sebesar Rp(53.196.752.922,67) atau (26,33%). Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan belum cukup baik dan relatif jauh di bawah target yang ditetapkan. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 tidak optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :</p> <p>(1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp19.108.000,00 atau 1,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.142.997.230,00.</p> <p>(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp26.339.182.991,00 atau 93,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.309.890.874,00.</p> <p>(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp33.431.528.257,00 atau</p>	<p>Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja barang dan jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET																												
	<p>88,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.859.519.525,00.</p> <p>(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp77.154.111.140,00 atau 98,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.100.973.060,00.</p> <p>(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp2.769.134.050,00 atau 98,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.809.763.900,00.</p> <p>(6) Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp652.400.000,00.</p> <p>Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 s.d 2023, sebagaimana tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="456 626 1517 927"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran</th> <th>Rcalisasi</th> <th>%</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>301.666.389.574,00</td> <td>210.375.471.214,00</td> <td>69,74</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>156.252.380.478,00</td> <td>124.575.198.868,00</td> <td>79,73</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>170.062.407.944,00</td> <td>127.046.936.090,00</td> <td>74,71</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>219.977.614.670,00</td> <td>202.072.297.511,67</td> <td>91,86</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>148.875.544.589,00</td> <td>139.713.064.438,00</td> <td>93,84</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, persentase realisasi Belanja Modal cenderung meningkat dan pada tahun 2023 nilai nominal anggaran dan realisasinya lebih rendah dari tahun sebelumnya.</p> <p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian serta percepatan realisasi atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>	TA	Anggaran	Rcalisasi	%	1	2	3	4	2019	301.666.389.574,00	210.375.471.214,00	69,74	2020	156.252.380.478,00	124.575.198.868,00	79,73	2021	170.062.407.944,00	127.046.936.090,00	74,71	2022	219.977.614.670,00	202.072.297.511,67	91,86	2023	148.875.544.589,00	139.713.064.438,00	93,84	<p>Jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p>	
TA	Anggaran	Rcalisasi	%																												
1	2	3	4																												
2019	301.666.389.574,00	210.375.471.214,00	69,74																												
2020	156.252.380.478,00	124.575.198.868,00	79,73																												
2021	170.062.407.944,00	127.046.936.090,00	74,71																												
2022	219.977.614.670,00	202.072.297.511,67	91,86																												
2023	148.875.544.589,00	139.713.064.438,00	93,84																												

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>c) Belanja Tak Terduga Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp150.000.000,00 atau 15,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Alokasi anggaran tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.061.054.001,00 mengalami penurunan sebesar Rp(2.061.054.001,00) atau (67,33%).</p> <p>2) Belanja Transfer Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp92.627.871.216,00 atau 99,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp92.778.971.754,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp86.917.238.179,00 terjadi peningkatan sebesar Rp5.861.733.575,00 atau 6,74%, yang terdiri dari :</p> <p>a) Transfer Bagi Hasil realisasi sebesar Rp1.429.609.216,00 atau 90,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.580.709.754,00 terdiri dari :</p> <p>(1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah realisasi sebesar Rp1.188.858.383,00 atau 90,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.306.754.754,00 berupa Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.</p> <p>(2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp240.750.833,00 atau 87,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp273.955.000,00 berupa Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.</p> <p>b) Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp91.198.262.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp91.198.262.000,00 yang antara lain merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang diperuntukkan untuk 39 Nagari di Kabupaten Solok Selatan.</p> <p>Belanja Transfer pada poin 2)a) dan 2)b) merupakan Dana yang disalurkan untuk Desa/Nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 97</p>	<p>Terimakasih atas sarannya, Kedepannya Pemcrintah Daerah Kabupaten Solok Selatan akan lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas pnyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam butir I.C.2.s.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih mendorong Desa/Nagari yang ada di wilayahnya agar optimal dalam memanfaatkan dan merealisasikan Belanja Transfer dimaksud dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari tersebut.</p> <p>3) Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :</p> <p>(1) Dinas Kesehatan, antara lain pada sub kegiatan :</p> <p>(a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya terealisasi sebesar Rp284.345.858,00 atau 31,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp890.920.000,00.</p> <p>(b) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp6.458.196.640,00 atau 81,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.892.454.999,00.</p> <p>(c) Pengadaan Obat, Vaksin terealisasi sebesar Rp3.091.246.495,00 atau 69,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.468.382.574,00.</p> <p>(d) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp276.894.949,00 atau 52,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp525.078.000,00.</p> <p>(e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita terealisasi sebesar Rp60.514.852,00 atau 32,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp184.225.900,00.</p> <p>(f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif terealisasi sebesar Rp52.030.000,00 atau 30,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp168.384.700,00.</p> <p>(g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis terealisasi sebesar Rp78.122.500,00 atau 12,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp634.199.600,00.</p> <p>(h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) terealisasi sebesar Rp93.212.900,00 atau 34,27% dari yang dianggarkan</p>	<p>Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan lebih mendorong Desa/Nagari agar optimal dalam memanfaatkan dan merealisasikan Belanja Transfer dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari.</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>sebesar Rp272.026.500,00.</p> <p>(i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terealisasi sebesar Rp949.630.075,00 atau 30,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.085.488.453,00.</p> <p>(j) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular terealisasi sebesar Rp639.438.880,00 atau 61,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.033.511.200,00.</p> <p>(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain pada sub kegiatan :</p> <p>(a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp82.306.450,00 atau 5,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.502.712.230,00.</p> <p>(b) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp6.465.764.798,00 atau 67,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.541.646.880,00.</p> <p>4) Terdapat realisasi belanja sub kegiatan pada SKPD yang melebihi anggaran antara lain pada Dinas Pendidikan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD terealisasi sebesar Rp2.518.292.000,00 atau 110,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.285.165.000,00.</p> <p>Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan. 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman teknis dan instansi terkait khususnya dana transfer DAK. 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang 		

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>telah diisyaratkan sebelumnya.</p> <p>5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu seaimana yang telah diatur dalam juknisnya.</p> <p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (UJ.P) dalam pengadaan barang/jasa. 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak tercalisasi dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, revidi serta penetapan RKA/DPA serta memastikan keterpaduan dan keselarasan antara sub kegiatan dan uraian belanja dengan capaian dan tolak ukur yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud. 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan 	<p>Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>anggaran.</p> <p>7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.</p> <p>8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.</p> <p>9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.</p> <p>10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.</p> <p>11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.</p> <p>12) Melakukan penyempurnaan regulasi terkait sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam rangka simplifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan belanja sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p><i>Terhadap realisasi belanja sub kegiatan yang melebihi anggaran pada tahun 2023 agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :</i></p> <p>1) <i>Melakukan sinkronisasi antara RKAS Dana BOS yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan aplikasi keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan sehingga tidak terjadi lagi realisasi belanja yang melebihi anggarannya.</i></p> <p>2) <i>Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai</i></p>	<p>Terimakasih sarannya kedepannya pemerintah kabupaten solok selatan akan lebih memperhatikan agar tidak terjadi kelebihan belanja dimasa mendatang dan melakukan langkah-langkah yang telah disarankan supaya tidak terjadi kelebihan belanja.</p> <p>Terimakasih atas sarannya. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan lebih</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET																												
	<p><i>pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD." Kedepannya ini agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sehingga hal ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.</i></p> <p>c. PEMBIAYAAN</p> <p>Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp53.999.775.184,78 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp933.186.620.627,00 adalah 5,79%.</p> <p>Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 s.d 2023 sebagaimana dalam tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="358 760 1555 1192"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 760 475 938">TA</th> <th data-bbox="475 760 892 938">Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah</th> <th data-bbox="892 760 1290 938">SILPA</th> <th data-bbox="1290 760 1555 938">Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah</th> </tr> <tr> <th data-bbox="358 938 475 971">1</th> <th data-bbox="475 938 892 971">2</th> <th data-bbox="892 938 1290 971">3</th> <th data-bbox="1290 938 1555 971">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 971 475 1013">2019</td> <td data-bbox="475 971 892 1013">Rp. 998.194.358.064,00</td> <td data-bbox="892 971 1290 1013">Rp. 66.825.361.913,08</td> <td data-bbox="1290 971 1555 1013">6,69%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1013 475 1055">2020</td> <td data-bbox="475 1013 892 1055">Rp. 930.210.853.201,00</td> <td data-bbox="892 1013 1290 1055">Rp. 69.573.319.582,89</td> <td data-bbox="1290 1013 1555 1055">7,47%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1055 475 1097">2021</td> <td data-bbox="475 1055 892 1097">Rp. 919.633.509.773,00</td> <td data-bbox="892 1055 1290 1097">Rp. 109.103.438.557,94</td> <td data-bbox="1290 1055 1555 1097">11,86%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1097 475 1140">2022</td> <td data-bbox="475 1097 892 1140">Rp. 962.869.500.804,00</td> <td data-bbox="892 1097 1290 1140">Rp. 92.755.109.943,27</td> <td data-bbox="1290 1097 1555 1140">9,63%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1140 475 1192">2023</td> <td data-bbox="475 1140 892 1192">Rp. 933.186.620.627,00</td> <td data-bbox="892 1140 1290 1192">Rp. 53.999.775.184,78</td> <td data-bbox="1290 1140 1555 1192">5,79%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2019 s.d 2023 cenderung berfluktuasi. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan :</p>	TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	1	2	3	4	2019	Rp. 998.194.358.064,00	Rp. 66.825.361.913,08	6,69%	2020	Rp. 930.210.853.201,00	Rp. 69.573.319.582,89	7,47%	2021	Rp. 919.633.509.773,00	Rp. 109.103.438.557,94	11,86%	2022	Rp. 962.869.500.804,00	Rp. 92.755.109.943,27	9,63%	2023	Rp. 933.186.620.627,00	Rp. 53.999.775.184,78	5,79%	<p>cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat terus memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.</p>	
TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah																												
1	2	3	4																												
2019	Rp. 998.194.358.064,00	Rp. 66.825.361.913,08	6,69%																												
2020	Rp. 930.210.853.201,00	Rp. 69.573.319.582,89	7,47%																												
2021	Rp. 919.633.509.773,00	Rp. 109.103.438.557,94	11,86%																												
2022	Rp. 962.869.500.804,00	Rp. 92.755.109.943,27	9,63%																												
2023	Rp. 933.186.620.627,00	Rp. 53.999.775.184,78	5,79%																												

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>1) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan kelenyuan perundang-undangan.</p> <p>Harus tetap cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.</p>		
2.	NERACA		
	<p>1. NERACA</p> <p>Saldo aset per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp1.993.532.329.596,54 terjadi penurunan sebesar Rp(54.496.883.210,85) atau (2,66%) dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp2.048.029.212.807,39.</p> <p>Aset Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2023 tersebut, antara lain:</p> <p>a. Aset Lancar</p> <p>Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp101.004.176.210,21 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(36.516.933.911,46) atau (26,55%) dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp137.521.110.127,67. Aset tersebut antara lain terdiri atas :</p> <p>1) Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.037.472.513,78 yaitu :</p> <p>(a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp37.746.132.263,89.</p> <p>(b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp722.384,00.</p> <p>(c) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp17.499.253,00.</p> <p>(d) Kas di BLUD sebesar Rp11.133.995.004,62.</p> <p>(e) Kas Dana Kapitasi FKTP sebesar Rp1.765.637.607,27.</p> <p>(f) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp161.495.545,00.</p> <p>(g) Kas Dana BOSP sebesar Rp3.211.990.456,00.</p> <p>Memperhatikan data huruf (b) dan (c) di atas masih terjadi keterlambatan penyetoran pajak ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Oleh</p>	Terimakasih,	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>karena itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.</p> <p>2) Saldo Piutang Daerah</p> <p>(i) Saldo Piutang Dacrah :</p> <p>Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 berjumlah Rp60.093.668.067,62 terdiri dari :</p> <p>(a) Piutang Pajak Dacrah Rp 13.223.511.675,00</p> <p>(b) Piutang Retribusi Daerah Rp 2.062.825.350,00</p> <p>(c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 28.342.289.419,62</p> <p>(d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp 16.107.026.723,00</p> <p>(e) Piutang Lainnya Rp 358.014.900,00</p> <p>(ii) Penyisihan Piutang Dacrah :</p> <p>Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(34.732.090.291,93), yang meliputi :</p> <p>a) Penyisihan Piutang Pajak Rp (8.629.250.289,09)</p> <p>b) Penyisihan Piutang Retribusi Rp (1.756.281.888,00)</p>	<p>kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp (24.344.768.040,34)</p> <p>d) Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp (0,00)</p> <p>e) Penyisihan Piutang Lainnya Rp (1.790.074,50)</p> <p>(iii) Piutang Bersih : Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp25.361.577.775,69 yang terdiri dari :</p> <p>a) Piutang Pajak Daerah Rp 4.594.261.385,91</p> <p>b) Piutang Retribusi Daerah Rp 306.543.462,00</p> <p>c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 3.997.521.379,28</p> <p>d) Piutang Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp 16.107.026.723,00</p> <p>e) Piutang Lainnya Rp 356.224.825,50</p> <p>Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka 2) (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :</p> <p>a) Piutang Pajak yang bersumber dari :</p> <p>(1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp12.742.439.897,00.</p> <p>(2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp481.071.778,00.</p> <p>Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan</p>	<p>Terimakasih kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat dircalisasikan, agar dapat memperkecil</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>terhadap piutang yang masuk kategori macet.</p> <p>b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :</p> <p>(1) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo) sebesar Rp82.817.900,00.</p> <p>(2) Piutang Retribusi IMB Dinas PTSP sebesar Rp25.446.250,00.</p> <p>(3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp8.375.000,00.</p> <p>(4) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp1.946.186.200,00.</p> <p>c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah bersumber dari :</p> <p>(1) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Dinas PUPR sebesar Rp18.402.559,62.</p> <p>(2) BLUD RSUD sebesar Rp4.049.399.370,00.</p> <p>(3) Piutang Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp21.500.415.808,00.</p> <p>(4) Piutang Tuntutan Kerugian Daerah sebesar Rp454.333.948,00.</p> <p>(5) Dana Revolving sebesar Rp2.319.737.734,00.</p> <p>d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Dana Bagi Hasil bersumber dari :</p> <p>(1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.895.882.329,00.</p> <p>(2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.798.498.698,00.</p> <p>(3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.354.824.302,00.</p> <p>(4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air sebesar Rp57.821.394,00.</p> <p>e) Piutang Lainnya bersumber dari piutang yang terdapat pada UPT Puskesmas dan RSUD Batang Sangir sebesar Rp358.014.900,00.</p> <p>Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan</p>	<p>resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya untuk meningkatkan capaian pendapatan daerah. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>penganggaran berikutnya untuk meningkatkan capaian pendapatan daerah. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.</p> <p>3) Beban Dibayar Dimuka Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.959.419,00 merupakan beban dibayar dimuka yang terdapat pada Perangkat Daerah yang berasal dari sisa manfaat atas pembayaran pajak kendaraan bermotor.</p> <p>4) Persediaan Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.474.166.507,74 mengalami penurunan sebesar Rp(5.819.489.337,16) atau (21,32%) dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.293.655.844,90. Saldo persediaan tersebut antara lain : (a) Alat Tulis Kantor sebesar Rp503.105.076,00. (b) Bahan Cetak sebesar Rp731.003.106,00. (c) Persediaan Obat sebesar Rp11.968.181.383,84 . (d) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp6.829.596.430,00. Untuk poin huruf c) yang merupakan bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD didasarkan pada temuan BPK-RI yang menyatakan bahwa masih terdapat penatausahaan persediaan pada 3 (tiga) instansi yang belum tertib.</p> <p>b. Investasi Jangka Panjang</p>	<p>Terimakasih kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.780.251.630,24 mengalami kenaikan sebesar Rp905.836.273,00 atau 1,54% dari tahun 2022 sebesar Rp58.874.415.357,24 dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank Nagari sebesar Rp16.225.000.000,00.2) PT. Balairung Citra Jaya sebesar Rp1.500.000.000,00.3) PDAM Solok Selatan Tirta Saribu Sungai sebesar Rp42.055.251.630,24. <p>Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.</p> <p>c. Aset Tetap</p> <p>Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (sebelum akumulasi penyusutan) sebesar Rp3.130.605.024.681,27 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.992.000.662.981,27 terjadi peningkatan sebesar Rp138.604.361.700,00 atau 4,63%, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp366.834.744.609,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp366.709.927.859,00 terjadi peningkatan sebesar Rp124.816.750,00 atau 0,03%.2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp369.488.477.246,99 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 343.963.123.810,99 terjadi peningkatan sebesar Rp25.525.353.436,00 atau 7,42%.3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar	<p>optimal dalam mengelola dan penatausahaan persediaan pada SKPD.</p> <p>Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Rp792.050.970.350,20 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp757.522.080.597,20 terjadi peningkatan sebesar Rp34.528.889.753,00 atau 4,56%.</p> <p>4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.484.235.103.721,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.410.782.448.374,04 terjadi peningkatan sebesar Rp73.452.655.347,00 atau 5,21%.</p> <p>5) Aset Tetap lainnya dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.398.770.995,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.007.519.047,04% terjadi peningkatan sebesar Rp5.391.251.948,00 atau 11,72%.</p> <p>6) Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.596.957.759,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.015.563.293,00 terjadi penurunan sebesar Rp(418.605.534,00) atau (0,62%).</p> <p>Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.</p> <p>Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca, terdapat nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.315.682.288.253,68. Sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.814.922.736.427,59 atau 91,04%.</p> <p>Berdasarkan dengan nilai Aset Tetap di atas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap mengingat aset tetap tersebut</p>	<p>dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah.</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.</p> <p><i>Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.</i></p> <p><i>Setanjutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, peningkatan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.</i></p> <p><i>Hal ini terkait juga dengan temuan dalam LHP BPK-RI yang menyatakan bahwa penataan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum sepenuhnya tertib.</i></p> <p>d. Aset Lainnya</p> <p>Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebelum akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp42.206.722.481,24 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.500.839.727,24 terjadi peningkatan sebesar Rp7.705.882.754,00 atau 22,34% antara lain berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.540.963.875,00 yang berasal dari beberapa perangkat lunak/software dan kajian. 2) Aset Lain-lain sebesar Rp27.427.296.606,24 terdiri dari aset yang sudah tidak digunakan dan dimanfaatkan lagi dalam kegiatan operasional sehari-hari dikarenakan rusak atau diserahkan kepada pihak lain dan dalam proses penghapusan. 3) Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) sebesar Rp13.328.462.000,00 yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF TKO Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. <p>Dalam laporan neraca terdapat total akumulasi amortisasi dan akumulasi penyusutan</p>	<p>Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut.</p> <p>Terimakasih, kedepannya Pemerintah</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>sebesar Rp24.381.557.158,74 sehingga nilai bersih aset lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.825.165.322,50.</p> <p><i>Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.</i></p> <p>e. Kewajiban</p> <p>Kewajiban per 31 Desember 2023 yang merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp18.841.445.391,97 mengalami penurunan sebesar Rp(4.461.020.391,54) atau (19,14%) dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.302.465.783,51. Kewajiban per 31 Desember 2023 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang Terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp31.214.835,00 yang merupakan pendapatan diterima dimuka pada BLUD RSUD merupakan pendapatan atas sewa ATM sebesar Rp22.500.000,00 sementara pada BPKD merupakan pendapatan atas pajak reklame sebesar Rp8.714.835,00. 2) Utang Beban sebesar Rp18.772.533.227,97 antara lain terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> (a) Utang Beban Pegawai sebesar Rp5.015.998.106,00. (b) Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp12.963.977.271,97. (c) Utang Beban Transfer sebesar Rp201.637.850,00. (d) Utang Beban Modal sebesar Rp590.920.000,00. 3) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp37.697.329,00 yang merupakan : <ol style="list-style-type: none"> (a) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) sebesar Rp37.697.329,00. (b) Utang Sisa BOS sebesar Rp579.200,00. (c) Utang Jasa Giro kepada Pemerintahan Nagari sebesar Rp32.985.597,00. (d) Utang Jasa Giro kepada Sekolah Swasta Rp2.866.179,00. 	<p>Kabupaten Solok Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah akan lebih optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, meningkatkan kompetensi SDM, melakukan</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>(e) Utang Jasa Giro kepada Instansi Lain sebesar Rp1.266.353,00.</p> <p>Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan TA 2023, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.</p>	<p>koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.</p> <p>Terimakasih, Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
		<p>pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat</p> <p>Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
		perundang-undangan	
3.	LAPORAN OPERASIONAL (LO)		
	<p>Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp824.749.562.781,03 turun sebesar Rp(70.125.021.650,11) atau (8,50)% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp894.874.584.431,14. Pendapatan-LO TA 2023 tersebut terdiri dari :</p> <p>a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp88.913.195.401,03 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp78.133.896.833 atau 113,80%. PAD-LO Tahun Anggaran 2023 tersebut terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.788.216.584,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.627.963.123,00 atau 101,27%. 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.110.591.022,70 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.404.500.000 atau 87,78%. 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.796.556.717,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.628.000.000,00 atau 106,41%. 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp71.217.831.077,33 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp60.473.433.710,00 atau 117,77%. <p>b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp719.725.595.687,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp753.151.463.851,00 atau 95,56%.</p>	<p>Terima kasih atas sarannya, terkait dengan Pendapatan-LO yang bersumber antara lain dari Pendapatan Pajak-LO dan Pendapatan Retribusi-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang merupakan potensi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan menjadikan Laporan</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.110.771.693,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.875.150.000,00 atau 163,14%.</p> <p>Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
----	----------------	-----------	-----

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET															
II.	<p>B. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p> <p>Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :</p> <p>1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA</p> <p>Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel</p> <p style="text-align: center;">Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara</p> <table border="1" data-bbox="368 1161 1682 1318"> <thead> <tr> <th>Kode</th> <th>Uraian</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.1.01</td> <td>PENDIDIKAN</td> <td>239.721.011.915,00</td> <td>231.238.973.390,00</td> <td>96,46</td> </tr> <tr> <td>0.1.02</td> <td>KESEHATAN</td> <td>177.399.049.638,00</td> <td>157.759.141.074,95</td> <td>88,93</td> </tr> </tbody> </table>	Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	0.1.01	PENDIDIKAN	239.721.011.915,00	231.238.973.390,00	96,46	0.1.02	KESEHATAN	177.399.049.638,00	157.759.141.074,95	88,93	<p>Terimakasih kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.</p>	
Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase														
0.1.01	PENDIDIKAN	239.721.011.915,00	231.238.973.390,00	96,46														
0.1.02	KESEHATAN	177.399.049.638,00	157.759.141.074,95	88,93														

NO	HASIL EVALUASI					TANGGAPAN	KET
0.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	102.216.011.777,00	97.231.159.479,00	95,12			
0.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.229.701.629,00	23.747.890.221,00	94,13			
0.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.418.731.772,00	12.745.645.563,00	95,01			
0.1.06	SOSIAL	4.763.206.028,00	4.408.585.099,00	92,55			
0.2.07	TENAGA KERJA	3.056.814.081,00	2.813.226.038,00	92,03			
0.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.737.499.730,00	1.634.078.358,00	94,05			
0.2.09	PANGAN	495.045.028,00	463.727.100,00	93,67			
0.2.10	PERTANAHAN	1.502.712.230,00	82.306.450,00	5,48			
0.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	2.919.253.116,00	2.678.205.547,00	91,74			
0.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.350.454.840,00	3.924.175.969,00	90,20			
0.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	619.705.300,00	599.408.617,00	96,72			
0.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.095.798.524,00	5.653.146.862,00	92,74			
0.2.15	PERHUBUNGAN	681.001.061,00	607.000.184,00	89,13			
0.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	7.153.294.094,00	6.879.617.379,00	96,17			
0.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.432.762.900,00	2.190.519.473,00	90,04			
0.2.18	PENANAMAN MODAL	3.843.847.177,00	3.469.587.107,52	90,26			
0.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA	6.637.472.104,00	4.101.964.910,00	61,80			
0.2.20	STATISTIK	85.050.000,00	81.457.440,00	95,78			
0.2.21	PERSANDIAN	46.999.760,00	44.431.401,00	94,54			

NO	HASIL EVALUASI				TANGGAPAN	KET
0.2.22	KEBUDAYAAN	3.628.172.591,00	3.517.960.043,81	96,96		
0.2.23	PERPUSTAKAAN	1.189.629.840,00	1.160.313.156,00	92,66		
0.2.24	KEARSIPAN	250.000.000,00	244.039.000,00	97,62		
0.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.579.385.665,00	1.534.780.200,00	97,18		
0.3.26	PARIWISATA	4.216.286.551,00	4.057.855.864,00	96,24		
0.3.27	PERTANIAN	31.517.474.258,00	29.443.346.639,00	93,42		
0.3.30	PERDAGANGAN	1.499.481.500,00	1.468.113.743,00	97,91		
0.3.31	PERINDUSTRIAN	4.203.604.102,00	4.077.311.708,00	97,00		
0.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	52.811.683.144,00	48.812.282.062,00	92,43		
0.4.02	SEKRETARIAT DPRD	26.581.910.853,00	25.369.998.823,00	95,41		
0.5.01	PERENCANAAN	4.585.005.541,00	4.206.455.964,00	91,74		
0.5.02	KEUANGAN	118.012.566.957,00	116.059.698.872,00	98,35		
0.5.03	KEPEGAWAIAN	35.974.472.576,00	34.641.195.032,00	96,29		
0.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	300.955.000,00	279.955.821,00	93,02		
0.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	83.301.200,00	57.029.629,00	68,46		
0.5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	42.991.500,00	31.459.232,00	73,18		
0.6.01	INSPEKTORAT	4.915.920.045,00	4.439.337.561,00	90,31		
0.7.01	KECAMATAN	19.686.538.441,00	19.161.897.082,00	97,34		
0.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.404.798.156,00	14.127.771.570,00	98,08		
	Jumlah	933.186.620.627,00	878.045.052.664,28	94,09		

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Anggaran 2023 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Belanja Daerah sebesar Rp933.186.620.627,00 sejumlah Rp878.045.052.664,28 atau 94,09% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.</p> <p>Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.</p> <p>2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)</p> <p>a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan</p> <p>Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp239.661.011.915,00 atau 25,68% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2023 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp231.238.973.390,00 atau 26,34% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,</p>	<p>Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20%</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan</p>	<p>(dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan</p>	

NO	HASIL EVALUASI				TANGGAPAN	KET
	No	Komponen Perhitungan	Jumlah			
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
	1.	Urusan Bidang Pendidikan				
	A.	Belanja Operasi	214.168.096.235,00	206.341.360.856,00	96,35	
	a.	Belanja Pegawai	182.260.591.604,00	175.092.372.186,00	96,07	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	25.904.539.631,00	25.055.826.981,00	96,72	
	c.	Belanja Hibah	6.002.965.000,00	6.193.161.689,00	103,17	
	d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	
	B.	Belanja Modal	25.492.915.680,00	24.897.612.534,00	97,66	
	a.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	
	b.	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	5.373.779.586,00	5.399.720.234,00	100,48	
	c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.509.372.194,00	16.927.636.630,00	96,68	
	d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	
	e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.609.763.900,00	2.570.255.650,00	98,49	
	2.	ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN (A + B)	239.661.011.915,00	231.238.973.390,00	96,49	
	3.	TOTAL BELANJA DAERAH	933.186.620.627,00	878.045.052.664,28	94,09	
	4.	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) x 100%	25,68	26,34		

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Terimakasih Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap konsisten dan tidak menurunkan jumlah

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp177.399.049.638,00 atau 24,86% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2023, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp157.759.141.074,95 atau 23,78% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2023. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan</p>	<p>alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	

NO	HASIL EVALUASI				TANGGAPAN	KET	
No	Komponen Perhitungan	Jumlah			Persen taac (%)		
		Anggaran (Rp)	Rcalisasi (Rp)				
1.	Urusan Bidang Kesehatan						
A.	Belanja Operasi	164.573.154.541,00	147.633.683.032,95		89,71		
a.	Belanja Pegawai	66.617.039.513,00	62.064.102.957,95		93,17		
b.	Belanja Barang dan Jasa	97.706.115.028,00	85.449.580.730,00		87,46		
c.	Belanja Hibah	250.000.000,00	119.999.345,00		48,00		
B.	Belanja Modal	12.825.895.097,00	10.125.458.042,00		78,95		
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.543.105.033,00	9.208.307.238,00		87,34		
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.630.390.064,00	917.150.804,00		56,25		
c.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-		0,00		
d.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		0,00		
e.	Belanja Modal Aset Lainnya	652.400.000,00	-		0,00		
2.	ANGGARAN KESEHATAN (A + B)	177.399.049.638,00	157.759.141.074,95		88,93		
3.	TOTAL BELANJA DAERAH	933.186.620.627,00	878.045.052.664,28		94,09		
4.	GAJI ASN	219.702.778.523,00	214.534.840.604,00		97,65		
5.	TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (3-4)	713.483.842.104,00	663.510.212.060,28		93,00		
4.	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2 : 5) x 100%	24,86%	23,78%				

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik
Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar

Terimakasih atas sarannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan mengupayakan secara lurus mencerus mengalokasikan dan

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Rp194.864.491.939,00 atau 43,88% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp444.114.243.000,00. Sampai akhir tahun anggaran 2023, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp184.308.850.621,00 atau 40,31% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp457.256.073.235,00.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sudah menganggarkan dan sudah merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD <i>diluar</i> belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.</p> <p>Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan <i>agar mengupayakan secara terus menerus</i> dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Tabel</p> <p style="text-align: center;">Realisasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada</p>	<p>merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut.</p>	

NO	HASIL EVALUASI				TANGGAPAN	KET
	Daerah/Desa					
	No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
	1.	PENERJMAAN				
		a. DAU	452.753.785.000	452.753.785.000	100,00	
		b. DBH	40.706.485.000	53.848.315.235	132,28	
		Jumlah Penerimaan	493.460.270.000	506.602.100.235	102,66	
	2.	PENGURANG				
		a. DAU TAMBAHAN	-	-	-	
		b. DBH yang bersifat earmarked	-	-	-	
		c. ADD	49.346.027.000	49.346.027.000	100,00	
		Jumlah Pengurang	49.346.027.000	49.346.027.000	100,00	
	3.	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	444.114.243.000	457.256.073.235		

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	HASIL EVALUASI					TANGGAPAN	KET
	No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)		
1.	BELANJA MODAL	148.884.941.719	139.713.064.438	93,84			
a.	Tanah	1.142.997.230	19.108.000	1,67			
b.	Peralatan dan Mesin	28.301.788.004	26.339.182.991	93,07			
c.	Gedung dan Bangunan	37.859.519.525	33.431.528.257	88,30			
d.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	78.118.473.060	77.154.111.140	98,77			
e.	Aset Tetap Lainnya	2.809.763.900	2.769.134.050	98,55			
f.	Aset Lainnya	652.400.000	-	-			
	BELANJA PEMELIHARAAN	927.169.910	861.820.049	93,28			
	BELANJA Hibah	16.873.213.944	16.111.571.345	95,49			
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-	-			
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK INFRASTRUKTUR	28.179.166.366	27.619.394.789	98,01			
2.	JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH	194.864.191.939	184.308.850.621	94,58			
3.	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	43,88	40,31				
<p>3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM); Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir</p>							

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:</p> <p>a. SPM Bidang Pendidikan</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp13.880.395.617,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.317.211.805,00 atau 95,94% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kota/kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama. 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.</p> <p>b. SPM Bidang Kesehatan</p>	<p>Terimakasih, terkait belum optimalnya capaian belanja</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp3.100.623.183,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.727.439.052,00 atau 55,71% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kota/kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan. 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan. 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan. 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan. 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan. 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan. 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan. 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan. 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan. 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan. 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan. 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan. <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar</p>	<p>untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan disebabkan tidak berjalannya sebagian kegiatan oleh OPD terkait, kedepannya akan dilakukan langkah-langkah supaya dapat terealisasi 100%</p> <p>Terimakasih, terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.</p> <p><i>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan ini dimana hanya terealisasi sebesar 55,71% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memberikan penjelasan.</i></p> <p>c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2023 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp482.608.900,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp461.240.600,00 atau 95,57% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2023 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp200.322.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp128.065.900,00</p>	<p>disebabkan tidak berjalannya sebagian kegiatan oleh OPD terkait, kedepannya akan dilakukan langkah-langkah supaya dapat terealisasi 100%</p> <p>Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar tetap berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan umum.</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>atau 63,93% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kota/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.</p> <p><i>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman ini, dimana hanya terealisasi sebesar 63,93% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memberikan penjelasan.</i></p> <p>e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2023 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp3.168.966.391,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.993.263.875,11 atau 94,46% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari pencegahan hukum perda dan perkara. 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. 	<p>Terimakasih, terkait belum optimalnya capaian belanja</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.</p> <p>4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.</p> <p>5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.</p> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Kertertiban Umum di Provinsi/Kota/kota dan Kota/Kota.</p> <p>f. SPM Bidang Sosial</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2023 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp241.452.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp205.183.485,00 atau 84,98% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kota/kota yang terdiri dari:</p> <p>1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.</p> <p>2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.</p> <p>3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.</p> <p>4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.</p> <p>5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.</p>	<p>untuk pemenuhan SPM bidang sosial disebabkan tidak berjalannya sebagian kegiatan oleh OPD terkait, kedepannya akan dilakukan langkah-langkah supaya dapat terealisasi 100%</p> <p>Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kota/Kota dan di Daerah Kota/Kota.</p> <p><i>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang sosial ini dimana hanya terealisasi sebesar 84,98% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memberikan penjelasan.</i></p> <p>4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI</p> <p>Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp392.799.470.116,58 atau 95,10% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp143.865.364.140,,95 atau 34,83% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.</p> <p>Hal ini belum memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.</p>	<p>Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).</p> <p>Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p><i>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).</i></p> <p>5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH; Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 sejumlah Rp928.554.312.579,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp873.651.422.711,56 atau 94,09% dari yang ditargetkan.</p> <p><i>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.</i></p>	<p>akan terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.</p> <p>Terimakasih atas sarannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan berupaya mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING</p> <p>Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp4.880.521.431,00 atau 2,75% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp177.399.049.638,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan dircalisasikan sebesar Rp2.540.173.885,00 atau 52,05% dari total alokasi dana yang dianggarkan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGLIAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.</p>	<p>hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri.</p> <p>Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Terimakasih, Bupati Solok Selatan akan terus</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp21.783.471.508,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp15.559.753.374,00 atau dengan tingkat capaian 71,43%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>8. REKAPITULASI REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI <i>E-PURCHASING</i> TAHUN ANGGARAN 2023.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui <i>E-purchasing</i> sebesar Rp107.252.593.450,00 atau 37,06% dari total nilai PBJ Tahun 2023 sebesar Rp289.429.187.934,00. Untuk itu agar diminta kepada Bupati Solok Selatan untuk terus meningkatkan komitmen melaksanakan PBJ secara elektronik melalui <i>E-purchasing</i> dalam rangka penguatan sistem PBJ melalui transformasi digital pengadaan.</p> <p>Selain itu Bupati Solok Selatan agar mempedomani dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui <i>E-purchasing</i>. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain :</p> <p>a. Memperbanyak jumlah etalase dalam Katalog Elektronik sektoral dan Katalog Elektronik lokal dengan menayangkan seluruh kebutuhan</p>	<p>meningkatkan komitmen melaksanakan PBJ secara elektronik melalui <i>E-purchasing</i> dalam rangka penguatan sistem PBJ melalui transformasi digital pengadaan</p> <p>Terimakasih, Bupati Solok Selatan akan mempedomani dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui <i>E-purchasing</i> dengan mengikuti langkah-langkah yang disarankan</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>barang/jasa di satuan kerja/perangkat daerah.</p> <p>b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mendorong pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.</p> <p>c. Menginstruksikan kepada KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan <i>E-purchasing</i>; dan 2) dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain <i>E-purchasing</i>. <p>d. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi <i>E-purchasing</i> paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.</p> <p>e. Menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi <i>E-purchasing</i> dan melaporkan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.</p> <p>9. REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TAHUN ANGGARAN 2023.</p> <p>Sesuai laporan yang disajikan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum merealisasikan belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan KKPD atau nihil. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas</p>	<p>Terimakasih, kedepannya Bupati Solok Selatan akan melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan pemanfaatan KKPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan hal ini akan dilakukan percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah terkait pemanfaatan KKPD, segera melakukan perikatan (kerjasama) dengan Bank terkait dan segera mengimplementasikan</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Solok Selatan maka diminta kepada Bupati Solok Selatan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan pemanfaatan KKPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan hal ini agar dilakukan percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah terkait pemanfaatan KKPD, segera melakukan perikatan (kerjasama) dengan Bank terkait dan segera mengimplementasikan KKPD dalam transaksi Belanja Daerah di Kabupaten Solok Selatan.</p> <p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK</p> <p>Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :</p> <p>Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :</p> <p>A. Belanja :</p>	<p>KKPD dalam transaksi Belanja Daerah di Kabupaten Solok Selatan</p> <p>Terimakasih, Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Gaji, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai, Tambahan Penghasilan (Tamsil) dan tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Tidak sesuai Ketentuan. 2. Kelebihan Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Jasa Pengelolaan BMD. 3. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Jasa Honorarium Narasumber dan Tim Pelaksanaan Kegiatan. 4. Pembayaran Biaya Langsung Personel dengan Waktu Penugasan Tumpang Tindih dan Tidak Sesuai Kehadiran pada Empat SKPD. 5. Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis Kantor di Tiga SKPD Tidak Tertib. 6. Realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dua SKPD Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Riil. 7. Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Sapi Ternak Program Unggulan Satu Keluarga Satu Sapi Tidak Cermat. 8. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Dua SKPD Tidak Sesuai Ketentuan. 9. Pelaksanaan e-Purchasing Melalui Aplikasi e-Katalog Belum Tertib dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Ongkos Kirim. 10. Pengelolaan Belanja Hibah pada Tiga SKPD Tidak Tertib. 11. Empat Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin pada Tiga SKPD Belum Dikenakan Denda Keterlambatan. 12. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Putus Kontrak dan Jaminan Uang Muka Belum Dicairkan. 13. Kekurangan Volume dan/atau Ketidaksesuaian Spesifikasi atas Enam Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dua SKPD. 14. Kekurangan Volume dan/atau Mutu atas 17 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas PUTRP. 15. Kekurangan Volume dan/atau Mutu Empat Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas 	<p>Terimakasih, Berknaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan menerapkan langkah-langkah yang disarankan.</p>	

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	<p>Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan.</p> <p>16. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Sepuluh SKPD.</p> <p>B. Asct :</p> <p>17. Penatausahaan Persediaan pada Tiga SKPD Belum Tertib.</p> <p>18. Pengelolaan Asct Tetap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Belum Sepenuhnya Tertib.</p> <p>C. Kewajiban</p> <p>19. Pekerjaan Pengawasan Jalang Baring - Kuok (DAK Non Tematik) Belum Dibayarkan.</p> <p>Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>III. LAIN-LAIN</p> <p>Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. 2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD. 3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan 		

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.		



Padang Aro, Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN

KH. IRUNAS



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

- Meningkatkan :
Menimbang :
Mengingat :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan

BUPATI SOLOK SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. Pendapatan sebesar Rp840.018.798.191,79 (*delapan ratus empat puluh miliar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah*) belanja dan transfer sebesar Rp878.045.052.664,28 (*delapan ratus tujuh puluh delapan miliar empat puluh lima juta lima puluh dua ribu enam ratus puluh empat koma dua puluh delapan rupiah*)
 2. Defisit sebesar Rp38.026.254.472,49 (*tiga puluh delapan miliar dua puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah*)
 3. pembiayaan
 - a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp92.755.029.657,27 (*sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah*)
 - b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp729.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah*)
- Surplus sebesar Rp92.026.029.657,27 (*sembilan puluh dua miliar dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah*)
- Sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp53.999.775.184,78 (*lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah*)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.141.712.492,21 (*satu miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh dua koma dua puluh satu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp841.160.510.684,00 (*delapan ratus empat puluh satu miliar seratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*)
 - b. Realisasi sebesar Rp840.018.798.191,79 (*delapan ratus empat puluh miliar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah*) selisih lebih sebesar Rp1.141.712.492,21 (*satu miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh dua koma dua puluh satu rupiah*)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(54.990.467.424,72) (*lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat koma tujuh puluh dua rupiah*) dengan

rincian sebagai berikut:

- a. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp840.407.648.873,00 (delapan ratus empat puluh miliar empat ratus tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- b. Realisasi sebesar Rp785.417.181.448,28 (tujuh ratus delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan koma dua puluh delapan rupiah)
selisih lebih sebesar Rp54.990.467.424,72 (lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat koma tujuh puluh dua rupiah)
- c selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp(130.052.364.415,49) (seratus tiga puluh miliar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima belas koma empat puluh sembilan rupiah) rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp92.026.109.943,00 (sembilan puluh dua miliar dua puluh enam juta seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)
 - b. Realisasi sebesar Rp38.026.254.472,49 (tiga puluh delapan miliar dua puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah)
selisih kurang sebesar Rp130.052.364.415,49 (seratus tiga puluh miliar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima belas koma empat puluh sembilan rupiah)
- d selisih anggaran dengan penerimaan pembiayaan sejumlah Rp Rp80.285,73 (delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp92.755.109.943,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)
 - b. Realisasi sebesar Rp92.755.029.657,27 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah)
selisih kurang sebesar Rp80.285,73 (delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah)
- e selisih anggaran dengan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol koma nol nol) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp729.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah)
 - b. Realisasi sebesar Rp729.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah)
selisih lebih (kurang) sebesar Rp0,00 (nol koma nol nol)
- f selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(80.285,73) (minus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar

- Rp(92.026.109.943,00) (minus sembilan puluh dua miliar dua puluh enam juta seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)
- b. Realisasi Rp(92.026.029.657,27) (minus sembilan puluh dua miliar dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah) selisih kurang sebesar (Rp80.285.73) (minus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2023 terdiri atas:

- a. *puluh dua miliar dua puluh enam juta seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*)
penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp92.755.029.657,27 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah)
sub total sebesar Rp80.286 (delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)
- b. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp53.999.775.184,78 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat koma tujuh puluh delapan rupiah)
- c. sub total sebesar Rp53.999.855.470,78 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh koma tujuh puluh delapan rupiah)
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol koma nol nol)
- e. lain-lain sebesar Rp80.286 (delapan puluh ribu dua ratus saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp53.999.775.184,78 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah)

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp824.749.562.781,03 (delapan ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma tiga rupiah)
- b. beban sebesar Rp873.461.391.766,34 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam koma tiga puluh empat rupiah)
- defisit sebesar Rp48.711.828.985,31 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh satu rupiah)

- c. surplus kegiatan non operasional Rp176.836.273,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp(48.534.992.712,31) (empat puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua belas koma tiga puluh satu rupiah)
- d. defisit dari pos luar biasa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
defisit laporan operasional Rp48.684.992.712,31 (empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua belas koma tiga puluh satu rupiah)

Pasal 6

- Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 terdiri atas:
- a. jumlah asset sebesar Rp1.993.332.329.596,54 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma lima puluh empat rupiah)
 - b. jumlah kewajiban sebesar Rp18.841.445.391,97 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah)
 - c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.974.690.884.204,57 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat koma lima puluh tujuh rupiah)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri atas:

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp92.792.228.072,27 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah)
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp101.665.759.965,51 (seratus satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma lima puluh satu rupiah)
- c. arus kas bersih aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp(140.421.014.438,00) (minus seratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)
- d. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol koma nol nol)
- e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp579.200,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
- f. saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.037.472.513,78 (lima puluh empat miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga belas koma tujuh puluh delapan rupiah)

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri atas:

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.024.726.747.023,88 (*dua triliun dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh tiga koma delapan puluh delapan rupiah*);
- b. surplus laporan operasional sebesar Rp(48.684.992.712,31) (*minus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua belas koma tiga puluh satu rupiah*);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(1.350.870.107,00) (*minus satu miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh rupiah*);
- d. koreksi nilai persediaan sebesar Rp0,00 (*nol koma nol nol*);
- e. selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp0,00 (*nol koma nol nol*);
- f. koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp0,00(*nol koma nol nol*);
- g. ekuitas akhir sebesar Rp1.974.690.884.204,57 (*satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat koma lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
 4. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keseluruhan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. lampiran II laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III laporan operasional;
- d. lampiran IV laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V neraca;
- f. lampiran VI laporan arus kas;
- g. lampiran VII catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

- j. lampiran X tertagih;
- k. lampiran XI daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- l. lampiran XII daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- m. lampiran XIII daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- n. lampiran XIV daftar rekapitulasi aset tetap; daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.


Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan peraturan bupati.


Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,


KHARUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


SYAMSURIZALDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 4

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT: 4/48/2024

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023.

Secara Umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

KODE REK	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023		REALISASI 2023		REALISASI 2022	
	PENDAPATAN LRA		64.366.510.894,00	64.013.760.193,73	64.453.109.093,18	96,98	98,45	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA		78.133.898.833,00	88.875.590.931,79		113,75	92.121.048.046,10	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.A.1	12.527.963.123,00	11.176.289.565,00		89,50	11.006.714.870,10	
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.A.2	2.404.500.000,00	2.000.096.422,70		83,18	2.354.215.128,00	
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.A.3	2.838.000.000,00	2.796.556.717,00		100,41	2.415.782.950,00	
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.2.1.A.4	80.473.433.710,00	72.902.648.227,09		120,55	75.344.355.098,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA		753.151.483.851,00	741.131.287.237,00		98,40	734.708.642.887,00	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.B.1	649.852.549.241,00	653.258.740.634,00		100,55	676.013.344.009,00	
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.B.1.a	24.749.777.000,00	26.898.998.917,00		107,88	51.482.886.778,00	
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.B.1.b	15.956.708.000,00	27.148.916.318,00		170,14	18.897.850.392,00	
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.B.1.c	452.753.785.000,00	452.753.785.000,00		100,00	426.897.960.582,00	
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.B.1.d	156.192.279.241,00	146.651.540.393,00		93,89	188.734.846.280,00	
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.B.2	41.852.235.000,00	41.852.235.000,00		100,00	37.621.151.000,00	
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.B.2.a	41.852.235.000,00	41.852.235.000,00		100,00	37.621.151.000,00	
4.2.2.4	Dana WISM - LRA	5.1.1.B.2.b	0,00	0,00			0,00	

ODE REK	URAIAN	REF	ANGGARAN 2007	REALISASI 2007	1997	REALISASI 2007
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.B.3	54.646.679.610,00	39.025.311.603,00	71,41	59.572.147.878,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.B.3	54.646.679.610,00	39.025.311.603,00	71,41	59.572.147.878,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	11.500.000.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.B.4	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	11.500.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.C	9.875.150.000,00	10.011.920.023,00	101,38	7.828.208.106,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.C.1				
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	5.1.1.C.2	9.875.150.000,00	10.011.920.023,00	101,38	7.828.208.106,00
5	BELANJA		400.027.248.250,00	485.417.034.462,00	121,40	517.920.024.901,00
5.1	BELANJA OPERASI		690.532.104.284,00	645.594.117.010,28	93,49	608.487.257.791,10
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.A.1	393.671.094.050,00	375.400.727.878,95	95,36	375.198.145.727,83
5.1.2	Belanja Barang	5.1.2.A.2	276.187.786.290,00	249.419.979.153,33	90,31	224.250.330.259,27
5.1.5	Belanja Habis Pakai	5.1.2.A.3	20.673.213.944,00	20.733.409.978,00	100,29	9.038.751.804,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.A.4	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL		148.875.544.589,00	139.713.064.458,00	93,85	202.072.297.511,67
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.B.1	1.142.997.290,00	19.109.000,00	1,67	11.111.952.077,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.B.2	29.309.890.874,00	26.339.182.991,00	93,04	31.337.433.903,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.B.3	97.859.519.525,00	93.431.528.257,00	95,30	69.285.571.660,08
5.2.4	Belanja Modal Jatan, Irigasi dan Jeringan	5.1.2.B.4	78.100.879.080,00	77.154.111.140,00	98,79	59.128.226.659,59
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.B.5	3.462.163.900,00	2.762.134.050,00	79,98	1.235.948.475,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA		1.000.000.000,00	150.000.000,00	15,00	3.051.054.001,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.C	1.000.000.000,00	150.000.000,00	15,00	3.051.054.001,00
6	TRANSFER		279.885.000,00	240.750.833,00	87,88	171.747.312,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	1.580.709.754,00	1.429.609.216,00	90,44	1.095.023.679,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.a	1.306.754.754,00	1.188.858.383,00	90,99	823.276.367,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.b	273.955.000,00	240.750.833,00	87,88	171.747.312,00

ODE REK	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	91.198.262.000,00	91.198.262.000,00	100,00	85.822.214.500,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.a	91.198.262.000,00	91.198.262.000,00	100,00	85.822.214.500,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.b	0,00	0,00		0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.4	(92.026.109.943,00)	(38.026.254.472,49)	41,32	(15.881.948.443,67)
7	PEMBAYARAN					
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5	92.755.109.943,00	92.755.029.857,27	100,00	109.137.058.388,94
7.1.1	Penggunaan SILPA		92.755.109.943,00	92.755.029.857,27	100,00	109.137.058.388,94
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.6	729.000.000,00	729.000.000,00	100,00	500.000.000,00
7.2.2	Partisipasi Modal/Investasi Pemerintah Daerah		729.000.000,00	729.000.000,00	100,00	500.000.000,00
	PEMBILAYAN NETTO	5.1.7	92.026.109.943,00	82.026.029.657,27	100,00	108.637.058.388,94
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			9,00	59.999.775.184,73		92.755.109.943,27

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Padang, Aro, 29 Juli 2024

BUKATI SOLOK SELATAN
KHARRUNAS

Lampiran I.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	841.160.510.684,00	840.018.798.191,78	(1.141.712.492,21)	99,86
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	43.062.500.000,00	51.182.031.198,00	7.320.131.198,00	116,09
4.1.02	KESEHATAN	43.462.500.000,00	50.984.740.198,00	7.522.249.198,00	117,31
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	43.462.500.000,00	50.984.740.198,00	7.522.249.198,00	117,31
4.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKHMAN	400.000.000,00	197.082.000,00	(202.118.000,00)	49,47
4.1.04.1-04.2-11.2-15.01	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	400.000.000,00	197.082.000,00	(202.118.000,00)	49,47
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	360.000.000,00	349.512.088,70	(487.910,30)	99,86
4.2.10	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	250.000.000,00	321.945.312,00	71.945.312,00	128,78
4.2.10.2-10.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000,00	321.945.312,00	71.945.312,00	128,78
4.2.18	PENANAMAN MODAL	100.000.000,00	27.566.777,70	(72.433.222,30)	27,57
4.2.10.2-10.3-29.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,00	27.566.777,70	(72.433.222,30)	27,57
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	761.000.000,00	506.802.481,00	(174.187.600,00)	77,11
4.3.26	PARIWISATA	300.000.000,00	219.352.000,00	(80.648.000,00)	73,12
4.3.26.3-26.2-22.2-19.01	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	300.000.000,00	219.352.000,00	(80.648.000,00)	73,12
4.3.31	PERINDUSTRIAN	461.000.000,00	367.480.400,00	(93.519.600,00)	79,71
4.3.31.3-31.2-17.3-30.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	461.000.000,00	367.480.400,00	(93.519.600,00)	79,71
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	796.187.010.684,00	787.899.822.504,09	(8.287.188.179,91)	99,96
4.5.02	KEUANGAN	796.187.010.684,00	787.899.822.504,09	(8.287.188.179,91)	99,96
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Bantuan Pengeluaran Keuangan Daerah	796.187.010.684,00	787.899.822.504,09	(8.287.188.179,91)	99,96
5	BELANJA DAERAH	933.186.620.627,00	878.045.052.664,28	(55.141.567.962,72)	94,09
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	568.467.404.466,00	504.098.285.624,95	(37.360.118.841,05)	93,43
5.1.01	PENDIDIKAN	239.721.011.915,00	231.238.973.390,00	(8.482.038.525,00)	96,46
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01	Dinas Pendidikan	239.721.011.915,00	231.238.973.390,00	(8.482.038.525,00)	96,46
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	214.168.090.235,00	206.341.360.056,00	(7.826.730.379,00)	96,35
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	122.260.591.604,00	175.092.372.186,00	(7.168.219.410,00)	98,07
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.904.538.631,00	25.055.826.961,00	(848.712.650,00)	98,72
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	6.002.965.600,00	6.193.161.080,00	190.196.680,00	103,17



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	25.552.915.600,00	24.897.612.534,00	(655.303.146,00)	97,44
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.433.779.586,00	5.399.720.234,00	(34.059.352,00)	99,37
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.509.372.184,00	16.927.636.650,00	(581.735.544,00)	96,68
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.609.763.900,00	2.570.255.650,00	(39.508.250,00)	98,49
5.1.02	KESEHATAN				
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	177.399.049.838,00	157.759.141.074,95	(19.639.908.763,05)	88,93
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	177.399.049.838,00	157.759.141.074,95	(19.639.908.763,05)	88,93
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	66.617.039.513,00	62.064.102.957,95	(4.552.936.555,05)	93,17
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.773.831.028,00	85.449.580.730,00	(12.324.250.298,00)	87,40
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	119.999.345,00	(130.000.655,00)	48,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	12.758.179.097,00	10.125.458.042,00	(2.632.721.055,00)	79,36
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.475.389.033,00	9.208.307.238,00	(1.267.081.795,00)	87,90
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.630.330.084,00	917.150.804,00	(713.239.280,00)	56,25
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	652.400.000,00	0,00	(652.400.000,00)	0
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	109.718.724.007,00	97.313.465.929,00	(12.405.258.078,00)	88,82
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	109.718.724.007,00	97.313.465.929,00	(12.405.258.078,00)	88,82
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.018.223.663,00	9.682.369.043,00	(1.335.854.620,00)	87,89
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.863.045.168,00	6.616.639.137,00	(246.407.031,00)	96,41
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2	BELANJA MODAL	92.700.510.344,00	87.631.096.886,00	(5.069.403.458,00)	94,53
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	1.142.997.240,00	19.108.000,00	(1.123.889.240,00)	1,67
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.189.864.156,00	7.633.634.060,00	(556.230.096,00)	93,21
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.438.543.880,00	8.408.695.208,00	(1.029.848.672,00)	89,00
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.929.095.078,00	73.569.659.586,00	(359.435.492,00)	99,51
5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	28.829.955.806,00	27.033.095.952,00	(1.796.859.854,00)	93,77
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.1	BELANJA OPERASI	28.829.955.806,00	27.033.095.952,00	(1.796.859.854,00)	93,77
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.1.01	Belanja Pegawai	7.931.151.902,00	7.294.882.404,00	(636.269.498,00)	91,98
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.935.128.446,00	11.320.189.085,00	(614.940.361,00)	94,85
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.2	BELANJA MODAL	8.963.675.458,00	8.418.025.373,00	(545.650.085,00)	93,91
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344.950.000,00	339.225.804,00	(5.624.196,00)	98,37
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.546.703.374,00	4.545.529.187,00	(1.174.187,00)	99,97
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.072.122.084,00	3.533.271.552,00	(538.850.532,00)	86,77
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.415.751.772,00	12.745.645.563,00	(670.106.209,00)	95,01
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	13.415.751.772,00	12.745.645.563,00	(670.106.209,00)	95,01
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.873.101.377,00	7.710.046.097,00	(163.055.280,00)	97,89
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.876.488.106,00	5.600.247.389,00	(276.240.717,00)	95,30
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.196.613.271,00	2.117.800.706,00	(78.812.565,00)	96,41
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.197.135,00	108.500.000,00	(5.697.135,00)	95,01



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.577.547,00	123.014.000,00	(10.513.547,00)	92,13
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.204.925.713,00	4.796.189.466,00	(498.842.247,00)	91,58
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	4.078.576.161,00	4.480.146.716,00	(498.429.445,00)	89,99
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	3.210.962.952,00	3.005.245.384,00	(205.717.568,00)	93,59
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.767.613.209,00	1.474.901.332,00	(292.711.877,00)	83,44
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	316.349.552,00	315.936.750,00	(412.802,00)	99,57
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	266.350.000,00	266.160.000,00	(190.000,00)	99,93
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.999.552,00	49.776.750,00	(222.802,00)	99,55
5.1.06	SOSIAL	5.382.911.328,00	5.007.963.718,00	(374.947.610,00)	93,03
5.1.06.1-06.2-13.0-00.01	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.382.911.328,00	5.007.963.718,00	(374.947.610,00)	93,03
5.1.06.1-06.2-13.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.354.279.528,00	4.989.852.716,00	(373.426.812,00)	93,03
5.1.06.1-06.2-13.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.951.372.898,00	2.793.000.064,00	(158.372.834,00)	94,63
5.1.06.1-06.2-13.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.402.906.640,00	2.187.852.652,00	(215.053.988,00)	91,05
5.1.06.1-06.2-13.0-00.01.2	BELANJA MODAL	28.631.800,00	27.111.000,00	(1.520.800,00)	94,69
5.1.06.1-06.2-13.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.631.800,00	27.111.000,00	(1.520.800,00)	94,69
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WALIY YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31.109.388.046,00	28.904.072.710,52	(2.205.315.335,48)	92,91
5.2.07	TENAGA KERJA	3.056.814.081,00	2.813.226.038,00	(243.588.043,00)	92,03
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.056.814.081,00	2.813.226.038,00	(243.588.043,00)	92,03
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.051.314.081,00	2.807.726.038,00	(243.588.043,00)	92,02
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.158.201.716,00	2.007.773.360,00	(150.428.656,00)	93,03
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	893.112.365,00	799.952.978,00	(93.159.387,00)	89,57
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.2	BELANJA MODAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	4.350.454.840,00	3.924.175.869,00	(426.278.971,00)	90,20
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.350.454.840,00	3.924.175.869,00	(426.278.971,00)	90,20
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.234.313.076,00	3.812.965.069,00	(421.347.907,00)	90,05
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.081.127.399,00	2.782.610.843,00	(298.516.556,00)	90,31
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.153.185.677,00	1.030.355.126,00	(122.830.551,00)	89,35
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	116.141.764,00	111.210.000,00	(4.931.764,00)	95,75
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.116.000,00	77.710.000,00	(4.406.000,00)	94,63
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.025.764,00	33.500.000,00	(525.764,00)	98,45
5.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.833.298.254,00	7.287.225.220,00	(546.073.034,00)	93,03
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.833.298.254,00	7.287.225.220,00	(546.073.034,00)	93,03
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	7.813.809.954,00	7.268.676.220,00	(545.133.734,00)	93,02
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.597.040.279,00	2.509.926.018,00	(87.113.631,00)	96,65
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.216.769.675,00	4.758.749.572,00	(458.020.103,00)	91,22
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.2	BELANJA MODAL	19.488.300,00	18.549.000,00	(939.300,00)	95,18
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.488.300,00	18.549.000,00	(939.300,00)	95,18
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	7.285.843.854,00	7.105.506.220,00	(179.837.634,00)	96,15



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.285.343.854,00	7.005.606.220,00	(279.837.634,00)	96,18
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	7.011.312.387,00	6.732.032.220,00	(279.300.167,00)	96,02
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	2.031.341.288,00	2.884.034.983,00	(107.306.325,00)	96,41
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.979.971.099,00	3.007.977.257,00	(171.093.842,00)	95,68
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.05	Belanja Hibah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2	BELANJA MODAL	274.031.467,00	273.494.000,00	(537.467,00)	99,80
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	274.031.467,00	273.494.000,00	(537.467,00)	99,80
5.2.18	PENANAMAN MODAL	3.843.047.177,00	3.469.537.107,52	(374.280.069,48)	90,26
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.843.047.177,00	3.469.537.107,52	(374.280.069,48)	90,26
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.663.989.980,00	3.296.735.107,52	(366.664.872,48)	89,99
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.577.409.730,00	2.403.425.426,00	(173.983.304,00)	93,25
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.085.991.250,00	993.309.681,52	(192.681.568,48)	92,26
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01.2	BELANJA MODAL	100.447.197,00	172.052.000,00	(7.505.197,00)	95,79
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.241.086,00	65.900.000,00	(7.341.086,00)	89,98
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.206.111,00	106.952.000,00	(254.111,00)	99,76
5.2.23	PERPUSTAKAAN	4.739.629.840,00	4.104.352.156,00	(335.277.684,00)	86,93
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.739.629.840,00	4.104.352.156,00	(335.277.684,00)	86,93
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.540.952.413,00	3.208.819.534,10	(332.132.879,00)	90,62
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.569.010.029,00	2.361.954.029,00	(207.059.000,00)	91,94
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.842.374,00	846.868.504,00	(125.073.870,00)	87,13
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.198.677.427,00	1.495.532.623,00	(3.144.814,00)	99,74
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.863.214,00	13.840.000,00	(2.023.214,00)	87,25
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	982.814.223,00	982.814.223,00	0,00	100,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.05	Belanja Modal Asul Tetap Lainnya	200.000.000,00	108.878.400,00	(1.121.600,00)	99,44
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	56.209.684.702,00	50.855.612.680,81	(5.354.072.021,19)	90,47
5.3.26	PARIWISATA	14.481.931.249,00	11.677.780.817,81	(2.804.150.431,19)	80,64
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	14.481.931.249,00	11.677.780.817,81	(2.804.150.431,19)	80,64
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.1	BELANJA OPERASI	12.941.104.081,00	10.174.050.882,81	(2.767.054.098,19)	78,62
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.1.01	Belanja Pegawai	2.874.204.291,00	2.822.826.580,00	(51.377.711,00)	98,21
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.516.900.890,00	5.801.224.302,81	(2.715.676.587,19)	68,11
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.1.05	Belanja Hibah	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	100,00
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.2	BELANJA MODAL	1.540.826.268,00	1.503.729.995,00	(37.096.333,00)	97,59
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.140.503,00	158.580.000,00	(1.560.503,00)	99,03
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.380.685.768,00	1.345.149.995,00	(35.535.833,00)	97,43
5.3.27	PERTANIAN	33.591.904.951,00	31.441.853.939,00	(2.150.051.012,00)	93,60
5.3.27.3-27.2-09.3-25.01	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	33.591.904.951,00	31.441.853.939,00	(2.150.051.012,00)	93,60
5.3.27.3-27.2-09.3-25.01.1	BELANJA OPERASI	31.935.923.291,00	29.926.337.689,00	(2.009.585.542,00)	93,71
5.3.27.3-27.2-09.3-25.01.1.01	Belanja Pegawai	11.451.453.321,00	10.391.864.512,00	(1.058.588.809,00)	90,76
5.3.27.3-27.2-09.3-25.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.485.469.970,00	19.534.473.177,00	(950.996.733,00)	95,36
5.3.27.3-27.2-09.3-25.01.2	BELANJA MODAL	1.655.981.720,00	1.515.516.250,00	(140.465.470,00)	91,52



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3.27.9-27.2-09.9-25.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	643.804.580,00	609.488.250,00	(40.322.330,00)	93,74
5.3.27.3-27.2-09.3-25.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	912.421.242,00	860.854.000,00	(51.567.242,00)	94,35
5.3.27.3-27.2-09.3-25.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.755.898,00	51.180.000,00	(48.575.898,00)	51,31
5.3.31	PERINDUSTRIAN	8.135.848.502,00	7.735.977.924,00	(399.870.578,00)	95,04
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8.135.848.502,00	7.735.977.924,00	(399.870.578,00)	95,04
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1	BELANJA OPERASI	7.824.563.335,00	7.226.246.231,00	(598.317.104,00)	92,47
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1.01	Belanja Pegawai	3.173.892.604,00	3.085.806.750,00	(88.085.854,00)	97,22
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.450.670.731,00	4.140.439.481,00	(310.231.250,00)	93,00
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.2	BELANJA MODAL	511.285.167,00	509.731.693,00	(1.553.474,00)	99,70
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.800.000,00	15.000.000,00	(20.800.000,00)	41,90
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	496.285.167,00	494.731.693,00	(1.553.474,00)	99,69
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	79.436.585.497,00	74.213.740.117,00	(5.222.845.380,00)	93,43
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	52.854.874.844,00	48.643.741.294,00	(4.211.133.550,00)	92,03
5.4.01.4-01.5-06.0-00.01	Sekretariat Daerah	52.854.874.844,00	48.643.741.294,00	(4.211.133.550,00)	92,03
5.4.01.4-01.5-06.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	50.981.189.370,00	47.002.125.814,00	(3.979.063.556,00)	92,20
5.4.01.4-01.5-06.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.250.821.861,00	10.434.262.573,00	(816.559.288,00)	92,74
5.4.01.4-01.5-06.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.730.367.509,00	34.567.863.241,00	(3.162.504.268,00)	91,62
5.4.01.4-01.5-06.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
5.4.01.4-01.5-08.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.873.485.274,00	1.041.615.480,00	(831.869.794,00)	55,63
5.4.01.4-01.5-08.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.655.390.564,00	1.624.186.480,00	(31.204.084,00)	98,11
5.4.01.4-01.5-08.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.094.710,00	217.579.000,00	(515.710,00)	99,76
5.4.02	SEKRETARIAT DPRD	26.581.940.653,00	25.369.998.823,00	(1.211.941.830,00)	95,44
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat DPRD	26.581.940.653,00	25.369.998.823,00	(1.211.941.830,00)	95,44
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	28.450.440.175,00	25.238.811.823,00	(3.211.628.352,00)	88,75
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.812.409.051,00	11.604.358.523,00	(208.050.528,00)	98,16
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.638.031.124,00	13.544.253.300,00	(1.093.777.824,00)	92,53
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	131.470.678,00	131.387.000,00	(83.678,00)	99,94
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.470.678,00	131.387.000,00	(83.678,00)	99,94
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	158.966.301.274,00	155.244.335.318,00	(3.721.965.956,00)	97,68
5.5.01	PERENCANAAN	4.668.306.741,00	4.283.485.593,00	(384.821.148,00)	91,78
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.668.306.741,00	4.283.485.593,00	(384.821.148,00)	91,78
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.668.306.741,00	4.283.485.593,00	(384.821.148,00)	91,78
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.026.674.800,00	2.908.049.511,00	(118.625.289,00)	96,08
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.641.631.941,00	1.355.436.082,00	(286.195.859,00)	82,57
5.5.02	KEUANGAN	118.012.566.957,00	116.059.698.872,00	(1.952.868.085,00)	98,35
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	118.012.566.957,00	116.059.698.872,00	(1.952.868.085,00)	98,35
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	24.070.349.203,00	23.128.827.656,00	(941.521.547,00)	96,09
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	17.971.210.283,00	17.568.686.357,00	(402.523.926,00)	97,75
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.099.138.920,00	5.560.141.299,00	(539.997.621,00)	91,26
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	163.246.000,00	153.000.000,00	(10.246.000,00)	93,72



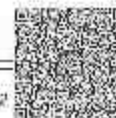
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.246.000,00	153.000.000,00	(10.246.000,00)	93,72
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	150.000.000,00	(850.000.000,00)	15,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	150.000.000,00	(850.000.000,00)	15,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	92.778.971.754,00	92.627.071.216,00	(151.900.538,00)	99,84
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.580.709.754,00	1.429.609.216,00	(151.100.538,00)	90,44
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	91.198.262.000,00	91.198.262.000,00	0,00	100,00
5.5.03	KEPEGAWAIAN	36.275.427.576,00	34.921.150.853,00	(1.354.276.723,00)	96,27
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.275.427.576,00	34.921.150.853,00	(1.354.276.723,00)	96,27
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	36.245.429.576,00	34.891.350.853,00	(1.354.078.723,00)	96,26
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	21.860.861.154,00	21.121.608.321,00	(739.252.833,00)	96,62
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.384.568.422,00	13.769.742.532,00	(614.825.890,00)	95,73
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	29.998.000,00	29.800.000,00	(198.000,00)	99,34
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.998.000,00	29.800.000,00	(198.000,00)	99,34
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	4.915.920.045,00	4.439.337.561,00	(476.582.484,00)	90,31
5.6.01	INSPEKTORAT	4.915.920.045,00	4.439.337.561,00	(476.582.484,00)	90,31
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat	4.915.920.045,00	4.439.337.561,00	(476.582.484,00)	90,31
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.902.600.045,00	4.426.387.561,00	(476.212.484,00)	90,29
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.437.439.046,00	2.959.729.310,00	(477.709.736,00)	86,23
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.160.999,00	1.466.658.251,00	(3.502.748,00)	99,76
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	13.320.000,00	12.950.000,00	(370.000,00)	97,22
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.320.000,00	12.950.000,00	(370.000,00)	97,22
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	19.886.538.441,00	19.161.897.082,00	(624.641.359,00)	97,34
5.7.III	KECAMATAN	19.886.538.441,00	19.161.897.082,00	(624.641.359,00)	97,34
5.7.01.7-01.II-00.0-00.01	Kecamatan Sungai Pagu	3.288.284.654,00	3.151.783.278,00	(136.481.376,00)	95,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.288.284.654,00	3.151.783.278,00	(136.481.376,00)	95,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.442.057.896,00	2.424.918.140,00	(17.139.756,00)	99,30
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	846.226.758,00	726.865.136,00	(119.341.622,00)	85,80
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Pauh Duo	2.516.848.801,00	2.429.055.443,00	(87.793.358,00)	96,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	2.514.853.051,00	2.427.075.443,00	(87.777.608,00)	96,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	1.861.186.510,00	1.777.212.713,00	(83.973.797,00)	95,49
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	653.666.541,00	649.062.730,00	(3.803.811,00)	99,42
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	1.995.750,00	1.980.000,00	(15.750,00)	99,21
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.995.750,00	1.980.000,00	(15.750,00)	99,21
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Sangir Balai Janggo	2.146.679.695,00	2.132.758.725,00	(13.920.970,00)	99,45
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	2.146.679.695,00	2.113.199.725,00	(33.479.970,00)	98,44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	1.448.885.285,00	1.431.237.830,00	(15.647.455,00)	98,92
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.794.400,00	681.961.095,00	(17.833.305,00)	97,45
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	19.674.000,00	19.560.000,00	(64.000,00)	99,67
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.674.000,00	19.560.000,00	(64.000,00)	99,67
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Sangir Batang Hari	2.875.676.596,00	2.799.887.871,00	(75.788.725,00)	97,12



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	2.691.120.889,00	2.608.812.871,00	(82.308.018,00)	96,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	2.105.670.009,00	2.026.139.971,00	(79.533.118,00)	96,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.447.000,00	582.672.900,00	(2.774.900,00)	99,53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	184.555.707,00	184.075.000,00	(480.707,00)	99,74
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.555.707,00	174.075.000,00	(480.707,00)	99,72
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Sangir Jujuan	2.231.182.489,00	2.155.695.309,00	(75.487.180,00)	96,62
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	2.176.820.547,00	2.101.840.542,00	(74.980.005,00)	96,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	1.538.216.018,00	1.502.754.942,00	(35.461.076,00)	97,69
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.603.929,00	599.085.600,00	(39.518.329,00)	93,81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2	BELANJA MODAL	54.361.942,00	53.844.767,00	(517.175,00)	99,05
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.737.050,00	5.737.050,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.624.892,00	48.107.717,00	(517.175,00)	98,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	3.370.119.409,00	3.307.539.183,00	(62.580.226,00)	98,14
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	3.329.257.479,00	3.266.741.153,00	(62.516.026,00)	98,12
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	2.460.696.346,00	2.430.057.087,00	(30.639.659,00)	98,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	862.561.133,00	836.683.786,00	(25.877.387,00)	96,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2	BELANJA MODAL	40.861.930,00	40.797.730,00	(64.200,00)	99,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.597.730,00	40.597.730,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	264.200,00	200.000,00	(64.200,00)	75,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Sangir	3.238.142.007,00	3.102.186.275,00	(135.955.732,00)	95,88
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	3.002.569.432,00	2.957.311.900,00	(45.257.532,00)	98,49
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	2.001.516.389,00	1.958.018.010,00	(43.498.379,00)	97,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	911.053.043,00	900.493.890,00	(10.559.153,00)	98,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2	BELANJA MODAL	235.573.375,00	234.874.375,00	(699.000,00)	99,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.568.245,00	39.111.375,00	(456.870,00)	98,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.005.130,00	195.763.000,00	(242.130,00)	99,88
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	14.404.798.156,00	14.127.771.570,00	(277.026.586,00)	98,08
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.404.798.156,00	14.127.771.570,00	(277.026.586,00)	98,09
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	14.404.798.156,00	14.127.771.570,00	(277.026.586,00)	98,09
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	14.348.102.156,00	14.071.461.570,00	(276.640.586,00)	98,07
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.381.113.932,00	1.336.545.560,00	(44.568.364,00)	96,77
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.196.739.280,00	1.904.067.058,00	(292.672.222,00)	86,74
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	10.830.248.944,00	10.830.248.944,00	0,00	100,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.2	BELANJA MODAL	56.696.000,00	56.310.000,00	(386.000,00)	99,32
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.696.000,00	56.310.000,00	(386.000,00)	99,32
6	PEMBIAYAAN DAERAH	93.484.109.943,00	93.484.024.657,27	(80.285,73)	100,00
6.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	-80.285,73	(80.285,73)	0
6.1.01	PENDIDIKAN	0,00	-80.285,73	(80.285,73)	0
6.1.01.1-01.0-00.0-00.01	Dinas Pendidikan	0,00	-80.285,73	(80.285,73)	0



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-80.285,73	(80.285,73)	0
6.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-80.285,73	(80.285,73)	0
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	93.484.109.943,00	93.484.109.943,00	0,00	100,00
6.5.02	KEUANGAN	93.484.109.943,00	93.484.109.943,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	93.484.109.943,00	93.484.109.943,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.755.109.943,00	92.755.109.943,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.755.109.943,00	92.755.109.943,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	729.000.000,00	729.000.000,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Penyertaan Modal Daerah	729.000.000,00	729.000.000,00	0,00	100,00



Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4
Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	841.100.510.664,00	840.018.798.191,79	99,86	884.655.899.039,10
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.133.896.833,00	80.874.599.931,79	113,75	92.121.048.046,10
4.1.01	Pajak Daerah	12.627.963.123,00	11.176.289.565,00	88,50	11.006.714.870,10
4.1.02	Retribusi Daerah	2.414.500.000,00	2.000.096.422,70	83,18	2.354.215.128,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.628.000.000,00	2.790.556.717,00	106,41	2.415.762.950,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.473.433.710,00	72.902.648.227,09	120,55	76.344.355.098,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	753.151.463.851,00	741.131.207.237,00	98,40	784.706.642.887,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	691.504.704.241,00	695.105.975.634,00	100,52	713.634.495.009,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	649.652.549.241,00	653.253.740.634,00	100,55	676.013.344.009,00
4.2.01.05	Dana Desa	41.852.235.000,00	41.852.235.000,00	100,00	37.621.151.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.646.679.610,00	46.025.311.603,00	74,66	71.072.147.878,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	54.646.070.610,00	39.025.311.603,00	71,41	59.572.147.878,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	11.500.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.875.150.000,00	10.011.920.023,00	101,38	7.828.208.106,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.875.150.000,00	10.011.920.023,00	101,38	7.828.208.106,00
5	BELANJA DAERAH	930.186.620.627,00	878.046.052.654,28	94,09	900.537.847.482,77
5.1	BELANJA OPERASI	890.532.104.284,00	845.554.117.010,28	94,99	808.487.257.791,10
5.1.01	Belanja Pegawai	493.671.094.050,00	375.390.087.878,95	95,36	375.198.145.727,63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.187.736.290,00	240.430.649.153,33	90,31	224.250.350.255,27
5.1.05	Belanja Hibah	20.673.210.944,00	20.733.409.978,00	100,29	9.038.761.804,00
5.2	BELANJA MODAL	149.075.544.589,00	139.715.064.438,00	93,05	202.072.297.611,67
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.142.897.230,00	19.108.000,00	1,67	11.111.852.077,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.309.890.674,00	26.330.182.991,01	93,04	31.337.496.900,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.859.510.525,00	33.431.528.257,00	88,30	69.288.671.660,08
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.100.973.060,00	77.154.111.140,00	98,79	80.128.228.089,59
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.809.763.900,00	2.789.134.050,00	90,55	1.205.948.175,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	652.400.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	150.000.000,00	15,00	3.081.054.001,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	150.000.000,00	15,00	3.081.054.001,00
5.4	BELANJA TRANSFER	92.778.971.754,00	92.627.871.216,00	99,84	86.917.238.178,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.580.709.754,00	1.429.609.216,00	90,44	1.095.023.679,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	91.198.262.000,00	91.198.262.000,00	100,00	85.822.214.500,00
	SURPLUS / DEFISIT	(92.026.109.943,00)	(38.026.254.472,49)	0	(15.881.948.443,67)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.755.109.943,00	92.755.029.657,27	100,00	109.137.058.386,94
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.755.109.943,00	92.755.029.657,27	100,00	109.137.058.386,94
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	729.000.000,00	729.000.000,00	100,00	500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	729.000.000,00	729.000.000,00	100,00	500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	92.026.109.943,00	92.026.029.657,27	100,00	108.637.058.386,94
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	53.999.775.184,78	0	92.755.109.943,27

Padang Aro, 29 Juli 2024

BUPATI
KIAMUNAS




Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
 SKPD : 1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	230.721.011.915,00	231.238.973.390,00	(8.482.038.525,00)	96,46		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	182.713.781.443,00	175.522.014.583,00	(7.191.761.860,00)	96,06		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	182.100.271.604,00	174.975.152.180,00	(7.125.119.418,00)	96,00		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	181.703.371.604,00	174.677.802.168,00	(7.025.769.418,00)	96,13		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	181.703.371.604,00	174.677.802.168,00	(7.025.769.418,00)	96,13		
01.2.02.01.5.1.01	Ublanja Pegawai	181.703.371.604,00	174.677.802.168,00	(7.025.769.418,00)	96,13		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	396.900.000,00	297.550.000,00	(99.350.000,00)	74,97		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	396.900.000,00	297.550.000,00	(99.350.000,00)	74,97		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	396.900.000,00	297.550.000,00	(99.350.000,00)	74,97		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.455.000,00	27.864.000,00	(1.491.000,00)	94,94		
01.2.03.06	Peralaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.455.000,00	27.864.000,00	(1.491.000,00)	94,94		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	29.455.000,00	27.864.000,00	(1.491.000,00)	94,94		
01.2.03.06.5.1.02	Ublanja Barang dan Jasa	29.455.000,00	27.864.000,00	(1.491.000,00)	94,94		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.000.640,00	234.631.184,00	(50.375.465,00)	82,51		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.990.309,00	4.987.923,00	(2.386,00)	99,95		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.990.309,00	4.987.923,00	(2.386,00)	99,95		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.309,00	4.987.923,00	(2.386,00)	99,95		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Ublanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.140,00	4.989.000,00	(11.140,00)	99,78		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.999.140,00	4.988.000,00	(11.140,00)	99,78		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.140,00	4.988.000,00	(11.140,00)	99,78		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.429.200,00	27.429.519,00	(3.681,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	27.429.200,00	27.429.519,00	(3.681,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.429.200,00	27.429.519,00	(3.681,00)	99,99		
01.2.06.08	fasilitas Kunjungan Tamu	9.750.000,00	6.710.700,00	(3.039.300,00)	68,83		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.750.000,00	6.710.700,00	(3.039.300,00)	68,83		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	6.710.700,00	(3.039.300,00)	68,83		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.834.000,00	134.060.042,00	(13.773.958,00)	90,68		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	147.834.000,00	134.060.042,00	(13.773.958,00)	90,68		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.834.000,00	134.060.042,00	(13.773.958,00)	90,68		
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35.000.000,00	21.455.000,00	(13.545.000,00)	61,30		
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	21.455.000,00	(13.545.000,00)	61,30		
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	21.455.000,00	(13.545.000,00)	61,30		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.005.960,00	39.636.468,00	(8.369.492,00)	82,57		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	48.005.960,00	39.636.468,00	(8.369.492,00)	82,57		
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0		
01.2.07.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	46.755.960,00	39.636.468,00	(7.119.492,00)	84,77		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.755.960,00	39.636.468,00	(7.119.492,00)	84,77		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.418.000,00	84.531.884,00	(9.886.116,00)	89,53		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	REVENUE OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.918.000,00	67.185.084,00	(14.732.916,00)	82,02		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	81.918.000,00	67.185.084,00	(14.732.916,00)	82,02		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.918.000,00	67.185.084,00	(14.732.916,00)	82,02		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	12.346.800,00	(153.200,00)	98,77		
01.2.08.03.5.1	REVENUE OPERASI	12.500.000,00	12.346.800,00	(153.200,00)	98,77		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.346.800,00	(153.200,00)	98,77		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.824.230,00	160.103.821,00	(11.720.409,00)	93,29		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.000.000,00	128.090.522,00	(10.909.478,00)	92,15		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	139.000.000,00	128.090.522,00	(10.909.478,00)	92,15		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.000.000,00	128.090.522,00	(10.909.478,00)	92,15		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.624.230,00	32.013.339,00	(610.891,00)	98,13		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	32.624.230,00	32.013.339,00	(610.891,00)	98,13		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.624.230,00	32.013.339,00	(610.891,00)	98,13		
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	58.321.719.272,00	55.420.466.866,00	(1.201.252.406,00)	97,87		
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	38.237.214.499,00	35.710.641.944,00	(2.526.572.555,00)	93,55		
02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.410.862.049,00	2.401.713.634,00	(9.148.415,00)	99,62		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	81.191.000,00	75.653.604,00	(5.537.396,00)	93,18		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	12.480.000,00	12.430.000,00	(50.000,00)	99,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.711.000,00	63.223.604,00	(5.487.396,00)	92,01		
02.2.01.02.5.2	REANJAL MODAL	2.329.671.049,00	2.326.060.000,00	(3.611.049,00)	99,84		
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.329.671.049,00	2.326.060.000,00	(3.611.049,00)	99,84		
02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/VTU	1.123.084.822,00	1.085.899.000,00	(37.185.822,00)	96,69		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.640.000,00	39.100.000,00	(1.540.000,00)	96,21		
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	25.860.000,00	(1.540.000,00)	94,38		
02.2.01.03.5.2	REANJAL MODAL	1.082.444.822,00	1.046.799.000,00	(35.645.822,00)	96,71		
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.082.444.822,00	1.046.799.000,00	(35.645.822,00)	96,71		
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	655.591.250,00	649.903.000,00	(5.688.250,00)	99,13		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.420.000,00	31.830.000,00	(590.000,00)	98,18		
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	7.270.000,00	6.870.000,00	(400.000,00)	94,50		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	24.960.000,00	(190.000,00)	99,24		
02.2.01.04.5.2	REANJAL MODAL	623.171.250,00	618.073.000,00	(5.098.250,00)	99,18		
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	623.171.250,00	618.073.000,00	(5.098.250,00)	99,18		
02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	397.520.112,00	396.979.000,00	(550.112,00)	99,85		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.210.000,00	16.100.000,00	(110.000,00)	99,32		
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.240.000,00	(60.000,00)	98,87		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.910.000,00	10.860.000,00	(50.000,00)	99,54		
02.2.01.05.5.2	REANJAL MODAL	381.310.112,00	380.879.000,00	(440.112,00)	99,89		
02.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	381.310.112,00	380.879.000,00	(440.112,00)	99,89		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.980.808.158,00	3.933.887.000,00	(46.921.158,00)	98,80		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	106.356.000,00	84.160.000,00	(22.196.000,00)	78,13		
02.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	32.480.000,00	32.420.000,00	(60.000,00)	99,02		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.876.000,00	51.740.000,00	(22.136.000,00)	70,04		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	3.883.252.158,00	3.849.727.000,00	(33.525.158,00)	99,14		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.883.252.158,00	3.849.727.000,00	(33.525.158,00)	99,14		
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.925.848.120,00	3.702.480.000,00	(223.368.120,00)	94,31		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	144.970.000,00	139.275.000,00	(5.695.000,00)	96,07		
02.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	17.730.000,00	17.430.000,00	(300.000,00)	98,31		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.240.000,00	121.845.000,00	(5.395.000,00)	95,76		
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	3.780.878.120,00	3.563.205.000,00	(217.673.120,00)	94,24		
02.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.780.878.120,00	3.563.205.000,00	(217.673.120,00)	94,24		
02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Barat Ruang Gua/Kepala Sekolah/VTU	177.269.000,00	162.161.000,00	(15.108.000,00)	91,48		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.040.000,00	14.020.000,00	(1.020.000,00)	93,22		
02.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.340.000,00	1.140.000,00	(200.000,00)	85,07		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	12.880.000,00	(820.000,00)	94,01		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	162.229.000,00	148.141.000,00	(14.088.000,00)	91,32		
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.229.000,00	148.141.000,00	(14.088.000,00)	91,32		
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	282.360.000,00	283.550.000,00	(8.810.000,00)	96,99		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	18.320.000,00	14.110.000,00	(4.210.000,00)	77,02		
02.2.01.12.5.1.01	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.420.000,00	(80.000,00)	97,71		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.820.000,00	10.690.000,00	(4.130.000,00)	72,13		
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	274.040.000,00	269.440.000,00	(4.600.000,00)	98,32		
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.040.000,00	269.440.000,00	(4.600.000,00)	98,32		
02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	1.275.506.012,00	1.261.974.500,00	(10.531.512,00)	99,17		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	28.810.000,00	28.575.000,00	(235.000,00)	92,24		
02.2.01.14.5.1.01	Belanja Pegawai	3.330.000,00	2.850.000,00	(480.000,00)	85,59		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.480.000,00	23.725.000,00	(1.755.000,00)	93,11		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	1.246.696.012,00	1.233.399.500,00	(8.296.512,00)	99,33		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.246.696.012,00	1.233.399.500,00	(8.296.512,00)	99,33		
02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.243.620.000,00	1.233.195.000,00	(10.425.000,00)	99,16		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	1.243.620.000,00	1.233.195.000,00	(10.425.000,00)	99,16		
02.2.01.21.5.1.01	Belanja Pegawai	970.000,00	970.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.242.650.000,00	1.232.225.000,00	(10.425.000,00)	99,16		
02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.260.250.000,00	1.258.652.000,00	(1.598.000,00)	99,87		
02.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	15.250.000,00	14.360.000,00	(890.000,00)	94,10		
02.2.01.22.5.1.01	Belanja Pegawai	850.000,00	570.000,00	(280.000,00)	67,00		
02.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	13.790.000,00	(610.000,00)	95,76		
02.2.01.22.5.2	BELANJA MODAL	1.245.000.000,00	1.244.292.000,00	(708.000,00)	99,94		
02.2.01.22.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.245.000.000,00	1.244.292.000,00	(708.000,00)	99,94		
02.2.01.23	Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	19.143.261.278,00	19.031.085.010,00	(112.176.268,00)	99,41		
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	15.442.822.882,00	15.349.729.528,00	(110.093.354,00)	99,23		
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.744.362.882,00	13.637.499.428,00	(106.863.454,00)	99,22		
02.2.01.23.5.1.05	Belanja Hibah	1.698.460.000,00	1.695.230.100,00	(3.229.900,00)	99,81		
02.2.01.23.5.2	BELANJA MODAL	3.700.438.414,00	3.698.355.482,00	(2.082.932,00)	99,94		
02.2.01.23.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.818.415.214,00	1.817.482.682,00	(1.932.532,00)	99,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.23.5.2.05	Ucapan Modaf Ases Telap Lainnya	1.881.023.200,00	1.880.872.800,00	(150.600,00)	99,99		
02.2.01.24	Penyulpan dan Yndak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	48.886.900,00	38.310.000,00	(10.576.900,00)	78,36		
02.2.01.24.5.1	BELANJA OPERASI	48.886.900,00	38.310.000,00	(10.576.900,00)	78,36		
02.2.01.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.886.900,00	38.310.000,00	(10.576.900,00)	78,36		
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	151.088.000,00	146.648.000,00	(4.440.000,00)	97,06		
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	151.088.000,00	146.648.000,00	(4.440.000,00)	97,06		
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.088.000,00	146.648.000,00	(4.440.000,00)	97,06		
02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	92.450.000,00	81.450.000,00	(11.000.000,00)	88,10		
02.2.01.27.5.1	BELANJA OPERASI	92.450.000,00	81.450.000,00	(11.000.000,00)	88,10		
02.2.01.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.450.000,00	81.450.000,00	(11.000.000,00)	88,10		
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	14.999.800,00	7.719.800,00	(7.280.000,00)	51,47		
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	14.999.800,00	7.719.800,00	(7.280.000,00)	51,47		
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.800,00	7.719.800,00	(7.280.000,00)	51,47		
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	35.000.000,00	32.035.000,00	(2.965.000,00)	91,53		
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.035.000,00	(2.965.000,00)	91,53		
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.035.000,00	(2.965.000,00)	91,53		
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.036.970.828,00	12.341.991.892,00	(694.978.933,00)	94,67		
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	672.276.000,00	609.179.000,00	(63.097.000,00)	90,61		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	672.276.000,00	4.914.000,00	(11.486.000,00)	29,96		
02.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	4.420.000,00	0,00	(4.420.000,00)	0		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.980.000,00	4.914.000,00	(7.066.000,00)	41,02		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	655.876.000,00	604.265.000,00	(51.611.000,00)	92,13		
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	655.876.000,00	604.265.000,00	(51.611.000,00)	92,13		
02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	655.124.700,00	579.231.000,00	(75.893.700,00)	88,42		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	14.625.000,00	4.055.000,00	(10.570.000,00)	27,73		
02.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	2.570.000,00	0,00	(2.570.000,00)	0		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.055.000,00	4.055.000,00	(8.000.000,00)	33,64		
02.2.02.05.5.2	BELANJA MODAL	640.499.700,00	575.176.000,00	(65.323.700,00)	89,80		
02.2.02.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	640.499.700,00	575.176.000,00	(65.323.700,00)	89,80		
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	1.345.331.766,00	1.257.389.000,00	(87.932.766,00)	93,46		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	33.216.000,00	12.631.000,00	(20.585.000,00)	38,03		
02.2.02.06.5.1.01	Belanja Pegawai	9.100.000,00	6.870.000,00	(2.230.000,00)	75,19		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.116.000,00	5.761.000,00	(18.355.000,00)	23,89		
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	1.312.115.766,00	1.244.758.000,00	(67.347.766,00)	94,87		
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.312.115.766,00	1.244.758.000,00	(67.347.766,00)	94,87		
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.097.136.401,00	1.018.408.150,00	(78.728.251,00)	92,62		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	129.055.404,00	56.205.500,00	(72.849.904,00)	43,55		
02.2.02.12.5.1.01	Belanja Pegawai	15.250.000,00	3.400.000,00	(11.850.000,00)	22,30		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.805.404,00	52.805.500,00	(60.999.904,00)	46,40		
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	988.080.997,00	962.202.650,00	(5.878.347,00)	99,39		
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	988.080.997,00	962.202.650,00	(5.878.347,00)	99,39		
02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	377.120.400,00	318.638.000,00	(8.482.400,00)	97,41		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	5.860.000,00	0,00	(5.860.000,00)	0		
02.2.02.25.5.1.01	Belanja Pegawai	1.340.000,00	0,00	(1.340.000,00)	0		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	0,00	(4.520.000,00)	0		
02.2.02.25.5.2	BELANJA MODAL	321.260.400,00	318.638.000,00	(2.622.400,00)	99,18		
02.2.02.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.260.400,00	318.638.000,00	(2.622.400,00)	99,18		
02.2.02.32	Penyediaan Ulaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.087.065.200,00	1.078.788.000,00	(8.277.200,00)	99,24		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	1.087.065.200,00	1.078.788.000,00	(8.277.200,00)	99,24		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.065.200,00	1.078.788.000,00	(8.277.200,00)	99,24		
02.2.02.36	Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	7.573.780.658,00	7.251.869.742,00	(321.910.916,00)	95,75		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	6.107.245.958,00	5.883.661.006,00	(323.584.950,00)	94,94		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.649.725.958,00	5.337.901.418,00	(312.424.539,00)	94,47		
02.2.02.36.5.1.05	Belanja Hibah	547.520.000,00	546.359.588,00	(1.160.411,00)	99,79		
02.2.02.36.5.2	BELANJA MODAL	1.376.544.700,00	1.368.228.734,00	(8.315.966,00)	99,40		
02.2.02.36.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	720.868.000,00	716.674.184,00	(4.193.816,00)	99,45		
02.2.02.36.5.2.05	Belanja Modal Asat Tetap Lainnya	655.675.700,00	651.554.550,00	(4.121.150,00)	99,34		
02.2.02.37	Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	34.999.800,00	32.675.000,00	(2.324.800,00)	93,36		
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	34.999.800,00	32.675.000,00	(2.324.800,00)	93,36		
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.800,00	32.675.000,00	(2.324.800,00)	93,36		
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	154.512.000,00	131.996.000,00	(22.516.000,00)	85,49		
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	154.512.000,00	131.996.000,00	(22.516.000,00)	85,49		
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.512.000,00	131.996.000,00	(22.516.000,00)	85,49		
02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	43.128.900,00	39.276.000,00	(3.852.900,00)	91,07		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	43.128.900,00	39.276.000,00	(3.852.900,00)	91,07		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.128.900,00	39.276.000,00	(3.852.900,00)	91,07		
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	26.490.000,00	11.880.000,00	(14.610.000,00)	44,85		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	26.490.000,00	11.880.000,00	(14.610.000,00)	44,85		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.490.000,00	11.880.000,00	(14.610.000,00)	44,85		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.995.000,00	12.632.000,00	(7.363.000,00)	63,18		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	19.995.000,00	12.632.000,00	(7.363.000,00)	63,18		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.995.000,00	12.632.000,00	(7.363.000,00)	63,18		
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.834.420.248,00	4.897.204.230,00	32.783.982,00	100,67		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Huang Kelas/Huang Guru PAUD	880.193.750,00	823.085.700,00	(57.108.050,00)	93,51		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	534.394.700,00	505.083.700,00	(29.311.000,00)	94,52		
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	24.900.000,00	10.370.000,00	(14.530.000,00)	41,65		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.494.700,00	494.713.700,00	(14.781.000,00)	97,10		
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	345.799.050,00	318.002.000,00	(27.797.050,00)	91,90		
02.2.03.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.799.050,00	318.002.000,00	(27.797.050,00)	91,98		
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.117.626.319,00	1.057.412.350,00	(60.213.969,00)	94,61		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.631.149,00	36.513.350,00	(11.117.799,00)	76,66		
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.631.149,00	36.513.350,00	(8.117.799,00)	81,81		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	1.069.995.170,00	1.020.899.000,00	(49.096.170,00)	95,41		
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.069.995.170,00	1.020.899.000,00	(49.096.170,00)	95,41		
02.2.03.10	Pengadaan Peralengkapan Siswa PAUD	250.000.000,00	243.948.000,00	(6.052.000,00)	97,58		
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	243.948.000,00	(6.052.000,00)	97,58		
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	243.948.000,00	(6.052.000,00)	97,58		
02.2.03.13	Penyelenggaraan Pemes Belajar PAUD	2.285.165.000,00	2.518.292.000,00	233.127.000,00	110,20		
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	2.246.172.000,00	2.486.821.800,00	240.649.800,00	110,71		
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.287.000,00	283.349.800,00	7.062.800,00	102,56		
02.2.03.13.5.1.05	Belanja Hibah	1.969.885.000,00	2.203.472.000,00	233.587.000,00	112,20		
02.2.03.13.5.2	BELANJA MODAL	44.993.000,00	31.470.200,00	(13.522.800,00)	69,94		
02.2.03.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.026.000,00	24.597.200,00	10.571.200,00	175,34		
02.2.03.13.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.967.000,00	6.873.000,00	(24.094.000,00)	22,20		
02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	69.230.179,00	55.390.000,00	(13.840.179,00)	80,01		
02.2.03.16.5.1	BELANJA OPERASI	69.230.179,00	55.390.000,00	(13.840.179,00)	80,01		
02.2.03.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.230.179,00	55.390.000,00	(13.840.179,00)	80,01		
02.2.03.17	Pembinaan Kolembagaan dan Manajemen PAUD	228.289.000,00	178.628.280,00	(49.660.720,00)	78,25		
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	228.289.000,00	178.628.280,00	(49.660.720,00)	78,25		
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.289.000,00	178.628.280,00	(49.660.720,00)	78,25		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	33.936.000,00	20.447.900,00	(13.488.100,00)	60,25		
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	33.936.000,00	20.447.900,00	(13.488.100,00)	60,25		
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.936.000,00	20.447.900,00	(13.488.100,00)	60,25		
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Keselaraan	2.183.113.700,00	2.170.628.800,00	(12.484.900,00)	99,43		
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Keselaraan	2.070.399.800,00	2.070.299.800,00	(100.000,00)	100,00		
02.2.04.12.5.1	BELANJA OPERASI	2.008.544.000,00	2.039.344.300,00	30.799.500,00	101,53		
02.2.04.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.444.800,00	291.244.300,00	75.799.500,00	136,18		
02.2.04.12.5.1.05	Belanja Hibah	1.793.100.000,00	1.748.100.000,00	(45.000.000,00)	97,49		
02.2.04.12.5.2	BELANJA MODAL	61.865.000,00	30.955.500,00	(30.899.500,00)	50,05		
02.2.04.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.955.000,00	0,00	(19.955.000,00)	0		
02.2.04.12.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.910.000,00	30.955.500,00	(10.954.500,00)	73,88		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	36.699.900,00	35.188.900,00	(1.511.000,00)	95,88		
02.2.04.15.5.1	BELANJA OPERASI	36.699.900,00	35.188.900,00	(1.511.000,00)	95,88		
02.2.04.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.699.900,00	35.188.900,00	(1.511.000,00)	95,88		
02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	76.014.000,00	65.140.100,00	(10.873.900,00)	85,69		
02.2.04.16.5.1	BELANJA OPERASI	76.014.000,00	65.140.100,00	(10.873.900,00)	85,69		
02.2.04.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.014.000,00	65.140.100,00	(10.873.900,00)	85,69		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	74.500.000,00	46.190.000,00	(28.310.000,00)	62,00		
03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	74.500.000,00	46.190.000,00	(28.310.000,00)	62,00		
03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	35.000.000,00	21.500.000,00	(13.410.000,00)	61,69		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	21.500.000,00	(13.410.000,00)	61,69		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	21.500.000,00	(13.410.000,00)	61,69		
03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	39.500.000,00	24.600.000,00	(14.900.000,00)	62,28		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	39.500.000,00	24.600.000,00	(14.900.000,00)	62,28		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	24.600.000,00	(14.900.000,00)	62,28		
04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	611.011.200,00	550.296.941,00	(60.714.259,00)	90,06		
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	611.011.200,00	550.296.941,00	(60.714.259,00)	90,06		
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	611.011.200,00	550.296.941,00	(60.714.259,00)	90,06		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	611.011.200,00	550.296.941,00	(60.714.259,00)	90,06		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	611.011.200,00	550.296.941,00	(60.714.259,00)	90,06		
	SURPLUS / DEFISIT	(239.721.011.915,00)	(231.238.973.390,00)	8.482.038.525,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-80.285,73	(80.285,73)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-80.285,73	(80.285,73)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(80.285,73)	(80.285,73)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(239.721.011.915,00)	(231.239.053.675,73)	8.481.958.239,27	0		



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.01.4	PENDAPATAN DAERAH	43.462.500.000,00	50.984.749.198,00	7.522.249.198,00	117,31		
00.0.00.01.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.462.500.000,00	50.984.749.198,00	7.522.249.198,00	117,31		
00.0.00.01.4.1.02	Kontribusi Daerah	228.500.000,00	138.175.000,00	(90.325.000,00)	59,60		
00.0.00.01.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.234.000.000,00	50.846.574.198,00	7.614.574.198,00	117,61		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	177.309.049.830,00	157.759.141.074,95	(19.639.908.563,05)	88,93		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.076.252.327,00	56.833.233.832,00	(2.193.018.495,00)	96,29		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.780.032.497,00	55.702.979.939,00	(2.057.952.558,00)	96,44		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.740.612.497,00	55.203.386.839,00	(1.537.225.558,00)	97,29		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.740.612.497,00	55.203.386.839,00	(1.537.225.558,00)	97,29		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	56.740.612.497,00	55.203.386.839,00	(1.537.225.558,00)	97,29		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.020.320.000,00	499.593.000,00	(520.727.000,00)	48,96		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.020.320.000,00	499.593.000,00	(520.727.000,00)	48,96		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	541.320.000,00	499.593.000,00	(41.727.000,00)	92,29		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.000.000,00	0,00	(479.000.000,00)	0		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	554.115.071,00	492.462.486,00	(61.653.185,00)	88,87		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.574.721,00	18.630.000,00	(16.938.721,00)	52,39		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.124.721,00	16.186.000,00	(16.938.721,00)	48,86		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.124.721,00	16.186.000,00	(16.938.721,00)	48,86		
01.2.06.01.5.2	BELANJA MODAL	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.732.000,00	58.297.106,00	(434.894,00)	99,28		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	53.732.000,00	53.690.806,00	(41.394,00)	99,92		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.732.000,00	53.690.806,00	(41.394,00)	99,92		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	4.606.500,00	(393.500,00)	92,13		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.606.500,00	(393.500,00)	92,13		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.488.850,00	24.226.880,00	(261.970,00)	98,93		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.488.850,00	24.226.880,00	(261.970,00)	98,93		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.488.850,00	24.226.880,00	(261.970,00)	98,93		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pongandaan	32.500.000,00	30.692.100,00	(1.807.900,00)	94,44		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	32.500.000,00	30.692.100,00	(1.807.900,00)	94,44		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	30.692.100,00	(1.807.900,00)	94,44		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.200.000,00	8.410.400,00	(1.789.600,00)	82,45		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	8.410.400,00	(1.789.600,00)	82,45		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	8.410.400,00	(1.789.600,00)	82,45		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.620.100,00	352.200.000,00	(40.420.100,00)	89,71		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	392.620.100,00	352.200.000,00	(40.420.100,00)	89,71		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.620.100,00	352.200.000,00	(40.420.100,00)	89,71		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.147.700,00	159.402.900,00	(5.744.800,00)	96,52		
01.2.07.08	Pungadaan Peralatan dan Mesin lainnya	165.147.700,00	159.402.900,00	(5.744.800,00)	96,52		
01.2.07.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.850.000,00	2.280.000,00	(570.000,00)	80,00		
01.2.07.08.5.1.01	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.280.000,00	(570.000,00)	80,00		
01.2.07.08.5.2	BELANJA MODAL	162.297.700,00	157.122.900,00	(5.174.800,00)	96,81		
01.2.07.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.297.700,00	157.122.900,00	(5.174.800,00)	96,81		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.375.459,00	59.556.760,00	(30.818.699,00)	65,90		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.800.000,00	49.578.904,00	(27.221.096,00)	64,56		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	76.800.000,00	49.578.904,00	(27.221.096,00)	64,56		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	49.578.904,00	(27.221.096,00)	64,56		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.475.459,00	7.877.856,00	(3.597.603,00)	68,65		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.475.459,00	7.877.856,00	(3.597.603,00)	68,65		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.475.459,00	7.877.856,00	(3.597.603,00)	68,65		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.681.000,00	469.831.747,00	(36.849.253,00)	92,71		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.181.000,00	243.359.289,00	(34.821.711,00)	87,18		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	279.181.000,00	243.359.289,00	(34.821.711,00)	87,18		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.181.000,00	243.359.289,00	(34.821.711,00)	87,48		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.500.000,00	225.472.458,00	(2.027.542,00)	99,11		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	242.500.000,00	210.472.458,00	(32.027.542,00)	86,80		
01.2.09.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000,00)	99,90		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182.500.000,00	100.502.458,00	(1.997.542,00)	55,09		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	116.825.377.898,00	100.054.948.012,95	(16.570.431.683,05)	85,79		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.027.408.107,80	12.011.020.669,00	(4.016.387.438,80)	74,94		
02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	50.570.000,00	49.924.000,00	(646.000,00)	98,91		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	570.000,00	0,00	(570.000,00)	0		
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	570.000,00	0,00	(570.000,00)	0		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.924.000,00	(76.000,00)	99,85		
02.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.924.000,00	(76.000,00)	99,85		
02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	76.805.534,00	76.760.757,00	(44.777,00)	99,94		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	76.805.534,00	76.760.757,00	(44.777,00)	99,94		
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.805.534,00	76.760.757,00	(44.777,00)	99,94		
02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	890.920.000,00	284.345.858,00	(606.574.142,00)	31,92		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	28.482.308,00	13.779.500,00	(14.703.408,00)	48,34		
02.2.01.10.5.1.01	Belanja Pegawai	7.320.000,00	1.000.000,00	(6.320.000,00)	13,53		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.162.308,00	11.979.500,00	(9.183.408,00)	56,61		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	862.437.692,00	270.566.358,00	(591.870.734,00)	31,37		
02.2.01.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	862.437.692,00	270.566.358,00	(591.870.734,00)	31,37		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.892.454.999,00	6.458.190.040,00	(1.434.258.359,00)	81,83		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	39.363.000,00	23.270.000,00	(16.093.000,00)	59,12		
02.2.01.14.5.1.01	Belanja Pegawai	23.370.000,00	23.270.000,00	(100.000,00)	99,57		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.993.000,00	0,00	(15.993.000,00)	0		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	7.853.091.999,00	6.434.926.640,00	(1.418.165.359,00)	81,94		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.853.091.999,00	6.434.926.640,00	(1.418.165.359,00)	81,94		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.468.382.574,00	3.001.216.495,00	(1.377.136.079,00)	67,18		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	4.356.297.574,00	2.981.143.495,00	(1.375.154.079,00)	68,43		
02.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	75.930.000,00	39.750.000,00	(36.180.000,00)	52,36		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.280.367.574,00	2.941.393.495,00	(1.338.974.079,00)	68,72		
02.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	112.085.000,00	110.103.000,00	(1.982.000,00)	98,23		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.16.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.085.000,00	110.103.000,00	(1.982.000,00)	98,23		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.033.946.000,00	1.734.723.950,00	(299.222.050,00)	85,29		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	2.033.946.000,00	1.734.723.950,00	(299.222.050,00)	85,29		
02.2.01.17.5.1.01	Belanja Pegawai	41.700.000,00	13.930.000,00	(27.770.000,00)	33,41		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.246.000,00	1.720.793.950,00	(271.452.050,00)	86,37		
02.2.01.20	Pemeliharaan Hulin dan Berkata Alat Kesehatan/Afat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	525.078.000,00	276.894.949,00	(248.183.051,00)	52,73		
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	525.078.000,00	276.894.949,00	(248.183.051,00)	52,73		
02.2.01.20.5.1.01	Belanja Pegawai	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	0		
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.638.000,00	276.894.949,00	(246.743.051,00)	52,88		
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Media Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	89.251.000,00	38.928.020,00	(50.322.980,00)	43,62		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	89.251.000,00	38.928.020,00	(50.322.980,00)	43,62		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.251.000,00	38.928.020,00	(50.322.980,00)	43,62		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.851.033.899,00	87.559.056.993,45	(12.292.036.895,55)	87,60		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	677.521.800,00	298.316.300,00	(379.205.500,00)	44,03		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	677.521.800,00	298.316.300,00	(379.205.500,00)	44,03		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.521.800,00	298.316.300,00	(379.205.500,00)	44,03		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	110.889.600,00	77.946.900,00	(32.952.700,00)	70,29		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	110.889.600,00	77.946.900,00	(32.952.700,00)	70,29		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	54.304.300,00	46.130.900,00	(8.164.200,00)	84,87		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.585.300,00	31.807.000,00	(24.788.500,00)	56,20		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	23.750.500,00	16.520.000,00	(7.230.500,00)	69,56		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.750.500,00	16.520.000,00	(7.230.500,00)	69,56		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.750.500,00	16.520.000,00	(7.230.500,00)	69,56		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Wanita	184.225.900,00	60.514.852,00	(123.711.048,00)	32,85		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	184.225.900,00	60.514.852,00	(123.711.048,00)	32,85		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.225.900,00	60.514.852,00	(123.711.048,00)	32,85		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan perfa Usia Pendidikan Dasar	241.363.200,00	145.649.700,00	(95.713.500,00)	60,34		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	241.363.200,00	145.649.700,00	(95.713.500,00)	60,34		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.363.200,00	145.649.700,00	(95.713.500,00)	60,34		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	168.384.700,00	52.030.000,00	(116.354.700,00)	30,90		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	168.384.700,00	52.030.000,00	(116.354.700,00)	30,90		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.384.700,00	52.030.000,00	(116.354.700,00)	30,90		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	151.917.800,00	92.428.000,00	(59.489.800,00)	60,84		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	151.917.800,00	92.428.000,00	(59.489.800,00)	60,84		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.917.800,00	92.428.000,00	(59.489.800,00)	60,84		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	24.999.800,00	17.054.800,00	(7.945.000,00)	68,22		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	24.999.800,00	17.054.800,00	(7.945.000,00)	68,22		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.800,00	17.054.800,00	(7.945.000,00)	68,22		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	181.499.783,00	175.164.800,00	(6.334.983,00)	96,51		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	181.499.783,00	175.164.800,00	(6.334.983,00)	96,51		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.499.783,00	175.164.800,00	(6.334.983,00)	96,51		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	165.180.000,00	101.425.000,00	(63.755.000,00)	61,40		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	165.180.000,00	101.425.000,00	(63.755.000,00)	61,40		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.180.000,00	101.425.000,00	(63.755.000,00)	61,40		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	634.199.600,00	78.122.500,00	(556.077.100,00)	12,32		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	634.199.600,00	78.122.500,00	(556.077.100,00)	12,32		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	634.199.600,00	78.122.500,00	(556.077.100,00)	12,32		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	54.392.000,00	34.670.900,00	(19.721.100,00)	63,74		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	54.392.000,00	34.670.900,00	(19.721.100,00)	63,74		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.392.000,00	34.670.900,00	(19.721.100,00)	63,74		
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	272.026.500,00	93.212.900,00	(178.813.600,00)	34,27		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	272.026.500,00	93.212.900,00	(178.813.600,00)	34,27		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.026.500,00	93.212.900,00	(178.813.600,00)	34,27		
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	22.420.000,00	0,00	(22.420.000,00)	0		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	22.420.000,00	0,00	(22.420.000,00)	0		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.420.000,00	0,00	(22.420.000,00)	0		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	3.085.488.453,00	949.630.075,00	(2.135.858.378,00)	30,78		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	3.085.488.453,00	949.630.075,00	(2.135.858.378,00)	30,78		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.085.488.453,00	949.630.075,00	(2.135.858.378,00)	30,78		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	144.162.800,00	59.967.000,00	(84.195.800,00)	41,60		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	144.162.800,00	59.967.000,00	(84.195.800,00)	41,60		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.162.800,00	59.967.000,00	(84.195.800,00)	41,60		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	544.034.000,00	272.290.696,00	(271.743.304,00)	50,05		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	544.034.000,00	272.290.696,00	(271.743.304,00)	50,05		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.034.000,00	272.290.696,00	(271.743.304,00)	50,05		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	543.854.596,00	202.449.800,00	(341.404.796,00)	37,22		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	543.854.596,00	202.449.800,00	(341.404.796,00)	37,22		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.854.596,00	202.449.800,00	(341.404.796,00)	37,22		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	45.000.000,00	17.389.200,00	(27.610.800,00)	38,64		
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	17.389.200,00	(27.610.800,00)	38,64		
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	17.389.200,00	(27.610.800,00)	38,64		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	307.338.000,00	105.148.000,00	(202.190.000,00)	34,21		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	307.338.000,00	105.148.000,00	(202.190.000,00)	34,21		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.338.000,00	105.148.000,00	(202.190.000,00)	34,21		
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	54.678.000,00	52.257.000,00	(2.421.000,00)	95,57		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	54.678.000,00	52.257.000,00	(2.421.000,00)	95,57		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.678.000,00	52.257.000,00	(2.421.000,00)	95,57		
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	154.200.505,00	73.856.750,00	(80.343.755,00)	47,90		
02.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	154.200.505,00	73.856.750,00	(80.343.755,00)	47,90		
02.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.200.505,00	73.856.750,00	(80.343.755,00)	47,90		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.033.511.200,00	639.438.880,00	(394.072.320,00)	61,87		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.033.511.200,00	639.438.880,00	(394.072.320,00)	61,87		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.033.511.200,00	639.438.880,00	(394.072.320,00)	61,87		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19.711.265.000,00	19.679.214.550,00	(32.050.450,00)	99,84		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	19.711.265.000,00	19.679.214.550,00	(32.050.450,00)	99,84		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.711.265.000,00	19.679.214.550,00	(32.050.450,00)	99,84		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLD ke Laboratorium Rujukan/Nasional	7.080.000,00	720.000,00	(6.360.000,00)	10,17		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	7.080.000,00	720.000,00	(6.360.000,00)	10,17		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	720.000,00	(6.360.000,00)	10,17		
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	57.180.184.962,00	54.577.270.225,00	(2.602.918.737,00)	95,45		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	54.472.831.984,00	52.373.081.010,00	(2.099.750.974,00)	96,15		
02.2.02.32.5.1.01	Belanja Pegawai	1.575.499.821,00	580.174.185,00	(1.015.325.636,00)	35,56		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.897.332.173,00	51.812.907.725,00	(1.084.424.448,00)	97,95		
02.2.02.32.5.2	BELANJA MODAL	2.707.382.968,00	2.204.194.315,00	(503.188.653,00)	81,41		
02.2.02.32.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.804.390.800,00	2.008.695.315,00	204.304.715,00	111,32		
02.2.02.32.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.572.368,00	195.499.000,00	(55.073.368,00)	78,02		
02.2.02.32.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	652.400.000,00	0,00	(652.400.000,00)	0		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	13.209.692.592,00	9.212.880.320,95	(3.996.812.271,05)	69,74		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	12.405.543.788,00	8.678.549.208,95	(3.886.994.581,05)	69,89		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	7.552.123.095,00	5.673.778.933,95	(1.878.344.161,05)	75,13		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.943.420.693,00	2.934.770.273,00	(2.008.650.420,00)	59,37		
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	714.148.804,00	604.331.114,00	(109.817.690,00)	84,62		
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	506.973.704,00	460.432.883,00	(46.540.821,00)	90,98		
02.2.02.33.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	208.075.070,00	143.898.231,00	(64.176.839,00)	69,16		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	799.060.998,00	425.035.945,00	(374.025.053,00)	53,19		
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	799.060.998,00	425.035.945,00	(374.025.053,00)	53,19		
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.060.998,00	305.036.600,00	(244.024.398,00)	55,56		
02.2.02.34.5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	119.999.345,00	(130.000.655,00)	48,00		
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktulan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	72.772.000,00	37.485.900,00	(35.286.100,00)	51,51		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	72.772.000,00	37.485.900,00	(35.286.100,00)	51,51		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.772.000,00	37.485.900,00	(35.286.100,00)	51,51		
02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.740.000,00	4.580.000,00	(4.160.000,00)	52,40		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	8.740.000,00	4.580.000,00	(4.160.000,00)	52,40		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.740.000,00	4.580.000,00	(4.160.000,00)	52,40		
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	37.240.000,00	6.390.000,00	(30.860.000,00)	17,13		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	37.240.000,00	6.390.000,00	(30.860.000,00)	17,13		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.240.000,00	6.390.000,00	(30.860.000,00)	17,13		
02.2.04	Pencabutan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	748.875.700,00	484.868.350,00	(264.007.350,00)	64,92		
02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	30.000.000,00	14.388.950,00	(15.611.050,00)	47,96		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	14.388.950,00	(15.611.050,00)	47,96		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	14.388.950,00	(15.611.050,00)	47,96		
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	716.875.700,00	470.479.400,00	(246.396.300,00)	65,83		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	716.875.700,00	470.479.400,00	(246.396.300,00)	65,83		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	716.875.700,00	470.479.400,00	(246.396.300,00)	65,83		
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.070.471.000,00	480.318.890,00	(590.152.110,00)	44,87		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	84.400.000,00	57.320.000,00	(27.080.000,00)	67,91		
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	84.400.000,00	57.320.000,00	(27.080.000,00)	67,91		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	84.400.000,00	57.320.000,00	(27.080.000,00)	67,91		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.400.000,00	57.320.000,00	(27.080.000,00)	67,91		
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	986.071.000,00	422.998.890,00	(563.072.110,00)	42,90		
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	986.071.000,00	422.998.890,00	(563.072.110,00)	42,90		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	986.071.000,00	422.998.890,00	(563.072.110,00)	42,90		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.071.000,00	422.988.890,00	(563.072.110,00)	42,90		
04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	134.500.000,00	80.398.100,00	(54.101.900,00)	59,78		
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).	50.000.000,00	22.513.050,00	(27.486.950,00)	45,03		
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000,00	22.513.950,00	(27.486.050,00)	45,03		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	22.513.950,00	(27.486.050,00)	45,03		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	22.513.950,00	(27.486.050,00)	45,03		
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	44.500.000,00	36.758.150,00	(7.741.850,00)	82,60		
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	44.500.000,00	36.758.150,00	(7.741.850,00)	82,60		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.500.000,00	36.758.150,00	(7.741.850,00)	82,60		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	36.758.150,00	(7.741.850,00)	82,60		
04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.000.000,00	21.126.000,00	(18.874.000,00)	52,82		
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.000.000,00	21.126.000,00	(18.874.000,00)	52,82		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	21.126.000,00	(18.874.000,00)	52,82		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	21.126.000,00	(18.874.000,00)	52,82		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	492.448.615,00	260.244.240,00	(232.204.375,00)	52,85		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kerjasama, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	255.811.500,00	185.394.140,00	(70.417.360,00)	72,47		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Komitmen dan Pemberdayaan Masyarakat	255.811.500,00	185.394.140,00	(70.417.360,00)	72,47		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	255.811.500,00	185.394.140,00	(70.417.360,00)	72,47		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.811.500,00	185.394.140,00	(70.417.360,00)	72,47		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.397.115,00	27.410.100,00	(8.987.015,00)	75,31		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	36.397.115,00	27.410.100,00	(8.987.015,00)	75,31		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.397.115,00	27.410.100,00	(8.987.015,00)	75,31		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.397.115,00	27.410.100,00	(8.987.015,00)	75,31		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKDM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.240.000,00	47.440.000,00	(152.800.000,00)	23,69		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	200.240.000,00	47.440.000,00	(152.800.000,00)	23,69		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.240.000,00	47.440.000,00	(152.800.000,00)	23,69		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.240.000,00	47.440.000,00	(152.800.000,00)	23,69		
	SURPLUS / DEFISIT	(133.936.549.638,00)	(106.774.391.876,95)	27.162.157.761,05	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(133.936.549.638,00)	(106.774.391.876,95)	27.162.157.761,05	0		



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKPD : 1-03.2-10.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	103.718.724.007,00	97.313.465.829,00	(6.405.258.070,00)	93,82		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.134.450.463,00	15.347.862.231,00	(786.588.232,00)	95,12		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.532.685.168,00	6.329.317.427,00	(203.367.741,00)	96,89		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.144.505.168,00	5.944.787.427,00	(199.717.741,00)	96,75		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.144.505.168,00	5.944.787.427,00	(199.717.741,00)	96,75		
01.2.02.01.5.1.01	Ulangi Pegawai	6.144.505.168,00	5.944.787.427,00	(199.717.741,00)	96,75		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	388.180.000,00	384.530.000,00	(3.650.000,00)	99,08		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	388.180.000,00	384.530.000,00	(3.650.000,00)	99,08		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	388.180.000,00	384.530.000,00	(3.650.000,00)	99,06		
01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.882.851,00	303.763.599,00	(37.118.942,00)	89,11		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.988.201,00	4.988.000,00	(201,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.988.201,00	4.988.000,00	(201,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.988.201,00	4.988.000,00	(201,00)	100,00		
01.2.06.02	Penyerahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.658.800,00	45.998.625,00	(20.660.175,00)	69,01		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.658.800,00	45.998.625,00	(20.660.175,00)	69,01		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.658.800,00	45.998.625,00	(20.660.175,00)	69,01		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.131.850,00	4.836.500,00	(1.295.350,00)	78,88		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.131.850,00	4.836.500,00	(1.295.350,00)	78,88		
01.2.06.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	0		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.991.850,00	4.836.500,00	(155.350,00)	96,89		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengangkutan	29.435.000,00	28.810.400,00	(624.600,00)	97,88		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	29.435.000,00	28.810.400,00	(624.600,00)	97,88		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.435.000,00	28.810.400,00	(624.600,00)	97,00		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.995.000,00	4.972.000,00	(23.000,00)	99,54		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.995.000,00	4.972.000,00	(23.000,00)	99,54		
01.2.06.08.5.1.02	Ucuran Barang dan Jasa	4.995.000,00	4.972.000,00	(23.000,00)	99,54		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.674.000,00	214.158.384,00	(14.515.616,00)	93,65		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	228.674.000,00	214.158.384,00	(14.515.616,00)	93,65		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.674.000,00	214.158.384,00	(14.515.616,00)	93,65		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.955.723.500,00	7.642.394.000,00	(313.329.500,00)	96,06		
01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	7.955.723.500,00	7.642.394.000,00	(313.329.500,00)	96,06		
01.2.07.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.420.000,00	8.768.000,00	(5.660.000,00)	60,75		
01.2.07.03.5.1.01	Belanja Pegawai	14.420.000,00	8.768.000,00	(5.660.000,00)	60,75		
01.2.07.03.5.2	BELANJA MODAL	7.941.303.500,00	7.633.634.000,00	(307.669.500,00)	96,13		
01.2.07.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.941.303.500,00	7.633.634.000,00	(307.669.500,00)	96,13		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.100.000,00	50.091.064,00	(15.088.936,00)	76,85		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	46.000.000,00	30.921.064,00	(15.078.936,00)	67,22		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.000.000,00	30.921.064,00	(15.078.936,00)	67,22		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	30.921.064,00	(15.078.936,00)	67,22		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.680.000,00	16.670.000,00	(10.000,00)	99,94		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.680.000,00	16.670.000,00	(10.000,00)	99,94		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.680.000,00	16.670.000,00	(10.000,00)	99,94		
01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.240.018.944,00	1.022.245.031,00	(217.723.113,00)	82,44		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.940.000,00	189.435.861,00	(69.504.139,00)	73,16		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	258.940.000,00	189.435.861,00	(69.504.139,00)	73,16		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.940.000,00	189.435.861,00	(69.504.139,00)	73,16		
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	981.078.944,00	832.859.970,00	(148.218.974,00)	84,89		
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	981.078.944,00	832.859.970,00	(148.218.974,00)	84,89		
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	981.078.944,00	832.859.970,00	(148.218.974,00)	84,89		
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.177.531.800,00	5.073.250.781,00	(104.281.019,00)	97,59		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.775.959.800,00	1.744.389.914,00	(31.569.886,00)	98,22		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	101.139.800,00	100.847.000,00	(292.800,00)	99,71		
02.2.01.01.5.1	DELANJA OPERASI	101.139.800,00	100.847.000,00	(292.800,00)	99,71		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.800,00	99.707.000,00	(292.800,00)	99,71		
02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tabing	1.207.370.000,00	1.203.532.000,00	(3.838.000,00)	99,68		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	32.370.000,00	30.840.000,00	(1.530.000,00)	95,27		
02.2.01.10.5.1.01	Belanja Pegawai	17.620.000,00	18.130.000,00	(1.490.000,00)	91,54		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	14.710.000,00	(40.000,00)	99,73		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	1.175.000.000,00	1.172.692.000,00	(2.308.000,00)	99,80		
02.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.175.000.000,00	1.172.692.000,00	(2.308.000,00)	99,80		
02.2.01.10.5.2.04	Normalisasi/Restorasi Sungai	467.450.000,00	440.010.914,00	(27.439.086,00)	94,13		
02.2.01.10.5.2.04.5.1	DELANJA OPERASI	237.906.000,00	216.034.914,00	(21.870.086,00)	90,81		
02.2.01.10.5.2.04.5.1.01	Belanja Pegawai	5.600.000,00	5.400.000,00	(200.000,00)	96,43		
02.2.01.10.5.2.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.305.000,00	210.634.914,00	(21.670.086,00)	90,67		
02.2.01.10.5.2.04.5.2	BELANJA MODAL	229.545.000,00	223.976.000,00	(5.569.000,00)	97,57		
02.2.01.10.5.2.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	229.545.000,00	223.976.000,00	(5.569.000,00)	97,57		
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Rawa: HIRID Ra dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.401.575.000,00	3.329.680.870,00	(72.114.130,00)	97,86		
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Tawa	153.230.000,00	152.505.200,00	(724.000,00)	99,53		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.475.000,00	45.197.200,00	(277.800,00)	99,38		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.230.000,00	3.070.000,00	(160.000,00)	95,05		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.245.000,00	42.127.200,00	(117.800,00)	99,72		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	107.755.000,00	107.308.000,00	(447.000,00)	99,54		
02.2.02.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.755.000,00	107.308.000,00	(447.000,00)	99,54		
02.2.02.03	Pembangunan Dendung Irigasi	591.440.000,00	442.629.000,00	(58.811.000,00)	88,27		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.210.000,00	12.108.000,00	(102.000,00)	99,16		
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.440.000,00	1.438.000,00	(2.000,00)	99,86		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.770.000,00	10.670.000,00	(100.000,00)	99,07		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	489.230.000,00	430.521.000,00	(58.709.000,00)	88,00		
02.2.02.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	489.230.000,00	430.521.000,00	(58.709.000,00)	88,00		
02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.589.460.000,00	1.583.022.000,00	(10.438.000,00)	99,34		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	50.795.000,00	44.555.000,00	(6.240.000,00)	87,72		
02.2.02.08.5.1.01	Belanja Pegawai	16.610.000,00	10.380.000,00	(6.230.000,00)	62,49		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.185.000,00	34.175.000,00	(10.000,00)	99,97		
02.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	1.542.665.000,00	1.538.467.000,00	(4.198.000,00)	99,73		
02.2.02.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.542.665.000,00	1.538.467.000,00	(4.198.000,00)	99,73		
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman	544.735.000,00	542.069.800,00	(2.665.100,00)	99,51		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	44.735.000,00	43.180.800,00	(1.554.100,00)	96,53		
02.2.02.14.5.1.01	Belanja Pegawai	18.100.000,00	17.740.800,00	(360.000,00)	98,28		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.635.000,00	25.440.000,00	(194.100,00)	99,24		
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	498.889.000,00	(1.111.000,00)	99,76		
02.2.02.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000,00	498.889.000,00	(1.111.000,00)	99,76		
02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	608.710.000,00	608.634.770,00	(75.230,00)	99,98		
02.2.02.22.5.1	ULLANJA OPERASI	51.045.000,00	51.025.000,00	(20.000,00)	99,96		
02.2.02.22.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.435.000,00	49.415.000,00	(20.000,00)	99,96		
02.2.02.22.5.2	BELANJA MODAL	557.665.000,00	557.609.770,00	(55.230,00)	99,99		
02.2.02.22.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	557.665.000,00	557.609.770,00	(55.230,00)	99,99		
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	212.649.900,00	199.803.600,00	(12.846.300,00)	93,96		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	212.649.900,00	199.803.600,00	(12.846.300,00)	93,96		
03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	187.100.000,00	170.760.000,00	(11.340.000,00)	91,27		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	42.300.800,00	42.080.000,00	(220.000,00)	99,55		
03.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.060.000,00	(40.000,00)	98,05		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	140.000.000,00	128.680.000,00	(11.320.000,00)	91,91		
03.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.000.000,00	128.680.000,00	(11.320.000,00)	91,91		
03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	30.549.900,00	29.043.600,00	(1.506.300,00)	95,07		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	30.549.900,00	29.043.600,00	(1.506.300,00)	95,07		
03.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.099.900,00	18.493.600,00	(1.506.300,00)	92,47		
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	389.959.000,00	301.437.000,00	(8.522.000,00)	97,25		
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	389.959.000,00	301.437.000,00	(8.522.000,00)	97,25		
05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	26.080.000,00	17.560.000,00	(8.520.000,00)	67,33		
05.2.01.03.5.1	ULLANJA OPERASI	26.080.000,00	17.560.000,00	(8.520.000,00)	67,33		
05.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	11.480.000,00	(8.520.000,00)	57,40		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.06	Pembangunan/Periyodiasan Sub Sistem Pengolahan Setempat	283.879.000,00	283.877.000,00	(2.000,00)	100,00		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	283.879.000,00	283.877.000,00	(2.000,00)	100,00		
05.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	4.480.000,00	4.478.000,00	(2.000,00)	99,96		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.399.000,00	279.399.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI-KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.502.712.230,00	82.306.450,00	(1.420.405.780,00)	5,48		
05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.502.712.230,00	82.306.450,00	(1.420.405.780,00)	5,48		
05.2.01.02	Kondinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.502.712.230,00	82.306.450,00	(1.420.405.780,00)	5,48		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	358.715.000,00	63.108.450,00	(295.606.550,00)	17,57		
05.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.010.000,00	2.850.000,00	(4.160.000,00)	36,49		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.705.000,00	60.258.450,00	(291.446.550,00)	17,15		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.142.997.230,00	19.108.000,00	(1.123.889.230,00)	1,67		
05.2.01.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.142.997.230,00	19.108.000,00	(1.123.889.230,00)	1,67		
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.760.554.000,00	5.760.149.000,00	(405.000,00)	99,99		
06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.760.554.000,00	5.760.149.000,00	(405.000,00)	99,99		
06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	5.245.324.000,00	5.244.918.000,00	(406.000,00)	99,99		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	44.915.000,00	44.910.000,00	(5.000,00)	99,99		
06.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	20.370.000,00	20.365.000,00	(5.000,00)	99,98		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.545.000,00	24.545.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	5.200.409.000,00	5.200.009.000,00	(400.000,00)	99,99		
06.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.200.409.000,00	5.200.009.000,00	(400.000,00)	99,99		
06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	515.230.000,00	515.230.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	17.180.000,00	17.180.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	8.530.000,00	8.530.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	498.050.000,00	498.050.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	498.050.000,00	498.050.000,00	0,00	100,00		
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.891.396.880,00	6.588.364.798,00	(3.303.032.082,00)	66,61		
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Menonjolkan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi laik Fungsi Bangunan Gedung	9.891.396.880,00	6.588.364.798,00	(3.303.032.082,00)	66,61		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laku Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Perizinan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	349.750.000,00	122.000.000,00	(227.150.000,00)	35,05		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	349.750.000,00	122.000.000,00	(227.150.000,00)	35,05		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.750.000,00	122.000.000,00	(227.150.000,00)	35,05		
09.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9.541.646.880,00	6.465.764.795,00	(3.075.882.082,00)	67,76		
09.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	103.103.000,00	57.069.500,00	(46.033.500,00)	55,35		
09.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	18.020.000,00	18.010.000,00	(10.000,00)	99,94		
09.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.003.000,00	39.059.500,00	(46.023.500,00)	45,91		
09.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	9.438.543.880,00	6.408.695.295,00	(3.029.848.582,00)	67,90		
09.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.438.543.880,00	6.408.695.295,00	(3.029.848.582,00)	67,90		
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	64.503.765.734,00	63.076.638.392,00	(627.127.342,00)	98,03		
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	64.503.765.734,00	63.076.638.392,00	(627.127.342,00)	98,03		
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengusahaan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	224.409.000,00	208.405.000,00	(16.093.919,00)	92,83		
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	68.404.000,00	53.209.331,00	(15.194.669,00)	77,79		
10.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	20.620.000,00	8.130.000,00	(14.490.000,00)	39,43		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.784.000,00	45.079.331,00	(704.669,00)	98,53		
10.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	156.095.000,00	155.195.750,00	(899.250,00)	99,42		
10.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	156.095.000,00	155.195.750,00	(899.250,00)	99,42		
10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	400.927.000,00	388.827.000,00	(12.099.100,00)	96,98		
10.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	41.775.000,00	29.675.000,00	(12.099.100,00)	71,04		
10.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	5.320.000,00	2.200.000,00	(3.040.000,00)	41,46		
10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.455.000,00	27.475.000,00	(9.059.100,00)	75,15		
10.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	359.152.000,00	359.152.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	359.152.000,00	359.152.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	59.769.018.800,00	58.092.249.711,00	(5.769.092,00)	98,03		
10.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	531.479.000,00	475.374.343,00	(56.104.657,00)	89,61		
10.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	128.510.000,00	128.409.710,00	(10.290,00)	99,99		
10.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.969.000,00	346.974.633,00	(55.094.367,00)	86,29		
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	59.237.539.800,00	58.216.875.368,00	(521.664.435,00)	98,11		
10.2.01.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.580.656,00	0,00	(248.580.656,00)	0		
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.988.979.147,00	58.216.875.368,00	(772.103.779,00)	98,86		
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.335.579.431,00	2.327.739.700,00	(7.839.731,00)	99,66		
10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	50.673.000,00	42.842.000,00	(7.831.000,00)	84,55		
10.2.01.11.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	3.860.000,00	(180.000,00)	95,54		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
10.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.633.000,00	39.082.000,00	(7.651.000,00)	83,59		
10.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	2.284.906.431,00	2.284.897.700,00	(8.731,00)	100,00		
10.2.01.11.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.284.906.431,00	2.284.897.700,00	(8.731,00)	100,00		
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	824.265.000,00	817.299.000,00	(7.026.000,00)	99,15		
10.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	34.265.000,00	28.399.000,00	(5.876.000,00)	82,95		
10.2.01.12.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	5.280.000,00	(3.400.000,00)	60,74		
10.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.605.000,00	23.129.000,00	(2.476.000,00)	90,33		
10.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	790.000.000,00	788.850.000,00	(1.150.000,00)	99,85		
10.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	790.000.000,00	788.850.000,00	(1.150.000,00)	99,85		
10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	76.250.000,00	75.420.000,00	(830.000,00)	98,91		
10.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60		
10.2.01.18.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60		
10.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.850.000,00	(150.000,00)	99,80		
10.2.01.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000,00	74.850.000,00	(150.000,00)	99,80		
10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.373.226.500,00	1.366.757.000,00	(6.469.500,00)	99,58		
10.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	39.593.000,00	33.120.000,00	(6.463.000,00)	83,67		
10.2.01.19.5.1.01	Belanja Pegawai	970.000,00	970.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.613.000,00	32.150.000,00	(6.463.000,00)	83,26		
10.2.01.19.5.2	BELANJA MODAL	1.333.643.500,00	1.333.637.000,00	(6.500,00)	100,00		
10.2.01.19.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.333.643.500,00	1.333.637.000,00	(6.500,00)	100,00		
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	15.000.000,00	14.425.900,00	(574.100,00)	96,17		
11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	15.000.000,00	14.425.900,00	(574.100,00)	96,17		
11.2.02.07	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.425.900,00	(574.100,00)	96,17		
11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi	15.000.000,00	14.425.900,00	(574.100,00)	96,17		
11.2.02.07	Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	15.000.000,00	14.425.900,00	(574.100,00)	96,17		
11.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.425.900,00	(574.100,00)	96,17		
11.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.425.900,00	(574.100,00)	96,17		
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	210.661.000,00	89.227.774,00	(141.433.226,00)	42,36		
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	172.161.000,00	50.211.774,00	(121.949.226,00)	29,17		
12.2.01.01	Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	68.728.000,00	30.086.583,00	(38.641.417,00)	43,78		
12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,	68.728.000,00	30.086.583,00	(38.641.417,00)	43,78		
12.2.01.01	Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	68.728.000,00	30.086.583,00	(38.641.417,00)	43,78		
12.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	68.728.000,00	30.086.583,00	(38.641.417,00)	43,78		
12.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.728.000,00	30.086.583,00	(38.641.417,00)	43,78		
12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,	103.433.000,00	20.125.191,00	(83.307.809,00)	19,46		
12.2.01.02	Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	103.433.000,00	20.125.191,00	(83.307.809,00)	19,46		
12.2.01.02	Kabupaten/Kota	103.433.000,00	20.125.191,00	(83.307.809,00)	19,46		
12.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	103.433.000,00	20.125.191,00	(83.307.809,00)	19,46		
12.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
12.2.01.02.5.1.02	Dolanja Barang dan Jasa	102.293.000,00	18.985.191,00	(83.307.809,00)	18,56		
12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	38.500.000,00	19.016.000,00	(19.484.000,00)	49,30		
12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	38.500.000,00	19.016.000,00	(19.484.000,00)	49,39		
12.2.03.01.5.1	REKONSTRUKSI OPERASI	38.500.000,00	19.016.000,00	(19.484.000,00)	49,39		
12.2.03.01.5.1.02	Dolanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	19.016.000,00	(19.484.000,00)	49,39		
	SURPLUS / DEFISIT	(103.710.724.007,00)	(97.313.465.929,00)	6.405.258.078,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(103.710.724.007,00)	(97.313.465.929,00)	6.405.258.078,00	0		



Lampiran 1.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1-04 PERUMAHAN HAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD : 1-04.2-11.2-f3.01 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	197.882.000,00	(202.118.000,00)	49,47		
00.0.00.00.4.3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000,00	197.882.000,00	(202.118.000,00)	49,47		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	400.000.000,00	197.882.000,00	(202.118.000,00)	49,47		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	28.829.955.806,00	27.033.095.957,00	(1.796.859.854,00)	93,77		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.594.225.479,00	7.863.067.045,00	(731.158.434,00)	91,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.831.481.902,00	7.227.802.494,00	(603.679.408,00)	92,29		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.503.881.902,00	7.035.022.494,00	(558.859.408,00)	92,64		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.503.881.902,00	7.035.022.494,00	(558.859.408,00)	92,64		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.503.881.902,00	7.035.022.494,00	(558.859.408,00)	92,64		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	237.600.000,00	192.780.000,00	(44.820.000,00)	81,14		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	237.600.000,00	192.780.000,00	(44.820.000,00)	81,14		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	237.600.000,00	192.780.000,00	(44.820.000,00)	81,14		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.880.688,00	186.420.900,00	(22.459.788,00)	89,02		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.497.188,00	11.305.000,00	(1.192.188,00)	90,46		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.497.188,00	11.305.000,00	(1.192.188,00)	90,46		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.497.188,00	11.305.000,00	(1.192.188,00)	90,46		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.600.000,00	36.711.117,00	(1.888.883,00)	95,11		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.600.000,00	36.711.117,00	(1.888.883,00)	95,11		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000,00	36.711.117,00	(1.888.883,00)	95,11		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.999.600,00	11.999.000,00	(600,00)	99,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.999.600,00	11.999.000,00	(600,00)	99,99		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.999.600,00	11.999.000,00	(600,00)	99,99		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.499.900,00	12.916.900,00	(1.583.000,00)	88,08		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	14.499.900,00	12.916.900,00	(1.583.000,00)	88,08		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.499.900,00	12.916.900,00	(1.583.000,00)	88,08		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.995.000,00	2.200.000,00	(2.795.000,00)	44,04		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.995.000,00	2.200.000,00	(2.795.000,00)	44,04		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	2.200.000,00	(2.795.000,00)	44,04		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.289.000,00	111.288.883,00	(16.000.117,00)	87,43		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	127.289.000,00	111.288.883,00	(16.000.117,00)	87,43		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.289.000,00	111.288.883,00	(16.000.117,00)	87,43		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.499.564,00	60.241.861,00	(38.257.683,00)	61,10		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.499.564,00	43.745.681,00	(33.753.883,00)	56,45		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	77.499.564,00	43.745.681,00	(33.753.883,00)	56,45		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.499.564,00	43.745.681,00	(33.753.883,00)	56,45		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	12.496.200,00	(4.503.800,00)	73,51		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	12.496.200,00	(4.503.800,00)	73,51		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	12.496.200,00	(4.503.800,00)	73,51		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.263.325,00	396.601.770,00	(55.761.555,00)	87,45		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.964.725,00	269.995.103,00	(46.969.622,00)	85,18		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	316.964.725,00	269.995.103,00	(46.969.622,00)	85,18		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.964.725,00	269.995.103,00	(46.969.622,00)	85,18		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.308.600,00	118.606.667,00	(8.701.933,00)	93,10		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	33.750.000,00	25.295.000,00	(8.455.000,00)	74,95		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.545.000,00	(8.455.000,00)	71,82		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	93.648.600,00	93.311.667,00	(336.933,00)	99,64		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.648.600,00	93.311.667,00	(336.933,00)	99,64		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	200.322.500,00	128.065.500,00	(72.256.600,00)	63,93		
02.2.01	Pendulaan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.999.500,00	0,00	(9.999.500,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.999.500,00	0,00	(9.999.500,00)	0		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.999.500,00	0,00	(9.999.500,00)	0		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.500,00	0,00	(9.999.500,00)	0		
02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.999.500,00	0,00	(9.999.500,00)	0		
02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	9.999.500,00	0,00	(9.999.500,00)	0		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.999.500,00	0,00	(9.999.500,00)	0		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.500,00	0,00	(9.999.500,00)	0		
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	170.324.000,00	128.065.900,00	(42.258.100,00)	75,19		
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	170.324.000,00	128.065.900,00	(42.258.100,00)	75,19		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	170.324.000,00	128.065.900,00	(42.258.100,00)	75,19		
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	669.000,00	660.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.664.000,00	127.405.900,00	(42.258.100,00)	75,09		
02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.999.500,00	0,00	(9.999.500,00)	0		
02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.999.500,00	0,00	(9.999.500,00)	0		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.999.500,00	0,00	(9.999.500,00)	0		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.500,00	0,00	(9.999.500,00)	0		
02	PROGRAM PENYELENGGAHAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	681.001.061,00	607.000.184,00	(74.000.877,00)	89,13		
02.2.02	Penyediaan Perangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	99.993.000,00	97.722.500,00	(2.270.500,00)	97,73		
02.2.02.02	Penyediaan Perangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	99.993.000,00	97.722.500,00	(2.270.500,00)	97,73		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.993.000,00	12.022.500,00	(1.970.500,00)	85,92		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.500.000,00	680.000,00	(1.820.000,00)	27,20		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.493.000,00	11.342.500,00	(150.500,00)	98,69		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	86.000.000,00	85.700.000,00	(300.000,00)	99,65		
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.000.000,00	85.700.000,00	(300.000,00)	99,65		
02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	99.997.470,00	98.115.700,00	(1.881.770,00)	98,12		
02.2.03.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	99.997.470,00	98.115.700,00	(1.881.770,00)	98,12		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.916.294,00	21.439.800,00	(1.476.494,00)	93,56		
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	680.000,00	(570.000,00)	54,40		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.666.294,00	20.758.800,00	(908.494,00)	95,82		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	77.081.178,00	76.675.900,00	(405.278,00)	99,47		
02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.081.178,00	76.675.900,00	(405.278,00)	99,47		
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	85.049.000,00	66.597.334,00	(18.451.666,00)	78,30		
02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24.028.000,00	13.284.734,00	(10.743.266,00)	55,29		
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.028.000,00	11.821.100,00	(9.206.900,00)	56,22		
02.2.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0		
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.778.000,00	11.821.100,00	(7.956.900,00)	59,77		
02.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	3.000.000,00	1.463.834,00	(1.536.166,00)	48,79		
02.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	1.463.834,00	(1.536.166,00)	48,79		
02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	29.521.000,00	23.312.600,00	(6.208.400,00)	78,97		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	29.521.000,00	23.312.600,00	(6.208.400,00)	78,97		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.521.000,00	23.312.600,00	(6.208.400,00)	78,97		
02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	31.500.000,00	30.000.000,00	(1.500.000,00)	95,24		
02.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	31.500.000,00	30.000.000,00	(1.500.000,00)	95,24		
02.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	30.000.000,00	(1.500.000,00)	95,24		
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	355.724.216,00	304.843.550,00	(50.880.666,00)	85,70		
02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	114.621.700,00	113.969.500,00	(652.200,00)	99,43		
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	114.621.700,00	113.969.500,00	(652.200,00)	99,43		
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.621.700,00	113.969.500,00	(652.200,00)	99,43		
02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	241.102.516,00	190.874.050,00	(50.228.466,00)	79,17		
02.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	241.102.516,00	190.874.050,00	(50.228.466,00)	78,77		
02.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0		
02.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.852.516,00	190.874.050,00	(48.978.466,00)	79,59		
02.2.07	Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	13.987.600,00	13.599.600,00	(388.000,00)	97,23		
02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	13.987.600,00	13.599.600,00	(388.000,00)	97,23		
02.2.07.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.987.600,00	13.599.600,00	(388.000,00)	97,23		
02.2.07.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.987.600,00	13.599.600,00	(388.000,00)	97,23		
02.2.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.249.775,00	26.121.500,00	(128.275,00)	99,51		
02.2.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	26.249.775,00	26.121.500,00	(128.275,00)	99,51		
02.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.249.775,00	26.121.500,00	(128.275,00)	99,51		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.249.775,00	26.121.500,00	(128.275,00)	99,51		
03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	349.186.600,00	340.165.974,00	(9.020.626,00)	97,42		
03.2.01	Penerbitan Izin Pemukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman	349.186.600,00	340.165.974,00	(9.020.626,00)	97,42		
03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	349.186.600,00	340.165.974,00	(9.020.626,00)	97,42		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	349.186.600,00	340.165.974,00	(9.020.626,00)	97,42		
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.366.600,00	337.345.974,00	(9.020.626,00)	97,40		
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	300.431.350,00	215.976.608,00	(84.454.652,00)	69,89		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	235.955.350,00	205.484.198,00	(30.471.152,00)	87,08		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	69.676.900,00	59.453.698,00	(10.223.202,00)	85,33		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	69.676.900,00	59.453.698,00	(10.223.202,00)	85,33		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.676.900,00	59.453.698,00	(10.223.202,00)	85,33		
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Limas Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	55.011.150,00	39.813.000,00	(15.198.150,00)	72,37		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.011.150,00	39.813.000,00	(15.198.150,00)	72,37		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.011.150,00	39.813.000,00	(15.198.150,00)	72,37		
03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	111.267.300,00	106.197.500,00	(5.069.800,00)	95,44		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	111.267.300,00	106.197.500,00	(5.069.800,00)	95,44		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.330.000,00	1.250.000,00	(80.000,00)	93,99		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.137.300,00	25.147.500,00	(4.989.800,00)	83,44		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	100,00		
03.2.02	Pananggunan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	73.476.000,00	10.512.500,00	(62.963.500,00)	14,31		
03.2.02.01	Pemberian Informasi/Peningkatan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	73.476.000,00	10.512.500,00	(62.963.500,00)	14,31		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	73.476.000,00	10.512.500,00	(62.963.500,00)	14,31		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.476.000,00	10.512.500,00	(62.963.500,00)	14,31		
04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.129.737.000,00	1.112.949.400,00	(16.787.600,00)	98,46		
04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.129.737.000,00	1.112.949.400,00	(16.787.600,00)	98,46		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Dawahi 10 (Sepuluh) Ha	1.129.737.000,00	1.112.349.400,00	(17.387.600,00)	98,46		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.129.737.000,00	1.112.349.400,00	(17.387.600,00)	98,46		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.800.000,00	2.170.000,00	(1.630.000,00)	57,11		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.937.000,00	1.110.179.400,00	(15.757.600,00)	98,60		
05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	14.966.230.050,00	14.304.241.902,00	(661.988.148,00)	95,58		
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	14.966.230.050,00	14.304.241.902,00	(661.988.148,00)	95,58		
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	14.966.230.050,00	14.304.241.902,00	(661.988.148,00)	95,58		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.518.134.368,00	6.395.428.730,00	(122.704.638,00)	98,12		
05.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	81.060.000,00	55.070.000,00	(25.990.000,00)	67,94		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.437.074.368,00	6.340.358.730,00	(96.714.638,00)	98,50		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	8.448.095.682,00	7.908.812.172,00	(539.283.510,00)	93,62		
05.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.375.973.588,00	4.375.540.620,00	(432.978,00)	99,99		
05.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.072.122.094,00	3.533.271.552,00	(538.850.532,00)	86,77		
06	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14.723.000,00	7.740.000,00	(6.983.000,00)	52,57		
06.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	14.723.000,00	7.740.000,00	(6.983.000,00)	52,57		
06.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	14.723.000,00	7.740.000,00	(6.983.000,00)	52,57		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.723.000,00	7.740.000,00	(6.983.000,00)	52,57		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.723.000,00	7.740.000,00	(6.983.000,00)	52,57		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	38.308.000,00	17.014.000,00	(21.294.000,00)	44,41		
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.308.000,00	17.014.000,00	(21.294.000,00)	44,41		
06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	15.000.000,00	7.915.000,00	(7.085.000,00)	52,77		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	7.915.000,00	(7.085.000,00)	52,77		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.915.000,00	(7.085.000,00)	52,77		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Ditorkikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.308.000,00	9.089.000,00	(14.209.000,00)	39,04		
06.2.01.03.5.1	DILLANJA OPERASI	23.308.000,00	9.089.000,00	(14.209.000,00)	39,04		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.308.000,00	9.089.000,00	(14.209.000,00)	39,04		
08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	71.333.500,00	41.729.340,00	(29.604.160,00)	58,50		
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Komunitas/Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.333.500,00	41.729.340,00	(29.604.160,00)	58,50		
08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peruli Lingkungan Hidup	71.333.500,00	41.729.340,00	(29.604.160,00)	58,50		
08.2.01.02.5.1	DILLANJA OPERASI	71.333.500,00	41.729.340,00	(29.604.160,00)	58,50		
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.333.500,00	41.729.340,00	(29.604.160,00)	58,50		
09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	37.602.000,00	6.400.000,00	(31.202.000,00)	17,02		
09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.602.000,00	6.400.000,00	(31.202.000,00)	17,02		
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	37.602.000,00	6.400.000,00	(31.202.000,00)	17,02		
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.602.000,00	6.400.000,00	(31.202.000,00)	17,02		
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.602.000,00	6.400.000,00	(31.202.000,00)	17,02		
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19.977.500,00	3.686.000,00	(16.291.500,00)	18,45		
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.977.500,00	3.686.000,00	(16.291.500,00)	18,45		
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.977.500,00	3.686.000,00	(16.291.500,00)	18,45		
10.2.01.01.5.1	DILLANJA OPERASI	19.977.500,00	3.686.000,00	(16.291.500,00)	18,45		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.977.500,00	3.686.000,00	(16.291.500,00)	18,45		
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.427.877.786,00	2.385.659.508,00	(42.218.257,00)	98,26		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.427.877.786,00	2.385.659.508,00	(42.218.257,00)	98,26		
11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Penurunan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	805.000,00	800.000,00	(5.000,00)	99,38		
11.2.01.02.5.1	DILLANJA OPERASI	805.000,00	800.000,00	(5.000,00)	99,38		
11.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	805.000,00	800.000,00	(5.000,00)	99,38		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.144.571.916,00	2.117.148.509,00	(27.423.407,00)	98,72		
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.144.571.916,00	2.117.148.509,00	(27.423.407,00)	98,72		
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.144.571.916,00	2.117.148.509,00	(27.423.407,00)	98,72		
11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	155.495.850,00	145.441.000,00	(10.054.850,00)	93,53		
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	104.445.850,00	94.391.000,00	(10.054.850,00)	90,37		
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.445.850,00	94.391.000,00	(10.054.850,00)	90,37		
11.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	51.050.000,00	51.050.000,00	0,00	100,00		
11.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.050.000,00	51.050.000,00	0,00	100,00		
11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	127.005.000,00	122.270.000,00	(4.735.000,00)	96,27		
11.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.005.000,00	1.058.000,00	(947.000,00)	52,77		
11.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.005.000,00	1.058.000,00	(947.000,00)	52,77		
11.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	121.212.000,00	(3.788.000,00)	96,97		
11.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	121.212.000,00	(3.788.000,00)	96,97		
	SURPLUS / DEFISIT	(28.429.955.806,00)	(26.835.213.952,00)	1.594.741.854,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(28.429.955.806,00)	(26.835.213.952,00)	1.594.741.854,00	0		



Lampiran 1.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.120.826.059,00	7.949.562.097,00	(171.263.962,00)	97,89		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.053.084.884,00	5.966.004.280,00	(87.080.604,00)	98,55		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.956.000,00	(44.000,00)	99,12		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.956.000,00	(44.000,00)	99,12		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.956.000,00	(44.000,00)	99,12		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.956.000,00	(44.000,00)	99,12		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.037.558.106,00	5.093.357.389,00	(74.200.717,00)	98,69		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.586.818.106,00	5.512.417.389,00	(74.200.717,00)	98,67		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.586.818.106,00	5.512.417.389,00	(74.200.717,00)	98,67		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.586.818.106,00	5.512.417.389,00	(74.200.717,00)	98,67		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.940.000,00	80.940.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.940.000,00	80.940.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	80.940.000,00	80.940.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.186.715,00	155.617.275,00	(28.569.440,00)	84,50		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.275,00	4.980.000,00	(19.275,00)	99,61		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.999.275,00	4.980.000,00	(19.275,00)	99,61		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.275,00	4.980.000,00	(19.275,00)	99,61		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	24.782.875,00	(217.125,00)	99,05		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.782.875,00	(217.125,00)	99,05		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.782.875,00	(217.125,00)	99,05		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.445.940,00	6.385.750,00	(60.190,00)	99,07		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.445.940,00	6.385.750,00	(60.190,00)	99,07		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.445.940,00	6.385.750,00	(60.190,00)	99,07		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.360.500,00	26.795.000,00	(565.500,00)	97,93		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	27.360.500,00	26.795.000,00	(565.500,00)	97,93		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.360.500,00	26.795.000,00	(565.500,00)	97,93		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.381.000,00	92.893.650,00	(7.487.350,00)	92,54		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	100.381.000,00	92.893.650,00	(7.487.350,00)	92,54		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.381.000,00	92.893.650,00	(7.487.350,00)	92,54		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.052.700,00	10.470.000,00	(1.582.700,00)	86,87		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	12.052.700,00	10.470.000,00	(1.582.700,00)	86,87		
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.348.100,00	570.000,00	(778.100,00)	42,28		
01.2.07.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60		
01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.100,00	0,00	(90.100,00)	0		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	10.704.600,00	9.900.000,00	(804.600,00)	92,48		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.704.600,00	9.900.000,00	(804.600,00)	92,48		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.000.000,00	33.143.000,00	(60.857.000,00)	35,26		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sural Menyural	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000,00	16.693.000,00	(307.000,00)	98,19		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.693.000,00	(307.000,00)	98,19		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.693.000,00	(307.000,00)	98,19		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perongkapan Kantor	15.000.000,00	14.450.000,00	(550.000,00)	96,33		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.450.000,00	(550.000,00)	96,33		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.450.000,00	(550.000,00)	96,33		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.187.373,00	164.260.625,00	(6.926.748,00)	95,96		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.000.000,00	137.681.625,00	(1.318.375,00)	99,05		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	139.000.000,00	137.681.625,00	(1.318.375,00)	99,05		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.000.000,00	137.681.625,00	(1.318.375,00)	99,05		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.187.373,00	30.579.000,00	(1.608.373,00)	95,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	32.187.373,00	30.579.000,00	(1.608.373,00)	95,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.187.373,00	30.579.000,00	(1.608.373,00)	95,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.017.841.458,00	980.000.558,00	(37.840.900,00)	96,28		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	982.896.458,00	926.933.658,00	(55.962.800,00)	94,26		
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	694.763.800,00	680.025.758,00	(14.738.042,00)	97,88		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	694.763.800,00	680.025.758,00	(14.738.042,00)	97,88		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.423.800,00	678.685.758,00	(14.738.042,00)	97,87		
02.2.01.02	Penindakan Alas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000,00	47.522.000,00	(2.478.000,00)	95,04		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.522.000,00	(2.478.000,00)	95,04		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.522.000,00	(2.478.000,00)	95,04		
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	54.318.000,00	42.449.000,00	(11.869.000,00)	78,15		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	54.318.000,00	42.449.000,00	(11.869.000,00)	78,15		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.318.000,00	42.449.000,00	(11.869.000,00)	78,15		
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	41.194.808,00	46.644.800,00	(5.450.000,00)	97,79		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	41.194.808,00	46.644.800,00	(5.450.000,00)	97,79		
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.322.058,00	32.404.800,00	(917.258,00)	97,52		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	35.622.720,00	34.900.000,00	(722.720,00)	97,97		
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.622.720,00	34.900.000,00	(722.720,00)	97,97		
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongrejo dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termaruk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa I hak Asasi Manusia	33.588.500,00	32.328.000,00	(1.260.500,00)	96,25		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	33.588.500,00	32.328.000,00	(1.260.500,00)	96,25		
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.338.500,00	11.958.000,00	(380.500,00)	96,92		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00		
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00		
02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kerjasama dalam Formasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.031.250,00	55.934.300,00	(4.096.950,00)	93,18		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	60.031.250,00	55.934.300,00	(4.096.950,00)	93,18		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.931.250,00	55.934.300,00	(4.996.950,00)	93,18		
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	54.945.000,00	53.096.900,00	(1.848.100,00)	96,64		
02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	54.945.000,00	53.096.900,00	(1.848.100,00)	96,64		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.945.000,00	53.096.900,00	(1.848.100,00)	96,64		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.945.000,00	53.096.900,00	(1.848.100,00)	96,64		
04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.040.999.707,00	1.003.557.250,00	(45.442.457,00)	96,67		
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahari Berbahaya dan Beracun Kabakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.004.549.807,00	978.071.750,00	(26.478.057,00)	97,45		
04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	979.314.807,00	956.951.750,00	(22.363.057,00)	97,72		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	797.917.445,00	790.037.750,00	(7.879.695,00)	99,01		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.160.000,00	(680.000,00)	82,29		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.077.445,00	786.877.750,00	(7.199.695,00)	99,09		
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	181.397.362,00	166.914.000,00	(14.483.362,00)	92,02		
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.860.815,00	43.800.000,00	(3.960.815,00)	91,71		
04.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.527.547,00	123.014.000,00	(10.513.547,00)	92,13		
04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	25.235.000,00	22.020.000,00	(3.215.000,00)	87,26		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.235.000,00	22.020.000,00	(3.215.000,00)	87,26		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.235.000,00	22.020.000,00	(3.215.000,00)	87,26		
04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	19.999.900,00	17.540.000,00	(2.459.900,00)	87,70		
04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	19.999.900,00	17.540.000,00	(2.459.900,00)	87,70		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.999.900,00	17.540.000,00	(2.459.900,00)	87,70		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.900,00	17.540.000,00	(2.459.900,00)	87,70		
04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	24.450.000,00	7.045.500,00	(17.404.500,00)	28,82		
04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	24.450.000,00	7.045.500,00	(17.404.500,00)	28,82		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.450.000,00	7.045.500,00	(17.404.500,00)	28,82		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	7.045.500,00	(17.404.500,00)	28,82		
	SURPLUS / DEFISIT	(8.120.826.059,00)	(7.949.562.097,00)	171.263.962,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.120.826.059,00)	(7.949.562.097,00)	171.263.962,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : 1-05.0-00.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.294.025.713,00	4.700.083.166,00	(498.812.247,00)	90,58		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.816.128.704,00	3.488.993.226,00	(329.135.478,00)	91,38		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.186.812.952,00	2.999.635.384,00	(197.277.568,00)	94,14		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.112.197.952,00	2.917.345.384,00	(194.852.568,00)	93,74		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.112.197.952,00	2.917.345.384,00	(194.852.568,00)	93,74		
01.2.02.01.5.1.01	Umlah Pegawai	3.112.197.952,00	2.917.345.384,00	(194.852.568,00)	93,74		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.715.000,00	82.290.000,00	(2.425.000,00)	97,14		
01.2.02.02.5.1	RIF. ANJA OPERASI	84.715.000,00	82.290.000,00	(2.425.000,00)	97,14		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	84.715.000,00	82.290.000,00	(2.425.000,00)	97,14		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.116.200,00	186.710.555,00	(10.397.645,00)	94,73		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.990.000,00	3.409.685,00	(1.580.315,00)	68,21		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.990.000,00	3.409.685,00	(1.580.315,00)	68,21		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	3.409.685,00	(1.580.315,00)	68,21		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	28.000.000,00	28.461.070,00	(538.930,00)	98,14		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	28.461.070,00	(538.930,00)	98,14		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.461.070,00	(538.930,00)	98,14		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.997.200,00	5.958.800,00	(38.400,00)	99,36		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.997.200,00	5.958.800,00	(38.400,00)	99,36		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.997.200,00	5.958.800,00	(38.400,00)	99,36		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Ponggandaan	19.575.000,00	13.424.400,00	(6.150.600,00)	68,58		
01.2.06.05.5.1	RIF. ANJA OPERASI	19.575.000,00	13.424.400,00	(6.150.600,00)	68,58		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.575.000,00	13.424.400,00	(6.150.600,00)	68,58		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.000.000,00	7.412.800,00	(587.400,00)	92,66		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.412.800,00	(587.400,00)	92,66		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.412.800,00	(587.400,00)	92,66		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.545.000,00	128.052.000,00	(1.493.000,00)	98,85		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	129.545.000,00	128.052.000,00	(1.493.000,00)	98,85		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.545.000,00	128.052.000,00	(1.493.000,00)	98,85		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.000.000,00	33.780.176,00	(2.219.824,00)	93,83		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	30.780.176,00	(2.219.824,00)	93,27		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	30.780.176,00	(2.219.824,00)	93,27		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	30.780.176,00	(2.219.824,00)	93,27		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.099.552,00	268.858.111,00	(119.240.441,00)	69,20		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.100.000,00	130.788.201,00	(52.311.799,00)	71,43		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	183.100.000,00	130.788.201,00	(52.311.799,00)	71,43		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.100.000,00	130.788.201,00	(52.311.799,00)	71,43		
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	125.000.000,00	65.668.538,00	(59.331.462,00)	52,53		
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	65.668.538,00	(59.331.462,00)	52,53		
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	65.668.538,00	(59.331.462,00)	52,53		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	22.625.622,00	(7.374.378,00)	75,42		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	22.625.622,00	(7.374.378,00)	75,42		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	22.625.622,00	(7.374.378,00)	75,42		
01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.999.552,00	49.776.750,00	(222.802,00)	99,55		
01.2.09.08.5.2	BELANJA MODAL	49.999.552,00	49.776.750,00	(222.802,00)	99,55		
01.2.09.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.999.552,00	49.776.750,00	(222.802,00)	99,55		
03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.476.707.000,00	1.307.090.200,00	(169.706.760,00)	88,51		
03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	43.667.599,00	22.931.891,00	(20.735.708,00)	52,51		
03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	43.667.599,00	22.931.891,00	(20.735.708,00)	52,51		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	43.667.599,00	22.931.891,00	(20.735.708,00)	52,51		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.667.599,00	22.931.891,00	(20.735.708,00)	52,51		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.115.700.122,00	1.039.685.725,00	(76.022.397,00)	93,19		
03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	487.265.799,00	478.687.600,00	(8.578.199,00)	98,24		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	487.265.799,00	478.687.600,00	(8.578.199,00)	98,24		
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.560.000,00	(240.000,00)	91,43		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.465.799,00	476.127.600,00	(8.338.199,00)	98,28		
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	48.033.000,00	29.698.025,00	(18.334.975,00)	61,83		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	48.033.000,00	29.698.025,00	(18.334.975,00)	61,83		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.033.000,00	29.698.025,00	(18.334.975,00)	61,83		
03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	391.561.343,00	389.418.553,00	(8.142.790,00)	99,59		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	125.211.343,00	117.258.553,00	(7.952.790,00)	93,65		
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.000.000,00	3.050.000,00	(1.950.000,00)	61,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.211.343,00	114.208.553,00	(6.002.790,00)	95,01		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	266.350.000,00	266.160.000,00	(190.000,00)	99,93		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	266.350.000,00	266.160.000,00	(190.000,00)	99,93		
03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	82.799.900,00	62.359.680,00	(20.440.220,00)	75,31		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	82.799.900,00	62.359.680,00	(20.440.220,00)	75,31		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.799.900,00	62.359.680,00	(20.440.220,00)	75,31		
03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	41.969.000,00	36.369.951,00	(5.599.049,00)	86,66		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	41.969.000,00	36.369.951,00	(5.599.049,00)	86,66		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.969.000,00	36.369.951,00	(5.599.049,00)	86,66		
03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	64.079.080,00	49.151.936,00	(14.927.144,00)	76,71		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	64.079.080,00	49.151.936,00	(14.927.144,00)	76,71		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.079.080,00	49.151.936,00	(14.927.144,00)	76,71		
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	317.421.266,00	244.472.624,00	(72.948.642,00)	77,02		
03.2.03.02	BELANJA OPERASI	191.954.992,00	151.060.265,00	(40.894.727,00)	78,70		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.954.992,00	151.060.265,00	(40.894.727,00)	78,70		
03.2.03.03	Pencarian, Perolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	18.689.296,00	15.404.900,00	(3.284.396,00)	82,43		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.689.296,00	15.404.900,00	(3.284.396,00)	82,43		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.689.296,00	15.404.900,00	(3.284.396,00)	82,43		
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	106.777.000,00	78.007.459,00	(28.769.541,00)	73,06		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	106.777.000,00	78.007.459,00	(28.769.541,00)	73,06		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	0		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.527.000,00	78.007.468,00	(22.519.541,00)	77,80		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.294.925.713,00)	(4.796.083.466,00)	498.842.247,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.294.925.713,00)	(4.796.083.466,00)	498.842.247,00	0		

Padang Aro, 29 Juli 2024

BUPATI



ASWARUNAS





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL

SKPD : 1-06.2-13.0-00.01 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.302.911.328,00	5.017.963.716,00	(374.947.612,00)	93,03		
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.119.141.278,00	3.899.660.584,00	(225.480.694,00)	94,53		
01.2.02	Administrasi Keuangan Purungkat Daerah	3.559.697.400,00	3.397.494.364,00	(168.193.036,00)	95,28		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.485.987.400,00	3.208.504.364,00	(167.483.036,00)	95,17		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.485.987.400,00	3.208.504.364,00	(167.483.036,00)	95,17		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.646.022.888,00	2.694.770.064,00	(151.252.824,00)	94,60		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	819.964.512,00	603.734.300,00	(16.230.212,00)	97,39		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.700.000,00	92.990.000,00	(710.000,00)	99,24		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	93.700.000,00	92.990.000,00	(710.000,00)	99,24		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	93.700.000,00	92.990.000,00	(710.000,00)	99,24		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.641.058,00	194.088.517,00	(17.655.541,00)	91,70		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.987.098,00	4.987.000,00	(98,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.987.098,00	4.987.000,00	(98,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.987.098,00	4.987.000,00	(98,00)	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.360.000,00	34.359.875,00	(125,00)	100,00		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.360.000,00	34.359.875,00	(125,00)	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.360.000,00	34.359.875,00	(125,00)	100,00		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.536.160,00	9.204.000,00	(332.160,00)	96,52		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.536.160,00	9.204.000,00	(332.160,00)	96,52		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.536.160,00	9.204.000,00	(332.160,00)	96,52		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	32.877.800,00	30.577.676,00	(2.300.124,00)	93,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	32.877.800,00	30.577.678,10	(2.300.124,00)	93,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.877.800,00	30.577.676,00	(2.300.124,00)	93,00		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.985.000,00	5.945.000,00	(40.000,00)	99,33		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.985.000,00	5.945.000,00	(40.000,00)	99,33		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.985.000,00	5.945.000,00	(40.000,00)	99,33		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.898.000,00	109.914.966,00	(14.983.034,00)	88,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	124.898.000,00	109.914.966,00	(14.983.034,00)	88,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.898.000,00	109.914.966,00	(14.983.034,00)	88,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.131.800,00	28.251.000,00	(2.880.800,00)	90,75		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.381.800,00	7.681.000,00	(700.000,00)	91,64		
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60		
01.2.07.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	7.131.800,00	7.111.000,00	(20.800,00)	99,71		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.131.800,00	7.111.000,00	(20.800,00)	99,71		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.750.000,00	20.570.000,00	(2.180.000,00)	90,42		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60		
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	21.500.000,00	20.000.000,00	(1.500.000,00)	93,02		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.500.000,00	20.000.000,00	(1.500.000,00)	93,02		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.005.850,00	42.289.450,00	(716.594,00)	98,33		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.996.050,00	25.332.256,00	(663.794,00)	97,45		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.996.050,00	25.332.256,00	(663.794,00)	97,45		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.996.050,00	25.332.256,00	(663.794,00)	97,45		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.010.000,00	11.957.200,00	(52.800,00)	99,56		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.010.000,00	11.957.200,00	(52.800,00)	99,56		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.010.000,00	11.957.200,00	(52.800,00)	99,56		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.671.970,00	230.637.247,00	(42.034.723,00)	84,71		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.500.000,00	207.597.997,00	(33.902.003,00)	85,96		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	241.500.000,00	207.597.997,00	(33.902.003,00)	85,96		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.500.000,00	207.597.997,00	(33.902.003,00)	85,96		



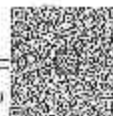
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.171.970,00	29.039.250,00	(2.132.720,00)	93,16		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	31.171.970,00	29.039.250,00	(2.132.720,00)	93,16		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.171.970,00	29.039.250,00	(2.132.720,00)	93,16		
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	115.935.800,00	78.166.500,00	(37.769.300,00)	67,42		
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	115.935.800,00	78.166.500,00	(37.769.300,00)	67,42		
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	115.935.800,00	78.166.500,00	(37.769.300,00)	67,42		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	115.935.800,00	78.166.500,00	(37.769.300,00)	67,42		
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.685.800,00	76.916.500,00	(37.769.300,00)	67,07		
02	PROGRAM PENATAAN DESA	7.043.900,00	6.965.000,00	(78.900,00)	98,88		
02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	7.043.900,00	6.965.000,00	(78.900,00)	98,88		
02.2.01.03	Facilitasi Penataan Kewenangan Desa	7.043.900,00	6.965.000,00	(78.900,00)	98,88		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.043.900,00	6.965.000,00	(78.900,00)	98,88		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.043.900,00	6.965.000,00	(78.900,00)	98,88		
03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	39.421.000,00	38.855.100,00	(565.900,00)	98,56		
03.2.01	Facilitasi Kerja Sama antar Desa	39.421.000,00	38.855.100,00	(565.900,00)	98,56		
03.2.01.02	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	39.421.000,00	38.855.100,00	(565.900,00)	98,56		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.421.000,00	38.855.100,00	(565.900,00)	98,56		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.421.000,00	38.855.100,00	(565.900,00)	98,56		
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	267.231.250,00	195.617.051,00	(71.614.199,00)	73,20		
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Partisipatif Sosial	116.269.900,00	80.105.200,00	(36.164.700,00)	77,50		
04.2.01.01	Penyediaan Pemukiman	58.569.900,00	43.329.000,00	(15.240.900,00)	73,98		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	58.569.900,00	43.329.000,00	(15.240.900,00)	73,98		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.569.900,00	43.329.000,00	(15.240.900,00)	73,98		
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	57.700.000,00	46.776.200,00	(10.923.800,00)	81,07		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	57.700.000,00	46.776.200,00	(10.923.800,00)	81,07		
04.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.950.000,00	570.100,00	(1.380.000,00)	29,23		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.750.000,00	46.206.200,00	(9.543.800,00)	82,88		
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Partisipatif Sosial	150.961.350,00	105.511.851,00	(45.449.499,00)	69,89		
04.2.02.03	Penyediaan Pemukiman	150.961.350,00	105.511.851,00	(45.449.499,00)	69,89		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	150.961.350,00	105.511.851,00	(45.449.499,00)	69,89		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.200.000,00	570.000,00	(1.630.000,00)	25,91		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.761.350,00	104.941.851,00	(43.819.499,00)	70,64		
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	456.323.600,00	450.169.117,00	(6.154.483,00)	98,65		
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	456.323.600,00	450.169.117,00	(6.154.483,00)	98,65		
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	419.238.600,00	413.461.217,00	(5.777.383,00)	98,62		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	419.238.600,00	413.461.217,00	(5.777.383,00)	98,62		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.238.600,00	413.461.217,00	(5.777.383,00)	98,62		
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	37.085.000,00	36.707.900,00	(377.100,00)	98,98		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	37.085.000,00	36.707.900,00	(377.100,00)	98,98		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.085.000,00	36.707.900,00	(377.100,00)	98,98		
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	134.464.900,00	126.032.679,00	(8.432.221,00)	93,73		
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	134.464.900,00	126.032.679,00	(8.432.221,00)	93,73		
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	134.464.900,00	126.032.679,00	(8.432.221,00)	93,73		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	134.464.900,00	126.032.679,00	(8.432.221,00)	93,73		
05.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.214.900,00	125.462.679,00	(7.752.221,00)	94,18		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	116.916.800,00	103.419.400,00	(13.497.400,00)	88,46		
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.916.800,00	103.419.400,00	(13.497.400,00)	88,46		
05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	31.453.000,00	30.989.600,00	(463.400,00)	98,53		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.453.000,00	30.989.600,00	(463.400,00)	98,53		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.453.000,00	30.989.600,00	(463.400,00)	98,53		
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	27.768.000,00	20.995.000,00	(6.773.000,00)	75,61		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	27.768.000,00	20.995.000,00	(6.773.000,00)	75,61		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.768.000,00	20.905.000,00	(6.773.000,00)	75,81		
05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	57.695.800,00	51.434.800,00	(6.261.000,00)	89,15		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	57.695.800,00	51.434.800,00	(6.261.000,00)	89,15		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.695.800,00	51.434.800,00	(6.261.000,00)	89,15		
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	126.432.800,00	115.078.285,00	(11.354.515,00)	91,02		
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	126.432.800,00	115.078.285,00	(11.354.515,00)	91,02		
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	89.176.000,00	91.378.285,00	(7.798.515,00)	92,14		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	89.176.000,00	91.378.285,00	(7.798.515,00)	92,14		
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.926.000,00	90.808.285,00	(7.118.515,00)	92,73		
06.2.01.02	Penyediaan Sandang	27.256.000,00	23.700.000,00	(3.556.000,00)	86,95		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.256.000,00	23.700.000,00	(3.556.000,00)	86,95		
06.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.006.000,00	23.130.000,00	(2.876.000,00)	88,94		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.382.911.328,00)	(5.007.963.716,00)	374.947.612,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.382.911.328,00)	(5.007.963.716,00)	374.947.612,00	0		



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.07 TENAGA KEHJA

SKPD : 2-07.3-32.0-00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.056.814.041,00	2.813.296.038,00	(243.518.043,00)	92,03		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.580.864.083,00	2.432.624.338,00	(148.239.745,00)	93,93		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.158.201.716,00	2.007.773.060,00	(150.428.656,00)	93,03		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.085.851.716,00	1.960.118.080,00	(125.733.636,00)	93,97		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.085.051.716,00	1.960.118.080,00	(125.733.636,00)	93,97		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.085.851.716,00	1.960.118.080,00	(125.733.636,00)	93,97		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72.350.000,00	47.655.000,00	(24.695.000,00)	65,87		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	72.350.000,00	47.655.000,00	(24.695.000,00)	65,87		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	72.350.000,00	47.655.000,00	(24.695.000,00)	65,87		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.053.527,00	141.873.158,00	(180.369,00)	99,87		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.078.270,00	7.070.000,00	(8.270,00)	99,88		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.078.270,00	7.070.000,00	(8.270,00)	99,88		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.078.270,00	7.070.000,00	(8.270,00)	99,88		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.495.000,00	5.494.000,00	(1.000,00)	99,97		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.495.000,00	5.494.000,00	(1.000,00)	99,97		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.495.000,00	5.494.000,00	(1.000,00)	99,97		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.452.457,00	26.445.400,00	(7.057,00)	99,97		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	26.452.457,00	26.445.400,00	(7.057,00)	99,97		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.452.457,00	26.445.400,00	(7.057,00)	99,97		
01.2.06.08	fasilitasi Kunjungan Tamu	4.995.000,00	4.960.000,00	(35.000,00)	99,30		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.995.000,00	4.960.000,00	(35.000,00)	99,30		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	4.960.000,00	(35.000,00)	99,30		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.032.000,00	78.903.758,00	(128.242,00)	99,84		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	79.032.000,00	78.903.758,00	(128.242,00)	99,84		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.032.000,00	78.903.758,00	(128.242,00)	99,84		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.514.458,00	51.933.470,00	(2.580.988,00)	95,27		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.514.458,00	38.233.470,00	(1.280.988,00)	96,76		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.514.458,00	38.233.470,00	(1.280.988,00)	96,76		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.514.458,00	38.233.470,00	(1.280.988,00)	96,76		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	11.200.000,00	(1.300.000,00)	89,60		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	11.200.000,00	(1.300.000,00)	89,60		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	11.200.000,00	(1.300.000,00)	89,60		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.094.382,00	231.044.650,00	(4.049.732,00)	98,28		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.500.000,00	162.481.250,00	(4.018.750,00)	97,59		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	166.500.000,00	162.481.250,00	(4.018.750,00)	97,59		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.500.000,00	162.481.250,00	(4.018.750,00)	97,59		
01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.594.382,00	68.563.400,00	(30.982,00)	99,95		
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	68.594.382,00	68.563.400,00	(30.982,00)	99,95		
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.594.382,00	68.563.400,00	(30.982,00)	99,95		
02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	80.000.000,00	79.900.000,00	(100.000,00)	99,88		
02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	80.000.000,00	79.900.000,00	(100.000,00)	99,88		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	80.000.000,00	79.900.000,00	(100.000,00)	99,88		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.900.000,00	(100.000,00)	99,88		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.900.000,00	(100.000,00)	99,88		
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	217.034.998,00	200.849.300,00	(16.185.698,00)	92,53		
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	217.034.998,00	196.929.300,00	(20.105.698,00)	90,27		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	202.034.998,00	196.829.300,00	(5.105.698,00)	97,47		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	202.034.998,00	196.829.300,00	(5.105.698,00)	97,47		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.034.998,00	196.829.300,00	(5.105.698,00)	97,47		
03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.000.000,00	11.920.000,00	(3.080.000,00)	79,47		
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.000.000,00	11.920.000,00	(3.080.000,00)	79,47		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	11.920.000,00	(3.080.000,00)	79,47		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.920.000,00	(3.080.000,00)	79,47		
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	17.600.000,00	12.140.000,00	(5.460.000,00)	68,98		
04.2.03	Pengetahuan Informasi Pasar Kerja	17.600.000,00	12.140.000,00	(5.460.000,00)	68,98		
04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12.750.000,00	9.510.000,00	(3.240.000,00)	74,59		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.750.000,00	9.510.000,00	(3.240.000,00)	74,59		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	9.510.000,00	(3.240.000,00)	74,59		
04.2.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	4.850.000,00	2.630.000,00	(2.220.000,00)	54,23		
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.850.000,00	2.630.000,00	(2.220.000,00)	54,23		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	2.630.000,00	(2.220.000,00)	54,23		
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	152.315.000,00	79.712.400,00	(72.602.600,00)	52,33		
05.2.01	Pengsahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang / hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	152.315.000,00	79.712.400,00	(72.602.600,00)	52,33		
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	152.315.000,00	79.712.400,00	(72.602.600,00)	52,33		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	152.315.000,00	79.712.400,00	(72.602.600,00)	52,33		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.315.000,00	79.712.400,00	(72.602.600,00)	52,33		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.058.014.081,00)	(2.813.226.038,00)	243.588.043,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.056.814.081,00)	(2.813.226.038,00)	243.588.043,00	0		

Padang Aro, 29 Juli 2024

BUPATI



KEMUNAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

SKPD : 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.8.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.350.454.840,00	3.924.175.969,00	(426.278.871,00)	90,20		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.577.043.940,00	3.250.420.981,00	(318.618.959,00)	91,09		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.380.000,00	9.365.000,00	(15.000,00)	99,84		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.380.000,00	9.365.000,00	(15.000,00)	99,84		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.380.000,00	9.365.000,00	(15.000,00)	99,84		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.380.000,00	9.365.000,00	(15.000,00)	99,84		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.080.417.389,00	2.781.930.843,00	(298.516.556,00)	90,31		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.985.077.399,00	2.695.835.843,00	(289.241.556,00)	90,31		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.985.077.399,00	2.695.835.843,00	(289.241.556,00)	90,31		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.985.077.399,00	2.695.835.843,00	(289.241.556,00)	90,31		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.370.000,00	86.095.000,00	(9.275.000,00)	90,27		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	95.370.000,00	86.095.000,00	(9.275.000,00)	90,27		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	95.370.000,00	86.095.000,00	(9.275.000,00)	90,27		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.938.246,00	167.968.434,00	(5.969.812,00)	96,51		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.606,00	4.999.000,00	(606,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.999.606,00	4.999.000,00	(606,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	4.999.606,00	4.999.000,00	(606,00)	99,99		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	35.000.000,00	34.995.125,00	(4.875,00)	99,99		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.995.125,00	(4.875,00)	99,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.995.125,00	(4.875,00)	99,99		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.994.840,00	6.982.000,00	(12.840,00)	99,92		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.994.840,00	6.982.000,00	(12.840,00)	99,92		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.994.840,00	6.982.000,00	(12.840,00)	99,92		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	24.748.800,00	24.713.100,00	(35.700,00)	99,86		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	24.748.800,00	24.713.100,00	(35.700,00)	99,86		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.748.800,00	24.713.100,00	(35.700,00)	99,86		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000,00	7.193.800,00	(6.200,00)	99,91		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.193.800,00	(6.200,00)	99,91		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.193.800,00	(6.200,00)	99,91		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.995.000,00	88.985.409,00	(6.009.591,00)	93,67		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	94.995.000,00	88.985.409,00	(6.009.591,00)	93,67		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.995.000,00	88.985.409,00	(6.009.591,00)	93,67		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.172.400,00	73.385.659,00	(4.786.741,00)	93,88		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.172.400,00	58.597.159,00	(4.575.241,00)	92,76		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.172.400,00	58.597.159,00	(4.575.241,00)	92,76		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.172.400,00	58.597.159,00	(4.575.241,00)	92,76		
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	12.788.500,00	(211.500,00)	98,37		
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.788.500,00	(211.500,00)	98,37		
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.788.500,00	(211.500,00)	98,37		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.105.895,00	225.877.045,00	(9.228.850,00)	96,07		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.327.000,00	176.633.045,00	(8.693.955,00)	95,31		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	185.327.000,00	176.633.045,00	(8.693.955,00)	95,31		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.327.000,00	176.633.045,00	(8.693.955,00)	95,31		
01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.778.895,00	49.244.000,00	(534.895,00)	98,93		
01.2.09.08.5.1	BELANJA OPERASI	49.778.895,00	49.244.000,00	(534.895,00)	98,93		
01.2.09.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.778.895,00	49.244.000,00	(534.895,00)	98,93		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.753.131,00	15.744.000,00	(9.131,00)	99,94		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.753.131,00	15.744.000,00	(9.131,00)	99,94		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	34.025.784,00	33.500.000,00	(525.784,00)	98,45		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.025.784,00	33.500.000,00	(525.784,00)	98,45		
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	507.370.000,00	480.000.652,00	(27.369.348,00)	94,58		
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	501.586.000,00	455.376.052,00	(46.211.948,00)	90,79		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Hunian Administrasi Kependudukan	13.554.000,00	9.105.000,00	(4.449.000,00)	67,18		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.554.000,00	9.105.000,00	(4.449.000,00)	67,18		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.554.000,00	9.105.000,00	(4.449.000,00)	67,18		
02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	248.350.000,00	245.128.570,00	(3.221.430,00)	98,70		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	248.350.000,00	245.128.570,00	(3.221.430,00)	98,70		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.350.000,00	245.128.570,00	(3.221.430,00)	98,70		
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	117.583.000,00	95.483.532,00	(22.099.468,00)	81,21		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	117.583.000,00	95.483.532,00	(22.099.468,00)	81,21		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.583.000,00	95.483.532,00	(22.099.468,00)	81,21		
02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pulaporan Peristiwa Kependudukan	122.101.000,00	105.658.050,00	(16.442.950,00)	86,53		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	122.101.000,00	105.658.050,00	(16.442.950,00)	86,53		
02.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.305.000,00	27.268.050,00	(11.036.950,00)	60,38		
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	82.116.000,00	77.710.000,00	(4.406.000,00)	94,83		
02.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.116.000,00	77.710.000,00	(4.406.000,00)	94,83		
02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	5.782.000,00	4.714.600,00	(1.067.400,00)	81,54		
02.2.03.01	Kordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.782.000,00	4.714.600,00	(1.067.400,00)	81,54		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.782.000,00	4.714.600,00	(1.067.400,00)	81,54		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.782.000,00	4.714.600,00	(1.067.400,00)	81,54		
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	132.610.800,00	102.330.125,00	(30.280.675,00)	77,17		
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	75.119.000,00	57.494.700,00	(17.625.200,00)	76,54		
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.605.900,00	19.958.700,00	(5.647.200,00)	77,95		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.605.900,00	19.958.700,00	(5.647.200,00)	77,95		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.605.900,00	19.958.700,00	(5.647.200,00)	77,95		
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	36.850.000,00	28.732.000,00	(8.118.000,00)	77,97		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	36.850.000,00	28.732.000,00	(8.118.000,00)	77,97		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.850.000,00	28.732.000,00	(8.118.000,00)	77,97		
03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Disseminasi Data Pencatatan Sipil	12.664.000,00	8.804.000,00	(3.860.000,00)	69,52		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.664.000,00	8.804.000,00	(3.860.000,00)	69,52		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.664.000,00	8.804.000,00	(3.860.000,00)	69,52		
03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	57.491.000,00	44.835.425,00	(12.655.575,00)	77,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	15.266.000,00	15.208.800,00	(57.200,00)	99,63		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.266.000,00	15.208.800,00	(57.200,00)	99,63		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.266.000,00	15.208.800,00	(57.200,00)	99,63		
03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	13.415.000,00	5.995.125,00	(7.419.875,00)	44,69		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.415.000,00	5.995.125,00	(7.419.875,00)	44,69		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.415.000,00	5.995.125,00	(7.419.875,00)	44,69		
03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	28.810.000,00	23.631.500,00	(5.178.500,00)	82,03		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	28.810.000,00	23.631.500,00	(5.178.500,00)	82,03		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.810.000,00	23.631.500,00	(5.178.500,00)	82,03		
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	93.900.000,00	74.007.961,00	(19.892.039,00)	78,75		
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	21.921.000,00	16.959.000,00	(4.962.000,00)	77,36		
04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	21.921.000,00	16.959.000,00	(4.962.000,00)	77,36		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.921.000,00	16.959.000,00	(4.962.000,00)	77,36		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.921.000,00	16.959.000,00	(4.962.000,00)	77,36		
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	72.059.000,00	57.049.961,00	(15.010.039,00)	79,17		
04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.069.000,00	22.056.961,00	(3.012.039,00)	87,99		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.069.000,00	22.056.961,00	(3.012.039,00)	87,99		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.069.000,00	22.056.961,00	(3.012.039,00)	87,99		
04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	33.740.000,00	21.840.000,00	(11.900.000,00)	64,73		
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	33.740.000,00	21.840.000,00	(11.900.000,00)	64,73		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.740.000,00	21.840.000,00	(11.900.000,00)	64,73		
04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.250.000,00	13.152.000,00	(98.000,00)	99,26		
04.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.250.000,00	13.152.000,00	(98.000,00)	99,26		
04.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	13.152.000,00	(98.000,00)	99,26		
05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	39.450.000,00	29.320.250,00	(10.129.750,00)	74,32		
05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	39.450.000,00	29.320.250,00	(10.129.750,00)	74,32		
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	39.450.000,00	29.320.250,00	(10.129.750,00)	74,32		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.450.000,00	29.320.250,00	(10.129.750,00)	74,32		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.450.000,00	29.320.250,00	(10.129.750,00)	74,32		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.350.454.840,00)	(3.924.175.969,00)	426.278.871,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.350.454.840,00)	(3.924.175.969,00)	426.278.871,00	0		







PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SKPD : 2-14.2-08.0-00.01 Dinas Pengendalian Periduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.833.998.254,00	7.207.225.220,00	(546.073.034,00)	93,03		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.975.884.042,00	2.869.230.112,00	(106.644.930,00)	96,42		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.597.040.279,00	2.509.996.648,00	(87.113.631,00)	98,65		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.510.870.279,00	2.425.986.648,00	(84.883.631,00)	96,62		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.510.870.279,00	2.425.986.648,00	(84.883.631,00)	96,62		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.510.870.279,00	2.425.986.648,00	(84.883.631,00)	96,62		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86.170.000,00	83.940.000,00	(2.230.000,00)	97,41		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	86.170.000,00	83.940.000,00	(2.230.000,00)	97,41		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	86.170.000,00	83.940.000,00	(2.230.000,00)	97,41		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.310.538,00	180.157.104,00	(6.159.435,00)	95,69		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.341,00	4.900.000,00	(97.341,00)	98,05		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.997.341,00	4.900.000,00	(97.341,00)	98,05		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.997.341,00	4.900.000,00	(97.341,00)	98,05		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.975.000,00	20.720.000,00	(2.255.000,00)	90,18		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.975.000,00	20.720.000,00	(2.255.000,00)	90,18		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.975.000,00	20.720.000,00	(2.255.000,00)	90,18		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.999.598,00	5.024.000,00	(975.598,00)	83,74		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.999.598,00	5.024.000,00	(975.598,00)	83,74		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.999.598,00	5.024.000,00	(975.598,00)	83,74		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.708.600,00	14.700.000,00	(8.600,00)	99,94		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	14.708.600,00	14.700.000,00	(8.600,00)	99,94		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.708.610,00	14.700.000,00	(8.610,00)	99,94		
01.2.08.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.960.000,00	3.292.500,00	(667.500,00)	83,14		
01.2.06.01.5.1	BFI ANJAL OPERASI	3.960.000,00	3.292.500,00	(667.500,00)	83,14		
01.2.08.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	3.292.500,00	(667.500,00)	83,14		
01.2.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.676.000,00	131.520.604,00	(2.155.396,00)	98,39		
01.2.08.09.5.1	RELANJA OPERASI	133.676.000,00	131.520.604,00	(2.155.396,00)	98,39		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.676.000,00	131.520.604,00	(2.155.396,00)	98,39		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.509.150,00	13.130.616,00	(9.408.504,00)	58,26		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	RELANJA OPERASI	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.112	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.999.150,00	3.765.646,00	(6.233.504,00)	37,66		
01.2.08.02.5.1	RELANJA OPERASI	9.999.150,00	3.765.646,00	(6.233.504,00)	37,66		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.150,00	3.765.646,00	(6.233.504,00)	37,66		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.940.000,00	6.765.000,00	(3.175.000,00)	68,06		
01.2.08.03.5.1	BFI ANJAL OPERASI	9.940.000,00	6.765.000,00	(3.175.000,00)	68,06		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	6.765.000,00	(3.175.000,00)	68,06		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.988.600,00	146.153.714,00	(3.834.886,00)	97,44		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.988.600,00	146.153.714,00	(3.834.886,00)	97,44		
01.2.09.02.5.1	BFI ANJAL OPERASI	149.988.600,00	146.153.714,00	(3.834.886,00)	97,44		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.988.600,00	146.153.714,00	(3.834.886,00)	97,44		
01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.999.474,00	19.871.000,00	(128.474,00)	99,36		
01.2.09.09.5.1	RELANJA OPERASI	19.999.474,00	19.871.000,00	(128.474,00)	99,36		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.474,00	19.871.000,00	(128.474,00)	99,36		
02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	24.998.500,00	20.023.337,00	(4.975.163,00)	80,51		
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewahangan Kabupaten/Kota	22.352.850,00	19.048.400,00	(3.304.450,00)	85,22		
02.2.01.03	Aktivitas Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	22.352.850,00	19.048.400,00	(3.304.450,00)	85,22		
02.2.01.03.5.1	RELANJA OPERASI	22.352.850,00	19.048.400,00	(3.304.450,00)	85,22		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.352.850,00	19.048.400,00	(3.304.450,00)	85,22		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pembudayaan Perempuannya Kewenangan Kabupaten/Kota	722.643.650,00	689.974.937,00	(22.668.713,00)	96,08		
02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pembudayaan Perempuannya Kewenangan Kabupaten/Kota	722.643.650,00	689.974.937,00	(22.668.713,00)	96,08		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	722.643.650,00	689.974.937,00	(22.668.713,00)	96,08		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.643.650,00	689.974.937,00	(22.668.713,00)	96,08		
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	106.199.996,00	70.850.938,00	(35.349.058,00)	66,71		
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106.199.996,00	70.850.938,00	(35.349.058,00)	66,71		
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	106.199.996,00	70.850.938,00	(35.349.058,00)	66,71		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	106.199.996,00	70.850.938,00	(35.349.058,00)	66,71		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.199.996,00	70.850.938,00	(35.349.058,00)	66,71		
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	22.264.500,00	21.409.500,00	(855.000,00)	96,16		
03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22.264.500,00	21.409.500,00	(855.000,00)	96,16		
03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.264.500,00	21.409.500,00	(855.000,00)	96,16		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.264.500,00	21.409.500,00	(855.000,00)	96,16		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.264.500,00	21.409.500,00	(855.000,00)	96,16		
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.180.246.876,00	1.971.210.162,00	(209.036.714,00)	90,41		
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.114.692.645,00	985.339.700,00	(129.352.945,00)	88,40		
03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP/K	3.772.845,00	3.529.700,00	(243.145,00)	93,56		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.772.845,00	3.529.700,00	(243.145,00)	93,56		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.772.845,00	3.529.700,00	(243.145,00)	93,56		
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBP/K Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	160.660.000,00	91.230.000,00	(69.430.000,00)	56,78		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	160.660.000,00	91.230.000,00	(69.430.000,00)	56,78		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.660.000,00	91.230.000,00	(69.430.000,00)	56,78		
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP/K Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Jarak Jauh (Minilok)	613.210.000,00	571.998.000,00	(41.212.000,00)	93,26		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	613.210.000,00	571.998.000,00	(41.212.000,00)	93,26		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	613.210.000,00	571.998.000,00	(41.212.000,00)	93,26		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	337.049.800,00	318.682.000,00	(18.367.800,00)	94,55		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	337.049.800,00	318.682.000,00	(18.367.800,00)	94,55		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.049.800,00	318.682.000,00	(18.367.800,00)	94,55		
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Pelugas Lapangan KB (PKW/PLKB)	392.580.000,00	366.715.982,00	(25.864.018,00)	93,41		
03.2.02.04	Pengjorakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	392.580.000,00	366.715.982,00	(25.864.018,00)	93,41		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	392.580.000,00	366.715.982,00	(25.864.018,00)	93,41		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.580.000,00	366.715.982,00	(25.864.018,00)	93,41		
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	375.085.481,00	357.187.480,00	(17.898.001,00)	95,23		
03.2.03.03	Peningkatan Kesadaran Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	375.085.481,00	357.187.480,00	(17.898.001,00)	95,23		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	375.085.481,00	357.187.480,00	(17.898.001,00)	95,23		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.085.481,00	357.187.480,00	(17.898.001,00)	95,23		
03.2.04	Pembentayan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Komunitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	297.886.750,00	261.967.000,00	(35.921.750,00)	87,94		
03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Komunitas dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	9.888.750,00	9.022.000,00	(866.750,00)	91,23		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.888.750,00	9.022.000,00	(866.750,00)	91,23		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.888.750,00	9.022.000,00	(866.750,00)	91,23		
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	288.000.000,00	252.945.000,00	(35.055.000,00)	87,83		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	288.000.000,00	252.945.000,00	(35.055.000,00)	87,83		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000,00	252.945.000,00	(35.055.000,00)	87,83		
04	PROGRAM PEMINGKATAN KUALITAS KELUARGA	859.944.900,00	808.412.934,00	(51.531.966,00)	94,01		
04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keselamatan Qendok (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	859.944.900,00	808.412.934,00	(51.531.966,00)	94,01		
04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewonoregan Kabupaten/Kota	15.560.100,00	7.682.000,00	(7.878.100,00)	49,37		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.560.100,00	7.682.000,00	(7.878.100,00)	49,37		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.560.100,00	7.682.000,00	(7.878.100,00)	49,37		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.489.800,00	13.555.300,00	(1.934.500,00)	87,51		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.489.800,00	13.555.300,00	(1.934.500,00)	87,51		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.489.800,00	13.555.300,00	(1.934.500,00)	87,51		
04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	628.805.030,00	707.775.634,00	(41.719.396,00)	94,97		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	809.406.730,00	708.626.634,00	(40.780.096,00)	94,96		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.406.730,00	708.626.634,00	(40.780.096,00)	94,96		
04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	19.488.300,00	18.549.000,00	(939.300,00)	95,18		
04.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.488.300,00	18.549.000,00	(939.300,00)	95,18		
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	843.467.610,00	741.846.850,00	(91.620.960,00)	89,01		
04.2.01	Pelaksanaan Pambinaan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	175.396.200,00	171.427.950,00	(3.968.250,00)	97,74		
04.2.01.01	Pemberitukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	175.396.200,00	171.427.950,00	(3.968.250,00)	97,74		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	175.396.200,00	171.427.950,00	(3.968.250,00)	97,74		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.396.200,00	171.427.950,00	(3.968.250,00)	97,74		
04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Komunitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	658.071.410,00	570.418.700,00	(87.652.710,00)	86,68		
04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	658.071.410,00	570.418.700,00	(87.652.710,00)	86,68		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	658.071.410,00	570.418.700,00	(87.652.710,00)	86,68		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	658.071.410,00	570.418.700,00	(87.652.710,00)	86,68		
05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	10.589.800,00	13.500.000,00	(5.089.800,00)	72,62		
05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kolaborasi Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.589.800,00	13.500.000,00	(5.089.800,00)	72,62		
05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	18.589.800,00	13.500.000,00	(5.089.800,00)	72,62		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.589.800,00	13.500.000,00	(5.089.800,00)	72,62		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.589.800,00	13.500.000,00	(5.089.800,00)	72,62		
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	57.034.200,00	44.820.587,00	(12.213.613,00)	78,59		
06.2.02	Penguatan dan Pengumbangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	57.034.200,00	44.820.587,00	(12.213.613,00)	78,59		
06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.034.200,00	44.820.587,00	(12.213.613,00)	78,59		
06.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	57.034.200,00	44.820.587,00	(12.213.613,00)	78,59		
06.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.034.200,00	44.820.587,00	(12.213.613,00)	78,59		
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	34.669.800,00	26.912.000,00	(7.757.800,00)	77,62		
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	34.669.800,00	26.912.000,00	(7.757.800,00)	77,62		
07.2.01.02	Kordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34.669.800,00	26.912.000,00	(7.757.800,00)	77,62		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.669.800,00	26.912.000,00	(7.757.800,00)	77,62		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.669.800,00	26.912.000,00	(7.757.800,00)	77,62		
	SURPLUS / DEFISIT	(7.833.298.254,00)	(7.207.225.220,00)	546.073.034,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.833.298.254,00)	(7.207.225.220,00)	546.073.034,00	0		



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA
 SKPD : 2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
001.000.00.4	PENDAPATAN DAERAH	250.000.000,00	321.945.312,00	71.945.312,00	128,78		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.000.000,00	321.945.312,00	71.945.312,00	128,78		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	250.000.000,00	321.945.312,00	71.945.312,00	128,78		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.285.343.854,00	7.005.506.220,00	(279.837.634,00)	96,16		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.444.331.287,00	3.321.991.726,00	(122.339.561,00)	96,45		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.984.997.100,00	2.980.284.063,00	(4.712.937,00)	96,49		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.891.157.088,00	2.787.044.963,00	(104.112.125,00)	96,40		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.891.157.088,00	2.787.044.963,00	(104.112.125,00)	96,40		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.891.157.088,00	2.787.044.963,00	(104.112.125,00)	96,40		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.840.000,00	93.240.000,00	(600.000,00)	99,36		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	93.840.000,00	93.240.000,00	(600.000,00)	99,36		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	93.840.000,00	93.240.000,00	(600.000,00)	99,36		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.605.716,00	225.963.966,00	(8.641.740,00)	96,32		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencantangan Bangunan Kantor	8.005.525,00	8.005.525,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.005.525,00	8.005.525,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.005.525,00	8.005.525,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.460.000,00	27.955.000,00	(505.000,00)	98,23		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.460.000,00	27.955.000,00	(505.000,00)	98,23		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.460.000,00	27.955.000,00	(505.000,00)	98,23		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.990.840,00	9.778.000,00	(212.840,00)	97,82		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.990.840,00	9.778.000,00	(212.840,00)	97,82		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.991.840,00	9.778.000,00	(213.840,00)	97,87		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Colakan dan Pengarkoran	11.040.340,00	10.564.192,00	(476.148,00)	95,69		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.040.340,00	10.564.192,00	(476.148,00)	95,69		
01.2.06.05.5.1.02	Udianja Barang dan Jasa	11.040.340,00	10.564.192,00	(476.148,00)	95,69		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.995.000,00	7.975.009,00	(19.991,00)	99,75		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	7.995.000,00	7.975.009,00	(19.991,00)	99,75		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.995.000,00	7.975.009,00	(19.991,00)	99,75		
01.2.06.09	Ponyalenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.114.001,00	161.686.240,00	(7.427.761,00)	95,61		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	169.114.001,00	161.686.240,00	(7.427.761,00)	95,61		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.114.001,00	161.686.240,00	(7.427.761,00)	95,61		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.431.070,00	24.300.000,00	(131.070,00)	99,46		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.431.070,00	24.300.000,00	(131.070,00)	99,46		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	24.431.070,00	24.300.000,00	(131.070,00)	99,46		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.431.070,00	24.300.000,00	(131.070,00)	99,46		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.449.000,00	39.696.046,00	(1.752.954,00)	95,77		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sifat Menyurat	2.500.000,00	2.433.500,00	(66.500,00)	97,34		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.433.500,00	(66.500,00)	97,34		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.433.500,00	(66.500,00)	97,34		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.949.000,00	37.262.546,00	(1.686.454,00)	95,67		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.949.000,00	37.262.546,00	(1.686.454,00)	95,67		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.949.000,00	37.262.546,00	(1.686.454,00)	95,67		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.848.423,00	151.736.719,00	(7.111.674,00)	95,52		
01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Aki Angkutan Darat Tak Bermotor	123.250.000,00	117.380.744,00	(5.869.256,00)	95,24		
01.2.09.04.5.1	BELANJA OPERASI	123.250.000,00	117.380.744,00	(5.869.256,00)	95,24		
01.2.09.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.250.000,00	117.380.744,00	(5.869.256,00)	95,24		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.810.000,00	8.170.005,00	(639.995,00)	92,74		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.810.000,00	8.170.005,00	(639.995,00)	92,74		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.810.000,00	8.170.005,00	(639.995,00)	92,74		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.788.423,00	26.186.000,00	(602.423,00)	97,75		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	26.788.423,00	26.186.000,00	(602.423,00)	97,75		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.788.423,00	26.186.000,00	(602.423,00)	97,75		
02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.445.265.568,00	1.297.171.790,00	(148.093.778,00)	89,75		
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.445.265.568,00	1.297.171.790,00	(148.093.778,00)	89,75		
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	57.964.000,00	54.000.000,00	(3.964.000,00)	93,21		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	43.464.000,00	39.530.000,00	(3.934.000,00)	90,95		
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	570.000,00	0,00	(570.000,00)	0		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.894.000,00	39.530.000,00	(3.364.000,00)	92,16		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08	Pelayanan Informasi Publik	26.331.900,00	26.040.800,00	(291.100,00)	98,89		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	26.331.900,00	26.040.800,00	(291.100,00)	98,89		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.331.900,00	26.040.800,00	(291.100,00)	98,89		
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.129.868.777,00	900.941.090,00	(137.925.687,00)	67,78		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	1.073.363.040,00	935.490.000,00	(137.704.950,00)	87,17		
02.2.01.12.5.1.01	Belanja Pegawai	1.254.200,00	1.250.000,00	(4.200,00)	99,67		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.032.108.840,00	894.318.090,00	(137.760.750,00)	86,65		
02.2.01.12.5.1.05	Belanja Hibah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	55.503.737,00	55.343.000,00	(160.737,00)	99,71		
02.2.01.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.503.737,00	55.343.000,00	(160.737,00)	99,71		
02.2.01.13	Penyediaan/Perjagaan Sarana dan Piasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	232.102.891,00	226.159.900,00	(5.942.991,00)	97,41		
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	170.872.891,00	164.932.900,00	(5.939.991,00)	96,52		
02.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.622.891,00	163.682.900,00	(5.939.991,00)	96,50		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	61.230.000,00	61.227.000,00	(3.000,00)	100,00		
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.230.000,00	61.227.000,00	(3.000,00)	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	85.050.000,00	81.457.440,00	(3.592.560,00)	95,78		
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	85.050.000,00	81.457.440,00	(3.592.560,00)	95,78		
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	85.050.000,00	81.457.440,00	(3.592.560,00)	95,78		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.050.000,00	81.457.440,00	(3.592.560,00)	95,78		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.050.000,00	81.457.440,00	(3.592.560,00)	95,78		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	46.999.760,00	44.431.401,00	(2.568.359,00)	94,54		
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46.999.760,00	44.431.401,00	(2.568.359,00)	94,54		
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46.999.760,00	44.431.401,00	(2.568.359,00)	94,54		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.793.100,00	23.331.401,00	(2.461.699,00)	90,46		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.793.100,00	23.331.401,00	(2.461.699,00)	90,46		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	21.206.660,00	21.100.000,00	(106.660,00)	99,50		
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.206.660,00	21.100.000,00	(106.660,00)	99,50		
03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.263.697.239,00	2.200.463.865,00	(63.233.374,00)	96,80		
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub-Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.939.600.239,00	1.938.927.050,00	(673.189,00)	99,97		
03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub-Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.230.000,00	26.221.000,00	(9.000,00)	99,97		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.230.000,00	26.221.000,00	(9.000,00)	99,97		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.230.000,00	26.221.000,00	(9.000,00)	99,97		
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	1.913.370.239,00	1.912.706.050,00	(664.189,00)	99,97		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.816.210.239,00	1.815.682.050,00	(528.189,00)	99,97		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.814.960.239,00	1.814.432.050,00	(528.189,00)	99,97		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	97.160.000,00	97.024.000,00	(136.000,00)	99,86		
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.160.000,00	97.024.000,00	(136.000,00)	99,86		
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	324.097.000,00	321.536.015,00	(2.560.985,00)	99,21		
03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	67.725.000,00	67.721.500,00	(3.500,00)	99,99		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	67.725.000,00	67.721.500,00	(3.500,00)	99,99		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.725.000,00	67.721.500,00	(3.500,00)	99,99		
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	235.018.000,00	234.834.950,00	(183.050,00)	99,92		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	235.018.000,00	234.834.950,00	(183.050,00)	99,92		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.018.000,00	234.834.950,00	(183.050,00)	99,92		
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	21.354.000,00	18.980.165,00	(2.373.835,00)	88,88		
03.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	21.354.000,00	18.980.365,00	(2.373.635,00)	88,88		
03.2.02.10.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	0,00	(2.020.000,00)	0,00		
03.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.334.000,00	18.980.365,00	(353.635,00)	98,17		
	SURPLUS / DEFISIT	(7.035.343.854,00)	(6.683.560.908,00)	351.782.946,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.035.343.854,00)	(6.683.560.908,00)	351.782.946,00	0		



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4
Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL
SKPD : 2-18.3-29.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.1	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	27.566.777,70	(72.433.222,30)	27,57		
00.0.00.00.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	27.566.777,70	(72.433.222,30)	27,57		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	27.566.777,70	(72.433.222,30)	27,57		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.849.947.177,00	3.469.597.107,52	(374.280.069,48)	90,26		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.157.938.871,00	2.936.431.407,52	(221.507.213,40)	92,99		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.572.388.730,00	2.390.075.426,00	(172.713.304,00)	93,20		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.497.304.730,00	2.327.835.426,00	(169.469.304,00)	93,21		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.497.304.730,00	2.327.835.426,00	(169.469.304,00)	93,21		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.497.304.730,00	2.327.835.426,00	(169.469.304,00)	93,21		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.084.000,00	71.940.000,00	(3.244.000,00)	95,68		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	75.084.000,00	71.940.000,00	(3.244.000,00)	95,68		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	75.084.000,00	71.940.000,00	(3.244.000,00)	95,68		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.587.677,00	297.054.327,52	(31.633.349,48)	90,40		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.992.817,00	4.092.000,00	(892.817,00)	82,16		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.992.817,00	4.092.000,00	(892.817,00)	82,16		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.992.817,00	4.092.000,00	(892.817,00)	82,16		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.423.160,00	83.215.809,97	(8.207.350,03)	91,02		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	26.515.809,97	(1.484.190,03)	94,70		
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	25.265.809,97	(1.484.190,03)	94,45		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	63.423.160,00	56.700.000,00	(6.723.160,00)	89,40		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.423.160,00	56.700.000,00	(6.723.160,00)	89,40		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.755.300,00	32.579.999,55	(175.300,45)	99,46		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.257.300,00	26.179.999,55	(77.300,45)	99,71		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.257.300,00	26.179.999,55	(77.300,45)	99,71		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	6.498.000,00	6.400.000,00	(98.000,00)	98,49		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.498.000,00	6.400.000,00	(98.000,00)	98,49		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Ponggandaan	24.528.400,00	24.478.700,00	(49.700,00)	99,80		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	24.528.400,00	24.478.700,00	(49.700,00)	99,80		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.528.400,00	24.478.700,00	(49.700,00)	99,80		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.450.000,00	12.344.000,00	(106.000,00)	99,15		
01.2.06.08.1	BELANJA OPERASI	12.450.000,00	12.344.000,00	(106.000,00)	99,15		
01.2.06.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	12.344.000,00	(106.000,00)	99,15		
01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.438.000,00	140.343.818,00	(23.094.182,00)	85,87		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	163.438.000,00	140.343.818,00	(23.094.182,00)	85,87		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.438.000,00	140.343.818,00	(23.094.182,00)	85,87		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	113.976.111,00	112.252.000,00	(1.724.111,00)	98,49		
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.506.111,00	10.252.000,00	(254.111,00)	97,58		
01.2.07.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.340.000,00	1.250.000,00	(90.000,00)	93,28		
01.2.07.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.340.000,00	1.250.000,00	(90.000,00)	93,28		
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	9.166.111,00	9.002.000,00	(164.111,00)	98,21		
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.166.111,00	9.002.000,00	(164.111,00)	98,21		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.470.000,00	102.060.000,00	(1.470.000,00)	98,58		
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.430.000,00	1.250.000,00	(1.180.000,00)	51,44		
01.2.07.11.5.1.01	Belanja Pegawai	2.430.000,00	1.250.000,00	(1.180.000,00)	51,44		
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	101.040.000,00	100.750.000,00	(290.000,00)	99,71		
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.800.000,00	(200.000,00)	93,33		
01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.040.000,00	97.950.000,00	(90.000,00)	99,91		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	32.999.650,00	25.761.650,00	(7.238.000,00)	78,07		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.999.650,00	13.768.750,00	(7.230.900,00)	65,57		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.999.650,00	13.768.750,00	(7.230.900,00)	65,57		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.999.650,00	13.768.750,00	(7.230.900,00)	65,57		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.992.900,00	(7.100,00)	99,93		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.992.900,00	(7.100,00)	99,93		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.992.900,00	(7.100,00)	99,99		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penerimaan Urusan Pemerintahan Daerah	108.986.453,00	100.788.004,00	(8.198.449,00)	92,48		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.986.453,00	100.788.004,00	(8.198.449,00)	92,48		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	108.986.453,00	100.788.004,00	(8.198.449,00)	92,48		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.986.453,00	100.788.004,00	(8.198.449,00)	92,48		
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	127.957.600,00	124.803.700,00	(3.153.900,00)	97,54		
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	127.957.600,00	124.803.700,00	(3.153.900,00)	97,54		
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Bebas Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	62.265.930,00	62.055.600,00	(210.330,00)	99,66		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	62.265.930,00	62.055.600,00	(210.330,00)	99,66		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.265.930,00	62.055.600,00	(210.330,00)	99,66		
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Kamitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	55.869.800,00	55.443.100,00	(426.700,00)	99,24		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.869.800,00	55.443.100,00	(426.700,00)	99,24		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.869.800,00	55.443.100,00	(426.700,00)	99,24		
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelutian Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	9.821.900,00	7.305.000,00	(2.516.900,00)	74,37		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.821.900,00	7.305.000,00	(2.516.900,00)	74,37		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.821.900,00	7.305.000,00	(2.516.900,00)	74,37		
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	535.795.000,00	388.067.400,00	(147.627.600,00)	72,44		
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	535.795.000,00	388.067.400,00	(147.627.600,00)	72,44		
05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	46.070.000,00	41.982.600,00	(4.087.400,00)	91,13		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.070.000,00	41.982.600,00	(4.087.400,00)	91,13		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.070.000,00	41.982.600,00	(4.087.400,00)	91,13		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	330.571.000,00	262.312.400,00	(68.258.600,00)	79,35		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	330.571.000,00	262.312.400,00	(68.258.600,00)	79,35		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.571.000,00	262.312.400,00	(68.258.600,00)	79,35		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	159.064.000,00	83.772.400,00	(75.291.600,00)	52,67		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	159.064.000,00	83.772.400,00	(75.291.600,00)	52,67		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.064.000,00	83.772.400,00	(75.291.600,00)	52,67		
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	22.245.926,00	20.284.600,00	(1.961.326,00)	91,18		
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.245.926,00	20.284.600,00	(1.961.326,00)	91,18		
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22.245.926,00	20.284.600,00	(1.961.326,00)	91,18		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.926.000,00	20.284.600,00	(1.641.400,00)	92,51		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.926.000,00	20.284.600,00	(1.641.400,00)	92,51		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	319.926,00	0,00	(319.926,00)	0		
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	319.926,00	0,00	(319.926,00)	0		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.743.847.177,00)	(3.442.020.329,82)	301.826.847,18	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.743.847.177,00)	(3.442.020.329,82)	301.826.847,18	0		

Padang Aro, 29 Juli 2024

BUPATI

KH. IRUNAS



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.23 PERPUSTAKAAN

SKPD : 2-23.2-24.0-00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.739.620.810,00	4.404.352.156,00	(335.277.654,00)	92,93		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.046.075.717,00	2.740.581.047,00	(305.494.670,00)	99,97		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.568.250.029,00	2.361.271.029,00	(206.979.000,00)	91,94		
01.2.02.01	Penyediaan Haji dan Tunjangan ASN	2.500.830.024,00	2.296.791.029,00	(203.539.000,00)	91,86		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPFRASI	2.500.330.024,00	2.296.791.029,00	(203.539.000,00)	91,86		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.500.330.029,00	2.296.791.029,00	(203.539.000,00)	91,86		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67.920.000,00	64.480.000,00	(3.440.000,00)	94,94		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	67.920.000,00	64.480.000,00	(3.440.000,00)	94,94		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	67.920.000,00	64.480.000,00	(3.440.000,00)	94,94		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.400.876,00	157.799.159,00	(607.717,00)	99,62		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.898.500,00	26.882.239,00	(16.261,00)	99,94		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.898.500,00	26.882.239,00	(16.261,00)	99,94		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.898.500,00	26.882.239,00	(16.261,00)	99,94		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.249.576,00	6.187.243,00	(62.333,00)	99,00		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.109.576,00	6.047.243,00	(62.333,00)	98,78		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.109.576,00	6.047.243,00	(62.333,00)	98,78		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05	Penyerahan Barang Cetak dan Penggandaan	14.653.000,00	14.652.475,00	(525,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	14.653.000,00	14.652.475,00	(525,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.653.000,00	14.652.475,00	(525,00)	100,00		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.000.000,00	1.965.000,00	(35.000,00)	98,25		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.965.000,00	(35.000,00)	98,25		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.965.000,00	(35.000,00)	98,25		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.599.600,00	103.106.202,00	(493.598,00)	99,52		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	103.599.600,00	103.106.202,00	(493.598,00)	99,52		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.599.600,00	103.106.202,00	(493.598,00)	99,52		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.733.214,00	12.700.000,00	(92.033.214,00)	12,13		
01.2.07.05	Pengadaan Mobil	14.723.214,00	12.700.000,00	(2.023.214,00)	86,26		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	14.723.214,00	12.700.000,00	(2.023.214,00)	86,26		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.723.214,00	12.700.000,00	(2.023.214,00)	86,26		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.015.920,00	0,00	(90.015.920,00)	0		
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	90.015.920,00	0,00	(90.015.920,00)	0		
01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.015.920,00	0,00	(90.015.920,00)	0		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.620.749,00	71.568.584,00	(1.032.165,00)	98,59		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.620.749,00	63.642.584,00	(978.165,00)	98,49		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	64.620.749,00	63.642.584,00	(978.165,00)	98,49		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.620.749,00	63.642.584,00	(978.165,00)	98,49		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	5.946.000,00	(54.000,00)	99,10		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.946.000,00	(54.000,00)	99,10		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.946.000,00	(54.000,00)	99,10		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.480.000,00	117.643.346,00	(4.836.654,00)	96,05		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.480.000,00	117.643.346,00	(4.836.654,00)	96,05		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	122.480.000,00	117.643.346,00	(4.836.654,00)	96,05		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.480.000,00	117.643.346,00	(4.836.654,00)	96,05		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.584.929,00	19.584.929,00	0,00	100,00		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	19.584.929,00	19.584.929,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.584.929,00	19.584.929,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.413.554.123,00	1.305.120.809,00	(18.433.314,00)	98,70		
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.413.554.123,00	1.305.120.809,00	(18.433.314,00)	98,70		
02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.358.554.123,00	1.344.459.823,00	(9.094.300,00)	99,33		
02.2.01.02.5.1	ULLANJA OPERASI	475.739.900,00	167.767.200,00	(7.972.700,00)	95,46		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	760.000,00	680.000,00	(80.000,00)	89,47		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.979.900,00	167.087.200,00	(7.892.700,00)	95,49		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.182.814.223,00	1.181.692.623,00	(1.121.600,00)	99,91		
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	982.814.223,00	982.814.223,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.05	Belanja Modal Asst. Tetap Lainnya	200.000.000,00	198.878.400,00	(1.121.600,00)	99,44		
02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	16.928.686,00	(8.071.314,00)	67,71		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	16.928.686,00	(8.071.314,00)	67,71		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	16.928.686,00	(8.071.314,00)	67,71		
02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	30.000.000,00	28.732.300,00	(1.267.700,00)	95,77		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.732.300,00	(1.267.700,00)	95,77		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.732.300,00	(1.267.700,00)	95,77		
02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	41.730.000,00	40.110.100,00	(1.619.900,00)	96,12		
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	34.180.000,00	33.940.100,00	(239.900,00)	99,30		
02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	34.180.000,00	33.940.100,00	(239.900,00)	99,30		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.180.000,00	33.940.100,00	(239.900,00)	99,30		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.180.000,00	33.940.100,00	(239.900,00)	99,30		
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	7.550.000,00	6.170.000,00	(1.380.000,00)	81,72		
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	7.550.000,00	6.170.000,00	(1.380.000,00)	81,72		
02.2.02.02.5.1	ULLANJA OPERASI	7.550.000,00	6.170.000,00	(1.380.000,00)	81,72		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	6.170.000,00	(1.380.000,00)	81,72		
03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	30.000.000,00	24.611.300,00	(5.388.700,00)	82,04		
03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	24.611.300,00	(5.388.700,00)	82,04		
03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmodaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Diutamakan dan Didayagunakan	30.000.000,00	24.611.300,00	(5.388.700,00)	82,04		
03.2.01.02.5.1	ULLANJA OPERASI	30.000.000,00	24.611.300,00	(5.388.700,00)	82,04		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	24.611.300,00	(5.388.700,00)	82,04		
03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	208.276.000,00	203.928.900,00	(4.347.100,00)	97,82		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekutan Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	208.270.000,00	203.928.900,00	(4.341.100,00)	97,92		
03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekutan Daerah Kecamatan	208.270.000,00	203.928.900,00	(4.341.100,00)	97,92		
03.2.03.03.5.1	BIJLANJA OPERASI	208.270.000,00	203.928.900,00	(4.341.100,00)	97,92		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.270.000,00	203.928.900,00	(4.341.100,00)	97,92		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.739.629.940,00)	(4.404.352.156,00)	335.277.684,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.739.629.940,00)	(4.404.352.156,00)	335.277.684,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA

SKPD : 3-26.2-22.2-19.01 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	219.352.000,00	(80.648.000,00)	73,12		
110.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	219.352.000,00	(80.648.000,00)	73,12		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	300.000.000,00	219.352.000,00	(80.648.000,00)	73,12		
00.0.10.00.5	BELANJA DAERAH	14.461.931.249,00	11.677.780.817,81	(2.784.150.431,19)	80,84		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.210.771.840,00	3.138.627.724,00	(72.093.124,00)	97,75		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.819.034.291,00	2.774.016.580,00	(36.017.711,00)	98,72		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.678.364.291,00	2.642.441.580,00	(35.922.711,00)	98,66		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.678.364.291,00	2.642.441.580,00	(35.922.711,00)	98,66		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.678.364.291,00	2.642.441.580,00	(35.922.711,00)	98,66		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	131.670.000,00	131.575.000,00	(95.000,00)	99,93		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	131.670.000,00	131.575.000,00	(95.000,00)	99,93		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	131.670.000,00	131.575.000,00	(95.000,00)	99,93		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.507.740,00	187.804.788,00	(14.702.952,00)	92,74		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencantolan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.917.000,00	(83.000,00)	98,34		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.917.000,00	(83.000,00)	98,34		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.917.000,00	(83.000,00)	98,34		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.199.000,00	(801.000,00)	94,66		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.199.000,00	(801.000,00)	94,66		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.199.000,00	(801.000,00)	94,66		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.534.000,00	(466.000,00)	90,68		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.534.000,00	(466.000,00)	90,68		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.534.000,00	(466.000,00)	90,68		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.850.000,00	12.849.000,00	(1.807.000,00)	87,67		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPLHASI	14.850.000,00	12.849.000,00	(1.807.000,00)	87,67		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	12.843.000,00	(1.807.000,00)	87,67		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.857.740,00	151.311.788,00	(11.545.952,00)	92,91		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPLHASI	162.857.740,00	151.311.788,00	(11.545.952,00)	92,91		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.857.740,00	151.311.788,00	(11.545.952,00)	92,91		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.000.000,00	31.279.400,00	(5.720.600,00)	84,54		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	29.279.400,00	(5.720.600,00)	83,66		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	29.279.400,00	(5.720.600,00)	83,66		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	29.279.400,00	(5.720.600,00)	83,66		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.170.817,00	145.520.956,00	(15.651.861,00)	90,29		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.000.000,00	117.060.091,00	(11.939.919,00)	90,74		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPLHASI	129.000.000,00	117.060.091,00	(11.939.919,00)	90,74		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	117.060.091,00	(11.939.919,00)	90,74		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.178.817,00	18.041.875,00	(3.336.942,00)	84,95		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	22.178.817,00	18.041.875,00	(3.336.942,00)	84,95		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.178.817,00	18.041.875,00	(3.336.942,00)	84,95		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.625.000,00	(375.000,00)	96,25		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.625.000,00	(375.000,00)	96,25		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.625.000,00	(375.000,00)	96,25		
02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00	100,00		
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.478.199.594,00	3.306.600.743,81	(79.538.850,19)	97,71		
02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.707.160.594,00	2.691.836.285,41	(15.324.308,59)	99,43		
02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.707.160.594,00	2.691.836.285,41	(15.324.308,59)	99,43		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.707.160.594,00	2.691.836.285,41	(15.324.308,59)	99,43		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	42.560.000,00	38.270.000,00	(6.290.000,00)	85,22		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.664.600.594,00	2.655.566.285,41	(9.034.308,59)	99,66		
02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pongannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	768.979.000,00	704.704.158,40	(64.274.841,60)	91,65		
02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	130.430.000,00	85.515.500,00	(44.914.500,00)	65,56		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	130.430.000,00	85.515.500,00	(44.914.500,00)	65,56		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.130.000,00	35.515.500,00	(44.614.500,00)	44,16		
02.2.03.02.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	638.549.000,00	619.248.958,40	(19.300.041,60)	96,99		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	638.549.000,00	619.248.958,40	(19.300.041,60)	96,99		
02.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.230.000,00	4.010.000,00	(2.620.000,00)	63,76		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	631.319.000,00	614.638.958,40	(16.680.041,60)	97,36		
02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	576.886.719,00	539.669.650,00	(37.217.069,00)	93,55		
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	576.886.719,00	539.669.650,00	(37.217.069,00)	93,55		
02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	576.886.719,00	539.669.650,00	(37.217.069,00)	93,55		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	416.746.219,00	381.083.650,00	(35.662.569,00)	91,44		
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.690.000,00	1.340.000,00	(1.340.000,00)	50,00		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.056.219,00	379.743.650,00	(34.312.569,00)	91,71		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	160.140.500,00	158.580.000,00	(1.560.500,00)	99,03		
02.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	160.140.500,00	158.580.000,00	(1.560.500,00)	99,03		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.280.067.104,00	3.748.964.910,00	(2.531.102.194,00)	59,69		
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pemuda/Pemudi pada Jenjang Pendidikan yang Menjadl Kewonngan Daerah Kabupaten/Kota	1.599.179.204,00	1.475.492.085,00	(123.687.119,00)	92,27		
03.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.599.179.204,00	1.475.492.085,00	(123.687.119,00)	92,27		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	218.493.416,00	130.342.150,00	(88.151.266,00)	59,65		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	9.520.000,00	6.590.000,00	(2.730.000,00)	70,71		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.173.436,00	123.752.150,00	(85.421.286,00)	59,16		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	1.380.685.768,00	1.345.149.936,00	(35.535.833,00)	97,43		
03.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.380.685.768,00	1.045.149.936,00	(335.535.833,00)	97,43		
03.2.02	Penyenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.030.000,00	16.290.500,00	(36.739.500,00)	30,72		
03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	53.030.000,00	16.290.500,00	(36.739.500,00)	30,72		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	53.030.000,00	16.290.500,00	(36.739.500,00)	30,72		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.030.000,00	16.290.500,00	(36.739.500,00)	30,72		
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.308.289.900,00	675.000,00	(2.307.614.900,00)	0,03		
03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	2.308.289.900,00	675.000,00	(2.307.614.900,00)	0,03		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.308.289.900,00	675.000,00	(2.307.614.900,00)	0,03		
03.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	0		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.305.909.900,00	675.000,00	(2.305.234.900,00)	0,03		
03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.120.168.000,00	1.056.507.325,00	(63.660.675,00)	94,32		
03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1.120.168.000,00	1.056.507.325,00	(63.660.675,00)	94,32		
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.120.168.000,00	1.056.507.325,00	(63.660.675,00)	94,32		
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.168.000,00	1.056.507.325,00	(63.660.675,00)	94,32		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	90.000.000,00	76.643.300,00	(13.356.700,00)	85,16		
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakukannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	76.643.300,00	(13.356.700,00)	85,16		
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	40.000.000,00	33.080.000,00	(6.920.000,00)	82,70		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	33.080.000,00	(6.920.000,00)	82,70		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	33.080.000,00	(6.920.000,00)	82,70		
03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	50.000.000,00	43.563.300,00	(6.436.700,00)	87,13		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	43.563.300,00	(6.436.700,00)	87,13		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	43.563.300,00	(6.436.700,00)	87,13		
03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	411.190.980,00	364.825.290,00	(46.373.690,00)	88,72		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	411.198.980,00	364.825.290,00	(46.373.690,00)	88,72		
03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	409.425.980,00	363.490.290,00	(45.935.690,00)	88,78		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	409.425.980,00	363.490.290,00	(45.935.690,00)	88,78		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.425.980,00	363.490.290,00	(45.935.690,00)	88,78		
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	438.000,00	0,00	(438.000,00)	0		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	438.000,00	0,00	(438.000,00)	0		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.000,00	0,00	(438.000,00)	0		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	350.000.000,00	366.195.000,00	(3.805.000,00)	98,91		
04.2.01	Pembinaan dan Penguatan Organisasi Kepriamuksaan	330.000.000,00	340.195.000,00	(3.805.000,00)	98,91		
04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	50.000.000,00	46.195.000,00	(3.805.000,00)	92,39		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	46.195.000,00	(3.805.000,00)	92,39		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.195.000,00	(3.805.000,00)	92,39		
04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.476.004,00	900.000,00	(576.004,00)	60,98		
04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Huang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berkreasi, Promosi dan Kolaborasi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	1.476.004,00	900.000,00	(576.004,00)	60,98		
04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	1.476.004,00	900.000,00	(576.004,00)	60,98		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.476.004,00	900.000,00	(576.004,00)	60,98		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.476.004,00	900.000,00	(576.004,00)	60,98		
05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	62.033.000,00	41.716.000,00	(17.317.000,00)	72,08		
05.2.01	Pemetaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	12.033.000,00	11.145.000,00	(888.000,00)	92,62		
05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	12.033.000,00	11.145.000,00	(888.000,00)	92,62		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.033.000,00	11.145.000,00	(888.000,00)	92,62		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.033.000,00	11.145.000,00	(888.000,00)	92,62		
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	50.000.000,00	33.571.000,00	(16.429.000,00)	67,14		
05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	50.000.000,00	33.571.000,00	(16.429.000,00)	67,14		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	33.571.000,00	(16.429.000,00)	67,14		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	33.571.000,00	(16.429.000,00)	67,14		
05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	16.004.000,00	13.839.200,00	(2.164.800,00)	86,47		
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	16.004.000,00	13.839.200,00	(2.164.800,00)	86,47		
05.2.01.05	Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	16.004.000,00	13.839.200,00	(2.164.800,00)	86,47		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.004.000,00	13.839.200,00	(2.164.800,00)	86,47		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.004.000,00	13.839.200,00	(2.164.800,00)	86,47		
	SURPLUS / DEFISIT	(14.181.931.249,00)	(11.458.428.817,81)	2.723.502.431,19	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(14.181.931.249,00)	(11.458.428.817,81)	2.723.502.431,19	0		





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN

SKPD : 3-27.2-09.3-25.01 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.000.00.5	BELANJA DAERAH	33.691.904.951,00	31.447.853.939,00	(2.150.051.012,00)	93,60		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.241.302.824,00	11.139.598.017,00	(1.101.704.807,00)	91,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.398.673.321,00	10.300.994.512,00	(1.028.688.809,00)	90,93		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.055.973.321,00	10.033.514.512,00	(1.022.458.809,00)	90,75		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.055.973.321,00	10.033.514.512,00	(1.022.458.809,00)	90,75		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.055.973.321,00	10.033.514.512,00	(1.022.458.809,00)	90,75		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.700.000,00	276.470.000,00	(6.230.000,00)	97,80		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	282.700.000,00	276.470.000,00	(6.230.000,00)	97,80		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	282.700.000,00	276.470.000,00	(6.230.000,00)	97,80		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.517.586,00	372.192.040,00	(9.325.546,00)	97,56		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.658,00	9.998.000,00	(658,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.998.658,00	9.998.000,00	(658,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.658,00	9.998.000,00	(658,00)	99,99		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.420.483,00	93.300.000,00	(5.059.583,00)	94,86		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.094.903,00	39.061.903,00	(5.033.000,00)	88,59		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.094.903,00	39.061.903,00	(5.033.000,00)	88,59		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	54.325.580,00	54.299.000,00	(26.580,00)	99,95		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.325.580,00	54.299.000,00	(26.580,00)	99,95		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.821.390,00	19.812.000,00	(9.390,00)	99,95		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.821.390,00	19.812.000,00	(9.390,00)	99,95		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.821.390,00	19.812.000,00	(9.390,00)	99,95		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pongorandaan	48.019.700,00	48.015.000,00	(4.700,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	48.019.700,00	48.015.000,00	(4.700,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.019.700,00	48.015.000,00	(4.700,00)	99,99		
01.2.06.08	fasilitasi Kunjungan Tamu	4.995.000,00	4.950.000,00	(45.000,00)	99,10		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.995.000,00	4.950.000,00	(45.000,00)	99,10		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	4.950.000,00	(45.000,00)	99,10		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.262.353,00	196.056.140,00	(4.206.213,00)	97,90		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	200.262.353,00	196.056.140,00	(4.206.213,00)	97,90		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.262.353,00	196.056.140,00	(4.206.213,00)	97,90		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.049.991,00	90.078.315,00	(40.971.676,00)	68,74		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.050.000,00	3.042.000,00	(8.000,00)	99,74		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.050.000,00	3.042.000,00	(8.000,00)	99,74		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.042.000,00	(8.000,00)	99,74		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.999.991,00	77.068.315,00	(40.931.676,00)	65,31		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	117.999.991,00	77.068.315,00	(40.931.676,00)	65,31		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.999.991,00	77.068.315,00	(40.931.676,00)	65,31		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlungkapan Kantor	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)	99,70		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)	99,70		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)	99,70		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.061.928,00	108.343.150,00	(84.718.778,00)	56,11		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.000.000,00	108.930.950,00	(15.069.050,00)	87,85		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	124.000.000,00	108.930.950,00	(15.069.050,00)	87,85		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.000.000,00	108.930.950,00	(15.069.050,00)	87,85		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.105.400,00	108.541.200,00	(87.564.200,00)	55,34		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	196.105.400,00	108.541.200,00	(87.564.200,00)	55,34		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.105.400,00	108.541.200,00	(87.564.200,00)	55,34		
01.2.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	9.970.000,00	9.865.000,00	(5.000,00)	99,95		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.970.000,00	9.865.000,00	(5.000,00)	99,95		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.970.000,00	9.865.000,00	(5.000,00)	99,95		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.986.520,00	59.906.000,00	(80.520,00)	99,87		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	59.986.520,00	59.906.000,00	(80.520,00)	99,87		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.986.520,00	59.906.000,00	(80.520,00)	99,87		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	45.296.000,00	43.665.000,00	(1.631.000,00)	96,40		
02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.296.000,00	43.665.000,00	(1.631.000,00)	96,40		
02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	45.296.000,00	43.665.000,00	(1.631.000,00)	96,40		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	45.296.000,00	43.665.000,00	(1.631.000,00)	96,40		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.296.000,00	43.665.000,00	(1.631.000,00)	96,40		
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	16.025.040.498,00	15.425.553.371,00	(599.487.127,00)	96,28		
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.663.614.600,00	3.577.669.832,00	(85.944.768,00)	97,65		
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.663.614.600,00	3.577.669.832,00	(85.944.768,00)	97,65		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.139.135.600,00	3.087.388.582,00	(51.747.018,00)	98,35		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	29.820.000,00	21.650.000,00	(8.170.000,00)	72,60		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.109.315.600,00	3.065.738.582,00	(43.577.018,00)	98,60		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	524.479.000,00	400.283.250,00	(124.195.750,00)	83,48		
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	524.479.000,00	400.283.250,00	(124.195.750,00)	83,48		
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.649.041.748,00	3.421.620.178,00	(227.421.572,00)	93,77		
02.2.02.01	Penjaminan Komunitas dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	199.290.960,00	53.785.921,00	(145.505.039,00)	26,99		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	199.290.960,00	53.785.921,00	(145.505.039,00)	26,99		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.290.960,00	53.785.921,00	(145.505.039,00)	26,99		
02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	367.197.758,00	360.800.670,00	(6.397.088,00)	97,88		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	168.573.279,00	160.450.670,00	(8.122.609,00)	95,18		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.980.000,00	5.700.000,00	(280.000,00)	95,32		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.593.279,00	154.750.670,00	(7.842.609,00)	95,18		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	198.624.479,00	198.150.000,00	(474.479,00)	99,76		
02.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.624.479,00	198.150.000,00	(474.479,00)	99,76		
02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.082.553.030,00	3.009.242.585,00	(73.310.445,00)	97,62		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.082.553.030,00	3.009.242.585,00	(73.310.445,00)	97,62		
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	21.780.000,00	22.910.000,00	1.130.000,00	102,45		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.057.773.030,00	2.986.332.585,00	(71.440.445,00)	97,66		
02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.712.381.150,00	8.426.251.363,00	(286.129.787,00)	96,72		
02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.685.504.250,00	8.388.706.563,00	(296.797.687,00)	96,81		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPLHASI	8.665.504.250,00	8.308.706.563,00	(276.797.687,00)	96,81		
02.2.06.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.400.000,00	6.440.000,00	(5.960.000,00)	51,94		
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.653.104.250,00	8.302.266.563,00	(270.837.687,00)	96,87		
02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	46.879.900,00	37.547.800,00	(9.332.100,00)	80,09		
02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.879.900,00	37.547.800,00	(9.332.100,00)	80,09		
02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.879.900,00	37.547.800,00	(9.332.100,00)	80,09		
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	338.794.828,00	316.521.700,00	(22.273.128,00)	93,43		
03.2.01	Penyediaan dan Penyuluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	180.674.176,00	180.681.000,00	(9.992.076,00)	94,76		
03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	28.091.400,00	23.386.900,00	(4.704.500,00)	83,25		
03.2.01.01.5.1	BFI ANJA OPERASI	28.091.400,00	23.386.900,00	(4.704.500,00)	83,25		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.091.400,00	23.386.900,00	(4.704.500,00)	83,25		
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	69.583.028,00	69.065.900,00	(517.128,00)	99,26		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	69.583.028,00	69.065.900,00	(517.128,00)	99,26		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.583.028,00	69.065.900,00	(517.128,00)	99,26		
03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	92.999.750,00	88.229.000,00	(4.770.750,00)	94,87		
03.2.01.04.5.1	BFI ANJA OPERASI	92.999.750,00	88.229.000,00	(4.770.750,00)	94,87		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.999.750,00	88.229.000,00	(4.770.750,00)	94,87		
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	25.121.850,00	24.621.000,00	(500.850,00)	98,01		
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25.121.850,00	24.621.000,00	(500.850,00)	98,01		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPLHASI	25.121.850,00	24.621.000,00	(500.850,00)	98,01		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.121.850,00	24.621.000,00	(500.850,00)	98,01		
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	122.988.800,00	111.218.900,00	(11.779.900,00)	90,42		
03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10.449.900,00	8.819.000,00	(1.630.900,00)	84,39		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.449.900,00	8.819.000,00	(1.630.900,00)	84,39		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.449.900,00	8.819.000,00	(1.630.900,00)	84,39		
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	112.548.900,00	102.399.900,00	(10.149.000,00)	90,98		
03.2.04.02.5.1	BFI ANJA OPERASI	112.548.900,00	102.399.900,00	(10.149.000,00)	90,98		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.548.900,00	102.399.900,00	(10.149.000,00)	90,98		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.066.779.841,00	1.657.000.780,00	(208.869.861,00)	89,01		
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	252.157.950,00	176.171.680,00	(75.986.270,00)	69,87		
03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	201.283.050,00	165.042.780,00	(36.240.270,00)	82,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	201.283.050,00	165.042.780,00	(36.240.270,00)	82,00		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.710.000,00	0,00	(1.710.000,00)	0		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.573.050,00	165.042.780,00	(34.530.270,00)	82,70		
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	50.871.800,00	11.128.900,00	(39.746.000,00)	21,88		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.871.800,00	11.128.900,00	(39.746.000,00)	21,88		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	0		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.591.800,00	11.128.900,00	(34.466.000,00)	24,41		
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.624.621.691,00	1.481.738.100,00	(142.883.591,00)	91,77		
03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.189.100,00	3.189.000,00	(4.100,00)	99,87		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.189.100,00	3.189.000,00	(4.100,00)	99,87		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.189.100,00	3.189.000,00	(4.100,00)	99,87		
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	535.928.050,00	520.077.400,00	(14.950.650,00)	97,21		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	535.928.050,00	520.077.400,00	(14.950.650,00)	97,21		
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	16.250.000,00	11.190.000,00	(5.060.000,00)	68,86		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.678.050,00	508.787.400,00	(9.890.650,00)	98,10		
03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	51.581.050,00	50.403.800,00	(1.177.250,00)	97,72		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	51.581.050,00	50.403.800,00	(1.177.250,00)	97,72		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.581.050,00	50.403.800,00	(1.177.250,00)	97,72		
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.023.919.491,00	907.167.900,00	(116.751.591,00)	88,60		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	145.366.830,00	131.383.000,00	(10.982.930,00)	92,44		
03.2.02.09.5.1.01	Belanja Pegawai	14.316.000,00	12.740.000,00	(1.576.000,00)	89,03		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.050.830,00	121.843.000,00	(9.412.930,00)	92,82		
03.2.02.09.5.2	BELANJA MODAL	878.552.661,00	775.784.000,00	(102.768.661,00)	87,96		
03.2.02.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	58.900.000,00	(6.100.000,00)	90,62		
03.2.02.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	713.796.763,00	662.704.000,00	(51.092.763,00)	92,84		
03.2.02.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.755.898,00	51.180.000,00	(48.575.898,00)	51,31		
04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	102.412.900,00	97.660.500,00	(4.852.400,00)	95,26		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01	Penyusunan Peta Keortanan dan Kelahanan Pangan Kecamatan	13.039.400,00	9.520.000,00	(3.519.400,00)	73,01		
04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Keortanan Pangan	13.039.400,00	9.520.000,00	(3.519.400,00)	73,01		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.039.400,00	9.520.000,00	(3.519.400,00)	73,01		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.039.400,00	9.520.000,00	(3.519.400,00)	73,01		
04.2.02	Penerangan Kerawanan Pangan Kewilayahan Kabupaten/Kota	89.373.500,00	88.040.500,00	(1.333.000,00)	98,51		
04.2.02.02	Petaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyuluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.373.500,00	88.040.500,00	(1.333.000,00)	98,51		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	89.373.500,00	88.040.500,00	(1.333.000,00)	98,51		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.373.500,00	88.040.500,00	(1.333.000,00)	98,51		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.531.090.815,00	1.505.272.350,00	(25.827.465,00)	98,31		
04.2.02	Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	279.276.000,00	264.014.300,00	(15.261.700,00)	94,54		
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	230.266.800,00	228.727.300,00	(1.539.500,00)	99,33		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	230.266.800,00	228.727.300,00	(1.539.500,00)	99,33		
04.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.586.800,00	228.047.300,00	(1.539.500,00)	99,33		
04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kolaborasi Pembudi Daya Ikan Kecil	34.290.000,00	28.750.000,00	(5.540.000,00)	83,84		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.290.000,00	28.750.000,00	(5.540.000,00)	83,84		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.290.000,00	28.750.000,00	(5.540.000,00)	83,84		
04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	14.719.200,00	6.537.000,00	(8.182.200,00)	44,41		
04.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	14.719.200,00	6.537.000,00	(8.182.200,00)	44,41		
04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.719.200,00	6.537.000,00	(8.182.200,00)	44,41		
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.251.823.815,00	1.241.258.050,00	(10.565.765,00)	99,16		
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	807.558.000,00	798.256.550,00	(9.301.450,00)	98,85		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	807.558.000,00	798.256.550,00	(9.301.450,00)	98,85		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	807.558.000,00	798.256.550,00	(9.301.450,00)	98,85		
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	444.265.815,00	443.001.500,00	(1.264.315,00)	99,72		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	444.265.815,00	443.001.500,00	(1.264.315,00)	99,72		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.265.815,00	443.001.500,00	(1.264.315,00)	99,72		
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	625.646.779,00	575.804.374,00	(49.812.455,00)	92,04		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	462.312.329,00	424.671.424,00	(37.640.905,00)	91,86		
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	462.312.329,00	424.671.424,00	(37.640.905,00)	91,86		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	462.312.329,00	424.671.424,00	(37.640.905,00)	91,86		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.742.329,00	424.101.424,00	(37.640.905,00)	91,85		
04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	25.704.800,00	24.990.000,00	(714.800,00)	97,22		
04.2.02.02	Pengawasan dan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	25.704.800,00	24.990.000,00	(714.800,00)	97,22		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.704.800,00	24.990.000,00	(714.800,00)	97,22		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.704.800,00	24.990.000,00	(714.800,00)	97,22		
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.999.595,00	80.293.903,00	(8.705.692,00)	90,22		
04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	37.599.801,00	33.063.650,00	(4.536.151,00)	87,94		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.599.801,00	33.063.650,00	(4.536.151,00)	87,94		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.599.801,00	33.063.650,00	(4.536.151,00)	87,94		
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	51.399.794,00	47.230.250,00	(4.169.544,00)	91,89		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.399.794,00	47.230.250,00	(4.169.544,00)	91,89		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.399.794,00	47.230.250,00	(4.169.544,00)	91,89		
04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	48.630.055,00	45.879.000,00	(2.751.055,00)	94,34		
04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	29.980.600,00	28.165.000,00	(1.815.600,00)	93,94		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.980.600,00	28.165.000,00	(1.815.600,00)	93,94		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.980.600,00	28.165.000,00	(1.815.600,00)	93,94		
04.2.04.02	Pengawasan Pendaratan Hewan dan Produk Hewan	18.649.455,00	17.714.000,00	(935.455,00)	94,98		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.649.455,00	17.714.000,00	(935.455,00)	94,98		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.649.455,00	17.714.000,00	(935.455,00)	94,98		
05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	8.541.300,00	5.979.900,00	(2.561.400,00)	70,01		
05.2.01	Polaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	8.541.300,00	5.979.900,00	(2.561.400,00)	70,01		
05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8.541.300,00	5.979.900,00	(2.561.400,00)	70,01		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.541.300,00	5.979.900,00	(2.561.400,00)	70,01		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.541.300,00	5.979.900,00	(2.561.400,00)	70,01		
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	34.905.900,00	27.862.700,00	(7.133.200,00)	79,82		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	34.995.900,00	27.062.700,00	(7.133.200,00)	79,62		
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	9.995.900,00	9.502.700,00	(493.200,00)	95,07		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.995.900,00	9.502.700,00	(493.200,00)	95,07		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.995.900,00	9.502.700,00	(493.200,00)	95,07		
05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	25.000.000,00	18.360.000,00	(6.640.000,00)	73,44		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	18.360.000,00	(6.640.000,00)	73,44		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	18.360.000,00	(6.640.000,00)	73,44		
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	49.285.850,00	29.507.850,00	(18.778.000,00)	61,11		
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	48.285.850,00	29.507.850,00	(18.778.000,00)	61,11		
06.2.02.01	Pelaksanaan Umbingan dan Penetapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	48.285.850,00	29.507.850,00	(18.778.000,00)	61,11		
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	48.285.850,00	29.507.850,00	(18.778.000,00)	61,11		
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.285.850,00	29.507.850,00	(18.778.000,00)	61,11		
06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	27.450.000,00	26.831.850,00	(618.150,00)	97,75		
06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.450.000,00	26.831.850,00	(618.150,00)	97,75		
06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	27.450.000,00	26.831.850,00	(618.150,00)	97,75		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	27.450.000,00	26.831.850,00	(618.150,00)	97,75		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.450.000,00	26.831.850,00	(618.150,00)	97,75		
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	696.258.616,00	589.756.597,00	(106.502.019,00)	84,70		
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	696.258.616,00	589.756.597,00	(106.502.019,00)	84,70		
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kolembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	424.657.400,00	380.217.916,00	(44.439.484,00)	89,54		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	424.657.400,00	380.217.916,00	(44.439.484,00)	89,54		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.657.400,00	380.217.916,00	(44.439.484,00)	89,54		
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kolembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	84.435.500,00	73.387.600,00	(11.067.900,00)	86,89		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	84.435.500,00	73.387.600,00	(11.067.900,00)	86,89		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.435.500,00	73.387.600,00	(11.067.900,00)	86,89		
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	117.166.000,00	86.711.465,00	(30.454.535,00)	74,01		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	117.166.000,00	86.711.465,00	(30.454.535,00)	74,01		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.168.000,00	88.711.465,00	(30.454.535,00)	74,81		
07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	69.999.716,00	49.459.616,00	(20.540.100,00)	70,66		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASIONAL	69.999.716,00	49.459.616,00	(20.540.100,00)	70,66		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.999.716,00	49.459.616,00	(20.540.100,00)	70,66		
	SURPLUS / DEFISIT	(33.591.904.951,00)	(31.441.853.939,00)	2.150.051.012,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(33.591.904.951,00)	(31.441.853.939,00)	2.150.051.012,00	0		



Lampiran L3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4
Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.31 PERINDUSTRIAN

SKPD : 3.31.2-17.3-30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
001.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	161.000.000,00	367.480.400,00	(83.519.600,00)	79,71		
001.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	161.000.000,00	367.480.400,00	(83.519.600,00)	79,71		
001.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	161.000.000,00	367.480.400,00	(83.519.600,00)	79,71		
001.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.135.948.502,00	7.735.977.924,00	(399.870.578,00)	95,09		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.519.860.099,00	3.413.822.180,00	(106.037.919,00)	96,99		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.154.252.604,00	3.066.926.750,00	(87.325.854,00)	97,23		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.046.552.604,00	2.964.626.750,00	(81.925.854,00)	97,31		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.046.552.604,00	2.964.626.750,00	(81.925.854,00)	97,31		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.046.552.604,00	2.964.626.750,00	(81.925.854,00)	97,31		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.700.000,00	102.300.000,00	(5.400.000,00)	94,99		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	107.700.000,00	102.300.000,00	(5.400.000,00)	94,99		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	107.700.000,00	102.300.000,00	(5.400.000,00)	94,99		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.743.204,00	100.820.706,00	(4.922.508,00)	95,38		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	7.980.000,00	(20.000,00)	99,75		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.980.000,00	(20.000,00)	99,75		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.980.000,00	(20.000,00)	99,75		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.765.000,00	50.004.250,00	(760.750,00)	98,50		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.765.000,00	35.004.250,00	(760.750,00)	97,87		
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.990.000,00	1.970.000,00	(20.000,00)	98,99		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.435.000,00	34.434.250,00	(750,00)	100,00		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.999.000,00	(7.000,00)	99,99		
01.2.06.03.5.1	BEI ANJAL OPLHASI	10.000.000,00	9.993.000,00	(7.000,00)	99,93		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.993.000,00	(7.000,00)	99,93		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.500.000,00	27.498.000,00	(2.000,00)	99,99		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	27.500.000,00	27.498.000,00	(2.000,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	27.498.000,00	(2.000,00)	99,99		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.750.000,00	6.745.000,00	(5.000,00)	99,93		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.750.000,00	6.745.000,00	(5.000,00)	99,93		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.745.000,00	(5.000,00)	99,93		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.728.304,00	78.600.456,00	(14.127.848,00)	84,78		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	92.728.304,00	78.600.456,00	(14.127.848,00)	84,78		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.728.304,00	78.600.456,00	(14.127.848,00)	84,78		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.625.000,00	55.389.889,00	(235.101,00)	99,58		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	50.125.000,00	49.889.889,00	(235.101,00)	99,53		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.125.000,00	49.889.889,00	(235.101,00)	99,53		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.125.000,00	49.889.889,00	(235.101,00)	99,53		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.247.791,00	110.684.825,00	(3.562.966,00)	96,88		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.640.700,00	82.093.700,00	(3.547.000,00)	95,86		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	85.640.700,00	82.093.700,00	(3.547.000,00)	95,86		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.640.700,00	82.093.700,00	(3.547.000,00)	95,86		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.997.000,00	(3.000,00)	99,94		
01.2.09.06.5.1	BEI ANJAL OPLHASI	5.000.000,00	4.997.000,00	(3.000,00)	99,94		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.997.000,00	(3.000,00)	99,94		
01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.607.091,00	23.594.125,00	(12.966,00)	99,95		
01.2.09.08.5.1	BELANJA OPERASI	23.607.091,00	23.594.125,00	(12.966,00)	99,95		
01.2.09.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.607.091,00	23.594.125,00	(12.966,00)	99,95		
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	628.637.403,00	619.829.028,00	(8.808.375,00)	98,60		
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	628.637.403,00	619.829.028,00	(8.808.375,00)	98,60		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	23.366.400,00	23.245.900,00	(120.500,00)	99,48		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.366.400,00	23.245.900,00	(120.500,00)	99,48		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.366.400,00	23.245.900,00	(120.500,00)	99,48		
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	605.271.003,00	596.583.128,00	(8.687.875,00)	98,56		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	605.271.003,00	596.583.128,00	(8.687.875,00)	98,56		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.271.003,00	596.583.128,00	(8.687.875,00)	98,56		
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	72.361.500,00	65.925.700,00	(6.435.800,00)	91,11		
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	72.361.500,00	65.925.700,00	(6.435.800,00)	91,11		
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	72.361.500,00	65.925.700,00	(6.435.800,00)	91,11		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.361.500,00	65.925.700,00	(6.435.800,00)	91,11		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.361.500,00	65.925.700,00	(6.435.800,00)	91,11		
03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.111.111.000,00	1.004.541.133,00	(20.569.867,00)	87,61		
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.075.046.000,00	1.060.321.333,00	(14.724.667,00)	99,03		
03.2.01.01	Penyerahan Sarana Distribusi Perdagangan	452.446.000,00	450.870.633,00	(1.575.167,00)	99,85		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	119.875.031,00	119.114.200,00	(760.831,00)	99,37		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.815.031,00	110.054.200,00	(760.831,00)	99,31		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	392.670.969,00	331.756.633,00	(60.914.336,00)	99,76		
03.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.670.969,00	331.756.633,00	(60.914.336,00)	99,76		
03.2.01.02	fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	622.600.000,00	609.450.500,00	(13.149.500,00)	97,89		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	622.600.000,00	609.450.500,00	(13.149.500,00)	97,89		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.600.000,00	609.450.500,00	(13.149.500,00)	97,89		
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	36.065.000,00	24.219.800,00	(11.845.200,00)	67,16		
03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	36.065.000,00	24.219.800,00	(11.845.200,00)	67,16		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.065.000,00	24.219.800,00	(11.845.200,00)	67,16		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.065.000,00	24.219.800,00	(11.845.200,00)	67,16		
03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	55.098.000,00	43.893.500,00	(11.404.800,00)	79,30		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DAJAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	55.098.000,00	43.693.500,00	(11.404.500,00)	79,30		
03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	55.098.000,00	43.693.500,00	(11.404.500,00)	79,30		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.098.000,00	43.693.500,00	(11.404.500,00)	79,30		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.098.000,00	43.693.500,00	(11.404.500,00)	79,30		
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	8.878.000,00	5.349.900,00	(3.528.100,00)	60,26		
04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.076.000,00	5.349.900,00	(3.528.100,00)	60,26		
04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.422.000,00	4.014.000,00	(1.408.000,00)	74,03		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.422.000,00	4.014.000,00	(1.408.000,00)	74,03		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.422.000,00	4.014.000,00	(1.408.000,00)	74,03		
04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.456.000,00	1.335.900,00	(2.120.100,00)	38,65		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.456.000,00	1.335.900,00	(2.120.100,00)	38,65		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.456.000,00	1.335.900,00	(2.120.100,00)	38,65		
04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	163.916.000,00	160.822.250,00	(3.093.750,00)	98,11		
04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	18.636.000,00	18.274.800,00	(361.200,00)	98,06		
04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	18.636.000,00	18.274.800,00	(361.200,00)	98,06		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.636.000,00	18.274.800,00	(361.200,00)	98,06		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.636.000,00	18.274.800,00	(361.200,00)	98,06		
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	135.830.000,00	133.377.650,00	(2.452.350,00)	98,19		
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	135.830.000,00	133.377.650,00	(2.452.350,00)	98,19		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	135.830.000,00	133.377.650,00	(2.452.350,00)	98,19		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.830.000,00	133.377.650,00	(2.452.350,00)	98,19		
04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.450.000,00	9.169.800,00	(280.200,00)	97,03		
04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dari Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.450.000,00	9.169.800,00	(280.200,00)	97,03		
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.450.000,00	9.169.800,00	(280.200,00)	97,03		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	9.189.800,00	(260.200,00)	97,03		
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	204.453.000,00	178.685.150,00	(25.767.850,00)	87,40		
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	204.453.000,00	178.685.150,00	(25.767.850,00)	87,40		
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Perkoperasian serta Kapasitas dari Kurikulum SDM Koperasi	204.453.000,00	178.685.150,00	(25.767.850,00)	87,40		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	204.453.000,00	178.685.150,00	(25.767.850,00)	87,40		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.453.000,00	178.685.150,00	(25.767.850,00)	87,40		
06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	203.414.500,00	201.748.700,00	(1.665.740,00)	99,18		
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	203.414.500,00	201.748.700,00	(1.665.740,00)	99,18		
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	194.082.000,00	192.951.260,00	(1.130.740,00)	99,42		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.367.802,00	29.076.200,00	(1.291.602,00)	95,71		
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.887.802,00	27.496.200,00	(391.602,00)	99,60		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	183.714.198,00	162.975.060,00	(207.138,00)	99,55		
06.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.714.198,00	162.975.060,00	(739.138,00)	99,55		
06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	9.332.500,00	8.797.500,00	(535.000,00)	94,27		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.332.500,00	8.797.500,00	(535.000,00)	94,27		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.332.500,00	8.797.500,00	(535.000,00)	94,27		
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	461.475.400,00	425.776.681,00	(35.698.719,00)	92,26		
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Perdagangan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	461.475.400,00	425.776.681,00	(35.698.719,00)	92,26		
07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	24.250.000,00	23.095.000,00	(1.155.000,00)	95,24		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.250.000,00	23.095.000,00	(1.155.000,00)	95,24		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	23.095.000,00	(1.155.000,00)	95,24		
07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Komitmen Usaha Mikro	11.677.000,00	11.089.000,00	(588.000,00)	94,96		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.677.000,00	11.089.000,00	(588.000,00)	94,96		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.677.000,00	11.089.000,00	(588.000,00)	94,96		
07.2.01.03	fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	30.512.000,00	27.764.731,00	(2.747.269,00)	91,00		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.512.000,00	27.764.731,00	(2.747.269,00)	91,00		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.512.000,00	27.764.731,00	(2.747.269,00)	91,00		
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	94.897.000,00	91.709.550,00	(3.187.450,00)	96,65		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	94.897.000,00	91.709.550,00	(3.187.450,00)	96,65		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.697.000,00	91.709.550,00	(2.987.450,00)	96,85		
07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5.375.000,00	4.209.000,00	(1.166.000,00)	78,31		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.375.000,00	4.209.000,00	(1.166.000,00)	78,31		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	4.209.000,00	(1.166.000,00)	78,31		
07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	294.964.400,00	267.909.400,00	(27.055.000,00)	90,83		
07.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	294.964.400,00	267.909.400,00	(27.055.000,00)	90,83		
07.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.964.400,00	267.909.400,00	(27.055.000,00)	90,83		
07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	21.040.000,00	21.001.600,00	(38.400,00)	99,82		
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	21.040.000,00	21.001.600,00	(38.400,00)	99,82		
07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	11.193.000,00	11.154.800,00	(38.200,00)	99,66		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.193.000,00	11.154.800,00	(38.200,00)	99,66		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.193.000,00	11.154.800,00	(38.200,00)	99,66		
07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	9.847.000,00	9.846.800,00	(200,00)	100,00		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.847.000,00	9.846.800,00	(200,00)	100,00		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.847.000,00	9.846.800,00	(200,00)	100,00		
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.685.595.000,00	1.514.782.042,00	(170.812.958,00)	89,87		
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.685.595.000,00	1.514.782.042,00	(170.812.958,00)	89,87		
08.2.01.01	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.685.595.000,00	1.514.782.042,00	(170.812.958,00)	89,87		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.685.595.000,00	1.514.782.042,00	(170.812.958,00)	89,87		
08.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.770.000,00	6.770.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.678.825.000,00	1.508.012.042,00	(170.812.958,00)	89,83		
	SURPLUS / DEFISIT	(7.674.848.502,00)	(7.368.497.524,00)	306.350.978,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEMAAAN	(7.674.848.502,00)	(7.368.497.524,00)	306.350.978,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.5-06.0-00.01 Sekretariat Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.000.00.5	BELANJA DAERAH	52.851.674.644,00	48.843.741.294,00	(4.010.933.350,00)	92,41		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.138.122.218,00	26.594.208.754,00	(1.543.913.464,00)	94,51		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.842.558.123,00	9.846.440.877,00	(796.119.246,00)	92,52		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.315.570.123,00	9.521.820.877,00	(793.749.246,00)	92,31		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.315.570.123,00	9.521.820.877,00	(793.749.246,00)	92,31		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.315.570.123,00	9.521.820.877,00	(793.749.246,00)	92,31		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	326.980.000,00	324.820.000,00	(2.160.000,00)	99,28		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	326.980.000,00	324.820.000,00	(2.160.000,00)	99,28		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	326.980.000,00	324.820.000,00	(2.160.000,00)	99,28		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.784.035.071,00	7.596.657.527,00	(187.377.544,00)	97,59		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	234.573.088,00	234.306.965,00	(266.123,00)	99,89		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	234.573.088,00	234.306.965,00	(266.123,00)	99,89		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.573.088,00	234.306.965,00	(266.123,00)	99,89		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.782.711.796,00	1.758.954.580,00	(23.757.216,00)	98,67		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.782.711.796,00	1.758.954.580,00	(23.757.216,00)	98,67		
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	8.610.000,00	4.160.000,00	(4.450.000,00)	48,15		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.191.796,00	408.521.100,00	(670.696,00)	99,78		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	1.384.580.000,00	1.346.273.450,00	(38.306.550,00)	96,88		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.384.580.000,00	1.346.273.450,00	(38.306.550,00)	96,88		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	187.451.300,00	187.179.350,00	(271.950,00)	99,94		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	187.451.300,00	187.179.350,00	(271.950,00)	99,94		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.481.300,00	187.179.350,00	(301.950,00)	99,81		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.470.081.000,00	2.461.008.158,00	(9.071.842,00)	99,63		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.470.081.000,00	2.461.008.158,00	(9.071.842,00)	99,63		
01.2.06.08.5.1.01	Belanja Pegawai	2.680.000,00	2.590.000,00	(90.000,00)	96,64		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.467.401.000,00	2.458.418.158,00	(8.982.842,00)	99,64		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.109.187.887,00	2.955.210.504,00	(153.977.383,00)	95,05		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.109.187.887,00	2.955.210.504,00	(153.977.383,00)	95,05		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.109.187.887,00	2.955.210.504,00	(153.977.383,00)	95,05		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.572.604.980,00	2.458.587.940,00	(114.017.040,00)	95,56		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.000.000,00	25.950.000,00	(50.000,00)	99,81		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	25.950.000,00	(50.000,00)	99,81		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	25.950.000,00	(50.000,00)	99,81		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	516.064.980,00	432.566.518,00	(83.498.462,00)	83,82		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	516.064.980,00	432.566.518,00	(83.498.462,00)	83,82		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.064.980,00	432.566.518,00	(83.498.462,00)	83,82		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.030.630.000,00	2.000.071.422,00	(30.558.578,00)	98,50		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.030.630.000,00	2.000.071.422,00	(30.558.578,00)	98,50		
01.2.08.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.640.000,00	6.830.000,00	(2.010.000,00)	76,74		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.021.990.000,00	1.993.441.422,00	(28.548.578,00)	98,59		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.654.728.170,00	2.512.333.390,00	(142.394.880,00)	94,64		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	519.688.292,00	490.329.390,00	(29.358.902,00)	94,35		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	519.688.292,00	490.329.390,00	(29.358.902,00)	94,35		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.688.292,00	490.329.390,00	(29.358.902,00)	94,35		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.840.711.968,00	1.736.162.580,00	(104.549.388,00)	94,32		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.840.711.968,00	1.736.162.580,00	(104.549.388,00)	94,32		
01.2.09.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.680.000,00	0,00	(2.680.000,00)	0		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.838.031.968,00	1.736.162.580,00	(101.869.388,00)	94,48		
01.2.09.03	Pemeliharaan/Pohablitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	158.212.480,00	154.048.000,00	(4.164.480,00)	97,30		
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	158.212.480,00	154.048.000,00	(4.164.480,00)	97,30		
01.2.09.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.750.000,00	680.000,00	(3.070.000,00)	18,13		
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.462.480,00	153.048.000,00	(1.414.480,00)	99,73		
01.2.09.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.462.480,00	154.048.000,00	(414.480,00)	99,73		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.115.450,00	131.113.350,00	(5.002.100,00)	96,33		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	72.483.200,00	67.582.350,00	(4.900.850,00)	93,24		
01.2.09.11.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.233.200,00	67.582.350,00	(3.650.850,00)	94,87		
01.2.09.11.5.2	BELANJA MODAL	63.632.250,00	63.531.000,00	(101.250,00)	99,84		
01.2.09.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.632.250,00	63.531.000,00	(101.250,00)	99,84		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.064.781.738,00	984.179.266,00	(80.602.472,00)	92,41		
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	166.981.738,00	165.985.696,00	(996.042,00)	99,40		
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	166.981.738,00	165.985.696,00	(996.042,00)	99,40		
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	166.981.738,00	165.985.696,00	(996.042,00)	99,40		
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	401.800.000,00	399.555.620,00	(2.244.380,00)	99,44		
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	401.800.000,00	399.555.620,00	(2.244.380,00)	99,44		
01.2.11.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.000.000,00	2.300.000,00	(1.610.000,00)	57,50		
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.800.000,00	397.255.620,00	(544.380,00)	99,36		
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	98.000.000,00	18.641.950,00	(79.358.050,00)	19,02		
01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	98.000.000,00	18.641.950,00	(79.358.050,00)	19,02		
01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	18.641.950,00	(79.358.050,00)	19,02		
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	399.996.000,00	(4.000,00)	100,00		
01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	399.996.000,00	(4.000,00)	100,00		
01.2.11.04.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	399.996.000,00	(4.000,00)	100,00		
01.2.12	Fasilitasi Kemahasiswaan Sekretariat Daerah	1.444.650.364,00	1.365.209.600,00	(79.440.764,00)	94,58		
01.2.12.01	Penyediaan Kelengkapan Rumah Tangga Kepala Daerah	803.674.400,00	787.382.095,00	(16.292.305,00)	97,85		
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	803.674.400,00	787.382.095,00	(16.292.305,00)	97,85		
01.2.12.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.680.000,00	1.230.000,00	(1.450.000,00)	45,90		
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.367.400,00	619.748.705,00	(10.618.695,00)	98,32		
01.2.12.01.5.2	BELANJA MODAL	170.627.000,00	166.403.390,00	(4.223.610,00)	97,52		
01.2.12.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.627.000,00	166.403.390,00	(4.223.610,00)	97,52		
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	590.315.964,00	561.497.585,00	(28.818.379,00)	95,12		
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	470.132.400,00	440.197.945,00	(29.934.455,00)	93,62		
01.2.12.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.680.000,00	1.230.000,00	(1.450.000,00)	45,90		
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.452.400,00	438.907.945,00	(28.544.455,00)	93,89		
01.2.12.02.5.2	BELANJA MODAL	120.183.564,00	111.359.640,00	(8.823.924,00)	92,66		
01.2.12.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.183.564,00	111.359.640,00	(8.823.924,00)	92,66		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	59.660.000,00	46.330.000,00	(4.330.000,00)	91,45		
01.2.12.03.5.1	BELANJA OPERASI	59.660.000,00	46.330.000,00	(4.330.000,00)	91,45		
01.2.12.03.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	570.000,00	(30.000,00)	95,00		
01.2.12.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.060.000,00	45.760.000,00	(4.240.000,00)	91,52		
01.2.13	Penataan Organisasi	497.267.694,00	439.937.981,00	(57.329.713,00)	88,47		
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	83.131.900,00	74.290.270,00	(8.841.630,00)	89,36		
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.131.900,00	74.290.270,00	(8.841.630,00)	89,36		
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.131.900,00	74.290.270,00	(8.841.630,00)	89,36		
01.2.13.02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	242.679.000,00	226.539.637,00	(16.139.363,00)	93,35		
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	242.679.000,00	226.539.637,00	(16.139.363,00)	93,35		
01.2.13.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.100.000,00	1.000.000,00	(1.100.000,00)	47,62		
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.579.000,00	225.539.637,00	(15.039.363,00)	93,75		
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	171.458.799,00	139.108.054,00	(32.348.745,00)	81,13		
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	171.458.799,00	139.108.054,00	(32.348.745,00)	81,13		
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.458.799,00	139.108.054,00	(32.348.745,00)	81,13		
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.477.414.073,00	1.376.882.103,00	(100.521.890,00)	92,79		
01.2.14.01	Facilitasi Keprotokolan	580.465.883,00	526.777.305,00	(53.688.588,00)	90,75		
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	580.465.883,00	526.777.305,00	(53.688.588,00)	90,75		
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.465.883,00	526.777.305,00	(53.688.588,00)	90,75		
01.2.14.02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	129.153.000,00	116.140.950,00	(13.008.050,00)	89,93		
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	129.153.000,00	116.140.950,00	(13.008.050,00)	89,93		
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.153.000,00	116.140.950,00	(13.008.050,00)	89,93		
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	767.795.180,00	727.987.928,00	(39.807.252,00)	94,81		
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	767.795.180,00	727.987.928,00	(39.807.252,00)	94,81		
01.2.14.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.530.000,00	1.360.000,00	(170.000,00)	88,89		
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.265.180,00	726.607.928,00	(39.657.252,00)	94,82		
02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	24.273.112.120,00	21.808.820.712,00	(2.404.291.414,00)	90,09		
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	265.426.690,00	258.388.168,00	(7.038.522,00)	97,35		
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	37.810.390,00	35.438.900,00	(2.371.490,00)	93,73		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.810.390,00	35.438.900,00	(2.371.490,00)	93,73		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.810.390,00	35.438.900,00	(2.371.490,00)	93,73		
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9.721.600,00	9.297.300,00	(424.300,00)	95,64		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.721.600,00	9.297.300,00	(424.300,00)	95,64		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.721.600,00	9.297.300,00	(424.300,00)	95,64		
02.2.01.03	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	217.894.700,00	213.651.988,00	(4.242.712,00)	98,05		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	217.894.700,00	213.651.988,00	(4.242.712,00)	98,05		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.894.700,00	213.651.988,00	(4.242.712,00)	98,05		
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	23.624.360.700,00	21.363.808.140,00	(2.260.552.560,00)	90,43		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	21.267.929.200,00	19.028.180.940,00	(2.239.748.260,00)	89,47		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.267.929.200,00	19.028.180.940,00	(2.239.748.260,00)	89,47		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.267.929.200,00	17.028.180.940,00	(2.239.748.260,00)	88,38		
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02	Polaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	80.499.500,00	66.430.600,00	(14.068.900,00)	82,52		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.499.500,00	66.430.600,00	(14.068.900,00)	82,52		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.499.500,00	66.430.600,00	(14.068.900,00)	82,52		
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.275.932.000,00	2.269.196.800,00	(6.735.400,00)	99,70		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.275.932.000,00	2.269.196.800,00	(6.735.400,00)	99,70		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.275.932.000,00	2.269.196.800,00	(6.735.400,00)	99,70		
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	98.266.736,00	85.896.704,00	(12.370.032,00)	87,41		
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	98.266.736,00	85.896.704,00	(12.370.032,00)	87,41		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	98.266.736,00	85.896.704,00	(12.370.032,00)	87,41		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.266.736,00	85.896.704,00	(12.370.032,00)	87,41		
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	225.000.000,00	130.764.700,00	(94.235.300,00)	58,12		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	130.764.700,00	(94.235.300,00)	58,12		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	130.764.700,00	(94.235.300,00)	58,12		
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	60.058.000,00	29.863.000,00	(30.095.000,00)	49,89		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.058.000,00	29.863.000,00	(30.095.000,00)	49,89		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.058.000,00	29.863.000,00	(30.095.000,00)	49,89		
02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	42.991.500,00	31.459.232,00	(11.532.268,00)	73,18		
02.2.02	Polaksanaan Wilayah Perbatasan	42.991.500,00	31.459.232,00	(11.532.268,00)	73,18		
02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	42.991.500,00	31.459.232,00	(11.532.268,00)	73,18		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.991.500,00	31.459.232,00	(11.532.268,00)	73,18		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.991.500,00	31.459.232,00	(11.532.268,00)	73,18		
03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	102.418.900,00	92.329.504,00	(9.189.396,00)	90,65		
03.2.01	Polaksanaan Kebijakan Perakonomian	102.081.900,00	92.329.504,00	(9.752.396,00)	90,65		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan UUMD dan BLUD	30.000.000,00	20.414.000,00	(9.586.000,00)	68,05		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	20.414.000,00	(9.586.000,00)	68,05		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.414.000,00	(9.586.000,00)	68,05		
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perakonomian	42.082.000,00	41.964.200,00	(117.800,00)	99,72		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.082.000,00	41.964.200,00	(117.800,00)	99,72		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.082.000,00	41.964.200,00	(117.800,00)	99,72		
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	29.999.000,00	29.951.304,00	(47.696,00)	99,84		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	29.999.000,00	29.951.304,00	(47.696,00)	99,84		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.900,00	29.951.304,00	(48.596,00)	99,84		
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	76.275.900,00	59.725.246,00	(16.550.654,00)	78,99		
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	43.825.900,00	33.002.346,00	(10.823.554,00)	75,65		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	43.825.900,00	33.002.346,00	(10.823.554,00)	75,65		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.825.900,00	33.002.346,00	(10.823.554,00)	75,65		
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	32.650.000,00	25.722.900,00	(6.927.100,00)	78,78		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	32.650.000,00	25.722.900,00	(6.927.100,00)	78,78		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.650.000,00	25.722.900,00	(6.927.100,00)	78,78		
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	202.091.000,00	178.487.046,00	(23.603.954,00)	88,32		
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	114.321.000,00	96.943.146,00	(17.377.854,00)	84,80		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	114.321.000,00	96.943.146,00	(17.377.854,00)	84,80		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.321.000,00	96.943.146,00	(17.377.854,00)	84,80		
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	67.500.000,00	67.000.000,00	(500.000,00)	99,26		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	67.500.000,00	67.000.000,00	(500.000,00)	99,26		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	67.000.000,00	(500.000,00)	99,26		
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20.270.000,00	14.543.900,00	(5.726.100,00)	71,75		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.270.000,00	14.543.900,00	(5.726.100,00)	71,75		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.270.000,00	14.543.900,00	(5.726.100,00)	71,75		
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	20.000.000,00	19.680.800,00	(319.200,00)	98,40		
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	20.000.000,00	19.680.800,00	(319.200,00)	98,40		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.680.800,00	(319.200,00)	98,40		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.680.800,00	(319.200,00)	98,40		
	SURPLUS / DEHSIT	(52.854.674.644,00)	(48.843.741.294,00)	4.010.933.350,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(52.854.674.644,00)	(48.843.741.294,00)	4.010.933.350,00	0		



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETEHAANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	26.581.910.853,00	25.369.998.823,00	(1.211.912.030,00)	95,44		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.057.886.153,00	14.768.378.055,00	(289.508.098,00)	98,08		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.011.729.051,00	11.093.678.523,00	(118.050.528,00)	99,00		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.688.729.051,00	11.570.858.523,00	(117.870.528,00)	98,99		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.688.729.051,00	11.570.858.523,00	(117.870.528,00)	98,99		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.688.729.051,00	11.570.858.523,00	(117.870.528,00)	98,99		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.000.000,00	122.820.000,00	(6.180.000,00)	99,85		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	129.000.000,00	122.820.000,00	(6.180.000,00)	99,85		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	129.000.000,00	122.820.000,00	(6.180.000,00)	99,85		
01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	75,00		
01.2.05.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	75,00		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	75,00		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	75,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.124.891.828,00	1.069.913.976,00	(54.980.852,00)	95,11		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.997.344,00	32.234.000,00	(2.763.344,00)	92,10		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.997.344,00	32.234.000,00	(2.763.344,00)	92,10		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.997.344,00	32.234.000,00	(2.763.344,00)	92,10		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.000.000,00	123.075.200,00	(12.924.800,00)	90,50		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	136.000.000,00	123.075.200,00	(12.924.800,00)	90,50		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000,00	123.075.200,00	(12.924.800,00)	90,50		



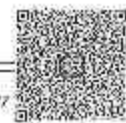
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.488.784,00	50.474.076,00	(14.708,00)	99,97		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.488.784,00	50.474.076,00	(14.708,00)	99,97		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.488.784,00	50.474.076,00	(14.708,00)	99,97		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.166.400,00	212.730.400,00	(436.000,00)	99,80		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	213.166.400,00	212.730.400,00	(436.000,00)	99,80		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.166.400,00	212.730.400,00	(436.000,00)	99,80		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	348.642.300,00	345.344.500,00	(3.297.800,00)	99,05		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	348.642.300,00	345.344.500,00	(3.297.800,00)	99,05		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.642.300,00	345.344.500,00	(3.297.800,00)	99,05		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	135.050.000,00	135.009.500,00	(40.500,00)	99,97		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	135.050.000,00	135.009.500,00	(40.500,00)	99,97		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.050.000,00	135.009.500,00	(40.500,00)	99,97		
01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.550.000,00	171.046.300,00	(35.503.700,00)	82,81		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	206.550.000,00	171.046.300,00	(35.503.700,00)	82,81		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.550.000,00	171.046.300,00	(35.503.700,00)	82,81		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.470.678,00	131.387.000,00	(83.678,00)	99,94		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.470.678,00	131.387.000,00	(83.678,00)	99,94		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	131.470.678,00	131.387.000,00	(83.678,00)	99,94		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.470.678,00	131.387.000,00	(83.678,00)	99,94		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.719.750,00	131.450.098,00	(12.269.712,00)	91,64		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.549.750,00	68.913.188,00	(11.636.562,00)	85,55		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.549.750,00	68.913.188,00	(11.636.562,00)	85,55		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.549.750,00	68.913.188,00	(11.636.562,00)	85,55		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.170.000,00	57.536.850,00	(633.150,00)	98,91		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	58.170.000,00	57.536.850,00	(633.150,00)	98,91		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.170.000,00	57.536.850,00	(633.150,00)	98,91		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.603.816,00	454.479.818,00	(93.123.998,00)	82,99		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.208.600,00	188.570.685,00	(61.637.915,00)	75,37		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.208.600,00	188.570.685,00	(61.637.915,00)	75,37		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.208.600,00	188.570.685,00	(61.637.915,00)	75,37		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.392.300,00	239.130.933,00	(18.261.367,00)	92,91		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	257.392.300,00	239.130.933,00	(18.261.367,00)	92,91		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.392.300,00	239.130.933,00	(18.261.367,00)	92,91		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.999.946,00	26.778.000,00	(13.221.946,00)	66,95		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	39.999.946,00	26.778.000,00	(13.221.946,00)	66,95		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.946,00	26.778.000,00	(13.221.946,00)	66,95		
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	423.000.000,00	423.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	373.000.000,00	373.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	373.000.000,00	373.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.000.000,00	373.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	832.471.000,00	831.468.900,00	(1.002.100,00)	99,86		
01.2.16.03	Fasilitas Hapal Koordinasi dan Konsultasi DPRD	832.471.000,00	831.468.900,00	(1.002.100,00)	99,86		
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	832.471.000,00	831.468.900,00	(1.002.100,00)	99,86		
01.2.16.03.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00		
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.791.000,00	830.788.900,00	(1.002.100,00)	99,88		
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.524.024.700,00	10.801.020.768,00	(922.403.932,00)	92,00		
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.683.051.000,00	2.636.529.127,00	(46.521.873,00)	98,27		
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	2.629.915.000,00	2.615.449.127,00	(14.465.873,00)	99,45		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.629.915.000,00	2.615.449.127,00	(14.465.873,00)	99,45		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.629.915.000,00	2.615.449.127,00	(14.465.873,00)	99,45		
02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	53.136.000,00	21.080.000,00	(32.056.000,00)	39,67		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	53.136.000,00	21.080.000,00	(32.056.000,00)	39,67		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.136.000,00	21.080.000,00	(32.056.000,00)	39,67		
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.679.143.000,00	1.509.237.218,00	(89.905.782,00)	94,05		
02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	513.736.000,00	513.529.300,00	(206.700,00)	99,96		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	513.736.000,00	513.529.300,00	(206.700,00)	99,96		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.736.000,00	513.529.300,00	(206.700,00)	99,96		
02.2.02.03	Pembahasan APBD	709.669.000,00	621.846.457,00	(87.822.543,00)	87,62		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	709.669.000,00	621.846.457,00	(87.822.543,00)	87,62		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.669.000,00	621.846.457,00	(87.822.543,00)	87,62		
02.2.02.06	Pembahasan Perangjawaan APBD	455.738.000,00	453.061.461,00	(1.876.539,00)	99,59		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	455.738.000,00	453.061.461,00	(1.876.539,00)	99,59		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.738.000,00	453.861.461,00	(1.876.539,00)	99,59		
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	206.544.700,00	201.503.300,00	(1.041.400,00)	99,49		
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	48.760.000,00	48.700.000,00	(60.000,00)	99,88		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	48.760.000,00	48.700.000,00	(60.000,00)	99,88		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.760.000,00	48.700.000,00	(60.000,00)	99,88		
02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	43.130.000,00	42.990.000,00	(140.000,00)	99,68		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	43.130.000,00	42.990.000,00	(140.000,00)	99,68		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.130.000,00	42.990.000,00	(140.000,00)	99,68		
02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	33.199.700,00	32.991.800,00	(207.900,00)	99,37		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	33.199.700,00	32.991.800,00	(207.900,00)	99,37		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.199.700,00	32.991.800,00	(207.900,00)	99,37		
02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	80.455.000,00	79.821.500,00	(633.500,00)	99,21		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	80.455.000,00	79.821.500,00	(633.500,00)	99,21		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.455.000,00	79.821.500,00	(633.500,00)	99,21		
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.251.451.000,00	1.223.037.900,00	(28.413.100,00)	97,73		
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	894.451.000,00	866.037.900,00	(28.413.100,00)	96,82		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	894.451.000,00	866.037.900,00	(28.413.100,00)	96,82		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	894.451.000,00	866.037.900,00	(28.413.100,00)	96,82		
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.05	Penyorotan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	545.345.000,00	542.340.000,00	(3.005.000,00)	99,45		
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	545.345.000,00	542.340.000,00	(3.005.000,00)	99,45		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	545.345.000,00	542.340.000,00	(3.005.000,00)	99,45		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.345.000,00	542.340.000,00	(3.005.000,00)	99,45		
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5.159.490.000,00	4.405.974.223,00	(753.515.777,00)	85,40		
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.582.395.000,00	4.020.405.912,00	(561.989.088,00)	87,74		
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.582.395.000,00	4.020.405.912,00	(561.989.088,00)	87,74		
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.582.395.000,00	4.020.405.912,00	(561.989.088,00)	87,74		
02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	577.095.000,00	385.567.311,00	(191.527.689,00)	66,81		
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	577.095.000,00	385.567.311,00	(191.527.689,00)	66,81		
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.095.000,00	385.567.311,00	(191.527.689,00)	66,81		
	SURPLUS / DEFISIT	(26.581.910.853,00)	(25.369.998.823,00)	1.211.912.030,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(26.581.910.853,00)	(25.369.998.823,00)	1.211.912.030,00	0		



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

SKPD : 5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.000.00.5	BELANJA DAERAH	4.669.306.741,00	4.263.185.583,00	(406.121.148,00)	91,33		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.511.848.001,00	3.353.330.430,00	(178.518.571,00)	94,95		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.026.104.800,00	2.908.049.511,00	(118.055.289,00)	96,10		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.038.264.800,00	2.021.279.511,00	(17.585.289,00)	98,00		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.038.264.800,00	2.021.279.511,00	(17.585.289,00)	98,00		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.038.264.800,00	2.021.279.511,00	(17.585.289,00)	96,00		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.240.000,00	86.770.000,00	(470.000,00)	99,46		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	87.240.000,00	86.770.000,00	(470.000,00)	99,46		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	87.240.000,00	86.770.000,00	(470.000,00)	99,46		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.333.553,00	227.521.467,00	(36.812.086,00)	86,07		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.931.636,00	6.930.000,00	(1.636,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.931.636,00	6.930.000,00	(1.636,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.931.636,00	6.930.000,00	(1.636,00)	99,98		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.672.000,00	33.559.000,00	(113.000,00)	99,66		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.672.000,00	33.559.000,00	(113.000,00)	99,66		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.672.000,00	33.559.000,00	(113.000,00)	99,66		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.605.925,00	9.605.000,00	(925,00)	99,99		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.605.925,00	9.605.000,00	(925,00)	99,99		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.605.925,00	9.605.000,00	(925,00)	99,99		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	26.495.992,00	26.346.400,00	(149.592,00)	99,44		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	26.495.992,00	26.346.400,00	(149.592,00)	99,44		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.495.992,00	26.316.400,00	(179.592,00)	99,44		
01.2.06.08	fasilitasi Kunjungan Tamu	7.020.000,00	3.725.000,00	(3.295.000,00)	53,06		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	7.020.000,00	3.725.000,00	(3.295.000,00)	53,06		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	3.725.000,00	(3.295.000,00)	53,06		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.808.000,00	147.356.057,00	(33.251.943,00)	81,59		
01.2.06.09.5.1	DELANJA OPFRASI	180.808.000,00	147.356.057,00	(33.251.943,00)	81,59		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.808.000,00	147.356.057,00	(33.251.943,00)	81,59		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.970.112,00	49.940.376,00	(6.029.736,00)	89,23		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.890.112,00	28.721.376,00	(5.168.736,00)	84,75		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.890.112,00	28.721.376,00	(5.168.736,00)	84,75		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.890.112,00	28.721.376,00	(5.168.736,00)	84,75		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.450.000,00	18.509.000,00	(861.000,00)	95,57		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.450.000,00	18.509.000,00	(861.000,00)	95,57		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	18.509.000,00	(861.000,00)	95,57		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.440.536,00	167.819.086,00	(17.621.450,00)	90,50		
01.2.09.02	Penyerahan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Louangan	155.724.413,00	140.857.086,00	(14.867.327,00)	90,45		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	155.724.413,00	140.857.086,00	(14.867.327,00)	90,45		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.724.413,00	140.857.086,00	(14.867.327,00)	90,45		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.716.123,00	26.962.000,00	(2.754.123,00)	90,73		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	29.716.123,00	26.962.000,00	(2.754.123,00)	90,73		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.716.123,00	26.962.000,00	(2.754.123,00)	90,73		
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	479.048.000,00	383.719.797,00	(95.328.203,00)	80,10		
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	406.670.500,00	310.265.243,00	(96.405.257,00)	83,67		
02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Strategi Pembangunan Daerah	67.908.000,00	33.908.111,00	(33.999.889,00)	49,93		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	67.908.000,00	33.908.111,00	(33.999.889,00)	49,93		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.908.000,00	33.908.111,00	(33.999.889,00)	49,93		
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	37.092.800,00	37.399.800,00	4.693.000,00	87,35		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	37.092.800,00	37.399.800,00	4.693.000,00	87,35		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.092.800,00	37.399.800,00	4.693.000,00	87,35		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Linlas Perangkat Daerah	10.903.000,00	6.128.900,00	(4.774.100,00)	56,21		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.903.000,00	6.128.900,00	(4.774.100,00)	56,21		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.903.000,00	6.128.900,00	(4.774.100,00)	56,21		
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	61.700.000,00	54.484.300,00	(7.215.700,00)	88,31		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	61.700.000,00	54.484.300,00	(7.215.700,00)	88,31		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.700.000,00	54.484.300,00	(7.215.700,00)	88,31		
02.2.01.06	Penyapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	26.394.800,00	25.047.800,00	(1.347.000,00)	94,90		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	26.394.800,00	25.047.800,00	(1.347.000,00)	94,90		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.394.800,00	25.047.800,00	(1.347.000,00)	94,90		
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	202.671.900,00	188.295.332,00	(14.376.568,00)	92,91		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	202.671.900,00	188.295.332,00	(14.376.568,00)	92,91		
02.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	570.000,00	0,00	(570.000,00)	0		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.101.900,00	188.295.332,00	(13.806.568,00)	93,17		
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	11.883.000,00	2.847.000,00	(9.036.000,00)	23,96		
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	11.883.000,00	2.847.000,00	(9.036.000,00)	23,96		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.883.000,00	2.847.000,00	(9.036.000,00)	23,96		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.883.000,00	2.847.000,00	(9.036.000,00)	23,96		
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	63.494.500,00	40.597.554,00	(19.896.946,00)	63,98		
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	19.700.500,00	14.194.254,00	(5.506.246,00)	72,05		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.700.500,00	14.194.254,00	(5.506.246,00)	72,05		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.700.500,00	14.194.254,00	(5.506.246,00)	72,05		
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	40.794.000,00	26.403.300,00	(14.390.700,00)	64,72		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.794.000,00	26.403.300,00	(14.390.700,00)	64,72		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.794.000,00	26.403.300,00	(14.390.700,00)	64,72		
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	83.301.200,00	57.029.629,00	(26.271.571,00)	68,46		
02.2.04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	35.442.500,00	27.136.200,00	(8.306.300,00)	76,56		
02.2.04.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	35.442.500,00	27.136.200,00	(8.306.300,00)	76,56		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.442.500,00	27.136.200,00	(8.306.300,00)	76,56		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.442.500,00	27.136.200,00	(8.306.300,00)	76,56		
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	47.858.700,00	29.893.429,00	(17.965.271,00)	62,46		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	36.964.900,00	21.077.629,00	(15.887.271,00)	57,02		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	36.964.900,00	21.077.629,00	(15.887.271,00)	57,02		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.964.900,00	21.077.629,00	(15.887.271,00)	57,02		
02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kolaborasi	10.893.800,00	8.815.800,00	(2.078.000,00)	80,92		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.893.800,00	8.815.800,00	(2.078.000,00)	80,92		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.893.800,00	8.815.800,00	(2.078.000,00)	80,92		
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	574.108.540,00	469.415.737,00	(104.692.803,00)	81,76		
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	226.214.500,00	190.068.962,00	(36.145.538,00)	84,02		
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.110.500,00	37.681.300,00	(14.429.200,00)	72,31		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.110.500,00	37.681.300,00	(14.429.200,00)	72,31		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.110.500,00	37.681.300,00	(14.429.200,00)	72,31		
03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	26.587.000,00	21.503.400,00	(5.083.600,00)	80,88		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.587.000,00	21.503.400,00	(5.083.600,00)	80,88		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.587.000,00	21.503.400,00	(5.083.600,00)	80,88		
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.015.000,00	76.156.362,00	(13.858.638,00)	84,60		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	90.015.000,00	76.156.362,00	(13.858.638,00)	84,60		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.015.000,00	76.156.362,00	(13.858.638,00)	84,60		
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	57.502.000,00	54.727.300,00	(2.774.700,00)	95,17		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	57.502.000,00	54.727.300,00	(2.774.700,00)	95,17		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.502.000,00	54.727.300,00	(2.774.700,00)	95,17		
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	191.704.940,00	133.249.203,00	(58.535.737,00)	69,48		
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.401.400,00	50.768.254,00	(10.633.146,00)	82,68		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	61.401.400,00	50.768.254,00	(10.633.146,00)	82,68		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.401.400,00	50.768.254,00	(10.633.146,00)	82,68		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	83.579.000,00	44.038.144,00	(39.540.856,00)	52,69		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	83.579.000,00	44.038.144,00	(39.540.856,00)	52,69		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.579.000,00	44.038.144,00	(39.540.856,00)	52,69		
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (DIPUD, RPJMD dan HKPD)	29.279.040,00	26.249.005,00	(3.030.035,00)	89,65		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	29.279.040,00	26.249.005,00	(3.030.035,00)	89,65		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.279.040,00	26.249.005,00	(3.030.035,00)	89,65		
03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17.525.500,00	12.193.800,00	(5.331.700,00)	69,58		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	17.525.500,00	12.193.800,00	(5.331.700,00)	69,58		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.525.500,00	12.193.800,00	(5.331.700,00)	69,58		
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	156.109.100,00	146.008.172,00	(10.110.928,00)	93,59		
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.425.100,00	69.646.100,00	(12.779.000,00)	84,55		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	82.425.100,00	69.646.100,00	(12.779.000,00)	84,55		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.425.100,00	69.646.100,00	(12.779.000,00)	84,55		
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	26.164.000,00	24.705.900,00	(1.458.100,00)	94,43		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.164.000,00	24.705.900,00	(1.458.100,00)	94,43		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.164.000,00	24.705.900,00	(1.458.100,00)	94,43		
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.539.000,00	46.707.672,00	(3.831.328,00)	92,42		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.539.000,00	46.707.672,00	(3.831.328,00)	92,42		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.539.000,00	46.707.672,00	(3.831.328,00)	92,42		
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	16.981.000,00	15.038.500,00	(1.942.500,00)	88,56		
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	16.981.000,00	15.038.500,00	(1.942.500,00)	88,56		
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.981.000,00	15.038.500,00	(1.942.500,00)	88,56		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.668.306.741,00)	(4.263.485.593,00)	404.821.148,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.668.306.741,00)	(4.263.485.593,00)	404.821.148,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
101.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	786.187.010.884,00	787.898.822.904,00	(8.287.188.179,91)	98,96		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.160.386.833,00	36.756.615.244,00	3.596.218.411,00	110,84		
00.0.01.00.4.1.01	Pajak Daerah	12.027.863.123,00	11.176.280.565,00	(1.451.673.558,00)	88,50		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	665.000.000,00	729.694.933,00	64.694.933,00	109,73		
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.628.000.000,00	2.796.556.717,00	168.556.717,00	106,41		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.239.433.710,00	22.054.074.029,00	4.814.640.319,00	127,93		
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	753.151.483.651,00	741.131.287.237,00	(12.020.176.614,00)	98,40		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	697.504.784.241,00	695.105.975.634,00	-3.601.191.393,00	100,52		
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.646.679.610,00	46.025.311.603,00	(15.021.368.007,00)	74,86		
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.875.150.000,00	10.011.920.023,00	136.770.023,00	101,38		
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.875.150.000,00	10.011.920.023,00	136.770.023,00	101,38		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	118.012.566.957,00	116.059.698.872,00	(1.952.868.085,00)	98,35		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.911.400.432,00	18.415.735.657,00	(485.664.775,00)	97,38		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.094.610.283,00	17.674.221.905,00	(420.388.378,00)	97,68		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.778.190.283,00	17.362.857.405,00	(418.532.878,00)	97,66		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.778.190.283,00	17.362.857.405,00	(418.532.878,00)	97,68		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	17.647.190.283,00	17.247.501.857,00	(399.626.426,00)	97,74		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	115.005.548,00	(16.804.452,00)	87,13		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	315.420.000,00	311.584.500,00	(3.855.500,00)	98,78		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	315.420.000,00	311.584.500,00	(3.855.500,00)	98,78		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	315.420.000,00	311.584.500,00	(3.855.500,00)	98,78		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.791.775,00	382.721.532,00	(24.070.243,00)	91,41		
01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.954.075,00	4.715.000,00	(239.075,00)	95,17		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.954.075,00	4.715.000,00	(239.075,00)	95,17		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.954.075,00	4.715.000,00	(239.075,00)	95,17		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.290.000,00	104.210.870,00	(27.070.130,00)	97,76		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.044.000,00	41.210.870,00	(16.833.130,00)	71,00		
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.794.000,00	39.960.870,00	(10.833.130,00)	70,36		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	163.246.000,00	153.000.000,00	(10.246.000,00)	93,72		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.246.000,00	153.000.000,00	(10.246.000,00)	93,72		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.877.900,00	25.769.730,00	(108.170,00)	99,58		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.877.900,00	25.769.730,00	(108.170,00)	99,58		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.877.900,00	25.769.730,00	(108.170,00)	99,58		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.850.000,00	18.721.900,00	(3.128.100,00)	85,68		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.850.000,00	18.721.900,00	(3.128.100,00)	85,68		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.850.000,00	18.721.900,00	(3.128.100,00)	85,68		
01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	4.999.800,00	3.960.000,00	(1.039.800,00)	79,20		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.999.800,00	3.960.000,00	(1.039.800,00)	79,20		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800,00	3.960.000,00	(1.039.800,00)	79,20		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.820.000,00	115.344.032,00	(2.475.968,00)	97,90		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	117.820.000,00	115.344.032,00	(2.475.968,00)	97,90		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.820.000,00	115.344.032,00	(2.475.968,00)	97,90		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.021.400,00	94.956.494,00	(21.064.906,00)	81,84		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.600.000,00	(400.000,00)	92,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.600.000,00	(400.000,00)	92,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.600.000,00	(400.000,00)	92,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.181.400,00	63.039.494,00	(9.141.906,00)	87,33		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	72.181.400,00	63.039.494,00	(9.141.906,00)	87,33		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.181.400,00	63.039.494,00	(9.141.906,00)	87,33		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.840.000,00	27.317.000,00	(11.523.000,00)	70,33		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	38.840.000,00	27.317.000,00	(11.523.000,00)	70,33		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.840.000,00	27.317.000,00	(11.523.000,00)	70,33		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.976.974,00	283.935.726,00	(20.141.248,00)	93,37		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.273.450,00	203.409.726,00	(19.783.724,00)	91,14		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	223.273.450,00	203.409.726,00	(19.783.724,00)	91,14		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.273.450,00	203.480.728,00	(18.783.724,00)	91,14		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.053.524,00	29.925.000,00	(128.524,00)	99,57		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	30.053.524,00	29.925.000,00	(128.524,00)	99,57		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.053.524,00	29.925.000,00	(128.524,00)	99,57		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.650.000,00	50.421.000,00	(229.000,00)	99,55		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	50.650.000,00	50.421.000,00	(229.000,00)	99,55		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.650.000,00	50.421.000,00	(229.000,00)	99,55		
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	95.046.318.804,00	91.620.804.312,00	(1.225.514.492,00)	98,72		
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.288.783.750,00	1.092.742.428,00	(184.041.324,00)	84,92		
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	132.312.150,00	128.200.500,00	(4.111.650,00)	96,89		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	132.312.150,00	128.200.500,00	(4.111.650,00)	96,89		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.312.150,00	128.200.500,00	(4.111.650,00)	96,89		
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	152.548.150,00	134.491.300,00	(18.056.850,00)	88,16		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	152.548.150,00	134.491.300,00	(18.056.850,00)	88,16		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.548.150,00	134.491.300,00	(18.056.850,00)	88,16		
02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	48.827.000,00	48.379.200,00	(1.247.800,00)	97,49		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	48.827.000,00	48.379.200,00	(1.247.800,00)	97,49		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.827.000,00	48.379.200,00	(1.247.800,00)	97,49		
02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	44.644.000,00	33.115.200,00	(11.528.800,00)	74,18		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	44.644.000,00	33.115.200,00	(11.528.800,00)	74,18		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.644.000,00	33.115.200,00	(11.528.800,00)	74,18		
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	332.947.250,00	294.725.299,00	(38.221.951,00)	88,52		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	332.947.250,00	294.725.299,00	(38.221.951,00)	88,52		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.947.250,00	294.725.299,00	(38.221.951,00)	88,52		
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	318.870.150,00	217.255.527,00	(101.614.623,00)	68,13		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	318.870.150,00	217.255.527,00	(101.614.623,00)	68,13		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.870.150,00	217.255.527,00	(101.614.623,00)	68,13		
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	255.835.050,00	236.575.400,00	(19.259.650,00)	92,47		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	255.835.050,00	236.575.400,00	(19.259.650,00)	92,47		
02.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.460.000,00	2.040.000,00	(420.000,00)	82,93		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.375.050,00	234.535.400,00	(18.839.650,00)	92,56		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	202.812.000,00	247.070.845,00	(15.141.155,00)	94,24		
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	10.749.500,00	18.871.308,00	(2.878.192,00)	85,43		
02.2.02.05.1	DILLANJA OPERASI	10.749.500,00	18.871.308,00	(2.878.192,00)	85,43		
02.2.02.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.749.500,00	18.871.308,00	(2.878.192,00)	85,43		
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyederhana Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	61.268.000,00	58.544.400,00	(2.723.600,00)	95,55		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	61.268.000,00	58.544.400,00	(2.723.600,00)	95,55		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.268.000,00	58.544.400,00	(2.723.600,00)	95,55		
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	181.794.500,00	172.255.137,00	(9.539.363,00)	94,75		
02.2.02.11.5.1	DILLANJA OPERASI	181.794.500,00	172.255.137,00	(9.539.363,00)	94,75		
02.2.02.11.5.1.01	Belanja Pegawai	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.224.500,00	171.685.137,00	(9.539.363,00)	94,74		
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	481.495.000,00	466.394.825,00	(15.101.175,00)	96,88		
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, B/LUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	237.538.000,00	233.070.425,00	(4.467.575,00)	98,12		
02.2.03.04.5.1	DILLANJA OPERASI	237.538.000,00	233.070.425,00	(4.467.575,00)	98,12		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.538.000,00	233.070.425,00	(4.467.575,00)	98,12		
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	78.197.000,00	77.273.900,00	(923.100,00)	98,82		
02.2.03.05.5.1	DILLANJA OPERASI	78.197.000,00	77.273.900,00	(923.100,00)	98,82		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.197.000,00	77.273.900,00	(923.100,00)	98,82		
02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	88.158.000,00	87.900.600,00	(257.400,00)	99,71		
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	88.158.000,00	87.900.600,00	(257.400,00)	99,71		
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.158.000,00	87.900.600,00	(257.400,00)	99,71		
02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	29.879.900,00	21.100.000,00	(8.779.900,00)	70,62		
02.2.03.10.5.1	DILLANJA OPERASI	29.879.900,00	21.100.000,00	(8.779.900,00)	70,62		
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.879.900,00	21.100.000,00	(8.779.900,00)	70,62		
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	47.723.000,00	47.049.900,00	(673.100,00)	98,59		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	47.723.000,00	47.049.900,00	(673.100,00)	98,59		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.11.5.1.02	Ularja Barang dan Jasa	47.723.000,00	47.049.900,00	(673.100,00)	98,59		
02.2.04	Penunjang Usaha Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	93.815.227.154,00	92.813.996.216,00	(1.001.230.938,00)	99,93		
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	92.815.227.154,00	92.603.996.216,00	(151.230.938,00)	99,84		
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	36.255.400,00	36.125.000,00	(130.400,00)	99,64		
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.255.400,00	36.125.000,00	(130.400,00)	99,64		
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	92.778.971.754,00	92.627.871.216,00	(151.100.538,00)	99,82		
02.2.04.08.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.580.709.754,00	1.420.009.216,00	(151.100.538,00)	90,41		
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	91.198.262.000,00	91.199.262.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.89	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000,00	150.000.000,00	(850.000.000,00)	15,00		
02.2.04.09.5.3	BFI ANJIA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	150.000.000,00	(850.000.000,00)	15,00		
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	150.000.000,00	(6.850.000.000,00)	15,00		
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	418.321.923,00	285.521.450,00	(132.800.473,00)	68,25		
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	418.321.923,00	285.521.450,00	(132.800.473,00)	68,25		
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	10.807.000,00	6.217.500,00	(4.589.500,00)	57,53		
03.2.01.03.5.1	BFI ANJIA OPERASI	10.807.000,00	6.217.500,00	(4.589.500,00)	57,53		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.807.000,00	6.217.500,00	(4.589.500,00)	57,53		
03.2.01.05	Peralaksanaan Barang Milik Daerah	18.758.000,00	14.895.500,00	(3.862.500,00)	79,41		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	18.758.000,00	14.895.500,00	(3.862.500,00)	79,41		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.758.000,00	14.895.500,00	(3.862.500,00)	79,41		
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	16.200.000,00	10.691.350,00	(5.508.650,00)	66,00		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.200.000,00	10.691.350,00	(5.508.650,00)	66,00		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	10.691.350,00	(5.508.650,00)	66,00		
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	72.022.000,00	49.132.300,00	(22.889.700,00)	68,22		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	72.022.000,00	49.132.300,00	(22.889.700,00)	68,22		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.022.000,00	49.132.300,00	(22.889.700,00)	68,22		
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	145.088.000,00	114.513.350,00	(30.574.650,00)	78,93		
03.2.01.10.5.1	BFI ANJIA OPERASI	145.088.000,00	114.513.350,00	(30.574.650,00)	78,93		
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.088.000,00	114.513.350,00	(30.574.650,00)	78,93		
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	31.369.200,00	16.282.250,00	(15.086.950,00)	51,91		
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	31.369.200,00	16.282.250,00	(15.086.950,00)	51,91		
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.369.200,00	16.282.250,00	(15.086.950,00)	51,91		
03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	124.077.723,00	73.789.200,00	(50.288.523,00)	59,47		
03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	124.077.723,00	73.789.200,00	(50.288.523,00)	59,47		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.077.723,00	73.789.200,00	(50.288.523,00)	59,47		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.836.525.798,00	2.737.637.453,00	(98.888.345,00)	96,51		
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.836.525.798,00	2.737.637.453,00	(98.888.345,00)	96,51		
04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	44.228.470,00	43.654.000,00	(574.470,00)	98,70		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.228.470,00	43.654.000,00	(574.470,00)	98,70		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.228.470,00	43.654.000,00	(574.470,00)	98,70		
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.507.884.530,00	2.427.262.623,00	(80.601.907,00)	96,79		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.507.884.530,00	2.427.262.623,00	(80.601.907,00)	96,79		
04.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	4.320.000,00	3.700.000,00	(620.000,00)	85,65		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.503.544.530,00	2.423.562.623,00	(79.981.907,00)	96,81		
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	205.742.298,00	189.100.630,00	(16.641.668,00)	91,91		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	205.742.298,00	189.100.630,00	(16.641.668,00)	91,91		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.742.298,00	189.100.630,00	(16.641.668,00)	91,91		
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	78.690.500,00	77.620.200,00	(1.070.300,00)	98,64		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	78.690.500,00	77.620.200,00	(1.070.300,00)	98,64		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.690.500,00	77.620.200,00	(1.070.300,00)	98,64		
	SURPLUS / DEFISIT	670.174.443.727,00	671.840.123.632,09	(6.334.320.094,91)	99,07		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.755.109.943,00	92.755.109.943,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.755.109.943,00	92.755.109.943,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	729.000.000,00	729.000.000,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	729.000.000,00	729.000.000,00	0,00	100,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	92.026.109.943,00	92.026.109.943,00	0,00	100,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	770.200.553.670,00	763.866.233.575,09	(6.334.320.094,91)	99,18		



Lampiran 1.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

SKPD : 6-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.01.00.5	BELANJA DAERAH	30.275.427.576,00	31.921.150.853,00	(1.354.276.723,00)	96,27		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.060.618.216,00	33.407.601.213,00	(1.169.017.003,00)	96,63		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.235.476.154,00	33.090.529.581,00	(1.116.946.593,00)	96,68		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.730.251.154,00	21.008.568.321,00	(721.682.833,00)	96,68		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.730.251.154,00	21.008.568.321,00	(721.682.833,00)	96,68		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	21.730.251.154,00	21.008.568.321,00	(721.682.833,00)	96,68		
01.2.02.02	Penyerahan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.505.225.000,00	12.089.961.240,00	(415.263.760,00)	96,68		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.505.225.000,00	12.089.961.240,00	(415.263.760,00)	96,68		
01.2.02.02.5.1.01	Ublanja Pegawai	130.610.000,00	113.040.000,00	(17.570.000,00)	86,55		
01.2.02.02.5.1.02	Ublanja Barang dan Jasa	12.374.615.000,00	11.978.921.240,00	(397.693.760,00)	96,78		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.255.065,00	195.603.394,00	(13.651.671,00)	93,48		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.292.193,00	5.289.000,00	(3.193,00)	99,94		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.292.193,00	5.289.000,00	(3.193,00)	99,94		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.292.193,00	5.289.000,00	(3.193,00)	99,94		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.054.000,00	28.047.168,00	(6.832,00)	99,98		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.054.000,00	28.047.168,00	(6.832,00)	99,98		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.054.000,00	28.047.168,00	(6.832,00)	99,98		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.949.479,00	4.956.000,00	(43.479,00)	99,13		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.949.479,00	4.956.000,00	(43.479,00)	99,13		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.949.479,00	4.956.000,00	(43.479,00)	99,13		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.900.393,00	19.872.500,00	(27.893,00)	99,86		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.900.000,00	19.872.500,00	(27.893,00)	99,86		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	19.872.500,00	(27.893,00)	99,86		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.765.000,00	9.765.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.765.000,00	9.765.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.765.000,00	9.765.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.244.000,00	127.673.726,00	(13.570.274,00)	90,39		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	141.244.000,00	127.673.726,00	(13.570.274,00)	90,39		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.244.000,00	127.673.726,00	(13.570.274,00)	90,39		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.998.000,00	29.800.000,00	(198.000,00)	99,34		
01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.998.000,00	29.800.000,00	(198.000,00)	99,34		
01.2.07.08.5.2	BELANJA MODAL	29.998.000,00	29.800.000,00	(198.000,00)	99,34		
01.2.07.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.998.000,00	29.800.000,00	(198.000,00)	99,34		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.180.000,00	35.879.022,00	(13.300.978,00)	72,95		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	17.601.244,00	(9.398.756,00)	65,19		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	17.601.244,00	(9.398.756,00)	65,19		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	17.601.244,00	(9.398.756,00)	65,19		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.680.000,00	15.277.778,00	(3.402.222,00)	81,79		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.680.000,00	15.277.778,00	(3.402.222,00)	81,79		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.680.000,00	15.277.778,00	(3.402.222,00)	81,79		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.708.997,00	137.789.236,00	(4.919.761,00)	96,55		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.710.000,00	107.955.743,00	(4.754.257,00)	95,78		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.710.000,00	107.955.743,00	(4.754.257,00)	95,78		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.710.000,00	107.955.743,00	(4.754.257,00)	95,78		
01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rangunan Lainnya	29.998.997,00	29.833.493,00	(165.504,00)	99,45		
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	29.998.997,00	29.833.493,00	(165.504,00)	99,45		
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.998.997,00	29.833.493,00	(165.504,00)	99,45		
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.307.854.360,00	1.143.593.810,00	(164.260.541,00)	87,44		
02.2.01	Pengadaan, Pembastaraan dan Informasi Kepugawain ASN	200.238.040,00	176.506.267,00	(23.841.773,00)	88,19		
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	82.639.400,00	60.324.457,00	(22.314.943,00)	83,69		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	82.839.400,00	69.324.457,00	(13.514.943,00)	83,69		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.839.400,00	69.324.457,00	(13.514.943,00)	83,69		
02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembentukan	26.504.300,00	25.180.505,00	(1.343.795,00)	94,93		
02.2.01.06.5.1	UCLANJA OPERASI	26.504.300,00	25.180.505,00	(1.343.795,00)	94,93		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.504.300,00	25.180.505,00	(1.343.795,00)	94,93		
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	90.894.340,00	82.111.305,00	(8.783.035,00)	90,34		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	90.894.340,00	82.111.305,00	(8.783.035,00)	90,34		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.894.340,00	82.111.305,00	(8.783.035,00)	90,34		
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	434.722.400,00	375.619.452,00	(59.102.948,00)	86,40		
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	230.585.400,00	170.090.300,00	(54.495.100,00)	73,37		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	230.585.400,00	170.090.300,00	(54.495.100,00)	73,37		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.585.400,00	170.090.300,00	(54.495.100,00)	73,37		
02.2.02.02	Pengelolaan Karir dan Pangkat ASN	204.137.000,00	199.529.152,00	(4.607.848,00)	97,74		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	204.137.000,00	199.529.152,00	(4.607.848,00)	97,74		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.137.000,00	199.529.152,00	(4.607.848,00)	97,74		
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	381.340.100,00	360.802.000,00	(20.538.010,00)	94,61		
02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	305.366.000,00	291.150.900,00	(14.215.010,00)	95,34		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	305.366.000,00	291.150.900,00	(14.215.010,00)	95,34		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.366.000,00	291.150.900,00	(14.215.010,00)	95,34		
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	45.575.000,00	43.025.000,00	(2.550.000,00)	94,40		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	45.575.000,00	43.025.000,00	(2.550.000,00)	94,40		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.575.000,00	43.025.000,00	(2.550.000,00)	94,40		
02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	30.399.100,00	26.628.100,00	(3.773.000,00)	87,59		
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	30.399.100,00	26.628.100,00	(3.773.000,00)	87,59		
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.399.100,00	26.628.100,00	(3.773.000,00)	87,59		
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	291.553.820,00	230.578.010,00	(60.977.810,00)	79,09		
02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	56.417.100,00	54.038.600,00	(2.378.500,00)	95,78		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.417.100,00	54.038.600,00	(2.378.500,00)	95,78		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.417.100,00	54.038.600,00	(2.378.500,00)	95,78		
02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	55.592.860,00	43.722.860,00	(11.869.814,00)	78,65		
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	55.592.860,00	43.722.860,00	(11.869.814,00)	78,65		
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.592.860,00	43.722.860,00	(11.869.814,00)	78,65		
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	99.349.520,00	90.498.039,00	(8.851.481,00)	91,09		
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	99.349.520,00	90.498.039,00	(8.851.481,00)	91,09		
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.349.520,00	90.498.039,00	(8.851.481,00)	91,09		
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	45.059.520,00	28.204.505,00	(16.855.015,00)	62,59		
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	45.059.520,00	28.204.505,00	(16.855.015,00)	62,59		
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.059.520,00	28.204.505,00	(16.855.015,00)	62,59		
02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perencanaan Pegawai	35.135.000,00	14.172.000,00	(21.023.000,00)	40,17		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.135.000,00	14.112.000,00	(21.023.000,00)	40,17		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.135.000,00	14.112.000,00	(21.023.000,00)	40,17		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	300.955.000,00	279.955.821,00	(20.999.179,00)	93,02		
02.2.02	Sertifikasi, Kelambagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	300.955.000,00	279.955.821,00	(20.999.179,00)	93,02		
02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengeluaan Kelambagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prjotatan, serta Jabatan Fungsional	300.955.000,00	279.955.821,00	(20.999.179,00)	93,02		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	300.955.000,00	279.955.821,00	(20.999.179,00)	93,02		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.955.000,00	279.955.821,00	(20.999.179,00)	93,02		
	SURPLUS / DEFISIT	(36.275.427.576,00)	(34.921.150.853,00)	1.354.276.723,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(36.275.427.576,00)	(34.921.150.853,00)	1.354.276.723,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT
 SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.915.920.045,00	4.439.337.561,00	(476.582.484,00)	90,31		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.030.045.245,00	3.555.299.861,00	(474.745.384,00)	88,20		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.432.439.046,00	2.959.729.310,00	(472.709.736,00)	86,23		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.347.439.046,00	2.891.629.310,00	(455.809.736,00)	86,38		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.347.439.046,00	2.891.629.310,00	(455.809.736,00)	86,38		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.347.439.046,00	2.891.629.310,00	(455.809.736,00)	86,38		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.000.000,00	88.100.000,00	(16.900.000,00)	80,12		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	88.100.000,00	(16.900.000,00)	90,72		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	85.000.000,00	88.100.000,00	(16.900.000,00)	80,12		
01.2.05	Administrasi Koprogwalan Perangkat Daerah	180.806.800,00	180.833.600,00	(773.184,00)	99,59		
01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.371.800,00	140.135.490,00	(236.310,00)	99,83		
01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	140.371.800,00	140.135.490,00	(236.310,00)	99,83		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.371.800,00	140.135.490,00	(236.310,00)	99,83		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.235.000,00	49.698.116,00	(536.884,00)	98,93		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	50.235.000,00	49.698.116,00	(536.884,00)	98,93		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.235.000,00	49.698.116,00	(536.884,00)	98,93		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.569.999,00	197.354.517,00	(1.215.478,00)	99,30		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.751,00	4.986.000,00	(13.751,00)	99,72		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.999.751,00	4.986.000,00	(13.751,00)	99,72		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.751,00	4.986.000,00	(13.751,00)	99,72		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.975.000,00	37.062.984,00	(12.016,00)	99,97		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.975.000,00	37.962.984,00	(12.016,00)	99,97		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.975.000,00	37.962.984,00	(12.016,00)	99,97		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.242,00	4.955.000,00	(44.242,00)	99,12		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.999.242,00	4.955.000,00	(44.242,00)	99,12		
01.2.06.03.5.1.02	Udang-udangan Barang dan Jasa	4.999.242,00	4.955.000,00	(44.242,00)	99,12		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	17.140.000,00	17.135.200,00	(4.800,00)	99,97		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.140.000,00	17.135.200,00	(4.800,00)	99,97		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.140.000,00	17.135.200,00	(4.800,00)	99,97		
01.2.06.08	fasilitasi Kunjungan Tamu	8.130.000,00	8.123.000,00	(7.000,00)	99,91		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.130.000,00	8.123.000,00	(7.000,00)	99,91		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.130.000,00	8.123.000,00	(7.000,00)	99,91		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.326.000,00	124.192.333,00	(1.133.667,00)	99,10		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	125.326.000,00	124.192.333,00	(1.133.667,00)	99,10		
01.2.06.09.5.1.02	Udang-udangan Barang dan Jasa	125.326.000,00	124.192.333,00	(1.133.667,00)	99,10		
01.2.07	Pengadaan Aset Milik Daerah Peninjauan Utusan Pemerintah Daerah	13.320.000,00	12.950.000,00	(370.000,00)	97,22		
01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.320.000,00	12.950.000,00	(370.000,00)	97,22		
01.2.07.08.5.2	BELANJA MODAL	13.320.000,00	12.950.000,00	(370.000,00)	97,22		
01.2.07.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.320.000,00	12.950.000,00	(370.000,00)	97,22		
01.2.08	Penyediaan Jasa Peninjauan Utusan Pemerintahan Daerah	26.953.500,00	26.788.100,00	(165.400,00)	99,42		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.543.500,00	16.413.100,00	(130.400,00)	99,21		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.543.500,00	16.413.100,00	(130.400,00)	99,21		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.543.500,00	16.413.100,00	(130.400,00)	99,21		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.510.000,00	7.485.000,00	(25.000,00)	99,67		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.510.000,00	7.485.000,00	(25.000,00)	99,67		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	7.485.000,00	(25.000,00)	99,67		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peninjauan Utusan Pemerintahan Daerah	138.956.180,00	138.697.328,00	(258.852,00)	99,81		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Keantaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.956.180,00	138.697.328,00	(258.852,00)	99,81		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	138.956.180,00	138.697.328,00	(258.852,00)	99,81		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.956.180,00	138.697.328,00	(258.852,00)	99,81		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rangunan Lainnya	29.999.726,00	29.932.000,00	(67.726,00)	99,77		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	29.999.726,00	29.932.000,00	(67.726,00)	99,77		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.726,00	29.932.000,00	(67.726,00)	99,77		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	774.713.000,00	774.259.000,00	(453.800,00)	99,94		
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	668.813.800,00	668.477.300,00	(336.500,00)	99,95		
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36.260.000,00	36.130.000,00	(130.000,00)	99,64		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.260.000,00	36.130.000,00	(130.000,00)	99,64		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.260.000,00	36.130.000,00	(130.000,00)	99,64		
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	265.328.800,00	265.310.000,00	(18.800,00)	99,99		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	265.328.800,00	265.310.000,00	(18.800,00)	99,99		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.328.800,00	265.310.000,00	(18.800,00)	99,99		
02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	173.180.000,00	173.176.200,00	(3.800,00)	100,00		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	173.180.000,00	173.176.200,00	(3.800,00)	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.180.000,00	173.176.200,00	(3.800,00)	100,00		
02.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan	20.425.000,00	20.379.600,00	(45.400,00)	99,78		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.425.000,00	20.379.600,00	(45.400,00)	99,78		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.425.000,00	20.379.600,00	(45.400,00)	99,78		
02.2.01.05	Pengawasan Dana	75.220.000,00	75.179.700,00	(40.300,00)	99,95		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	75.220.000,00	75.179.700,00	(40.300,00)	99,95		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.220.000,00	75.179.700,00	(40.300,00)	99,95		
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK HI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	98.400.000,00	98.301.800,00	(98.200,00)	99,90		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	98.400.000,00	98.301.800,00	(98.200,00)	99,90		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	98.301.800,00	(98.200,00)	99,90		
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	105.900.000,00	105.782.600,00	(117.400,00)	99,86		
02.2.02.01	Perancangan Penyelesaian Kerugian Negara/Dacrah	19.995.000,00	19.995.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.995.000,00	19.995.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.995.000,00	19.995.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85.905.000,00	85.787.600,00	(117.400,00)	99,86		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	85.905.000,00	85.787.600,00	(117.400,00)	99,86		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.905.000,00	85.787.600,00	(117.400,00)	99,86		
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	110.361.000,00	109.782.800,00	(578.200,00)	99,44		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	30.000.000,00	29.744.400,00	(255.600,00)	99,15		
03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	30.000.000,00	29.744.400,00	(255.600,00)	99,15		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.744.400,00	(255.600,00)	99,15		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.744.400,00	(255.600,00)	99,15		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	80.038.400,00	80.038.400,00	(322.600,00)	99,60		
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	29.776.400,00	(223.600,00)	99,25		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.776.400,00	(223.600,00)	99,25		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.776.400,00	(223.600,00)	99,25		
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30.000.000,00	29.976.000,00	(24.000,00)	99,92		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.976.000,00	(24.000,00)	99,92		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.976.000,00	(24.000,00)	99,92		
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.361.000,00	20.286.000,00	(75.000,00)	99,63		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.361.000,00	20.286.000,00	(75.000,00)	99,63		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.361.000,00	20.286.000,00	(75.000,00)	99,63		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.915.020.045,00)	(4.439.337.561,00)	476.582.484,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.915.920.045,00)	(4.439.337.561,00)	476.582.484,00	0		



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Sungai Pagu

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.01.00.5	BELANJA DAERAH	3.288.261.654,00	3.151.783.276,00	(136.481.378,00)	95,85		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.686.629.309,00	2.631.294.076,00	(55.335.233,00)	98,67		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.442.057.896,00	2.424.918.140,00	(17.139.756,00)	99,30		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.389.777.896,00	2.373.113.140,00	(16.664.756,00)	99,30		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.389.777.896,00	2.373.113.140,00	(16.664.756,00)	99,30		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.389.777.896,00	2.373.113.140,00	(16.664.756,00)	99,30		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.280.000,00	51.805.000,00	(475.000,00)	99,09		
01.2.02.02.5.1	BEANJIAN OPERASI	52.280.000,00	51.805.000,00	(475.000,00)	99,09		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	52.280.000,00	51.805.000,00	(475.000,00)	99,09		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.678.800,00	120.447.900,00	(10.228.900,00)	92,17		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.400,00	2.991.000,00	(8.400,00)	99,72		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.999.400,00	2.991.000,00	(8.400,00)	99,72		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.400,00	2.991.000,00	(8.400,00)	99,72		
01.2.06.02	Penyerbiaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.579.000,00	(421.000,00)	97,19		
01.2.06.02.5.1	BEANJIAN OPERASI	15.000.000,00	14.579.000,00	(421.000,00)	97,19		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.579.000,00	(421.000,00)	97,19		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	2.930.000,00	(70.000,00)	97,67		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.930.000,00	(70.000,00)	97,67		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.930.000,00	(70.000,00)	97,67		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.249.400,00	14.249.300,00	(100,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	14.249.400,00	14.249.300,00	(100,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.249.400,00	14.248.300,00	(100,00)	100,00		
01.2.06.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.850.000,00	2.715.000,00	(135.000,00)	95,26		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.850.000,00	2.715.000,00	(135.000,00)	95,26		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.715.000,00	(135.000,00)	95,26		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.578.000,00	82.983.600,00	(8.594.400,00)	89,64		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	92.578.000,00	82.983.600,00	(9.594.400,00)	89,64		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.578.000,00	82.983.600,00	(8.594.400,00)	89,64		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.699.900,00	15.093.036,00	(2.606.864,00)	84,32		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.499.900,00	11.693.036,00	(2.806.864,00)	80,64		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.499.900,00	11.693.036,00	(2.806.864,00)	80,64		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.499.900,00	11.693.036,00	(2.806.864,00)	80,64		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.094.713,00	70.836.000,00	(5.159.713,00)	93,21		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.000.000,00	53.792.000,00	(2.208.000,00)	96,06		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000,00	53.792.000,00	(2.208.000,00)	96,06		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	53.792.000,00	(2.208.000,00)	96,06		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.994.713,00	17.043.000,00	(2.951.713,00)	85,24		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	19.994.713,00	17.043.000,00	(2.951.713,00)	85,24		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.994.713,00	17.043.000,00	(2.951.713,00)	85,24		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.750.000,00	34.009.000,00	(14.741.000,00)	69,76		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	48.750.000,00	34.009.000,00	(14.741.000,00)	69,76		
02.2.02.09	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.750.000,00	34.009.000,00	(14.741.000,00)	69,76		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	48.750.000,00	34.009.000,00	(14.741.000,00)	69,76		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.750.000,00	34.009.000,00	(14.741.000,00)	69,76		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	133.093.701,00	120.422.000,00	(12.671.701,00)	90,48		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	133.093.701,00	120.422.000,00	(12.671.701,00)	90,48		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	4.311.000,00	(689.000,00)	86,22		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.311.000,00	(689.000,00)	86,22		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.311.000,00	(689.000,00)	86,22		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	128.093.701,00	116.111.000,00	(11.982.701,00)	90,65		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	128.093.701,00	116.111.000,00	(11.982.701,00)	90,65		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.093.701,00	116.111.000,00	(11.982.701,00)	90,65		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000,00	12.259.200,00	(7.740.800,00)	61,30		
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	12.259.200,00	(7.740.800,00)	61,30		
04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah-Kecamatan	20.000.000,00	12.259.200,00	(7.740.800,00)	61,30		
04.7.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	12.259.200,00	(7.740.800,00)	61,30		
04.7.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	12.259.200,00	(7.740.800,00)	61,30		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	379.799.144,00	325.311.000,00	(54.488.144,00)	85,65		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	379.799.144,00	325.311.000,00	(54.488.144,00)	85,65		
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	123.500.000,00	123.095.000,00	(405.000,00)	99,67		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	123.500.000,00	123.095.000,00	(405.000,00)	99,67		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.500.000,00	123.095.000,00	(405.000,00)	99,67		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	166.300.000,00	131.400.000,00	(34.900.000,00)	79,01		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	166.300.000,00	131.400.000,00	(34.900.000,00)	79,01		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.300.000,00	131.400.000,00	(34.900.000,00)	79,01		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Umum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	89.999.144,00	70.816.000,00	(19.183.144,00)	78,69		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	89.999.144,00	70.816.000,00	(19.183.144,00)	78,69		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.999.144,00	70.816.000,00	(19.183.144,00)	78,69		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.992.500,00	28.488.000,00	(11.504.500,00)	71,23		
06.2.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.992.500,00	28.488.000,00	(11.504.500,00)	71,23		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.999.900,00	12.304.000,00	(8.695.900,00)	58,59		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.999.900,00	12.304.000,00	(8.695.900,00)	58,59		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.989.900,00	12.304.000,00	(8.685.900,00)	58,69		
06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.992.600,00	2.445.000,00	(1.547.600,00)	61,24		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.992.600,00	2.445.000,00	(1.547.600,00)	61,24		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.992.600,00	2.445.000,00	(1.547.600,00)	61,24		
06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000,00	13.739.000,00	(1.261.000,00)	91,59		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.739.000,00	(1.261.000,00)	91,59		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.739.000,00	(1.261.000,00)	91,59		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.288.264.654,00)	(3.151.793.276,00)	136.481.378,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.288.264.654,00)	(3.151.793.276,00)	136.481.378,00	0		



Lampiran L3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.002 Kecamatan Pauh Duo

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.11.00.00.6	BELANJA DAERAH	2.518.848.001,00	2.429.155.443,00	(87.793.358,00)	96,81		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.075.441.351,00	1.989.474.543,00	(85.966.808,00)	95,86		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.861.186.510,00	1.777.212.713,00	(83.973.797,00)	95,49		
01.2.02.01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.815.586.510,00	1.731.612.713,00	(83.973.797,00)	95,37		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.815.586.510,00	1.731.612.713,00	(83.973.797,00)	95,37		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.815.586.510,00	1.731.612.713,00	(83.973.797,00)	95,37		
01.2.02.02	Persediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.809.699,00	116.132.130,00	(677.568,00)	99,51		
01.2.06.01	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.099.989,00	3.096.000,00	(3.989,00)	99,87		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.099.989,00	3.096.000,00	(3.989,00)	99,87		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.099.989,00	3.096.000,00	(3.989,00)	99,87		
01.2.06.02	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.386.400,00	15.384.000,00	(2.400,00)	99,94		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.386.400,00	15.384.000,00	(2.400,00)	99,94		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.386.400,00	15.384.000,00	(2.400,00)	99,94		
01.2.06.03	Persediaan Perjalanan Rumah Tangga	4.998.091,00	4.998.000,00	(91,00)	100,00		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.998.091,00	4.998.000,00	(91,00)	100,00		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.998.091,00	4.998.000,00	(91,00)	100,00		
01.2.06.05	Persediaan Barang Colakan dan Pengeranaan	9.895.418,00	9.895.200,00	(218,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.895.418,00	9.895.200,00	(218,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.885.418,00	9.885.200,00	(218,00)	100,00		
01.2.06.08	fasilitasi Kunjungan Tamu	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	DLLANJA OPERASI	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyenggaraan Hapal Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.414.800,00	109.743.930,00	(670.870,00)	99,39		
01.2.06.09.5.1	DLLANJA OPERASI	110.414.800,00	109.743.930,00	(670.870,00)	99,39		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.414.800,00	109.743.930,00	(670.870,00)	99,39		
01.2.00	Penyerahan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.489.580,00	14.872.500,00	(627.080,00)	95,95		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.999.650,00	6.374.500,00	(625.150,00)	91,07		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.999.650,00	6.374.500,00	(625.150,00)	91,07		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.999.650,00	6.374.500,00	(625.150,00)	91,07		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.999.910,00	6.998.000,00	(1.910,00)	99,97		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.999.910,00	6.998.000,00	(1.910,00)	99,97		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.999.910,00	6.998.000,00	(1.910,00)	99,97		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.945.580,00	51.257.200,00	(688.380,00)	98,67		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.998.046,00	41.322.200,00	(665.846,00)	98,41		
01.2.09.02.5.1	DLLANJA OPERASI	41.998.046,00	41.322.200,00	(665.846,00)	98,41		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.998.046,00	41.322.200,00	(665.846,00)	98,41		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.957.537,00	9.935.000,00	(22.537,00)	99,77		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	9.957.537,00	9.935.000,00	(22.537,00)	99,77		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.957.537,00	9.935.000,00	(22.537,00)	99,77		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.400.000,00	14.388.000,00	(12.000,00)	99,92		
02.2.02	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Difaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.400.000,00	14.388.000,00	(12.000,00)	99,92		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.400.000,00	14.388.000,00	(12.000,00)	99,92		
02.2.02.03.5.1	DLLANJA OPERASI	14.400.000,00	14.388.000,00	(12.000,00)	99,92		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.388.000,00	(12.000,00)	99,92		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.499.900,00	100.159.200,00	(340.700,00)	99,66		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.499.900,00	100.159.200,00	(340.700,00)	99,66		
03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	700.499.900,00	100.159.200,00	(340.700,00)	99,66		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.499.900,00	100.159.200,00	(340.700,00)	99,66		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.499.900,00	100.159.200,00	(340.700,00)	99,66		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.855.000,00	12.824.000,00	(31.000,00)	99,76		
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.855.000,00	12.824.000,00	(31.000,00)	99,76		
04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.855.000,00	12.824.000,00	(31.000,00)	99,76		
04.7.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.855.000,00	12.824.000,00	(31.000,00)	99,76		
04.7.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.855.000,00	12.824.000,00	(31.000,00)	99,76		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	279.595.850,00	278.222.800,00	(1.372.850,00)	99,51		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	279.595.850,00	278.222.800,00	(1.372.850,00)	99,51		
05.2.01.03	Pembinaan Peralatan dan Kesatuan Uangsa	123.661.750,00	123.604.000,00	(57.750,00)	99,95		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	121.666.000,00	121.624.000,00	(42.000,00)	99,97		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.666.000,00	121.624.000,00	(42.000,00)	99,97		
05.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	1.995.750,00	1.980.000,00	(15.750,00)	99,21		
05.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.995.750,00	1.980.000,00	(15.750,00)	99,21		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Has. dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	83.750.000,00	83.684.900,00	(65.100,00)	99,92		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	83.750.000,00	83.684.900,00	(65.100,00)	99,92		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.750.000,00	83.684.900,00	(65.100,00)	99,92		
05.2.01.08	Putaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	72.183.900,00	70.933.900,00	(1.250.000,00)	98,27		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	72.183.900,00	70.933.900,00	(1.250.000,00)	98,27		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.183.900,00	70.933.900,00	(1.250.000,00)	98,27		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.056.900,00	33.986.900,00	(70.000,00)	99,79		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.056.900,00	33.986.900,00	(70.000,00)	99,79		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000,00	9.865.000,00	(135.000,00)	98,65		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.965.000,00	(35.000,00)	99,65		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.965.000,00	(35.000,00)	99,65		
06.2.01.09	Fasilitasi Pengalokasian Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000,00	4.965.000,00	(35.000,00)	99,30		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.965.000,00	(35.000,00)	99,30		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.965.000,00	(35.000,00)	99,30		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.056.900,00	19.056.900,00	0,00	100,00		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	19.056.900,00	19.056.900,00	0,00	100,00		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.056.900,00	19.056.900,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.516.848.601,00)	(2.429.055.443,00)	87.793.358,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.516.848.601,00)	(2.429.055.443,00)	87.793.358,00	0		



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Sangir Balai Janggo

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.169.303.685,00	2.132.750.725,00	(36.543.960,00)	98,45		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.712.001.385,00	1.683.461.880,00	(28.539.505,00)	98,36		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.444.955.285,00	1.429.307.830,00	(15.647.455,00)	98,92		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.398.855.285,00	1.383.682.830,00	(15.172.455,00)	98,92		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.398.855.285,00	1.383.682.830,00	(15.172.455,00)	98,92		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.398.855.285,00	1.383.682.830,00	(15.172.455,00)	98,92		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.100.000,00	45.625.000,00	(475.000,00)	98,97		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.100.000,00	45.625.000,00	(475.000,00)	98,97		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	46.100.000,00	45.625.000,00	(475.000,00)	98,97		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.988.000,00	154.433.500,00	(9.533.400,00)	94,19		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03	Penyerahan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.616.900,00	12.616.900,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.616.900,00	12.616.900,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	12.616.900,00	12.616.900,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Asiliasi Kunjungan Tamu	1.350.000,00	1.342.000,00	(8.000,00)	99,41		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000,00	1.342.000,00	(8.000,00)	99,41		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.342.000,00	(8.000,00)	99,41		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	115.474.600,00	(9.525.400,00)	92,38		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	115.474.600,00	(9.525.400,00)	92,38		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	115.474.600,00	(9.525.400,00)	92,38		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.554.000,00	21.490.000,00	(64.000,00)	99,70		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.554.000,00	21.490.000,00	(64.000,00)	99,70		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	19.624.000,00	19.560.000,00	(64.000,00)	99,67		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.624.000,00	19.560.000,00	(64.000,00)	99,67		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.425.000,00	9.200.500,00	(224.500,00)	97,62		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.275.000,00	1.256.500,00	(18.500,00)	98,55		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.275.000,00	1.256.500,00	(18.500,00)	98,55		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	1.256.500,00	(18.500,00)	98,55		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.650.000,00	6.444.000,00	(206.000,00)	96,90		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.650.000,00	6.444.000,00	(206.000,00)	96,90		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	6.444.000,00	(206.000,00)	96,90		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.100.000,00	66.030.050,00	(6.069.950,00)	91,58		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.100.000,00	66.030.050,00	(6.069.950,00)	91,58		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	72.100.000,00	66.030.050,00	(6.069.950,00)	91,58		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.100.000,00	66.030.050,00	(6.069.950,00)	91,58		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.450.000,00	25.399.545,00	(50.455,00)	99,80		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.450.000,00	25.399.545,00	(50.455,00)	99,80		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.450.000,00	25.399.545,00	(50.455,00)	99,80		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.450.000,00	25.399.545,00	(50.455,00)	99,80		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	25.390.545,00	(50.455,00)	99,80		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	99.400.000,00	99.380.100,00	(19.900,00)	99,98		
03.2.III	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Usaha	99.400.000,00	99.380.100,00	(19.900,00)	99,98		
03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.400.000,00	99.380.100,00	(19.900,00)	99,98		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	99.400.000,00	99.380.100,00	(19.900,00)	99,98		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.400.000,00	99.380.100,00	(19.900,00)	99,98		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.005.000,00	5.848.000,00	(1.157.000,00)	83,48		
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.005.000,00	5.848.000,00	(1.157.000,00)	83,48		
04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.005.000,00	5.848.000,00	(1.157.000,00)	83,48		
04.7.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.005.000,00	5.848.000,00	(1.157.000,00)	83,48		
04.7.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.005.000,00	5.848.000,00	(1.157.000,00)	83,48		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	298.347.500,00	297.784.700,00	(562.800,00)	99,81		
05.2.III	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	298.347.500,00	297.784.700,00	(562.800,00)	99,81		
05.2.01.03	Pembinaan Porsatuan dan Keratuan Bangsa	121.800.000,00	121.797.700,00	(2.300,00)	100,00		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	121.800.000,00	121.797.700,00	(2.300,00)	100,00		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.800.000,00	121.797.700,00	(2.300,00)	100,00		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Ibra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85.050.000,00	85.035.100,00	(14.900,00)	99,98		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	85.050.000,00	85.035.100,00	(14.900,00)	99,98		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.050.000,00	85.035.100,00	(14.900,00)	99,98		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	91.497.500,00	90.951.900,00	(545.600,00)	99,40		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	91.497.500,00	90.951.900,00	(545.600,00)	99,40		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.497.500,00	90.951.900,00	(545.600,00)	99,40		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.100.000,00	23.885.500,00	(214.500,00)	99,11		
06.2.01	Facilitasi, Komunikasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.100.000,00	23.885.500,00	(214.500,00)	99,11		
06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.850.000,00	5.739.000,00	(111.000,00)	98,10		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.850.000,00	5.739.000,00	(111.000,00)	98,10		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	5.739.000,00	(111.000,00)	98,10		
06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Peningkatan Aspek Desa	4.000.000,00	3.980.500,00	(19.500,00)	99,51		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.980.500,00	(19.500,00)	99,51		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.980.500,00	(19.500,00)	99,51		
06.2.01.09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14.250.000,00	14.166.000,00	(84.000,00)	99,41		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	14.250.000,00	14.166.000,00	(84.000,00)	99,41		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	14.166.000,00	(84.000,00)	99,41		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.166.303.685,00)	(2.132.759.725,00)	33.543.960,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.166.303.685,00)	(2.132.759.725,00)	33.543.960,00	0		

Padang Aro, 29 Juli 2024

BUPATI

[Signature]

KLAIRLINAS




Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Sangir Batang Hari

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.000.00.5	BELANJA DAERAH	2.875.676.596,00	2.792.887.071,00	(82.789.525,00)	97,12		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.538.410.596,00	2.456.147.871,00	(82.262.725,00)	96,76		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.104.333.089,00	2.024.799.871,00	(79.533.118,00)	96,22		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.052.563.089,00	1.973.019.871,00	(79.533.118,00)	96,13		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.052.563.089,00	1.973.019.871,00	(79.533.118,00)	96,13		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.052.563.089,00	1.973.019.871,00	(79.533.118,00)	96,13		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.780.000,00	51.780.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.780.000,00	51.780.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	51.780.000,00	51.780.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.551.800,00	155.465.800,00	(85.900,00)	99,94		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Humali Tangga	3.561.800,00	3.560.000,00	(1.800,00)	99,95		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.561.800,00	3.560.000,00	(1.800,00)	99,95		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.561.800,00	3.560.000,00	(1.800,00)	99,95		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.990.000,00	125.905.900,00	(84.100,00)	99,93		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	125.990.000,00	125.905.900,00	(84.100,00)	99,93		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.990.000,00	125.905.900,00	(84.100,00)	99,93		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.600.000,00	16.485.240,00	(1.114.760,00)	93,67		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.100.000,00	8.985.240,00	(1.114.760,00)	88,96		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.100.000,00	8.985.240,00	(1.114.760,00)	88,96		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	8.985.240,00	(1.114.760,00)	88,96		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.925.707,00	249.396.760,00	(1.528.947,00)	99,39		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.030.000,00	73.081.760,00	(1.948.240,00)	98,60		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	75.030.000,00	73.081.760,00	(1.948.240,00)	98,60		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.030.000,00	73.081.760,00	(1.948.240,00)	98,60		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.895.707,00	175.415.000,00	(480.707,00)	99,73		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	174.555.707,00	174.075.000,00	(480.707,00)	99,72		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.555.707,00	174.075.000,00	(480.707,00)	99,72		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03.5.1	DELANJA OPERASI	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.800.000,00	61.710.000,00	(90.000,00)	99,85		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	61.800.000,00	61.710.000,00	(90.000,00)	99,85		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	61.800.000,00	61.710.000,00	(90.000,00)	99,85		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	61.800.000,00	61.710.000,00	(90.000,00)	99,85		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	61.710.000,00	(90.000,00)	99,85		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00		
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00		
04.7.03.01	Sinergitas dengan Kopolsian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00		
04.7.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00		
04.7.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	204.116.000,00	203.920.000,00	(196.000,00)	99,90		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasan Kepala Daerah	204.116.000,00	203.920.000,00	(196.000,00)	99,90		
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80.250.000,00	80.210.000,00	(40.000,00)	99,95		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	80.250.000,00	80.210.000,00	(40.000,00)	99,95		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.250.000,00	80.210.000,00	(40.000,00)	99,95		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intro Suku, Umat Beragama, Has, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	38.566.000,00	38.410.000,00	(156.000,00)	99,60		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	38.566.000,00	38.410.000,00	(156.000,00)	99,60		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.566.000,00	38.410.000,00	(156.000,00)	99,60		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	85.300.000,00	85.300.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	85.300.000,00	85.300.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.300.000,00	85.300.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.750.000,00	56.510.000,00	(240.000,00)	99,58		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.750.000,00	56.510.000,00	(240.000,00)	99,58		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.950.000,00	15.830.000,00	(120.000,00)	99,25		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.950.000,00	15.830.000,00	(120.000,00)	99,25		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.950.000,00	15.830.000,00	(120.000,00)	99,25		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.550.000,00	24.460.000,00	(90.000,00)	99,63		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.550.000,00	24.460.000,00	(90.000,00)	99,63		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	24.460.000,00	(90.000,00)	99,63		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16.250.000,00	16.220.000,00	(30.000,00)	99,82		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	16.250.000,00	16.220.000,00	(30.000,00)	99,82		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	16.220.000,00	(30.000,00)	99,82		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.875.676.596,00)	(2.792.887.871,00)	82.788.725,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEMAAAN	(2.875.676.596,00)	(2.792.887.871,00)	82.788.725,00	0		



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Sangir Jujuan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.6.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.231.182.409,00	2.155.085.309,00	(75.497.100,00)	96,62		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.897.548.472,00	1.777.463.659,00	(50.106.813,00)	93,26		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.535.516.614,00	1.500.824.942,00	(34.691.676,00)	97,74		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.489.916.618,00	1.455.224.942,00	(34.691.676,00)	97,67		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.489.916.618,00	1.455.224.942,00	(34.691.676,00)	97,67		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.409.916.618,00	1.455.224.942,00	(34.691.676,00)	97,67		
01.2.02.01.5.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.646.712,00	158.493.150,00	(8.153.562,00)	95,11		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.982.794,00	2.982.000,00	(794,00)	99,97		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.982.794,00	2.982.000,00	(794,00)	99,97		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.982.794,00	2.982.000,00	(794,00)	99,97		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.999.573,00	(427,00)	100,00		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.999.573,00	(427,00)	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.999.573,00	(427,00)	100,00		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.999.918,00	3.999.900,00	(18,00)	100,00		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.999.918,00	3.999.900,00	(18,00)	100,00		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.999.918,00	3.999.900,00	(18,00)	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.950.000,00	12.949.977,00	(23,00)	100,00		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	12.950.000,00	12.949.977,00	(23,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	12.949.977,00	(23,00)	100,00		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.900.000,00	3.609.000,00	(291.000,00)	92,54		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.609.000,00	(291.000,00)	92,54		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.609.000,00	(291.000,00)	92,54		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.814.000,00	114.952.700,00	(7.861.300,00)	93,60		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	122.814.000,00	114.952.700,00	(7.861.300,00)	93,60		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.814.000,00	114.952.700,00	(7.861.300,00)	93,60		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.324.892,00	50.037.717,00	(1.287.175,00)	97,49		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.324.892,00	50.037.717,00	(1.287.175,00)	97,49		
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	1.930.000,00	(770.000,00)	71,48		
01.2.07.11.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	1.930.000,00	(770.000,00)	71,48		
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	48.624.892,00	48.107.717,00	(517.175,00)	98,94		
01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gertung dan Bangunan	48.624.892,00	48.107.717,00	(517.175,00)	98,94		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.810.000,00	18.112.500,00	(697.500,00)	96,29		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.730.000,00	9.032.500,00	(697.500,00)	92,83		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.730.000,00	9.032.500,00	(697.500,00)	92,83		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.730.000,00	9.032.500,00	(697.500,00)	92,83		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.250.250,00	49.973.350,00	(5.276.900,00)	90,45		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.250.250,00	49.973.350,00	(5.276.900,00)	90,45		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.250.250,00	49.973.350,00	(5.276.900,00)	90,45		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.250.250,00	49.973.350,00	(5.276.900,00)	90,45		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.784.000,00	28.701.500,00	(8.483.300,00)	77,19		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	37.784.000,00	28.701.500,00	(8.483.300,00)	77,19		
02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.784.000,00	28.701.500,00	(8.483.300,00)	77,19		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	37.184.800,00	28.701.500,00	(8.483.300,00)	77,19		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.184.800,00	28.701.500,00	(8.483.300,00)	77,19		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	97.399.800,00	92.120.000,00	(5.279.800,00)	94,58		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	97.399.800,00	92.120.000,00	(5.279.800,00)	94,58		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97.399.800,00	92.120.000,00	(5.279.800,00)	94,58		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	97.399.800,00	92.120.000,00	(5.279.800,00)	94,58		
03.2.01.03.5.1.02	Udang-udangan Barang dan Jasa	97.399.800,00	92.120.000,00	(5.279.800,00)	94,58		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.499.718,00	4.349.000,00	(4.150.718,00)	51,17		
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertibatan dan Ketertibatan Umum	8.499.718,00	4.349.000,00	(4.150.718,00)	51,17		
04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.499.718,00	4.349.000,00	(4.150.718,00)	51,17		
04.7.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.499.718,00	4.349.000,00	(4.150.718,00)	51,17		
04.7.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.499.718,00	4.349.000,00	(4.150.718,00)	51,17		
05	PROGRAM PENYELENGGAAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	240.149.800,00	234.310.150,00	(5.830.540,00)	97,57		
05.2.01	Ponyolnggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	240.149.800,00	234.310.150,00	(5.830.540,00)	97,57		
05.2.01.03	Pemeliharaan Persediaan dan Kasaluan Bangsa	123.399.650,00	122.554.150,00	(845.500,00)	99,31		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	117.662.800,00	116.817.100,00	(845.500,00)	99,28		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.662.800,00	116.817.100,00	(845.500,00)	99,28		
05.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	5.737.050,00	5.737.050,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.2.02	Udang-udangan Peralatan dan Mesin	5.737.050,00	5.737.050,00	0,00	100,00		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Has, dan Golongan Lainnya Cuna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65.500.000,00	63.500.000,00	(2.000.000,00)	96,95		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	65.500.000,00	63.500.000,00	(2.000.000,00)	96,95		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.500.000,00	63.500.000,00	(2.000.000,00)	96,95		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	51.250.049,00	48.285.000,00	(2.965.049,00)	94,18		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	51.250.049,00	48.285.000,00	(2.965.049,00)	94,18		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.250.049,00	48.285.000,00	(2.965.049,00)	94,18		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.400.000,00	18.754.000,00	(1.646.000,00)	91,93		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.400.000,00	18.754.000,00	(1.646.000,00)	91,93		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.400.000,00	4.978.000,00	(1.422.000,00)	77,78		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	4.978.000,00	(1.422.000,00)	77,78		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	4.978.000,00	(1.422.000,00)	77,78		
06.2.01.09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14.000.000,00	13.776.000,00	(224.000,00)	98,40		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.776.000,00	(224.000,00)	98,40		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.776.000,00	(224.000,00)	98,40		
	SURPLUS / DEFISI	(2.231.182.489,00)	(2.155.685.309,00)	75.497.180,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.231.182.489,00)	(2.155.685.309,00)	75.497.180,00	0		



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Utusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7.01.0-00.0-00.06 Kecamatan Koto Parik Gadang Diarah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.370.119.400,00	3.307.539.183,00	(62.580.226,00)	98,14		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.839.955.219,00	2.753.610.583,00	(86.344.636,00)	97,99		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.466.696.346,00	2.433.057.687,00	(33.638.659,00)	98,64		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.414.676.346,00	2.381.277.687,00	(33.398.659,00)	98,62		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.414.676.346,00	2.381.277.687,00	(33.398.659,00)	98,62		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.414.676.346,00	2.381.277.687,00	(33.398.659,00)	98,62		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.020.000,00	51.780.000,00	(240.000,00)	99,54		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.020.000,00	51.780.000,00	(240.000,00)	99,54		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	52.020.000,00	51.780.000,00	(240.000,00)	99,54		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.321.790,00	215.669.355,00	(18.652.435,00)	92,01		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.990.468,00	2.985.000,00	(5.468,00)	99,82		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.990.468,00	2.985.000,00	(5.468,00)	99,82		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.990.468,00	2.985.000,00	(5.468,00)	99,82		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.597.730,00	55.597.730,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.597.730,00	55.597.730,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.597.730,00	55.597.730,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	40.597.730,00	40.597.730,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.597.730,00	40.597.730,00	0,00	100,00		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.996.490,00	2.995.500,00	(990,00)	99,97		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.996.490,00	2.995.500,00	(990,00)	99,97		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.996.490,00	2.995.500,00	(990,00)	99,97		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Kelakan dan Penggandaan	10.258.102,00	10.258.225,00	(1.877,00)	99,90		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.258.102,00	10.258.225,00	(1.877,00)	99,98		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.258.102,00	10.258.225,00	(1.877,00)	99,98		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.300.000,00	9.295.000,00	(5.000,00)	99,95		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	9.295.000,00	(5.000,00)	99,95		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.295.000,00	(5.000,00)	99,95		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.179.000,00	134.539.900,00	(18.639.100,00)	87,83		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	153.179.000,00	134.539.900,00	(18.639.100,00)	87,83		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.179.000,00	134.539.900,00	(18.639.100,00)	87,83		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.780.008,00	24.594.641,00	(1.185.317,00)	95,48		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.400.008,00	14.234.691,00	(1.165.317,00)	92,43		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.400.008,00	14.234.691,00	(1.165.317,00)	92,43		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.400.008,00	14.234.691,00	(1.165.317,00)	92,43		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.177.075,00	80.298.151,00	(2.888.225,00)	96,55		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.410.153,00	78.508.850,00	(2.821.303,00)	96,53		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	81.410.153,00	78.508.850,00	(2.821.303,00)	96,53		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.410.153,00	78.508.850,00	(2.821.303,00)	96,53		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.768.922,00	1.700.000,00	(68.922,00)	96,21		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.768.922,00	1.500.000,00	(2.722,00)	99,82		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.768.922,00	1.500.000,00	(2.722,00)	99,82		
01.2.09.11.5.2	BELANJA MODAL	264.200,00	200.000,00	(64.200,00)	75,70		
01.2.09.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	264.200,00	200.000,00	(64.200,00)	75,70		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.271.500,00	16.396.400,00	(875.100,00)	94,93		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.271.500,00	16.396.400,00	(875.100,00)	94,93		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.271.500,00	16.396.400,00	(875.100,00)	94,93		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KEYERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.271.500,00	16.396.400,00	(875.100,00)	94,93		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.271.500,00	16.396.400,00	(875.100,00)	94,93		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	132.385.000,00	132.352.800,00	(32.200,00)	99,98		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	132.385.000,00	132.352.800,00	(32.200,00)	99,98		
03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	132.385.000,00	132.352.800,00	(32.200,00)	99,98		
03.2.01.03.6.1	BELANJA OPERASI	132.385.000,00	132.352.800,00	(32.200,00)	99,98		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.385.000,00	132.352.800,00	(32.200,00)	99,98		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.998.400,00	17.640.000,00	(2.358.400,00)	88,21		
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.998.400,00	17.640.000,00	(2.358.400,00)	88,21		
04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.998.400,00	17.640.000,00	(2.358.400,00)	88,21		
04.7.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.998.400,00	17.640.000,00	(2.358.400,00)	88,21		
04.7.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.998.400,00	17.640.000,00	(2.358.400,00)	88,21		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	357.079.700,00	354.139.800,00	(2.939.900,00)	99,18		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	357.079.700,00	354.139.800,00	(2.939.900,00)	99,18		
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	142.399.800,00	142.380.000,00	(19.800,00)	99,99		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	142.399.800,00	142.380.000,00	(19.800,00)	99,99		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.399.800,00	142.380.000,00	(19.800,00)	99,99		
05.2.01.04	Pembinaan Kenikmatan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Cuna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	140.239.900,00	140.219.800,00	(20.100,00)	99,99		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	140.239.900,00	140.219.800,00	(20.100,00)	99,99		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.239.900,00	140.219.800,00	(20.100,00)	99,99		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	74.440.000,00	71.540.000,00	(2.900.000,00)	96,10		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	74.440.000,00	71.540.000,00	(2.900.000,00)	96,10		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.440.000,00	71.540.000,00	(2.900.000,00)	96,10		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.429.800,00	33.399.600,00	(29.900,00)	99,91		
06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.429.800,00	33.399.600,00	(29.900,00)	99,91		
06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.999.800,00	7.999.800,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.999.800,00	7.999.800,00	0,00	100,00		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.800,00	7.999.800,00	0,00	100,00		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pondyagunaan Aset Desa	13.429.990,00	13.400.000,00	(29.990,00)	99,78		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.429.990,00	13.400.000,00	(29.990,00)	99,78		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.429.990,00	13.400.000,00	(29.990,00)	99,78		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.999.800,00	11.999.800,00	0,00	100,00		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	11.999.800,00	11.999.800,00	0,00	100,00		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.999.800,00	11.999.800,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.370.119.409,00)	(3.307.539.183,00)	62.580.226,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.370.119.409,00)	(3.307.539.183,00)	62.580.226,00	0		



Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Sangir

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.238.142.807,00	3.192.186.275,00	(45.956.532,00)	98,58		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.461.995.747,00	2.423.285.178,00	(38.710.569,00)	98,43		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.019.498.309,00	2.054.818.010,00	(34.078.379,00)	98,34		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.037.716.389,00	2.063.588.010,00	(34.128.379,00)	98,33		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.037.716.389,00	2.033.508.010,00	(34.128.379,00)	99,33		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.037.716.389,00	2.033.588.010,00	(34.128.379,00)	98,33		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.780.000,00	51.230.000,00	(550.000,00)	98,94		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.780.000,00	51.230.000,00	(550.000,00)	98,94		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	51.780.000,00	51.230.000,00	(550.000,00)	98,94		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.940.000,00	83.844.077,00	(95.923,00)	99,80		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03	Penyediaan Pemukiman Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	9.850.000,00	9.826.377,00	(23.623,00)	99,76		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.850.000,00	9.826.377,00	(23.623,00)	99,76		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1.02	Gula-gula Barang dan Jasa	9.850.000,00	9.826.377,00	(23.623,00)	99,76		
01.2.06.09	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.090.000,00	52.017.700,00	(72.300,00)	99,86		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	52.090.000,00	52.017.700,00	(72.300,00)	99,86		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.090.000,00	52.017.700,00	(72.300,00)	99,86		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.700.000,00	21.403.540,00	(2.296.460,00)	90,31		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.320.000,00	11.108.540,00	(2.211.460,00)	83,40		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.320.000,00	11.108.540,00	(2.211.460,00)	83,40		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.320.000,00	11.108.540,00	(2.211.460,00)	83,40		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.680.000,00	8.585.000,00	(95.000,00)	99,02		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.680.000,00	8.585.000,00	(95.000,00)	99,02		
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.680.000,00	8.585.000,00	(95.000,00)	99,02		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.859.358,00	263.210.551,00	(1.648.807,00)	99,38		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.959.358,00	64.956.561,00	(2.797,00)	99,96		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	64.959.358,00	64.956.561,00	(2.797,00)	99,96		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.959.358,00	64.956.561,00	(2.797,00)	99,96		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.900.000,00	198.263.000,00	(1.637.000,00)	99,18		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.020.000,00	2.403.000,00	(20.000,00)	99,01		
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.000.000,00	(20.000,00)	99,01		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	197.880.000,00	197.263.000,00	(617.000,00)	99,69		
01.2.09.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.874.870,00	1.500.000,00	(374.870,00)	80,01		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.005.130,00	195.763.000,00	(242.130,00)	99,88		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.309.375,00	51.203.006,00	(106.369,00)	99,79		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	51.309.375,00	51.203.006,00	(106.369,00)	99,79		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.309.375,00	51.203.006,00	(106.369,00)	99,79		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.616.000,00	13.591.631,00	(24.369,00)	99,82		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.616.000,00	13.591.631,00	(24.369,00)	99,82		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	37.693.375,00	37.611.375,00	(82.000,00)	99,78		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.693.375,00	37.611.375,00	(82.000,00)	99,78		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	204.000.000,00	198.558.700,00	(5.441.300,00)	97,33		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	204.000.000,00	198.558.700,00	(5.441.300,00)	97,33		
03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	204.000.000,00	198.558.700,00	(5.441.300,00)	97,33		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	204.000.000,00	198.558.700,00	(5.441.300,00)	97,33		
03.2.01.03.5.1.02	Udang-udangan Barang dan Jasa	204.000.000,00	198.558.700,00	(5.441.300,00)	97,33		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.850.000,00	11.675.000,00	(175.000,00)	98,52		
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.850.000,00	11.675.000,00	(175.000,00)	98,52		
04.7.03.07	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.850.000,00	11.675.000,00	(175.000,00)	98,52		
04.7.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.850.000,00	11.675.000,00	(175.000,00)	98,52		
04.7.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	11.675.000,00	(175.000,00)	98,52		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	472.647.685,00	471.249.391,00	(1.398.294,00)	99,70		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	472.647.685,00	471.249.391,00	(1.398.294,00)	99,70		
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	203.907.685,00	203.567.523,00	(340.162,00)	99,83		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	203.907.685,00	203.567.523,00	(340.162,00)	99,83		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.907.685,00	203.567.523,00	(340.162,00)	99,83		
05.2.01.104	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Cuna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	178.740.000,00	177.692.116,00	(1.047.884,00)	99,41		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	178.740.000,00	177.692.116,00	(1.047.884,00)	99,41		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.740.000,00	177.692.116,00	(1.047.884,00)	99,41		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	90.000.000,00	89.989.752,00	(10.248,00)	99,99		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	89.989.752,00	(10.248,00)	99,99		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.989.752,00	(10.248,00)	99,99		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.340.000,00	36.215.000,00	(125.000,00)	99,66		
06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.340.000,00	36.215.000,00	(125.000,00)	99,66		
06.2.01.01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.450.000,00	10.425.000,00	(25.000,00)	99,76		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.450.000,00	10.425.000,00	(25.000,00)	99,76		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	10.425.000,00	(25.000,00)	99,78		
06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.230.000,00	12.130.000,00	(100.000,00)	99,18		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.230.000,00	12.130.000,00	(100.000,00)	99,18		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.230.000,00	12.130.000,00	(100.000,00)	99,18		
06.2.01.09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.238.142.807,00)	(3.192.186.275,00)	45.956.532,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.238.142.807,00)	(3.192.186.275,00)	45.956.532,00	0		



Lampiran I3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 0.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : 8-01.0-00.0-00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.010.00.5	BELANJA DAERAH	14.404.798.158,00	14.127.771.570,00	(277.026.588,00)	98,08		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.760.882.512,00	1.865.051.125,00	(95.831.387,00)	94,58		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.379.863.932,00	1.315.245.568,00	(44.560.364,00)	96,77		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.300.853.932,00	1.259.755.568,00	(40.898.364,00)	96,86		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.853.932,00	1.259.755.568,00	(40.898.364,00)	96,86		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.853.932,00	1.259.755.568,00	(40.898.364,00)	96,86		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.210.000,00	75.540.000,00	(3.670.000,00)	95,37		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	79.210.000,00	75.540.000,00	(3.670.000,00)	95,37		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	79.210.000,00	75.540.000,00	(3.670.000,00)	95,37		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.517.580,00	164.907.610,00	(45.609.970,00)	78,33		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.520.000,00	1.510.000,00	(10.000,00)	99,34		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.520.000,00	1.510.000,00	(10.000,00)	99,34		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	1.510.000,00	(10.000,00)	99,34		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	39.828.397,00	(171.603,00)	99,57		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.828.397,00	(171.603,00)	99,57		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.828.397,00	(171.603,00)	99,57		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.291.580,00	4.250.000,00	(41.580,00)	99,03		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.291.580,00	4.250.000,00	(41.580,00)	99,03		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.291.580,00	4.250.000,00	(41.580,00)	99,03		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pongandaan	20.650.000,00	20.638.313,00	(11.687,00)	99,94		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.650.000,00	20.638.313,00	(11.687,00)	99,94		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.650.000,00	20.638.313,00	(11.687,00)	99,94		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.000.000,00	7.997.000,00	(2.200,00)	99,97		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.997.000,00	(2.200,00)	99,97		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.997.000,00	(2.200,00)	99,97		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.056.000,00	90.683.100,00	(45.372.900,00)	66,65		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	136.056.000,00	90.683.100,00	(45.372.900,00)	66,65		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.056.000,00	90.683.100,00	(45.372.900,00)	66,65		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.806.000,00	81.310.000,00	(596.000,00)	99,28		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.696.000,00	56.310.000,00	(386.000,00)	99,32		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	56.696.000,00	56.310.000,00	(386.000,00)	99,32		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.696.000,00	56.310.000,00	(386.000,00)	99,32		
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.200.000,00	25.000.000,00	(200.000,00)	99,21		
01.2.07.09.5.1	BELANJA OPERASI	25.200.000,00	25.000.000,00	(200.000,00)	99,21		
01.2.07.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.000.000,00	(200.000,00)	99,21		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.205.000,00	11.754.116,00	(2.450.884,00)	82,75		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.285.000,00	2.960.116,00	(2.324.884,00)	56,01		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.285.000,00	2.960.116,00	(2.324.884,00)	56,01		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.285.000,00	2.960.116,00	(2.324.884,00)	56,01		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor	5.920.000,00	5.794.000,00	(126.000,00)	97,87		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.920.000,00	5.794.000,00	(126.000,00)	97,87		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	5.794.000,00	(126.000,00)	97,87		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.400.000,00	71.783.831,00	(2.616.169,00)	96,48		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.400.000,00	71.783.831,00	(2.616.169,00)	96,48		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	74.400.000,00	71.783.831,00	(2.616.169,00)	96,48		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	71.783.831,00	(2.616.169,00)	96,48		
02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	833.224.000,00	808.175.486,00	(25.048.514,00)	96,99		
02.2.01	Penemuan Kebijakan Pokok dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	833.224.000,00	808.175.486,00	(25.048.514,00)	96,99		
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Penguatan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	833.224.000,00	808.175.486,00	(25.048.514,00)	96,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	833.224.000,00	806.175.406,00	(25.048.514,00)	96,89		
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.974.000,00	808.925.486,00	(25.048.514,00)	96,89		
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA, PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	11.163.191.644,00	11.149.512.211,00	(13.679.433,00)	99,88		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kolembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	11.163.191.644,00	11.149.512.211,00	(13.679.433,00)	99,88		
03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kolembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.163.191.644,00	11.149.512.211,00	(13.679.433,00)	99,88		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.163.191.644,00	11.149.512.211,00	(13.679.433,00)	99,88		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.942.700,00	319.263.267,00	(13.679.433,00)	95,89		
03.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	10.830.248.944,00	10.830.248.944,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PEMBENDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KOMUNITAS	9.880.000,00	7.915.000,00	(1.965.000,00)	80,11		
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pembendayaan dan Pengawasan Organisasi Komunitas	9.880.000,00	7.915.000,00	(1.965.000,00)	80,11		
04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendallaran Ormas, Pembendayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Gengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	9.880.000,00	7.915.000,00	(1.965.000,00)	80,11		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.880.000,00	7.915.000,00	(1.965.000,00)	80,11		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.880.000,00	7.915.000,00	(1.965.000,00)	80,11		
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	79.186.000,00	35.929.662,00	(43.256.338,00)	45,37		
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	79.186.000,00	35.929.662,00	(43.256.338,00)	45,37		
05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	79.186.000,00	35.929.662,00	(43.256.338,00)	45,37		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	79.186.000,00	35.929.662,00	(43.256.338,00)	45,37		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.186.000,00	35.929.062,00	(43.256.938,00)	45,37		
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	558.434.000,00	461.188.086,00	(97.245.914,00)	82,59		
06.2.01	Purumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	558.434.000,00	461.188.086,00	(97.245.914,00)	82,59		
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	558.434.000,00	461.188.086,00	(97.245.914,00)	82,59		
06.2.01.04.5.1	BEI ANJIA OPERASI	558.434.000,00	461.188.086,00	(97.245.914,00)	82,59		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.434.000,00	461.188.086,00	(97.245.914,00)	82,59		
	SURPLUS / DEFISIT	(14.404.798.156,00)	(14.127.771.570,00)	277.026.586,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(14.404.798.156,00)	(14.127.771.570,00)	277.026.586,00	0		



Lampiran 1.4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4

Tanggal : 29 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	423.741.084.552,00	139.003.048.207,00	0,00	0,00
1.01	PENDIDIKAN	395.918.819.775,95	191.211.745.051,00	0,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	214.168.096.235,00	25.552.915.680,00	0,00	0,00
		206.341.360.656,00	24.897.612.534,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169.667.025.483,00	46.755.980,00	0,00	0,00
		175.482.383.115,00	39.636.463,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	182.100.271.004,00	0,00	0,00	0,00
		174.075.152.186,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	181.703.371.804,00	0,00	0,00	0,00
		174.677.802.186,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.455.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.964.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03.06	Penulausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.455.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.964.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.003.649,00	0,00	0,00	0,00
		294.631.184,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penunangan Bangunan Kantor	4.990.309,00	0,00	0,00	0,00
		4.987.923,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.140,00	0,00	0,00	0,00
		4.988.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.433.200,00	0,00	0,00	0,00
		27.429.519,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.710.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.834.000,00	0,00	0,00	0,00
		134.060.042,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.455.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.250.000,00	46.755.960,00	0,00	0,00
		0,00	39.636.468,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.250.000,00	46.755.960,00	0,00	0,00
		0,00	39.636.468,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.178.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.531.884,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.918.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.185.084,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.346.809,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.624.230,00	0,00	0,00	0,00
		160.103.861,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.080.522,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.624.230,00	0,00	0,00	0,00
		32.013.339,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	30.815.559.552,00	25.506.159.720,00	0,00	0,00
		30.262.490.600,00	24.657.976.086,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17.579.074.562,00	18.708.139.937,00	0,00	0,00
		17.327.270.962,00	18.383.370.982,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	81.191.000,00	2.329.671.049,00	0,00	0,00
		75.653.634,00	2.326.060.900,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	40.640.000,00	1.082.444.822,00	0,00	0,00
		39.100.000,00	1.046.799.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	32.420.000,00	623.171.250,00	0,00	0,00
		31.830.000,00	618.073.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	16.210.000,00	381.319.112,00	0,00	0,00
		16.100.000,00	380.879.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	106.356.000,00	3.883.252.158,00	0,00	0,00
		84.160.000,00	3.849.727.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	144.970.000,00	3.780.878.120,00	0,00	0,00
		139.275.000,00	3.563.205.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	15.040.000,00	162.229.000,00	0,00	0,00
		14.020.000,00	148.341.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18.420.000,00	274.040.000,00	0,00	0,00
		14.110.000,00	268.440.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	28.810.000,00	1.210.890.012,00	0,00	0,00
		26.575.000,00	1.238.398.500,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.243.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.239.195.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	15.250.000,00	1.245.000.000,00	0,00	0,00
		14.300.000,00	1.244.292.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	15.442.822.862,00	3.700.438.414,00	0,00	0,00
		15.332.729.528,00	3.608.355.482,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	48.886.900,00	0,00	0,00	0,00
		38.336.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	151.088.000,00	0,00	0,00	0,00
		146.648.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	32.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	14.099.800,00	0,00	0,00	0,00
		7.719.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.035.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.762.593.262,00	5.274.377.563,00	0,00	0,00
		7.268.713.568,00	5.073.278.384,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	18.400.000,00	855.876.000,00	0,00	0,00
		4.814.000,00	804.265.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	14.625.000,00	640.499.000,00	0,00	0,00
		4.055.000,00	575.376.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	33.216.000,00	1.312.115.766,00	0,00	0,00
		12.031.000,00	1.244.768.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	129.955.404,00	860.080.997,00	0,00	0,00
		56.205.500,00	962.202.650,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	5.860.000,00	321.260.400,00	0,00	0,00
		0,00	318.636.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.087.065.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.078.786.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8.197.245.958,00	1.376.544.700,00	0,00	0,00
		5.883.661.000,00	1.368.228.734,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.37	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	34.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		32.675.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	154.512.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.998.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	43.128.900,00	0,00	0,00	0,00
		30.276.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dari Manajemen Sekolah	26.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.880.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.995.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.632.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.403.833.028,00	1.460.787.220,00	0,00	0,00
		3.526.833.030,00	1.370.371.200,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Huang Kelas/Ruang Guru PAUD	534.394.700,00	345.799.050,00	0,00	0,00
		505.003.700,00	318.002.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	47.831.149,00	1.060.995.170,00	0,00	0,00
		36.513.350,00	1.020.899.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		243.948.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.240.172.000,00	44.943.000,00	0,00	0,00
		2.486.821.800,00	31.470.200,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	69.730.179,00	0,00	0,00	0,00
		55.380.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	228.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.628.280,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana DOP PAUD	33.936.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.447.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.121.258.700,00	61.855.030,00	0,00	0,00
		2.138.673.300,00	30.935.500,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	2.008.544.800,00	61.855.030,00	0,00	0,00
		2.039.344.300,00	30.855.500,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	36.898.900,00	0,00	0,00	0,00
		35.188.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	76.014.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.140.100,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	74.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01	Pendalaman Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	74.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.590.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	611.011.200,00	0,00	0,00	0,00
		550.296.941,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	611.011.200,00	0,00	0,00	0,00
		550.296.941,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.01	Perhalangan dan Pemutaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	611.011.200,00	0,00	0,00	0,00
		550.296.941,00	0,00	0,00	0,00
1.02	KESEHATAN	164.640.870.541,00	12.758.179.007,00	0,00	0,00
		147.631.643.032,95	10.125.158.042,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.894.004.627,00	382.247.700,00	0,00	0,00
		56.508.581.974,00	374.651.858,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.700.032.497,00	0,00	0,00	0,00
		55.702.879.938,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.740.612.497,00	0,00	0,00	0,00
		55.203.386.938,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.020.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.593.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.665.671,00	7.450.000,00	0,00	0,00
		486.405.986,00	7.050.500,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.124.721,00	2.450.000,00	0,00	0,00
		16.186.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.732.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		53.690.000,00	4.806.500,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.486.850,00	0,00	0,00	0,00
		24.226.880,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pungandaa	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.692.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.410.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	392.620.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	2.850.000,00	182.207.700,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.280.000,00	157.122.900,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.850.000,00	162.297.700,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.02	Pemeliharaan (Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	2.280.000,00	157.122.900,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sangunan Lainnya	90.375.459,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sangunan Lainnya	50.558.760,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sangunan Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sangunan Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sangunan Lainnya	76.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sangunan Lainnya	49.579.904,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sangunan Lainnya	11.475.459,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sangunan Lainnya	7.877.856,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sangunan Lainnya	230.181.000,00	212.500.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sangunan Lainnya	258.159.289,00	210.472.458,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sangunan Lainnya	278.181.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sangunan Lainnya	243.359.289,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUJIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15.000.000,00	212.500.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk LKMD dan UKP Kawerangan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	210.472.458,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	104.249.446.209,00	12.375.931.397,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	80.304.139.820,95	8.750.806.184,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.072.988.482,00	8.054.118.625,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.068.730.914,00	6.942.280.755,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.15	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	570.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	49.824.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	76.805.534,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.18	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	70.700.707,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.19	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	28.482.908,00	862.437.002,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.20	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.779.500,00	270.586.358,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.21	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	39.363.000,00	7.053.091.090,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.22	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23.270.000,00	6.434.926.840,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.356.297.574,00	112.085.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Modik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.981.143.195,00	110.103.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.033.040.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.704.720.950,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	525.078.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	270.804.949,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	89.251.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	38.928.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	90.429.592.117,00	3.421.511.772,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	84.750.531.564,95	2.600.525.429,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	677.521.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	298.316.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	110.899.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ural	77.946.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.750.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	16.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		181.225.900,00	0,00	0,00	0,00
		60.514.852,00	0,00	0,00	0,00
		241.363.200,00	0,00	0,00	0,00
		145.649.700,00	0,00	0,00	0,00
		168.384.700,00	0,00	0,00	0,00
		52.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.917.600,00	0,00	0,00	0,00
		32.428.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		17.054.800,00	0,00	0,00	0,00
		181.499.700,00	0,00	0,00	0,00
		175.164.800,00	0,00	0,00	0,00
		105.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.425.000,00	0,00	0,00	0,00
		634.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.122.500,00	0,00	0,00	0,00
		54.392.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.670.900,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK YERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	277.028.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Bortpotensi Bencana	93.212.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22.423.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.085.488.453,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	949.630.075,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	144.182.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	59.967.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (DDMK)	514.034.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	272.290.696,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	543.864.596,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	202.449.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	17.389.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	307.338.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	105.148.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	54.678.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.257.000,00	0,00	0,00	0,00
		154.200.505,00	0,00	0,00	0,00
		73.856.750,00	0,00	0,00	0,00
		1.033.511.200,00	0,00	0,00	0,00
		639.438.881,00	0,00	0,00	0,00
		19.711.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.679.214.550,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.472.831.994,00	2.707.362.988,00	0,00	0,00
		52.373.081.910,00	2.204.184.315,00	0,00	0,00
		12.495.543.788,00	714.148.804,00	0,00	0,00
		8.608.549.206,95	604.331.114,00	0,00	0,00
		794.060.998,00	0,00	0,00	0,00
		425.035.945,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	72.772.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Polaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	37.485.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesenalan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	11,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	37.240.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan LKM di Wilayah Kabupaten/Kota	448.875.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.388.950,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	716.875.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	470.479.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.070.471.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	480.318.840,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	84.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		986.071.000,00	0,00	0,00	0,00
		422.998.890,00	0,00	0,00	0,00
		986.071.000,00	0,00	0,00	0,00
		422.998.890,00	0,00	0,00	0,00
		131.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.398.100,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.513.950,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.513.950,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IHT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	41.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IHT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	36.758.150,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	21.286.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	402.448.615,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Intas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	255.011.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Unsur Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	185.394.140,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Prevensi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	255.811.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	185.394.140,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.410.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKDM)	27.410.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200.240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.440.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.658.508.863,00	91.557.503.114,00	0,00	0,00
		8.619.770.593,00	87.811.908.808,00	0,00	0,00
		8.193.196.963,00	7.941.333.510,00	0,00	0,00
		7.714.228.231,00	7.633.834.000,00	0,00	0,00
		6.532.885.180,00	0,00	0,00	0,00
		6.329.317.427,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.144.505.168,00	0,00	0,00	0,00
		5.944.787.427,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	388.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		384.530.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.882.851,00	0,00	0,00	0,00
		303.783.909,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencaraan Bangunan Kantor	4.888.201,00	0,00	0,00	0,00
		4.888.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.658.800,00	0,00	0,00	0,00
		45.998.625,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.131.890,00	0,00	0,00	0,00
		4.836.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.435.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.810.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.985.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.977.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.874.000,00	0,00	0,00	0,00
		214.158.384,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.420.000,00	7.941.303.500,00	0,00	0,00
		8.760.000,00	7.633.634.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	14.420.000,00	7.941.303.500,00	0,00	0,00
		8.760.000,00	7.633.634.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.081.064,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.921.084,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.670.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.240.018.944,00	0,00	0,00	0,00
		1.022.205.831,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.435.861,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	981.078.944,00	0,00	0,00	0,00
		832.859.970,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	575.674.800,00	4.601.880.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	543.788.014,00	4.599.482.770,00	0,00	0,00
		371.414.800,00	1.401.515.000,00	0,00	0,00
		347.721.914,00	1.398.860.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	101.138.800,00	0,00	0,00	0,00
		100.847.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Lebing	32.370.000,00	1.175.000.000,00	0,00	0,00
		30.810.000,00	1.172.692.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	237.905.000,00	229.545.000,00	0,00	0,00
		218.034.914,00	229.976.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 10x10 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	204.260.800,00	3.187.315.000,00	0,00	0,00
		196.066.100,00	3.132.794.770,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	45.475.000,00	107.755.000,00	0,00	0,00
		45.197.200,00	107.306.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.03	Pembangunan Dendeng Irigasi	12.210.000,00	489.220.000,00	0,00	0,00
		12.100.000,00	430.521.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	51.795.000,00	1.542.605.000,00	0,00	0,00
		44.555.000,00	1.538.487.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.14	Reliabilitas Jaringan Irigasi Permukaan	61.735.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
		43.180.900,00	490.894.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	51.045.000,00	557.665.000,00	0,00	0,00
		51.025.000,00	557.609.770,00	0,00	0,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	72.649.900,00	140.000.000,00	0,00	0,00
		71.123.600,00	128.680.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	72.649.900,00	140.000.000,00	0,00	0,00
		71.123.600,00	128.680.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	42.100.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
		42.000.000,00	128.680.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	30.549.900,00	0,00	0,00	0,00
		29.043.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	309.958.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.437.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	309.958.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.437.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Berskala Kota	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.560.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Sempal	283.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		283.077.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	62.095.000,00	5.608.459.000,00	0,00	0,00
		62.090.000,00	5.690.059.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	62.095.000,00	5.698.459.000,00	0,00	0,00
		62.090.000,00	5.698.059.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	44.915.000,00	5.200.409.000,00	0,00	0,00
		44.910.000,00	5.200.009.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	17.180.000,00	498.050.000,00	0,00	0,00
		17.180.000,00	498.050.000,00	0,00	0,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	152.853.000,00	9.438.543.880,00	0,00	0,00
		179.669.500,00	9.408.695.288,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pembenahan dan Mandirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	179.669.500,00	9.408.695.288,00	0,00	0,00
		349.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mandirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tunggai Afilis Bangunan Gedung (PATAG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	122.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.103.000,00	9.438.543.880,00	0,00	0,00
		57.069.500,00	9.408.695.288,00	0,00	0,00
1.03.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	766.429.000,00	63.737.336.734,00	0,00	0,00
		663.180.574,00	63.213.457.816,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	766.429.000,00	63.737.336.734,00	0,00	0,00
		663.180.574,00	63.213.457.816,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Stratag. Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	68.404.000,00	156.085.000,00	0,00	0,00
		53.209.331,00	156.195.750,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	11.775.000,00	359.152.000,00	0,00	0,00
		29.675.900,00	359.152.000,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	530.479.000,00	58.738.539.803,00	0,00	0,00
		475.374.343,00	58.216.875.368,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Hulin Jalan	50.673.000,00	2.284.906.431,00	0,00	0,00
		42.842.000,00	2.284.897.700,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	34.265.000,00	760.000.000,00	0,00	0,00
		28.389.000,00	708.050.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	1.250.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
		570.000,00	74.850.000,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	38.581.000,00	1.333.043.500,00	0,00	0,00
		33.120.000,00	1.333.637.000,00	0,00	0,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.425.900,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.425.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.01	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.425.900,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	230.681.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.227.774,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTDW) dan Rencana Hancu Tala Ruang (RHTR) Kabupaten/Kota	172.161.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.211.774,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Pencapaian RTHW Kabupaten/Kota	68.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.066.563,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RHTR Kabupaten/Kota	103.433.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.125.191,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.016.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.016.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.087.957.317,00	6.541.744.292,00	0,00	0,00
		15.745.760.382,00	8.002.123.639,00	0,00	0,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.490.576.879,00	98.648.601,00	0,00	0,00
		7.769.765.378,00	93.311.067,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.831.481.902,00	0,00	0,00	0,00
		7.227.802.494,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.593.881.802,00	0,00	0,00	0,00
		7.035.022.494,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	237.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		192.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.800.008,00	0,00	0,00	0,00
		186.420.908,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.497.100,00	0,00	0,00	0,00
		11.305.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKK TERDUGA	TRANSFER
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	38.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.711.717,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	11.999.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	14.499.900,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Kurisulasi SKPD	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.219.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.289.840,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.499.564,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor	60.241.881,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Diluar Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.499.564,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	43.745.681,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	12.496.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	350.714.725,00	93.648.600,00	0,00	0,00
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	299.290.103,00	93.311.667,00	0,00	0,00
		316.364.725,00	0,00	0,00	0,00
		268.095.303,00	0,00	0,00	0,00
		43.750.000,00	93.648.600,00	0,00	0,00
		25.285.300,00	93.311.667,00	0,00	0,00
		200.922.500,00	0,00	0,00	0,00
		128.065.900,00	0,00	0,00	0,00
		0.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		3,00	0,00	0,00	0,00
		0.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGABAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	170.324.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.065.900,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	170.324.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.065.900,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.04	Pondistribusi dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	349.186.800,00	0,00	0,00	0,00
		349.186.874,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	349.186.800,00	0,00	0,00	0,00
		349.186.874,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	349.186.800,00	0,00	0,00	0,00
		349.186.874,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.129.737.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.112.349.400,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.129.737.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.112.349.400,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01.01	Portaikun Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Perkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.129.737.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.112.349.400,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.518.134.868,00	8.448.095.682,00	0,00	0,00
		6.395.429.730,00	7.908.812.172,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Utusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.518.134.868,00	8.448.095.682,00	0,00	0,00
		6.395.429.730,00	7.908.812.172,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.518.134.868,00	8.448.095.682,00	0,00	0,00
		6.395.429.730,00	7.908.812.172,00	0,00	0,00
1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.951.077.038,00	564.074.234,00	0,00	0,00
		12.108.191.813,00	547.450.750,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.811.409.448,00	60.704.152,00	0,00	0,00
		4.395.020.765,00	59.676.790,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.946.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	YDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.956.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.261.471.058,00	0,00	0,00	0,00
		8.592.992.773,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.898.818.058,00	0,00	0,00	0,00
		8.429.762.773,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	165.655.000,00	0,00	0,00	0,00
		163.230.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.302.015,00	0,00	0,00	0,00
		342.538.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.988.275,00	0,00	0,00	0,00
		8.389.685,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.223.945,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Peralatan Pemah Tongga	12.443.140,00	0,00	0,00	0,00
		12.344.550,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengjandaan	46.935.500,00	0,00	0,00	0,00
		40.219.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.412.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	223.928.000,00	0,00	0,00	0,00
		220.945.650,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.348.100,00	10.704.600,00	0,00	0,00
		570.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.348.100,00	10.704.600,00	0,00	0,00
		570.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.923.178,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.173.178,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509.287.370,00	49.990.552,00	0,00	0,00
		387.342.998,00	49.778.750,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	322.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		268.169.826,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.868.539,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.625.622,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.99	Pemeliharaan/Habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.187.373,00	49.999.552,10	0,00	0,00
		30.579.900,00	49.776.750,00	0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	962.218.738,00	55.622.720,00	0,00	0,00
		925.300.558,00	54.700.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	907.273.738,00	55.622.720,00	0,00	0,00
		872.203.658,00	54.700.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	694.763.900,00	0,00	0,00	0,00
		680.025.758,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.522.010,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	54.318.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.410.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.04	Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.572.088,00	35.622.720,00	0,00	0,00
		33.744.800,00	34.900.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamungpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Dimuatnya Hak Asasi Manusia	13.508.500,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		12.528.000,00	0.800.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.031.250,00	0,00	0,00	0,00
		55.034.300,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	64.945.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.046.911,10	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	54.945.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.030.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.210.447.009,00	266.350.000,00	0,00	0,00
		1.040.930.240,00	266.160.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Pawan Bencana Kabupaten/Kota	43.667.599,00	0,00	0,00	0,00
		22.931.891,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	43.667.599,00	0,00	0,00	0,00
		22.931.891,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	849.358.122,00	266.350.000,00	0,00	0,00
		773.525.725,00	266.160.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	497.265.799,00	0,00	0,00	0,00
		476.687.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	18.033.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.698.025,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	125.211.343,00	266.350.000,00	0,00	0,00
		117.256.553,00	266.160.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	92.799.900,00	0,00	0,00	0,00
		92.359.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	41.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.389.951,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Respon Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	64.079.080,00	0,00	0,00	0,00
		49.151.936,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	317.421.288,00	0,00	0,00	0,00
		244.472.624,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	191.954.992,00	0,00	0,00	0,00
		151.080.265,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.639.296,00	0,00	0,00	0,00
		15.404.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	106.777.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.007.459,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	897.602.345,00	104.397.362,00	0,00	0,00
		836.640.250,00	166.914.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Sahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	823.152.445,00	181.397.362,00	0,00	0,00
		812.057.750,00	166.914.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	797.917.445,00	181.397.362,00	0,00	0,00
		790.037.750,00	166.914.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	25.235.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.020.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	19.999.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	17.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	19.999.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	17.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	SOSIAL	24.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.045.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.734.574.228,00	28.631.800,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.381.444.090,00	27.117.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.090.509.478,00	28.631.800,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.860.549.584,00	27.117.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.04	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.559.687.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.391.404.364,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.06	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.465.907.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.07	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.298.504.384,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.08	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.09	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.990.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	212.614.058,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	194.088.517,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.907.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.907.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.961.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.359.875,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.536.160,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.204.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.08	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.877.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.09	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.577.878,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.985.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.915.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	124.888.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	139.914.088,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	28.631.800,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.140.000,00	27.111.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.250.000,00	7.131.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.000,00	7.111.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.250.000,00	21.540.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	570.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.000.050,00	0,00	0,00	0,00
		42.289.458,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.01	Penyerahan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.986.050,00	0,00	0,00	0,00
		25.332.258,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	12.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.957.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.671.970,00	0,00	0,00	0,00
		236.637.247,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		207.597.497,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.171.970,00	0,00	0,00	0,00
		29.039.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	115.935.800,00	0,00	0,00	0,00
		78.166.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	115.935.800,00	0,00	0,00	0,00
		78.166.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kuwangan Kabupaten/Kota	115.935.800,00	0,00	0,00	0,00
		78.166.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	267.231.250,00	0,00	0,00	0,00
		195.817.051,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	118.269.400,00	0,00	0,00	0,00
		99.105.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Pemukiman	58.509.900,00	0,00	0,00	0,00
		43.329.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	57.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.776.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	150.961.350,00	0,00	0,00	0,00
		105.511.851,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Pemukiman	150.961.350,00	0,00	0,00	0,00
		105.511.051,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	134.464.900,00	0,00	0,00	0,00
		128.032.679,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	134.464.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.032.679,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	134.464.900,00	0,00	0,00	0,00
		126.032.679,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	126.432.800,00	0,00	0,00	0,00
		115.078.285,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	126.432.000,00	0,00	0,00	0,00
		115.078.285,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	89.170.800,00	0,00	0,00	0,00
		91.378.285,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	27.266.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	45.285.612.040,00	4.739.900.339,00	0,00	0,00
		39.087.867.943,33	3.557.297.092,00	0,00	0,00
2.07	TENAGA KERJA	3.051.314.091,00	5.500.000,00	0,00	0,00
		2.907.728.038,00	5.500.000,00	0,00	0,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.504.364.083,00	5.500.000,00	0,00	0,00
		2.427.124.339,00	5.500.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.158.201.716,00	0,00	0,00	0,00
		2.007.773.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.085.851.716,00	0,00	0,00	0,00
		1.960.110.080,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.655.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.553.527,00	5.500.000,00	0,00	0,00
		136.373.158,00	5.500.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.078.270,00	0,00	0,00	0,00
		7.070.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
		13.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.485.800,00	0,00	0,00	0,00
		5.484.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.452.157,00	0,00	0,00	0,00
		26.445.400,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.360.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.09	Penyuluhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.012.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.813.758,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.514.458,00	0,00	0,00	0,00
		51.938.470,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.514.450,00	0,00	0,00	0,00
		36.283.470,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.034.382,00	0,00	0,00	0,00
		231.044.650,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.481.250,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.534.382,00	0,00	0,00	0,00
		60.563.400,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RHK)	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	217.134.998,00	0,00	0,00	0,00
		208.849.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	202.034.998,00	0,00	0,00	0,00
		196.929.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	202.034.998,00	0,00	0,00	0,00
		196.929.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.140.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.140.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.510.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.04.2.03.03	Jab Fair/Bursa Kerja	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.630.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	152.315.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.712.400,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perdamaian Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	152.315.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.712.400,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sazana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	152.315.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.712.400,00	0,00	0,00	0,00
2.00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.718.011.430,00	19.488.300,00	0,00	0,00
		1.615.529.358,00	18.549.000,00	0,00	0,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	744.946.500,00	0,00	0,00	0,00
		719.029.337,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kawenangan Kabupaten/Kota	22.352.850,00	0,00	0,00	0,00
		19.048.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	22.352.850,00	0,00	0,00	0,00
		19.048.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kawenangan Kabupaten/Kota	722.643.650,00	0,00	0,00	0,00
		699.974.937,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kawenangan Kabupaten/Kota	722.643.650,00	0,00	0,00	0,00
		699.974.937,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	22.284.500,00	0,00	0,00	0,00
		21.409.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22.284.500,00	0,00	0,00	0,00
		21.409.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kawenangan Kabupaten/Kota	22.284.500,00	0,00	0,00	0,00
		21.409.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	840.456.630,00	19.488.300,00	0,00	0,00
		789.863.934,00	18.549.000,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840.456.630,00	19.488.300,00	0,00	0,00
		789.863.934,00	18.549.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.04.2.01.01	Alokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.560.100,00	0,00	0,00	0,00
		7.682.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.480.800,00	0,00	0,00	0,00
		13.555.300,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	809.406.730,00	19.488.300,00	0,00	0,00
		768.626.634,00	18.549.000,00	0,00	0,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	18.519.800,00	0,00	0,00	0,00
		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kolembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.588.800,00	0,00	0,00	0,00
		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	18.588.800,00	0,00	0,00	0,00
		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	57.034.200,00	0,00	0,00	0,00
		44.820.587,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	57.034.200,00	0,00	0,00	0,00
		44.820.587,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.034.200,00	0,00	0,00	0,00
		44.820.587,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	34.669.800,00	0,00	0,00	0,00
		26.912.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01	Penugasan Kekerasan Terhadap Anak yang Merugikan para Pihak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.669.800,00	0,00	0,00	0,00
		26.912.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34.669.800,00	0,00	0,00	0,00
		26.912.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09	PANGAN	498.045.000,00	0,00	0,00	0,00
		463.777.100,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	45.296.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.665.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Saluran Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.296.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.665.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	45.296.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.665.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	336.794.828,00	0,00	0,00	0,00
		316.521.700,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	190.674.178,00	0,00	0,00	0,00
		180.691.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	28.091.400,00	0,00	0,00	0,00
		23.386.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	69.583.028,00	0,00	0,00	0,00
		69.066.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	92.089.750,00	0,00	0,00	0,00
		88.229.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	25.121.850,00	0,00	0,00	0,00
		24.621.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25.121.850,00	0,00	0,00	0,00
		24.621.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	122.998.800,00	0,00	0,00	0,00
		111.218.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10.449.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.819.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02	Pembudayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	112.548.900,00	0,00	0,00	0,00
		102.399.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	102.412.900,00	0,00	0,00	0,00
		97.560.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	13.039.400,00	0,00	0,00	0,00
		9.520.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	13.039.400,00	0,00	0,00	0,00
		9.520.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	89.373.500,00	0,00	0,00	0,00
		88.040.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.373.500,00	0,00	0,00	0,00
		88.040.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	8.547.300,00	0,00	0,00	0,00
		5.979.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	8.541.300,00	0,00	0,00	0,00
		5.979.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8.541.300,00	0,00	0,00	0,00
		5.070.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10	PERTANAHAN	359.715.000,00	1.142.997.230,00	0,00	0,00
		63.198.450,00	19.108.000,00	0,00	0,00
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	359.715.000,00	1.142.997.230,00	0,00	0,00
		63.198.450,00	19.108.000,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	359.715.000,00	1.142.997.230,00	0,00	0,00
		63.198.450,00	19.108.000,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	359.715.000,00	1.142.997.230,00	0,00	0,00
		63.198.450,00	19.108.000,00	0,00	0,00
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	2.680.403.116,00	255.850.000,00	0,00	0,00
		2.426.143.547,00	252.362.000,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	229.631.350,00	79.800.000,00	0,00	0,00
		136.176.699,00	79.800.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	156.155.350,00	79.800.000,00	0,00	0,00
		125.864.109,00	79.800.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	89.676.900,00	0,00	0,00	0,00
		59.453.698,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	55.011.150,00	0,00	0,00	0,00
		30.873.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	31.467.300,00	79.800.000,00	0,00	0,00
		26.997.500,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	73.476.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.512.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02.01	Pemberian informasi/Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	73.476.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.512.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.740.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	14.723.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.740.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	14.723.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.740.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	38.308.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.014.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.PPLH	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.308.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.014.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.915.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.308.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.099.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.2.01.01	Kondinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	71.333.500,00	0,00	0,00	0,00
		41.729.340,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.333.500,00	0,00	0,00	0,00
		41.729.340,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	71.333.500,00	0,00	0,00	0,00
		41.729.340,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.400.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filaritropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	37.602.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.977.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.686.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.977.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.686.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.977.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.686.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.251.827.786,00	176.050.000,00	0,00	0,00
		2.213.397.509,00	172.262.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.251.827.786,00	176.050.000,00	0,00	0,00
		2.213.397.509,00	172.262.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendorong Ulang dan Pemfaatan Kembali	805.000,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPW/PSI/SPA Kabupaten/Kota	2.144.571.916,00	0,00	0,00	0,00
		2.117.148.509,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	104.445.850,00	61.050.000,00	0,00	0,00
		94.391.000,00	51.850.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPW/PSI/SPA Kabupaten/Kota	2.005.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
		1.058.000,00	121.212.000,00	0,00	0,00
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.234.313.076,00	116.141.764,00	0,00	0,00
		3.812.865.969,00	111.210.000,00	0,00	0,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.543.018.176,00	34.025.764,00	0,00	0,00
		3.224.026.981,00	31.500.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.365.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.365.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.080.447.309,00	0,00	0,00	0,00
		2.781.930.643,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.985.077.399,00	0,00	0,00	0,00
		2.695.835.843,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.095.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.431.216,00	0,00	0,00	0,00
		167.868.434,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.030.606,00	0,00	0,00	0,00
		4.998.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.003.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.995.125,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.994.840,00	0,00	0,00	0,00
		6.982.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.713.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.103.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyuluenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.985.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.985.409,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.172.430,00	0,00	0,00	0,00
		73.385.659,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.172.400,00	0,00	0,00	0,00
		50.597.159,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.788.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.060.131,00	34.025.764,00	0,00	0,00
		182.377.045,00	33.500.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.327.000,00	0,00	0,00	0,00
		176.633.045,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.733.131,00	34.025.764,00	0,00	0,00
		15.744.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	425.254.000,00	82.116.000,00	0,00	0,00
		392.300.652,00	77.710.000,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	419.472.000,00	82.116.000,00	0,00	0,00
		377.686.052,00	77.710.000,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.01	Hondalan Penduduk Non Permanen dari Hunian Administrasi Kependudukan	13.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.105.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	248.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		245.120.570,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	117.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.483.532,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Palaporan Peristiwa Kependudukan	19.985.000,00	82.116.000,00	0,00	0,00
		27.948.960,00	77.710.000,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	5.782.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.714.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.782.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.714.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	132.610.308,00	0,00	0,00	0,00
		102.330.125,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	75.119.800,00	0,00	0,00	0,00
		57.494.700,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Palaporan Peristiwa Penting	25.605.900,00	0,00	0,00	0,00
		19.958.700,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	36.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.732.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	12.664.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.004.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	57.491.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.835.225,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02.03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	15.266.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.208.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02.06	Insitusi Terkai Pencatatan Sipil	13.415.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.995.135,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02.09	Sosialisasi Terkai Pencatatan Sipil	28.810.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.631.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	93.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.007.981,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Keperazudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	21.921.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.954.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	21.921.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.959.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	72.059.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.048.961,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.089.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.056.961,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.04.2.03.04	fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	33.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.840.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.152.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	38.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.320.250,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	30.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.320.250,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Pnyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	39.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.320.250,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	619.705.000,00	0,00	0,00	0,00
		599.408.617,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	7.043.900,00	0,00	0,00	0,00
		6.965.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	7.043.900,00	0,00	0,00	0,00
		6.985.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	7.043.900,00	0,00	0,00	0,00
		6.965.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	39.421.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.855.100,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	39.421.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.855.100,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01.02	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	39.421.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.855.100,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	456.323.600,00	0,00	0,00	0,00
		450.189.117,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	456.323.600,00	0,00	0,00	0,00
		450.189.117,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.01	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	419.238.600,00	0,00	0,00	0,00
		413.661.217,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	37.085.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.707.900,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	110.916.800,00	0,00	0,00	0,00
		103.419.400,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.05.2.01	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Uklang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemertayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.016.800,00	0,00	0,00	0,00
		103.419.400,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.02	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kolaborasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (DT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	31.453.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.889.600,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kolaborasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	27.768.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.995.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	57.685.800,00	0,00	0,00	0,00
		51.434.800,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.095.798.524,00	0,00	0,00	0,00
		5.653.146.882,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.975.864.042,00	0,00	0,00	0,00
		2.869.238.112,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.597.040.279,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.026.648,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.510.870.279,00	0,00	0,00	0,00
		2.425.968.640,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	08.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		03.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.316.539,00	0,00	0,00	0,00
		180.157.104,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.097.341,00	0,00	0,00	0,00
		4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.975.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.999.598,00	0,00	0,00	0,00
		5.024.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.708.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.282.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.676.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.620.004,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.01.2.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.539.150,00	0,00	0,00	0,00
		13.130.846,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.999.100,00	0,00	0,00	0,00
		3.785.846,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08.03	Penyerahan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.785.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.888.074,00	0,00	0,00	0,00
		166.024.714,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penznan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.980.800,00	0,00	0,00	0,00
		146.153.714,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.03	Pemeliharaan/Rahabiliasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.999.474,00	0,00	0,00	0,00
		19.871.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	106.199.996,00	0,00	0,00	0,00
		70.850.938,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Penelaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106.199.996,00	0,00	0,00	0,00
		70.850.938,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	106.199.996,00	0,00	0,00	0,00
		70.850.938,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.180.246.876,00	0,00	0,00	0,00
		1.971.210.162,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Palaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.114.692.646,00	0,00	0,00	0,00
		985.339.700,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	3.772.846,00	0,00	0,00	0,00
		3.529.700,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	180.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.230.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.05	Palaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Hakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	613.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		571.898.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Dalam Penyuluhan KKBPK	337.049.800,00	0,00	0,00	0,00
		314.882.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KKBPK/otugas Lapangan KB (PKR/P KB)	992.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		366.715.992,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	392.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		368.715.982,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengentalian dan Pendistribusian Kebuahan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	375.085.481,00	0,00	0,00	0,00
		357.187.480,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Keserian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	375.085.481,00	0,00	0,00	0,00
		357.187.480,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-KB	287.888.750,00	0,00	0,00	0,00
		281.987.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-KB	8.881.750,00	0,00	0,00	0,00
		9.022.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KIKUPK di Kampung KB	288.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		252.945.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	831.467.610,00	0,00	0,00	0,00
		741.046.650,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	175.396.200,00	0,00	0,00	0,00
		171.427.950,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Ura Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	175.396.200,00	0,00	0,00	0,00
		171.427.950,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	658.071.410,00	0,00	0,00	0,00
		570.418.700,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	658.071.410,00	0,00	0,00	0,00
		570.418.700,00	0,00	0,00	0,00
2.15	PERHUBUNGAN	514.919.885,00	168.081.176,00	0,00	0,00
		443.160.650,00	163.639.534,00	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	514.919.885,00	168.081.176,00	0,00	0,00
		443.160.650,00	163.639.534,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.993.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00
		12.022.500,00	86.700.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.993.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00
		12.022.500,00	86.700.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	82.916.294,00	77.081.176,00	0,00	0,00
		21.439.800,00	76.675.900,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas Utama dan Pendukung)	22.916.294,00	77.081.176,00	0,00	0,00
		21.439.800,00	76.675.900,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	82.049.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		65.133.700,00	1.463.634,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.01	Penyerahan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	21.028.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		11.821.100,00	1.463.634,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.03	Hugisasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	29.521.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.312.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Matrik Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	355.724.216,00	0,00	0,00	0,00
		304.843.550,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.01	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	114.021.700,00	0,00	0,00	0,00
		113.969.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Lektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	241.102.516,00	0,00	0,00	0,00
		190.874.050,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalan) untuk Jalan Kabupaten/Kota	13.987.600,00	0,00	0,00	0,00
		13.509.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalan	13.987.600,00	0,00	0,00	0,00
		13.509.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.249.775,00	0,00	0,00	0,00
		26.121.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	26.249.775,00	0,00	0,00	0,00
		26.121.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	6.900.469.287,00	252.364.807,00	0,00	0,00
		6.627.223.979,00	252.394.000,00	0,00	0,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.419.000.217,00	24.431.070,00	0,00	0,00
		3.297.681.724,00	24.360.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.884.097.088,00	0,00	0,00	0,00
		2.880.284.983,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.891.157.088,00	0,00	0,00	0,00
		2.787.044.869,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.240.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.005.706,00	0,00	0,00	0,00
		225.063.966,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.005.525,00	0,00	0,00	0,00
		8.005.525,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dari Perlengkapan Kantor	28.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.955.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.990.840,00	0,00	0,00	0,00
		9.778.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Celakan dan Penggantian	11.040.340,00	0,00	0,00	0,00
		10.564.192,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.095.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.075.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.114.001,00	0,00	0,00	0,00
		163.666.240,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	24.431.070,00	0,00	0,00
		0,00	24.300.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	24.431.070,00	0,00	0,00
		0,00	24.300.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.449.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.696.046,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.433.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.049.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.262.546,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.848.423,00	0,00	0,00	0,00
		151.736.749,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	123.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.300.744,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.810.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.170.005,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.788.423,00	0,00	0,00	0,00
		20.186.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.314.031.831,00	141.233.737,00	0,00	0,00
		1.169.101.790,00	131.070.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.314.031.831,00	141.233.737,00	0,00	0,00
		1.166.101.790,00	131.070.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	43.461.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00
		39.530.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	26.331.900,00	0,00	0,00	0,00
		26.040.800,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kerjasama Komunitas	1.074.363.040,00	55.503.737,00	0,00	0,00
		935.588.000,00	55.349.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	170.872.881,00	61.293.000,00	0,00	0,00
		164.932.900,00	61.227.000,00	0,00	0,00
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.160.537.239,00	97.160.000,00	0,00	0,00
		2.183.439.865,00	97.024.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.842.440.239,00	97.160.000,00	0,00	0,00
		1.811.903.050,00	97.024.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.221.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.816.210.239,00	97.160.000,00	0,00	0,00
		1.815.682.050,00	97.024.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	324.097.000,00	0,00	0,00	0,00
		321.536.815,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	67.725.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.721.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	235.318.000,00	0,00	0,00	0,00
		234.834.950,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	21.354.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.960.385,00	0,00	0,00	0,00
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.432.762.900,00	0,00	0,00	0,00
		2.190.519.473,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	72.361.500,00	0,00	0,00	0,00
		65.925.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	72.361.500,00	0,00	0,00	0,00
		65.925.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Keuangan Kabupaten/Kota	72.361.500,00	0,00	0,00	0,00
		65.925.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	8.878.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.349.900,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.04.2.01	Pembiayaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.878.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.049.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.422.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.014.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.335.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	204.453.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.685.150,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	204.453.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.685.150,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	204.453.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.685.150,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	481.475.400,00	0,00	0,00	0,00
		425.776.681,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengualan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	461.475.400,00	0,00	0,00	0,00
		425.776.681,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.01	Pemetaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	24.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.095.600,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	11.677.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.089.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	30.512.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.764.731,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	34.697.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.709.550,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	204.964.400,00	0,00	0,00	0,00
		267.909.400,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.685.593.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.514.782.042,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.685.593.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.514.782.042,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.08.2.07.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjerif Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.685.585.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.514.782.042,00	0,00	0,00	0,00
2.18	PENANAMAN MODAL	3.863.349.980,00	180.447.197,00	0,00	0,00
		3.296.735.107,52	172.852.000,00	0,00	0,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.977.811.350,00	180.127.271,00	0,00	0,00
		2.763.579.407,52	172.852.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.572.388.730,00	0,00	0,00	0,00
		2.399.675.426,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.497.304.790,00	0,00	0,00	0,00
		2.327.835.426,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.084.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.040.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.668.517,00	89.921.160,00	0,00	0,00
		234.654.327,52	83.100.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.992.817,00	0,00	0,00	0,00
		4.992.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.000.000,00	63.423.160,00	0,00	0,00
		26.515.809,97	56.730.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.257.300,00	6.498.000,00	0,00	0,00
		26.179.999,55	6.490.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Ferggandaan	24.528.400,00	0,00	0,00	0,00
		24.478.700,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Kerja	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.344.100,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.418.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.343.819,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.770.000,00	110.200.111,00	0,00	0,00
		2.590.000,00	109.752.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.340.000,00	9.166.111,00	0,00	0,00
		1.250.000,00	9.002.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.430.000,00	101.040.000,00	0,00	0,00
		1.250.000,00	100.750.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.939.650,00	0,00	0,00	0,00
		25.761.650,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.999.650,00	0,00	0,00	0,00
		13.768.750,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.992.900,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.906.453,00	0,00	0,00	0,00
		100.788.004,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.04.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ulaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.986.453,00	0,00	0,00	0,00
		100.788.004,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	127.957.830,00	0,00	0,00	0,00
		124.803.700,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	127.957.830,00	0,00	0,00	0,00
		124.803.700,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	62.265.930,00	0,00	0,00	0,00
		62.055.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	55.869.800,00	0,00	0,00	0,00
		55.443.100,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelnaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	9.821.900,00	0,00	0,00	0,00
		7.305.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	535.705.000,00	0,00	0,00	0,00
		388.087.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	535.705.000,00	0,00	0,00	0,00
		388.087.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	46.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.982.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	330.571.000,00	0,00	0,00	0,00
		262.312.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	159.064.000,00	0,00	0,00	0,00
		03.772.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	21.926.000,00	318.926,00	0,00	0,00
		20.284.600,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.926.000,00	310.926,00	0,00	0,00
		20.294.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21.926.000,00	310.926,00	0,00	0,00
		20.294.600,00	0,00	0,00	0,00
2.10	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.256.786.336,00	1.380.685.768,00	0,00	0,00
		2.758.814.975,00	1.345.149.935,00	0,00	0,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.805.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.805.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	6.805.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.805.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	6.805.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.805.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.890.981.336,00	1.380.685.768,00	0,00	0,00
		2.403.814.975,00	1.345.149.935,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewonangan Daerah Kabupaten/Kota	218.494.436,00	1.380.685.768,00	0,00	0,00
		130.342.150,00	1.345.149.935,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	218.494.436,00	1.380.685.768,00	0,00	0,00
		130.342.150,00	1.345.149.935,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.290.500,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	53.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.290.500,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Praetasi Tingkat Daerah Provinsi	2.308.289.900,00	0,00	0,00	0,00
		675.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	2.308.289.900,00	0,00	0,00	0,00
		675.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.190.188.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.056.507.325,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Perksalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1.120.168.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.056.507.325,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		348.195.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		348.195.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.195.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20	STATISTIK	85.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.457.440,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	85.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.457.440,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	85.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.457.440,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektoral	85.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.457.440,00	0,00	0,00	0,00
2.21	PERSANDIAN	25.793.100,00	21.206.660,00	0,00	0,00
		23.331.401,00	21.100.000,00	0,00	0,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.793.100,00	21.206.660,00	0,00	0,00
		23.331.401,00	21.100.000,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.793.100,00	21.206.660,00	0,00	0,00
		23.331.401,00	21.100.000,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.793.100,00	21.206.660,00	0,00	0,00
		23.331.401,00	21.100.000,00	0,00	0,00
2.22	KEBUDAYAAN	3.628.172.594,00	0,00	0,00	0,00
		3.517.900.043,81	0,00	0,00	0,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.476.130.504,00	0,00	0,00	0,00
		3.396.600.743,81	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kosong Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.707.160.594,00	0,00	0,00	0,00
		2.691.836.285,41	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemantapan Objek Perwujudan Tradisi Budaya	2.707.160.594,00	0,00	0,00	0,00
		2.691.836.285,41	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	768.979.000,00	0,00	0,00	0,00
		704.764.453,40	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pradota Adat	130.430.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.515.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.02.2.03.03	Penyelesaian Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	638.548.000,00	0,00	0,00	0,00
		619.218.058,40	0,00	0,00	0,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.843.300,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.843.300,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.080.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.563.300,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	62.033.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.716.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01	Pemeliharaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	12.033.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.145.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	12.033.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.145.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.571.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.571.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23	PERPUSTAKAAN	3.280.952.403,00	1.198.677.437,00	0,00	0,00
		2.964.780.533,00	1.196.532.623,00	0,00	0,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.030.212.503,00	15.833.214,00	0,00	0,00
		2.726.741.047,00	13.840.030,00	0,00	0,00
2.23.01.2.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.568.250.029,00	0,00	0,00	0,00
		2.361.271.029,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.500.330.029,00	0,00	0,00	0,00
		2.296.791.029,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.480.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.250.876,00	1.140.000,00	0,00	0,00
		156.653.159,00	1.140.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.898.500,00	0,00	0,00	0,00
		26.882.239,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.109.576,00	1.140.000,00	0,00	0,00
		5.047.243,00	1.140.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Colokan dan Penggandaan	14.653.003,00	0,00	0,00	0,00
		14.652.475,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.965.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.599.500,00	0,00	0,00	0,00
		103.106.202,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.015.920,00	14.723.214,00	0,00	0,00
		0,00	12.700.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	14.723.214,00	0,00	0,00
		0,00	12.700.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.015.920,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.620.749,00	0,00	0,00	0,00
		71.588.584,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.620.749,00	0,00	0,00	0,00
		63.642.584,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.946.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.064.929,00	0,00	0,00	0,00
		137.228.276,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.643.346,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.584.929,00	0,00	0,00	0,00
		19.584.929,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	230.739.900,00	1.182.814.223,00	0,00	0,00
		213.428.186,00	1.181.692.623,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.739.900,00	1.182.814.223,00	0,00	0,00
		213.428.186,00	1.181.692.623,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.739.000,00	1.182.814.223,00	0,00	0,00
		167.767.200,00	1.181.692.623,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.03	Peningkatan Kekayaan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.998.686,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.732.300,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.611.300,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.611.300,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilastarkan dan Didayagunakan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.611.300,00	0,00	0,00	0,00
2.24	KEARSIPAN	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		244.030.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	41.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.110.100,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	34.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.940.100,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	34.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.940.100,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.170.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.170.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	208.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		203.928.900,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	208.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		203.928.900,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	208.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		203.928.900,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	40.688.824.689,00	2.327.407.987,00	0,00	0,00
		38.307.813.211,00	2.183.827.043,00	0,00	0,00
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.579.365.665,00	0,00	0,00	0,00
		1.534.780.203,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.531.089.815,00	0,00	0,00	0,00
		1.505.272.350,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02	Pemherdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	278.276.000,00	0,00	0,00	0,00
		264.014.300,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	230.266.800,00	0,00	0,00	0,00
		220.727.300,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembiuktan dan Pengembangan Kolaborasi Pembudi Daya Ikan Kecil	48.009.200,00	0,00	0,00	0,00
		43.747.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.04.2.02.01	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	14.710.200,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pambudidayaan Ikan	6.537.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pambudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.251.823.815,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pambudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.241.258.050,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	807.558.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	798.256.550,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Pendorongan Peningkatan Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	444.205.815,00	0,00	0,00	0,00
3.26	PARISWATA	443.051.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.285.850,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.507.850,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.507.850,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.285.850,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.507.850,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.056.146.000,00	360.140.500,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.275.864,00	158.500.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.210.720.818,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	3.138.827.724,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.09	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.811.134.201,00	0,00	0,00	0,00
		2.774.018.580,00	0,00	0,00	0,00
		2.678.364.291,00	0,00	0,00	0,00
		2.642.441.580,00	0,00	0,00	0,00
		131.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.507.740,00	0,00	0,00	0,00
		187.804.708,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.917.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.199.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.534.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.843.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.857.740,00	0,00	0,00	0,00
		151.311.788,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.278.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.278.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26.11.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.178.817,00	0,00	0,00	0,00
		145.526.058,110	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ulaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Diras Operasional atau Lapangan	128.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.060.081,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.178.817,00	0,00	0,00	0,00
		18.841.875,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.625.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	416.746.219,00	180.140.500,00	0,00	0,00
		381.083.650,00	158.580.000,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	416.746.219,00	180.140.500,00	0,00	0,00
		381.083.650,00	158.580.000,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.01	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	416.746.219,00	180.140.500,00	0,00	0,00
		301.083.650,00	158.580.000,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04	Pencapaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	411.198.980,00	0,00	0,00	0,00
		364.825.280,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	411.198.980,00	0,00	0,00	0,00
		364.825.280,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.335.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	409.425.980,00	0,00	0,00	0,00
		363.490.280,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	138.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.476.004,00	0,00	0,00	0,00
		896.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Dorcksprosi, Bcipromusi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	1.476.004,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	1.476.004,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	16.004.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.839.200,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	16.004.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.839.200,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Pemasaran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	16.004.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.839.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PERTANIAN	20.861.492.530,00	1.655.981.720,00	0,00	0,00
		27.027.930.389,00	1.515.516.250,00	0,00	0,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.186.977.244,00	54.325.500,00	0,00	0,00
		11.385.259.017,00	54.209.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.338.673.321,00	0,00	0,00	0,00
		10.309.924.512,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.055.973.321,00	0,00	0,00	0,00
		10.033.514.512,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	292.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		276.470.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.192.004,00	54.325.500,00	0,00	0,00
		317.803.040,00	54.299.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.980.658,00	0,00	0,00	0,00
		9.938.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.1196.803,00	54.325.500,00	0,00	0,00
		38.061.000,00	54.299.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.821.390,00	0,00	0,00	0,00
		10.812.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.019.200,00	0,00	0,00	0,00
		48.015.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.01.2.08.08	Fasilitasi Kunjungan Tanau	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.262.353,00	0,00	0,00	0,00
		196.056.140,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Peranjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.044.991,00	0,00	0,00	0,00
		90.078.315,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.042.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.994.491,00	0,00	0,00	0,00
		77.066.315,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.970.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Pemeliharaan Sarang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.061.424,00	0,00	0,00	0,00
		367.343.150,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	294.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		108.930.950,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.103.400,00	0,00	0,00	0,00
		108.541.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	9.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.965.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.986.528,00	0,00	0,00	0,00
		59.906.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15.301.937.019,00	723.103.479,00	0,00	0,00
		14.737.120.121,00	688.433.250,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pangawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.134.135.600,00	524.479.000,00	0,00	0,00
		3.087.986.582,00	490.243.250,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.130.135.000,00	524.479.000,00	0,00	0,00
		3.087.386.502,00	490.283.250,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisma Kuwangan Kabupaten/Kota	3.450.417.269,00	198.624.479,00	0,00	0,00
		3.224.479.176,00	198.150.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	189.290.980,00	0,00	0,00	0,00
		53.785.921,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	108.573.279,00	198.624.479,00	0,00	0,00
		160.450.670,00	198.150.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.082.553.030,00	0,00	0,00	0,00
		3.019.242.585,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MGDAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.712.384.150,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.428.254.383,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.665.504.250,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.388.706.563,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	46.879.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	37.547.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	988.226.980,00	878.552.661,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	885.125.780,00	772.784.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	252.157.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	176.171.680,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Perir	201.283.050,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	165.042.780,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Garam	50.874.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	11.128.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	736.089.030,00	878.552.661,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	708.954.110,00	772.784.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3.189.100,00	0,00	0,00	0,00
		3.189.000,00	0,00	0,00	0,00
		535.929.050,00	0,00	0,00	0,00
		520.977.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		51.581.050,00	0,00	0,00	0,00
		50.103.800,00	0,00	0,00	0,00
		145.366.830,00	878.552.661,00	0,00	0,00
		134.380.900,00	772.784.000,00	0,00	0,00
		625.646.729,00	0,00	0,00	0,00
		575.834.324,00	0,00	0,00	0,00
		462.312.320,00	0,00	0,00	0,00
		424.671.424,00	0,00	0,00	0,00
		462.312.329,00	0,00	0,00	0,00
		424.671.424,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	25.704.800,00	0,00	0,00	0,00
		24.990.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	25.704.800,00	0,00	0,00	0,00
		24.990.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.909.585,00	0,00	0,00	0,00
		80.293.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.01	Penyerahan Pelayanan Jasa Laboratorium	37.599.801,00	0,00	0,00	0,00
		33.063.850,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	51.309.784,00	0,00	0,00	0,00
		47.230.250,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	48.640.055,00	0,00	0,00	0,00
		45.879.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	29.980.800,00	0,00	0,00	0,00
		28.165.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Perekaman Hewan dan Produk Hewan	18.649.455,00	0,00	0,00	0,00
		17.714.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	34.345.900,00	0,00	0,00	0,00
		27.862.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	34.345.900,00	0,00	0,00	0,00
		27.862.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	9.005.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.512.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	25.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	27.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.831.850,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.831.850,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	27.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.831.850,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	698.258.816,00	0,00	0,00	0,00
		589.758.597,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	698.258.816,00	0,00	0,00	0,00
		589.758.597,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	424.657.400,00	0,00	0,00	0,00
		380.217.916,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Pengumpulan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	81.435.500,00	0,00	0,00	0,00
		73.387.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemandaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	117.166.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.711.465,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	69.880.716,00	0,00	0,00	0,00
		49.459.616,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PERDAGANGAN	1.003.196.333,00	496.285.107,00	0,00	0,00
		973.382.050,00	494.731.693,00	0,00	0,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	778.540.031,00	332.570.989,00	0,00	0,00
		752.784.500,00	331.756.633,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	742.475.031,00	332.570.989,00	0,00	0,00
		728.564.700,00	331.756.633,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	119.875.031,00	332.570.989,00	0,00	0,00
		119.114.200,00	331.756.633,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	622.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		600.450.500,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	36.085.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.219.800,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	36.085.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.219.800,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	169.916.000,00	0,00	0,00	0,00
		160.822.250,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	18.636.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.274.800,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	18.636.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.274.800,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	135.830.000,00	0,00	0,00	0,00
		133.377.650,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.03	Polaksanaan Operasi Pasar Umum dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	135.830.000,00	0,00	0,00	0,00
		133.377.650,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		0.169.800,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.04.2.00.03	Pengawasan Penyulutan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubaidi	0.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.169.800,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	39.700.302,00	163.714.189,00	0,00	0,00
		38.773.700,00	162.975.080,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	39.700.302,00	163.714.189,00	0,00	0,00
		38.773.700,00	162.975.080,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	30.367.802,00	163.714.189,00	0,00	0,00
		29.076.200,00	162.975.080,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0.332.500,00	0,00	0,00	0,00
		8.797.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	21.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.001.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	21.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.001.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	11.193.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.154.800,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	9.847.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.846.800,00	0,00	0,00	0,00
3.31	PERINDUSTRIAN	4.188.604.102,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		4.032.344.188,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3.31.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.504.868.889,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		3.398.822.180,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.154.252.604,00	0,00	0,00	0,00
		3.086.926.750,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.016.562.604,00	0,00	0,00	0,00
		2.964.626.750,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.743.304,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		165.820.708,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.785.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		35.004.250,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.993.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.488.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	FDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.01.2.06.08	fasilitasi Kunjungan Tamu	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.745.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.728.304,00	0,00	0,00	0,00
		78.800.498,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.389.899,08	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.889.889,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.247.791,00	0,00	0,00	0,00
		110.684.825,08	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Olhas Operasional atau Lapangan	85.640.700,00	0,00	0,00	0,00
		82.083.700,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.997.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gorong Kambor dan Bangunan Lainnya	23.607.091,00	0,00	0,00	0,00
		23.594.125,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	628.637.403,00	0,00	0,00	0,00
		619.829.028,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evalueasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	628.637.403,00	0,00	0,00	0,00
		619.829.028,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.02	Konominasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Pempetaan Pengembangan, Penyebaran dan Penyaluran Industri	23.386.400,00	0,00	0,00	0,00
		23.245.900,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pempodayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	605.271.003,00	0,00	0,00	0,00
		596.583.128,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	55.098.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.693.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	55.098.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.693.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01.01	fasilitasi Perneruhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	55.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.693.500,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUH PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	77.398.638.045,00	2.004.955.952,00	0,00	0,00
		72.209.278.405,00	1.873.002.480,00	0,00	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	50.938.197.870,00	1.873.485.274,00	0,00	0,00
		46.970.666.582,00	1.841.615.480,00	0,00	0,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.294.030.944,00	1.873.485.274,00	0,00	0,00
		24.752.623.274,00	1.841.615.480,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.842.550.123,00	0,00	0,00	0,00
		9.846.440.877,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.315.570.123,00	0,00	0,00	0,00
		9.521.820.877,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	326.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		324.620.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.419.455.071,00	1.364.580.000,00	0,00	0,00
		6.250.384.077,00	1.346.273.450,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Kumpulan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	234.573.088,00	0,00	0,00	0,00
		234.306.065,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	418.131.795,00	1.364.580.000,00	0,00	0,00
		412.601.100,00	1.346.273.450,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	187.401.300,00	0,00	0,00	0,00
		187.179.350,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.470.081.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.461.000.158,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Pencolnggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.109.187.897,00	0,00	0,00	0,00
		2.955.210.504,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.572.694.880,00	0,00	0,00	0,00
		2.453.587.940,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.950.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	510.084.900,00	0,00	0,00	0,00
		432.566.518,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.030.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.071.422,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.436.633.460,00	218.094.710,00	0,00	0,00
		2.294.754.320,00	217.578.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	519.688.292,00	0,00	0,00	0,00
		400.329.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.840.711.968,00	0,00	0,00	0,00
		1.736.102.590,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.750.000,00	154.482.460,00	0,00	0,00
		600.000,00	154.118.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.483.200,00	64.632.250,00	0,00	0,00
		67.582.350,00	63.531.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Adminstras Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.064.781.730,00	0,00	0,00	0,00
		904.179.268,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	166.981.738,00	0,00	0,00	0,00
		165.985.688,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Alas Kaki Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	101.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		399.555.620,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.03	Peaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	06.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.641.950,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.04	Penyerahan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		398.996.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahsantiahan Sekretariat Daerah	1.153.839.800,00	200.810.384,00	0,00	0,00
		1.107.416.650,00	277.763.030,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	633.047.400,00	170.627.000,00	0,00	0,00
		620.978.705,00	166.409.390,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	470.132.400,00	120.189.564,00	0,00	0,00
		440.137.915,00	111.359.640,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.03	Penyerahan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	50.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.320.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Pendidikan Organisasi	497.207.699,00	0,00	0,00	0,00
		439.937.961,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	83.131.900,00	0,00	0,00	0,00
		74.290.270,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	742.679.000,00	0,00	0,00	0,00
		220.530.637,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	171.456.799,00	0,00	0,00	0,00
		130.100.654,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Peaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.177.414.073,00	0,00	0,00	0,00
		1.370.092.183,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TOK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	580.465.893,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	526.777.305,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.03	Perdokumentasian Tugas Pimpinan	129.153.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	116.146.950,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	707.795.180,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01	Pendataan Administrasi Pemerintahan	727.967.928,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	24.273.112.126,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	21.868.820.712,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	265.426.690,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	258.388.168,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	37.810.390,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	35.438.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	9.721.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	9.287.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	217.894.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	210.651.968,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	23.624.360.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	21.963.803.140,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan ULUD	21.267.224.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	19.028.160.940,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan ULUD	80.499.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	66.430.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2.275.032.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan ULUD	2.269.196.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	383.324.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	246.624.404,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	98.266.736,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.05	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	85.896.704,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.06	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	226.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.07	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	130.764.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.08	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	60.058.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.09	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	29.963.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.10	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	400.448.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.11	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	343.222.596,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.12	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	102.081.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.13	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	92.329.604,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.14	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.15	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	20.414.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	42.082.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.964.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	29.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		29.951.304,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	76.275.900,00	0,00	0,00	0,00
		58.726.246,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	40.625.900,00	0,00	0,00	0,00
		33.002.346,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	32.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.722.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	202.091.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.487.046,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	114.321.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.943.148,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.513.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.680.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.680.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	26.450.440.175,00	131.470.678,00	0,00	0,00
		25.236.611.823,00	131.387.000,00	0,00	0,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.926.415.475,00	131.470.678,00	0,00	0,00
		14.636.991.055,00	131.387.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.811.729.051,00	0,00	0,00	0,00
		11.693.678.523,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.693.678.051,00	0,00	0,00	0,00
		11.570.858.523,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.820.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.124.891.828,00	0,00	0,00	0,00
		1.069.913.978,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.06.01	Penyerahan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Unguran Kantor	31.987.344,00	0,00	0,00	0,00
		32.234.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		123.075.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.488.784,00	0,00	0,00	0,00
		50.474.076,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.166.400,00	0,00	0,00	0,00
		212.730.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Uang Coklatan dan Pungguan	348.642.300,00	0,00	0,00	0,00
		345.344.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	135.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.009.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.09	Ponyulenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.016.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	131.170.679,00	0,00	0,00
		0,00	131.367.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	131.470.678,00	0,00	0,00
		0,00	131.387.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.719.750,00	0,00	0,00	0,00
		134.150.038,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.549.750,00	0,00	0,00	0,00
		68.913.184,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.536.850,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517.600.848,00	0,00	0,00	0,00
		454.479.618,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pergerakan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.200.600,00	0,00	0,00	0,00
		188.570.685,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267.392.300,00	0,00	0,00	0,00
		239.130.033,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.999.946,00	0,00	0,00	0,00
		26.778.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	423.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		423.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	373.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		373.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medica' Check Up DPRD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	832.471.000,00	0,00	0,00	0,00
		831.468.900,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	832.471.000,00	0,00	0,00	0,00
		831.468.900,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.524.024.700,00	0,00	0,00	0,00
		10.601.620.768,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.683.051.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.686.529.127,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	2.620.915.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.615.449.127,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	53.136.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.080.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.679.148.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.589.237.218,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PDAS	513.736.000,00	0,00	0,00	0,00
		513.529.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	709.869.000,00	0,00	0,00	0,00
		621.846.457,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	455.738.000,00	0,00	0,00	0,00
		453.861.461,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	205.544.700,00	0,00	0,00	0,00
		204.503.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	48.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	43.190.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.990.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	33.198.700,00	0,00	0,00	0,00
		32.981.800,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.06	Pengawasan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	61.455.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.821.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.251.451.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.223.037.900,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	894.451.000,00	0,00	0,00	0,00
		866.047.900,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	252.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		252.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	545.345.000,00	0,00	0,00	0,00
		542.340.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Rease	545.345.000,00	0,00	0,00	0,00
		542.340.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06	Facilitasi Tugas DPRD	5.158.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.406.973.223,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06.01	Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.582.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.405.912,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06.04	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	577.085.000,00	0,00	0,00	0,00
		385.587.311,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	65.077.077.020,00	193.244.000,00	1.000.000.000,00	92.778.971.754,00
		62.315.123.334,00	182.800.000,00	150.000.000,00	92.627.871.216,00
5.01	PERENCANAAN	4.585.005.541,00	0,00	0,00	0,00
		4.208.455.964,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.531.849.011,00	0,00	0,00	0,00
		3.359.340.430,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.026.104.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.908.048.511,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.938.864.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.821.279.511,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.740.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.333.553,00	0,00	0,00	0,00
		227.521.457,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.931.636,00	0,00	0,00	0,00
		6.930.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.672.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.559.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.605.925,00	0,00	0,00	0,00
		9.605.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.08.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.485.992,00	0,00	0,00	0,00
		20.346.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.03	Facilitasi Kunjungan Tamu	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.725.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.608.000,00	0,00	0,00	0,00
		147.356.057,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.970.112,00	0,00	0,00	0,00
		49.940.376,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.01	Penyerahan Jasa Surat Menyurat	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.630.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.800.112,00	0,00	0,00	0,00
		28.721.376,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.589.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.440.536,00	0,00	0,00	0,00
		167.819.086,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.724.470,00	0,00	0,00	0,00
		140.857.086,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.716.123,00	0,00	0,00	0,00
		26.962.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	479.048.000,00	0,00	0,00	0,00
		383.709.797,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	406.670.500,00	0,00	0,00	0,00
		340.265.248,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	67.908.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.809.111,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	37.092.800,00	0,00	0,00	0,00
		32.390.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	10.503.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.128.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	61.703.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.484.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.06	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	26.394.800,00	0,00	0,00	0,00
		25.047.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penerapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	202.671.900,00	0,00	0,00	0,00
		108.295.332,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	11.883.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.847.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	11.883.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.847.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	60.494.500,00	0,00	0,00	0,00
		40.587.554,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	19.700.500,00	0,00	0,00	0,00
		14.184.254,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	40.794.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.403.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	574.108.510,00	0,00	0,00	0,00
		469.415.737,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	226.214.500,00	0,00	0,00	0,00
		190.066.362,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, HPJMD dan HKPD)	52.110.500,00	0,00	0,00	0,00
		37.081.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	26.587.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.503.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, HPJMD dan RKPD)	90.015.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.156.362,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	57.502.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.727.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Parakeonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	141.784.940,00	0,00	0,00	0,00
		133.249.203,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.401.400,00	0,00	0,00	0,00
		50.780.254,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	63.579.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.038.144,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.279.040,00	0,00	0,00	0,00
		26.249.095,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17.525.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.193.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	156.109.100,00	0,00	0,00	0,00
		140.098.172,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.425.100,00	0,00	0,00	0,00
		59.646.100,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	26.164.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.705.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.539.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.707.672,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.981.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.038.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02	KEUANGAN	24.070.340.203,00	163.246.000,00	1.000.000.000,00	92.778.971.754,00
		23.128.827.656,00	153.000.000,00	150.000.000,00	92.827.871.216,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.748.154.432,00	163.246.000,00	0,00	0,00
		18.262.735.657,00	153.000.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.094.670.283,00	0,00	0,00	0,00
		17.874.221.805,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.779.190.283,00	0,00	0,00	0,00
		17.562.657.405,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	915.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		311.564.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.545.775,00	163.246.000,00	0,00	0,00
		209.721.532,00	153.000.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Kumpulan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.954.075,00	0,00	0,00	0,00
		4.715.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	58.044.000,00	163.246.000,00	0,00	0,00
		41.210.870,00	153.000.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.877.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.768.730,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.06.06	Penyelesaian Barang Cacakan dan Penggantian	21.850.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.721.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.090.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.820.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.344.037,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor	116.021.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.956.494,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.181.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.039.494,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.840.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.317.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	303.976.974,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253.836.726,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	223.273.450,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.489.726,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.053.524,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.925.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	50.421.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.067.347.050,00	0,00	1.000.000.000,00	92.778.971.754,00
5.02.02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	7.942.433.096,00	0,00	150.000.000,00	92.627.871.218,00
5.02.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.286.783.750,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.092.742.426,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	132.312.150,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	128.200.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	152.548.150,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	134.491.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	49.627.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	48.379.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.01.10	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	44.044.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.01.11	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	33.115.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.01.12	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	302.947.250,00	0,00	0,00	0,00
		294.725.299,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	318.870.150,00	0,00	0,00	0,00
		217.255.527,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan serta Kebijakan Bidang Anggaran	258.835.050,00	0,00	0,00	0,00
		238.575.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	262.812.000,00	0,00	0,00	0,00
		247.670.845,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	19.749.500,00	0,00	0,00	0,00
		16.871.308,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	61.268.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.544.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Usaha/Usaha Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	181.794.500,00	0,00	0,00	0,00
		172.255.137,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	181.195.800,00	0,00	0,00	0,00
		166.364.825,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	237.538.000,00	0,00	0,00	0,00
		233.070.425,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	78.197.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.273.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	89.158.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.900.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	29.879.900,00	0,00	0,00	0,00
		21.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	47.723.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.049.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Lulus Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	38.255.400,00	0,00	1.000.000.000,00	92.778.871.754,00
		38.125.000,00	0,00	150.000.000,00	92.627.871.216,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	38.255.400,00	0,00	0,00	92.778.871.754,00
		38.125.000,00	0,00	0,00	92.627.871.216,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mandat	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	418.321.023,00	0,00	0,00	0,00
		295.521.450,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	418.921.923,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	285.521.450,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	10.807.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	6.217.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	38.758.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahalangan, Purnusnatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	14.895.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10.691.350,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	72.022.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	48.138.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	145.088.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pemetaan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	114.513.350,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Pengujian Pajak Daerah	31.369.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemerciksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	18.289.250,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	124.077.723,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.789.200,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.836.525.798,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.737.637.453,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.036.525.798,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.03		2.737.637.453,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.04		44.228.170,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.05		43.654.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.06		2.507.884.530,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.07		2.427.262.623,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.08		205.742.298,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.09		180.100.630,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.10		78.680.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.11		77.620.290,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.12		35.944.474.576,00	29.490.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.13		34.611.396.032,00	29.800.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.14		34.036.620.216,00	29.998.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.15		33.467.801.213,00	29.800.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.16		34.235.476.154,00	0,00	3,00	0,00
5.03.01.2.02.17		33.090.529.561,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.18		21.730.251.154,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.19		21.008.568.321,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.20		12.505.225.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.21		12.089.961.240,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.22			0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		RÉALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.265.065,00	0,00	0,00	0,00
		195.603.394,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.292.193,00	0,00	0,00	0,00
		5.289.600,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.051.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.047.168,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.479,00	0,00	0,00	0,00
		4.956.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.900.399,00	0,00	0,00	0,00
		19.872.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.06	Facilitasi Kunjungan Tamu	9.785.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.785.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.244.000,00	0,00	0,00	0,00
		127.673.726,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	29.998.000,00	0,00	0,00
		0,00	29.800.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	29.998.000,00	0,00	0,00
		0,00	29.800.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.879.022,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.601.244,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.277.770,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.706.947,00	0,00	0,00	0,00
		137.789.236,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penunjang Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.955.743,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.996.907,00	0,00	0,00	0,00
		29.833.493,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAJAN DAERAH	1.307.854.960,00	0,00	0,00	0,00
		1.143.593.819,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pembaharuan dan Informasi Kepagawajan ASN	200.238.040,00	0,00	0,00	0,00
		170.606.207,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	82.030.400,00	0,00	0,00	0,00
		69.324.457,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.02.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	26.504.300,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.160.505,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	80.894.340,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	82.111.305,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	434.722.400,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	375.619.452,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	230.585.400,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	176.000.300,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	204.137.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	194.529.152,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	381.340.100,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.19	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	360.802.090,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	305.360.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	291.150.990,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	45.575.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	49.025.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30.399.100,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Percobaan Pegawai	26.626.100,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	291.553.820,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	230.578.010,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	56.417.100,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	55.592.880,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	43.722.868,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	99.349.520,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	90.498.039,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	45.059.520,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	28.204.505,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	35.135.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	14.112.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	300.955.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	279.955.821,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	300.955.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Unggulan	279.955.821,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelambagaan, Tenaga Peningkat Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	300.955.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	279.955.821,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	83.301.200,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	57.029.629,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	83.301.200,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	57.029.629,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.02.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	26.271.571,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	27.136.200,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	47.859.700,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kolaborasi	29.893.429,00	0,00	0,00	0,00
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	36.984.900,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	21.077.829,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	10.893.810,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	9.815.800,00	0,00	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	42.091.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT	31.459.232,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.091.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.459.232,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.091.500,00	0,00	0,00	0,00
		31.459.232,00	0,00	0,00	0,00
		4.912.800.045,00	13.320.000,00	0,00	0,00
		4.426.307.561,00	12.950.000,00	0,00	0,00
		4.902.810.045,00	13.320.000,00	0,00	0,00
		4.426.307.561,00	12.950.000,00	0,00	0,00
		4.017.525.245,00	13.320.000,00	0,00	0,00
		3.542.344.861,00	12.950.000,00	0,00	0,00
		3.432.430.016,00	0,00	0,00	0,00
		2.959.729.310,00	0,00	0,00	0,00
		3.347.439.046,00	0,00	0,00	0,00
		2.891.629.310,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.02.02	Penyerahan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.100.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	100.606.800,00	0,00	0,00	0,00
		109.830.606,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.371.800,00	0,00	0,00	0,00
		140.135.180,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.235.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.690.116,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.569.993,00	0,00	0,00	0,00
		187.354.517,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ungkuran Kantor	4.980.751,00	0,00	0,00	0,00
		4.986.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.975.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.962.984,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.242,00	0,00	0,00	0,00
		4.955.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.135.200,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.123.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.326.000,00	0,00	0,00	0,00
		124.192.333,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	13.320.000,00	0,00	0,00
		0,00	12.950.800,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	13.320.000,00	0,00	0,00
		0,00	12.950.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.953.500,00	0,00	0,00	0,00
		26.798.100,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.543.500,00	0,00	0,00	0,00
		16.413.100,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.485.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.955.906,00	0,00	0,00	0,00
		168.629.329,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.956.180,00	0,00	0,00	0,00
		138.637.328,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.999.726,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	29.999.726,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	774.713.800,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	774.259.900,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	668.813.800,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	668.477.300,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan	36.260.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Dana	36.130.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APID	265.328.800,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	265.310.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.01	Penhanganan Penyelesaian Ketugan Negara/Daerah	173.110.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	173.176.200,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	20.425.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	20.379.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	75.220.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.02	Pendampingan dan Asistensi	75.174.700,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.03	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	98.400.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Holistik/Birokrasi	98.301.800,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.02		105.782.600,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.03		19.995.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.995.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.905.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.787.600,00	0,00	0,00	0,00
		110.361.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.782.800,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.744.400,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.744.400,00	0,00	0,00	0,00
		80.361.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.038.400,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.776.400,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.976.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.361.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.286.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
/	UNSUR KEWILAYAHAN	19.149.565.737,00	596.972.704,00	0,00	0,00
7.01	KECAMATAN	18.626.765.210,00	535.131.872,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.149.565.737,00	536.872.704,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Adminislrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.828.765.210,00	505.131.872,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Adminislrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.600.435.350,00	491.548.529,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Adminislrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.221.912.343,00	489.803.647,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Adminislrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.944.242.133,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Adminislrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.644.939.293,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.599.082.133,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.301.519.293,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.160.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.820.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.041.315.970,00	40.597.730,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	993.806.282,00	40.597.730,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.072.651,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.054.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.886.400,00	40.597.730,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.462.573,00	40.597.730,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.556.299,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.483.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.08	fasilitasi Kunjungan Luar	79.310.820,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.08	fasilitasi Kunjungan Luar	79.293.979,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.415.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.876.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	762.065.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	735.618.330,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.630.000,00	78.240.632,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.093.000,00	77.867.717,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.930.000,00	29.624.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.896.000,00	29.560.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.700.000,00	48.621.892,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.930.000,00	48.107.717,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.604.438,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.762.007,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.260.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.260.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.694.558,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.757.587,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	44.739.910,00	0,00	0,00	0,00
		43.748.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.552.779,00	372.890.907,00	0,00	0,00
		459.482.761,00	371.508.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.069.511,00	0,00	0,00	0,00
		142.545.401,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.389.206,00	0,00	0,00	0,00
		295.099.060,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.292.250,00	174.555.707,00	0,00	0,00
		28.318.000,00	174.075.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.020.000,00	197.800.000,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	197.264.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.502.722,00	264.200,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	260.000,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	162.722.300,00	37.693.375,00	0,00	0,00
		138.536.076,00	37.611.375,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	162.722.300,00	37.693.375,00	0,00	0,00
		138.536.076,00	37.611.375,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	162.722.300,00	37.693.375,00	0,00	0,00
		138.536.076,00	37.611.375,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	823.578.401,00	0,00	0,00	0,00
		804.702.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	823.578.401,00	0,00	0,00	0,00
		804.702.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.311.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	823.578.401,00	0,00	0,00	0,00
		800.391.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	88.758.118,00	0,00	0,00	0,00
		73.145.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kelermban Umum	88.758.118,00	0,00	0,00	0,00
		73.145.200,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86.758.118,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	73.145.260,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Pendayagunaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.224.002.578,00	7.732.800,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persaluan dan Kesatuan Bangsa	2.157.229.791,00	7.717.050,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.03.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.224.002.578,00	7.732.800,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.03.01.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	2.157.229.791,00	7.717.050,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.03.01.01.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	911.180.085,00	7.732.800,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.03.01.01.01.01.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	909.491.323,00	7.717.050,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.03.01.01.01.01.01.01.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	758.145.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	719.941.816,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	554.670.583,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	627.706.552,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	245.068.990,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	231.209.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	245.068.990,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01.01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	231.239.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01.01.01	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01.01.01.01	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.425.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01.01.01.01.01	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	67.130.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01.01.01.01.01.01	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	58.915.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01.01.01.01.01.01.01	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	63.202.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	61.380.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	104.216.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	102.617.700,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	14.348.102.156,00	56.696.000,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.071.461.570,00	56.310.000,00	0,00	0,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.348.102.156,00	56.696.000,00	0,00	0,00
8.01.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.071.461.570,00	56.310.000,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.704.188.512,00	56.696.000,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.608.741.125,00	56.310.000,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.379.803.932,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.335.295.568,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.01.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.300.653.932,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.01.01.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.289.755.568,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79.210.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75.540.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.517.580,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.01	Penyediaan: Kurponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	164.007.010,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.511.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Uang Cetak dan Penggandaan	39.828.397,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Uang Cetak dan Penggandaan	4.201.580,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Uang Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.08	Penyediaan Uang Cetak dan Penggandaan	20.650.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.09	Penyediaan Uang Cetak dan Penggandaan	20.638.313,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.10	Penyediaan Uang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.11	Penyediaan Uang Cetak dan Penggandaan	7.897.800,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.12	Penyediaan Uang Cetak dan Penggandaan	116.058.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.683.100,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.200.000,00	56.696.300,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	56.810.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	56.696.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	56.810.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.215.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.750.118,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.205.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.960.118,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.784.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.400.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.783.831,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.400.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	71.703.831,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	833.224.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	808.175.486,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.01.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	833.224.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.01.01.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	808.175.486,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kehangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	833.224.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLTIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100.175.486,00	0,00	0,00	0,00
		11.163.191.644,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik	11.149.512.211,00	0,00	0,00	0,00
		11.163.191.644,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	11.149.512.211,00	0,00	0,00	0,00
		11.163.191.644,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERJAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.915.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.915.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Peningkatan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.915.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	79.186.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.929.662,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	79.186.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.929.662,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	79.186.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.929.662,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	558.434.000,00	0,00	0,00	0,00
		401.188.086,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	558.434.000,00	0,00	0,00	0,00
		401.188.086,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
II.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemonitauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Keterbukaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	558.434.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	481.188.086,00	0,00	0,00	0,00
		890.532.104.284,00	148.875.544.589,00	1.000.000.000,00	92.778.971.754,00
		845.554.117.010,28	139.713.064.438,00	150.000.000,00	92.627.871.210,00

Padang, Ayo, 29 Juli 2024

BUPATI
KAMUNAS




LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	92.756.109.943,27	109.103.439.557,94
2	Pengurangan SAL sebagai Pemeliharaan Pembayaran Tahun Berjalan	92.755.029.657,27	109.137.056.386,94
3	Sub Total (1 - 2)	80.286,00	(33.619.829,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembayaran Anggaran (SILPA/SIKPA)	53.999.776.184,78	92.755.158.843,27
5	Sub Total (3 + 4)	53.999.856.470,78	92.721.450.114,27
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	33.058.324,00
7	Lain-lain	(80.286,00)	591.505,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	53.999.776.184,78	92.755.109.643,27

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Padang Aro, 29 Juli 2024
 BUPATI SOLOK SELATAN

 KHARUNAS

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	SALDO 2023	SALDO 2022	REVISI PERMINTAAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO					
3	Pencapaian Pajak Daerah - LO	54.1.A.1	12.788.218.584,00	12.512.960.774,10	276.365.809,90	2,20
4	Pencapaian Retribusi Daerah -LO	54.1.A.2	2.110.591.022,70	2.206.416.790,00	(95.825.767,30)	(4,52)
5	Pencapaian Hasil Pengeblauan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	54.1.A.3	2.796.556.717,00	2.415.762.950,00	380.793.767,00	15,76
6	Sarana PAD Yang Sah - LO	54.1.A.4	71.217.891.077,38	76.690.428.978,04	(5.472.537.900,71)	(7,16)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO						
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO					
9	Dana Bagi Hasil: Pajak - LO	54.1.B.1.A	36.126.624.195,00	51.890.240.949,00	(15.864.716.754,00)	(30,61)
10	Dana Bagi Hasil: Sumber Daya Alam - LO	54.1.B.1.B	25.596.972.087,00	23.754.276.171,00	1.842.696.216,00	7,76
11	Dana Alokasi Umum - LO	54.1.B.1.C	452.753.733.000,00	436.897.960.562,00	15.855.824.438,00	3,63
12	Dana Alokasi Khusus - LO	54.1.B.1.C	148.651.640.599,00	163.703.080.880,00	(17.051.440.481,00)	(10,42)
13	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		661.128.022.881,00	676.345.758.562,00	(15.217.735.881,00)	(2,25)
14	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO					
15	Dana Penyesuaian - LO	54.1.B.2.A	0,00	0,00	-	-
16	Dana WISM - LO	54.1.B.2.B	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi - LO					
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.1.B.3	51.597.573.006,00	51.465.719.839,00	131.853.167,00	0,26
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	54.1.B.3	7.000.000.000,00	11.500.000.000,00	(4.500.000.000,00)	(39,13)

NO	URAIAN	REF	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO		58.597.573.006,00	62.965.719.839,00	(4.368.146.833,00)	(6,94)
Jumlah Pendapatan LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO			118.29.595.687,00	139.31.425.461,00	(21.018.873.744,00)	(15,85)
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO					
25	Pendapatan Hibah - LO	54.1.C.1	5.895.892.270,00	53.844.974.132,00	(47.949.081.862,00)	(89,05)
26	Pendapatan Dana Darurat - LO	54.1.C.2	3,00	0,00	0,00	0,00
27	Pendapatan Lainnya - LO	54.1.C.3	10.214.879.423,00	7.892.677.406,00	2.322.202.017,00	29,42
Jumlah Pendapatan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO			(10.214.879.423,00)	(7.892.677.406,00)	(2.322.202.017,00)	(23,40)
28	JUMLAH PENDAPATAN - LO		824.749.562.781,03	894.874.584.431,14	(70.125.021.650,11)	(7,84)
29	BEBAN					
30	Beban Pegawai - LO	54.2.A	273.003.820.339,44	390.297.198.582,04	(1.293.376.362,60)	(10,34)
31	Beban Persediaan	54.2.B	97.695.937.920,46	92.071.298.264,75	15.624.639.655,71	19,04
32	Beban Jasa	54.2.C	104.565.115.711,00	25.078.391.312,52	18.786.734.398,48	23,26
33	Beban Pemeliharaan	54.2.D	2.471.487.437,00	5.866.751.757,00	(4.395.264.320,00)	(54,01)
34	Beban Perjalanan Dinas	54.2.E	35.500.721.399,00	41.087.206.641,00	(5.586.485.242,00)	(13,60)
35	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Hibah	54.2.F	27.774.142.546,00	5.385.18.904,00	21.408.925.642,00	365,61
38	Beban Bantuan Sosial	54.2.G	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Penyusutan dan Amortisasi	54.2.H	167.447.009.682,39	137.472.887.485,09	29.974.112.217,30	21,80
40	Beban Penyelidikan Piliang	54.2.I	4.998.679.683,06	799.037.113,85	4.199.642.569,20	526,58
41	Beban Transfer	54.2.J	50.819.283.214,00	49.467.550.012,00	1.151.683.201,00	2,33
42	Beban Lain-lain	54.2.K	3.085.333.835,00	4.592.976.904,72	(1.507.643.069,72)	(32,82)
43	JUMLAH BEBAN		873.461.391.766,34	793.698.394.937,27	79.762.996.829,07	10,05
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			(687.711.829.985,31)	(607.825.874.496,13)	(79.885.955.489,18)	(13,15)
45	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
46	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		178.836.273,00	0,00	178.836.273,00	0,00
47	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	54.3	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	54.3	0,00	10.509.237.485,00	(10.509.237.485,00)	0,00

NO	URAIAN	REF	SALDO 2023	SALDO 2022	KEMAKLUM (PEMURUAN)	(%)
52	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	178.838.273,00	(10.809.237.485,00)	10.986.073.758,00	(101,64)
53	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(28.634.992.712,31)	90.568.952.608,82	(138.904.944.721,18)	(153,71)
54	POS LUAR BIASA					
55	Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Akuan Luar Biasa	5.4.5	150.000.000,00	940.000.000,00	(890.000.000,00)	(92,14)
57	POS LUAR BIASA		(150.000.000,00)	(940.000.000,00)	690.000.000,00	(82,14)
58	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.5	(28.634.992.712,31)	89.528.952.608,82	(138.904.944.721,18)	(154,38)

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Padang Aro, 29 Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN
KHAIRUNNAS



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
	EKUITAS AWAL		
2	SURPLUS/DEFISI-LO	2.024.726.747.023,88	1.919.864.279.152,90
3	DAWPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBILAKAN/KESALAHAN MENDASARI	(49.884.992.712,31)	88.526.952.008,867
4	a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	(139.522.600,00)	19.545.019.882,71
5	b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(1.211.347.507,00)	19.503.006.229,71
6	EKUITAS AKHIR	1.874.690.884.204,57	2.024.726.747.023,89

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Padang, Ate, 29 Juli 2024
 BUPATI SOLOK SELATAN

 KHARUNAS

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATENEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NERACA
 PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2023	2022
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.A.1	37.745.553.063,89	79.143.345.993,74
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.A.2	17.499.253,00	37.220.678,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.A.3	722.384,00	167.208.566,69
6	Kas di BLUD	5.3.1.A.4	11.133.995.004,62	12.193.379.820,62
7	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	5.3.1.A.5	1.765.637.607,27	549.090.169,22
8	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.A.6	162.074.745,00	701.982.844,00
9	Kas di Bendahara BOK	5.3.1.A.7	3.211.990.456,00	0,00
10	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.B.1	13.223.511.675,00	18.018.014.963,00
11	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(8.629.250.289,09)	(10.381.931.529,09)
12	Piutang Pajak Daerah Netto		4.594.261.385,91	7.636.083.433,91
13	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.B.2	2.062.825.350,00	1.970.109.750,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi		(1.756.281.888,00)	(1.926.103.288,00)
15	Piutang Retribusi Daerah Netto		306.543.462,00	4.006.462,00
16	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	5.3.1.B.3	28.342.289,41	30.242.352.052,38
17	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(24.344.768.040,34)	(24.556.779.579,29)
18	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto		3.997.521.379,28	5.685.572.453,09
19	Piutang Transfer Pemerintahan Daerah Lainnya	5.3.1.B.4	16.107.026.723,00	3.534.765.320,00
20	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintahan Daerah Lainnya		0,00	0,00
21	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto		16.107.026.723,00	3.534.765.320,00
22	Piutang Lainnya		358.014.900,00	155.055.500,00
23	Penyisihan Piutang Lainnya		(1.790.074,50)	(775.277,50)

NO	URSAH	REF		2023	2022
24	Piutang Lainnya Netto			356.224.825,50	154.280.222,50
31	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.C		130.959.419,00	380.518.319,00
32	Persediaan	5.3.1.D		21.474.166.507,74	27.293.655.844,90
33	JUMLAH ASET LANCAR			101.004.176.216,21	137.521.110.127,67
34	INVESTASI JANGKA PANJANG				
35	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			0,00	0,00
36	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen			0,00	0,00
37	Investasi Jangka Panjang Permanen			0,00	0,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2		59.780.251.630,24	58.874.415.357,24
39	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen			59.780.251.630,24	58.874.415.357,24
40	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG			59.780.251.630,24	58.874.415.357,24
41	ASET TETAP				
42	Tanah	5.3.3.1		366.834.744.609,00	366.709.927.859,00
43	Peralatan dan Mesin	5.3.3.2		369.488.477.246,99	343.963.123.810,99
44	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3		792.050.970.350,20	757.522.080.597,20
45	Jalan, Jrgasi, dan Jaringan	5.3.3.4		1.484.235.103.721,04	1.410.782.448.374,04
46	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5		51.398.770.995,04	46.007.519.047,04
47	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6		68.596.957.759,00	67.015.563.293,00
48	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.3.7		(1.315.682.238.253,88)	(1.150.700.964.067,79)
49	JUMLAH ASET TETAP			1.614.922.736.427,59	1.841.299.696.913,48
50	DANA CADANGAN				
51	Dana Cadangan			0,00	0,00
52	JUMLAH DANA CADANGAN			0,00	0,00
53	ASET LAINNYA				
54	Aset Tidak Berwujud	5.3.4.1		1.540.963.875,00	1.458.943.875,00
55	Amortisasi Aset Tak Berwujud			(973.215.033,50)	(856.628.646,00)
56	Aset Tidak Berwujud Setelah Amortisasi			567.748.841,50	602.315.229,00
57	Aset Lain-lain	5.3.4.2		27.427.296.606,24	27.677.715.899,24
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			(23.408.342.125,24)	(23.310.222.672,24)
59	Aset Lain-lain Setelah Penyusutan			4.018.954.481,00	4.367.493.227,00
60	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.4.3		13.238.462.000,00	5.364.179.953,00
61	JUMLAH ASET LAINNYA			17.825.165.322,50	10.333.988.409,00
62	JUMLAH ASET			1.993.582.329.596,51	2.049.029.212.503,39
63	KEWAJIBAN				

NO	URAIAN	REF	2023		2022	
64	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
65	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.5.A.2	31.214.835,00	44.512.023,00		
66	Uang Bahan	5.3.5.A.3	18.772.533.227,97	23.220.835.631,51		
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.5.A.4	37.697.329,00	37.118.129,00		
68	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		18.841.445.391,97	23.302.465.783,51		
69	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.5.B				
70	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00		
71	JUMLAH KEWAJIBAN		18.841.445.391,97	23.302.465.783,51		
72	EKUITAS					
73	EKUITAS	5.3.6	1.974.690.884.204,57	2.024.726.747.023,88		
74	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.993.532.329.596,54	2.049.059.212.807,39		

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
 (Metode Langsung)

(AUDITED) (Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023		2022	
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
2	Arus Masuk Kas				
3	Penerimaan Pajak Daerah	11.176.289.595,00		11.008.714.870,10	
4	Penerimaan Retribusi Daerah	2.000.090.422,70		2.354.215.128,00	
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.796.556.717,00		2.415.752.950,00	
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	72.881.598.227,09		74.584.228.098,00	
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	26.898.998.917,00		51.482.886.775,00	
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumbah Daya Alam	27.148.316.318,00		18.897.850.392,00	
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	452.753.785.000,00		438.997.960.562,00	
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	146.651.840.399,00		163.261.780.880,00	
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00		0,00	
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00		0,00	
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	39.025.911.603,00		69.572.147.978,00	
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7.000.000.000,00		11.500.000.000,00	
15	Penerimaan Hibah	0,00		0,00	
16	Penerimaan Dana Darurat	0,00		0,00	
17	Penerimaan Lainnya	10.011.920.028,00		7.828.208.196,00	
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Daerah	0,00		0,00	
19	Jumlah Arus Kas Masuk Kas	798.145.513.191,79		839.801.556.539,10	
20	Arus Keluar Kas				
21	Pembayaran Pegawai				
22	Pembayaran Barang	375.400.727.878,95		375.198.145.727,83	
23	Pembayaran Bunga	249.419.979.158,53		224.250.550.259,27	
24	Pembayaran Subsidi	0,00		0,00	
25	Pembayaran Hibah	0,00		0,00	
26	Pembayaran Bantuan Sosial	20.733.409.378,00		3.566.998.404,00	
27	Pembayaran Tak Terduga	0,00		0,00	
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	160.000.000,00		3.061.054.001,00	
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.188.858.363,00		923.276.367,00	
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	240.750.833,00		171.747.812,00	
31	Pembayaran Transfer bantuan Keuangan ke Desa	0,00		0,00	
32	Jumlah Arus Keluar Kas	49.346.027.000,00		48.201.063.500,00	
		696.479.753.226,28		655.371.333.571,10	
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	10.989.533.265,51		14.480.222.989,00	

NO	URAIAN	2025		2022	
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
35	Arus Masuk Kas				
36	Pencairan Dana Cadangan		0,00		0,00
37	Penjualan Aas tanah		0,00		0,00
38	Penjualan Aas Peralatan dan Mesin		21.030.000,00		1.735.201.100,00
39	Penjualan Aas Gedung dan Bangunan		0,00		0,00
40	Penjualan Aas Jalan, Jigasi dan Jaringan		0,00		0,00
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00		0,00
42	Penjualan Aset Lainnya		0,00		24.925.000,00
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00		0,00
44	Perolehan Penjualan Investasi Non Pemerintah		0,00		0,00
45	Perolehan Kembali Investasi Non Perumahan		0,00		0,00
46	Jumlah Arus Masuk Kas		21.050.000,00		1.760.126.100,00
47	Arus Keluar Kas				
48	Perberatkan Dana Cadangan		0,00		0,00
49	Perolehan Tanah		19.108.000,00		11.111.952.077,00
50	Perolehan Peralatar dan Mesin		26.339.182.891,00		31.337.498.905,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan		33.431.528.257,00		69.283.571.663,08
52	Perolehan Jalan, Jigasi dan Jaringan		77.154.111.140,00		89.128.225.638,59
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.769.134.050,00		1.205.948.175,00
54	Perolehan Aset Lainnya		0,00		0,00
55	Pengyertaan Modal Pemerintah Daerah:		729.000.000,00		500.000.000,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Perumahan		0,00		0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas		140.442.064.438,00		202.572.297.511,67
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		1.598.535.562,00		1.598.535.562,00
59	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
60	Arus Masuk Kas				
61	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Pusat:		0,00		0,00
62	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00		0,00
63	Pinjaman dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00		0,00
64	Pinjaman dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00		0,00
65	Pinjaman dalam Negeri - Obligasi		0,00		0,00
66	Pinjaman dalam Negeri - Lainnya		0,00		0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00		0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00		0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah daerah Lainnya		0,00		0,00
70	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00		0,00
71	Arus Keluar Kas				
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00		0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00		0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00		0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00		0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00		0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00		0,00
78	Pembelian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00		0,00
79	Pembelian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00		0,00
80	Pembelian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00		0,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00		0,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00		0,00

NO	URAIAN	2023	2022
83	Arus kas dari Aktivitas Transitoris		
84	Arus Masuk Kas		
85	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	45.638.664.462,00	55.872.597.374,54
86	Penerimaan Sisa Lebih Salur BOS	0,00	0,00
87	Penerimaan Jasa Giro BOS Swasta Yang Harus Dikembalikan	0,00	2.868.179,00
88	Penerimaan Jasa Giro Pemerintah Nagari dan Entitas Lain Yang Harus Dikembalikan	579.200,00	34.261.860,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas	45.639.263.652,00	55.709.715.503,54
90	Arus Keluar Kas		
91	Pengeluaran Perhitungar Pihak Ketiga (PFK)	45.638.664.462,00	55.851.657.644,54
92	Pengeluaran Sisa Lebih Salur BOS	0,00	32.013.696,00
93	Pengeluaran Jasa Giro BOS Yang Harus Dikembalikan	0,00	0,00
94	Pengeluaran Kelebihan Pembayaran BOS Yang Harus Dikembalikan	0,00	0,00
95	Jumlah Arus Keluar Kas	45.638.664.462,00	55.883.671.277,54
96	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	579.200,00	(173.955.774,00)
95	Koreksi Peninjauan Kas	(38.754.675.272,49)	(16.555.904.277,83)
96	Saldo Awal Kas di Kasda	79.143.345.993,74	106.618.873.069,00
97	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	187.208.566,69	13.741.405,00
98	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	37.220.678,00	30.456.756,00
98	Saldo Awal Kas BLUD	12.193.379.820,62	1.906.618.457,94
98	Saldo Awal Kas JKN	549.090.169,22	0,00
100	Saldo Awal Bendahara BOS	701.982.844,00	495.668.011,00
101	Saldo Awal Kas Bendahara BPBD	0,00	38.080.865,00
102	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Selera Kas	0,00	211.073.903,00
103	Saldo Awal Kas BUD (95 sd 102)	92.792.228.072,27	109.314.512.460,94
104	Saldo Akhir Kas di BUD Sebelum Koreksi Saldo Awal (95--103)	54.037.582.799,78	92.758.608.243,27
105	Koreksi Saldo Awal	(80.286,00)	33.619.829,00
106	Saldo Akhir Kas di BUD (104+105)	54.037.472.513,78	92.792.228.072,27
107	Saldo Akhir Kas di Kasda	37.745.553.063,89	79.143.345.993,74
109	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	3.212.712.840,00	187.208.566,69
109	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	17.499.253,00	37.220.678,00
110	Saldo Akhir Kas di BLUD	11.133.995.004,62	12.193.379.820,62
107	Saldo Akhir Kas di JKN	1.785.637.607,27	549.090.169,22
111	Saldo Akhir Kas Bendahara BOS	182.074.745,00	701.982.844,00
112	Saldo Akhir Kas Bendahara BPBD	0,00	0,00
113	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Selera Kas	0,00	0,00
114	Saldo Akhir Kas	54.037.472.513,78	92.792.228.072,27

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan





LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan dan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dimulainya regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyusunan perangkat pengelolaan keuangan daerah, untuk menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Hal ini tidak terbatas pada penuktahiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan perubahan system dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan dan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan bawahi dari basis kas, basis kas memuji akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Pada tahun 2014, Kabupaten Solok Selatan telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2015, Kabupaten Solok Selatan mengawali penerapannya pada tahun 2015. Serangkaian kebijakan



implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi untuk mengakomodir praktik akuntansi berbasis aktual. SAPD adalah merupakan pedoman perlu: penerapan basis aktual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 telah dilakukan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah ini kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis aktual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mata entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

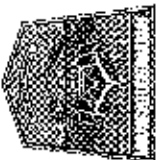
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digambarkan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketertarikan terhadap peraturan-undangan-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah memandani seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana

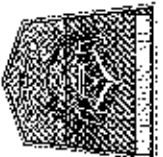


cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas cara dan arus kas Pemerintah Kabupaten Solok selama.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Penentuan Kabupaten Diampasaya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud;
23. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kebijakan Masa Manfaat dan Penyusutan Aset Tetap Kabupaten Solok Selatan;
24. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Solok Selatan;
25. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
26. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
27. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

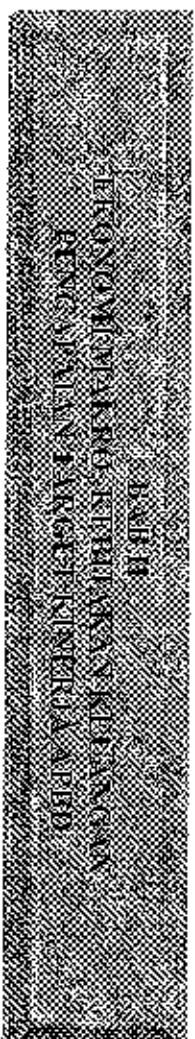
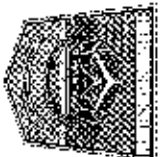
1.3 Sistematisa Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematisa penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

- BAB I** Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematisa Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II** Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III** Uktisair Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Uktisair Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV** Kebijakan Akuntansi;
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- BAB V** Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan – LRA
 - 5.1.2. Belanja



	5.1.3	Surplus/defisit-LRA
	5.1.4	Pembiayaan
	5.1.5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
	5.2	LPSAL
	5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal
	5.2.2	Penggunaan Saldo Awal Lebih
	5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
	5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembulatan tahun sebelumnya
	5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir
	5.3	Neraca
	5.3.1	Aset Lancar
	5.3.2	Investasi Jangka Panjang
	5.3.3	Aset Tetap
	5.3.4	Aset Lainnya
	5.3.5	Kewajiban
	5.3.6	Ekuitas Dana
	5.4	Laporan Operasional
	5.4.1	Pendapatan-LO
	5.4.2	Beban
	5.4.3	Surplus/defisit-LO
	5.5	Laporan Arus Kas
	5.5.1	Arus Kas ca ri Aktifitas Operasi
	5.5.2	Arus Kas dari Aktifitas Investasi
	5.5.3	Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
	5.5.4	Arus Kas dari Aktifitas Transitoris
	5.5.5	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas
	5.5.6	Saldo Awal Kas di B/L/D
	5.5.7	Saldo Akhir Kas di B/L/D
	5.5.8	Saldo Akhir Kas
	5.6	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.6.1	Ekuitas awal
	5.6.2	Surplus/Defisit-LO
	5.6.3	Koreksi-koreksi
	5.6.4	Ekuitas Akhir
BAB	VI	Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
	6.1	Domisili dan Operasional Entitas
	6.2	Penetapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03
BAB	VII	Penutup



2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional

1. Kondisi Topografi

Kabupaten Solok Selatan yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan memiliki bentang alam yang sebagian besar berbukit-bukit. Rata-rata pemukiman penduduk berada pada ketinggian 300-950 meter di atas permukaan laut, dengan topografi (bentang alam) bervariasi antara dataran lembah bergerombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang memujur dari Utara ke Selatan di sepanjang Pantai Barat Sumatera. Klasifikasi lerengnya, sebagian besar lerengnya curam (886,00 Km²) dan yang sangat curam (482,11 Km²) Kadaan ini memberi implikasi bahwa sebagian besar wilayah rawan terhadap bahaya longsor.

Tabel 2.1
Klasifikasi lereng wilayah Kabupaten Solok Selatan

No	Klasifikasi lereng	Lereng (%)	Luas (Km ²)
1	Datar, Agak Landai	0 - 8	782,12
2	Landai	8 - 15	530,68
3	Agak Curam	15 - 25	638,32
4	Curam	25 - 40	985,17
5	Sangat Curam	> 40	480,11
Total			3.294,39

Sumber : Hasil Olahan Peta Kontur RBI 1:50.000 Tahun 2017

Peta Kelas Lereng Kabupaten Solok Selatan





2. Gambaran Umum Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 168.411 jiwa pada tahun 2018 menjadi 184.854 jiwa pada tahun 2022. Dilihat dari jenis pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan cukup berfuktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2020 yaitu 6,40% dan yang terendah pada tahun 2021 yaitu 1,55%. Sedangkan: untuk jenis kelamin (sex ratio) atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Solok Selatan selama kurun waktu tahun 2018-2022, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, hal ini dapat dilihat dari Rasio jenis kelamin penduduk Solok Selatan diatas 100%.

Tabel 2.2
 Jumlah dan Kepadatan Penduduk
 Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018-2022

Jenis Kelamin	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)
Jumlah Penduduk (jiwa)	168.411		171.075		182.027		184.854		188.649	
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	51,1		51,9		55,3		56,1		57,26	
Jumlah keluarga	40.480		40.876		43.297		44.199		45.070	
Rata-rata jumlah anggota Keluarga	4,16		4,18		4,20		4,18		4,18	
Pertumbuhan penduduk (%)	1,70		1,58		6,40		1,55		2,05	
Sex ratio (%)	101,98		107,74		103,59		104,21		104,28	

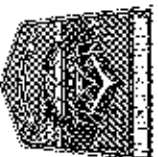
Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Tingkat kepadatan penduduk tahun 2021 berdasarkan luas wilayah adalah 56,11 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu (113,60 jiwa/km²), menyusul Kecamatan Sanggru (80,49 jiwa/km²), Pauh Duo (73,65 jiwa/km²), Koto Parik Gadang Diatch (69,69 jiwa/km²), Sanggru Jujuan (43,01 jiwa/km²), Kecamatan Sanggru Balai Janggo (37,01 jiwa/km²) dan Sanggru Bataang Hari (20,69 jiwa/km²).

Tabel 2.3
 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk
 per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Penduduk			Sex ratio (%)	Kepadatan jiwa/km ²
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Sanggru	26.629	25.532	52.161	104,30	80,49
2	Sungai Pagu	16.570	16.578	33.148	88,95	113,60
3	Koto Parik Gadang Diatch	14.921	14.387	29.308	103,77	69,69
4	Sanggru Jujuan	7.487	7.057	14.524	105,81	43,01
5	Sanggru Batang Hari	8.486	8.029	16.525	105,82	20,69
6	Pauh Duo	9.843	9.597	19.440	102,58	73,65
7	Sanggru Balai Janggo	10.408	9.340	19.748	111,43	37,01
	Jumlah	94.334	90.520	184.854	104,21	56,11

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)



Ditinjau dari klasifikasi kepadatan penduduk, Kabupaten Solok Selatan tergolong daerah yang berpenduduk kurang padat (Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk, yaitu: tidak padat dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/Km², kurang padat antara 51-250 jiwa/Km², cukup padat 251-400 jiwa/Km², dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/Km²).

Sebaran penduduk menurut kelompok usia (umur) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021 dapat digambarkan Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk yang produktif dan non produktif Kabupaten Solok Selatan sebesar 52,40%, ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 52-53 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki	Pria	Wanita
0-4	1.8216	7.880	16.106
5-9	7.819	7.385	15.204
10-14	8.280	7.772	16.052
15-19	9.739	8.269	17.008
20-24	5.819	8.028	18.847
25-29	7.796	7.436	15.232
30-34	7.788	7.729	15.517
35-39	7.378	7.109	14.487
40-44	6.869	6.554	13.423
45-49	5.883	5.634	11.517
50-54	4.987	4.686	9.652
55-59	3.828	3.781	7.607
60-64	2.937	3.044	6.981
65-69	2.246	2.255	4.471
70-74	1.480	1.477	2.957
75+	1.271	1.522	2.793
Jumlah	94.334	80.520	184.854

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diamati melalui beberapa indikator makro salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten Solok Selatan merupakan jumlah dari seluruh nilai tambah dari produk barang dan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Solok Selatan. Besaran nilai PDRB ini merupakan indikator yang dapat dijadikan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan.

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Solok Selatan secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan indikator-indikator lain yang terkait sebagai mana yang tergambar pada Tabel 2.5.



Tabel 2.5
Nilai PDRB Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2017-2021

Indikator	Realisasi			
	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,03	4,89	4,22
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	4.888.871,25	5.302.502,22	5.571.732,28	5.528.507,31
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	3.612.139,52	3.736.200,14	3.877.409,14	3.828.031,94
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Miliar)	30,14	30,97	32,58	30,37
Persentase Penduduk Miskin	7,07	7,38	7,15	7,52
Indeks Gini	0,308	0,295	0,307	0,277
Tingkat Pengangguran	5,85	4,01	5,92	4,84
				3,71

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika dilihat dari perkembangan PDRB Kabupaten Solok Selatan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu tahun 2017-2021 meningkat tiap tahun, yaitu dari Rp 4.893.871,25 juta (ADHB) dan Rp. 3.612.139,52 juta (ADHK) pada tahun 2017 menjadi Rp 5.777.977,93 juta (ADHB) dan Rp. 4.059.514,72 juta (ADHK) pada tahun 2021. Selama periode 2017-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan sebesar 4,89 persen dan terus mengalami perlambatan sampai tahun 2020 menjadi 4,22 persen. Namun pada tahun 2021 seiring dengan puluhnya kondisi masyarakat dari pandemic covid 19 yang sudah tidak lagi membatasi masyarakat ke aktifitas ekonomi PDRB Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan menjadi Rp. 5.777.977,93,- juta (ADHB) dan Rp. 4.059.514,72 juta (ADHK).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan dominasi sektor-sektor pembentuk ekonomi. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah. Dari sini terlihat perkembangan PDRB dapat dihitung melalui 2 pendekatan yaitu Atas Dasar harga Berlaku yang menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan Atas Dasar Harga Konstan yang menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar (tahun 2010).

Jika dilihat perkembangan dan peningkatan PDRB Kabupaten Solok Selatan baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berturut-turut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan ini diikuti oleh perlambatan pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meskipun pada periode tahun 2017-2019 secara jumlah terus mengalami peningkatan dari Rp. 4.893.870,69- juta pada tahun 2017 menjadi Rp 5.571.732,28 juta pada tahun 2019, namun jika dilihat dari pertumbuhannya terus mengalami penurunan yaitu dari 6,54% menjadi 5,08. Hal ini juga terjadi pada Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga mengalami peningkatan dari Rp. 3.612.139,52



juta pada tahun 2017 menjadi Rp. 3.977.409,14 juta pada tahun 2019, dengan tingkat pertumbuhan dari 5,18% menjadi 4,80%. Penurunan ini terjadi seiring dengan perambatan dari pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang ditimngi oleh penurunan harga beberapa komoditi unggulan daerah terutama hasil pertanian.

Namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi (penurunan dibawah 0%) dalam perekonomian yang ditandai oleh penurunannya PDRB dari tahun sebelumnya dari Rp. 5.571.732,28 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 5.528.507,31 juta pada tahun 2020 (mengalami penurunan 0,78%) untuk PDRB berdasarkan ADHB dan dari Rp. 3.977.409,14 juta menjadi Rp. 3.928.031,94 juta (mengalami penurunan -1,24%) untuk PDRB berdasarkan ADHK. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid 19 yaitu melalui social distancing dan physical distancing, yang diikuti oleh kebijakan yang lebih luas diberesapa daerah yang salah satunya Provinsi Sumatera Barat yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat berdampak terhadap terganggunya aktifitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha baik dari penawaran (supply) dan sektor perantara (demand).

Namun pada tahun 2021, seiring dengan menurunnya kasus covid 19 serta keberhasilan program herd immunity melalui program vaksinasi, baik pemerintah pusat, provinsi dan daerah melakukan beberapa kebijakan antara lain pelonggaran pelonggaran level Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan tingkatan kasus covid. Selain itu membaiknya harga dan produksi unggulan daerah seperti kelapa sawit, kopi dan karet. Kondisi ini berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya PDRB menjadi Rp. 5.777.977,93,- (mengalami peningkatan 4,51%) untuk PDRB berdasarkan ADHB dan Rp. 4.059.514,72 juta (mengalami penurunan 3,35%) untuk PDRB berdasarkan ADHK. Perumbuhan ini terjadi diluaripir seluruh sektor perekonomian terutama sektor utama yang merupakan pembentuk perekonomian daerah seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertambangan dan Pertambangan; Transportasi dan Pergudangan.

2.1.2 Laju Inflasi

Dilihat dari kecenderungan perkembangan urusan perdagangan selama tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari perkembangan PDRB yaitu dari Rp. 915,33 milyar pada tahun 2017 menjadi 1.160,98 milyar pada tahun 2021. Peningkatan ini ditimngi dengan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten yaitu dari 18,70% pada tahun 2017 menjadi 20,42% pada tahun 2021. Untuk inflasi daerah Kabupaten Solok Selatan mengacu pada Inflasi Kota Padang. Hal ini disebabkan karena di Sumatera Barat, BPS hanya menerbitkan inflasi untuk dua daerah yaitu Kota Padang dan Bukittinggi. Dilihat dari perkembangan indikator inflasi tahun 2021 cukup stabil, hal ini dapat dilihat dari perkembangan realisasi inflasi yang mengalami penurunan dari 2.12 pada tahun 2020 menjadi 1,37 pada tahun 2021.



Dilihat dari ketersediaan sarana perdagangan dari tahun 2017-2021 tidak mengalami pertumbuhan yakni terdapat 2 pasar Kabupaten (pasar Padang Aro dan Pasar Muarabuh) serta 33 Pasar Nagari. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perdagangan Kabupaten Solik Selatan tahun 2017-2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Solik Selatan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sasaran					
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,70	19,44	20,21	20,20	20,42
2	Tingkat inflasi	%	2,11	2,55	1,72	2,12	1,37
3	Jumlah sarana perdagangan (pasar) > Pasar Kabupaten > Pasar Tradisional	Unit	2 31	2 31	2 31	2 31	2 31

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solik Selatan

2.1.3 PDRB Per Kapita

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Solik Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita di masing-masing tahun tersebut. PDRB per kapita menunjukkan perbandingan antara total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solik Selatan. Dari gambar di bawah dapat dilihat bahwa pada periode 2017-2019 PDRB perkapita Kabupaten Solik Selatan terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp 30,14 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 32,58 juta pada tahun 2019. Namun pada tahun 2021, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 hingga menjadi 30,37 juta per tahun namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan perekonomian daerah hingga menjadi 31,26 juta.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan anggaran Tahun 2022 diarahkan pada penyiapan perangkat pengelolaan anggaran, baik sumberdaye maupun sistem pengelolaan anggaran agar dapat memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah daerah. Pada aspek pendapatan diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah serta dana perimbangan.



Arah kebijakan Keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak, terutama dari pengelolaan kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah.
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional seperti penerimaan daerah bukan pajak.
- c. Meningkatkan porsi pengeluaran pembanguan dalam belanja dan pembiayaan daerah sehingga mampu meningkatkan PDRB Kabupaten Solok Selatan.
- d. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan: Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi, terutama melalui peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan, koordinasi dan penyempurnaan prosedur pembayaran pajak.
- e. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan melalui penetapan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan seperti Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Analisis Belanja (SAB), Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- f. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui peneraan, pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah.
- g. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pelaksana keuangan daerah dan penempatan aparatur yang sesuai dengan keahlian.
- h. Meningkatkan ketepatan waktu siklus penyusunan APBD.
- i. Meningkatkan pengawasan anggaran melalui peningkatan penyusunan dan pengawasan anggaran oleh eksekutif dan legislatif.
- j. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- k. Merintis program audit keuangan publik oleh kelembagaan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik dari penggunaan keuangan daerah terutama pengeluaran keuangan untuk belanja pelayanan publik dan infrastruktur ekonomi.
- l. Meningkatkan mutu laporan keuangan setiap satuan kerja terkait dengan memberikan keterampilan penyusunan standar akuntansi keuangan untuk tujuan umum, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana yang telah dikeluarkan atau dibelanjakan.

2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar penyusunan Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

Tabel 2.7

Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023

	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Parapabelan		
Belanja	954.258.062.246,00	947.180.513.684,00
Penerimaan Pembiayaan	932.865.500.804,37	840.407.649.872,00
Pengeluaran Pembiayaan	109.103.438.558,00	92.785.108.943,00
	500.500.000,00	729.000.000,00



Secara umum tampak bahwa pendapatan daerah Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022, pendapatan daerah anggarannya mengalami penurunan begitu pun dengan realisasinya juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berbanding terbalik dengan penurunan pendapatan belanja daerah mengalami peningkatan begitu pun penerimaan Penbiayaan daerah juga mengalami penurunan yang merupakan komponen untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan nomor 25 tahun 2023 dan nomor 6 tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 serta nota kesepakatan nomor 180.30/ NK/PTJ-SS/XI/2022 tahun 2022 tanggal 10 Nopember tahun 2022 tentang Perubahan Prioritas Klafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022, yang pada intinya berisi kebijakan sebagai berikut:

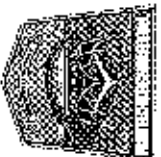
Penyisipan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan-terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kerahdian merencanakan pengeluaran sesuai dengan prinsip *money follow function*. Efektivitas pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terfacyap kelompok, jenis dan obyek pendapatan tersebut:

Dalam rangka mencapai peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menentukan beberapa kebijakan dalam rangka mengelola pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah;
- b. Peningkatan kualitas dan memperlulas akses pelayanan kepada wajib pajak;
- c. Inventarisasi potensi obyek pajak;
- d. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana serta SDM yang ada guna meningkatkan PAD;
- f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan swasta dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD; dan
- g. Optimalisasi BUMD.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap item belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 – 2026 yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah. Target indikator dimaksud berfungsi sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan. Namun demikian tidak semua target indikator yang akan diraih tersebut harus mendapat penyediaan



anggaran dari pemerintah Kabupaten, dapat juga dari pemerintah provinsi atau pusat atau sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

Adapun kebijakan dalam pengelolaan belanja daerah tahun 2022 Kabupaten Solok Selatan adalah:

- a. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja;
- b. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Anggaran lebih diutamakan pada program yang diperlukan (*money follows program*), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan organisasi;
- e. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Ransur;
- f. Dalam rangka kebijakan kemiripan swasta – pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah, harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan diawasi atas prinsip keadilan;
- g. Belanja Investasi, diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas pembangunan tahun 2022; dan
- h. Belanja Operasi diarahkan untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional, penentuan pembayaaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, membilaya program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022, serta mendorong percepatan pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Solok Selatan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) dan penerimaan kembali investasi pemerintah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *halancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun 2022 sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun anggaran 2023, yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional, perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 menunjukkan SILPA sebesar 54.000.044.742,51,-;
- b. SILPA diupayakan merurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
- c. Penyerahan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan dana yang diinvestasikan/diseritikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur modal;

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang



dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solik Selatan Tahun Anggaran 2023. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solik Selatan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

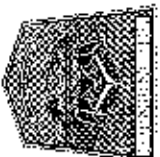
Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2023

Saluran	Anggaran		Realisasi	
	2023	2022	2023	2022
PENDAPATAN	841.160.510.684,00	840.018.794.191,79		93,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD-LRA)	78.133.886.833,00	88.875.787.203,79		113,75
PENDAPATAN TRANSFER-LRA	753.151.453.851,00	741.131.287.237,00		98,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	8.875.150.000,00	10.011.923.023,00		101,38
BELANGA	840.407.648.873,00	785.417.181.448,28		93,46
BELANGA OPERAS'	690.532.104.284,00	645.554.117.010,28		93,49
BELANGA MODAL	148.875.544.589,00	139.713.064.438,00		93,85
BELANGA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	150.000.000,00		15
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	92.778.871.754,00	92.627.871.216,00		99,84
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.580.709.754,00	1.429.809.218,00		90,44
SURPLUS/DEFISIT	-92.026.109.943,00	-98.026.065.200,49		100,44
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.755.109.943,00	92.755.109.943,00		100
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	729.000.000,00	729.000.000,00		100
PEMBIAYAAN NETTO	92.026.109.943,00	92.026.109.943,00		100
SISALBEHUKURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	53.999.775.184,78		0,00

Dari gambaran di atas, pencapaian Perda APBD Tahun 2023 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dari realisasi pendapatan yang bisa terealisasi sebesar 99,86% dari target yang telah ditetapkan dalam Perda APBD, sedangkan efisiensi pengelutaran dapat dicapai dengan penghematan belanja dan pembayaan.

Namun demikian, dihindari sosial-generatif dalam pelaksanaan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum atau pun asumsi dalam penyusunan APBD. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila: 1) Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) APBD awal, 2) Keadan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran antar unit organisasi, antar program dan kegiatan, dan antar jenis belanja, 3) Keadan yang menyebabkan terjadinya perubahan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, serta 4) Keadan darurat.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 155 (1) bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 dilakukan perubahan:

1. Adanya perubahan pada penerimaan pendapatan daerah. Pada Tahun 2023 diperkirakan pendapatan daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan ini disebabkan terjadinya pemulihan ekonomi dikarenakan Corona Virus Disease (Covid-19) yang sudah semakin mereda berdampak terhadap perekonomian dunia, nasional dan daerah yang menyering kedua sisi perekonomian baik sisi produksi atau penawaran (*supply*) maupun dari sisi permintaan (*demand*). Penurunan aktifitas ekonomi ini pada akhirnya berdampak terhadap perubahan struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyesuaian dan rasionalisasi perkiraan pendapatan Negara berdampak terhadap penurunan kemampuan Negara dalam membiayai belanja negara, sehingga dilakukan Efisiensi, Realokasi dan Refocusing dari anggaran belanja negara. Dampak dari penurunan belanja negara ini akhirnya juga berdampak terhadap penurunan dana perimbangan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kab. Solok Selatan perlu melakukan rasionalisasi perkiraan pendapatan.
2. Adanya penurunan dari prediksi target SILPA tahun 2022 berdasarkan Audit BPK terdapat Laporan Pertanggungjawaban Kemangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebesar Rp92.740.090.448,27.
3. Sehingga perlu dilakukan perubahan pada komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ringkasan Perubahan atas Pos Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Ringkasan Anggaran
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

Kategori	Sebelum Perubahan (Rp)	Terdampak (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)
Pendapatan	824.715.315.691	16.445.194.993	841.160.510.684
Belanja	899.549.031.793	32.237.523.839	933.186.623.627
Surplus/Defisit	75.233.776.097	-16.732.333.846	92.026.103.943
Penerimaan Pembiayaan	76.233.776.097	7.521.333.846	82.755.109.942
Pengeluaran Pembiayaan	0	729.000.000	729.000.000
Pembiayaan Netto	76.233.776.097	16.792.333.846	92.026.109.943

Dari pendapatan sebelum perubahan, ditargetkan sebesar 824.715.315.691,00 setelah anggaran perubahan menjadi Rp841.160.510.684,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp16.445.194.993,00 atau sebesar 2 %.

Tabel 2.10
Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Tahun 2023

Kategori	Sebelum Perubahan (Rp)	Terdampak (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	75.128.500.000,00	78.153.686.833,00	3.025.396.833,00
Pendapatan Transfer	738.771.665.681,00	753.151.463.651,00	13.439.798.160,00
Lain-lain Pendapatan yg sah	9.875.150,00	9.875.150,00	0
Total Pendapatan	824.715.315.691,00	841.160.510.684,00	16.445.194.993,00



Secara keseluruhan anggaran belanja pada tahun 2023 terjadi peningkatan anggaran belanja pada anggaran perubahan sebesar Rp30.965.655.841,00 atau 3%. Rincian penambahan dan pengurangan masing-masing SKPD sebagai berikut :

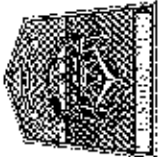
Tabel 2.11
Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan
per SKPD Tahun 2023

No	SKPD	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Perubahan (persen)
		Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	Dinas Pendidikan	225.767.583.430	229.721.011.515	3.953.428.085	2%	
2.	Dinas Kesehatan	166.655.659.649	177.399.049.635	10.743.389.986	6%	
3.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pertanahan	113.408.420.289	103.718.724.067	-9.689.696.222	-8%	
4.	Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	26.629.039.243	26.822.955.806	203.916.563	1%	
5.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Peradam Kecamatan	8.981.749.447	8.120.828.059	-860.921.388	-10%	
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.245.146.487	5.392.911.328	-4.852.234.159	-47%	
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.546.793.023	3.056.814.081	-489.978.942	-14%	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.759.352.796	4.350.454.840	-408.897.956	-9%	
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan, Perencanaan dan Pelindungan Anak	7.536.234.270	7.833.298.254	297.063.984	4%	
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.044.893.025	7.285.343.854	-759.049.172	-9%	
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.109.744.357	3.843.827.177	-265.917.180	-6%	
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	3.643.864.048	4.739.629.640	1.095.765.592	30%	
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemanduan dan Olahraga	14.806.105.658	14.481.931.249	-124.174.409	-1%	
14.	Dinas Pertanian, Kelautan, Rangan dan Perikanan	35.234.305.543	33.591.904.951	-1.642.401.592	-5%	
15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.621.327.544	8.135.828.502	-485.499.042	-6%	
16.	Sekretariat Daerah	42.803.456.275	52.854.674.644	10.051.218.369	24%	
17.	Sekretariat DPRD	25.810.763.017	26.581.910.855	771.147.838	3%	
18.	Kecamatan Koto Parik Gading Diateh	3.254.482.178	3.370.110.405	115.628.227	4%	
19.	Kecamatan Sungai Pagu	3.153.133.292	3.258.264.654	105.131.362	4%	
20.	Kecamatan Sangir	2.859.482.551	3.239.142.607	379.660.056	13%	
21.	Kecamatan Sangir Jujuan	2.207.105.535	2.231.182.489	24.076.954	1%	
22.	Kecamatan Sangir Belang Hari	2.723.684.007	2.875.676.596	151.992.589	6%	
23.	Kecamatan Pauh Duo	2.498.373.885	2.516.845.801	18.471.916	1%	
24.	Kecamatan Sangir Balan Janggo	2.274.844.075	2.163.303.695	-111.540.380	-5%	



REKAPITULASI HASIL PERUBAHAN KELOMPOKAN
PERANGKUAN ALAP BERDASARKAN SKORAN SPILATAY
TAHUN ANGGARAN 2023

No	SKPD	Sebelum			Perubahan (%)
		Perubahan RPM	Perubahan RPM	Perubahan RPM	
25.	Badan Perangulungan Bancane Daerah	6.029.587.593	5.294.925.713	-733.661.880	-12%
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.299.801.585	14.404.798.156	9.104.996.571	172%
27.	Inspektorat Daerah	5.046.090.220	4.915.920.048	-130.170.173	-3%
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.404.022.812	4.888.306.741	-525.716.071	-15%
28.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	104.809.802.885	118.012.566.957	13.202.664.272	13%
30.	Badan Kesegawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.108.857.519	36.275.427.576	5.166.570.057	17%
JUMLAH		899.949.091.788	933.166.620.627	33.237.528.839	4%

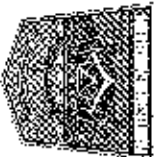


3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Solik Selatan sudah menerapkan penganggaran berbasis kas secara lebih luas pada tahun 2021. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD tidak hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, dan untuk pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah ditetapkan dalam APBD. Sebagai contoh, pendapatan dari belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya langsung dikelola oleh masing-masing sekolah negeri di Kabupaten Solik Selatan tanpa melalui rekening kas umum daerah dan pendapatan dari belanja dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pelaksanaannya langsung dilaksanakan oleh masing-masing Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dari sisi pembiayaan, APBD tahun 2023 juga telah berpedoman pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Perencanaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Solik Selatan mengalokasikan pendapatan sebesar Rp841.160.510,684,00 dan realisasi sebesar Rp840.018.987,463,70 atau sebesar 99,86%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp884.655.899,039,10, realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp-43.496,049.708,10 atau sebesar -5,09%. Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Solik Selatan mengalokasikan sebesar Rp840.407.648,873,00 dan realisasi sebesar Rp785.417.181,448,28 atau sebesar 93,46%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022 sebesar



Rp813.620.609.303,77 mengalami penurunan sebesar Rp-28.203.427.855,49 atau 3,59%.
 Sedangkan untuk Transfer Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menganggarkan Rp92.778.971.754,00 dan terrealisasi sebesar Rp92.627.871.216,00 atau 99,84%.
 Dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2022 sebesar Rp86.917.238.179,00 terdapat kenaikan sebesar Rp5.710.633.037,00 atau 6,57%

Berikut ini disajikan anggaran pendapatan, belanja tahun 2023 dan tahun 2022 beserta realisasinya.

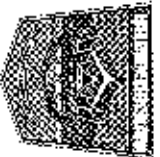
Tabel 3.1
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer
 Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023		Realisasi 2022		%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1.	PENDAPATAN	841.160.510.894	840.018.798.191,79	89,89%	884.656.566.992,10		
2.	BELANJA	840.407.648.879,00	785.477.187.448,28	93,46%	813.820.609.303,77		
	a. BELANJA OPERASI	646.554.117.070,28	646.554.117.070,28	92,34	608.497.257.791,10		
	b. BELANJA MODAL	139.773.064.439,00	139.773.064.438,00	91,88	202.672.297.511,67		
	c. BELANJA TIDAK TERDUGA	150.000.000,00	150.000.000,00	1,95	3.061.054.051,00		
2.	TRANSFER	92.778.971.754	92.627.871.216,00	99,84%	88.917.238.179,00		

Target dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk tahun anggaran 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023

No	NAMA UNIT ORGANISASI SKPD	ANGGARAN 2023		REALISASI 2022		%	REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1.	Dinas Kesehatan	43.462.500,00	50.984.749.198,00	117,31%	58.074.856.661,00		
2.	Dinas Perumahan, Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan	400.000.000,00	197.892.000,00	49,47%	253.771.000,00		
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000,00	321.945.312,00	128,78%	507.447.507,00		
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,00	27.566.777,70	27,57%	787.500,00		
5.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemandirian dan Olahraga	300.000.000,00	215.352.000,00	71,78%	282.506.000,00		
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	461.000.000,00	367.480.400,00	79,71%	418.312.400,00		
7.	Badan Pengalasan Kelengkapan Daerah	796.187.010.884,00	737.899.622.554,09	92,68%	825.198.249.977,10		



NO	NAMA UNIT ORGANISASI (SKPD)	ANGGARAN 2022 (Rp)		REALISASI 2022 (Rp)		% (1)	REALISASI 2022 (Rp)	
		2022	2022	2022	2022		(Rp)	(Rp)
JUMLAH		841.160.510.884,00		840.016.796.191,79		99,88%	884.655.899.039,10	

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk tahun anggaran 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3

Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	ANGGARAN 2023 (Rp)		REALISASI 2022 (Rp)		%	REALISASI 2022 (Rp)	
		2023	2023	2022	2022		(Rp)	(Rp)
1.	Dinas Pendidikan	239.721.011.915,00		237.238.979.390,00		98,46%	255.036.361.914,14	
2.	Dinas Kesehatan	177.399.049.638,00		157.758.741.074,95		88,93%	155.967.195.297,08	
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	103.718.724.007,00		97.313.465.929,00		93,82%	120.052.023.390,12	
4.	Dinas Perumahan, Pemukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	28.829.956.805,00		27.033.095.952,00		93,77%	28.078.657.528,30	
5.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pertadam Kabupaten	8.120.826.059,00		7.924.562.097,00		97,82%	8.196.977.143,00	
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.382.911.328,00		5.007.865.716,00		93,03%	5.523.030.404,30	
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.056.814.081,00		2.813.226.038,00		31,03%	3.891.097.739,00	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.350.454.940,00		3.024.175.969,00		69,50%	5.068.612.945,00	
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.893.298.254,00		7.267.225.220,00		92,08%	5.867.053.679,00	
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.285.343.854,00		7.005.606.220,00		96,15%	7.451.805.916,00	
11.	Dinas Perencanaan Mokal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.843.847.177,00		3.469.587.107,62		90,26%	3.932.298.542,00	
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.733.629.840,00		4.404.352.156,00		93,24%	10.858.896.987,06	
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemanduan dan Olahraga	14.481.931.259,00		11.677.780.817,41		80,64%	6.125.304.357,00	
14.	Dinas Pertanahan, Ketahanan Pangan dan Perikanan	39.661.904.961,00		31.441.858.339,00		79,28%	23.147.327.202,00	
15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.135.848.502,00		7.735.877.924,00		362,58%	8.000.707.890,07	
16.	Sekretariat Daerah	52.854.674.644,00		48.843.741.294,00		92,41%	33.369.601.586,00	
17.	Sekretariat DPRD	28.581.910.853,00		26.323.998.823,00		92,10%	26.759.402.910,00	
18.	Kecamatan Koto Parik Gedang Dietah	3.370.119.409,00		3.397.535.138,00		100,51%	2.876.170.187,00	
19.	Kecamatan Sungai Pagu	3.288.261.654,00		3.151.783.276,00		95,85%	2.464.886.454,00	



No	SKPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
20.	Kecamatan Sangir	2.238.142.807,00	5.192.186.275,00	98,58%	2.298.225.182,00
21.	Kecamatan Sangir Jujuan	2.231.182.489,00	2.156.885.309,00	96,62%	1.927.020.086,00
22.	Kecamatan Sangir Batang Heri	2.875.676.635,00	2.792.887.871,00	97,12%	2.522.896.199,00
23.	Kecamatan Paoh Duo Jarago	2.516.848.801,00	2.429.055.449,00	96,51%	2.123.051.301,00
24.	Kecamatan Sangir Sialit Jarago	2.166.303.686,00	2.192.759.725,00	98,45%	2.081.181.899,00
25.	Badan Perangulangan Bercana Daerah	5.294.925.715,00	4.798.083.466,00	90,56%	24.003.928.890,30
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	14.404.798.138,00	14.127.771.570,00	98,05%	3.126.828.081,00
27.	Inspektorat Daerah	4.913.920.045,00	4.438.337.661,00	90,31%	4.484.466.996,00
28.	Badan Perencanaan Daerah	4.668.306.741,00	4.263.485.599,00	91,33%	4.643.088.090,00
29.	Sedan Pengadaan Keuangan Daerah	25.283.595.209,00	23.431.827.666,00	92,66%	25.752.133.398,00
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.275.427.576,00	34.921.750.859,00	96,27%	27.479.250.480,00
	JUMLAH	840.407.648.873,00	785.417.181.448,28	93,46%	813.620.609.303,77

Terdapat besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel 3.3 tersebut, rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk tahun anggaran 2023 dan 2022 yang dibagi dalam kelompok belanja operasi dan belanja modal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	214.168.086.295,00	206.341.360.856,00	95,35%	207.905.360.000,00
2.	Dinas Kesehatan	182.640.870.541,00	147.633.683.032,95	89,67%	137.480.904.344,10
3.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan	11.018.223.683,00	9.852.369.042,00	87,88%	28.665.972.958,00
4.	Dinas Perumahan, Pemukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	19.566.290.945,00	18.616.070.579,00	93,70%	19.006.014.185,00
5.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pertadam Kecamatan	7.873.101.377,00	7.716.043.097,00	98,03%	7.974.060.143,00
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.354.278.528,00	4.980.652.716,00	93,03%	5.505.630.404,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.051.314.081,00	2.907.726.038,00	92,02%	3.501.764.799,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.234.313.076,00	3.812.965.969,00	90,05%	4.714.841.564,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.813.809.954,00	7.268.676.220,00	93,02%	6.709.542.679,00



No	SKOP	ANGGARAN 2023		REALISASI 2023		%	REALISASI 2022
		RP	RP	RP	RP		
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.011.312.387,00	6.792.012.220,00	96,92%	6.553.111.541,00		
11.	Dinas Peningkatan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.663.399.950,00	3.298.725.107,52	89,98%	3.370.092.542,00		
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	3.540.952.403,00	3.208.819.539,00	90,62%	2.946.517.327,00		
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemanduan dan Olahraga	12.841.104.981,00	10.174.050.882,51	78,62%	5.794.777.080,00		
14.	Dinas Perakalan, Ketahanan Pangan dan Pelikatan	31.925.922.237,00	29.826.397.689,00	93,71%	22.536.624.504,00		
15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.624.563.335,00	7.222.248.237,00	94,78%	6.526.982.154,00		
16.	Sekretariat Daerah	50.981.159.370,00	47.002.125.814,00	92,20%	30.302.669.153,00		
17.	Sekretariat DPRD	28.450.440.176,00	25.238.611.823,00	95,49%	28.667.774.010,00		
18.	Kecamatan Kota Park Gedang Diarah	3.379.257.279,00	3.266.741.483,00	96,12%	2.672.764.187,00		
19.	Kecamatan Sungai Pagar	3.288.264.654,00	3.157.783.276,00	95,99%	2.479.205.594,00		
20.	Kecamatan Sangir	2.002.663.432,00	2.957.311.300,00	98,49%	2.259.838.182,00		
21.	Kecamatan Sangir Jujuan	2.176.320.547,00	2.101.640.542,00	96,58%	1.307.056.066,00		
22.	Kecamatan Sangir Sintang Hari	2.691.120.889,00	2.608.812.671,00	96,94%	2.446.100.135,00		
23.	Kecamatan Paluh Dua	2.514.363.051,00	2.427.078.443,00	96,51%	2.097.876.301,00		
24.	Kecamatan Sangir Balai Lango	2.146.679.685,00	2.112.199.725,00	98,44%	1.918.871.558,00		
25.	Badan Peninggalan Berkarya Daerah	4.973.576.161,00	4.480.148.716,00	93,99%	4.690.667.802,00		
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	14.348.102.156,00	14.071.461.570,00	98,07%	3.106.929.081,00		
27.	Inspektori Daerah	4.902.600.045,00	4.426.387.931,00	90,29%	4.478.968.996,00		
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.668.306.741,00	4.263.488.693,00	91,33%	4.599.087.362,00		
29.	Badan Pengelolan Keuangan Daerah	24.070.349.203,00	23.128.827.668,00	96,09%	22.231.948.688,00		
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.245.429.576,00	34.891.359.853,00	96,28%	27.352.963.460,00		
	JUMLAH	690.532.104.284,00	643.554.117.010,28	93,48%	608.487.267.791,10		

Tabel 3.5
 Anggaran dan Realisasi Belanja Model Tahun Anggaran 2023 dan 2022

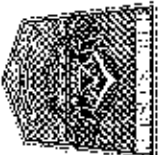
No	SKOP	ANGGARAN 2023		REALISASI 2023		%	REALISASI 2022	
		RP	RP	RP	RP		RP	RP
1.	Dinas Pendidikan	25.552.945.630,00	24.397.612.534,00	97,44%	47.130.001.914,12			
2.	Dinas Kesehatan	12.758.179.097,00	10.125.458.042,00	79,36%	18.466.230.892,98			
3.	Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan dan Pertahanan	92.700.500.324,00	87.631.092.886,00	94,56%	91.426.000.434,12			
4.	Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	9.063.675.459,00	8.418.025.372,00	93,01%	9.072.643.343,00			
5.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	247.724.682,00	231.514.000,00	93,46%	222.917.000,00			



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT MANAJEMEN KEUANGAN SOLUSI SLIPATAN
LABORATORIUM GABUNGAN 2013

2013

No	SKOP	SILOKASI 2013 (Rp)	REKONSILIASI (Rp)	REKONSILIASI (%)	REKONSILIASI (Rp)
Kebijakan					
9.	Dinas Sosial, Pembudayaan Masyarakat dan Desa	28.631.800,00	27.111.000,00	94,66%	1.520.800,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%	379.282.940,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	116.141.764,00	111.210.000,00	95,76%	932.771.381,00
9.	Dinas Pengendalian Pertumbuhan Keluarga Berencana, Perkembangan Perencanaan dan Perlindungan Anak	19.488.300,00	18.549.000,00	95,18%	939.300,00
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	274.021.487,00	273.494.000,00	99,80%	876.894.275,00
11.	Dinas Perencanaan Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	180.447.197,00	172.852.000,00	95,79%	22.188.000,00
12.	Dinas Perusahaan dan Keasripar	1.198.677.437,00	1.195.532.623,00	99,74%	7.713.419.050,06
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kependudukan dan Olahraga	1.540.826.268,00	1.503.729.935,00	97,59%	390.527.271,00
14.	Dinas Pertanian, Kehutanan Pangan dan Perikanan	1.655.981.720,00	1.515.516.250,00	91,52%	610.402.700,00
15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	511.265.671,00	508.731.688,00	99,70%	1.273.738.736,07
16.	Sekretariat Daerah	1.873.436.274,00	1.841.615.486,00	98,30%	2.586.932.832,00
17.	Sekretariat DPRD	131.470.678,00	131.387.000,00	99,94%	97.628.900,00
18.	Kecamatan Kota Park Gading Djarum	40.861.830,00	40.797.730,00	99,84%	203.406.000,00
19.	Kecamatan Sungai Pagu	0	0	0,00%	8.680.860,00
20.	Kecamatan Sangir	236.673.376,00	234.674.375,00	99,17%	33.359.000,00
21.	Kecamatan Sangir Jiluan	54.381.842,00	53.844.767,00	98,99%	19.953.000,00
22.	Kecamatan Sangir Batang Hari	94.865.707,00	184.075.000,00	89,74%	77.736.000,00
23.	Kecamatan Patih Duo	1.995.750,00	1.983.000,00	99,21%	25.376.000,00
24.	Kecamatan Sangir Baki Janggo	9.624.000,00	19.660.000,00	89,67%	182.310.350,00
25.	Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	316.348.552,00	315.935.750,00	99,87%	18.919.269.088,30
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	56.696.000,00	56.310.000,00	99,32%	19.900.000,00
27.	Inspektoriat Daerah	13.320.000,00	12.380.000,00	97,22%	5.500.000,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0,00%	44.000.722,00
29.	Badan Pengendalian Keuangan Daerah	63.246.000,00	153.000.000,00	93,72%	409.102.700,00
30.	Sadan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.538.000,00	29.800.000,00	99,34%	126.287.000,00
JUMLAH		148.875.544.589,00	139.713.064.438,00	93,85%	202.072.297.511,57



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan ketertandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Solik Selatan memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Solik Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Solik Selatan, Peraturan Bupati Solik Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Kabupaten Solik Selatan, Peraturan Bupati Solik Selatan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyisihan Piutang dan Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud, Peraturan Bupati Solik Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Masa Manfaat dan Penyusutan Aset Tetap Kabupaten Solik Selatan, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas ini terdiri dari SKPD dan BUD.

Entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang berlaku umum.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Solik Selatan Nomor 10 Tahun 2014, maka Pemerintah Kabupaten Solik Selatan resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD) dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.



4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membiatkan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penanganannya, pendapatan dijumlah menjadi 2 (dua), yakni:

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahakan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima direkening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akruntansi aktual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akruntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang



diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembayaran yang diukur dengan mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembayaran.

4.3.4 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus diserahkan kepada pihak ketiga berupa Utang PPK.

Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolannya menjadi tanggung jawab Bendahara umum Daerah (BUTD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

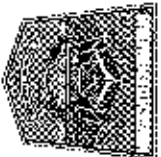
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyeror seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak terburu-kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

5) Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.



4.3.5 Pengaluran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk mengkredit uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

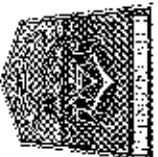
Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya telang kendaraan roda 4 (eripat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka pendek yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembiayaan atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus ditertine dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tunjutan Perbendaharaan (TP) dan Tunjutan Ganti Rugi (TGR)

Bendabara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melampas hakum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tunjutan Perbendaharaan (TP) dan Tunjutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus dicatat dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tunjutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.



4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar bagian lancar tagihan penjualan angguram, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perakuan akumulasi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dioclokkan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- (2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan alas laporan keuangan selama piutang pokok masih terancam atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang diragukan nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang tidak merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- (5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- (6) Pembentukan pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelunasan (*memboyar tunei*) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/tuntas.
 - b. Penghapusbukuan (*write down*) Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akumulasi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).



Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

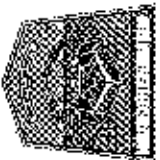
- 1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada rerace pemerintah, apabila perlu sebelum difinansiasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - 3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem normasi untuk dihapusbukukan atas usulan boyeziang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- c. Penghapustagihan (*write off*)
- Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemurugkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- 1) Penghapustagihan karena menginget jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
 - 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyajukkan, membuat citra pengah menjadi lebih baik.
 - 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti meragih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih meihal kondisi pihak teragih.
 - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyelatan utang.
 - 5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukumkepauffman, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan:peraturan *write off* di Negara lain.
- d. Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan
- Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayarand/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau penoibayaan terganitung dari jenis piutang.
- e. Restrukturisasi
- Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.6 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-



barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memungkinkannya nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memungkinkan nilai persediaan.

Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menerapkan sistem pencatatan dengan metode periodik, yaitu persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk memungkinkan nilai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya Perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan memproduksi Sendiri
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/sumbangan
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.7. Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non-pertanian misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.



Investasi jangka panjang yang bersifat permancn misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) **Dicatat Sebesar Nilai Wajar**

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar pencatapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tetapi biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) **Dicatat Sebesar Nilai Nominal**

Investasi jangka pendek dalam bentuk zon saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) **Dicatat Sebesar Nilai tercatat atau Nilai Wajar Lainnya**

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan selara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permancn dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

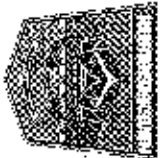
2) **Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:**

a) **Metode Biaya**

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) **Metode Ekuitas**

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Perencana Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.



c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir digunakan terbagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.3.8. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

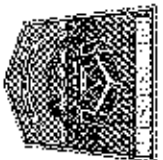
- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak menunjukkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengelabaran pengadaaan hari dan penambahan nilai aset tetap dari hasil: pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.9. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemeliharaanya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipemnti melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan rasah dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*)



dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran + 1.

4.3.10. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

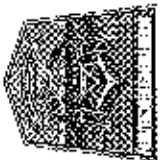
- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:
 - 2) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - 3) Biaya yang dapat dialokasikan pada kegiatan pada umumnya dan Dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - 4) Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi Yang bersangkutan.

4.3.11. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Aset lainnya dibagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

- 1) Tagihan Jangka Panjang.
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, diukur sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a) Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa aset yang bersangkutan.
 - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP), diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
 - c) Bangun Guna Serah/BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
 - d) Bangun Serah Guna/BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 3) Aset Tidak Berwujud (AIB)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak (*software*) jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.



- 4) Aset Lain-Lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya/bukunya.

4.3.12. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perkiraan akunlansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- 3) Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a) Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akunlansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
 - b) Kewajiban Jangka Panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akunlansi. Meliputi pinjaman utang perbantuan dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.13. Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

- 1) Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah dikurangi oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.
- 2) Ekuitas SAL
Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.
- 3) Ekuitas Untuk Dikonversi/didesikan



Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kesalahan tidak bertulang
 - a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 - b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perbaikannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menaruh maupun menguraangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan- LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2. Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan, pengukuran, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapabilitas, metode, dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terkait penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:



- 1) Melakukan perhitungan ulang terhadap akur yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode berkenaan sesuai perubahan kebijakan akuntansi.
- 2) Menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan periode sebelumnya.



**JABATAN
 PENYIARAN RADIO POSKORAPORAN KEMERANGAN**

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1 Pendapatan LRA	31 Des 2023	31 Des 2022
	(Rp)	(Rp)
	840.018.798.191,79	884.655.899.039,10

Realisasi pendapatan tahun 2023 adalah sebesar Rp840.018.798.191,79 atau 99,86% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp841.160.510.684,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp884.655.899.039,10 maka realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp44.637.100.847,31 atau turun sebesar 5,05%.

Sementara rincian anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2023 dan tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

No	Kategori	Anggaran 2023		Realisasi 2023	
		RP	RP	RP	RP
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	78.123.895.839,00	88.875.590.931,79	113,75	
2.	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	753.151.463.851,00	741.181.287.237,00	98,40	
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	8.875.150.000,00	10.011.920.028,00	101,38	
	Total	841.160.510.684,00	840.018.798.191,79	99,86	

Tabel V.1.2 Rincian Kenaikan/Penurunan Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023		Realisasi 2022		Selisih (Rp)
		RP	RP	RP	RP	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	88.875.590.931,79	92.121.048.048,10	(3.245.457.114,31)	(3,52)	
2.	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	741.181.287.237,00	784.706.642.887,00	(43.525.355.650,00)	(5,65)	
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	10.011.920.028,00	7.828.208.102,00	2.183.711.917,00	27,90	
	Total	840.018.798.191,79	884.655.899.039,10	(44.637.100.847,31)	(5,05)	

A. Pendapatan Asli Daerah	31 Des 2023	31 Des 2022
	(Rp)	(Rp)
	88.875.590.931,79	92.121.048.048,10

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp88.875.590.931,79 atau 113,75% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp78.123.896.839,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar



Rp92.121.048.046,10 maka realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.245.457.114,31 atau turun sebesar 3,52%.

Tabel V.1.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

No	Kategori	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	12.627.963.123,00	11.176.289.565,00	88,50
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.404.500.000,00	2.000.096.422,70	83,18
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	2.628.000.000,00	2.796.556.717,00	106,41
4.	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	60.473.433.710,00	72.902.648.227,09	120,55
	Total	78.133.896.833,00	88.875.590.931,79	113,75

Tabel V.1.4 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Kategori	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	11.176.289.565,00	11.026.714.870,10	169.574.694,90	1,54
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.000.096.422,70	2.364.215.128,00	(364.118.705,30)	(15,04)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	2.796.556.717,00	2.415.762.960,00	380.793.767,00	15,78
4.	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	72.902.648.227,09	76.344.355.028,00	(3.441.706.870,91)	(4,51)
	Total	88.875.590.931,79	92.121.048.046,10	(3.245.457.114,31)	(3,52)

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023:

1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp11.176.289.565,00 atau 88,50% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp12.627.963.123,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp11.006.714.870,10 maka realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp169.574.694,90 atau 1,54%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023

No	Kategori	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	
1.	Pajak Hotel - LRA	130.000.000,00	140.967.113,00	140,97
2.	Pajak Restoran - LRA	2.000.000.000,00	2.528.210.675,00	126,41
3.	Pajak Reklame - LRA	230.000.000,00	355.151.708,00	177,58
4.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	5.357.865.943,00	5.850.671.865,00	109,48
5.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.750.000.000,00	925.642.685,00	52,83
6.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LRA	2.719.997.400,00	4.211.091.597,00	144,32
7.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	500.000.000,00	364.613.822,00	72,92
	Total	12.627.963.123,00	11.176.289.565,00	88,50



Tabel V.1.8 Kenaiakan/Penurunan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pajak Hotel - LRA	140.987.113,00	97.148.159,00	43.838.954,00	45,11
2.	Pajak Restoran - LRA	2.828.210.675,00	1.999.906.655,00	828.304.020,00	28,42
3.	Pajak Hiburan - LRA	0,00	9.170.000,00	(9.170.000,00)	0,00
4.	Pajak Reklame - LRA	355.151.708,00	139.606.848,00	215.544.862,00	154,39
5.	Pajak Perancangan Jalan - LRA	5.650.671.365,00	5.457.965.948,00	192.706.022,00	3,53
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	925.642.685,00	1.315.706.188,10	(390.063.503,10)	(29,65)
7.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LRA	1.211.031.597,00	1.294.461.356,00	(83.430.239,00)	(6,45)
8.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	364.813.422,00	692.743.243,00	(328.135.421,00)	(47,37)
	Total	11.176.289.565,00	11.006.714.870,10	169.574.694,90	1,54

Sistem pemungutan pajak di Kabupaten Solok Selatan terbagi atas dua sistem, yaitu *Self Assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terhutang dan *Official Assessment*, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Jenis pajak yang dipungut dengan sistem *self assessment* adalah Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Untuk Pajak reklame dan Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) dipungut dengan sistem *official assessment*.

Pada tahun 2023 realisasi pajak yang telah melebihi anggaran adalah Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak reklame dan Pajak penerangan jalan sedangkan untuk Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) belum melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Pendapatan pajak reklame yang dipungut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp355.151.708,00 (177,58% dari anggaran) dan mengalami kenaikan sebesar Rp215.544.862,00 (154,39% dari tahun 2022).

Pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) yang dipungut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.211.031.597,00 (44,52% dari anggaran) dan mengalami penurunan sebesar Rp83.430.239,00 (6,45% dari tahun 2022).

Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Pajak Hotel - LRA

Pajak hotel yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp140.967.113,00 atau sebesar 140,97% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00.

b) Pajak Restoran - LRA

Pajak restoran yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.528.210.675,00 atau sebesar 126,41% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00.



c) Pajak Reklame - LRA

Pajak reklame yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp355.151.708,00 atau sebesar 177,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Pajak reklame merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penerapan Bupati yang kewenangan pemungutannya ditimpahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

d) Pajak Penerangan Jalan - LRA

Pajak penerangan jalan, merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, pajak penerangan jalan yang pemungutannya dilakukan oleh PT. PLN. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi setiap bulan dengan pihak PT. PLN Wilayah Sumatera Barat. Jumlah pajak penerangan jalan yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp5.650.671.965,00 atau sebesar 105,46% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp5.357.965.943,00.

e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA

Pajak mineral bukan logam dan batuan, juga termasuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, namun dibawah monitoring dan evaluasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp925.642.685,00 atau sebesar 52,89% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.750.000.000,00.

f) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LRA

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang ditetapkan oleh Bupati, untuk besaran pajak terutang yang dalam pemungutannya melibatkan Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.211.031.597,30 atau sebesar 44,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.719.997.180,00.

g) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan jenis pajak kabupaten yang dibayar sendiri berdasarkan pengalihan oleh wajib pajak. Penerimaan pajak BPHTB Kabupaten Solok Selatan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp364.613.822,00 atau sebesar 72,92% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.000.096.422,70 atau sebesar 83,18% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.404.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah tahun 2022 maka realisasi retribusi daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp354.118.705,30 atau turun sebesar 15,04%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel V.1.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	228.500.000,00	136.175.000,00	59,60
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	275.000.000,00	110.627.000,00	40,23
3.	Retribusi Pelayanan Pasar-LRA	461.000.000,00	367.490.400,00	79,71
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	50.000.000,00	51.339.000,00	102,68
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Merafe Telekomunikasi- LRA	250.000.000,00	321.845.312,00	128,72
6.	Retribusi Pemakatan Kekayaan Daerah - LRA	665.000.000,00	729.694.833,00	109,73
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	75.000.000,00	36.916.000,00	47,89
8.	Retribusi Tempat Pelekan dan Olah Raga- LRA	300.000.000,00	219.352.000,00	73,12
9.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	100.000.000,00	21.566.777,70	21,57
	Total	2.404.500.000,00	2.000.096.422,70	83,18

Tabel V.1.8 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	136.175.000,00	122.519.000,00	13.656.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	110.627.000,00	132.471.000,00	(21.844.000,00)
3.	Retribusi Pelayanan Pasar-LRA	367.483.400,00	418.312.400,00	(50.832.000,00)
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	51.339.000,00	56.252.000,00	(4.913.000,00)
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Merafe Telekomunikasi- LRA	321.845.312,00	507.447.501,00	(185.602.189,00)
6.	Retribusi Pemakatan Kekayaan Daerah - LRA	729.694.833,00	753.745.227,00	(24.050.394,00)
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	35.916.000,00	45.049.000,00	(9.132.000,00)
8.	Retribusi Tempat Pelekan dan Olah Raga- LRA	219.352.000,00	282.596.000,00	(63.153.000,00)
9.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	27.566.777,70	35.915.000,00	(8.348.222,30)
	Total	2.000.096.422,70	2.354.315.128,00	(354.118.705,30)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10, ayat (1), huruf f, disebutkan "Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas melaksanakan tugas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah. Pada tahun 2023 ada 9 (sembilan) jenis objek retribusi yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan, berikut daftar jenis objek retribusi dan Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab pemungutan diantaranya :

Tabel V.1.9 Daftar OPD Penanggung Jawab dan Pemungut Retribusi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023

No	Objek Retribusi	OPD Penanggung Jawab
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan
3.	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perindustri, Perdagangan dan Cooperasi Dari UKM
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Merafe Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informasi



No	Objek Retribusi	OPD Penyuguh
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perumahan, Perumahan dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan
8.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Penerimaan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2023 sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA

Retribusi pelayanan kesehatan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solik Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp136.175.000,00 atau sebesar 59,60% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp228.500.000,00. Retribusi pelayanan kesehatan di Pemerintah Kabupaten Solik Selatan dipungut oleh Dinas Kesehatan.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solik Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp110.627.000,00 atau sebesar 40,23% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp275.000.000,00. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pemerintah Kabupaten Solik Selatan dipungut oleh Dinas Perumahan, Perumahan dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

c) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA

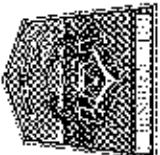
Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solik Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp51.339.000,00 atau sebesar 102,68% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp50.000.000,00. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor di Pemerintah Kabupaten Solik Selatan dipungut oleh Dinas Perumahan, Perumahan dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

d) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA

Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solik Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp321.945.312,00 atau sebesar 128,78% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp250.000.000,00. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Solik Selatan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

e) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA

Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solik Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp729.694.933,00 atau sebesar 109,73% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp665.000.000,00. Pada tahun 2023, retribusi pemakaian kekayaan daerah terbagi kepada 3 macam pemungutan yaitu:



Tabel V.1.10 Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA
Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi % (2023)
1.	Retribusi Pemakaian Ruang – LRA	65.000.000,00	120.056.555,00	184,70
2.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor – LRA	100.000.000,00	106.013.378,00	105,01
2.	Retribusi Pemakaian Alat – LRA	500.000.000,00	504.625.000,00	100,93
	Total	665.000.000,00	729.694.933,00	109,73

Tabel V.1.11 Kenaikan/Penurunan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	% (2023)
1.	Retribusi Pemakaian Ruang – LRA	120.056.555,00	120.056.555,00	14.883.328,00	14,15
2.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor – LRA	105.013.378,00	110.800.000,00	(5.486.827,00)	(4,97)
3.	Retribusi Pemakaian Alat – LRA	504.625.000,00	504.625.000,00	(33.447.000,00)	(6,22)
	Total	729.694.933,00	729.694.933,00	(24.080.294,00)	(3,19)

0) Retribusi Pelayanan Pasar – LRA

Retribusi pelayanan pasar yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp367.480.400,00 atau sebesar 79,71% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp461.000.000,00. Retribusi pelayanan pasar di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

Tabel V.1.12 Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar – LRA Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	% (2023)
1.	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	81.000.000,00	103.892.400,00	127,17
2.	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	370.000.000,00	263.588.000,00	71,24
	Total	451.000.000,00	367.480.400,00	79,71

Tabel V.1.13 Kenaikan/Penurunan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar – LRA Tahun 2023 dan Tahun 2022

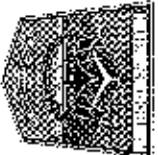
No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	% (2023)
1.	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	103.892.400,00	103.892.400,00	(1.255.000,00)	(1,15)
2.	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	263.588.000,00	313.185.000,00	(49.577.000,00)	(18,83)
	Total	367.480.400,00	418.312.400,00	(50.832.000,00)	(12,15)

g) Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA

Retribusi tempat khusus parkir yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp35.916.000,00 atau sebesar 47,89% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp75.000.000,00. Retribusi tempat khusus parkir di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

h) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp219.352.000,00 atau sebesar 73,12% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp300.000.000,00. Retribusi tempat



husus parkir di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA

Retribusi izin mendirikan bangunan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp27.566.777,70 atau sebesar 27,57% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000,00. Retribusi izin mendirikan bangunan di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.796.556.717,00 atau sebesar 106,41% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.628.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2022 maka realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp180.793.767,00 atau naik sebesar 15,76%.

Tabel V.1.14 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi %	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi %
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA	2.628.000.000,00	2.796.556.717,00	106,41		
	Total	2.628.000.000,00	2.796.556.717,00	106,41		

Tabel V.1.15 Kenaikan/penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA	2.796.556.717,00	2.413.762.950,00	382.793.767,00	15,76
	Total	2.796.556.717,00	2.413.762.950,00	382.793.767,00	15,76

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp72.902.648.227,09 atau sebesar 120,55% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp60.473.433.710,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2022 sebesar Rp76.344.355.098,00 maka realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.441.706.870,91 atau 4,51%.



Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.16 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023

No	Keterangan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	500.000.000,00	2.050.000,00	4,21
2.	Jasa Giro - LRA	5.000.000.000,00	3.738.881.518,00	74,78
3.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	7.721.065,08	17.965.774,32	232,69
4.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	1.561.733.764,00	328.368.169,53	21,03
5.	Pendapatan dari Pengembalian	2.456.824.865,00	0,00	0,00
6.	Pendapatan BLUD - LRA	43.234.000.000,00	60.948.574.188,00	117,61
	Total	60.473.453.710,00	72.902.648.227,09	120,55

Tabel V.1.17 Kenaikan/Penurunan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2022

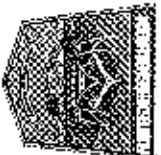
No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Perubahan (Rp)	
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	21.050.000,00	1.780.125.100,00	(1.739.076.100,00)	(88,80)
2.	Penerimaan Jasa Giro - LRA	3.738.881.518,00	2.032.953.705,00	1.705.927.813,00	88,91
3.	Pendapatan Bunga - LRA	0,00	5.376.329.638,00	(5.376.329.638,00)	(100,00)
4.	Penerimaan atas Turnover Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA	0,00	2.299.096.037,00	(2.299.096.037,00)	(100,00)
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	17.965.774,32	6.821.059.102,00	11.124.715.238,46	162,62
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	328.368.169,53	78.088.055,00	250.302.114,53	320,63
7.	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	0,00	4.397.800,00	(4.397.800,00)	(100,00)
8.	Pendapatan BLUD - LRA	50.848.574.188,00	57.852.336.881,00	(7.103.762.463,00)	(12,26)
	Total	72.902.648.227,09	76.344.355.098,00	(3.441.706.870,91)	(4,51)

Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Perubahan (Rp)
11.085.2023	11.085.2023	0,00
11.085.2023	11.085.2023	0,00

Realisasi pendapatan transfer tahun 2023 adalah sebesar Rp 741.131.287.237,00 atau sebesar 98,40% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 753.151.463.851,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer tahun 2022 sebesar Rp 784.706.642.887,00 maka realisasi pendapatan transfer tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 43.575.355.650,00 atau turun sebesar 5,55%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer tahun 2023:

Tabel V.1.18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023

No	Keterangan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	943.652.549.241,00	653.258.740.632,00	100,05
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	41.852.235.000,00	41.852.235.000,00	100,00



No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	\$4.648.679.610,00	39.026.311.603,00	71,41	
4.	Bantuan Keuangan - LRA	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	
	Total	753.151.463.851,00	741.131.287.237,00	98,40	

Tabel V.1.19Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022.

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Perubahan/Perbedaan	
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	653.253.740.634,00	676.013.344.009,00	22.759.603.375,00	3,37
2.	Pendapatan Transfer Lainnya - LRA	41.852.285.000,00	37.621.151.300,00	(4.231.084.000,00)	(11,25)
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	39.026.311.603,00	69.572.147.878,00	20.546.836.275,00	54,49
4.	Bantuan Keuangan - LRA	7.000.000.000,00	11.500.000.000,00	4.500.000.000,00	39,13
	Total	741.131.287.237,00	784.706.642.887,00	43.575.355.650,00	5,55

1. Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2023 adalah sebesar Rp653.253.740.634,00 atau sebesar 100,55% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp649.652.549.241,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2022 maka realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat untuk tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.759.603.375,00 atau turun sebesar 3,37%.

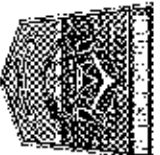
Rincian transfer pemerintah pusat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.20Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak - LRA	24.802.275.384,00	26.889.998.917,00	107,65	
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	15.804.208.636,00	27.148.318.318,00	170,70	
3.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	452.753.795.000,00	452.753.795.000,00	100,00	
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	156.192.279.241,00	146.651.840.399,00	93,89	
	Total	649.652.549.241,00	653.253.740.634,00	100,55	

Tabel V.1.21Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Perubahan/Perbedaan	
1.	Bagi Hasil Pajak - LRA	26.699.998.317,00	51.482.866.775,00	(24.782.868.458,00)	(49,14)
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	27.148.318.318,00	18.987.650.892,00	8.260.666.326,00	43,68
3.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	452.753.795.000,00	453.597.980.882,00	15.805.824.438,00	3,63
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	146.651.840.399,00	169.754.846.280,00	(22.083.205.881,00)	(13,08)
	Total	653.253.740.634,00	676.013.344.009,00	(22.759.603.375,00)	(3,37)



a) **Bagi Hasil Pajak**

Anggaran pendapatan bagi hasil pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp24.802.275.364,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp26.699.998.917,00 atau sebesar 107,65%. Apabila dibandingkan dengan realisasi bagi hasil pajak tahun 2022 maka realisasi bagi hasil pajak tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp24.782.887.858,00 atau turun sebesar 48,14%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

M/R	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023		Realisasi 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	DBH Palak Bumi dan Banguan - LRA	19.969.402.000,00	21.613.643.294,00	109,26
2.	DBH PPh Pasal 21 - LRA	4.780.375.000,00	4.833.098.889,00	101,10
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29W/POP/PPN - LRA	0,00	201.903.199,00	0,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT) - LRA	52.498.364,00	46.753.535,00	88,10
	Total	24.802.275.364,00	26.699.998.917,00	107,65

Tabel V.1.23 Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan Tahun 2022

M/R	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023		Realisasi 2022		
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1.	DBH Palak Bumi dari Banguan - LRA	21.613.643.294,00	46.379.028.989,00	(24.759.385.694,00)	(53,38)
2.	DBH PPh Pasal 21 - LRA	4.833.098.889,00	4.715.940.063,00	113.158.926,00	2,45
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29W/POP/PPN - LRA	201.003.199,00	342.350.031,00	(141.346.892,00)	(4,29)
4.	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT) - LRA	46.253.535,00	41.567.633,00	4.685.902,00	11,27
	Total	26.699.998.917,00	51.482.866.775,00	(24.762.887.858,00)	(48,14)

b) **Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.**

Anggaran pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam tahun 2023 adalah sebesar Rp15.904.209.636,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp27.148.316.318,00 atau sebesar 170,70%. Apabila dibandingkan dengan realisasi bagi hasil pajak/ sumber daya alam tahun 2022 maka realisasi bagi hasil pajak/ sumber daya alam tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.250.665.926,00 atau naik sebesar 43,66%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.24 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Tahun 2023

M/R	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Tahun 2023		Realisasi 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi - LRA	13.387.320.000,00	13.386.635.747,00	104,48
2.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Lendert - LRA	0,00	231.332.912,00	0,00
3.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalti - LRA	977.876.636,00	880.051.668,00	87,94
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kesehatan- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LRA	225.659.000,00	10.650.869.887,00	4.726,20
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan - LRA	1.313.555.000,00	1.419.432.806,00	108,06
	Total	15.904.209.636,00	27.148.316.318,00	170,70



Tabel V.1.25 **kenaikan/Penurunan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Kategori	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Ket. (2023/2022) (%)
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi - LRA	13.986.635.747,00	15.016.724.263,00	(1.030.088.616,00)
2.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Lendert - LRA	231.832.912,00	258.334.073,00	(25.001.161,00)
3.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalti - LRA	980.051.666,00	1.639.733.356,00	(779.681.690,00)
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LRA	10.650.863.387,00	25.547.600,00	10.624.315.787,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan - LRA	1.419.432.606,00	1.968.311.030,00	(538.878.394,00)
	Total	27.148.316.318,000	18.897.650.392,000	8.250.665.926,00

c) Dana Alokasi Umum

Anggaran pendapatan dana alokasi umum tahun 2023 adalah sebesar Rp452.753.785.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp452.753.785.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi dana alokasi umum tahun 2022 maka realisasi dana alokasi umum tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.855.824.438,00 atau naik sebesar 3,63%.

Tabel V.1.26 **Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2023**

No	Kategori	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	452.753.785.000,00	452.753.785.000,00	100,00
	Total	452.753.785.000,00	452.753.785.000,00	100,00

Tabel V.1.27 **Kenaikan/ Penurunan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Kategori	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Ket. (2023/2022) (%)
1.	Dana Alokasi Umum - LRA	452.753.785.000,00	437.174.072.000,00	15.578.713.000,00
	Total	452.753.785.000,00	437.174.072.000,00	15.579.713.000,00

d) Dana Alokasi Khusus

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus adalah sebesar Rp156.192.279.241,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp146.653.640.399,00 atau sebesar 93,89%. Apabila dibandingkan dengan realisasi dana alokasi khusus tahun 2022 maka realisasi dana alokasi khusus tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.083.205.881,00 atau turun sebesar 13,09%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus tahun 2023 adalah sebagai berikut:

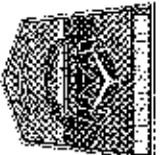


Tabel V.1.28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023

No	Kategori	Keterangan	Anggaran 2023 (Rp)		Realisasi 2023 (Rp)		Keterlambatan (Rp)	Keterlambatan (%)
			IPA	IPB	IPA	IPB		
1.	Dana Alokasi Khusus (DAK)		156.192.272.241,00		146.651.640.399,00		93,89	
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		1.451.518.000,00		1.374.625.780,00		94,70	
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		9.795.193.000,00		9.501.537.287,00		97,00	
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		2.472.303.000,00		2.299.561.200,00		92,60	
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Pengujian Intervensi-Suntung		7.236.312.000,00		5.925.529.569,00		81,86	
6.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan		23.001.202.000,00		22.829.813.300,00		99,18	
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit		365.734.000,00		304.594.000,00		83,28	
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		259.997.000,00		204.803.271,00		78,77	
9.	DAK Non Fisik-SDS, Reguler		23.508.160.000,00		23.572.290.801,00		99,00	
10.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja		1.950.000.000,00		1.960.000.000,00		100,00	
11.	DAK Non Fisik-TPG PNSD		55.582.387.241,00		53.709.805.493,00		96,71	
12.	DAK Non Fisik-Tansik Guru PNSD		1.025.002.000,00		837.544.420,00		78,64	
13.	DAK Non Fisik-TRG PNSD		4.573.851.000,00		4.873.851.000,00		100,00	
14.	DAK Non Fisik-BOP PAUD		2.230.200.000,00		2.459.787.000,00		110,74	
15.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		2.020.400.000,00		2.020.400.000,00		100,00	
16.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		8.313.398.000,00		8.410.739.291,00		77,11	
17.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi-Uskesmas		8.070.837.000,00		5.649.655.900,00		70,00	
18.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		2.633.824.000,00		1.565.844.450,00		50,90	
19.	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal		490.400.000,00		455.445.597,00		95,11	
20.	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		231.075.000,00		201.815.000,00		87,33	
21.	DAK Non Fisik-PK2LUK		420.370.000,00		373.036.250,00		88,73	
	Total		312.384.558.482,00		293.303.280.799,00		93,89	

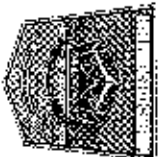
Tabel V.1.29 Kenaikan/Perurunan Realisasi Pendapatan Alokasi Khusus Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Kategori	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Ketertinggalan (Rp)	Ketertinggalan (%)
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.374.625.780,00	947.799.439,00	(426.826.247,00)	(45,03)
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.501.537.287,00	23.778.086.100,00	14.276.528.813,00	60,04
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.239.551.200,00	17.308.967.300,00	15.079.416.100,00	86,77
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	8.777.863.393,00	8.777.863.393,00	100,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kelamin	0,00	3.668.569.223,00	3.668.569.223,00	100,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengawasan	0,00	4.074.871.956,00	4.074.871.956,00	100,00



**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN BELANJA DANA
DASAR (RPJMD) KABUPATEN KEPULAUAN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Revisi 2023 (Rp)	Kepala S. Revisi (Rp)	Revisi (Rp)
	Penurunan AXL dan AKB				
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Pengjalan Intervensi Stunting	5.925.529.369,00	177.890.250,00	(5.747.639.119,00)	(8.229,19)
a.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Pengjalan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	510.817.000,00	510.817.000,00	100,00
a.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	0,00	443.693.375,00	443.693.375,00	100,00
10.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.929.813.300,00	9.243.698.942,00	(13.686.107.458,00)	(148,05)
11.	DAK Fisik-Bidang Minum-Reguler	0,00	7.168.080.009,00	7.168.080.009,00	100,00
12.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	5.412.783.000,00	5.412.783.000,00	100,00
13.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	1.200.076.143,00	1.200.076.143,00	100,00
14.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pengendalian Penyakit	304.594.000,00	0,00	(304.594.000,00)	0,00
15.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pengkatan Sistem Kesehatan	204.803.271,00	0,00	(204.803.271,00)	0,00
16.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	28.572.290.501,00	23.871.223.294,00	398.932.493,00	1,66
17.	DAK Non Fisik-BOS Kineia	1.990.000.000,00	920.000.000,00	(1.070.000.000,00)	(111,88)
18.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	\$3.709.805.433,00	49.390.073.742,00	(4.319.731.751,00)	(8,74)
13.	DAK Non Fisik-Tansil Guru PNSD	837.544.420,00	750.187.500,00	(87.356.920,00)	(11,84)
20.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.873.851.000,00	4.361.144.000,00	(522.707.000,00)	(12,01)
21.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.489.787.000,00	2.302.200.000,00	(187.587.000,00)	(7,27)
22.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesehatan	2.020.400.000,00	1.093.500.000,00	(926.900.000,00)	(84,76)
22.	DAK Non Fisik-SOKK3-BOK	8.410.739.281,00	146.691.270,00	(8.264.048.011,00)	(4270,22)
23.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	5.849.655.900,00	0,00	(5.849.655.900,00)	0,00
24.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.595.844.450,00	2.017.879.200,00	432.034.750,00	21,41
25.	DAK Non Fisik-PAZUKM	0,00	377.182.000,00	377.182.000,00	100,00
26.	DAK Non Fisik-	488.446.537,00	1.67.531.750,00	(298.914.847,00)	(78,42)



No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (%)	
	Fasilitas Penanaman Modal				
27.	DAK Non Fisik-Dana Kelangkaan Pangan Dan Perairan	201.815.000,00	535.766.500,00	333.951.500,00	62,33
28.	DAK Non Fisik-PR2LUMK	373.006.250,00	0,00	(373.006.250,00)	0,00
	Total	146.651.640.399,00	166.734.846.280,00	22.083.205.881,00	113,09

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2023 adalah sebesar Rp41.852.235.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.852.235.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.231.084.000,00, atau turun sebesar 11,25%.

Tabel V.1.30 Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi (%)
1.	Dana Penyesuaian - LRA	41.852.235.000,00	41.852.235.000,00	100,00
	Total	41.852.235.000,00	41.852.235.000,00	100,00

Tabel V.1.31 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2023 dan Tahun 2022

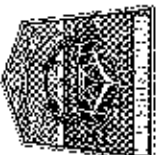
No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Realisasi (%)
1.	Dana Penyesuaian - LRA - Dana Desa	41.852.235.000,00	37.621.151.000,00	4.231.084.000,00	11,25
	Total	41.852.235.000,00	37.621.151.000,00	4.231.084.000,00	11,25

3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2023 merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target sebesar Rp54.646.679.610,00 dengan realisasi sebesar Rp39.025.311.603,00 atau 71,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2022 maka realisasi transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp20.546.836.275,00, atau turun sebesar 34,49% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi (%)
1.	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	54.646.679.610,00	39.025.311.603,00	71,41
	Total	54.646.679.610,00	39.025.311.603,00	71,41



Tabel V.1.33 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	39.025.311.603,00	59.572.147.878,00	(20.546.836.275,00)	(34,49)
	Total	39.025.311.603,00	59.572.147.878,00	(20.546.836.275,00)	(34,49)

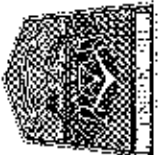
Dari seluruh realisasi tahun 2023 untuk penyetoran bagi hasil pajak provinsi, terdapat penyaluran Kurang Bayar pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2022 sejumlah Rp5.404.187.680,00 dan penyaluran bagi hasil Reguler tahun 2023 Rp33.621.123.923,00.

Tabel V.1.34 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	15.473.115.243,00	7.869.826.052,00	50,84
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	0,00	1.154.959.077,00	0,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	5.273.752.640,00	9.184.188.052,00	173,79
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	0,00	661.047.607,00	0,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	21.379.290.239,00	2.974.800.144,00	13,93
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	0,00	1.891.359.974,00	0,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	344.765.275,00	2.607.083.089,00	757,57
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	0,00	27.398.962,00	0,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	12.179.956.213,00	11.004.126.586,00	90,37
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	0,00	1.869.422.360,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Reguler	54.646.879.610,00	33.621.123.923,00	61,52
	Jumlah Penerimaan Kurang Bayar	0,00	5.404.187.680,00	0,00
	Total	54.646.879.610,00	39.025.311.603,00	71,41

Tabel V.1.35 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	7.869.826.052,00	11.251.505.102,00	(3.384.679.050,00)	(30,08)
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	1.154.959.077,00	2.536.060.330,00	(1.381.101.253,00)	(54,45)
2.	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	9.184.188.052,00	5.546.303.234,00	3.617.884.818,00	65,23
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	661.047.607,00	1.913.553.839,00	(1.292.506.232,00)	(65,45)



No	Berkas	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Saldo Anggaran Lebih (Rp)	
3	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Belanja Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	2.978.900.144,00	17.630.058.992,00	(14.651.158.788,00)	(83,10)
4	Kurang Besar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	1.691.359.974,00	7.128.667.832,00	(5.437.307.858,00)	(76,27)
4	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	2.607.088.089,00	284.925.888,00	2.322.162.201,00	884,08
4	Kurang Besar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	27.396.882,00	92.911.368,00	(65.514.486,00)	(56,45)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	11.004.126.586,00	11.636.138.436,00	(632.011.849,00)	(4,61)
	Kurang Besar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	1.869.423.360,00	1.732.022.127,00	137.399.233,00	9,82
	Jumlah Penerimaan Reguler Bayar	33.621.123.923,00	46.228.931.392,00	(12.607.807.469,00)	(27,27)
	Jumlah Penerimaan Kurang Bayar	5.404.187.680,00	13.943.216.486,00	(7.939.028.806,00)	(59,50)
	Total	39.025.311.603,00	59.572.147.878,00	(20.546.836.275,00)	(34,49)

4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan keuangan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp7.000.000000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.000.000000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi bantuan keuangan tahun 2022 maka realisasi bantuan keuangan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.500.000.000,00 atau turun sebesar 39,13% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.36 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023

No	Berkas	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Saldo Anggaran Lebih (Rp)
1.	Bantuan Keuangan - LRA	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00
	Total	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00

Tabel V.1.37 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Berkas	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	
1.	Bantuan Keuangan - LRA	7.000.000.000,00	11.500.000.000,00	(4.500.000.000,00)	(39,13)
	Total	7.000.000.000,00	11.500.000.000,00	(4.500.000.000,00)	(39,13)

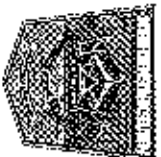
C. Lain-lain Pendapatan

Berkas yang Sah - LRA

31 Des. 2023
(Rp)
10.011.020.023,00

31 Des. 2022
(Rp)
7.818.208.106,00

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2023 adalah pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mempunyai target sebesar Rp9.875.150.000,00



dengan realisasi sebesar Rp10.011.920.023,00 atau 101,38%. Apabila dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2022 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.183.711.917,00, atau naik sebesar 27,90%.

Rincian lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.38 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya – LRA Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi % (2023/2023)
1.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LRA	9.575.150.000,00	10.011.920.023,00	107,38
	Total	9.575.150.000,00	10.011.920.023,00	107,38

Tabel V.1.39 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya – LRA Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LRA	7.828.208.106,00	7.928.208.106,00	2.183.711.917,00
	Total	7.828.208.106,00	7.928.208.106,00	2.183.711.917,00

Sisa Belanja **31 Des 2023** **31 Des 2022**
(Rp) **(Rp)** **(Rp)**
785.417.181.448,28 **785.417.181.448,28** **113.620.609.308,77**

Realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp785.417.181.448,28 atau 93,45% dari anggaran belanja sebesar Rp840.407.648.873,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp813.620.609.308,77 terjadi penurunan sebesar Rp28.203.427.855,49 atau 3,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi % (2023/2023)
1.	BELANJA OPERASI	630.532.104.284,00	645.584.117.010,28	83,48
2.	BELANJA MODAL	129.875.544.588,00	139.713.084.438,00	93,84
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	150.000.000,00	15,00
	Jumlah	860.407.648.873,00	785.417.181.448,28	93,45

A. Belanja Operasi **31 Des 2023** **31 Des 2022**
(Rp) **(Rp)** **(Rp)**
683.514.111.010,28 **683.514.111.010,28** **618.493.257.911,00**

Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp645.554.117.010,28 atau 93,48% dari total anggaran Belanja Operasi sebesar Rp690.532.104.284,00. Dibandingkan dengan realisasi



Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp608.487.257.791,0 terjadi kenaikan sebesar Rp37.066.859.219,18 atau 6,09% yang terdiri dari sebagai berikut:

Tabel V.1.41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Jumlah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	303.671.094.050,00	375.400.727.878,95	95,36	375.198.145.727,89	95,35
2.	Belanja Barang dan Jasa	276.197.796.290,00	249.419.979.463,83	90,30	224.260.350.259,27	81,16
3.	Belanja Hibah	20.673.213.944,00	20.733.409.978,00	100,23	9.058.761.804,00	43,86
	Jumlah	600.542.104.284,00	645.554.117.010,78	93,48	608.487.257.791,19	94,63

Rincian realisasi masing-masing jenis belanja operasi tersebut dapat ditrakan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp375.400.727.878,95 atau 95,35% dari total anggaran belanja pegawai sebesar Rp392.114.314.229,00. Dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp375.198.145.727,89 terjadi kenaikan sebesar Rp202.582.151,12 atau 0,05% dengan rincian sebagai berikut:

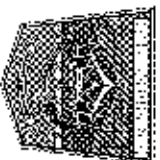
Tabel V.1.42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Jumlah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	231.746.797.716,00	228.508.897.528,00	97,73	223.722.201.461,00	96,53
2.	Belanja Tambahan Parahasilan ASN	72.058.866.139,00	67.328.077.992,00	91,61	73.876.662.813,50	102,44
3.	Tambahan Penhasilan berdasarkan Perimbangan Ojibati Lainnya ASN	78.291.111.779,00	71.636.306.971,95	91,34	67.482.228.576,33	86,32
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.172.806.740,00	9.107.343.370,00	99,28	9.323.586.803,00	101,63
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/MKDH	334.052.855,00	315.436.017,00	94,42	283.592.074,00	84,89
6.	Belanja Penorinaan Lainnya KDH/MKDH	510.890.000,00	510.876.000,00	99,99	510.876.000,00	100,00
	Jumlah	392.114.314.229,00	375.400.727.878,95	95,35	375.198.145.727,89	94,63

Rincian realisasi masing-masing jenis belanja pegawai tersebut dapat ditrakan sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp226.503.687.528,00 atau 97,73% dari total anggaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp231.746.797.716,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp223.722.201.461,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.781.486.067,00 atau 1,24% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.1.43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Anggaran 2023 (Rp)
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	173.233.900,16	169.411.780.784,00	97,79	163.871.854.870,00
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.352.351.646,00	16.792.779.288,00	96,99	16.381.303.880,00
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.910.988.603,00	3.741.440.563,00	95,65	3.796.998.742,00
4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.570.813.417,00	10.514.325.800,00	99,46	10.505.802.400,00
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.453.085.766,00	3.192.075.866,00	92,44	3.021.445.000,00
6.	Belanja Tunjangan Geras ASN	10.383.552.542,00	10.670.148.669,00	97,14	10.526.657.500,00
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	240.433.789,00	219.811.445,00	91,33	203.277.526,00
8.	Belanja Pembelian Gaji ASN	7.512.595,00	2.659.186,00	34,93	2.620.727,00
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.619.010.133,00	10.587.136.627,00	99,70	11.013.947.046,00
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	376.000.000,00	346.412.980,00	92,13	386.381.618,00
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.049.000.000,00	1.036.238.317,00	99,68	1.082.012.143,00
	Jumlah	231.746.797.716,00	226.503.687.528,00	97,73	223.722.201.461,00

b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

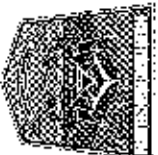
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2023 sebesar Rp67.328.077.992,00 atau 91,61% dari total anggaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp73.487.263.460,00. Dibandungkan dengan tahun 2022 sebesar Rp73.875.662.813,50 terjadi penurunan sebesar Rp6.547.584.821,50 atau 8,86% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	73.487.263.460,00	67.328.077.992,00	91,61	73.790.377.813,50
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	96.285.000,00
	Jumlah	73.487.263.460,00	67.328.077.992,00	91,61	73.875.662.813,50

c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp71.635.306.971,95 atau 91,34% dari total anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp78.419.494.279,00. Dibandungkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp67.482.226.576,33 terjadi kenaikan sebesar Rp4.153.080.395,62 atau 6,15%.



Tabel V.1.45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektiv Lainnya ASN

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	430.202.834,00	387.280.965,00	89,82	334.112.308,00
2.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	37.815.000,00	15.901.853,00	49,66	18.041.000,00
3.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58.889.382.550,00	54.767.456.700,00	93,00	52.158.718.813,00
4.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.873.851.000,00	4.854.852.900,00	99,61	4.346.827.100,00
5.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tambahan) Guru PNSD	1.066.000.000,00	960.300.000,00	90,14	1.075.500.000,00
6.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.606.227.195,00	5.719.818.838,95	75,18	4.278.237.356,33
7.	Belanja Honorarium	5.350.915.700,00	4.828.745.710,00	90,14	4.938.240.000,00
8.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	171.900.000,00	112.250.000,00	65,29	381.450.000,00
	Jumlah	78.419.494.279,00	71.635.305.971,95	91,34	67.482.226.576,33

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.107.343.370,00 atau 99,28% dari total anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.172.605.740,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.323.586.803,00 terjadi penurunan sebesar Rp 216.243.433,00 atau 2,31%.

Tabel V.1.46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Uang Repreresntasi DPRD	567.540.000,00	567.540.000,00	100,00	567.540.000,00
2.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	59.505.600,00	53.771.800,00	90,27	55.677.300,00
3.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	68.943.840,00	66.816.080,00	97,05	65.577.060,00
4.	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00	48.132.000,00
5.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	814.233.000,00
6.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	108.083.900,00	83.859.300,00	77,60	83.859.300,00
7.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	11.784.150,00	0,00	0,00	0,00
8.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
9.	Belanja Tunjangan Fasilitas DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	472.500.000,00
10.	Belanja Pembinaan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	55.147.960,00	50.134.188,00	90,90	50.033.107,00
11.	Belanja Tunjangan	1.831.255.293,00	1.825.356.992,00	99,67	1.810.735.036,00



No	Jenis	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Keselamatan Pimpinan dan Anggota DPRD				
12.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.298.900.000,00	3.298.900.000,00	100,00	3.471.300.000,00
13.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	9.172.605.740,00	9.107.343.370,00	99,28	9.323.586.803,00

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp315.436.017,00 atau 94,42% dari total anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH daerah sebesar Rp334.052.855,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp283.592.074,00 terdapat kenaikan sebesar Rp31.843.943,00 atau 11,22%.

Tabel V.1.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.780.000,00	54.500.000,00	98,94	54.800.000,00
2.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	6.552.000,00	100,00	6.552.000,00
3.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
4.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.283.280,00	6.093.280,00	98,81	5.214.240,00
5.	Belanja Tunjangan Ppn/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	288.058,00	488.058,00	70,10	429.414,00
6.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	17.402,00	1.360,00	7,81	1.200,00
7.	Belanja Urus Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.600.000,00	5.468.240,00	99,38	5.010.720,00
8.	Belanja Urus Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.000,00	112.320,00	97,66	102.960,00
9.	Belanja Urus Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.000,00	336.960,00	99,10	306.880,00
10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	158.116.137,00	147.634.801,00	88,95	111.284.660,00
11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1.869.000,00
	Jumlah	334.052.855,00	315.436.017,00	94,42	283.592.074,00

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp510.876.000,00 atau 99,99% dari total anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp510.880.000,00. Jumlahnya sama dengan tahun 2022 yang juga terrealisir sebesar Rp510.876.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.1.48 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD
serta KDH/WKDH

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	110.880.000,00
2. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.998.000,00	99,99	399.998.000,00
Jumlah	510.880.000,00	510.878.000,00	99,99	510.878.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp249.419.979.153,33 atau 90,30% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp276.187.796.290,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp224.250.350.259,27 terdapat kenaikan sebesar Rp25.169.628.894,06 atau 11,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabal V.1.49 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1. Belanja Barang	110.710.759.458,00	99.475.775.928,33	89,95	89.272.128.130,27
2. Belanja Jasa	115.425.072.159,00	107.748.274.124,00	93,34	83.534.193.413,52
3. Belanja Perumahan	2.738.547.720,00	2.575.207.950,00	94,10	7.842.348.047,48
4. Belanja Perjalanan Dinas Belanja Uang darat/air Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.470.871.629,00	35.500.721.389,00	83,58	41.066.868.641,00
5. Belanja Uang darat/air Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.844.545.283,00	4.119.898.693,00	85,04	2.734.072.027,00
Jumlah	276.187.796.290,00	249.419.979.153,33	90,30	224.250.350.259,27

Rincian realisasi masing-masing jenis belanja barang dan jasa tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Belanja Barang

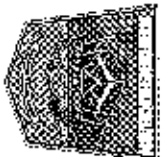
Realisasi Belanja Barang Rp99.475.775.928,33 atau 89,85% dari total anggaran Belanja Barang sebesar Rp110.710.759.459,00. Dibandungkan dengan realisasi Belanja Bahan Habis Pakai tahun 2022 sebesar Rp89.272.128.130,27 terdapat kenaikan sebesar Rp10.203.647.798,06 atau 11,42% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1. Belanja Barang Pakai Habis	110.641.657.959,00	99.411.753.063,33	89,95	89.239.537.601,27
2. Belanja Barang Tak Habis Pakai	69.701.800,00	64.022.925,00	91,85	32.590.529,00
Jumlah	110.710.759.459,00	99.475.775.928,33	89,85	89.272.128.130,27

1) Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Rp99.411.753.063,33 atau 89,85% dari total



anggaran Belanja Barang Rp110.641.057.959,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bahan Habis Pakai tahun 2022 sebesar Rp83.421.409.460,45 terdapat kenaikan sebesar Rp15.990.343.542,88 atau 19,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Y.1.51 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	Realisasi
1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.324.924.589,00	1.299.717.870,00	98,09	1.175.561.258,00
2.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	592.395.877,00	570.668.344,55	95,20	564.157.761,00
3.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Palunas	6.849.412.667,00	5.982.800.593,00	86,47	4.822.336.110,45
4.	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.480.000,00	10.480.000,00	100,00	9.345.000,00
5.	Belanja Bahan-Bahan/Bibir/ Tansaran	139.628.126,00	139.414.961,00	99,84	215.199.300,00
6.	Belanja Bahan/isi/Tabung Pemadam Kabakaran	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
7.	Belanja Bahan-Isi/Tabung Gas	994.503.177,00	987.278.577,00	99,27	512.383.000,00
8.	Belanja Bahan-Bahan/Bibir/ Termal/Bibir/ Ikan	229.390.400,00	209.445.200,00	91,07	141.250.000,00
9.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.238.050.693,00	2.380.044.226,00	73,50	12.876.756.658,00
10.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.002.689.897,00	2.849.933.527,00	94,91	2.775.308.289,00
11.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kocok/leran	291.303.632,00	291.303.632,00	100,00	75.603.382,00
13.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	0,00
14.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Farmasi	2.700.000,00	2.700.300,00	100,00	0,00
15.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
16.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	26.690.000,00	26.615.000,00	99,71	1.392.800,00
17.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.939.000,00	2.999.000,00	100,00	0,00
18.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	94.331.297,00	1.431.297,00	4,16	3.540.000,00
19.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.389.822.838,00	4.560.213.827,97	87,86	0,00
20.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.751.481.243,00	1.470.669.522,00	83,96	1.479.176.578,00
21.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.614.498.345,00	6.025.383.744,00	91,09	5.422.227.564,00
22.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	305.345.000,00	275.252.169,00	89,26	0,00
23.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Sarana Komputer	16.915.400,00	16.915.400,00	100,00	0,00
24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	192.145.698,00	192.145.698,00	100,00	0,00
25.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	872.472.412,00	757.785.560,00	90,29	0,00
26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Sertifikat/Dinas	2.727.500,00	2.727.500,00	100,00	0,00
27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Sertifikat/Dinas Pendukung Lainnya	871.625.168,00	267.814.168,00	30,72	222.922.948,00



REKAPITULASI HASIL AKTIVASI DAN MONITORING
PENYUNDAH KEMERDEKAAN ATAP SURUNG SIALAM
LEMBING ANGGARAN 2015

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Revisi (Rp)	%	Revisi (Rp)
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	38: 120.970,00	380.562.891,00	99,95	120.744.269,00
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	417.422.803,00	400.578.552,00	95,36	0,00
30	Belanja Obat-Obatan-Obat	18.233.195.788,00	17.222.513.972,00	89,54	5.978.585.535,00
31	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.053.674.145,00	1.789.257.455,00	87,12	22.464.000,00
32	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.214.949.986,00	27.619.594.785,81	97,88	28.431.872.561,00
33	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	883.508.422,00	867.175.220,00	98,15	669.792.293,00
34	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka-Strategis/Berjangka-Strategis	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
35	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.229.864.667,00	1.221.140.317,00	99,29	1.84: 257.264,00
36	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	233.651.000,00	232.529.100,00	99,51	203.583.675,00
37	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	44.076.500,00	44.076.500,00	100,00	38.284.000,00
38	Belanja Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00	118.000,00
39	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.052.407.401,00	4.397.913.135,00	87,04	4.306.380.305,00
40	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.613.007.200,00	2.283.370.667,00	98,86	1.909.228.618,00
41	Belanja Perambah Daya Taban Tabun	0,00	0,00	0,00	80.781.000,00
42	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.922.320.200,00	1.922.320.200,00	100,00	1.345.922.000,00
43	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.280.265.662,00	1.202.571.952,00	93,93	139.533.750,00
44	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.841.594.065,00	7.145.330.225,09	72,60	4.208.418.305,00
45	Belanja Pakatan Dinas KDH dan WKDH	355.000.000,00	354.426.420,00	99,83	356.513.000,00
46	Belanja Pakatan Dinas dan Ansur Pimpinan dan Anggota DPRD	322.500.000,00	222.500.000,00	100,00	424.612.500,00
47	Belanja Pakatan Dinas Harian (PDH)	213.794.637,00	213.594.637,00	99,90	10.000.000,00
48	Belanja Pakatan Dinas Lapangan (PDL)	1.499.283.719,00	1.479.827.324,00	98,68	672.727.880,00
49	Belanja Pakatan Dinas Upacara (PDU)	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00	0,00
50	Belanja Pakatan Penyelamatan	8.798.991,00	8.798.991,00	100,00	450.000,00
51	Belanja Pakatan Teknik	600.000,00	300.000,00	100,00	0,00
52	Belanja Pakatan Pelatihan Kerja	31.600.000,00	31.592.000,00	99,97	71.760.000,00
53	Belanja Pakatan Kerja Laboratorium	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	0,00
54	Belanja Pakatan Asst Daerah	162.268.333,00	161.983.963,00	99,81	145.049.999,00
55	Belanja Pakatan Batik Tradisional	467.276.000,00	462.774.545,00	98,03	106.400.000,00



No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
56.	Belanja Paksiian Diaharga	558.473.097,00	505.145.887,00	90,81	695.950.284,00
57.	Belanja Pakelan Paslab:ake	180.516.200,00	180.315.853,00	99,98	17.300.530,00
58.	Belanja Pakelan Jasa:Serf	1.138.000.000,00	463.815.000,00	40,71	1.300.000,00
	Jumlah	1.110.641.057.989,00	99.411.753.003,33	89,85	83.421.409.480,45

2) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Rp64.022.925,00 atau 91,85% dari total anggaran Belanja Barang sebesar Rp69.701.500,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bahan Habis Pakai tahun 2022 sebesar Rp32.590.529,00 terdapat kenaikan sebesar Rp31.432.396,00 atau 96,44% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.52 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai

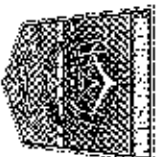
No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	47.554.500,00	47.554.500,00	100,00	20.458.904,00
2.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	6.818.800,00	6.818.800,00	100,00	0,00
3.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	15.328.200,00	9.649.625,00	62,95	11.616.625,00
4.	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	515.000,00
	Jumlah	69.701.500,00	64.022.925,00	91,85	32.590.529,00

b. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp107.748.274.134,00 atau 93,34% dari total anggaran Belanja Jasa sebesar Rp115.425.072.199,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bahan Material tahun 2022 sebesar Rp83.334.133.413,52 terdapat kenaikan sebesar Rp24.414.140.720,48 atau 29,29% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Jasa Kantor	85.008.288.223,00	78.724.581.857,00	92,53	59.013.789.703,52
2.	Belanja Iuran	20.849.234.512,00	20.655.342.088,00	98,40	18.035.576.600,00
3.	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.846.094.900,00	2.532.050.562,00	88,96	1.086.622.025,00
5.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.624.921.950,00	1.418.405.500,00	87,29	982.225.155,00
6.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	370.015.920,00	79.900.000,00	21,59	1.564.578.480,00
7.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.666.163.800,00	3.484.383.545,00	95,02	1.202.188.080,00
8.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	44.350.000,00	42.600.000,00	94,98	0,00
10.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	874.322.084,00	790.400.584,00	90,33	1.384.729.490,00
11.	Belanja Jasa Insentif bagi	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00



No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Pegawai Non ASN atas Perhitungan Retribusi Daerah				
	Jumlah	115.425.072.189,00	107.742.274.134,00	93,34	83.334.133.413,52

Adapun Rincian Belanja Jasa Sebagai Berikut:

1) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp78.744.581.857,00 atau 92,63% dari total anggaran Belanja Jasa sebesar Rp85.008.289.233,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2022 sebesar Rp59.016.769.703,52 terdapat kenaikan sebesar Rp19.727.812.153,48 atau 33,42% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.413.597.499,00	7.837.620.000,00	85,66	2.180.458.000,00
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekertaris Tim Pelaksana Kegiatan	2.021.453.656,00	1.735.548.656,00	85,85	1.230.594.558,12
3.	Honorarium Pembicara/Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	0,00
4.	Honorarium Penulisan atau Pandaimonggar	429.182.100,00	412.762.950,00	96,17	469.261.496,00
5.	Honorarium Pohanawan	1.235.550.000,00	1.176.790.000,00	95,23	104.900.000,00
5.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Inkomasi dan Pengelola Website	6.160.000,00	6.160.000,00	100,00	360.000,00
7.	Honorarium Penyelenggara: Ujian	66.400.000,00	66.400.000,00	100,00	30.992.000,00
8.	Honorarium Penulisan Surat Sosial Tingkat Provinsi Kabupaten atau Kota	49.900.000,00	49.400.000,00	98,99	2.240.000,00
9.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	46.552.000,00	46.552.000,00	100,00	79.100.000,00
10.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	497.800.000,00	462.000.000,00	92,84	442.600.000,00
11.	Belanja Jasa Tenaga Pencerdikan	2.106.791.000,00	2.106.791.000,00	100,00	2.550.094.000,00
12.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	27.733.862.382,00	27.194.662.362,00	98,06	20.963.706.116,40
13.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	174.442.400,00	24.802.400,00	14,21	24.390.222,00
14.	Belanja Jasa Tenaga Perancangan Prasana dan Sarana Umum	1.862.956.000,00	1.867.955.000,00	93,87	1.492.147.000,00
15.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	990.000.000,00	940.500.000,00	95,00	899.400.000,00
16.	Belanja Jasa Tenaga Perpadam Kebakaran dan Penyelamatan	522.000.000,00	522.000.000,00	100,00	460.200.000,00
17.	Belanja Jasa Tenaga Penerimaan Sosial	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN PENDANAAN
1. RENCANA ANGGARAN BELANJA

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
18.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	0,00	0,00	300,000,00
19.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	54,000,000,00	54,000,000,00	100,00	26,000,000,00
20.	Belanja Jasa Tenaga Atsip dan Perpusakaan	34,800,000,00	34,800,000,00	100,00	29,400,000,00
21.	Belanja Jasa Tenaga Keselamatan dan Kebudayaan	795,545,000,00	737,423,000,00	92,62	384,674,000,00
22.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,420,140,000,00	4,385,640,000,00	99,44	3,249,540,000,00
23.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	297,470,000,00	297,470,000,00	100,00	270,350,000,00
24.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	43,200,000,00	43,200,000,00	100,00	177,385,320,00
25.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,789,661,500,00	1,436,943,939,00	80,23	1,638,792,150,00
26.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3,334,673,000,00	3,332,173,000,00	99,92	2,890,997,400,00
27.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1,591,500,000,00	1,561,300,000,00	98,14	1,444,550,000,00
28.	Belanja Jasa Tenaga Sufir	1,843,400,000,00	1,623,400,000,00	88,19	1,254,100,000,00
29.	Belanja Jasa Tenaga Masaak	1,494,000,000,00	1,476,000,000,00	99,79	1,383,550,000,00
30.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi	2,295,792,992,00	2,029,173,943,00	88,38	1,832,159,459,00
31.	Belanja Jasa Tenaga Peromban/Perandingan	3,066,743,000,00	1,287,892,000,00	41,99	62,620,000,00
32.	Belanja Jasa Tara Rias	26,600,000,00	24,700,000,00	92,48	23,200,000,00
33.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1,323,750,000,00	1,258,226,890,00	95,05	821,984,200,00
34.	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Belanja Jasa Perancangan Instalasi Telepor, Air, dan Listrik	105,071,000,00	86,939,900,00	82,76	132,915,746,00
36.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5,870,000,00	5,870,000,00	100,00	3,600,000,00
37.	Belanja Jasa Penujisan dan Penarumahan	1,500,000,00	1,500,000,00	100,00	0,00
38.	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	14,400,000,00	14,400,000,00	100,00	45,600,000,00
39.	Belanja Jasa Pelayanan Kaatipari	2,000,000,00	2,000,000,00	100,00	0,00
40.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2,787,000,000,00	2,766,849,550,00	99,28	163,318,000,00
41.	Belanja Jasa Konduktur Asosiasi	267,500,000,00	116,282,787,00	43,47	30,000,000,00
42.	Belanja Jasa Pemunhan Paksiat, Ahat Keselamatan dan Kebudayaan, serta Ahat Ruzah Tangga	1,610,000,00	1,610,000,00	100,00	11,814,000,00
43.	Belanja Jasa Kalibrasi	467,078,000,00	257,566,019,00	55,14	53,612,000,00
44.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	462,645,600,00	352,939,681,00	76,28	76,600,000,00
45.	Belanja Jasa Pembersihan Pengendalian Hama dan Furnigasi	200,000,00	200,000,00	100,00	900,000,00
46.	Belanja Jasa Klian/Reklame Film, dan Pemotan	736,000,000,00	593,361,400,00	80,61	147,463,000,00
47.	Belanja Tagihan Telepon	268,590,104,00	234,823,060,00	87,12	298,987,939,00
48.	Belanja Tagihan Air	342,325,212,00	423,808,510,00	79,25	482,594,566,00
49.	Belanja Tagihan Listrik	8,770,609,085,00	7,822,679,240,00	89,76	6,679,311,326,00
50.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	94,106,000,00	129,570,000,00	94,61	337,925,000,00
51.	Belanja	3,328,076,552,00	3,081,899,300,00	92,60	2,877,033,922,00



No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (%)
	Kawat/Faksimil/Internet/TV			
	Belanggagan			
52.	Belanja Paket/Pengiriman	15.949.674,00	6.725.240,00	35,89
53.	Belanja Pemeliharaan Daya	22.030.350,00	20.043.400,00	91,10
54.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	6.725.000,00	6.725.000,00	100,00
55.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	442.102.850,00	235.200.850,00	53,20
56.	Belanja Pengalangan Air Limbah	19.360.000,00	19.360.000,00	100,00
57.	Belanja Larbur	1.683.401.500,00	1.834.838.500,00	96,47
58.	Belanja Medical Check Up	146.000.000,00	68.641.950,00	47,01
	Jumlah	85.008.289.233,00	78.744.581.857,00	92,63
			59.016.769.703,52	

2) Belanja Luran Jaminan Asuransi

Realisasi Belanja Luran Jaminan Asuransi sebesar Rp20.655.342.088,00 atau 98,40% dari total anggaran Belanja Luran Jaminan Asuransi sebesar Rp20.989.204.512,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Luran Jaminan Asuransi tahun 2022 sebesar Rp18.095.570.500,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.559.771.588,00 atau 14,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Luran Jaminan Asuransi

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (%)
1.	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Serangkat Desa	619.964.512,00	603.784.300,00	97,38
2.	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.121.980.000,00	19.897.912.240,00	98,83
3.	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	120.704.845,00	86.155.304,00	71,37
4.	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.545.455,00	77.543.244,00	61,27
	Jumlah	20.989.204.512,00	20.655.342.088,00	98,40
			18.095.570.500,00	

3) Belanja Sewa Tanah

Belanja Sewa Tanah sebesar tahun 2023 tidak ada dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solik Selatan. Sementara tahun 2022 terrealisasi sebesar Rp1.950.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (%)
1.	Belanja Sewa Tanah Sempunan Perumahan/Gesung Terpadu Tingsel	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gasung Pendagangan/Persewaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
			1.950.000,00	



4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.532.050.562,00 atau 88,96% dari total anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.846.094.900,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp1.086.622.025,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.445.428.537,00 atau 133,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Sewa Alat Pengerak	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	530.000,00
2.	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
3.	Belanja Sewa Electric Generating Set	10.400.000,00	400.000,00	3,84	9.275.000,00
4.	Belanja Sewa Alat Batu Lainnya	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00
5.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	438.623.900,00	290.851.900,00	66,38	98.744.800,00
6.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.380.000,00	50.380.000,00	100,00	7.835.000,00
9.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.865.000,00	1.865.000,00	100,00	0,00
10.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
11.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
12.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	77.500.000,00	60.000.000,00	64,51	128.900.000,00
13.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	302.261.000,00	203.358.202,00	92,40	407.386.415,00
14.	Belanja Sewa Alat Pendingin	10.000.000,00	8.786.000,00	87,36	5.712.000,00
15.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	137.500.000,00	135.354.860,00	98,43	46.082.300,00
16.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	588.800.000,00	588.854.000,00	28,63	144.296.000,00
17.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	66.440.000,00
18.	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	75.000,00
19.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
20.	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/Olainya	5.925.000,00	5.925.000,00	100,00	1.802.310,00
21.	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/Olainya	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
22.	Belanja Sewa Peralatan Umum	232.890.000,00	209.077.500,00	89,73	172.412.800,00
23.	Belanja Sewa Personal Computer	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24.	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	2.846.094.900,00	2.532.050.562,00	88,96	1.086.622.025,00

5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Sewa gedung Dan Bangunan sebesar Rp1.418.405.500,00 atau 87,29% dari total anggaran Belanja Sewa gedung Dan Bangunan sebesar



Rp1.624.921.950,00. Ditambahkan dengan realisasi Belanja Sewa gedung Dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp982.225.155,00 terdapat kenaikan sebesar Rp436.180.345,00 atau 44,40% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	136.200.000,00	134.600.000,00	99,55	109.000.000,00
2.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	347.100.000,00	269.432.600,00	77,89	241.786.000,00
3.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
4.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.000,00	600.000,00	100,00	1.450.000,00
5.	Belanja Sewa Rumah Negara Gelangan I	0,00	0,00	0,00	159.134.856,00
6.	Belanja Sewa Rumah Negara Gelangan III	360.868.000,00	356.620.000,00	99,82	373.270.000,00
7.	Belanja Sewa Hotel	790.853.950,00	662.853.000,00	84,88	37.585.500,00
	Jumlah	1.624.921.950,00	1.418.405.500,00	87,29	982.225.155,00

6) Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi sebesar Rp79.900.000,00 atau 21,59% dari total anggaran Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi sebesar Rp370.015.920,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi tahun 2022 sebesar Rp1.554.678.460,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.474.778.460,00 atau 94,86% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	763.194.000,00
2.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Lanscape	90.015.920,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Jasa Konsultansi Pangeawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	14.893.750,00
4.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	50.000.000,00	79.900.000,00	99,87	0,00
5.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terikat Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keahlian	230.000,000,00	0,00	0,00	264.627.500,00
6.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terikat Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keahlian	0,00	0,00	0,00	521.963.210,00
	Jumlah	370.015.920,00	79.900.000,00	21,59	1.554.678.460,00



- 7) **Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**
Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp3.484.393.543,00 atau 95,04% dari total anggaran Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi sebesar Rp3.666.163.600,00. Dibandungkan dengan realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi tahun 2022 sebesar Rp1.202.188.080,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.282.205.463,00 atau 189,83% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perencanaan Peranian dan Perdesaan	0,00	2,00	0,00	49.800.000,00
2.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telumatika	71.818.000,00	68.148.998,00	94,89	39.677.900,00
3.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.308.475.000,00	2.259.214.547,00	97,86	0,00
4.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.285.872.600,00	1.157.050.000,00	89,98	1.082.810.180,00
5.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemateran Pariwisata	0,00	0,00	0,00	49.900.000,00
Jumlah		3.686.163.600,00	3.484.393.543,00	95,04	1.202.188.080,00

8) **Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**

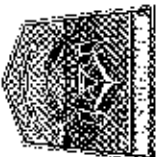
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp42.600.000,00 atau 94,98% dari anggaran sebesar Rp44.850.000,00 sementara tahun sebelumnya tidak ada dianggarkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (%)	
1.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	4.288.000,00	4.360.000,00	100,00	3,00
2.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	40.500.000,00	38.250.000,00	94,44	2,00
3.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		44.888.000,00	42.600.000,00	94,98	0,00

9) **Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**

Realisasi Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp790.400.584,00 atau 90,33% dari total anggaran Belanja Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp874.932.084,00. Dibandungkan dengan realisasi Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan



dan Pelatihah: tahun 2022 sebesar Rp1.394.129.490,00 terdapat penurunan: sebesar Rp603.728.906,00 atau 43,30% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,
Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)		Realisasi 2022 (Rp)	
		2022	2022	2022	2022
1.	Belanja Kursus SingkalPelatihan	369.244.584,00	337.694.584,00	91,70	394.375.490,00
2.	Belanja Bimbingan Teknis	506.667.500,00	452.708.000,00	89,34	294.974.000,00
3.	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	704.940.000,00
	Jumlah	874.912.084,00	790.402.584,00	90,33	1.394.129.490,00

10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp600.000,00 atau 100,00% dari total anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp600.000,00. Sementara tahun sebelumnya tidak ada dianggarkan.

c. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.575.207.859,00 atau 94,10% dari total anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.736.547.720,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp7.843.048.047,48 terdapat penurunan sebesar Rp5.267.840.188,48 atau 67,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.63 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)		Realisasi 2022 (Rp)	
		2022	2022	2022	2022
1.	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.814.900,00	2.814.900,00	100,00	0,00
2.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.386.433.833,00	1.804.810.072,00	91,79	1.879.271.781,48
3.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	619.287.926,00	619.287.926,00	100,00	2.798.169.528,00
4.	Belanja Pemeliharaan Jalinan, Jaringan, dan Irigasi	39.228.962,00	39.228.962,00	100,00	3.158.422.728,00
5.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	109.087.999,00	109.087.999,00	100,00	12.180.000,00
	Jumlah	2.736.547.720,00	2.575.207.859,00	94,10	7.943.048.047,48

d. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp35.500.721.399,00 atau 83,58% dari total anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp42.470.871.629,00, dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp41.066.968.641,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.566.247.242,00 atau 13,55% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.1.64 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

No	Keterangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi (%)	Saldo (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.829.583.184,00	9.631.273.461,00	88,93	9.752.483.986,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	489.162.192,00	443.917.192,00	95,25	94.780.000,00
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.162.591.273,00	25.412.875.746,00	81,54	31.208.119.975,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.055.000,00	5.055.000,00	100,00	11.580.000,00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	42.470.871.629,00	35.500.721.399,00	83,58	41.066.968.641,00

c. **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp4.119.999.833,00 atau 85,04% dari total anggaran Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp 4.844.545.283,00, dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.734.072.027,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.385.927.806,00 atau 50,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.65 Rincian Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Keterangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi (%)	Saldo (Rp)
1.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.079.220.000,00	2.354.674.550,00	76,46	1.691.300.000,00
2.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.765.325.283,00	1.765.325.283,00	100,00	1.042.772.027,00
	Jumlah	4.844.545.283,00	4.119.999.833,00	85,04	2.734.072.027,00

3. **Belanja Hibah**

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp20.733.409.978,00 atau 100,29% dari total anggaran Belanja Hibah tahun 2023 sebesar Rp20.673.213.944,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp9.038.761.804,00 tercapai kenaikan sebesar Rp11.694.648.174,00 atau 129,38% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.66 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023

No	Keterangan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi (%)	Saldo (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.598.983.000,00	17.661.571.345,00	100,36	6.131.47.460,00
2.	Belanja Hibah Dana BOS	2.245.980.000,00	2.241.589.689,00	99,80	2.077.365.100,00



No	Jumlah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	830.248.944,00	830.248.944,00	100,00	830.248.944,00
	Jumlah	20.673.213.944,00	20.733.409.978,00	100,29	9.038.761.804,00

a. **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi tahun 2023 sebesar Rp17.661.571.345,00 atau 100,36 dari anggaran sebesar Rp17.596.985.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp6.131.147.460,00 terdapat kenaikan sebesar Rp11.530.423.885,00 atau 188,06%.

Tabel V.1.67 Rincian Penerima Hibah kepada kepada
Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Jumlah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	15.046.985.000,00	16.111.571.345,00	100,42	4.811.147.460,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	1.850.000.000,00	1.550.000.000,00	100,00	1.320.000.000,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00
	Jumlah	17.596.985.000,00	17.661.571.345,00	100,36	6.131.147.460,00

1. **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi tahun 2023 sebesar Rp16.111.571.345,00 atau 100,40 dari anggaran sebesar Rp16.046.985.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp4.611.147.460 terdapat kenaikan sebesar Rp11.500.423.885,00 atau 249,40%.



Tabel V.1.68 Rincian Penerima Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.292.000.000,00	12.189.999.345,00	99,94	4.811.147.480,00
2.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.788.988.000,00	3.951.572.000,00	105,11	0,00
	Jumlah	16.046.988.000,00	16.111.571.345,00	100,40	4.811.147.480,00

2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi tahun 2023 sebesar Rp1.550.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.550.000.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.320.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp230.000.000,00 atau 17,42%. Adapun rincianya sebagai berikut:

3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tidak dianggarkan tahun 2023. Dibandingkan dengan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp200.000.000,00.

b. **Belanja Hibah Dana Bos**
Belanja Hibah Dana Bos tahun 2023 sebesar Rp2.241.589.689,00 atau 99,80 dari anggaran sebesar Rp2.245.980.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.077.365.400,00 terdapat kenaikan sebesar Rp164.224.289,00 atau 7,90%, adapun rincian penerimaanya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel V.1.69 Rincian Penerima Hibah Dana Bos Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sisdikdas Swasta	1.898.480.000,00	1.895.230.100,00	99,80	2.077.365.400,00
2.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sisdikmen Swasta	547.520.000,00	548.359.589,00	99,78	0,00
	Jumlah	2.245.980.000,00	2.241.589.689,00	99,80	2.077.365.400,00



- c. **Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**
 Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp830.248.944,00 atau 100,00% dari total anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2023 sebesar Rp830.248.944,00. Dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp830.248.944,00 atau sama banyak dengan tahun sebelumnya.

Tabel V.1.70 Rincian Penerima Hibah kepada Partai Politik

No	Partai Politik	Anggaran 2023		Realisasi 2023		Realisasi 2022
		RP	RP	RP	RP	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	68.066.816,00	69.066.816,00	100,00	69.066.816,00	
2.	Partai Nasdem	88.533.984,00	88.533.984,00	100,00	88.533.984,00	
3.	Partai Kaedilan Sejahtera	84.440.328,00	84.440.328,00	100,00	84.440.328,00	
4.	Partai Gerakan Nasional	142.029.048,00	142.029.048,00	100,00	142.029.048,00	
5.	Partai Golongan Karya	145.448.688,00	145.448.688,00	100,00	145.448.688,00	
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	36.387.128,00	36.387.128,00	100,00	36.387.128,00	
7.	Partai Bulan Bintang (PBB)	37.189.958,00	37.189.958,00	100,00	37.189.958,00	
8.	Partai Gerindra	124.227.098,00	124.227.098,00	100,00	124.227.098,00	
9.	Partai Demokrat	70.087.752,00	70.087.752,00	100,00	70.087.752,00	
10.	Partai Berkarya	32.878.104,00	32.878.104,00	100,00	32.878.104,00	
Jumlah		830.278.900,00	830.278.900,00	100,00	830.278.900,00	

4. **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 tidak dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun 2022 tercapai realisasi sebesar Rp145.686.080,00.

No	Belanja Modal	Anggaran 2023		Realisasi 2023		Realisasi 2022
		RP	RP	RP	RP	
1.	Belanja Modal Tanah	1.142.997.230,00	19.108.000,00	1,67	1.111.862.077,00	
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.309.890.874,00	26.339.182.991,00	93,03	31.337.428.900,00	
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.869.519.525,00	33.431.528.257,00	88,30	69.288.671.660,08	
4.	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Higasi	78.100.878.660,00	77.154.111.140,00	98,78	89.128.228.899,59	
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.809.763.900,00	2.769.154.050,00	98,55	1.205.948.175,00	
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	652.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah		148.875.544.589,00	139.713.084.438,00	93,84	202.072.297.511,67	

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp139.713.064.438,00 atau 93,84% dari total anggaran Belanja Modal sebesar Rp148.875.544.589,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp202.072.297.511,67 terjadi penurunan sebesar Rp62.359.233.073,67 atau 30,85% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.71 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Modal	Anggaran 2023		Realisasi 2023		Realisasi 2022
		RP	RP	RP	RP	
1.	Belanja Modal Tanah	1.142.997.230,00	19.108.000,00	1,67	1.111.862.077,00	
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.309.890.874,00	26.339.182.991,00	93,03	31.337.428.900,00	
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.869.519.525,00	33.431.528.257,00	88,30	69.288.671.660,08	
4.	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Higasi	78.100.878.660,00	77.154.111.140,00	98,78	89.128.228.899,59	
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.809.763.900,00	2.769.154.050,00	98,55	1.205.948.175,00	
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	652.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah		148.875.544.589,00	139.713.084.438,00	93,84	202.072.297.511,67	



Tabel V.1.73 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (%)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.674.328.919,00	31.255.549.257,00	87,61
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.185.190.606,00	2.175.979.000,00	99,57
	Jumlah	37.859.519.525,00	33.431.528.257,00	88,30

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp89.128.228.699,59 atau 95,76% dari total anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp93.071.814.561,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp62.841.156.713,00 terjadi kenaikan sebesar Rp11.974.117.559,59 atau 13,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.74 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (%)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	71.612.759.992,00	68.264.299.400,30	95,32
2.	Belanja Modal Bangunan Air	18.935.083.549,00	18.467.916.490,07	97,53
3.	Belanja Modal Instalasi	1.113.202.000,00	1.090.598.970,22	97,97
4.	Belanja Modal Jaringan	1.410.782.626,00	1.305.425.899,00	92,53
	Jumlah	93.071.814.561,00	89.128.228.699,59	95,76

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

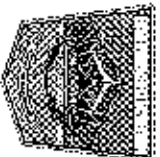
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp77.154.111.140,00 atau 98,78% dari total anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp78.100.973.060,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp89.128.228.699,59 terjadi penurunan sebesar Rp11.974.117.559,59 atau 13,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.75 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (%)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	68.275.562.925,00	65.991.305.334,00	99,57
2.	Belanja Modal Bangunan Air	10.312.261.720,00	10.239.236.770,00	99,29
3.	Belanja Modal Instalasi	239.755.858,00	79.860.320,00	75,01
4.	Belanja Modal Jaringan	1.273.392.659,00	743.709.336,00	58,40
	Jumlah	78.100.973.060,00	77.154.111.140,00	98,78

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset dianggarkan sebesar Rp652.400.000,00 namun tidak ada realisasinya. Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan di sub unit Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan:



Belanja Tak Terduga	31 Des 2023	31 Des 2022
(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.500.000.000,00	1.006.000.000,00	1.006.000.000,00

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 15,00% dari total anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2022 sebesar Rp3.061.054.001,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.911.054.001,00 atau 95,09%.

Sal. Transfer	31 Des 2023	31 Des 2022
(Rp)	(Rp)	(Rp)
92.778.971.754,00	92.627.871.216,00	86.917.238.179,00

Realisasi transfer Tahun 2023 sebesar Rp92.627.871.216,00 atau 99,83% dari anggaran transfer sebesar Rp92.778.971.754,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp86.917.238.179,00 naik sebesar Rp5.710.633.037,00 atau 6,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.76 Rincian Anggaran Dan Realisasi Transfer

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	
1.	Transfer Bagi Hasil	1.580.709.754,00	1.429.609.216,00	90,44	1.086.023.679,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	91.198.262.000,00	91.198.262.000,00	100,00	85.822.214.500,00
	Jumlah	92.778.971.754,00	92.627.871.216,00	99,83	86.917.238.179,00

A. Transfer Bagi Hasil

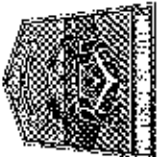
Realisasi Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp1.429.609.216,00 atau 90,44% dari anggaran belanja sebesar Rp1.580.709.754,00. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp1.641.329.910,00 terjadi kenaikan sebesar Rp334.585.537,00 atau 30,55% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.77 Rincian Anggaran Dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	1.306.784.754,00	1.188.868.383,00	90,97	923.276.867,00
2.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kota/Kepada Pemerintah Desa	273.985.000,00	240.750.833,00	87,87	171.747.812,00
	Jumlah	1.580.709.754,00	1.429.609.216,00	90,44	1.095.023.679,00

1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.188.858.383,00 atau 90,97% dari anggaran sebesar Rp1.306.754.754,00, dibandingkan dengan tahun 2022 tercalisasi sebesar Rp1.095.023.679,00 terdapat kenaikan sebesar Rp265.582.016,00 atau 28,76 %.



2. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa yang terrealisasi Tahun 2023 sebesar Rp240.750.833,00 atau 87,87% dari anggaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp273.955.000,00. Dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp171.747.312,00 terjadi kenaikan sebesar Rp69.003.521,00 atau 40,17%.

B. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp91.198.262.000,00 atau 100,00% dari anggaran Transfer Bantuan Keuangan Rp91.198.262.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp85.822.214.500,00 terjadi peningkatan sebesar Rp5.376.047.500,00 atau 6,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.78 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

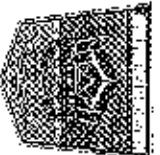
No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	49.346.027.000,00	49.346.027.000,00	100,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	41.852.235.000,00	41.852.235.000,00	100,00
	Jumlah	91.198.262.000,00	91.198.262.000,00	100,00

1. Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 sebesar Rp49.346.027.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp49.346.027.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp48.201.063.500,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.144.963.500,00 atau 2,37%. Adapun rincian Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2023 dapat sebagai berikut:

Tabel V.1.79 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	LUBUK GADANG	1.738.041.349,00	1.738.041.349,00	1.889.688.492,00
2	LUBUK GADANG TIMUR	1.785.510.367,00	1.785.510.367,00	1.569.310.600,00
3	LUBUK GADANG SELATAN	1.970.883.770,00	1.970.883.770,00	1.689.080.543,00
4	LUBUK GADANG UTARA	1.180.478.375,00	1.180.478.375,00	1.209.110.940,00
5	PASIR TALANG	1.144.285.692,00	1.144.285.590,00	1.189.874.654,00
6	KOTO BARU	1.197.890.072,00	1.197.890.072,00	1.240.637.776,00
7	SAKO PASIA TALANG	1.053.412.916,00	1.053.412.916,00	1.047.352.224,00
8	PASAR MUJARA EABUH	1.028.858.723,00	1.028.858.723,00	1.045.625.133,00
9	PULAKEK KOTO BARU	1.243.240.506,00	1.243.240.506,00	1.258.962.000,00
10	BOMAS	1.235.777.314,00	1.235.777.314,00	1.236.409.546,00
11	SAKO UTARA PASIA TALANG	1.066.065.820,00	1.066.065.820,00	1.066.806.931,00
12	SAKO SELATAN PASIA	1.065.835.915,00	1.065.835.915,00	1.048.927.887,00



No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2023
13	TALANG				
14	PASIR TALANG BARAT	1.075.951.150,00	1.076.881.115,00	100,00	1.087.527.292,00
15	PASIR TALANG TIMUR	1.142.114.029,00	1.122.112.029,00	100,00	1.149.586.845,00
16	PASIR TALANG SELATAN	1.097.498.230,00	1.097.498.230,00	100,00	1.098.387.705,00
17	PAKAN RABAA	1.449.869.689,00	1.449.959.689,00	100,00	1.227.368.179,00
18	PAKAN RABAA TIMUR	1.538.817.508,00	1.538.817.508,00	100,00	1.569.573.205,00
19	PAKAN RABAA UTARA	1.669.971.411,00	1.669.971.411,00	100,00	1.397.237.413,00
20	PAKAN RABAA TENGAH	1.884.573.910,00	1.884.573.910,00	100,00	1.403.087.749,00
21	LUBUK MAJAKO	1.868.307.360,00	1.868.307.360,00	100,00	1.548.030.415,00
22	BIDAR ALAM	1.138.613.714,00	1.138.613.714,00	100,00	1.159.751.478,00
23	PADANG AIR DINGIN	1.122.564.182,00	1.122.564.182,00	100,00	1.105.289.952,00
24	PADANG LEMAU SUNDA	1.370.568.134,00	1.070.568.134,00	100,00	1.080.088.448,00
25	PADANG GANTANG	1.065.941.183,00	1.065.941.183,00	100,00	1.036.223.234,00
26	ABAI	1.228.186.796,00	1.228.186.796,00	100,00	1.252.236.925,00
27	DUSUN TANGAH	1.157.208.879,00	1.157.208.879,00	100,00	1.163.654.719,00
28	LUBUK ULANG ALING	1.091.191.827,00	1.091.191.827,00	100,00	1.127.204.326,00
29	RANAH PANTAI CERMIN	1.132.006.784,00	1.102.006.784,00	100,00	1.109.899.466,00
30	SITAPUS	1.944.581.665,00	1.044.581.665,00	100,00	1.083.057.018,00
31	LUBUK ULANG ALING SELATAN	1.317.220.265,00	1.317.220.265,00	100,00	1.322.388.089,00
32	LUBUK ULANG ALING	1.101.340.978,00	1.101.040.978,00	100,00	1.073.404.387,00
33	ALAM PAUH DUO	1.500.899.201,00	1.500.899.201,00	100,00	1.368.309.817,00
34	KAPAUL ALAM PAUH DUO	1.207.585.802,00	1.207.585.802,00	100,00	1.212.159.967,00
35	LUAK KAPAUL ALAM PAUH DUO	1.448.451.884,00	1.448.451.884,00	100,00	1.186.727.534,00
36	PAUH DUO MAN BATIGO	1.062.607.785,00	1.062.607.785,00	100,00	1.090.966.839,00
37	SUNGAI KUNYIT	1.304.829.574,00	1.304.829.574,00	100,00	1.368.820.289,00
38	TALAO SUNGAI KUNYIT	1.242.721.288,00	1.244.721.285,00	100,00	1.267.266.963,00
39	SUNGAI KUNYIT BARAT	1.110.287.398,00	1.110.287.396,00	100,00	1.117.475.850,00
40	TALUAN MAJU	1.190.107.927,00	1.190.107.927,00	100,00	1.200.834.480,00
	JUMLAH	49.346.027.000,00	49.346.027.000,00	100,00	48.201.063.500,00

2) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 sebesar Rp41.852.235.000,00 atau 100,00% dari anggaran Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp41.852.235.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2022 sebesar Rp37.621.151.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.231.084.000,00 atau 11,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.80 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2023
1	LUBUK GADANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.632.644.170,00
2	LUBUK GADANG TIMUR	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.552.268.227,00
3	LUBUK GADANG SELATAN	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.537.304.710,00
4	LUBUK GADANG UTARA	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.188.980.771,00
5	PASIR TALANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.132.208.506,00
6	KOTO BARU	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.174.559.167,00
7	SAKO BASIA TALANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.055.489.360,00
8	PASAR MUARA LABUH	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.069.231.861,00



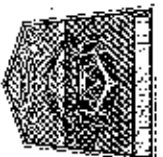
No	Uraian	10 Des 2022	11 Des 2022	12 Des 2022	13 Des 2022	14 Des 2022	15 Des 2022	16 Des 2022
9	PLAJEK KOTO BARU	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.176.443.386,00			
10	BOWAS	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.166.779.518,00			
11	SAKO UTARA PASIA TALANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.063.896.866,00			
12	SAKO SELATAN PASIA TALANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.061.738.254,00			
13	PASIR TALANG BARAT TALANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.066.362.612,00			
14	PASIR TALANG TIMUR TALANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.103.897.501,00			
15	PASIR TALANG SELATAN PAKAN RABAA	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.112.259.920,00			
16	PAKAN RABAA	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.266.807.847,00			
17	PAKAN RABAA TIMUR	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.267.479.731,00			
18	PAKAN RABAA UTARA	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.360.107.696,00			
19	PAKAN RABAA TENGAH	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.390.380.274,00			
20	LUBUK MALAKO	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.110.671.006,00			
21	BIDAR ALAM	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.086.460.632,00			
22	PADANG AIR DINGIN	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.048.248.240,00			
23	PADANG LIMAU SUNDAL	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.101.997.921,00			
24	PADANG GANTANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.175.101.211,00			
25	ABAT DUSUN TANGAH	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.124.759.914,00			
27	LUBUK ULANG ALING	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.112.693.862,00			
28	RAWAH PANTAI CERWIN	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.090.784.674,00			
29	STAPUS	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.064.752.871,00			
30	LUBUK ULANG ALING SELATAN	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.218.270.842,00			
31	LUBUK ULANG ALING TENGAH	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.066.477.411,00			
32	ALAM PAUH DUO	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.367.823.032,00			
33	KAPAU ALAM PAUH DUO	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.143.095.871,00			
34	LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.348.791.083,00			
35	PAUH DUO NAN BATIGO	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.076.886.442,00			
36	SUNGAI KUNYIT	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.268.806.507,00			
37	TALAO SUNGAI KUNYIT	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.196.109.674,00			
38	SUNGAI KUNYIT BARAT	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.076.003.054,00			
39	TALUAN MAJU	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.122.499.647,00			
	Jumlah	41.862.235.000,00	41.862.235.000,00	100,00	46.242.173.720,00			

31 Des 2022 31 Des 2022 31 Des 2022
 (Rp) (Rp) (Rp)
 15.881.948.443,67 22.144.306.028,82 139,43%
 41.862.235.000,00 41.862.235.000,00

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalami defisit sebesar Rp38.026.254.472,49. Jika dibandingkan dengan defisit tahun 2022 sebesar Rp15.881.948.443,67 maka defisit sebesar Rp22.144.306.028,82 atau 139,43%.

01 Des 2022 01 Des 2022 01 Des 2022
 (Rp) (Rp) (Rp)
 92.755.029.057,27 109.137.058.386,94

Realisasi Penerimaan Pembayaran Tahun 2023 sebesar Rp92.755.029.657,27 atau 99,99% dari anggaran Penerimaan Pembayaran sebesar Rp92.755.109.943,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp109.137.058.386,94 terdapat penurunan Penerimaan Pembayaran sebesar Rp16.382.028.729,670 atau 15,01.



	31 Des 2023	31 Des 2023
5.1.6 Pembiayaan	(Rp)	(Rp)
Pembayaran	29.000.000,00	500.000.000,00

Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp729.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran Pembiayaan Rp729.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp500.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp229.000.000,00 atau 45,80%. Realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan terbahasan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sorok Selatan ke Bank Negeri tahun 2023.

	31 Des 2023	31 Des 2023
5.1.7 PEMBIAYAAN	(Rp)	(Rp)
NETTO	92.026.029.657,27	108.037.958.386,94

Realisasi Perbiayaan Netto tahun 2023 sebesar Rp92.026.029.657,27 atau 99,99% dari anggaran Pembiayaan Netto Rp92.026.109.943,00. Dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp108.637.058.386,94 terjadi penurunan Perbiayaan Netto sebesar Rp16.611.028.729,670 atau sebesar 15,29%.

	31 Des 2023	31 Des 2023
5.1.8 SISA LEBIH PEMBIAYAAN	(Rp)	(Rp)
ANGGARAN (SILPA)	53.009.075.184,78	9.2755.109.043,27

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp53.999.775.184,78. Dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp92.755.109.943,27 terjadi penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp38.755.334.758,490 atau sebesar 41,78%.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA atau SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, serolak: ditrup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2023	31 Des 2022
Saldo Anggaran	(Rp)	(Rp)
Awal	92.755.109.943,27	109.108.458.557,94

Nilai SAL awai sebesar Rp92.755.109.943,27 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2022. Saldo tersebut adalah pencatatan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2023.



5.2.2	Penggunaan SAL sebagai penerimaan	31 Des 2023	31 Des 2022
	Pembayaran Tabung	(Rp)	(Rp)
		92.755.029.657,27	109.114.058.866,94

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembayaran tahun 2023 adalah seluruh SAL akhir tahun 2022. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembayaran tahun 2023 adalah sebesar Rp92.755.029.657,27. Terdapat selisih lebih atas penggunaan SAL tahun berjalan dari Saldo SAL awal sebesar Rp80.286,00.

5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pelaksanaan Anggaran	31 Des 2023	31 Des 2022
	Saldo Awal	(Rp)	(Rp)
	Saldo Akhir	53.999.775.184,78	92.755.029.657,27

SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SILPA pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp53.999.775.184,78.

5.2.4	Koreksi SILPA	31 Des 2023	31 Des 2022
		(Rp)	(Rp)
		(80.286,00)	43.619.829,00

Terdapat koreksi SILPA Rp33.619.829,00. Dibandingkan dengan koreksi Silpa tahun 2022 sebesar (Rp80.286,00) terdapat penurunan sebesar (Rp33.700.115,00) atau (100,24%).

5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Setelah Setelah	31 Des 2023	31 Des 2022
	Koreksi	(Rp)	(Rp)
		5.999.775.184,78	92.755.029.657,27

SAL akhir setelah koreksi merupakan akumulasi SILPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditamp ditamb/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada tahun 2023 adalah sebesar Rp53.999.775.184,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.2.1 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Setelah Koreksi Tahun 2023

No	Keterangan	2023	2022	Keseluruhan	
1	Saldo Akhir Kas di Kasda	37.708.434.334,83	79.106.227.864,74	(41.397.792.929,85)	(32,33)
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	3.212.712.840,00	167.209.566,69	3.045.504.273,31	1.821,38
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	17.490.253,00	37.220.678,00	(19.721.425,00)	(52,99)
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	11.133.985.004,82	12.193.379.820,62	(1.059.384.816,00)	(5,69)
5	Saldo Akhir Kas Bendahara BOS	161.495.545,30	70.982.844,00	(540.187.299,00)	(76,99)



No	Uraian	2023	2022	Ket. Mutasi Per 31 Desember	2022
6	Selanjut				
7.	Saldo Akhir Kas Bendahara Kapitasi JKN	1.765.637.507,27	549.090.169,22	1.216.547.438,05	221,56
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	53.999.775.194,78	92.755.111.965,27	(38.755.336.760,49)	(41,78)

5.3. NERACA

Dalam penjelasan Akun-akun neraca ini diberikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2023, adalah Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Des-23	31 Des-22	Ket. Mutasi Per 31 Des-23
5.3.1.	Aset lancar	71.004.176.216,21	137.521.110.127,67	(66.516.933.911,46)

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp101.004.176.216,21 yang terdiri dari Kas dan Bank, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

Tabel V.3.1. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Des-23	31 Des-22	Ket. Mutasi Per 31 Des-23
1	Kas dan Bank	54.037.472.513,78	92.792.229.072,27	(38.754.756.558,49)
2	Piutang	60.093.668.067,02	53.920.297.565,38	6.173.370.502,24
3	Penyisihan Piutang	(34.732.090.291,93)	(36.985.589.673,89)	2.133.499.381,95
4	Beban Dibayar Dimuka	130.959.419,00	380.518.319,00	(249.558.900,00)
5	Persediaan	2.474.166.507,74	27.293.655.844,00	(5.819.489.337,16)
	Jumlah	101.004.176.216,21	137.521.110.127,67	(36.516.933.911,46)

Aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp101.004.176.216,21 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp137.521.110.127,67. Aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp36.516.933.911,46 atau turun sebesar 26,55%. Berikut akan dijelaskan secara rinci asset lancar tersebut.

No	Uraian	31 Des-2023	31 Des-2022
1.	Kas dan Bank	54.037.472.513,78	92.792.229.072,27

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.037.472.513,78 merupakan saldo baru kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Keptasi FKTP, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara BPBD dan Kas Lainnya.

Jika dibandingkan dengan nilai Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.792.228.072,27 maka terdapat penurunan sebesar Rp38.754.755.558,49 atau turun sebesar 41,77%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.3.1.1. Rincian Kas dan Bank

No	Uraian	31 Des-23 (Rp)	31 Des-22 (Rp)	Ketertarikan Bantuan (Rp)	Persen Basis
1	Kas di Kas Daerah	37.746.132.263,89	79.143.345.993,74	(41.387.213.723,85)	(52,31)
2	Kas di Bendahara Porsewaran	792.384,00	167.205.566,50	(166.486.182,69)	(99,57)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	17.469.253,00	37.222.673,00	(19.721.425,00)	(59,29)
4	Kas di Bendahara BLUD	11.133.995.034,62	12.133.375.820,32	(1.059.384.816,00)	(8,69)
	Kas Dana Kepihasi FKTP	1.765.637.607,27	549.090.769,22	1.216.547.438,05	221,66
5	Kas di Bendahara BOS	161.468.545,00	701.982.844,00	(540.487.299,00)	(76,89)
6	Kas di Bendahara BOK	3.211.990.456,00	0,00	3.211.990.456,00	0,00
	Jumlah	54.037.472.513,78	92.792.228.072,27	(38.754.755.558,49)	(41,77)

1) Kas di Kas Daerah

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.745.553.063,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.1.1.1. Rincian Kas Daerah

No	Uraian	31 Des-23 (Rp)	31 Des-22 (Rp)	Ketertarikan Bantuan (Rp)	Persen Basis
	Saldo Kas di				
	Rekening Kas Umum				
1	Daerah pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang No. Rekening 1301.0101.30286,8	37.767.145.801,69	79.025.469.443,74	(41.255.322.641,85)	(52,21)
2	Mutasi Saldo Kas Bendahara BLUD Suksumas	0,00	515.015,00	(515.015,00)	(100,00)
3	Mutasi Saldo Kas Bendahara BOS pada rekening yang ditutup	0,00	79.315.680,00	(79.315.680,00)	(100,00)
4	Mutasi Saldo Kas Bendahara APBD	0,00	38.045.855,00	(38.045.855,00)	(100,00)
5	Kelengkapan Penyoran Pendapatan Non Kepihasi Puskumas Paut Duok ke Kasda Kas Bendahara BOS	(4.487.100,00)	0,00	(4.487.100,00)	0,00
e	Vang diserahkan ke kasda yang berasal dari temuan Pemeriksaan Inspektoral	(16.529.438,00)	0,00	(16.529.438,00)	0,00
	Jumlah	37.746.132.263,89	79.143.345.993,74	(41.387.213.723,85)	(52,31)

a. Saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah

Berdasarkan rekening Koran kas Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terdaftar pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang dengan nomor rekening 1301.0101.00286,6, saldo kas di rekening koran kas umum daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp37.767.148.801,89.



Apabila dibantungkan dengan saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.025.469,443,74. kas di Kas Daerah mengalami penurunan sebesar Rp41.258.320,641,85 atau turun sebesar 52,21%.

b. Mutasi Saldo Kas Bendahara BLUD Puskesmas

Per 31 Desember 2022 terdapat saldo rekening BLUD Puskesmas atas nama UPT BLUD PUSKESMAS KAB. SOLSEL dengan nomor rekening 13010101003202 yang terdapat pada Bank Negeri Cabang Mtuwa Labuh sebesar Rp515.015,00. Saldo tersebut merupakan penerimaan dari jasa giro bulan Oktober 2022 dimana sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 9 Maret 2023 sekaligus atas rekening tersebut sudah dilakukan penutupan.

Untuk selanjutnya, nomor rekening tersebut sudah tidak aktif seiring dengan perubahan status UPT BLUD PUSKESMAS KAB. SOLSEL menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT PUSKESMAS) sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

c. Mutasi Saldo Kas Bendahara BOS pada sekolah yang ditrup

Per 31 Desember 2022 terdapat saldo rekening Kas Bendahara BOS pada sekolah yang sudah ditrup sebesar Rp79.315.680,00 atas saldo sekolah yang sudah ditrup tersebut telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

Adapun rincian saldo Kas Bendahara BOS pada sekolah yang uup tersebut sebagai berikut:

No	Sekolah	Rekening	Tanggal Pembayaran dan Revisinya	Saldo Akhir Rekening Sebelum Pembayaran	Perubahan Kredit Kas Daerah	Saldo Akhir Rekening Setelah Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7
1	SD N 06 PAKAN RABA	13000210022094	Per 9 Maret 2023	41.031,00		41.031,00
2	SD N 01 KUTI ANYIR	13000210022391	Per 9 Maret 2023	6.848.795,00		6.848.795,00
3	SD N 08 SAWAH SILLAK	13000210022397	Per 9 Maret 2023	6.440.742,00		6.440.742,00
4	SD N 15 SIKUMBAANG	13000210021879	Per 9 Maret 2023	847.692,00	11.091,00	958.783,00
5	SD N 16 SIPOTU	13000210022707	Per 9 Maret 2023	5.108.505,00	86.926,00	5.195.431,00
6	SD N 17 SUNGAI CANGKAR	13000210022390	Per 9 Maret 2023	3.551.290,00		3.551.290,00
7	SD N 20 SAMPANG PAO-PAO	13000210022471	Per 9 Maret 2023	6.571.894,00		6.571.894,00
8	SD N 30 SUNGAI SALAK	13000210027631	Per 9 Maret 2023	7.641.122,00		7.641.122,00
9	SD N 15 KANDANG BANYAK	13000210021091	Per 9 Maret 2023	2.515.041,00		2.515.041,00
10	SD N 11 BATU MASO	13000210022987	Per 9 Maret 2023	1.296.308,00		1.296.308,00
11	SD N 14 SIVUEK	13000210022471	Per 9 Maret 2023	802.736,00	90.000,00	892.736,00
12	SMP NEEGE RI SELATAN	1300021003492	Per 9 Maret 2023	5.351.027,00		5.351.027,00
13	SMP SOLOK SELATAN	1300021003401	Per 9 Maret 2023	488.595,00		488.595,00
14	SMP NEEGE RI SOLOK SELATAN	13000210038771	Per 31 Maret 2023	16.228.204,00		16.228.204,00
				8 = 5 + 6		



No	Saldo	Saldo	Per 9 Maret 2023	Saldo Akhir	Saldo	Per 10 Maret 2023	Saldo Akhir
15	SMP NEGLI	130202101473-1	Per 9 Maret 2023	15.763.450,00	53.150,00	10 Maret 2023	15.816.600,00
	SOLOK SELATAN						
	JUMLAH			79.094.517	221.168,00		79.315.680,00

d. Mutasi Saldo Kas Bendahara BPBD

Kas Di Bendahara BPBD merupakan kas yang berasal dari sumbangan dana untuk bantuan penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Solok Selatan. Dana ini berasal dari sumbangan masyarakat dan badan usaha lainnya serta dari Pemerintah daerah lainnya. Saldo kas di bendahara BPBD sebesar Rp38.045.855,00 terdapat pada 2 (dua) rekening sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Uraian	Rekening	Saldo	Per 10 Maret 2023
1	Bank Nagari Kantor Kas Kantor Bupati - Nama Rek. Bantuan Bencana Alam Kab. Solok Selatan	1301.0101.00378-2	140.200,00	9 Maret 2023
2	BPT Unit Lubuk Gadang - Nama Rek. Bantuan Bencana Solok Selatan TH 2016	564401000188302	37.905.655,00	9 Maret 2023
	JUMLAH		38.045.855,00	

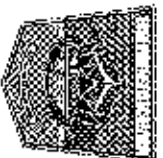
e. Kelebihan Penyetoran Pendapatan Non Kapitasi Puskesmas Pauh Duo ke Kasda sebesar Rp4.487.100,00

Pada tanggal 15 Agustus 2023 terdapat kelebihan penyetoran pendapatan non kapitasi ke kas daerah yang berasal dari UPT Puskesmas Pauh Duo sebesar Rp4.487.100,00. Dimana saripai dengan 31 Desember 2023, belum terjadi pengembalian ke rekening puskesmas tersebut.

f. Kas Bendahara BOS Yang diserorken ke kasde yang berasal dari temuan Pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp16.529.438,00.

Pada tahun 2023 terdapat penyetoran pengembalian ke kas daerah yang berasal dari temuan pemeriksaan inspektorat sebesar Rp16.529.438,00 terhadap beberapa sekolah, antara lain:

No	Nama Sekolah	Jumlah Pengembalian	Tanggal Setor	Keterangan
1	SD N 08 BATANG LOLO	807.651,00	28/12/2023	Bukti Setor lengkap
2	SD N 21 MPL BATANG PAGU	300.000,00	09/11/2023	Bukti Setor lengkap
3	SD N 03 PEKONINA	3.092.300,00	28/12/2023	Bukti Setor lengkap
4	SD N 14 SAPAN SARI	1.808.047,00	29/12/2023	2 bukti setor
5	SD N 12 PINGURAN TUJUAH	200.000,00	28/12/2023	Bukti Setor lengkap
6	SMPN. 07 SOLOK SELATAN	3.500.000,00	28/12/2023	Bukti setor ada
7	SMPN. 25 SOLOK SELATAN	5.711.040,00	28/12/2023	Bukti setor ada
8	SMPN. 01 SOLOK SELATAN	300.000,00	28/12/2023	Bukti setor ada
9	SMPN. 05 SOLOK SELATAN	810.400,00	29/12/2023	Bukti setor ada
	JUMLAH	16.529.438,00		



2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang berasal dari penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima pada Tahun 2023, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum disalurkan ke kas daerah. Kas tersebut baru disalurkan ke kas pada tahun 2024. Atas penyeteroran kas tersebut dihitung sebagai realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2023. Selain itu terdapat saldo kas yang berada pada rekening pendapatan QRIS Bank Nagari.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.499.253,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.721.425,00 atau turun sebesar 52,99% jika dibandingkan dengan saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.220.678,00. Rincian kas di bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23		Kebijakan Penerimaan	Rekening Kas
		(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	545.001,00	545.001,00	0,00	100,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	14.662.500,00	(14.662.500,00)	0,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.550.000,00	5.750.000,00	4.800.000,00	0,00
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	757.500,00	(757.500,00)	100,00
6	Sedana Pengalokasian Keuangan Daerah (SKPD)	8.401.252,00	17.522.677,00	(9.121.425,00)	(52,00)
	Jumlah	17.499.253,00	37.220.678,00	(19.721.425,00)	(52,99)

Adapun rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Denda	Jumlah		Keterangan	Denda
		Saldo	Perubahan		
12-Jan-2024	SEI RETR XARCIS WISATA HOT WATER BOOM 31 DES 2023	8.550.000,00		Kas di Bendahara Penerimaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
22-Jan-2024	TRF CR 9910501241207209011	545.001,00		Kas di Bendahara Penerimaan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertumbuhan
31-Jan-2024	621LG/002UM PELMPAHAN E-RETRIBUSI KOPERINDAGKOP KAB SOLOK SELATAN TH 2023	3.000,00		Kas di Bendahara Penerimaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	DANA NON KAPITAS: PUSKESMAS LVA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023	8.350.100,00		Kas di Bendahara Penerimaan	Dinas Kesehatan
	BUNGA TABUNGAN TK TAHUN 2023	48.152,00		Kas di Bendahara Penerimaan	Dinas Pendidikan
	Jumlah	17.499.253,00			



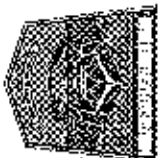
- 3) Kas Di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp722.384,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp166.486.182,69 atau turun sebesar 99,57%. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.1.3. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Revisi	31 Dec 23 (Rp)	31 Dec 22 (Rp)	Ketajutan Penyisihan (Rp)	Persis- tansi
1	Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olahraga	722.384,00	994.389,66	(272.014,86)	(27,36)
2	Dinas Kesehatan	0,00	355.000,00	(355.000,00)	(100,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	3.037.027,02	(3.037.027,02)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan	0,00	43.147,88	(43.147,88)	(100,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.000,00	(1.000,00)	(100,00)
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	19.500.000,00	(19.500.000,00)	(100,00)
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	24.640.000,00	(24.640.000,00)	(100,00)
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	4.392,98	(4.392,98)	(100,00)
9	Sekretariat Daerah	0,00	54.783.800,00	(54.783.800,00)	(100,00)
10	Raden Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
11	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	10.400.000,00	(10.400.000,00)	(100,00)
12	Sekretariat DPRD	0,00	40.970.000,00	(40.970.000,00)	(100,00)
13	Kantor Kesersuaan Bangsa dan Politik	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	722.384,00	167.208.566,69	(166.486.182,69)	(99,57)

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 lebih rinci terdapat pada Lampiran 1.

- 4) Kas di BLUD
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), merupakan kas pada BLUD RSUD Kabupaten Solok Selatan, yang terhitung langgal 1 Januari 2015 telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 440/437-2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakti Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan, tanggal 31 Desember 2014.
Saldo pada Kas BLUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.133.995.004,62 dengan rincian sebagai berikut:



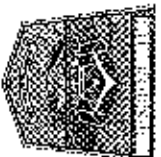
Tabel V.3.1.1.4. Kas BLUD RSUD

No	Uraian	Rekening	31-Dec-22	31-Dec-22	Peringkasan Pembayaran	Persen Tase
1	Bank Nagari Majene Labuhan	13000210.2009731	10.956.447.927,02	11.546.252.129,02	(590.804.157,00)	(7,96)
2	Bank Koperasi Majene Labuhan	1300010.0002286	93.925.164,50	209.334.967,50	(115.409.803,00)	(55,13)
3	Kas Timor Partikular Perumahan		5.086.500,00	0,00	5.086.500,00	0,00
4	Kas Timor Berdana Pengeluaran		36.616.389,00	34.792.745,00	1.823.644,00	5,01
	JUMLAH		11.133.995.004,52	12.159.379.020,52	(1.025.384.016,00)	(8,59)

5) Kas di Bendahara Kapitasi JKN
 Kas di Bendahara Kapitasi JKN merupakan kas pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT PUSKESMAS) sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. Dimana pada tahun sebelumnya, Puskesmas tergebug kedalam UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan yang telah berdiri semenjak 1 Januari 2017. Namun pada tahun 2022 berubah statusnya menjadi UPT PUSKESMAS.
 Par 31 Desember 2023 saldo kas pada UPT PUSKESMAS sebesar Rp1.765.637.607,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.1.1.5. Rincian Kas di Bendahara Kapitasi JKN

No	Uraian	Rekening	31-Dec-23	31-Dec-23	Peringkasan Pembayaran	Persen Tase
1	KAPITASI UPT PUSKESMAS KOTO PAKIK GADANG DIATTEH	1301.0101.00464.4	120.015.574,00	4.802.127,00	121.813.413,00	2.524,16
2	KAPITASI UPT PUSKESMAS SUNGAI PAGUL	1301.0101.00455.2	600.892.810,00	147.012.799,00	353.879.118,00	240,58
3	KAPITASI UPT PUSKESMAS PAUH DUO	1301.0101.00462.2	108.169.917,22	60.973.737,22	45.790.180,00	73,86
4	KAPITASI UPT PUSKESMAS SANGIR	1301.0101.00464.1	553.730.613,00	219.789.242,00	333.941.371,00	46,45
5	KAPITASI UPT PUSKESMAS SANGI PULUJAN	1301.0101.00460.0	279.801.140,00	54.382.979,00	222.439.892,00	409,02
6	KAPITASI UPT PUSKESMAS SANGIR SAKAI JANGGO	1301.0101.00466.8	128.469.541,00	33.207.995,00	95.261.546,00	296,89
7	KAPITASI UPT PUSKESMAS SANGIR SATANG HARI	1301.0101.00457.4	59.333.259,00	0,00	59.333.259,00	0,00
8	KAPITASI UPT PUSKESMAS CUBLK ULANG ALING	1301.0101.00426.1	13.815.030,05	32.845.390,00	(19.030.359,95)	(37,24)
	JUMLAH		1.765.637.607,27	549.090.169,22	1.216.547.438,05	221,56



- 6) Kas di Bendahara BOS
- Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang berada pada bendahara Sekolah Negeri (SDN dan SMPN) yang masih aktif yang berasal dari sisa bantuan operasional sekolah pada 31 Desember 2023, sebesar Rp161.495.545,00, sementara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp701.982.844,00 artinya terdapat penurunan sebesar Rp540.487.299,00 atau 76,99% seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3.1.1.6. Kas di Bendahara BOS

No	Sekolah	31 Dec-23		31 Dec-22		Kenaikan/ Penurunan	Persen dasar
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	SD	57.043.729,00	428.498.073,00	(371.454.344,00)	(86,69)		
2	SMP	104.451.816,00	273.484.771,00	(169.032.955,00)	(61,81)		
	JUMLAH	161.495.545,00	701.982.844,00	(540.487.299,00)	(76,99)		

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp161.495.545,00 tersebut, pada 31 Desember 2023 terdapat sisa Kas Bendahara BOS yang masih berada di Kas Daerah sebesar Rp17.108.638,00 yang belum disetorkan ke masing-masing Rekening Kas Bendahara BOS.

Adapun rincian sisa kas di bendahara BOS per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

7) Kas di Bendahara BOK

Kas di Bendahara BOK merupakan sisa kas yang berada pada bendahara puskesmas yang berasal dari sisa Dana DAK BOK. Adapun Kas di Bendahara BOK per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp3.211.990.456,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.1.1.7. Kas di Bendahara BOK

No	Pembayar Daerah	31 Dec-23		31 Dec-22		Kenaikan/ Penurunan	Persen
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	UPT Puskesmas Kragi	658.035.300,00	0,00	658.035.300,00	100,00		
2	UPT Puskesmas Sangal Pagu	417.045.360,00	0,00	417.045.360,00	100,00		
3	UPT Puskesmas Pauh Duo	293.065.300,00	0,00	293.065.300,00	100,00		
4	UPT Puskesmas Sangi-	186.329.120,00	0,00	186.329.120,00	100,00		
5	UPT Puskesmas Sangi-Juluan	363.242.125,00	0,00	363.242.125,00	100,00		
6	UPT Puskesmas Sangi-Balai Janggo	777.763.540,00	0,00	777.763.540,00	100,00		
7	UPT Puskesmas Sangi-Batang Hari	228.354.100,00	0,00	228.354.100,00	100,00		
8	UPT Puskesmas Lubek-Uiang Aling	290.155.611,00	0,00	290.155.611,00	100,00		
	Jumlah	3.211.990.456,00	0,00	3.211.990.456,00	100,00		



B. Piutang	31 Dec-23	31 Dec-22
	(Rp)	(Rp)
	25.361.577.775,69	13.054.707.891,50

Saldo piutang pct 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.361.577.775,69 jika dibandingkan dengan saldo piutang 31 Desember 2022 sebesar Rp17.054.707.891,50, mengalami kenaikan sebesar Rp8.306.869.884,19 atau naik 48,71%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel V.3.1.2. Piutang Netto

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022		Keterlambatan (Periode)	Persen (%)
		Rp	(Rp)	Rp	(Rp)		
1	PIUTANG	60.083.668.067,62	53.920.287.565,38	6.173.370.502,24	11,45		
2	PENYISIHAN PIUTANG	(34.732.090.291,93)	(36.856.589.873,88)	2.133.499.381,95	(5,79)		
	PIUTANG NETTO	25.361.577.775,69	17.054.707.891,50	8.306.869.884,19	48,71		

Dalam melakukan penyisihan piutang, metode penyisihan piutang tak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tak tertagih pada saat pelaporan keuangan, metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.1.2.2. Rincian Piutang

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022		Keterlambatan (Periode)	Persen (%)
		Rp	(Rp)	Rp	(Rp)		
I	PIUTANG	59.735.853.187,62	53.765.242.055,38	5.970.411.102,24	11,10		
	PENDAPATAN						
	PENYISIHAN PIUTANG	(34.730.900.217,43)	(36.354.814.396,38)	2.734.514.178,95	(5,79)		
	PENDAPATAN						
	PENDAPATAN NETTO	25.005.352.950,19	16.900.427.669,00	8.104.925.281,19	47,96		
II	PIUTANG LAINNYA	358.014.320,03	155.056.520,03	202.859.400,03	100,00		
	PENYISIHAN PIUTANG	(1.790.074,50)	(775.277,50)	(1.012.797,50)	100,00		
	PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA						
	PIUTANG LAINNYA NETTO	356.224.825,50	154.280.222,50	201.844.503,00	100,00		

Rincian piutang di atas terdiri dari:

I. Piutang Pendapatan

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.005.352.950,19 sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel V.3.1.2.3. Rincian Piutang Pendapatan

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022		Keterlambatan (Periode)	Persen (%)
		Rp	(Rp)	Rp	(Rp)		
	PIUTANG	59.735.853.167,62	53.765.242.055,38	5.970.411.102,24	11,10		
	PENDAPATAN						
	PENYISIHAN PIUTANG	(34.730.900.217,43)	(36.354.814.396,38)	2.134.514.178,95	(5,79)		
	PENDAPATAN						
	PIUTANG	25.005.352.950,19	16.900.427.669,00	8.104.925.281,19	47,96		
	PENDAPATAN NETTO						



No	Uraian	Saldo 2023		Saldo 2022		Saldo 2021		Perubahan
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	Piutang Pajak	13.223.511.675,00	15.018.014.863,00	(4.794.503.288,00)	(26,61)			
	Penyisihan Piutang Pajak	(8.629.260.289,09)	(10.381.831.529,08)	1.752.681.240,00	(16,88)			
	Piutang Pajak Netto	4.594.251.385,91	7.636.083.433,91	(3.041.822.048,00)	(39,83)			
2	Piutang Retribusi	2.082.825.360,00	1.970.109.760,00	92.715.600,00	4,71			
	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.756.281.888,00)	(1.926.103.288,00)	69.827.422,00	(8,82)			
	Piutang Retribusi Netto	306.543.472,00	44.006.472,00	262.537.000,00	596,59			
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	28.342.289.419,82	30.212.362.039,38	(1.900.072.612,76)	(6,28)			
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(24.344.768.040,34)	(24.566.779.579,29)	212.011.538,95	(0,88)			
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto	3.997.521.379,28	5.645.572.459,09	(1.648.051.073,91)	(0,30)			
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	16.107.026.723,00	3.634.766.320,00	12.572.261.403,00	355,67			
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	16.107.026.723,00	3.634.766.320,00	12.572.261.403,00	355,67			

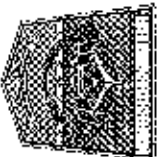
Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.005.352.950,19 sebagaimana terinci dalam tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak

Nilai saldo piutang pajak sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.594.261.385,91. Jika dibandingkan dengan nilai saldo piutang pajak piutang pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.636.083.433,91 terjadi penurunan saldo piutang pajak sebesar Rp3.051.730.617,20 atau turun sebesar 39,96%.

Tabel V.3.1.2.4. Rincian Piutang Pajak

No	Jenis Pajak	Saldo 2023		Saldo 2022		Saldo 2021		Perubahan
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Piutang Pajak	13.223.511.675,00	15.018.014.863,00	(4.804.461.649,00)	(25,66)			
	Penyisihan Piutang Pajak	(8.629.250.289,09)	(10.381.831.529,08)	1.752.731.031,80	(16,88)			
	Piutang Pajak Netto	4.594.261.385,91	7.636.083.433,91	(3.051.730.617,20)	(39,96)			
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	12.742.439.897,00	17.548.901.548,00	(4.804.461.649,00)	(27,38)			
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	(8.626.824.930,20)	(10.379.576.962,00)	1.752.731.031,80	(16,88)			
	Piutang Pajak Netto	4.115.594.966,80	7.167.325.584,00	(3.051.730.617,20)	(42,68)			



No	Jenis Pajak	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Perubahan Perubahan	Persentase Kenaikan
2	Piutang Pajak Penerangan Jalan	481.071.778,00	471.113.417,00	9.958.361,00	2,11
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(2.405.358,59)	(2.355.567,09)	(49.791,50)	2,11
	Piutang Pajak Netto	478.666.419,41	468.757.849,91	9.908.569,20	2,11

Nilai saldo piutang pajak sarapai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.594.261.385,91 terdiri dari:

1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai piutang pajak sarapai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.742.439.897,00 yang merupakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdassan dan Perkotaan (PBB P2) dengan penyisihan piutang pajak sebesar (Rp8.626.844.930,20), jika dibandingkan dengan nilai piutang pajak dan penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2022, masing-masing sebesar Rp17.546.901.546,00 dan (Rp10.379.575.962,00), terjadi penurunan piutang pajak sebesar Rp(4.804.461.649,00) atau turun sebesar 27,38%. Sedangkan untuk penyisihan piutang pajak terjadi kenaikan sebesar Rp1.752.731.031,80 dengan persentase 16,89%.

Tabel V.3.1.2.5. Rincian Piutang PBBP2

Jenis Pajak	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Perubahan (Rp)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdassan dan Perkotaan	12.742.439.897,00	17.546.901.546,00	(4.804.461.649,00)
Jumlah	12.742.439.897,00	17.546.901.546,00	(4.804.461.649,00)
Penyisihan Piutang Pajak	(8.626.844.930,20)	(10.379.575.962,00)	1.752.731.031,80
Piutang Pajak Netto	4.115.594.966,80	7.167.325.584,00	3.051.730.617,20

Pada Tahun 2023 total ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdassan dan Perkotaan adalah sebesar Rp2.814.703.067,00 dengan jumlah SPPT sebanyak 79.484 lembar, dan atas ketetapan Tahun 2023 tersebut terrealisasi sebesar Rp1.181.945.885,00 dan dengan tidak terrealisasinya ketetapan tersebut secara keseluruhan menurunkan nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdassan dan Perkotaan sebesar Rp1.632.757.187,00 dengan jumlah SPPT sebanyak 30.888 lembar. Untuk rincian pengelolaan PBB P2 pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Adapun nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdassan dan Perkotaan per 31 Desember Tahun 2023 untuk masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Saldo (Rp)
1.	Kecamatan KP.GD	743.546.506,00
2.	Kecamatan Paull Duo	478.824.922,00
3.	Kecamatan Sangi	8.027.772.882,00
4.	Kecamatan Sangi Balai Janggo	560.294.877,00
5.	Kecamatan Sangi Baling Hari	401.283.257
6.	Kecamatan Sangi Jujan	290.181.745,00
7.	Kecamatan Sungai Pagu	2.232.735.878,00
	Jumlah	12.742.439.897,00



Kegiatan pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB P2 untuk semua kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan yaitu Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangri Balai Jango, Kecamatan Koto Parik Gedang Diareh, Kecamatan Pah Duo, Kecamatan Sangri Batang Heri serta Kecamatan Sangri Jujan. Tahun 2023 telah dilakukan yang bertujuan untuk menyempurnakan data objek pajak dan subjek pajak di setiap kecamatan dengan cara mencocokkan data dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang terdapat dalam Daftar Hasil Rekaman (DHR) di aplikasi SISMIOP PBB P2 dengan kondisi sebenarnya di lapangan, dan berpedoman pada Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendaftaran, dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Pembentukan Basis Data Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.63-2020 Tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Tim Penuntakhir Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Sangri Balai Jango serta Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.216-2020 Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Tim Penuntakhir Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Solok Selatan.

Nilai penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar 8.626.844.930,20 dengan rincian sebagai berikut:

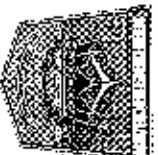
1. Kategori Lancar dengan persentase penyisihan sebesar 0,5%, berjumlah Rp8.163.786,00;
 2. Kategori Kurang Lancar dengan persentase penyisihan sebesar 10%, berjumlah Rp163.778.903,00;
 3. Kategori Diragukan dengan persentase penyisihan sebesar 50%, berjumlah Rp1.008.827.656,00; dan
 4. Kategori Masel dengan persentase penyisihan sebesar 100%, berjumlah Rp7.454.238.371,00.
- Untuk penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan per 31 Desember Tahun 2023 selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

2) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp478.666.419,11 adalah alokasi pembayaran pajak penerangan jalan untuk Kabupaten Solok Selatan dari PT. PLN (Persero) untuk alokasi bulan Desember 2023. Penyisihan piutang ini adalah sebesar 0,5% atau Rp2.405.358,89 dengan kategori lancar.

Tabel V.3.1.2.6. Piutang Pajak Penerangan Jalan

No	Jalan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kebijakan (Rp)	Persentase
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	481.071.779,00	471.113.417,00	9.958.361,00	2,11
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(2.405.358,89)	(2.355.567,09)	(49.781,80)	2,11
	Piutang Pajak Netto	478.666.419,11	468.757.849,91	9.908.569,20	2,11



2. Piutang Retribusi

Nilai Saldo Piutang Retribusi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp306.543.462,00. Piutang ini mengalami peningkatan sebesar Rp262.537.000,00 atau naik sebesar 596,59% jika dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi tahun 2022 yang berjumlah Rp44.006.462,00. Adapun rincian piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3.1.2.7. Piutang Retribusi

Aksi	Jenis Retribusi	Tahun 2023		Tahun 2022		Perubahan Penjumlahan	Perbedaan
		Rp	Rp	Rp	Rp		
	PIUTANG RETRIBUSI	2.062.825.850,00	1.970.109.750,00	82.715.800,00	4,71		
	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI	(1.756.281.888,00)	(1.322.103.298,00)	169.821.400,00	(8,32)		
	PIUTANG RETRIBUSI NETTO	306.543.462,00	44.006.462,00	262.537.000,00	596,59		
1	Piutang Retribusi Pengendalian Manera Telekomunikasi (Diskonhito)	82.817.900,00	82.817.900,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Manera Telekomunikasi	(82.817.900,00)	(82.817.900,00)	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Retribusi Pengendalian Manera Telekomunikasi (Diskonhito) Netto	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2	Piutang Retribusi IMS Dines PTSP	25.446.250,00	25.446.250,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Retribusi IMS	(25.446.250,00)	(25.446.250,00)	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Retribusi IMS Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Piutang Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah	(8.375.000,00)	(8.375.000,00)	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah - Sekretariat DPRD	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah	(3.450.000,00)	(3.450.000,00)	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah - Kecamatan Sungai Paou	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah	(4.925.000,00)	(4.925.000,00)	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.346.138.200,00	1.863.470.830,00	32.715.800,00	5,00	5,00	
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(1.039.642.738,00)	(1.809.464.138,00)	169.821.400,00	(8,32)		
	Piutang Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Netto	306.543.462,00	44.006.462,00	262.537.000,00	596,59		



1) Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

Saldo Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Diandingkan dengan: piutang tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Tabel V.3.1.2.8. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Perubahan (Rp)	Perubahan (%)
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskoninfo)	82.817.900,00	82.817.900,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	(82.817.900,00)	(82.817.900,00)	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskoninfo) Netto	0,00	0,00	0,00	100,00

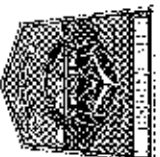
Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp82.817.900,00 merupakan piutang kepada PT.INDOSATI sebesar Rp82.817.900,00 merupakan piutang atas kewajiban Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Tahun 2013 kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan sampai tanggal Nerace belum pernah diterbitkan Surat Tagihan atas Retribusi tersebut. Adapun rincian dari Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.3.1.2.9. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

No	Nama SAKD	Tanggal SKRPD	Wajib Retribusi	Jumlah (Rp)
1	2388	19-Nov-13	PT. INDOSAT	11.142.000,00
2	2390	19-Nov-13	PT. INDOSAT	11.268.000,00
3	2391	19-Nov-13	PT. INDOSAT	12.145.000,00
4	2392	19-Nov-13	PT. INDOSAT	12.193.000,00
5	2393	19-Nov-13	PT. INDOSAT	12.193.000,00
6	2394	19-Nov-13	PT. INDOSAT	12.025.000,00
7	2395	19-Nov-13	PT. INDOSAT	11.851.900,00
	JUMLAH PIUTANG KEPADA PT. INDOSAT			82.817.900,00
	PENYISIHAN PIUTANG			-82.817.900,00

Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp82.817.900,00 kepada PT. INDOSAT dengan Penyisihan atas Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar (Rp82.817.900,00) termasuk penyisihan piutang Kategori Macer dengan persentase penyisihan piutang sebesar 100%.

Atas piutang retribusi menara telekomunikasi tersebut telah dilakukan pelimpahan pengurusan piutang ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUJPN) melalui KEPKNU Padang dengan surat Sekretaris Daerah nomor 900/71/BRPKD/II-2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal penerimaan pengurusan piutang dan surat Bupati Solok Selatan nomor 900/140/BPKD/III-2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal permintaan pelimpahan pengurusan piutang, dan pelimpahan piutang tersebut telah diterima oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUJPN) sesuai dengan surat nomor : SP3N-111/PLPUNG.04/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara dan di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pengurusan piutang Retribusi Menara Telekomunikasi milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah



beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan upaya penagihannya telah dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan Surat Paksa Nomor SP-86/PUPN.C.04.00/2019 tanggal 26 April 2019, akan tetapi sampai saat penyajian Laporan Keuangan ini Pihak Penanggung Hutang belum melunasi Piutang tersebut.

2) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp25.446.250,00.

Tabel V.3.1.2.10. Piutang Retribusi IMB

No.	Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kategori Pembayaran	Resiko
		(Rp)	(Rp)		
	Piutang Retribusi IMB Dinas PTSP	25.446.250,00	25.446.250,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi IMB	(25.446.250,00)	(25.446.250,00)	0,00	0,00
	Piutang Retribusi IMB Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Piutang Retribusi IMB sebesar Rp25.446.250,00 adalah piutang retribusi IMB yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Piutang ini disisihkan sebesar 100% atau Rp25.446.250,00 dengan kategori macet.

3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 merupakan piutang atas pemanfaatan/pemakaian fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan yang dipisahkan ini sebesar Rp8.375.000,00 dengan penyisihan 100% dan kategori macet.

Tabel V.3.1.2.11. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kategori Pembayaran	Resiko
		(Rp)	(Rp)		
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(8.375.000,00)	(8.375.000,00)	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Seksterlarif DPRD Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kecamatan Sungai Paçu	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00



No	Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kekayaan Pelayanan	Pengaruh Lain
		(Rp)	(Rp)		
	Penyisihan Piutang Retribusi	(4.825.000,00)	(4.825.000,00)	0,00	0,00
	Pemakaian Kekayaan Daerah				
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Neto	0,00	0,00	0,00	0,00

4) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo Piutang Retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp306.543.462,00 yang terdiri dari piutang retribusi tahun 2016 sd 2023. Penetapan piutang retribusi pelayanan pasar baru dilakukan pada tahun 2017 maka total piutang retribusi saat ini merupakan gabungan piutang pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2023.

Tabel V.3.1.2.12. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

No	Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kekayaan Pelayanan	Pengaruh Lain
		(Rp)	(Rp)		
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.948.186.200,00	1.858.470.600,00	92.715.800,00	5,30
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(1.639.642.738,00)	(1.809.464.158,00)	169.821.400,00	(9,38)
	Piutang Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Neto	306.543.462,00	44.006.462,00	262.537.000,00	596,59

Nilai piutang retribusi pelayanan pasar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.946.186.200,00 dengan penyisihan sebesar Rp1.639.642.738,00.

Untuk rincian piutang retribusi pasar selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

3. Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun sekarang nilai dividen atas penyerahan modal Pemerintah Kabupaten Solok selaran ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) belum diserapakan berbubung RUPS PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat belum terlaksana, sementara piutang dari PT Balairung tahun ini tidak ada disebabkan kondisi perusahaan yang mengalami kerugian.

Jenis Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kekayaan Pelayanan	Pengaruh Lain
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Hasil Pengelolaan kekayaan yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Nilai Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.997.521.379,28. Jika dibandingkan dengan saldo piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2022 sebesar Rp5.685.572.453,09 terdapat penurunan piutang sebesar Rp1.688.051.073,81 atau turun sebesar 29,69% sesuai dengan tabel berikut.



Tabel V.3.1.2.13. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2022		Perubahan Rendahnya	Perubahan Tingginya
		2021	2020	2022	2021		
	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	28.342.289.419,62	30.242.362.032,38	(1.900.062.612,76)	(6,28)		
	PENYISIHAN LAIN- LAIN PAD YANG SAH	(24.344.768.040,94)	(24.866.779.579,29)	212.011.538,95	(0,86)		
	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH NETTO	3.997.521.379,28	5.685.572.453,09	(1.688.051.073,81)	(29,69)		
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Denda atas Kecelakaan Pelaksanaan Pekerjaan Dinas PUJPR	9.402.559,62	18.402.559,62	0,00	0,00		
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(18.402.559,62)	(18.402.559,62)	(2.639.456,55)	88,27		
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	8.533.436,95	(8.533.436,55)	(100,00)		
2	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-BLUD RS-JUD	4.049.399.270,00	5.747.316.543,00	(1.698.516.172,00)	(29,55)		
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(51.877.990,72)	(72.277.503,22)	20.398.512,50	(28,72)		
3	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	3.997.521.379,28	5.675.638.039,78	(1.678.116.660,50)	(29,57)		
3	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-BLUD PUSKESMAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah-BLUD PUSKESMAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Piutang Tuntutan Perbendaharaan	21.500.415.809,00	21.700.681.271,00	(200.245.463,00)	-0,92		
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(21.500.415.808,00)	(21.700.661.271,00)	200.245.463,00	-0,92		
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Piutang Tuntutan Kerugian Daerah	454.333.943,00	454.333.943,00	0,00	0,00		
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(454.333.943,00)	(454.333.943,00)	0,00	0,00		
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Dana Revolving	2.319.737.734,00	2.319.737.734,00	0,00	0,00		
	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Dana Revolving	(2.319.737.734,00)	(2.319.737.734,00)	0,00	0,00		



No	Detail Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31/12/2023	31/12/2022	Perubahan	Persentase
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Piutang Dana Revolving Dinas BOP/PKIS (DINSOSPMD)	2.114.475.400,00	2.114.475.400,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Dana revolving	(2.114.475.400,00)	(2.114.475.400,00)	0,00	0,00
	Piutang Dana Revolving Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Piutang Dana Revolving Dinas KOPERINDAG	205.282.334,00	205.282.334,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Dana revolving	(205.282.334,00)	(205.282.334,00)	0,00	0,00
	Piutang Dana Revolving Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.300.976,76	(1.300.976,76)	100,00
7	Piutang Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.300.976,76	(1.300.976,76)	100,00

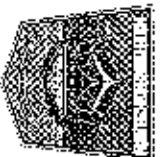
Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

1) **Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan piutang yang berasal dari denda keterlambatan dan pencatatan jaminan pelaksanaan. Pada tahun 2022, nilai saldo piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp0,00 dimana nilai piutang sebesar Rp18.402.559,62 dengan penyisihan sebesar Rp18.402.559,62.

Tabel V.3.1.2.14. Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Detail Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Januari 2023	Januari 2022	Keseluruhan	Persentase
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Dinas PUPH	18.402.559,62	18.402.559,62	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(18.402.559,62)	(18.402.559,62)	(8.633.436,55)	88,37
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	8.633.436,55	(8.633.436,55)	(100,00)



2) Piutang BLUD RSUD

Per 31 Desember 2023 Nilai Saldo Piutang BLUD RSUD sebesar Rp3.997.521.379,28, dimana nilai piutang sebesar Rp4.049.399.370,00 dengan penyisihan sebesar Rp51.877.990,50. Jika dibandingkan dengan piutang yang sarra pada tahun 2022, sebesar Rp5.675.638.039,78 terjadi penurunan piutang sebesar Rp1.678.116.660,50 atau sebesar 29,57%.

Tabel V.3.1.2.15. Piutang BLUD RSUD

NO	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan Perubahan	Persentase 1/2023
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- BLUD RSUD	4.049.399.370,00	5.747.815.543,00	(1.698.516.173,00)	(29,5%)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(51.877.990,72)	(72.277.503,22)	20.399.512,50	(28,22)
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	3.997.521.379,28	5.675.638.039,78	(1.678.116.660,50)	(29,57)

Adapun rincian piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2023 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel V.3.1.2.16. Rincian Piutang BLUD RSUD

NO	Uraian	Uraian	Status Konfirmasi
	TAHUN 2019		
1	PT. REKIN	154.000,00	Terkonfirmasi
2	PT. SUPREME ENERGY	410.000,00	Terkonfirmasi
	JUMLAH TOTAL	564.000,00	
	TAHUN 2020		
1	PT. SUPREME ENERGY	3.037.500,00	Terkonfirmasi
2	RETRIBUSI PARKIR	9.000.000,00	Terkonfirmasi
3	RETRIBUSI KANTIN	6.000.000,00	Terkonfirmasi
	JUMLAH TOTAL	18.067.500,00	
	TAHUN 2021		
1	RETRIBUSI PARKIR	1.000.000,00	Terkonfirmasi
2	RETRIBUSI KANTIN	9.200.000,00	Terkonfirmasi
3	JAMPERSAL	8.164.200,00	Terkonfirmasi
	JUMLAH TOTAL	18.364.200,00	
	TAHUN 2022		
1	KLAIM BPJS KETENAGAKERJAAN	33.676.285,00	Terkonfirmasi
2	PT. MITRA KERINCI	16.007.100,00	Terkonfirmasi
3	RETRIBUSI PARKIR	10.000.000,00	Terkonfirmasi
4	RETRIBUSI KANTIN	8.200.000,00	Terkonfirmasi
	JUMLAH TOTAL	67.883.385,00	
	TAHUN 2023		
1	PT. MITRA KERINCI	5.158.000,00	Terkonfirmasi
2	RETRIBUSI PARKIR	10.500.000,00	Terkonfirmasi
3	RETRIBUSI KANTIN	16.300.000,00	Terkonfirmasi
4	KLAIM BPJS Des 2023	3.912.572.285,00	Terkonfirmasi
	JUMLAH TOTAL	3.944.530.285,00	
	TOTAL PIUTANG SELURUHNYA	4.049.399.370,00	

3) Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Piutang Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp21.500.415.808,00 adalah Piutang yang telah dikeluarkan Surat Penempatannya oleh BPK-RI, dengan penyisihan 100% sebesar Rp21.500.415.808,00 dengan kategori macet. Pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi atas piutang ini. Adapun rincian piutang ini sebagai berikut:



Tabel V.3.1.2.17. Piutang Tuntutan Perbendaharaan

No	Kategori	Tahun 2022		Tahun 2023		Persen
		Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	
4	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Piutang Tuntutan Perbendaharaan	21.500.415.808,00	21.703.661.271,00	(200.245.463,00)	(0,92)	
		(21.500.415.808,00)	(21.700.661.271,00)	200.245.463,00	(0,92)	
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lihat rincian piutang Tuntutan Perbendaharaan lebih lanjut dilihat pada **Lampiran 6**.

4) Piutang Tuntutan Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Kerugian sebesar Rp454.333.948,00 adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Penyisihan piutang ini adalah 100% sebesar Rp454.333.948,00 dengan kategori macet. Pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi atas piutang ini.

Tabel V.3.1.2.18. Piutang Tuntutan Ganti Rugi

No	Kategori	Tahun 2022	Tahun 2023	Saldo Awal	Saldo Akhir	Persentase
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Piutang Tuntutan Kerugian Daerah	454.333.948,00	454.333.948,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(454.333.948,00)	(454.333.948,00)	0,00	0,00	
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piutang Tuntutan Kerugian sebesar Rp454.333.948,00 terdapat pada OPD berikut:

No	Urutan	Saldo		Kategori		Persentase
		Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	454.333.948,00	454.333.948,00	0,00	0,00	
2	Sekretariat Daerah	70.310.000,00	70.310.000,00	0,00	0,00	
	Sekretariat DPRD	384.023.948,00	384.023.948,00	0,00	0,00	

Untuk rincian piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah lebih lanjut dilihat pada **Lampiran 7**.

5) Piutang Dana Revolving

Nilai Saldo Piutang Dana Revolving sebesar Rp0,00 dimana piutang tersebut seluruhnya sudah macet dengan penyisihan sebesar Rp2.319.737.734,00.

Piutang revolving adalah Piutang yang diporsepsikan sebagai dana bergulir pada SKPD BPPMPrKB sekarang menjadi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Koperindag sekarang menjadi Dinas Perindagkop U.KM.



Tabel V.3.1.2.19. Dana Revolving

No.	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022		Kerangka Perencanaan	Persen Laba
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
	Piutang Lain- lain PAD yang Sah-Dana Revolving	2.319.737.734,00	2.319.737.734,00			0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Dana Revolving	(2.318.737.734,00)	(2.318.737.734,00)			0,00	0,00
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00			0,00	0,00
1	Piutang Dana Revolving Dinas BPM/PRKB (DINSOSPMD)	2.114.475.400,00	2.114.475.400,00			0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Dana revolving	(2.114.475.400,00)	(2.114.475.400,00)			0,00	0,00
	Piutang Dana Revolving Netto	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Piutang Dana Revolving Dinas KOPERINDAG	205.282.334,00	205.282.334,00			0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Dana revolving	(205.282.334,00)	(205.282.334,00)			0,00	0,00
	Piutang Dana Revolving Netto	0,00	0,00			0,00	0,00

Pada tahun 2023 tidak ada realisasi piutang dana revolving. Piutang ini termasuk kategori macet dengan persentase penyisihan piutang sebesar 100%, Rincian Piutang Revolving tersebut adalah sebagai berikut:

a. Revolving Fund BPM/PR&KB

Piutang Dana Bergulir (revolving) per 31 Desember 2023 pada BPM/PRKB (sekarang DINSOSPMD) adalah sebesar Rp2.114.475.400,00 dengan penyisihan piutang sebesar (Rp2.114.475.400,00) dimana saat ini piutang tersebut termasuk dalam kategori macet.

Pada tahun 2023 ini, dilakukan penyusutan: terhadap nilai piutang revolving tersebut dimana sesuai dengan Keputusan Bupati Solik Selatan Nomor: 460.128-2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penghapusan Denda Pada Dana Kegiatan Modal Usaha Ekonomi: Produktif Masyarakat Pola Revolving Tahun 2006, nilai denda sebesar Rp11.063.949.170,00 dihapuskan dari perhitungan piutang, sehingga piutang revolving tersebut hanya terdiri dari sisa nilai pokok ditambah dengan sisa bunga.

Tabel V.3.1.2.20. Piutang Dana Revolving BPM/PR&KB
(DINSOSPMD)

No.	Uraian	Salutir	Kategori Kecelakaan	BPM/PRKB Sesuai	JUMLAH	
					Macet	Revisi
1	Piutang Pokok Dana Bergulir BPM/PRKB 2006	1.847.681.700,00	Macet	100,00%	1.847.681.700,00	
2	Piutang Bunga Dana Bergulir BPM/PRKB 2006	286.793.700,00	Macet	100,00%	286.793.700,00	
	JUMLAH	2.114.475.400,00			2.114.475.400,00	



Rincian piutang revolving lebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Bupati Solik Selatan Nomor: 460.128-2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penghapusan Denda Pada Dana Kegiatan Model Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pola Revolving Tahun 2006 huruf B sebagaimana terdapat dalam Lampiran 8.

Selain itu, dalam Keputusan Bupati di atas, sebagaimana yang terdapat pada huruf C, juga ditetapkan bahwa nilai piutang revolving yang disalurkan ke PDAM sebesar Rp751.266.400,00 yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp636.666.400,00 dan sisa bunga sebesar Rp114.600.000,00 seluruhnya diulihkan menjadi penambahan Penyerahan Modal Pemerintah Kabupaten Solik Selatan.

h. Revolving Fund Koperindag (DINAS PERINDAGKOP-UKM)

Nilai piutang Dana Revolving Fund Koperindag Per Desember 2023 sebesar Rp205.262.334,00 terdiri dari Piutang Pokok sebesar Rp182.669.067,00 dan Piutang Bunga Rp22.593.267,00. Penyisihan piutang atas dana bergair sebesar Rp205.262.334,00 merupakan kategori macet dengan persentase sebesar 100%.

Tabel V.3.1.2.21. Rincian Piutang Revolving KOPERINDAG (DINAS PERINDAGKOP dan UKM)

No	Uraian	Piutang Lainya yang Sah KOPERINDAG (DINAS PERINDAGKOP-UKM)		Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	
		Jumlah Denda di Sisa Pokok	Sisa Pokok Desember 2023	Piutang Pokok	Piutang Bunga
1	KURBASI	329.000.000,00	266.846.533,00	30.180.753,00	52.116.487,00
2	UKM	367.000.000,00	238.446.400,00	29.687.001,00	20.563.600,00
	JUMLAH	696.000.000,00	505.350.933,00	59.798.733,00	182.669.067,00

a) Revolving Fund 2006

Nilai piutang yang berasal dari Dana Revolving Fund Koperindag 2006 Per Desember 2023 sebesar Rp48.491.500,00 terdiri dari Piutang Pokok sebesar Rp42.763.400,00 dan Piutang Bunga Rp5.728.100,00 dengan plafon sebesar Rp336.000.000,- terdiri dari plafon pokok Rp300.000.000,00 dan plafon bunga pinjaman Rp36.000.000,00. Penyisihan piutang atas dana bergair sebesar Rp48.491.500,00 merupakan kategori macet dengan persentase sebesar 100% (seratus persen).

Tabel V.3.1.2.22. Rincian Piutang Revolving Tahun 2006 - KOPERINDAG (DINAS PERINDAGKOP dan UKM)

Kode	Uraian	Revolving 2006		Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	
		Jumlah Denda di Sisa Pokok	Sisa Pokok Desember 2023	Piutang Pokok	Piutang Bunga
1	Koperasi	150.000.000,00	10.800.000,00	128.856.800,00	18.076.400,00
2	UKM	190.000.000,00	13.200.000,00	130.300.000,00	17.198.500,00
	JUMLAH	300.000.000,00	36.000.000,00	267.236.500,00	30.271.900,00
	JUMLAH PIUTANG				48.491.500,00
	PENYISIHAN PIUTANG				(48.491.500,00)

b) Revolving Fund Koperindag 2008

Nilai piutang lain-lain yang berasal dari Dana Revolving Fund Koperindag 2008 Per Desember 2022 sebesar Rp156.770.834,00 terdiri dari Piutang Pokok



sebesar Rp139.905.667,00 dan Piutang Bunga Rp16.865.167,00 Penyisihan piutang atas dana bergulir sebesar Rp156.770.834,00 dan merupakan kategori macet dengan persentase sebesar 100% (seratus persen).

Tabel V.3.1.2.23. Rincian Piutang Revolving Tahun 2006 - KOPERINDAG (DINAS PERINDAGKOP dan UKM)

No	Uraian	Saldo Awal		Saldo Akhir		Saldo Akhir
		1	2	3	4	
1	Koperasi	189.080.000,00	22.740.000,00	133.047.933,00	17.26.333,00	48.052.067,00
2	UKM	157.293.850,00	23.840.300,00	108.148.400,00	12.328.500,00	91.853.800,00
	JUMLAH	346.373.850,00	46.580.300,00	241.196.333,00	29.514.833,00	139.905.867,00
JUMLAH PIUTANG						156.770.834,00
PENYISIHAN PIUTANG						(156.770.834,00)

5. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.107.026.723,00 dimana piutang ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar Rp12.572.261.403,00 atau naik sebesar 355,67%.

Tabel V.3.1.2.24. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Jenis Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Tahun 2022		Tahun 2023		Peringkat
	Rp	(Rp)	Rp	(Rp)	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	16.107.026.723,00	0,00	2.534.785.320,00	12.572.261.403,00	355,67
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	16.107.026.723,00	0,00	2.534.785.320,00	12.572.261.403,00	355,67

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp16.107.026.723,00 adalah Piutang Dana Bagi Pajak Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolakan Keuangan dan Ase Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Alokasi Definif, Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dimana alokasi untuk Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.1.2.25. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		Saldo Akhir 2023	
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		3.895.862.339,00	
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BANKB)		1.798.498.698,00	
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		10.354.824.302,00	
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PA ³)		57.821.334,00	
	Jumlah	16.107.026.723,00	



II. Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp356.224.825,50 dengan penyisihan sebesar Rp1.790.074,50.

Tabel V.3.1.2.26. Rincian Piutang Lainnya

No	Uraian	Tahun 2022		Tahun 2023		Kebijakan	Puskesmas
		Rp	Rp	Rp	Rp		
1	PIUTANG LAINNYA	358.014.900,00	155.055.500,00	202.950.400,00	130,89		
	PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	(1.790.074,50)	(775.277,50)	(1.014.797,00)	130,89		
	PIUTANG LAINNYA NETTO	356.224.825,50	154.280.222,50	201.944.603,00	130,89		
	Piutang Pendapatan Kapitasi FKTP	358.014.900,00	155.055.500,00	202.950.400,00	130,89		
	Penyisihan Piutang Pendapatan/Kapitasi FKTP	(1.790.074,50)	(775.277,50)	(1.014.797,00)	130,89		
	Jumlah Piutang Lainnya Netto	356.224.825,50	154.280.222,50	201.944.603,00	130,89		

Piutang lainnya merupakan piutang yang terdapat pada UPT Puskesmas dan RST/D Batang Sangir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.1.2.27. Piutang lainnya - Kapitasi FKTP UPT Puskesmas

No	Uraian	Rincian		Rincian		Rincian		Rincian		Saldo Awal	Saldo Akhir
		Puskesmas	RST/D	Puskesmas	RST/D	Puskesmas	RST/D	Puskesmas	RST/D		
1	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas	1.980.000	8.000.000		1.298.400	320.000					10.998.400
2	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir Raju			1.400.000				1.225.000	440.000		3.065.000
3	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Parit Duo							1.980.000	50.000		2.040.000
4	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir	40.020.000	10.400.000		1.280.000			940.000			87.540.000
5	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir Jutan			840.000	2.320.000	1.708.000		480.000			5.348.000
6	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir Sala Jengcu	24.240.000	111.730.000		1.480.000						49.780.000
7	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir Batang Hiti	3.220.000	1.000.000		4.220.000						8.440.000
	JUMLAH	66.860.000	81.240.000	3.720.000	29.984.400	320.000	4.540.000	490.000	490.000	139.154.400	



Tabel V.3.1.2.28. Piutang Lainnya - Piutang Klaim RS
 Pratama Batang Sangir

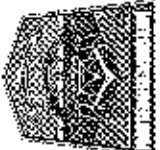
No	BULAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)
1	Piutang Klaim Oktober Perding		12.561.900
2	Piutang Klaim Oktober Susulan		182.200
3	Piutang Klaim November		97.631.100
4	Piutang Klaim Desember		138.485.300
	JUMLAH		218.860.500

C. Beban Dimuka Dimuka 31 Dec 2023 31 Dec 2023
 (Rp) (Rp)
 140.952.419,00 380.585.19,00

Beban dibayar dimuka pada kondisi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp130.959.419,00 jika dibandingkan dengan saldo pada 31 Desember 2022 sebesar Rp380.518.319,00 terjadi penurunan saldo sebesar Rp249.558.900,00 atau sebesar 65,58%, Jumlah tersebut merupakan beban dibayar dimuka yang terdapat pada Peringkat Daerah yang berasal dari sisa manfaat atas pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.1.3. Beban dibayar dimuka

No	Peringkat Daerah	31 Dec 21	31 Dec 22	Kondisi Perkiraan	Pisren 1956
		(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Pendidikan, Kepernudaan dan Olah Raga	857.725,00	267.502,00	590.225,00	220,64
2	Dinas Kesehatan	5.676.242,00	0,00	5.676.242,00	0,00
3	Rumah Sakti Umum Daerah (RUMUD)	3.184.133,00	3.882.696,00	(720.563,00)	(18,55)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertamanan	1.004.167,00	3.258.233,00	(2.254.066,00)	(69,19)
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	12.101.669,00	7.476.992,00	4.624.677,00	61,85
6	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	7.777.192,00	1.843.496,00	6.133.696,00	373,21
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.367.425,00	7.378.117,00	(2.020.692,00)	(27,59)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.989.076,00	828.000,00	1.161.076,00	140,23
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.220.883,00	2.402.432,00	(181.549,00)	(7,56)
10	Dinas Pengendalian Peruduk, Kelangka Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.034.646,00	3.394.113,00	680.533,00	20,55
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.421.550,00	277.152.696,00	(275.733.146,00)	(99,49)
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	912.667,00	768.829,00	145.828,00	19,02
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.124.075,00	0,00	1.124.075,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.368.838,00	2.068.671,00	(701.733,00)	(29,92)
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	751.663,00	692.771,00	96.892,00	14,80
16	Dinas Perikanan, Kehutanan dan Perikanan	12.698.500,00	12.134.567,00	561.933,00	4,63

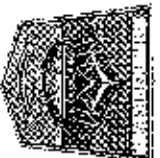


CATATAN KASUS TUNJUKAN BELAKANG
REKONSILIASI LABA RUGI BUDIDAYA PERIKANAN SOLIK, KABUPATEN
KABUPATEN ANGGARAN 2023

NOVEMBER 2023

No	Revisi/Perbaikan/Perubahan	1 Des-23 (Rp)	31 Des-22 (Rp)	Ketertakan Perubahan (Rp)	Perseri dasar
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	212.245.051,00	424.185.813,00	(211.940.762,00)	(49,96)
8	Dinas Sosial, Pembudayaan Masyarakat dan Desa	21.482.900,00	17.528.000,00	3.955.900,00	21,98
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	692.077.371,00	652.708.359,00	39.369.012,00	5,67
10	Dinas Pengendalian Pandaluk, Keuangan Berencana, Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.310.000,00	2.178.000,00	3.132.000,00	143,80
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.183.166,00	1.415.600,00	2.767.566,00	195,53
12	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.710.000,00	1.528.000,00	5.182.000,00	340,20
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	3.248.000,00	0,00	3.248.000,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.330.000,00	727.000,00	(1.140.000,00)	(15,66)
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.815.000,00	1.236.000,00	5.489.000,00	410,49
16	Dinas Pertanian, Kelaharan, Pangan dan Perikanan	1.268.704.477,90	671.554.881,90	597.149.486,00	88,98
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	31.776.000,00	56.214.500,00	(24.438.500,00)	(49,47)
18	Sekretariat Daerah	8.580.090,00	6.741.000,00	2.419.090,00	39,39
19	Sekretariat DPRD	52.218.000,00	8.244.450,00	43.973.550,00	533,37
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.276.000,00	3.308.500,00	167.500,00	5,39
21	Badan Pengeliatan Keuangan Daerah (SKPD)	476.055.610,00	480.315.610,00	(3.260.000,00)	(1,10)
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.300.000,00	4.220.000,00	(920.000,00)	(7,55)
23	Inspektorat Daerah	771.000,00	925.500,00	(154.500,00)	(16,69)
24	Kecamatan Kotik Perik Gadang Diarah	630.000,00	192.000,00	438.000,00	228,13
25	Kecamatan Sungai Pagu	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00
26	Kecamatan Sangir	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Sangir Jujuan	383.000,00	688.000,00	(205.000,00)	(34,64)
29	Kecamatan Sangir Batang Harai	289.000,00	510.000,00	(222.000,00)	(43,53)
28	Kecamatan Pauh Dyo	313.000,00	860.500,00	(547.500,00)	(63,68)
30	Kecamatan Sangir Balai Janggo	873.850,00	202.000,00	671.850,00	332,50
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	970.000,00	1.174.000,00	(204.000,00)	(17,38)
	Jumlah	21.474.166.507,74	27.293.655.844,90	(5.819.489.337,16)	(21,32)

Rincian persediaan berdasarkan jenis persediaan Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel V.3.1.4.1. Rincian persediaan per jenis persediaan

No	Jenis Persediaan	31 Des-22		31 Des-23		Kurang/Lebih	Persen
		Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Bahan Kimia	148.407.026,00	128.424.424,00	24.982.602,00	23,24		
2	Bahan Bakar dan Pelumas	86.917.230,00	32.235.015,00	54.682.185,00	159,64		
3	Bahan/Bibit Ternak/Silvikultur	464.665.400,00	3.8337.800,00	146.327.500,00	45,97		
4	Bahan Lainnya	27.708.200,00	1.374.891.579,00	(1.347.283.379,00)	(97,98)		
5	Alat Tulis Kantor	503.105.076,00	522.309.745,00	(39.203.665,00)	(17,23)		
6	Kertas dan Cover	33.978.065,00	16.250.910,00	17.727.155,00	109,37		
7	Bahan Cetak	731.003.105,00	889.426.784,00	81.577.312,00	9,20		
8	Benda Pos	3.080.000,00	2.950.000,00	110.000,00	3,73		
9	Alat Listrik	60.476.823,00	79.358.600,00	(19.381.777,00)	(24,27)		
10	Asal/bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya	1.950.000,00	1.074.699,00	(875.301,00)	(92,59)		
11	Obat	11.868.181.383,84	9.969.519.422,00	1.898.661.961,84	20,05		
12	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	6.929.596.490,00	19.428.228.942,00	(8.598.632.452,00)	(49,14)		
13	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjangka	473.962.645,90	609.485.245,90	(135.522.600,00)	(22,24)		
14	Natura	53.918.152,00	28.320.895,00	25.597.257,00	90,37		
15	Pakan	67.244.000,00	87.244.000,00	0,00	0,00		
	Jumlah	21.474.166.507,74	27.293.655.844,90	(5.819.489.337,16)	(21,32)		

1. Persediaan Bahan Kimia

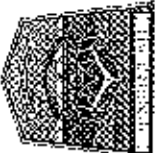
Persediaan Bahan Kimia Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp148.407.026,00 sementara pada 31 Desember 2022 sebesar Rp123.424.424,00. Terjadi kenaikan nilai persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp24.982.602,00 atau naik sebesar 20,24 %. Berikut daftar persediaan Bahan Kimia pada setiap OPD:

Tabel V.3.1.4.2. Persediaan Bahan Kimia

No	Perangkat Daerah	31 Des-22		31 Des-23		Kurang/Lebih	Persen
		Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga	466.000,00	0,00	466.000,00	0,00		
2	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	42.779.026,00	23.424.424,00	19.354.602,00	15,63		
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	0,00		
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00		
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.236.000,00	0,00	3.236.000,00	0,00		
	Jumlah	148.407.026,00	123.424.424,00	24.982.602,00	20,24		

2. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas

Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp86.917.200,00 dan rincian persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



Tabel V.3.1.4.3. Persediaan Bahan Bakar dan Petumas

No	Persediaan Bahan	31 Desember 2022		31 Desember 2023	
		Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Kelebihan/Kekurangan (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Perumatan, Perumukan dan Lingkungan Hidup	64.214.200,00	29.149.515,00	65.064.686,00	188,93
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.703.000,00	3.095.500,00	(382.500,00)	(12,43)
	Jumlah	86.917.200,00	32.235.015,00	54.682.185,00	169,84

3. Persediaan Bibit Ternak- Bibit Ikan

Persediaan Bibit Ternak- Bibit Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp464.665.400,00 dengan rincian pada setiap Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.4.4. Persediaan Bibit Ternak- Bibit Ikan

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2022		31 Desember 2023	
		Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Kelebihan/Kekurangan (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Perikanan, Kelautan Pangan dan Perikanan	464.665.400,00	318.337.600,00	146.327.800,00	45,97
	Jumlah	464.665.400,00	318.337.600,00	146.327.800,00	45,97

4. Persediaan Bahan Lainnya

Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.708.200,00 dengan rincian pada setiap Perangkat Daerah seperti di bawah ini:

Tabel V.3.1.4.5. Persediaan Bahan Lainnya

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2022		31 Desember 2023	
		Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Kelebihan/Kekurangan (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan, Kepernudaan dan Olah Raga	0,00	3.464.000,00	(3.464.000,00)	(100,00)
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RLUD)	19.389.000,00	1.368.063.779,00	(1.348.674.779,00)	(98,80)
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	1.070.800,00	(1.070.800,00)	(100,00)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00
6	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
7	Sekretariat DPRD	7.109.200,00	2.208.000,00	4.901.200,00	221,87
	Jumlah	27.708.200,00	1.374.991.579,00	(1.347.283.379,00)	(97,98)

5. Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp502.397.076,00, dengan rincian pada setiap Perangkat Daerah seperti tabel di bawah ini:



Tabel V.3.1.4.6. Persediaan Alat Tulis Kantor

No.	Daerah/Besok	Rp			
		Provinsi	Daerah	Kepulauan	Perserik
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga	2.475.000,00	22.335.285,00	(13.860.285,00)	(88,92)
2	Purnah Sakat Umum Daerah (BLUD)	19.253.800,00	782.000,00	18.461.800,00	2.337,04
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan	473.250,00	1.163.500,00	(685.250,00)	(58,90)
4	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.632.000,00	4.942.000,00	(3.242.000,00)	(69,01)
5	Satuan Pol PP dan Peradam Kebekaran	305.000,00	704.000,00	(399.000,00)	(56,98)
6	Badan Pengusahaan Bencana Daerah	823.340,00	1.030.835,00	(207.292,00)	(20,11)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	898.300,00	1.678.000,00	(779.100,00)	(46,43)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	439.189.350,00	481.438.975,00	(42.359.625,00)	(8,79)
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.325.000,00	435.000,00	930.000,00	212,79
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.008.833,00	1.353.500,00	1.655.333,00	122,30
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.935.000,00	740.000,00	1.195.000,00	181,49
12	Dinas Perhubungan dan Keatsipan	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	338.600,00	227.600,00	111.000,00	48,77
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.605.000,00	1.335.000,00	(390.000,00)	(24,72)
15	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.817.250,00	4.817.250,00	0,00	0,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.773.000,00	3.195.000,00	(422.000,00)	(18,21)
17	Sekretariat Daerah	3.277.300,00	3.317.500,00	(40.200,00)	(1,39)
18	Sekretariat DPRD	12.937.800,00	3.266.000,00	9.671.800,00	296,14
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.848.000,00	2.903.500,00	(1.282.500,00)	(43,41)
20	Badan Pengsolaian Keuangan Daerah (SKPD)	0,00	430.000,00	(430.000,00)	(100,00)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.271.000,00	3.233.000,00	(2.022.000,00)	(61,40)
22	Inspektorat Daerah	571.000,00	925.500,00	(354.500,00)	(35,30)
23	Kecamatan Kota Parik Gading Diateh	380.000,00	192.000,00	188.000,00	87,92
24	Kecamatan Sungai Ragu	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00
25	Kecamatan Sangir Juana	188.000,00	376.000,00	(208.000,00)	(56,32)
26	Kecamatan Siau Dolo	68.000,00	235.000,00	(167.000,00)	(71,06)
27	Kecamatan Sangir Balai Janggo	873.650,00	560.500,00	13.150,00	1,52
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	502.387.076,00	542.306.735,00	(39.911.659,00)	(7,36)

6. Persediaan Kertas Cover
Persediaan Kertas Cover per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.891.065,00 dengan rincian per Perangkat Daerah sebagai berikut:



Tabel V.3.1.4.7. Persediaan Kertas Cover

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Saldo Akhir	Konsumsi	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	3.345.000,00	498.000,00	3.347.000,00	672,09
3	Dinas Perumahan, Perumahan dan Lingkungan Hidup	1.135.000,00	0,00	1.195.000,00	0,00
4	Satuan Pol PP dan Pemdaer Kabakeran	587.500,00	0,00	587.500,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	323.340,00	434.010,00	(107.670,00)	(24,81)
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.584.000,00	1.649.500,00	936.000,00	36,90
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.525.125,00	0,00	5.525.125,00	0,00
8	Dinas Pangerdalan Penduduk, Keluaga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Penyulung Anak	2.975.000,00	705.000,00	2.270.000,00	321,99
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00
10	Dinas Peranmas, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
11	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	85.000,00	0,00	86.000,00	0,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi	274.400,00	433.400,00	(225.000,00)	(25,05)
13	Dinas Paralela dan Keadayaan	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
14	Dinas Peranmas, Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.385.500,00	6.225.500,00	0,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	1.883.200,00	265.000,00	1.588.200,00	599,32
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00
17	Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPD)	0,00	4.830.000,00	(4.830.000,00)	(100,00)
18	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00	0,00
19	Inspektorat Daerah	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
20	Kecamatan Sungat Pagi	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
21	Kecamatan Sangir Batang Hari	138.000,00	122.000,00	18.000,00	13,11
22	Kecamatan Paoh Duo	215.000,00	275.000,00	(60.000,00)	(21,82)
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	515.000,00	639.000,00	(124.000,00)	(19,41)
	Jumlah	32.891.065,00	16.250.910,00	16.640.155,00	102,40

7. Persediaan Bahan Cetak

Persediaan bahan cetak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp731.003.106,00 dengan rincian persediaan per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



Tabel V.3.1.4.8. Persediaan Bahan Cetak

No	Perangkat Daerah	31 Desember		Kecamatan Perkiraan (Rp)	Persen 1999
		(Rp)	(Rp)		
1	Satuan Pol Pas dan Pamadat Kabakaran	2.812.500,00	4.500.000,00	(1.687.500,00)	(37,50)
2	Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil	243.893.896,00	1.69.839.594,00	74.315.312,00	43,81
3	Dinas Pengendalian, Perizinan, Keluaraga, Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	350.000,00	1.038.000,00	(488.000,00)	(47,01)
4	Dinas Pananamar, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.700.000,00	485.000,00	3.215.000,00	682,89
5	Dinas Fergusonstakaan dan Keasipian	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	0,30
6	Dinas Pertanian, Kelahanan Pangan dan Perikanan	561.600,00	561.600,00	0,00	0,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	14.855.000,00	(14.855.000,00)	(100,00)
8	Sekretariat Daerah	2.077.500,00	2.200.000,00	(122.500,00)	(5,57)
9	Sekretariat D-PRD	250.000,00	0,00	250.000,00	0,30
10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	475.055.610,00	475.055.610,00	0,00	0,00
11	Sadan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	950.000,00	802.000,00	(452.000,00)	(56,26)
12	Kecamatan Sangri Juluan	1.05.000,00	210.000,00	(105.000,00)	(50,00)
13	Kecamatan Sangri Betang Ha1	731.003.106,00	80.000,00	70.000,00	87,50
	Jumlah	731.003.106,00	669.425.794,00	61.577.312,00	9,20

8. Persediaan Benda Pos

Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.060.000,00 dengan rincian persediaan Benda Pos per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.4.9. Persediaan Benda POS

No	Perangkat Daerah	31 Desember		Kecamatan Perkiraan (Rp)	Persen 1999
		(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Pendidikan, Kapemudaan dan Olah Raga	600.000,00	1.700.000,00	(1.100.000,00)	(84,71)
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
3	Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	60.000,00	(60.000,00)	(100,00)
6	Sekretariat Daerah	250.000,00	410.000,00	(160.000,00)	(39,02)
7	Sekretariat DPRD	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
9	Badan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	840.000,00	100.000,00	740.000,00	740,00
10	Kecamatan Kota Park Gandang Diateh	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
11	Kecamatan Pauh Duri	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
12	Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik	0,00	80.000,00	(80.000,00)	(100,00)
	Jumlah	3.060.000,00	2.950.000,00	110.000,00	3,73



9. Persediaan Alat Listrik
 Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.476.823,00 dengan rincian persediaan Alat Listrik per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.4.10. Persediaan Alat Listrik

No	Kategori Persediaan	Des-23		Des-22		Kumulatif	Perisri
		RPB	RPB	RPB	RPB		
1	Dinas Persidikan, Kemudahan dan Olah Raga	1.615.000,00	3.219.000,00			(1.604.000,00)	(49,23)
2	Rumah Sakti Umum Daerah (BLUD)	1.760.000,00	539.000,00			1.211.000,00	224,88
3	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	51.724.400,00	74.509.800,00			(22.784.200,00)	(32,58)
4	Dinas Keanjurudukan dan Pencatatan Sipil	2.157.000,00	1.430.000,00			757.000,00	54,07
5	Dinas Pengendalian Perilaku, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	270.000,00	0,00			270.000,00	0,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	329.333,00	22.000,00			307.333,00	1.396,57
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	480.000,00	170.000,00			310.000,00	182,35
8	Sekretariat Daerah	1.108.090,00	0,00			1.108.090,00	0,00
9	Sekretariat DPRD	473.000,00	0,00			473.000,00	0,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	460.000,00	0,00			460.000,00	0,00
11	Kecamatan Sangir, Jiluan	110.000,00	0,00			110.000,00	0,00
	Jumlah	60.476.823,00	79.858.600,00			(19.381.777,00)	(24,27)

10. Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya
 Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.950.000,00 dengan rincian per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.4.11. Rincian Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya

No	Perangkat Daerah	31 Des-23		31 Des-22		Kumulatif	Perisri
		RPB	RPB	RPB	RPB		
2	Rumah Sakti Umum Daerah	0,00	7.489.683,00			(7.489.683,00)	(100,00)
3	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.950.000,00	3.450.000,00			(1.500.000,00)	(43,48)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	40.000,00			(40.000,00)	(100,00)
5	Dinas Kesehatan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00			0,00	0,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Perawatan Terpadu Satu Pintu	0,00	70.000,00			(70.000,00)	(100,00)
8	Sekretariat DPRD	0,00	0,00			0,00	0,00
9	Kecamatan Pauh Duo	0,00	0,00			0,00	0,00
10	Badan Kesejawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	25.000,00			(25.000,00)	(100,00)
	Jumlah	1.950.000,00	11.074.683,00			(9.124.683,00)	(82,39)



11. Persediaan Obat
 Persediaan Obat per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.968.181.383,84 dengan rincian per Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.4.12. Rincian Persediaan Obat

No	Persediaan Obat	Kabupaten		Kota		Jumlah
		Sidoarjo (Rp)	Blora (Rp)	Surabaya (Rp)	Blora (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	0,00	619.170,00	(619.170,00)		(100,00)
2	Dinas Kesehatan	8.976.571.628,84	8.112.979.572,00	868.592.056,84		10,84
3	Rumah Sakti Umum Daerah (RLUD)	2.744.741.621,00	1.777.368.546,00	967.375.075,00		54,43
4	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Perikanan	246.868.134,00	78.554.134,00	168.314.000,00		214,28
	Jumlah	11.968.181.383,84	9.969.519.422,00	1.998.661.961,84		20,05

12. Persediaan Barang yang Diserahkan ke Masyarakat

Persediaan Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.829.596.430,00 dengan rincian Persediaan Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.4.13. Persediaan Barang yang Diserahkan Ke Masyarakat

No	Persediaan Barang	Kabupaten		Kota		Jumlah
		Sidoarjo (Rp)	Blora (Rp)	Surabaya (Rp)	Blora (Rp)	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tala Ruang dan Pertanahan	6.572.436.244,00	13.360.034.442,00	(6.917.627.992,00)		(50,92)
2	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		0,00
3	Badan Pengusahaan Bencana Daerah	563.104,00	0,00	562.104,00		0,00
4	Dinas Pertanian, Katalanaan Pangan dan Perikanan	210.093.882,00	0,00	210.093.882,00		0,00
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koparasi usaha kecil dan menengah	29.503.000,00	38.164.500,00	(9.661.500,00)		(25,39)
	Jumlah	6.829.596.430,00	13.428.228.942,00	(6.598.632.512,00)		(49,14)

Tabel V.3.1.4.14. Rincian Persediaan Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat

No	Uraian	Saldo Awal		Saldo Akhir
		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	
1	Perluasan Jaringan Air Bersih [1] Air Bersih Jorong Kempung Patak		99.917.000,00	
2	Perluasan Jaringan Perpipaan (DAK) [1] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sertibungun Rumah (SR) Lubuk Gadang Timur		2.218.023.739,00	
3	Perluasan Jaringan Perpipaan (DAK) [1] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sertibungun Rumah (SR) Lubuk Gadang Utara		458.090.000,00	
4	Perluasan Jaringan Perpipaan (DAK) [1] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sertibungun Rumah (SR) Padang Air Dingin		918.000.000,00	
5	Perluasan Jaringan Perpipaan (DAK) [1] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sertibungun Rumah (SR) Talao Sungai Kumyit		1.113.000.000,00	
6	Pertimbangan Gedung Secehmana		89.810.000,00	



No	URAIAN	SALDO AKHIR
7	Pembangunan gedung serba guna (orang bangun refo. Spesifikasi : Pembangunan Gedung Sederhana	148.914.000,00
8	Pembangunan MCK Musalla Kec. Paur Duc, Spesifikasi : Pembangunan Gedung Sederhana	99.915.000,00
9	-Rencanaasi Gedung Kelari Solok Selatan (2022)	487.152.705,00
10	-Rahab Ruangan SKCK dan Sali Intekom Polres Solok Selatan (2021)	99.808.000,00
11	e. Rumah Gadang Pangang Abai	398.780.000,00
12	b. Balai Acat Pasir Talang	489.978.000,00
13	c. Perencanaan Pembangunan Gedung Sarantis Polres Solok Selatan	99.260.000,00
14	d. Pembangunan Pagar dan Pemasangan Paving Blok Masjid Al Mukaramah	99.750.000,00
	JUMLAH	6.572.436.444,00

13. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga per 31 Desember 2023 sebesar Rp473.962.645,90 dengan rincian persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.4.15. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase (Rp)
1	Badan Perangugularan Bencana Daerah	207.829.284,00	419.636.669,00	(211.806.404,00)	(50,47)
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	28,57
2	Dinas Pertanahan, Ketahanan Pangan dan Perikanan	248.133.381,90	175.849.577,90	72.283.804,00	41,11
	Jumlah	473.962.645,90	609.485.245,90	(135.522.600,00)	(22,24)

14. Persediaan Natura

Persediaan Natura per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.913.152,00 dengan rincian persediaan Natura per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.4.16. Persediaan Natura

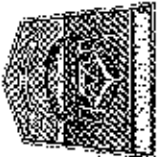
No	Perangkat Daerah	31 Des 23 (Rp)	31 Des 22 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase (Rp)
1	Rumah Sakti Unsur Daerah (BLUD)	22.705.520,00	25.601.835,00	(2.896.783,00)	(11,31)
2	Sekretariat DPRD	31.208.000,00	2.718.950,00	28.499.050,00	1.047,80
	Jumlah	53.913.152,00	28.320.885,00	25.592.267,00	90,67

15. Persediaan Pakan

Persediaan Pakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.244.000,00 dengan rincian persediaan Pakan per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.4.17. Persediaan Pakan

No	Perangkat Daerah	31 Des 23 (Rp)	31 Des 22 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase (Rp)
1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	87.244.000,00	87.244.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	87.244.000,00	87.244.000,00	0,00	0,00



5432	Investasi Jangka Panjang	31 Des 2022	31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)
		59.780.251.630,24	58.874.415.357,24

Investasi jangka Panjang tahun 2023 sebesar Rp59.874.415.357,24 dalam hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp905.836.273,00 atau naik 1,54% dari tahun 2022 sebesar Rp58.874.415.357,24. Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Investasi Permanen	31 Des 2022	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
	59.780.251.630,24	58.874.415.357,24

Investasi Permanen tahun 2023 sebesar Rp59.780.251.630,24 dalam hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp905.836.273,00 atau naik 1,54% dari tahun 2022 sebesar Rp58.874.415.357,24. Investasi Permanen merupakan investasi permanen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.3.2. Rincian Investasi Permanen

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)		(%)
1	Bank Nagari	16.225.000.000,00	15.496.500.000,00	729.000.000,00	4,70
2	PT. Balaijung Citra Jaya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
3	PDAM Sotok Selatan Tirta Saribu Sungai	42.055.251.630,24	41.873.415.357,24	176.836.273,00	0,42
	Jumlah	59.780.251.630,24	58.874.415.357,24	905.836.273,00	1,54

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada masing-masing perusahaan/BUMD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.2.1. Metode Penilaian Investasi Permanen

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Metode Evaluasi
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari	16.225.000.000,00	Metode Biaya
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Balaijung Citra Jaya	1.500.000.000,00	Metode Biaya
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Sotok Selatan Tirta Saribu Sungai	42.055.251.630,24	Metode Ekuitas
	Jumlah	59.780.251.630,24	

Berikut rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2023:
 a. Penyertaan modal pada Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp16.225.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.2.2. Nilai Penyertaan Modal Bank Nagari

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)		(%)
1	Saldo Awal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada	15.496.500.000,00	14.996.000.000,00	500.000.000,00	0,03



No	Bank	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir
1	Bank Nagari					
2	Penyertaan Modal Tahun Berjalan	729.000.000,00	500.000.000,00	229.000.000,00		0,31
		Jumlah : 16.225.000.000,00	16.496.000.000,00	729.000.000,00		0,04

Terdapat kenaikan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera sebesar Rp729.000.000,00 atau meningkat sebesar 0,04%.

Adapun rician penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ke BPD Sumatera Barai (Bank Nagari) per tahunnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel V.3.2.3. Nilai Penyertaan Modal di Bank Nagari

No	Tahun Penyertaan	Kontribusi Modal di Bank Nagari	Nilai per 31 Desember	Tgl. Setor ke Bank Nagari	Nilai per 31 Desember
1	2007	2.000.000.000,00	A.030012	20 September 2007	261.642 s/d 263.641
2	2009	421.000.000,00	A.030032	23 September 2009	360.836 s/d 361.256
3	2010	1.579.000.000,00	A.030051	06 September 2010	405.726 s/d 407.302
4	2012	683.000.000,00	A.030076	28 Juni 2012	481.691 s/d 482.323
5	2012	1.363.000.000,00	A.030101	10 Januari 2013	597.398 s/d 598.760
6	2015	2.030.000.000,00	A.030179	2 Februari 2016	1.149.281 s/d 1.151.280
7	2016	2.030.000.000,00	A.030200	09 Februari 2017	1.358.722 s/d 1.360.721
8	2018	1.500.000.000,00	A.030226	07 Juni 2018	1.574.986 s/d 1.576.485
9	2019	1.000.000.000,00	A.030242	07 April 2020	1.073.145 s/d 1.080.144
10	2020	2.030.000.000,00	A.030250	26 Januari 2021	1.713.849 s/d 1.715.847
11	2021	500.000.000,00	A.030333		
12	2022	500.000.000,00	A.030333		
13	2023	729.000.000,00	A.030333		
	JUMLAH	16.225.000.000,00			

Adapun jumlah lembar saham berdasarkan modal yang disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai per Saham	Total Nilai Saham	Persentase Kepemilikan
Seria	16.225	1.000.000,00	16.225.000.000,00	0,98

b. Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp1.500.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.2.4. Nilai Penyertaan Modal PT. Balairung Citra Jaya per Tahun

Tahun	Jumlah	seri A no 52-708 s.d 53-607	seri B no. 35-137-400 s.d 35-737-399
2007	800.000.000,00		
2008	500.000.000,00		
TOTAL	1.500.000.000,00		

Penyertaan modal yang dilakukan pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyertaan modal.



Tabel V.3.3.1. Rincian Aset Tetap per Golongan

Jenis Aset	31 Desember 2022		31 Desember 2023		Saldo per 31 Desember 2023
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Tanah	366.709.327.859,00	124.816.750,00	0,00	366.834.744.609,00	
Paralel dan lain-lain	243.863.123.810,08	3.130.960.308,00	5.805.507.472,00	369.498.477.248,88	
Gedung dan Bangunan	757.522.030.597,20	40.824.640.896,00	9.295.751.086,00	792.350.970.350,20	
Jalan, Teras, dan Jembatan	1.410.782.448.374,04	77.796.945.273,00	4.344.284.928,00	1.484.225.103.721,04	
Aset Tetap Lainnya	46.037.518.047,04	5.842.804.218,00	15.552.269,00	51.890.770.995,04	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	67.015.583.293,00	7.133.454.048,00	7.532.038.582,00	66.586.957.759,00	
Nilai Aset Tetap	2.992.000.662.981,27	165.553.522.036,00	26.949.160.336,00	3.130.605.024.681,27	
Akumulasi Penyusutan	11.150.700.964.087,791			(1.315.682.286.253,68)	
Nilai Buku	1.841.299.698.893,48			1.814.922.738.427,59	

Penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap lebih rinci disajikan pada *Lampiran 9* sampai dengan *Lampiran 25*. Saldo dan mutasi dari masing-masing golongan aset tetap per 31 Desember 2023 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.3.1 TANAH	31 Des 2022		31 Des 2023	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	366.834.744.609,00		366.709.927.859,00	

Perhitungan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp.366.834.744.609,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	366.709.927.859,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	124.816.750,00
Jumlah	Rp	366.834.744.609,00
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2023	Rp	366.834.744.609,00

Aset Tetap berupa tanah senilai Rp366.834.744.609,00 merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang berhartaiah sebanyak 407 persil, dari jumlah aset tanah tersebut sebagian sudah memiliki sertifikat sebanyak 176 bidang/persil dari 407 persil bidang tanah, sementara untuk yang belum bersertifikat masih dalam proses alas hak maupun peningkatan sertifikasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Selatan.

Adapun penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp 124.816.750,00 terdiri dari:

Belanja Modal Tanah	Rp	19.108.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal KTB C	Rp	104.639.665,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.069.085,00
Jumlah Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah	Rp	124.816.750,00



Rincian Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp19.108.000,00 yang berasal dari belanja modal tanah tahun 2023 untuk pengadaan tanah jalan berupa penggantian tanaman pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan.

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp104.639.665,00 merupakan penambahan nilai Aset Tetap Tanah yang berasal dari reklasifikasi belanja modal KIB C pada Kecamatan Sangir yang merupakan pekerjaan pemertanahan lahan pada Kantor Camat Sangir yang menambah nilai aset tanah.

Penambahan nilai aset tanah sebesar Rp1.069.085,00 merupakan penambahan nilai Aset Tetap Tanah yang berasal dari atribusi atas belanja barang dan jasa berupa honorarium pelaksanaan pekerjaan pada Kecamatan Sangir untuk pekerjaan rehabilitasi gedung kantor (pekerjaan perawatan lahan).

Selain penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Tanah untuk tahun 2023, juga terdapat mutasi Aset Tetap Tanah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solik Selatan dengan nilai sebesar Rp11.499.066.214,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel V.3.3.2. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah antar OPD

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Saldo Awal Tahun (Rp)	Perubahan Saldo Akhir Tahun (Rp)	Saldo Akhir Tahun (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	0,00	9.633.851.214,00	9.633.851.214,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertubunguan	892.680.000,00	0,00	892.680.000,00
3.	Dinas Pertubunguan	0,00	832.680.000,00	832.680.000,00
4.	Dinas Kesehatan	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	335.000.000,00	0,00	335.000.000,00
6.	Dinas Perwisata, Kebudayaan, Kependidikan dan Olahraga	9.633.851.214,00	0,00	9.633.851.214,00
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	697.535.000,00	697.535.000,00
8.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	697.535.000,00	0,00	697.535.000,00
	Jumlah	11.499.066.214,00	11.499.066.214,00	11.499.066.214,00

5.3.3.2. Perubahan dan Mutasi	31 Des 2023	31 Des 2022
	(Rp)	(Rp)
	369.488.477.246,00	343.963.123.810,99

Perhitungan nilai Aset Tetap Perangkat dan Mesin sebesar Rp369.520.286.246,99 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	343.963.123.810,99
Penambahan Tahun 2023	Rp	31.130.860.908,00
Jumlah	Rp	375.093.984.718,99
Pengurangan Tahun 2023	Rp	5.605.507.472,00



Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 Rp 369.488.477,246,99
Akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Rp (271.954.129.505,09)
Mesin per 31 Desember 2023
Nilai Buku Rp 97.534.347.741,90

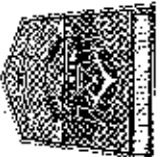
Tabel V.3.3.3. Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kategori	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1. Alat Beser	13.895.611.679,00	3.025.925.780,00	257.500,00	17.624.280.280,00
2. Alat Angkutan	73.103.206.993,00	6.898.787.580,00	1.158.325.000,00	78.245.689.483,00
3. Alat Benkel dan Alat Ukur	2.243.248.047,00	30.947.834,00	-	2.274.095.881,00
4. Alat Peralatan	2.682.175.745,00	54.122.750,00	-	2.746.898.495,00
5. Alat Kantor dan Peralajar Tangga	88.949.549.383,00	6.380.432.298,00	1.288.591.014,00	74.051.389.589,00
6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemasar	13.356.212.983,00	337.033.903,00	2.119.000,00	13.482.651.786,00
7. Alat Kelesterian Dan Keperawatan	77.92.787.586,91	6.280.117.641,00	2.319.935.624,00	63.800.309.618,91
8. Alat Laboratorium	33.300.083.586,06	1.184.837.024,00	479.368.824,00	34.008.611.388,06
9. Alat Peralayanan	124.085.000,00	1.270.000,00	-	125.475.000,00
10. Komputer	51.346.246.980,40	3.225.685.570,00	36.231.710,00	55.008.791.250,40
11. Alat Keselamatan Kerja	1.900.819.225,00	658.991.000,00	-	2.459.810.225,00
12. Rambu – Rambu	3.875.719,941,00	65.700.000,00	-	4.081.419.941,00
13. Peralatan Olan Hage	654.450.409,00	48.940.600,00	1.600.000,00	702.189.909,00
Jumlah	343.963.123.610,99	91.130.660.908,00	5.805.507.472,00	389.488.477.246,99

Terdapat penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.130.860.908,00 yang berasal dari:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 22.506.603.027,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BOS dan BILD)	Rp 3.832.579.964,00
Reklasifikasi dari entry Belanja Modal KIB C	Rp 426.321.838,00
Reklasifikasi dari entry Belanja Modal KIB F	Rp 46.597.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya/rusak berat	Rp 676.725.310,00
Hibah	Rp 3.557.091.270,00
Atribusi belanja barang dan jasa dan belanja pegawai	Rp 84.942.499,00
Jumlah Penambahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 31.130.860.908,00

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 adalah sebesar Rp22.506.603.027,00, berikut rincian belanja modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD):



Tabel V.3.3.4. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

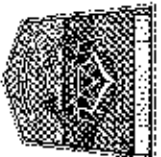
No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.840.965.964,00
2	Dinas Kesehatan	7.994.481.540,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	7.633.634.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Peribumhan	899.225.654,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	77.710.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.550.000,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	13.000.000,00
8	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	158.580.000,00
9	Kantor Kesehatan Bangsa	56.300.000,00
10	Dinas Polisi Pamong Praja dan Peradatar, Ketelanaan	138.500.000,00
11	Zadon Penguji/ujian Bencana Daerah	288.160.000,00
12	Sekretariat Daerah	1.624.086.480,00
13	Sekretariat DPRD	131.387.000,00
14	Badan Pengelolan Keuangan Daerah	153.000.000,00
15	Inspektori Daerah	12.950.000,00
16	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.800.000,00
17	Dinas Peranam Model dan Pelayaran Terpadu Satu Pintu	65.900.000,00
18	Kecamatan KPGD	40.597.730,00
19	Kecamatan Sangir	39.111.375,00
20	Kecamatan Sangir Jujuan	5.797.050,00
21	Kecamatan Sangir Batang Hari	10.000.000,00
22	Kecamatan Pauh Dux	1.990.000,00
23	Kecamatan Sangir Balai Janggo	19.560.000,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.549.000,00
25	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	13.840.000,00
26	Dinas Perencanaan, Kelengkapan Pangan dan Perikanan	605.482.250,00
27	Dinas Komunikas dan Informatika	273.494.000,00
28	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.111.600,00
Jumlah		22.506.603.027,00

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari belanja modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan, belanja modal dari Dana Kapitasi JKN Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.832.579.964,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.5. Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dari Belanja BOS, Kapitasi JKN dan BLUD

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.558.754.266,00
2	Dinas Kesehatan	460.482.883,00
3	Jumlah Sekali Umam Daerah (BLUD)	813.392.815,00
Jumlah		3.832.579.964,00

Rincian realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.558.754.266,00, adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :



Tabel V.3.3.6. Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dari Belanja BOS

No.	Jenis	Nilai (Rp)
1.	Alat Besar	4.486.290,30
2.	Alat Banglek Dan Alat Ukur	1.125.000,00
3.	Alat Partelan	5.000.000,00
4.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.212.820.308,00
5.	Asat Studio, Komunikasi Dan Penerima	44.287.100,00
6.	Alat Keokteran dan Kesehatan	250.000,00
7.	Alat Laboratorium	255.967.844,00
8.	Komputer	988.266.228,00
9.	Alat Keselamatan Kerja	31.771.530,00
10.	Peralatan Olah Raga	16.800.000,00
Jumlah		2.558.754.265,00

Rincian realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp460.432.883,00 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.3.7. Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dari Dana Kapitasi JKN

No.	Jenis	Nilai (Rp)
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	227.498.283,00
2.	Komputer	232.939.800,00
Jumlah		460.432.883,00

Rincian realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD sebesar Rp813.392.815,00 adalah sebagai berikut:

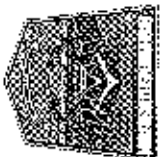
Tabel V.3.3.8. Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dari BLUD

No.	Jenis	Nilai (Rp)
1.	Asat Kantor Dan Rumah Tangga	447.945.686,00
2.	Asat Studio, Komunikasi Dan Penerima	5.453.269,00
3.	Alat Keokteran Dan Kesehatan	136.237.771,00
4.	Alat Laboratorium	64.812.250,00
5.	Komputer	127.543.840,00
6.	Alat Keselamatan Kerja	1.250.000,00
Jumlah		813.392.815,00

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi entry belanja modal KHB C sebesar Rp 426.321.838,00 merupakan reklasifikasi dari entry belanja modal Gedung dan Bangunan yang direalisasikan dalam bentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan, sehingga menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.9. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Jenis	Nilai (Rp)
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.687.188,00
2.	Alat Laboratorium	419.634.650,00
Jumlah		426.321.838,00



Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi entry belanja modal KIB E sebesar Rp 46.597.000,00 merupakan reklasifikasi dari entry belanja modal Aset Tetap Lainnya yang direalisasikan dalam bentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan, sehingga menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.10. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Jenis	Jumlah Rp
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.597.000,00
2.	Alat Keselamatan Kerja	3.000.000,00
Jumlah		46.597.000,00

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi dari Aset Lain-lain (Aset Rusak) sebesar Rp676.725.310,00 pada Sekretariat Daerah berupa kendaraan operasional minibus dan jeep yang sebelumnya dimanfaatkan pihak lain melalui pinjaman pakai..

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari hibah sebesar Rp3.557.091.270,00 merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan yang asetya telah diterima pada tahun anggaran 2014 dan 2015 yang lalu, sedangkan dokumen dan berita acara hibah diserahterimakan pada tahun anggaran 2023 dari Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KN.01.08/D.17820/2023 tanggal 04 April 2023, sehingga menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.11. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah

No	Kelompok	Jumlah Rp
1.	Alat Angkutan	1.025.483.000,00
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	826.876.040,00
3.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.912.768.230,00
4.	Alat Laboratorium	7.654.030,00
Jumlah		3.557.091.270,00

Penambahan nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari atribusi belanja barang/jasa dan belanja pegawai yang menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp84.989.999,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.12. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Atribusi Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Pegawai

No	Organisasi/Instansi Asal	Jumlah Rp	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	62.850.999,00	menupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
2.	Dinas Kesehatan	4.969.000,00	atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan	6.540.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	1.250.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai



No	Organisasi (RUP)	Uraian (RUP)	Keterangan
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	570.000,00	menupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
6.	Dinas Perangjangan Bencara Daerah	3.002.500,00	menupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
7.	Sekretariat Daerah	1.440.000,00	menupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
8.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.250.000,00	menupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
9.	Badan Kesejahteraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	680.000,00	menupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
10.	Dinas Peranam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.250.000,00	menupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.170.000,00	menupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
Jumlah		84.942.499,00	

Sedangkan pengurangan terhadap nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.605.507.472,00 terdiri dari :

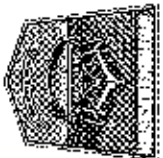
Reklasifikasi entry belanja modal ke KIB C	Rp	76.856.000,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke KIB F	Rp	259.872.386,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya – Aset Lain-lain (Rusak Berat)	Rp	3.742.027.497,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp	82.020.000,00
Dibawah nilai minimum kapitalisasi/Ekstrakontabel	Rp	709.378.104,00
Hibah	Rp	136.917.000,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke belanja barang dan jasa	Rp	511.646.485,00
Penghapusan dari Buku Inventaris	Rp	86.790.000,00
Jumlah Pengurangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin	Rp	5.605.507.472,00

Reklasifikasi entry belanja modal Peralatan dan Mesin ke KIB C sebesar Rp76.856.000,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada OPD Dinas Pendidikan senilai Rp56.856.000 dan Kecamatan Sangir senilai Rp20.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.13. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan

No	Organisasi Peralatan/Daerah	Nilai Perolehan (Rp)	Jenis Aset	Kategori Aset
1.	Dinas Pendidikan	11.100.000,00	SMP N 3 Sodik Salajan	Gazebro
		2.760.000,00	SDN 03 Dusun Tangah	Tanalis gedung
		12.000.000,00	SDN 16 Kampung Baru	Tanalis gedung
		3.000.000,00	SDN 18 Trans Dusun Tengah	Tanalis gedung
		5.000.000,00	SDN 22 Talak Ala Putih	Tertap Parkir
	5.300.000,00	SDN 03 Pakorima	Tertitis gedung	
	11.896.000,00	SDN 08 Pasar M.ara Labuh	Pemasangan rangka aluminium dan kaca	
2.	Kecamatan Sangir	20.000.000,00		Pemasangan interior gedung
Jumlah		76.856.000,00		

Reklasifikasi entry belanja modal Peralatan dan Mesin ke KIB E sebesar Rp259.872.386,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap



Lainnya pada Dinas Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.14. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Angka	Angka Pergerakan
1.	Buku, Alas dan Peta		6.879.453,00
2.	Alat Musik Modern/Barud		252.992.893,00
	Jumlah		259.872.346,00

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya pada Aset Lain-lain dengan kondisi rusak berat sebesar Rp3.742.027.497,00 merupakan reklasifikasi yang mengurangi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan kondisi aset tersebut yang rusak berat dan tidak dioperasikan lagi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.15. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya pada Aset Lain-lain dengan Kondisi Rusak

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Kategori Aset	Kategori Aset	Kategori Aset		Kategori Aset	Kategori Aset
				Revisi	Revisi		
1.	Rumah Sakit Uraji Daerah			2.295.072.624,00	20.097.073,00	2.315.169.697,00	
2.	Sok Alasari Daerah	1.156.325.000,00	68.739.800,00	202.493.000,00	3.000.000,00	1.487.347.800,00	
	Jumlah	1.156.325.000,00	68.739.800,00	204.986.000,00	2.285.072.624,00	32.007.073,00	3.742.027.497,00

Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp82.020.000,00 yang mengurangi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan berupa e-Barcode untuk pencatatan obat-obatan.

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang mempunyai harga perolehan dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (ekstrakomtable) dan tidak memenuhi kriteria aset tetap pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 709.378.104,00, dengan rincian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:

Tabel V.3.3.16. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi (Ekstrakomtable)

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	266.954.804,00
2.	Dinas Kesehatan	44.413.400,00
3.	Punah Sakit Umum Daerah	363.490.000,00
4.	Dinas Paratgulangan Bencana Daerah	257.500,00
5.	Sekretariat Daerah	22.288.400,00
6.	Badan Pengelolan Keuangan Daerah	4.800.000,00
7.	Kacamatan KPGD	7.168.000,00
	Jumlah	709.378.104,00

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp136.917.000,00 yang merupakan hibah dari Dinas Pendidikan senilai Rp 24.997.000,00 kepada beberapa sekolah



swasta/yayasan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Tahun 2023 dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 420/1793/BAST/DISDIK/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan hibah dari Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan, Lingkungan Hidup dan Perhubungan kepada instansi lain berupa hadiah senilai Rp11.920.000,00, dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/205/BPL-2-DPKPLHHUB/VIII-2023, tanggal 28 Agustus 2023, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/207/BPL-2-DPKPLHHUB/VIII-2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/212/BPL-2-DPKPLHHUB/VIII-2023 tanggal 28 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.17. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Berupa Hibah

No.	Organisasi Beribadah	Nilai dan Persentase (Rp)		Keterangan
		Asesmen	Realisasi	
1.	Dinas Pendidikan	114.333.330,00	SD VPTSS Sungai Kuruyik	Lap Top
		2.572.222,00	SD VPTSS Sungai Kuruyik	Router
		8.331.448,00	SD VPTSS Sungai Kuruyik	LCD Projector/focus
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	5.000.000,00	SMA N 33 Solok Selatan	Lemari Es
		3.500.000,00	SMA N 01 Solok Selatan	A.C. Split
		1.710.000,00	MAN 07 Solok Selatan	Dispenser
		1.770.000,00	MISN 02 Solok Selatan	Dispenser
Jumlah		136.917.000,00		

Reklasifikasi entry belanja modal Peralatan dan Mesin ke belanja barang dan jasa sebesar Rp511.646.485,00, merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang merupakan barang habis pakai dan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.18. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Barang dan Jasa

No.	Organisasi Beribadah	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	175.519.961,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
2.	Dinas Kesehatan	53.395.700,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
3.	Rumah Sakti Lumut Daerah	125.905.084,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
4.	Sekretariat Daerah	156.325.740,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
5.	Dinas Pengendalian Perencanaan, Kelangkaan Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	500.000,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
Jumlah		511.646.485,00	

Terdapat pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan penghapusan dari Daftar Inventaris atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 pada Kecamatan Sungai Pagu sebesar Rp 86.790.000,00, merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Alat Studio, Komunikasi dan Penerimaan yang dihapuskan karena bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 lalu dengan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900/224-2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Bencana Kebakaran Berupa Aset-Alat Kantor dan Rumah Tangga Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.



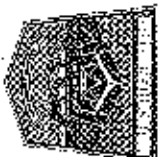
Selain penumbuhan dan pengurangan saldo Aset Tetap, terdapat mutasi saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka elektrifikasi dan efisiensi penggunaan dan pemanfaatan atas barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta adanya re-organisasi atas perubahan SOTK Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.19. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Perubahan Saldo Awal Periode dan Akhir Periode (Rp)		Pembelian/ Saldo Awal Periode (Rp)	Penjualan/ Saldo Akhir Periode (Rp)
		Peningkatan	Penurunan		
1.	Dinas Pendidikan	270.423.225,00		684.956.650,00	
2.	Dinas Kesehatan	306.267.938,00		5.247.131.129,00	
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	5.282.131.129,00		301.067.938,00	
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan	736.221.850,00		396.600.000,00	
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00		13.750.000,00	
6.	Dinas Perhubungan	0,00		6.797.717.886,00	
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	7.304.523.791,00		752.449.431,00	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	415.310.000,00		455.400.000,00	
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.650.000,00		0,00	
10.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemanduan dan Olahraga	55.390.000,00		0,00	
11.	Kantor Kesatuan Bangsa	240.350.000,00		226.800.000,00	
12.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pamdaer Kabupaten	451.600.000,00		0,00	
13.	Sekretariat Daerah	1.401.459.867,00		1.394.865.310,00	
14.	Sekretariat DPRD	464.166.000,00		61.858.200,00	
15.	Badan Pengkajian Keuangan Daerah	539.706.356,00		908.541.701,00	
16.	Inspektoriat Daerah	25.000.000,00		0,00	
17.	Badan Kepegawaian Dan Pengambargar Sumber Daya Manusia	11.859.000,00		0,00	
18.	Dinas Penanari Nodai dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	226.600.000,00		267.590.000,00	
19.	Kecamatan Sengir	4.150.000,00		0,00	
20.	Kecamatan Sangir Besar Jergo	224.014.505,00		0,00	
21.	Kantor Perwujudan & Ketahanan Pangan Dinas Pengendalian Peruduk, Keluaraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00		1.982.490.744,00	
22.	Dinas Perustakaan dan Keatsipan	0,00		35.000.000,00	
23.	Dinas Perumahan, Ketahanan Pangan dan Perkotaan	1.982.490.744,00		25.000.000,00	
24.	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.875.000,00		452.467.982,00	
25.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52.984.826,00		0,00	
26.	Jumlah	20.003.513.041,00		20.003.513.041,00	

Kepala OPD Kabupaten Solok Selatan
 (Rp) 20.003.513.041,00
 Kepala OPD Kabupaten Solok Selatan
 (Rp) 20.003.513.041,00

Perhitungan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 792.050.970.350,20 adalah sebagai berikut :



Saldo per 31 Desember 2022	Rp	757.522.080.597,20
Perambahan Tahun 2023	Rp	43.824.640.839,00
Jumlah	Rp	801.346.721.436,20
Pengurangan Tahun 2023	Rp	9.295.751.086,00
Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023	Rp	792.050.970.350,20
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	Rp	(161.895.552.315,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	Rp	630.155.418.035,20

Adapun rincian perambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel V.3.3.20. Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

No	Deskripsi	Saldo 1 Januari 2023 (Rp)	Pengurangan (Rp)	Perambahan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Bangunan Gedung Tetap Kerig	700.797.427.785,93	39.071.172.467,00	8.903.976.086,00	731.244.826.196,93
2.	Bangunan Gedung Tetap Tripoli	31.124.1125.560,00	1.872.326.103,00	92.086.050,00	32.801.966.078,00
3.	Candi Tripoli	2.898.820.461,00	0,00	0,00	2.898.820.461,00
4.	Peringatan/Prasasti Bangunan Menara Perambuan	730.571.520,00	0,00	0,00	730.571.520,00
5.	Tugu/Tanda Batas	22.084.185.220,57	2.581.142.264,00	279.690.400,00	24.385.847.154,57
Jumlah		757.522.080.597,20	43.824.640.839,00	9.295.751.086,00	792.050.970.350,20

Perambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.824.640.839,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	33.210.869.269,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BLUD)	Rp	220.638.988,00
Reklasifikasi dari entry belanja modal KIB B	Rp	76.856.000,00
Reklasifikasi dari KIB F	Rp	7.365.709.582,00
Hibah	Rp	2.486.957.000,00
Atribusi belanja barang dan jasa	Rp	32.456.000,00
Koreksi Tambah Nilai Pencatatan	Rp	431.134.000,00
Jumlah penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	43.824.640.839,00

Realisasi belanja modal atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp33.210.869.269,00, Adapun rincian realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut :



Tabel V.3.3.20. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No	Kategori Belanja (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	16.927.636.650,00
2.	Dinas Kesehatan	696.491.815,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	6.408.956.238,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	4.545.528.187,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	39.500.000,00
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	494.731.623,00
7.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepertanian dan Olahraga	1.345.149.936,00
8.	Dinas Polisi Pamong Praja dan Penadatan Kabarkarah	123.014.000,00
9.	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	49.776.750,00
10.	Sekretariat Daerah	217.573.000,00
11.	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	106.952.000,00
12.	Kecamatan KP-GD	200.000,00
13.	Kecamatan Sangir	195.768.000,00
14.	Kecamatan Sangir Juluan	48.107.717,00
15.	Kecamatan Sangir Batang Hari	174.075.000,00
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	982.814.223,00
17.	Dinas Peranian, Kehutanan, Pangan dan Perikanan	880.854.000,00
Jumlah		33.210.869.269,00

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari belanja modal Dana Kapitasi JKN Puskesmas pada Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah sebesar Rp220.658.988,00 berupa bangunan tempat kerja.

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi entry belanja modal KIB B sebesar Rp76.856.000,00, yang berasal dari Dinas Pendidikan senilai Rp56.856.000 dan Kecamatan Sangir senilai Rp20.000.000, merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.21. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Organisasi Pemerintah Daerah	Harga Perolehan (Rp)	Jenis Aset	Ket
	Dinas Pendidikan	11.103.000,00	SMP N 2 Sokol Selatan	Gazebo
		2.760.000,00	SDN 03 Dusun Tengah	Terasis gedung
		12.000.000,00	SDN 16 Kaungung Baru	Terasis gedung
		8.000.000,00	SDN 18 Trans Dusun Tengah	Terasis gedung
		6.000.000,00	SDN 22 Talrak Ala Pusan	Tempat Parkir
		5.300.000,00	SDN 03 Pekotina	Terasis gedung
		11.896.000,00	SDN 05 Pasar Muara Labuh	Pemasangan rangka alumunium dan kaca
2.	Kecamatan Sangir	20.000.000,00		Pemasangan interior gedung
Jumlah		76.856.000,00		

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi KIB F sebesar Rp7.365.709.582,00, merupakan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengorjaan fisik bangunannya dan telah dimanfaatkan, sehingga dilakukan reklasifikasi ke golongan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian yang terdiri atas :



Tabel V.3.3.22. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Organisasi Pengguna Anggaran (OPDA) dan Organisasi Perangkat Daerah	Tanggal (Rp)	No.
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan	766.784.958,00	Gedung Pertokoan/koperasi/asar Perumahan
2.	Dinas Kesehatan	19.255.000,00	Bangunan Klinik/Puskasmas
3.	Dinas Perpusustakaan dan Kearsipan	6.590.682.629,00	Bangunan Gedung Perpusustakaan Pemerintah
Jumlah		7.385.709.582,00	

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari hibah sebesar Rp2.486.957.000,00, merupakan gedung dan bangunan yang perolehannya bersumber dari hibah instansi lain kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, merupakan serah terima hibah yang dilakukan oleh Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang berupa pembangunan sarana dan prasarana Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan yang pelaksanaan kegiatannya pada tahun anggaran 2007 yang lalu dan proses serah terima hibah dilakukan pada tahun 2023 dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 000.3.3.2/8831/Bangda tanggal 09 Agustus 2023, sebagai berikut:

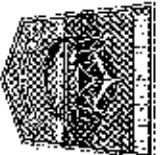
Tabel V.3.3.23. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah

No.	OPDA	Tanggal (Rp)	Instansi
1.	Kecamatan KPGD	640.646.000,00	Rumah Dinas Camat dan Aulia
2.	Kecamatan Sungai Pagu	316.470.000,00	Rumah Dinas Camat
3.	Kecamatan Sangir	816.912.000,00	Bangunan Kantor dan Aulia
4.	Kecamatan Sangir Jiluan	477.343.000,00	Rumah Dinas Camat dan Aulia
5.	Kecamatan Sangir Batang Hari	335.586.000,00	Rumah Dinas Camat dan Aulia
Jumlah		2.486.957.000,00	

Penambahan nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari atribusi belanja barang/jasa dan belanja pegawai yang menambah nilai perolehan aset gedung dan bangunan adalah sebesar Rp32.456.000,00. Penambahan nilai gedung bangunan tersebut berasal dari kegiatan rehabilitasi gedung dan bangunan yang penganggarnya pada belanja operasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 serta atribusi atas honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada beberapa OPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.24. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Atribusi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Pegawai

No.	Organisasi Pengguna Anggaran (OPDA) dan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	1.151.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Perumahan	1.230.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan	9.000.000,00	Rehabilitasi bangunan gedung kantor (permukiman kerentan K)
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	6.760.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
5.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemanduan dan Olahraga	6.530.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
6.	Sekretariat Daerah	680.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa



No	Objek Belanja	Luaran	Keas
7.	Kecamatan Sangir-Juluan	1.930.000,00	merupakan atribusi balai tita pegawai dan belanja barang dari jasa
8.	Kecamatan Sangir-Barang Hari	1.240.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dari jasa
9.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.715.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dari jasa
Jumlah		32.456.000,00	

Penambahan nilai aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 431.134.000,00, merupakan penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan gedung dan bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan berupa Bangunan Fasilitas Umum Lainnya / Toilet yang berlokasi di RTH Solok Selatan Kecamatan Sangir yang sebelumnya tercatat secara gabungan pada bangunan RTH Padang Aro.

Sementara pengurangan terhadap nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 9.295.751.086,00, berasal dari :

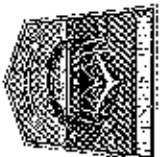
Reklasifikasi ke KIB A	Rp	104.639.665,00
Reklasifikasi ke KIB B	Rp	426.321.838,00
Reklasifikasi ke KIB D	Rp	290.747.955,00
Reklasifikasi ke KIB F	Rp	6.906.262.298,00
Hibeh	Rp	95.717.570,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke belanja barang dan jasa	Rp	200.000,00
Penghapusan aset	Rp	1.040.727.760,00
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	431.134.000,00
Jumlah pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	9.295.751.086,00

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 104.639.665,00, merupakan reklasifikasi entry belanja modal gedung dan bangunan ke KIB A karena realisasi pekerjaan menambah nilai Aset Tetap Tanah pada Kecamatan Sangir.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 426.321.838,00, merupakan reklasifikasi entry belanja modal Gedung dan Bangunan ke KIB B karena realisasi merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut :

Table V.3.3.25. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Mod	Luaran	Keterangan
1.	SDN 02 Sungai Kuruyt	6.687.188,00	Tiang Bendera
2.	TKN 02 Sungai Pegu	140.060.480,00	alat peraga praktik sekolahan bidang studi : olah raga lainnya (dst)
3.	TKN 01 Sangir	120.071.480,00	alat peraga praktik sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)
4.	TKN 01 Sangir Salai Janggjo	139.502.890,00	alat peraga praktik sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)
Jumlah		426.321.838,00	



Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp290.747.955,00, merupakan reklasifikasi entry belanja modal gedung dan bangunan ke KIB D karena realisasi merupakan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.26. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Detail Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan	199.524.620,00	Realisasi Belanja Modal berupa Instalasi Pusat Pengatur Listrik Air-Haji
2	Kecamatan Sangir	91.123.335,00	Realisasi Belanja Modal berupa seluruh drainase
Jumlah		290.747.955,00	

Realisasi belanja modal berupa lampu jalan dan laman sebesar Rp199.624.620,00 merupakan reklasifikasi entry belanja modal KIB C ke KIB D pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan. Sedangkan reklasifikasi entry belanja modal KIB C ke KIB D pada Kecamatan Sangir sebesar Rp91.123.335,00 merupakan pekerjaan pembangunan drainase/seluran.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang di reklasifikasi ke KIB F merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2023 yang belum selesai proses pengerjaannya sehingga direklasifikasi ke KIB F berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai sebesarRp 6.906.262.298,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.27. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Detail Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	580.141.000,00
2	Dinas Kesehatan	49.924.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Perumahan	6.109.395.298,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan, Hidup dan Pertumbuhan	49.850.000,00
5	Dinas Peranam Mocsel dan Palayaran Terpadu Satu Pintu	108.952.000,00
Jumlah		6.906.262.298,00

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 95.717.570,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan reklasifikasi entry belanja modal gedung dan bangunan berupa Gedung Petrolkan/Koperasi/Pasar Pannanen yang di ubahkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kepada Nagari Lubuk Malako berupa pekerjaan rehabilitasi bangunan Pasar Banca Kapel Nagari Lubuk Malako dengan Naskah Perjanjian Iltih Daerah Nomor : 900/05/NPHD/DPPKUKM-2023 tanggal 29 Desember 2023.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp200.000,00 merupakan reklasifikasi entry belanja modal gedung dan bangunan ke belanja barang dan jasa, yang merupakan belanja (keramik) pada Kecamatan Koto Perik Gadang Dietai.

Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.040.727.760,00, merupakan penghapusan atas gedung dan bangunan yang disebarkan karena kondisi aset tetap yang tidak layak dan tidak representatif lagi digunakan, serta efisiensi pemanfaatan lahan untuk



pembangunan gedung baru yang anggaran pembangunannya telah tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, sehingga harus dilakukan pembongkaran dan dihapus dari Daftar Inventaris berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.440.2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Gedung Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.28. Rincian Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Organisasi Pelaksana (OPD)	Lokasi	Alamat	Tahun Penghapusan	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	Asmara Permana	Kecamatan Sangir Jujur SDN 08 Kato Gancang	2007	30.943.850,00
		Bangunan Gedung Kantor Permana	Kecamatan Tauh Duo SDN 02 Pekan Selasa	2007	242.326.110,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasar Perumahan Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Bangunan Fasilitas Jurnum lainnya	Toilet RTH Padang Ayo, Kecamatan Sangir	2016	431.134.000,00
3.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Bangunan Gedung Perskoan Lainnya (Yst)	Lapak PKL RTH Muaru Labu, Kecamatan Sangir	2018	75.740.000,00
4.	Sekretariat Daerah	Pagar Permana	Gedang Kantor Bupati, Kecamatan Sangir	2013	199.840.000,00
5.	Kecamatan Sangir	Gedung Pos Jaga Permana	Kecamatan Sangir	2017	10.944.000,00
	Jumlah				1.040.727.750,00

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 431.134.000,00 merupakan koreksi pencatatan nilai gedung dan bangunan berupa Bangunan Olahraga Terbuka Perumahan RTH Padang Aro pada Dinas Perumahan, Kawasar Perumahan Lingkungan Hidup dan Perhubungan, yang mana bangun tersebut berupa bangunan toilet yang tercatat secara gabungan dengan bangunan Tamar RTH Padang Aro sehingga dilakukan koreksi pencatatannya sesuai klasifikasi jenis aset.

Disamping itu terdapat mutasi pencatatan Gedung dan Bangunan antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pendayagunaan barang milik daerah serta re-organisasi karena pembahar SOTK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.29. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Antar OPD

No	Organisasi Pelaksana (OPD)	Permasalahan Saldo Aset Gedung dan Bangunan (Rp)	Saldo Saldo Awal Gedung dan Bangunan (Rp)	Saldo Saldo Akhir Gedung dan Bangunan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	194.463.975,00	1.285.659.458,00	1.285.659.458,00
3.	Dinas Perhubungan	0,00	11.619.248.973,00	11.619.248.973,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasar Perumahan Lingkungan Hidup dan Perhubungan	12.814.748.254,00	269.662.700,00	269.662.700,00
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	182.502.458,00	0,00	0,00
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.105.157.000,00	0,00	0,00
7.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	53.482.477.120,00	0,00	0,00



REKAPITULASI SALDO AKUMULASI ASSET TETAP DAN JARINGAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Asset, Perkiraan Subkelas (RPP)	Perhitungan Saldo Awal (Saldo Awal) dan Saldo Akhir (Saldo Akhir) (Rp)	Perubahan Saldo Akhir (Rp)
8.	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
9.	Inspektorat Daerah	899.898.634,00	1.300.204.156,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	5.268.051.248,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	289.652.700,00	0,00
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	0,00	899.338.634,00
13.	Dinas Peranian, Ketahanan Pangan dan Palikaran	6.253.051.249,00	0,00
Jumlah		74.209.492.300,00	74.209.492.300,00

Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.410.782.448.374,04	1.410.782.448.374,04

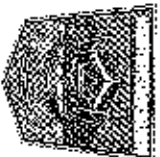
Perhitungan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.484.235.103.721,04 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.410.782.448.374,04
Penambahan Tahun 2023	Rp	77.796.945.275,00
Jumlah	Rp	1.488.579.393.649,04
Pengurangan Tahun 2023	Rp	4.344.289.928,00
Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023	Rp	1.484.235.103.721,04
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan s.d 31 Desember 2023	Rp	(881.832.606.433,59)
Nilai Buku	Rp	602.402.497.287,45

Jumlah tersebut dengan rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari:

Tabel V.3.3.30. Rincian Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Jenis	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Jalan	916.742.379.447,00	64.090.734.244,00	1.568.415.728,00	979.298.697.963,00
2	Jerbatar	215.525.586.682,00	2.272.347.500,00		221.797.904.182,00
3	Bangunan Air Irigasi	156.792.041.792,00	2.679.492.220,00	69.746.000,00	159.311.788.012,00
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	412.912.506,00			412.912.506,00
5	Bangunan Pengirangan Rawa Dan Polider	378.175.445,00	100.588.005,00		478.763.445,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Pansanggulangi, Benda Alam	70.287.251.658,04	7.590.919.366,00	2.909.448.200,00	76.258.722.263,04
7	Bangunan Pengirangan	5.665.659.967,00	51.860.000,00		5.717.519.967,00



Sumber Air Dan Air Tanah			
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.763.695.538,00	2.763.695.538,00
9	Bangunan Air Kotor	12.000.000,00	12.000.000,00
10	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	1.351.015.874,00	1.351.015.874,00
11	Instalasi Air Kotor	1.577.327.000,00	1.577.327.000,00
12	Instalasi Pembangkit Listrik	336.606.538,00	336.606.538,00
13	Instalasi Gardu Listrik	20.385.865.555,00	20.385.865.100,00
14	Instalasi Panganman	167.869.050,00	167.869.050,00
15	Jaringan Air Minum	11.072.828.816,00	126.680.000,00
16	Jaringan Listrik	3.314.145.566,00	547.354.411,00
17	Jaringan Telepon	80.717.500,00	-
18	Jaringan Gas	6.400.000,00	6.400.000,00
Jumlah		1.410.782.448.374,04	77.796.945.275,00

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp77.796.945.275,00 berasal dari:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 77.154.111.140,00
Reklasifikasi dari KIB C Rp 290.747.955,00
Reklasifikasi dari KIB F Rp 186.350.000,00
Atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa Rp 165.736.180,00
Jumlah Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 77.796.945.275,00

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari belanja modal adalah sebesar Rp77.154.111.140,00 berdasar rincian penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berasal dari realisasi belanja modal Tahun anggaran 2023:

Tabel V.3.3.31. Rincian Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	73.569.653.588,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan	3.533.271.552,00
3	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	61.180.000,00
Jumlah		77.154.111.140,00

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari reklasifikasi dari KIB C sebesar Rp290.747.955,00 merupakan reklasifikasi dari belanja modal Gedung dan Bangunan yang menambah nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan dan pada Kecamatan Sangir, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel V.3.3.32. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Belanja Gedung dan Bangunan

No	Organisasi Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan	99.624.520,00	Realisasi Belanja Modal berupa Instalasi Puser, Pengatur Listrik Lainnya
2.	Kecamatan Sangir	91.123.335,00	Realisasi Belanja Modal berupa saluran drainase
Jumlah		290.747.955,00	

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari reklasifikasi dari KTB F sebesar Rp 186.350.000,00, merupakan reklasifikasi dari aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Perencanaan yang telah selesai pengerjaan fisiknya dan dilakukan reklasifikasi ke aset tetap sehingga menambah nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Jata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.33. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Organisasi Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	Jalan Kabupaten Arteri	79.800.000,00	Perencanaan
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan	Jalan Desa Lainnya	14.800.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lainnya	12.360.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lainnya	12.360.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lainnya	14.830.000,00	Perencanaan
Jumlah	Jalan Desa Lainnya	26.800.000,00	Perencanaan	
	Jalan Desa Lainnya	26.800.000,00	Perencanaan	

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang menambah harga perolehan aset adalah sebesar Rp165.736.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.34. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Atribusi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

No	Organisasi Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	118.859.285,00		atribusi belanja barang dan jasa (perencanaan)
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan	45.267.000,00		atribusi belanja barang dan jasa (honorarium pelaksanaan kegiatan)
3.	Kecamatan Sangir	930.000,00		atribusi belanja barang dan jasa (honorarium pelaksanaan kegiatan)
4.	Dinas Pertanian	682.000,00		atribusi belanja barang dan jasa (honorarium pelaksanaan kegiatan)
Jumlah		165.736.180,00		

Sedangkan untuk perhitungan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.344.289.928,00 adalah sebagai berikut:



Reklasifikasi ke KIB E Rp 2.403.719.200,00
Reklasifikasi ke KIB F Rp 214.271.750,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke belanja barang dan jasa Rp 1.726.298.978,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 4.344.289.928,00

Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan ke KIB E sebesar Rp2.403.719.200,00 merupakan reklasifikasi atas belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang realisasinya merupakan Aset Tetap Lainnya berupa Aset Renovasi (lanjutan pembiayaan) untuk Padang aro serta pengawasan dan perencanaan) pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perencanaan.

Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 214.271.750,00 merupakan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perencanaan berupa Perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dan dicatat dalam Daftar Inventaris sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut :

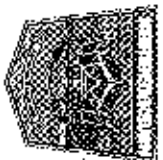
Tabel V.3.3.35. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Detail Pengerjaan (SPP)	Jumlah (Rp)
1.	Perencanaan Jalan Padang Aro- Sungai Paji	79.725.750,00
2.	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Daerah-irigasi Bandar Sungai Dahau	69.726.000,00
3.	Perencanaan Perbaikan/Umum Trotoar Muara Labuh	64.800.000,00
	Jumlah	214.271.750,00

Reklasifikasi entry belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke belanja barang dan jasa sebesar Rp1.726.298.978,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan ke belanja barang dan jasa yang merupakan alokasi belanja kegiatan yang bukan merupakan aset tetap atau yang tidak menambah nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.36. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Belanja Barang dan Jasa

No	Organisasi Penerima Belanja (SPP)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perencanaan	98.999.000,00	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Kec. KP/GD, Pauli Divo)
		98.999.000,00	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Kec Sanggri)
		62.316.000,00	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Kec SH, SBJ)
		98.838.500,00	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Kec Sungai Paqiu, SJJ)
		1.097.537.978,00	Pemeliharaan Rutin Jalan
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan	128.680.000,00	Lanjutan Air Bersih Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan
		129.214.000,00	Normalisasi sungai
		11.715.000,00	Belanja Perencanaan dan Pengawasan ulang Tahun 2022 yang dibayar tahun



No	Revisi	Perubahan	Jumlah	Saldo
			(Rp)	(Rp)
Jumlah			1.726.298.978,00	2023

Selain penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jalinan pada tahun 2023, juga terdapat mutasi antar Perangkat Daerah atas saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jalinan karena adanya re-organisasi dan perubahan SOTK Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.37. Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jalinan antar OPD

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)
1.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	0,00	9.070.015.893,00
2.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.070.015.893,00	0,00
Jumlah		9.070.015.893,00	9.070.015.893,00

Saldo per 31 Desember 2022	31 Des 2022	31 Des 2022
	(Rp)	(Rp)
Penambahan Tahun 2023	51.398.770.995,04	10.300.519,04
Jumlah		

Portingungan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp51.398.770.995,04 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	46.007.519,047,04
Penambahan Tahun 2023	Rp	5.542.804.216,00
Jumlah	Rp	51.550.323.263,04
Pengurangan Tahun 2023	Rp	151.552.268,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	Rp	51.398.770.995,04

Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.542.804.216,00 terdiri dari:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BOS)	Rp	2.570.255.650,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	198.878.400,00
Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB B	Rp	259.872.386,00
Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB D	Rp	2.403.719.200,00
Atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa	Rp	110.078.580,00
Jumlah Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya	Rp	5.542.804.216,00

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari belanja modal Aset Tetap Lainnya belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan tahun 2023 adalah sebesar Rp2.570.255.650,00 berupa pembelian barang perpusakaan dan barang berorak kesenian, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.3.3.38. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Belanja BOS

No	SKPD	Aset Tetap Lainnya		
		Belanja Pengadaan (Rp)	Barang Bekas (Rp)	Lintas (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Keperguruan dan Olahraga	2.431.033.894,00	139.221.755,00	2.570.255.650,00

Realisasi Belanja modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp198.873.400,00 berupa buku/bahan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi entry belanja modal KIB B sebesar Rp259.872.386,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang direalisasikan dalam bentuk Aset Tetap Lainnya berupa bahan perpustakaan terestak dan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga pada Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.39. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Aset Tetap Lainnya		
		Barang Bekas (Rp)	Lintas (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Keperguruan dan Olahraga	6.875.493,00	252.992.893,00	259.872.386,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi entry belanja modal KIB D sebesar Rp2.403.719.200,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan direalisasikan dalam bentuk Aset Tetap Lainnya berupa Aset Renovasi (lanjutan pembangunan trotoar Padang Aro serta pengawasan dan perencanaan pada ruas jalan nasional dan jalan provinsi) yang berada di Kabupaten Solok Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan.

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang menambah harga perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 110.078.580,00 merupakan atribusi atas honorarium pekerjaan lanjutan pembangunan trotoar Padang Aro pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan senilai Rp 2.110.000,00 dan atribusi atas belanja peralatan sekolah pada Dinas Pendidikan senilai Rp 107.968.580,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.40. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Atribusi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

No	SKPD	Aset Tetap Lainnya		
		Barang Bekas (Rp)	Lintas (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	15.602.500,00	4.950.000,00	20.552.500,00



No.	Obj/HR	Nama Barang	Nilai (Rp)
11.	TKN 01 Sungai Peju	Rak Kayu	2.500.000,00
12.	UPT SKB	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5.000.000,00
13.	UPT SKB	Loudspeaker	6.000.000,00
Jumlah			46.597.000,00

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya yang mempunyai harga perolehan dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (ekstrakumulatif) tahun 2023 adalah sebesar Rp 8.632.000,00, dengan rincian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:

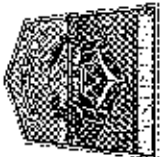
Tabel V.3.3.42. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Ekstrakumulatif)

No.	OPD/HR	Nama Barang	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	Gondyokray	732.000,00
2.	SMP N 5 Solok Selatan	Gondyokray	4.900.000,00
3.	SDN 10 Batang Pasiraman	Gondyokray	3.000.000,00
Jumlah			8.632.000,00

Reklasifikasi entry belanja modal Aset Tetap Lainnya ke belanja barang dan jasa sebesar Rp96.323.268,00 merupakan belanja barang berupa barang habis pakai dan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak memenuhi kriteria aset tetap pada Dinas Pendidikan berupa bahan perustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.43. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Belanja Barang dan Jasa yang Mempunyai Masa Manfaat Kurang dari 12 Bulan

No.	SMP/HR	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan Kepulauan dan Olah Raga			
1.	SMP N 2 Solok Selatan	Buku Agama	10.700,00	Buku tuntunan sholat
2.	SMP N 5 Solok Selatan	Alat Musik Modernband	2.777.775,00	Perlengkapan drum band
3.	SMP N 8 Solok Selatan	Buku Umum lain lain	1.000.000,00	Buku induk siswa
4.	SMP N 11 Solok Selatan	Bahan Perpustakaan	3.886.000,00	Kain tabir dan buku induk siswa
5.	SMP N 14 Solok Selatan	Alat Musik ModernBand (stik drum band)	2.241.731,00	Pakaian drumband dari perlengkapan
6.	SMP N 17 Solok Selatan	Permainan Olahraga	1.465.200,00	Pakaian seragam voli
7.	SMP N 23 Solok Selatan	Alat kesenian air lain	8.117.500,00	Pakaian drumband dan mayore
8.	SMP N 28 Solok Selatan	Buku umum lain lain	3.630,00	Buku referensi
9.	SMP N 32 Solok Selatan	Alat kesenian lain lain	7.650.000,00	Pakaian drum band
10.	SDN 02 Tanjung Puan Abai	Buku Umum lain lain	17.800,00	Juz Amma
11.	SDN 05 Orbak Kubu	Buku Umum lain lain	13.048,00	Buku referensi



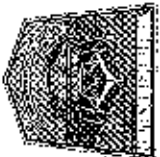
12.	SDN 07 Sitapus	Buku umum lain-lain	250.000,00	Buku induk siswa
13.	SDN 13 Batu Gajah	Buku umum lain-lain	11.100,00	Buku skolar jerezah
14.	SDN 17 Barau Limau Kepah	Buku umum lain-lain	531.535,00	Buku referensi dan buku assessment
15.	SDN 18 Treng Dusun Tengah	Buku umum lain-lain	36.926.100,00	Pembayaran honorarium, transportasi dan belanja barang dan jasa
16.	SDN 10 Padang Darek	Buku umum lain-lain	10.330,00	Buku cerita binatang
17.	SDN 04 Sungai Gadang	Buku umum lain-lain	45.000,00	Alquran
18.	SDN 07 Mercu	Alat kesenian lain-lain	4.000.000,00	Belanja bahan hiasis paket
19.	SDN 04 Timbulun	Buku umum lain-lain	15.200,00	Buku qra 2
20.	SDN 07 Sungai Duro	Buku umum lain-lain	26.000,00	Buku seku piramjika dan Buku lqra
21.	SDN 12 Pihang Awan	Buku umum lain-lain	492.575,00	Buku register
22.	SDN 13 Simanung	Buku umum lain-lain	500,00	Buku tulis
23.	SON 02 Pekan Selase	Agama Islam	332.000,00	Alquran
24.	SDN 06 Musjak Lolo	Buku umum lain-lain	310.900,00	Buku register dan daftar nilai siswa
25.	SDN 09 Kepala Bukit	Alat musik modern/blend	200.000,00	Stik dan tali senar
26.	SDN 11 Lubuk Jaya	Buku umum lain-lain	800.000,00	Buku kicper dan register siswa
27.	SDN 14 Mudlak Lolo	Buku umum lain-lain	16.700,00	Buku referensi
28.	SDN 03 Sungai Kalu	Buku umum lain-lain	8.000,00	Buku saku
29.	SDN 09 Sungai Pangku	Buku umum lain-lain	15.000,00	Pilcaci
30.	TKN 01 KP GD	Buku umum lain-lain	223.000,00	Buku referensi umum
31.	TKN 01 SANGIR	Buku umum lain-lain	1.500.000,00	Buku cerita dan puzzle
Jumlah			96.323.268,00	

5.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Des 2023	31 Des 2022
(Rp)	(Rp)	(Rp)
66.596.957.759,00	67.015.563.293,00	67.015.563.293,00

Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp66.596.957.759,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	67.015.563.293,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	7.133.454.048,00
Jumlah	Rp	74.149.017.341,00
Pengurangan Tahun 2023	Rp	7.552.059.582,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	66.596.957.759,00

Penambahan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2023 sebesar Rp7.133.454.048,00 terdiri dari:



Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB C Rp 6.906.262.298,00
Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB D Rp 214.271.750,00
Atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa Rp 12.920.000,00
Jumlah penambahan nilai Aset Tetap Konstruksi Rp 7.133.454.048,00
Dalam Pengerjaan

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.906.262.298,00 merupakan reklasifikasi atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum selesai pengerjaannya beserta dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.44. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	UPT	Pelaksanaan
1.	Dinas Pendidikan	33.848.360,00	SMP N 8 Sdok Selatan	Perencanaan
		15.928.640,00	SMP N 11 Sock Selatan	Perencanaan
		27.729.360,00	SMP N 14 Sock Selatan	Perencanaan
		21.792.640,00	SMP N 29 Sock Selatan	Perencanaan
		39.985.500,00	SDN 06 Buluh Kasok	Perencanaan
		10.213.500,00	SDN 01 Talao	Perencanaan
		42.711.000,00	SDN 02 Sungai Kunyit	Perencanaan
		3.375.000,00	SDN 07 Moco	Perencanaan
		34.849.800,00	SDN 04 Timbulun	Perencanaan
		52.340.120,00	SDN 08 Durian Tarung	Perencanaan
		84.626.000,00	SDN 09 Karang Putih	Perencanaan
		906.700,00	SDN 13 Aia Manyuruk	Perencanaan
		17.133.319,00	SDN 14 Padang Aro	Perencanaan
		99.522.000,00	SDN 21 Kelus	Perencanaan
26.507.661,00	SDN 23 Tandai	Perencanaan		
60.737.700,00	SDN 31 Sungai Lambai	Perencanaan		
2.987.100,00	SDN 32 Taratak	Perencanaan		
3.982.400,00	SDN 21 MPL Batang Pagu	Perencanaan		
10.861.600,00	SDN 24 Luncang	Perencanaan		
21	Dinas Kesehatan	49.924.000,00		Perencanaan pagar RS Batang Sangir
3.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan	6.109.386.298,00		Lanjutan pekerjaan fisik dan perencanaan
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertambangan	49.650.000,00		Perencanaan RTH Muara Labuh
5.	Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	106.382.000,00		lanjutan pekerjaan fisik dan perencanaan tanah
Jumlah		6.906.262.298,00		



Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp214.271.750,00 merupakan reklasifikasi atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pekerjaan perencanaan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.45. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Revisi Pekerjaan	Jumlah (Rp)	Saldo (Rp)
1.	Perencanaan Jalan Padang Aspal Sungai Padang		72.725.750,00
2.	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Daerah Irigasi Bandar Sungai Delman		69.746.000,00
3.	Perencanaan Pembangunan Trotoar Muara Laju		64.800.000,00
	Jumlah		214.271.750,00

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 12.920.000,00, berupa honorarium panitia pelaksana kegiatan yang melekat pada pekerjaan berupa perencanaan dengan rincian sebagai berikut:

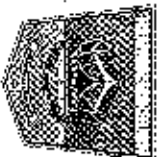
Tabel V.3.3.46. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Atribusi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

No	Revisi Pekerjaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9.850.000,00	Atribusi belanja barang jasa dan belanja pegawai/honorarium
2.	Perumahan Lingkungan Hidup dan Perhubungan	570.000,00	Atribusi belanja barang jasa dan belanja pegawai/honorarium
3.	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Dinas Satu Pintu	2.500.000,00	Atribusi belanja barang jasa dan belanja pegawai/honorarium
	Jumlah	12.920.000,00	

Sedangkan perhitungan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 7.552.059.582,00, dengan rincian sebagai berikut :

Reklasifikasi ke KIB C	Rp	7.365.709.582,00
Reklasifikasi ke KIB D	Rp	186.350.000,00
Pengurangan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	7.552.059.582,00

Pengurangan atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.365.709.582,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam pengerjaan ke KIB C Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan karena pembangunan fisik gedung dan bangunan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dimanfaatkan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel V.3.3.47. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	ORGANISASI Pengerjaan Aset Tetap (OPD) (Rp)	Uraian	Nilai (Rp)	Kategori Aset
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	755.784.853,00	Gedung Perkotaan/Koperasi/Pasar Perumahan
2.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	19.255.000,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
3.	Dinas Perindustrian dan Keairisan	Dinas Perindustrian dan Keairisan	6.530.669.629,00	Bangunan Gedung Perputakaan Perumahan
Jumlah			7.345.709.582,00	

Pengurangan atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp186.350.000,00, merupakan reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke KIB D Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan, yang telah selesai pekerjaan pembangunannya dan telah dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:

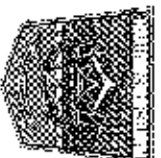
Tabel V.3.3.47. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	ORGANISASI Pengerjaan Aset Tetap (OPD)	Uraian	Nilai (Rp)	Kategori Aset
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	Jalan Kabupaten Arteri	78.800.000,00	Perencanaan
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Jalan Desa Lain-lain	4.800.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	12.850.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	12.380.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	14.830.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	26.500.000,00	Perencanaan
Jumlah		Jalan Desa Lain-lain	26.500.000,00	Perencanaan
			186.350.000,00	

Selain penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, juga terdapat mutasi antar Perangkat Daerah karena adanya re-organisasi terhadap SOTK Pemerintah Kabupaten Soek Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.48. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Antar OPD

No.	ORGANISASI Pengerjaan Aset Tetap (OPD)	Sasaran/Detail Pengerjaan	Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)	Pengalokasian Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)	Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2,00	49.600.000,00	49.600.000,00
2.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	49.600.000,00	0,00	0,00
Jumlah			49.600.000,00	49.600.000,00	49.600.000,00



5.3.3 Akumulasi Penyusutan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	(1.150.700.964.067,79)	(1.150.700.964.067,79)

Kabupaten Solok. Selain dalam penyusunan Laporan Keuangan juga menyajikan penyusutan terhadap Aset Tetap, perhitungan penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa, sesuai kebijakan perhitungan penyusutan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kebijakan Masa Manfaat dan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Perhitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan melalui Aplikasi SIMDA BMD dengan perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp(1.315.682.288.253,68), dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	(1.150.700.964.067,79)
Koreksi		
Perambahan	Rp	6.131.969.061,00
Pengurangan	Rp	4.137.899.745,00
Jumlah Setelah Koreksi/ Saldo per 1 Januari 2023	Rp	(1.148.706.894.751,79)
Beban Penyusutan Tahun 2023	Rp	(166.975.393.501,89)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	(1.315.682.288.253,68)

Asas penghapusan Aset Tetap yang telah dipindahtengankan dan dihapus, reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain kondisi rusak berat dan hilang serta pemutakhiran KLB dan mutasi antar Perangkat Daerah pada Aplikasi SIMDA BMD saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2023 terkoreksi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.49. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Perbaikan	Perbaikan	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.940.839.895,00	2.656.687.856,00	(830.449.735.944,00)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	91.802.386,00	1.379.687.774,00	(144.775.048.987,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Bangsal, dan Jembatan	0,00	102.744.136	(788.545.059.820,70)
	Jumlah Penyusutan	6.131.969.061,00	4.137.899.745,00	(1.148.706.894.751,79)

Akumulasi penyusutan Aset Tetap masing-masing golongan aset per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel V.3.3.50. Beban dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2023 (Rp)	Bedah Penyusutan tahun berjalan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(295.448.785.944,09)	(96.507.343.561,00)	(271.954.129.505,09)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(144.715.048.887,00)	(17.180.503.428,00)	(181.895.552.315,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Migas, dan Jembatan	(768.545.050.920,70)	(113.287.346.512,89)	(981.832.606.433,59)
Jumlah Akumulasi Penyusutan		(1.148.706.894.751,79)	(166.975.393.501,89)	(1.315.682.288.253,68)

Sedangkan daftar rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2023 untuk tiap golongan aset pada masing-masing OPD disajikan pada lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

No	Uraian	31 Dec 2021 (Rp)	31 Dec 2022 (Rp)	31 Dec 2022 (Rp)
Saldo Aset Lainnya		17.825.105.333,50	10.583.058.409,00	10.583.058.409,00

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2023 tersebut meliputi Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Jenis dan nilai saldo Aset lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel V.3.4.1. Rekapitulasi Aset Lainnya

No	Uraian	31 Dec 23 (Rp)	31 Dec 22 (Rp)	Keseluruhan Penyusutan (Rp)	Persentase (%)
1	Aset Tidak Berwujud Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.540.983.875,00	459.943.875,00	82.020.000,00	5,82
2	Aset Tidak Berwujud Seterah Amortisasi	567.748.841,50	602.315.229,00	(34.566.387,50)	(5,74)
4	Aset Lain-lain Akumulasi	27.427.296.606,24	27.677.715.899,24	(250.419.293,00)	(0,90)
5	Penyusutan Aset Lain-lain	(23.408.342.125,24)	(23.310.222.672,24)	(98.118.453,00)	0,42
6	Aset Lain-lain Seterah Penyusutan Dana Transfer	4.018.954.481,00	4.367.493.227,00	(348.538.746,00)	(7,99)
7	Treasury Deposit Facility (TDF)	13.238.462.000,00	5.364.179.953,00	7.874.282.047,00	146,79
Jumlah		17.825.105.332,50	10.333.992.409,00	7.491.176.913,50	462,49



	31 Des 2022	31 Des 2023
Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Rp 1.458.943.875,00	Rp 1.540.963.875,00
Berwujud	Rp 567.748.841,50	Rp 567.748.841,50
	Rp 891.195.033,50	Rp 973.215.033,50

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp567.748.841,50 adanya mutasi rincian Aset Tak Berwujud tahun 2023 dan perhitungan amortisasi aset tak berwujud tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.458.943.875,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	82.020.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Sebelum Amortisasi	Rp	1.540.963.875,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	(973.215.033,50)
Saldo Per 31 Desember 2023 (setelah amortisasi)	Rp	567.748.841,50

Tabel V.3.4.2. Rincian Aset Tak Berwujud 2023

Kategori	31 Des 2022		Perkiraan 2023		31 Des 2023	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1. Rumah Sakit Uthun Daerah						
- Billing Sistem	496.100.000,00	0,00	0,00	0,00	496.100.000,00	0,00
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
- Website	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
- SIPP	148.500.000,00	0,00	0,00	0,00	148.500.000,00	0,00
- Sistem Perencanaan RKPD	48.510.000,00	0,00	0,00	0,00	48.510.000,00	0,00
- E-Musrenbang	100.775.000,00	0,00	0,00	0,00	100.775.000,00	0,00
- AROGIS	164.038.795,00	0,00	0,00	0,00	164.038.795,00	0,00
- EPAPAT	19.900.089,00	0,00	0,00	0,00	19.900.089,00	0,00
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah						
- Software oracle dan	54.750.000,00	0,00	0,00	0,00	54.750.000,00	0,00
- SIM RPHS PBB P2	98.870.000,00	0,00	0,00	0,00	98.870.000,00	0,00
- Sistem Integrasi BPHTB	98.920.000,00	0,00	0,00	0,00	98.920.000,00	0,00
- Sistem E-Collector PBB P2	98.830.000,00	0,00	0,00	0,00	98.830.000,00	0,00
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan						
- Standard Pengujian Kendaraan	57.750.000,00	0,00	0,00	0,00	57.750.000,00	0,00
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
- Microsoft Office	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00
6. Dinas Kesehatan						
- E-Barcode Obat-obatan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
- E-Barcode Obat-obatan	82.020.000,00	0,00	0,00	0,00	82.020.000,00	0,00
Jumlah	1.458.943.875,00	82.020.000,00	0,00	0,00	1.540.963.875,00	0,00

Penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp82.020.000,00 pada tahun 2023 merupakan pengadaaan sistem pencatatan persediaan obat-obatan E-Barcode pada Dinas Kesehatan.



Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menerapkan kebijakan amortisasi aset tak berwujud. Nilai amortisasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.4.3. Amortisasi per SKPD
Per 31 Desember 2023**

NO	Kategori	Nilai	Tahun Perolehan	Tahun Pelaporan	Jumlah Perolehan	Amortisasi
1	Rumah Sakti Umum Daerah Billing System	486.100.000,00	31-Dec-14	31-Dec-23	108	108.800.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	501.723.875,00	31-Dec-09	31-Dec-23	120	375.100.000,00
	Web Site	20.000.000,00	31-Dec-14	31-Dec-23	108	18.000.000,00
	SIPPD	148.800.000,00	31-Dec-16	31-Dec-23	84	103.950.000,00
	Sistem Perencanaan RKKPD	48.510.000,00	31-Dec-16	31-Dec-23	84	33.957.000,00
	E-Musrenbang	100.775.000,00	31-Dec-19	31-Dec-23	80	50.387.500,00
	ARQGIS	164.038.795,00	21-Jan-20	31-Dec-23	48	65.815.517,50
	E-FAPAT	19.800.000,00	24-Nov-22	31-Dec-23	24	3.380.015,00
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	351.370.000,00				167.923.000,00
	Software Oracle	54.750.000,00	31-Dec-14	31-Dec-23	108	48.275.000,00
	SIM BPHTB PBB P2	98.970.000,00	31-Dec-20	31-Dec-23	48	38.648.000,00
	Sistem Integrasi BPHTB	98.820.000,00	31-Dec-20	31-Dec-23	48	38.568.000,00
	Sistem E-Collector PBB P2	98.830.000,00	31-Dec-20	31-Dec-23	48	38.532.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertubuhan	57.750.000,00				23.100.000,00
	Sincard Pengujian Kendaraan	57.750.000,00	31-Dec-20	31-Dec-23	48	23.100.000,00
5	Badan Pemangkuanghan Bencana Daerah	37.000.000,00				11.100.000,00
	Microsoft Office	37.000.000,00	04-Oct-21	31-Dec-23	36	11.100.000,00
6	Dinas Kesehatan	97.020.000,00				11.202.000,00
	E-Barcode Obat	15.000.000,00	15-Nov-22	31-Dec-23	24	3.000.000,00
	E-Barcode Obat-obatan	82.020.000,00	31-Dec-23	31-Dec-23	12	8.202.000,00
	Jumlah	1.540.963.875,00				973.215.033,50

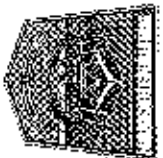


Tabel V.3.4.4. Beban dan Akumulasi Amortisasi
 Per 31 Desember 2023

No. Revisi	Uraian	Perkiraan Anggaran	Saldo Anggaran	Saldo Anggaran	Saldo Anggaran	Saldo Anggaran
		2023	2023	2023	2023	2023
1	Rumah Sakit Umum Daerah	496.100.000,00	471.900.000,00	12.100.000,00	484.000.000,00	12.100.000,00
	Eling Sistem	121.000.000,00	96.800.000,00	12.100.000,00	109.900.000,00	12.100.000,00
		375.100.000,00	375.100.000,00	0,00	375.100.000,00	-
2	Badan Pencapaian Pembangunan Daerah	501.725.875,00	225.717.348,00	50.172.887,00	275.890.235,00	225.839.841,50
	Wido Site	20.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00
	SPD	148.500.000,00	85.100.000,00	14.850.000,00	100.950.000,00	44.650.000,00
	Sistem Perencanaan RKPD	48.510.000,00	29.000.000,00	4.851.000,00	33.851.000,00	14.659.000,00
	E-Musrenbang	100.775.000,00	40.310.000,00	10.077.500,00	50.387.500,00	50.387.500,00
	ARQIS	104.028.795,00	49.211.638,00	15.408.879,00	65.616.517,50	96.423.277,96
	L.HAPAT	19.900.000,00	1.888.008,00	1.890.008,00	3.986.016,00	15.920.084,00
3	Badan Pengelola Daerah	351.370.000,00	132.786.000,00	35.137.000,00	167.923.000,00	183.447.000,00
	Software Cagle SIM BSH-B PBR P2	54.750.000,00	49.900.000,00	5.475.000,00	49.275.000,00	5.475.000,00
	3 sistem Integrasi SPHTB	98.820.000,00	20.679.000,00	9.882.000,00	39.561.000,00	39.322.000,00
	3 sistem E-Collector PBR P2	98.830.000,00	29.848.000,00	6.883.000,00	36.731.000,00	59.289.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Lingkungan Hidup dan Perhubungan	57.750.000,00	17.325.000,00	5.775.000,00	23.100.000,00	34.650.000,00
	Sarana Pengujiar Kendaraan	57.750.000,00	17.325.000,00	5.775.000,00	23.100.000,00	34.650.000,00
5	Badan Peninggalan Bencana Daerah	37.000.000,00	7.400.000,00	3.700.000,00	11.100.000,00	25.900.000,00
	Mitrosoft Office	37.000.000,00	7.400.000,00	3.700.000,00	11.100.000,00	25.900.000,00
6	Dinas Kesehatan	97.020.000,00	1.500.000,00	9.702.000,00	11.202.000,00	35.819.000,00
	E-Batcode3 Obat- obatan	15.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
	E-Batcode3 Obat- obatan	82.020.000,00	0,00	8.202.000,00	8.202.000,00	73.819.000,00
	JUMLAH	1.840.989.875,00	858.628.648,00	116.586.387,00	973.215.033,50	567.748.841,50

31 Des 2023
 (RPD)
 25.12.2023
 25.09.2023

Pertilungan aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar
 Rp27.427.296.606,24 adalah sebagai berikut:



Saldo per 31 Desember 2022	Rp	27.677.715.899,24
Penambahan Tahun 2023	Rp	4.099.683.997,00
Jumlah Aset Lain-lain	Rp	31.777.399.896,24
Pengurangan Tahun 2023	Rp	4.350.103.290,00
Saldo Aset lain-lain Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	27.427.296.606,24
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	(23.408.342.125,24)
Nilai Buku Aset Lain-lain setelah Akumulasi	Rp	4.018.954.481,00

Penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp4.099.683.997,00 merupakan penambahan dari reklasifikasi Aset Tetap dengan kondisi rusak berat. Adapun rincian penambahan aset lain-lain tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan Aset Lain-lain dengan kondisi rusak berat sebesar Rp 2.585.702.497,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tablel V.3.4.5. Penambahan Aset Lain-lain dengan Kondisi Rusak Berat

No	Organisasi	Kategori	Kondisi		Jumlah
			Sebelum	Setelah	
1.	Rumah Sakit				
2.	Sekretariat				
Jumlah					

2. Penambahan dari Aset Lain-lain dengan kondisi hilang ke Aset lain-lain rusak berat sebesar Rp357.656.500,00 merupakan reklasifikasi aset yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah dilakukan penertarikan dan inventarisasi, aset tersebut ditemukan kembali dalam keadaan rusak berat, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Organisasi	Kategori	Jumlah
1.	Badan Perencanaan Perbanguan Daerah		11.344.500,00
2.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemasdam Kecamatan		800.000,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		77.928.000,00
4.	Badan Kepegawajan Dan Pengantar Sgn Sumner Daya Manusia		16.887.000,00
5.	Dinas Penanang Monev Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		240.892.000,00
6.	Kecamatan Paluh Dago		8.930.000,00
7.	Kecamatan Sangir Balai Janggo		935.000,00
8.	Dinas Perarian, Kelahenan Pangan Dan Perikanan		1.000.000,00
Jumlah			357.656.500,00

3. Penambahan Aset Lainnya (aset dimantapkan pihak lain) sebesar Rp 1.156.325.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa kendaraan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten



Solok Selatan yang dipinjam pakai oleh instansi pemerintahan lain/vertikal, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perkiraan (Rp)	Salah satu instansi
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	394.365.000,00	Pinjara Pakai ke Kapres
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	394.365.000,00	Pinjara Pakai ke DANDIM
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	357.595.000,00	Pinjara Pakai ke Kejaksaan
Jumlah		1.156.325.000,00	

Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp4.350.103.290,00 terdiri atas :

1. Reklasifikasi atas aset lain-lain kondisi hilang ke Aset lain-lain rusak berat sebesar Rp 357.656.500,00, adalah atas inventarisasi dan penelusuran yang dilakukan kembali terhadap barang milik daerah pada beberapa OPD yang sebelumnya dilaporkan sebagai barang hilang telah ditemukan kembali keberadaannya dalam kondisi rusak berat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Angka (Rp)
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.341.500,00
2.	Satuan Polisi Praja Dan Remadani Kabupaten	800.000,00
3.	Badan Pengalolaan Keuangan Daerah	77.928.000,00
4.	Badan Kepegawaian Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	15.887.000,00
5.	Dinas Perencanaan Dan Pembangunan Terpadu Satu Pintu	240.882.000,00
6.	Kecamatan Pauh Duo	8.993.000,00
7.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	825.000,00
8.	Dinas Pertanian, Kehutanan Pangan Dan Perikanan	1.000.000,00
Jumlah		357.656.500,00

2. Pengurangan aset lain-lain berupa kendaraan yang sebelumnya dimanfaatkan pihak lain berupa kendaraan operasional jenis minibus dan jeep di reklasifikasi kembali ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 676.725.310,00.
3. Penghapusan atas aset lain-lain berupa alat kantor dan rumah tangga dilakukan pemindahalangan melalui pelepasan sebesar Rp 3.315.721.480,00 dan kemudian dihapus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.321-2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Alar-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dengan rincian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:



Tabel V.3.4.6. Pengurangan Aset Lain-lain dari Penghapusan atas Aset Lain-lain

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Kategori Aset	Saldo Awal
1.	Rumah Sakti Limun Daerah		618.672.992,00
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		97.394.122,00
3.	Diras Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan, Hidup Dan Perhubungan		44.922.862,00
4.	Diras Kesendukar Dan Penerangan Sipil		34.120.50,00
5.	Diras Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		68.129.975,00
5.	Sarjan Polisi Pemong Strata Dan Peradar, Kebakaran		98.632.228,00
7.	Sekretariat Daerah		903.250.932,00
8.	Gadai Pengelolaan Keuangan Daerah		516.638.214,00
8.	Diras Panaman, Model Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		70.660.000,00
10.	Kecamatan KPGD		214.912.300,00
11.	Kacamatan Sungai Pagu		24.505.000,00
12.	Diras Perpustakaan dan Kearsipan		118.718.200,00
13.	Diras Pertanian, Kelahatan Pangan dan Perkaratan		326.133.118,00
14.	Diras Komunikasi dan Informatika		166.901.600,00
	Jumlah		3.315.721.480,00

Selain penambahahan dan pengurangan nilai Aset Lain-lain untuk Tahun 2023, juga terdapat mutasi Aset Lain-lain antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan nilai sebesar Rp1.159.859.312,00, berupa Peralatan dan Mesin dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel V.3.4.7. Mutasi Aset Lain-lain antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	Diras Perumahan	0,00	486.927.850,00
2.	Diras Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	486.927.850,00	0,00
3.	Sekretariat Daerah	0,00	379.997.000,00
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	379.997.000,00	0,00
5.	Kantor Penyuluhan & Ketahanan Pangan	0,00	292.934.482,00
6.	Diras Pertanian	292.934.482,00	0,00
	Jumlah	1.159.859.312,00	1.159.859.312,00

Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
31 Des 2022	31 Des 2023	(Rp)	(Rp)
1.159.859.312,00	1.159.859.312,00	5.261.119.953,00	5.261.119.953,00

Pada akhir tahun 2023 Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil Dalam *Treasury Deposit Facility* ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyempitan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF TKO Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda.



Sesuai Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perencanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Solok Nomor S-68/K/PN.0303/2024 perihal Penyampaian Informasi mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Hasil dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Tahun Anggaran 2023, terdapat alokasi kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp13.238.462.000,00

SAS (LAMBANG)	31 Desember 2022	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	Rp18.841.445.391,97	Rp13.238.462.000,00

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban di kelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban sebesar Rp18.841.445.391,97 merupakan jumlah kewajiban per 31 Desember 2023, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3.5.1. Rincian Kewajiban

JENIS KEWAJIBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2023	Kewajiban Peringkat	Pengaruh
	(Rp)	(Rp)		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	18.841.445.391,97	23.302.465.783,51	(4.461.020.391,54)	(19,14)
Jumlah Kewajiban	18.841.445.391,97	23.302.465.783,51	(4.461.020.391,54)	(19,14)

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.841.445.391,97 sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.751.975.217,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.461.020.391,54 atau turun sebesar 19,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.5.2 Kewajiban Jangka Pendek

No	JENIS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2022	31 Desember 2023	Kewajiban Peringkat	Pengaruh
		(Rp)	(Rp)		
1	Pendapatan diterima dimuka	31.214.835,00	44.512.029,00	(13.297.188,00)	(29,87)
2	Utang Esden	18.772.833.227,97	23.220.835.631,51	(4.448.002.403,54)	(19,16)
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	37.697.329,00	37.118.129,00	579.200,00	1,56
	JUMLAH	18.841.445.391,97	23.302.465.783,51	(4.461.020.391,54)	(19,14)

1. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.214.835,00 sebagai berikut:



Tabel V.3.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka

No	REKAPITULASI PENDAPATAN DIMUKA (Rp)	31 Desember	31 Desember	Kumulatif	Perubahan
		2023	2022		
1	Ruman Sakti Umum Daerah (BLUD)	22.500.000,00	37.500.000,00	(15.000.000,00)	(40,00)
1	Bantuan Pengalokasian Keuangan Daerah (SKPD)	6.714.835,00	7.012.023,00	1.702.812,00	24,28
	Jumlah	31.214.835,00	44.512.023,00	(13.297.188,00)	(29,87)

Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.500.000,00 pada BLUD RSUD merupakan pendapatan atas pajak reklame sebesar Rp8.714.835,00.

2. Utang beban

Saldo Liang beban per 31 Desember 2023 Rp18.772.533.227,97 terdiri dari utang beban pegawai, utang barang dan jasa, utang beban transfer dan utang belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

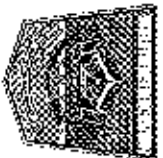
Tabel V.3.5.4 Jenis Utang Beban

No	JENIS UTANG BEBAN	31 Desember	31 Desember	Kumulatif	Perubahan
		2023	2022		
1	UTANG BEBAN PEGAWAI	5.015.888.106,00	1.572.823.689,51	3.443.074.416,49	218,90
2	UTANG BEBAN BARANG DAN JASA	12.983.977.271,97	20.687.003.389,00	(7.703.031.117,03)	(37,33)
3	UTANG BEBAN TRANSFER	201.637.850,00	358.040.859,00	(156.403.009,00)	(43,68)
4	UTANG BEBAN BELANJA MODAL	590.920.030,00	802.962.700,00	(111.942.700,00)	(1,98)
	JUMLAH	18.772.533.227,97	23.220.836.637,51	(4.448.302.409,54)	(19,16)

Utang beban tersebut terdapat pada OPD sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel V.3.5.5 Utang Beban Per OPD

No	OPD	31 Desember	31 Desember	Kumulatif	Perubahan
		2023	2022		
1	Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olah Raga	3.067.543,00	298.439.364,00	(295.372.421,00)	(98,87)
2	Dinas Kesehatan	5.082.990.483,00	4.927.021.205,00	155.969.287,00	3,17
3	Dinas Sakti Umum Daerah (BLUD)	8.342.550.671,97	16.684.317.393,00	(8.341.766.721,03)	(0,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Teta Ruang dan Perumahan	187.394.745,00	138.629.646,00	(2.234.903,00)	(1,60)
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	592.585.345,00	505.993.506,00	18.591.839,00	3,28
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan	4.978.083,00	1.469.521,00	3.508.572,00	0,00



REKAPITULASI PERANGKAIAN DAN KEBERKELANAN SALDO PER 31 DESEMBER 2023
REKAPITULASI PERANGKAIAN 2023

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Ketelitian Perhitungan	Pegawai 1999
8	Transmigrasi Dinas Kepandudukan dan Perawatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.527.895,00	7.514.897,00	12.998,00	0,7
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perantaraan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	312.394,00	0,00	312.394,00	0,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.000,00	2.183.192,50	(2.075.192,00)	(95,93)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	5.595.257,00	0,00	5.595.257,00	-0,00
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.394.200,00	6.728.210,00	(5.332.010,00)	(79,27)
13	Dinas Perantaraan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.124.500,00	2.687.100,00	(1.562.600,00)	(58,15)
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.841.415,00	4.480.785,00	360.629,00	6,03
15	Sekretariat Daerah	197.481.948,00	19.789.082,00	177.692.866,00	898,84
16	Sekretariat DPRD	9.691.278,00	10.491.990,00	(810.714,00)	(7,73)
17	Kecamatan Kota Park Gadang Diateh	1.311.879,00	1.350.588,00	(19.207,00)	(1,44)
18	Kecamatan Sungai Pagu	982.028,00	4.498.451,00	(3.516.422,00)	(78,01)
19	Kecamatan Sangir	1.078.092,00	529.933,00	548.159,00	103,06
20	Kecamatan Sangir Selatan	634.140,00	1.888.965,00	(1.254.825,00)	(66,81)
21	Kecamatan Sangir Batang Hari	103.000,00	415.800,00	(312.800,00)	0,00
22	Kecamatan Paik Duc	199.500,00	136.000,00	63.500,00	46,88
23	Badan Perangulajaran Bencana Daerah	220.000,00	1.089.873,00	(869.873,00)	(79,44)
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	345.985,00	225.104,00	120.879,00	53,70
25	Inspektat Daerah	0,00	8.310.000,00	(8.310.000,00)	(100,00)
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.028.216,00	1.400.000,00	(371.784,00)	(26,56)
27	Badan Pengalokar Keuangan Daerah (SKPD)	4.443.184.359,00	688.589.095,51	3.754.615.381,49	545,28
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.727.958,00	1.737.958,00	(10.000,00)	(0,58)
	JUMLAH	18.772.539.227,97	23.220.835.831,51	(4.448.302.403,54)	(19,16)

Tiang beban tersebut dapat dijelaskan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

I) Utang beban pegawai

Saldo Tiang beban pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.015.998.106,00 merupakan utang kepada pegawai terhadap pengajuan Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah, yang belum direalisasikan sampai dengan tahun anggaran berakhir:



Tabel V.3.5.6 Utang Beban Pegawai

No	SKPD	Saldo Awal 2023	Debit 2023	Kredit 2023	Saldo Akhir 2023
1	Dinas Pendidikan, Keperawatan dan Olah Raga	0,00	291.791,074,00	(291.791,074,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	609.336.594,00	431.635.762,00	177.700.832,00	41,17
3	Rumah Sakti Umum Daerah (BLUD)	164.692.087,00	408.789.729,00	(244.097.642,00)	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perencanaan	0,00	187.512.915,00	(187.512.915,00)	(100,00)
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	277.444,00	(277.444,00)	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.574.053,04	705.000,00	2.869.053,00	0,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.775.100,00	0,00	2.775.100,00	0,00
8	Dinas Perumahan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.903.132,00	(1.903.132,00)	0,00
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	710.000,00	(710.000,00)	(100,00)
10	Dinas Perikanan	0,00	710.100,00	(710.100,00)	0,00
11	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sekretariat DPRD	0,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	0,00
13	Kecamatan Koto Perik Gedang Diatesh	0,00	232.080,00	(232.080,00)	0,00
14	Kecamatan Sungai Paq	0,00	3.640.000,00	(3.640.000,00)	0,00
15	Inspektoriat Daerah	0,00	8.310.000,00	(8.310.000,00)	(100,00)
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	4.238.620.252,00	326.546.453,51	3.909.073.798,49	1.197,10
	Jumlah	5.015.698.106,00	1.619.063.589,51	3.396.634.516,49	209,81

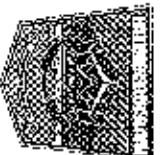
Jenis Utang beban pegawai selanjutnya dijelaskan dalam lampiran 26.

2) Utang Beban Barang dan Jasa

Saldo utang beban barang jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.963.977.271,97 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.3.5.7 Utang Beban Barang dan Jasa

No	SKPD	Saldo Awal 2023	Debit 2023	Kredit 2023	Saldo Akhir 2023
1	Dinas Pendidikan, Keperawatan dan Olah Raga	3.367.543,00	6.848.892,00	(9.581.347,00)	(53,86)
2	Dinas Kesehatan	3.882.733.898,00	3.904.465.443,00	(21.731.545,00)	(0,56)
3	Rumah Sakti Umum Daerah (BLUD)	8.177.658.604,97	16.175.527.654,00	(7.997.869.059,03)	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perencanaan	137.594.743,00	2.116.831,00	135.277.912,00	6.390,59
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	522.585.345,00	493.673.362,00	28.911.983,00	5,86



REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KATINGAN
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama OPD	31 Desember 2022	31 Desember 2023	Ketidakepastian Pembiayaan	Pengaruh
6	Dinas Sosial, Perpendayaaan Masyarakat dan Desa	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.406.000,00	764.521,00	640.479,00	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Kapandukan dan Pencatatan Sipil	4.752.595,00	7.514.897,00	(2.762.102,00)	(36,78)
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	312.354,00	0,00	312.354,00	0,00
11	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.000,00	220.000,00	(172.000,00)	(66,15)
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	5.595.257,00	0,00	5.595.257,00	0,00
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.394.200,00	6.016.210,00	(4.622.010,00)	(76,93)
14	Dinas Pertanian	1.124.500,00	1.977.000,00	(852.500,00)	(43,12)
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.851.415,00	4.430.786,00	360.629,00	8,02
16	Sekretariat Daerah	197.461.848,00	19.760.062,00	177.692.886,00	0,00
17	Sekretariat DPRD	9.691.276,00	5.691.990,00	3.999.286,00	70,09
18	Kecamatan Koto Parik Gadang Daerah	1.311.379,00	1.099.506,00	212.873,00	19,38
19	Kecamatan Sungai Pagu	862.028,00	858.451,00	103.578,00	12,07
20	Kecamatan Sangir	1.076.092,00	529.933,00	546.159,00	103,06
21	Kecamatan Sangir Jujuan	634.140,00	1.898.968,00	(1.264.828,00)	(66,81)
22	Kecamatan Sangir Selang Hari	103.000,00	415.500,00	(312.500,00)	0,00
23	Kecamatan Tauh Duo	199.500,00	136.000,00	63.500,00	46,69
24	Badan Pengendalian Bercana Daerah	220.000,00	1.069.873,00	(849.873,00)	(79,44)
26	Kantor Kesatuan Gangsa dan Politik	545.983,00	225.104,00	-20.979,00	53,70
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.028.216,00	0,00	1.028.216,00	0,00
27	Badan Pengolahan Karangan Daerah (SKPD)	5.926.256,00	3.861.720,00	1.944.536,00	48,64
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.727.958,00	1.737.958,00	(10.000,00)	(0,58)
Jumlah		12.963.977.271,97	20.640.866.489,00	(7.676.891.217,03)	(37,19)

Jenis Utang beban barang dan jasa selanjutnya dijelaskan dalam lampiran 27.

3) Utang Beban Transfer

Utang beban transfer per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp201.637.850,00 Utang beban transfer merupakan utang yang timbul akibat kekurangan transfer terhadap alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Nagari yang telah diamanatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, belum dibayarkan atau dibayarkan kepada Pemerintah Nagari.

Utang transfer tersebut merupakan utang transfer terhadap alokasi kurang bayar bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah nagari Tahun 2023.



No	Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Ket. Penurunan	Perubahan
1	Alokasi Kurang Bayar bagi hasil Pajak Daerah	177.791.347,00	214.324.512,00	(37.033.165,00)	(17,24)
2	Alokasi Kurang Bayar bagi hasil retribusi daerah	23.846.503,00	143.216.341,00	(119.369.838,00)	(83,35)
	Jumlah	201.637.850,00	358.040.853,00	(156.403.003,00)	(43,68)

4) Utang Beban Belanja Modal

Utang beban belanja modal per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp590.920.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.5.8 Utang Beban Belanja Modal

No	OPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Ket. Penurunan	Perubahan
1	Dinas Kesehatan	590.920.000,00	590.920.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Parurahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	11.842.700,00	(11.842.700,00)	(100,00)
	JUMLAH	590.920.000,00	602.862.700,00	(11.942.700,00)	(1,98)

Utang beban belanja modal pada Dinas Kesehatan merupakan Utang Belanja Modal Pembangunan Gedung Puskesmas Meru sebesar Rp590.920.000,00 pada tahun 2020 sampai 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayarannya.

3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp37.697.329,00.

Tabel V.3.5.9 Utang Jangka Pendek Lainnya

No	OPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Ket. Penurunan	Perubahan
	Badan Pengalokan Keuangan Daerah (SKPKD)	37.697.329,00	37.118.129,00	579.200,00	0,00
	Utang Sisa BOS	579.200,00	0,00	579.200,00	100,00
2	Utang Jasa Giro kepada Pemerintahan (Negari)	32.985.597,00	32.985.597,00	0,00	0,00
3	Utang Jasa Giro kepada Sekolah Swasta	2.866.179,00	2.866.179,00	0,00	0,00
4	Utang Jasa Giro kepada Instansi Lain	1.266.353,00	1.266.353,00	0,00	0,00
	JUMLAH	37.697.329,00	37.118.129,00	579.200,00	1,56

Adapun rincian utang jangka pendek selanjutnya dijelaskan pada Lampiran 28.



B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali/jarah tempo lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

Per 31 Desember 2023 dan 2022, saldo utang jangka panjang adalah sebesar Rp0,00.

	31 Des 2022	31 Des 2023
Saldo Awal	0,00	0,00
Saldo Akhir	0,00	0,00

Saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah Rp1.974.690.884.204,57 jika dibandingkan dengan ekuitas akhir 2022 sebesar Rp2.024.726.747.023,88 terdapat penurunan nilai sebesar Rp50.035.862.819,31 atau turun sebesar 2,47%. Penghitungan nilai ekuitas akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	2022	2023	NEKUISIV PERMULAAN	2023
1	EKUIAS AWAL	2.024.726.747.023,88	1.974.690.884.204,57	1.974.690.884.204,57	1.974.690.884.204,57
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(48.084.902.712,31)	89.526.552.608,87	(138.211.944.721,18)	(154.951.559.552,60)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(1.350.870.107,00)	19.535.019.882,71	(20.885.889.959,71)	(106,982)
4	a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	(1.350.870.107,00)	32.013.636,00	(171.536.236,00)	(525,582)
5	b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(1.211.547.507,00)	19.503.006.226,71	(20.714.353.793,71)	(108,21)
6	PERUBAHAN EKUIAS	(1.350.870.107,00)	2.024.726.747.023,88	(910.955.882.848,31)	(92,770)

5.4 LAPORAN OPERASIONAL.

Laporan Operasional disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2023. Laporan Operasional menyajikan Pendapatan-LO dan Beban.

5.4.1 Pendapatan-LO	31 Des 2022	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
	824.240.562.781,03	894.187.458.131,14

Pendapatan-LO tahun 2023 dengan realisasi Rp824.749.562.781,03 sedangkan tahun 2022 realisasi Rp894.874.584.431,14 terjadi penurunan sebesar Rp70.125.021.650,11 atau 8,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.1 Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2022	2023	Keseluruhan	Perubahan
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	88.913.195.401,03	93.825.454.492,72	(4.912.259,851,11)	(5,52)
2.	Pendapatan Transfer-LO	719.725.885.687,00	735.311.478.401,00	(19.585.882.714,00)	(2,72)



No	Jumlah	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Selisih Perubahan (Rp)	%
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ^{1, O}	16.110.771.693,00	6.737.651.538,00	(45.626.879.845,00)	(283,20)
	Jumlah	824.749.562.781,03	894.874.584.431,14	(70.125.021.650,11)	(8,50)

Agabila dibandingkan dengan: Pendapatan – I, RA dengan Pendapatan -LO maka terjadi selisih sebagai mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4.2 Perbedaan Pendapatan LRA dengan Pendapatan-LO

No	Uraian Pendapatan	Pada 2022 (Rp)	Pada 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	92.121.045.048,10	93.825.454.492,14	(1.704.438.448,04)
2.	Perolehan Transfer	794.706.642.887,00	739.311.478.401,00	45.395.164.486,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.828.208.106,00	61.737.651.538,00	(53.909.443.432,00)
	Jumlah	884.655.899.039,10	894.874.584.431,14	(10.218.685.392,04)

Dari tabel rincian pendapatan - lo diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

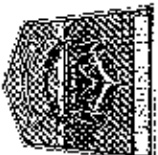
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Pendapatan asli daerah (PAD)-LO merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp88.913.195.401,03 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp93.825.454.492,14 terjadi penurunan sebesar Rp4.912.259.091,11 atau 5,52% Pendapatan Asli Daerah-LO ini memiliki proporsi sebesar 10,78% dari keseluruhan Pendapatan-LO. Kelompok Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel V.4.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Kepada Perubahan (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	12.788.218.584,00	12.512.850.774,10	275.368.809,90	2,15
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2.110.591.022,70	2.206.416.790,00	(95.825.767,30)	(4,54)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	2.786.556.717,00	2.453.762.350,00	360.793.767,00	13,61
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	71.217.831.077,38	76.890.423.976,04	(5.472.592.900,71)	(7,68)
	Jumlah	88.913.195.401,03	93.825.454.492,14	(4.912.259.091,11)	(5,52)

Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah – I, RA dengan Pendapatan Asli Daerah -LO maka terjadi selisih sebagai mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	925.642.995,00	925.642.885,00	0,00
6.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	2.111.031.597,00	2.814.703.067,00	(1.603.671.470,00)
7.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	364.613.822,00	954.613.822,00	5,00
	Jumlah	11.176.289.566,00	12.798.216.584,00	(1.611.927.018,00)

Terjadi selisih antara Pendapatan Pajak Daerah LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah LO dikarenakan:

1. Pendapatan Pajak reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron terjadi perbedaan antara Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO sebesar (Rp1.702.812,00) berasal dari Jumlah Balik Pendapatan di terima di muka lainnya Rp7.012.023,00 dan pelunasan piutang reklame sebesar Rp855.000,00 dikurangi dengan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan karena masa ketertanggungjawabannya lewat 31 desember 2023 sebesar Rp8.714.835,00.
2. Pendapatan Penerangan jalan terjadi selisih (Rp9.958.361,00) dikarenakan piutang pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2022 sebesar Rp471.113.417,00 yang diterima tahun 2023 dikurangi dengan munculnya piutang tahun 2023 sebesar Rp481.071.778,00 yang akan diterima tahun 2024
3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terjadi perbedaan sebesar (Rp1.603.671.470,00) karena penetapan tahun 2023 sebesar Rp2.814.703.067,00 sedangkan yang citragin sebesar Rp1.211.031.597,00 terdapat selisihnya yang akan menambah piutang sebesar Rp1.603.671.470,00

B. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp2.110.591.022,70 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp2.206.416.790,00 terjadi penurunan sebesar Rp95.825.767,30 atau 4,54% dengan Rincian masing masing Hasil Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

Table V.4.7 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Kepi- perubahan Retribusi-LO	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	136.175.000,00	122.519.000,00	13.656.000,00	10,32
2.	Retribusi Pelanggaran Persampahan/Kebersihan-LO	110.627.000,00	132.471.000,00	(21.844.000,00)	(19,74)
3.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	477.975.000,00	461.000.000,00	16.975.000,00	3,55
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	51.338.000,00	56.252.000,00	(4.913.000,00)	(9,56)
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	321.945.312,00	317.719.068,00	4.226.244,00	1,31
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	729.894.933,00	753.745.227,00	(24.050.294,00)	(3,29)
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	35.916.000,00	45.048.000,00	(9.132.000,00)	(25,42)



No.	Uraian	2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.	Perubahan Rp.	Saldo Rp.
8.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	219.362.000,00	282.505.000,00	(63.143.000,00)	(29,78)	
9.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	27.586.777,70	35.157.500,00	(7.590.722,30)	(27,53)	
	Jumlah	2.110.591.022,70	2.205.416.790,00	(95.825.767,30)	(4,54)	

Dari Pendapatan Retribusi Daerah -LO diatas apabila diperbandingkan dengan: Pendapatan Retribusi Daerah -LRA dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel V.4.8 Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah -LO

No.	Uraian	Retribusi LRA Rp.	Retribusi LO Rp.	Selisih Rp.
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	136.175.000,00	136.175.000,00	0,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	110.627.000,00	110.627.000,00	0,00
3.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	357.480.400,00	477.975.000,00	(110.494.600,00)
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	51.339.000,00	51.339.000,00	0,00
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	321.945.312,00	321.945.312,00	0,00
5.	Retribusi Pemakatan Kekayaan Daerah-LO	729.894.933,00	729.894.933,00	0,00
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	35.916.000,00	35.916.000,00	0,00
8.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	219.362.000,00	219.362.000,00	0,00
9.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	27.586.777,70	27.586.777,70	0,00
	Jumlah	2.000.096.422,70	2.110.591.022,70	(110.494.600,00)

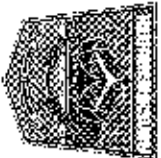
Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah LRA dengan Pendapatan Retribusi - LO di rekening Retribusi Pelayanan Pasar-LO sebesar Rp110.494.600,00 dikarenakan adanya penelapan retribusi pelayanan pasar sebesar tahun 2023 sebesar Rp477.975.000,00 namun yang teraang hanya Rp367.480.400,00 maka selisihnya menambah pada Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp110.494.600,00

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp2.796.556.717,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp2.415.762.950,00 terdapat kenaikan sebesar Rp380.793.767 atau 15,76%.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp71.217.831.077,33 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp76.690.423.978,04 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.472.592.900,71 atau 7,63% dengan rincian sebagaimana Tabel dibawah ini:



Tabel V.4.9 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Ketajiran Perubahan	%
1.	Hasil Penjualan Arah Angkutan-LO	21.050.000,00	1.735.201.00,00	(1.714.151.100,00)	(8.148,23)
2.	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	0,00	24.925.000,00	(24.925.000,00)	0,00
3.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.737.580.341,24	1.909.652.339,00	1.827.928.202,24	48,30
4.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	0,00	123.301.366,00	(123.301.366,00)	0,00
5.	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	0,00	1.300.976,76	(1.300.976,76)	0,00
6.	Pendapatan Bunga atas Perampatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	5.376.329.638,00	(5.376.329.638,00)	0,00
7.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	2.293.096.037,00	(2.293.096.037,00)	0,00
8.	Peninjauan Kembali, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	17.965.774.341,46	6.841.059.102,00	11.124.715.239,46	61,92
9.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	328.368.169,63	87.653.762,28	240.709.407,35	73,30
10.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	4.287.800,00	(4.287.800,00)	0,00
11.	Pendapatan dari BLUD-LO Jumlah	49.185.059.026,00 71.217.831.077,33	58.287.511.857,00 76.690.423.976,04	(8.122.453.832,00) (5.472.592.900,71)	(18,55) (7,69)

Perbedaan lain-lain PAD yang sah LRA dengan lain-lain PAD yang sah LO dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel V.4.10 Perbedaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Hasil Penjualan Arah Angkutan	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00
2.	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.738.881.515,00	3.737.580.341,24	1.300.976,76
3.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	17.965.774.341,46	17.965.774.341,46	0,00
4.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	328.368.169,63	328.368.169,63	0,00
5.	Pendapatan dari BLUD Jumlah	50.849.574.198,80 72.902.648.227,09	49.165.058.026,00 71.217.831.077,33	1.683.516.173,00 1.684.817.149,76

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perbedaan antara Perbedaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO dengan Perbedaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA di pendapatan blind LO dikarenakan sebagai berikut:

1. Adanya Perbedaan sebesar Rp1.300.976,76 karena pelunasan Pinrang Lain-Lain PAD Yang Sah - Pinrang Remunerasi DBH Treasury Deposit Facility
2. Adanya perbedaan sebesar Rp1.683.516.173,0 dikarenakan adanya realisasi pinrang tahun 2023 sebesar Rp5.747.915.543,00 dikurangi dengan penambahan pinrang tahun 2023 sebesar Rp4.049.399.370,00 dan ditambah dengan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp15.000.000,00



2. PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2023 terdapat sebesar Rp719.725.595.687,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp739.311.478.401,00 terjadi penurunan sebesar Rp19.585.882.714,00 atau 2,72% yang mana di dalamnya terdiri dari :

Tabel V.4.11 Rincian Pendapatan Transfer -LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Perubahan Pendapatan	%
1.	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	61.722.597.282,00	75.744.717.120,00	(14.022.119.838,00)	(22,71)
2.	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	452.753.766.000,00	436.897.960.562,00	15.855.824.438,00	3,50
3.	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK)	146.651.640.399,00	163.703.080.880,00	(17.051.440.481,00)	(11,62)
4.	Pendapatan Bagi Hasil Fisik-LO	51.597.573.006,00	51.465.719.839,00	131.853.167,00	0,25
5.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7.080.300.000,00	11.500.000.000,00	(4.500.000.000,00)	(64,28)
	Jumlah	719.725.595.687,00	739.311.478.401,00	(19.585.882.714,00)	(2,72)

Rincian masing-masing jenis Pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO

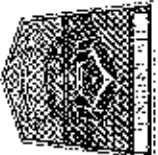
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO Tahun 2023 sebesar Rp61.722.597.282,00 tahun 2022 Rp75.744.717.120,00 terdapat penurunan sebesar Rp14.022.119.838,00 atau 22,71% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.12 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Perubahan Pendapatan	%
1.	DBH PBB-LO	31.557.623.241,00	49.679.511.041,00	(18.121.887.800,00)	(57,42)
2.	DBH PPh Pasal 21-LO	4.551.585.449,00	5.206.915.840,00	(655.330.391,00)	(14,39)
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 28/PP/PP/DN-LO	0,00	362.828.489,00	(362.828.489,00)	0,00
4.	DBH CHT-LO	16.415.505,00	46.488.129,00	(30.062.623,00)	(183,07)
5.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	12.788.004.265,00	16.215.355.855,00	(3.427.351.600,00)	(26,80)
6.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	109.511.759,00	378.155.227,00	(268.643.469,00)	(245,31)
7.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti-LO	660.051.666,00	1.639.733.856,00	(779.681.690,00)	(120,65)
9.	DBH SDA Kehutanan- PSDH-LO	10.631.726.013,00	45.694.974,00	10.586.041.039,00	99,57
9.	DBH SDA Perikanan-LO	1.207.679.335,00	2.170.064.211,00	(962.384.876,00)	(79,68)
	Jumlah	61.722.597.282,00	75.744.717.120,00	(14.022.119.838,00)	(22,71)

2. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp452.753.785.000,00 sedang pada Tahun 2022 sebesar Rp436.897.960.562,00 terjadi kenaikan sebesar Rp15.855.824.438,00 atau 3,62%.

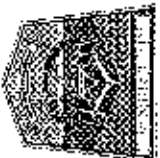


3. Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp146.651.640.399,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp163.703.080.880,00 terjadi penurunan sebesar Rp17.051.440.481,00 atau 11,62% dimana rincian sebagai berikut :

Tabel V.4.13 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

No	Uraian	2022 Rp	2023 Rp	Perubahan Rp	%
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	1.374.625.730,00	947.799.433,00	426.826.347,00	31,05
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	9.501.537.287,00	28.778.066.100,00	(14.276.528.813,00)	(150,25)
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.289.551.200,00	17.308.367.300,00	(15.019.416.100,00)	(655,99)
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	8.777.853.393,00	(8.777.853.393,00)	0,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Ketamassan-LO	0,00	3.666.569.223,00	(3.666.569.223,00)	0,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Perencanaan-Perumahan AKI dan AKB-LO	0,00	4.074.871.956,00	(4.074.871.956,00)	0,00
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Perencanaan-Perumahan Intervensi Stunting-LO	5.925.579.309,00	177.990.260,00	5.747.539.119,00	96,99
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Perencanaan-Perumahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	510.817.000,00	(510.817.000,00)	0,00
9.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	0,00	443.893.375,00	(443.893.375,00)	0,00
10.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan-LO	22.929.813.300,00	9.242.898.942,00	13.686.914.458,00	59,68
11.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Perumahan-LO	0,00	7.168.080.509,00	(7.168.080.509,00)	0,00
12.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Perumahan-LO	0,00	5.412.783.000,00	(5.412.783.000,00)	0,00
13.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Perencanaan Penanggulangan Penyakit-LO	304.594.000,00	0,00	304.594.000,00	100,00
14.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	204.803.271,00	1.203.076.143,00	(998.272.872,00)	(485,98)
15.	DAK Non Fisik-BOS-Reguler-LO	23.572.290.801,00	22.813.557.394,00	758.432.907,00	3,21
16.	DAK Non Fisik-BOS	1.950.000.000,00	0,00	1.950.000.000,00	100,00

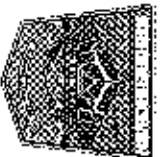


No	Kategori	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Saldo (Rp)	Saldo (Rp)
	Kinerja-LO				
17.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	58.709.805.499,00	49.380.073.742,00	4.319.731.757,00	8,04
18.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	837.544.420,00	750.187.500,00	87.356.920,00	10,45
19.	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	4.873.851.000,00	4.351.144.000,00	522.707.000,00	13,77
20.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.489.787.000,00	441.300.000,00	2.028.487.000,00	82,19
21.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	2.020.400.000,00		2.020.400.000,00	100,00
22.	DAK Non Fisik-300KB-BOK-LO	6.410.739.281,00	146.691.270,00	6.264.048.011,00	87,71
23.	DAK Non Fisik-BOKB-Akreditasi Puskesmas-LO	5.849.655.900,00	0,00	5.849.655.900,00	100,00
24.	DAK Non Fisik-BOKB-BOK9-LO	1.586.844.450,00	2.017.879.200,00	(432.034.750,00)	(27,24)
25.	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	378.006.250,00	377.183.000,00	(4.178.750,00)	(1,11)
26.	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanganan Miscal-LO	466.446.587,00	167.531.750,00	298.914.847,00	64,09
27.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	231.815.000,00	535.766.500,00	(333.951.500,00)	(145,47)
	Jumlah	146.651.640.399,00	163.703.080.860,00	(17.051.440.461,00)	(11,62)

Perbedaan DAK - LRA dengan DAK - LO dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel V.4.14 Perbedaan DAK - LRA dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

No	Kategori	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Saldo (Rp)	Saldo (Rp)
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler PAUD-LO	1.374.625.782,00	1.374.625.780,00		0,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	9.501.537.287,00	9.501.537.287,00		0,00
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.289.551.200,00	2.289.551.200,00		0,00
4.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pemupasan-Perawatan Intervensi Stunting-LO	5.925.529.389,00	5.925.529.389,00		0,00
5.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	22.929.813.300,00	22.929.813.300,00		0,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	304.594.000,00	304.594.000,00		0,00
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengujian Sistem Kesehatan-LO	204.803.271,00	204.803.271,00		0,00
8.	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	23.572.290.801,00	23.572.290.801,00		0,00
9.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00		0,00
10.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	53.709.805.499,00	53.709.805.499,00		0,00
11.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	837.544.420,00	837.544.420,00		0,00
12.	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	4.873.851.000,00	4.873.851.000,00		0,00
13.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.489.787.000,00	2.489.787.000,00		0,00
14.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	2.020.400.000,00	2.020.400.000,00		0,00
15.	DAK Non Fisik-BOKB-300K-LO	6.410.739.281,00	6.410.739.281,00		0,00
16.	DAK Non Fisik-BOKB-Akreditasi	5.849.655.900,00	5.849.655.900,00		0,00



No	Uraian	2022 Rp	2023 Rp	Perubahan Rp	Saldo Rp
	Puskemas-LO				
17.	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB-LO	1.585.844.450,00	1.585.844.450,00	0,00	
18.	DAK Non Fisik-Fasilitas Pengamar. Medal-LO	466.446.597,00	466.446.597,00	0,00	
19.	DAK NonFisik-Dana Kelurahan Pangan dan Perlindungan	201.815.000,00	201.815.000,00	0,00	
20.	DAK Non Fisik-PKUMK-LO Jumlah	373.008.250,00	373.008.250,00	0,00	0,00
		146.651.640.399,00	146.651.640.399,00	0,00	

4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak- LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2023 sebesar Rp51.465.719.839,00 sedang untuk tahun 2022 sebesar Rp51.465.719.839,00 terdapat kenaikan sebesar Rp131.853.167,00 atau 0,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.15 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak- LO

No	Uraian	2022 Rp	2023 Rp	Perubahan Rp	Saldo Rp
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	11.762.708.391,00	12.406.464.172,00	(643.755.790,00)	(5,47)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Naera Kendaraan Bermotor-LO	5.981.087.078,00	6.207.350.941,00	(226.263.863,00)	(3,78)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	29.612.771.458,00	19.321.418.906,00	1.291.352.552,00	6,26
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	367.457.143,00	292.324.361,00	75.132.792,00	20,44
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO Jumlah	12.873.548.346,00	13.238.161.562,00	(364.612.616,00)	(2,93)
		51.597.573.006,00	51.465.719.839,00	131.853.167,00	0,25

5. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Sintang Selama tahun 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 sedang tahun 2022 sebesar Rp11.500.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 39,13%

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO pada Tahun 2023 sebesar Rp16.110.771.693,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp61.737.651.538,00 terjadi kenaikan sebesar Rp45.626.879.845,00 atau 283,20% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.16 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

No	Uraian	2022 Rp	2023 Rp	Perubahan Rp	Saldo Rp
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	5.595.892.270,00	48.515.844.132,00	(42.719.951.862,00)	(724,57)
2	Pendapatan Hibah dari Kelompok masyarakat - LO	0,00	5.229.130.000,00	(5.229.130.000,00)	0,00
3	Pendapatan Dana Kaspiasi JKN pada FKT-LO	10.214.879.423,00	7.892.677.406,00	2.322.202.017,00	22,78



No	Uraian	2023		Keterkaitan Pemerintahan	Saldo
		(Rp)	(Rp)		
Jumlah:		16.110.771.693,00	61.737.651.538,00	(45.626.879.845,00)	(283,20)

Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah LO jika dibandingkan dengan Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah LRA sebagai mana dengan tabel dibawah ini:

Tabel V.4.17 Perbedaan Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah - LRA dengan Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah - LO

No	Uraian	2023		Saldo
		(Rp)	(Rp)	
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	0,00	5.895.892.270,00	(5.895.892.270,00)
2.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	10.011.920.023,00	10.214.878.423,00	(202.958.400,00)
Jumlah		10.011.920.023,00	16.110.771.693,00	(8.098.851.670,00)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perbedaan tersebut pada Lain-lain Penerimaan daerah yang sah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah pusat sebesar Rp5.895.892.270,00 merupakan bantuan Pemerintah Pusat dengan rincian:

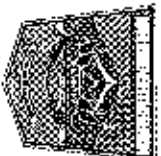
No	Uraian	2023 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	3.557.091.270,00
2.	Dinas Peranlah	168.134.000,000
3.	Kecamatan Kotlo Parik Gadang Disar	540.546.000,00
4.	Kecamatan Sungai Sargi	818.912.000,00
5.	Kecamatan Sangir Jujuan	477.343.000,00
6.	Kecamatan Sangir Balah Hari	335.588.000,00
Jumlah		5.895.892.270,00

2. Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD sebesar Rp64.469.300,00 karena ada penerimaan piutang sebesar Rp155.055.500,00 dan adanya piutang tahun 2023 sebesar Rp58.014.900,00.

5.4.2 BEBAN 31 Des 2023 31 Des 2023
 (Rp) (Rp)
 875.161.291.700,31 793.053.291.943,27

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pergeburan atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mempedomani Peraturan Kementerian Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dengan implementasi Permendagri ini terdapat penyesuaian dalam penyajian Laporan Operasional Tahun 2023.



Jumlah Beban Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2023 sebesar Rp873.461.391.766,34 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp793.698.394.937,27 mengalami kenaikan sebesar Rp79.762.996.829,07 atau 10,05% yang merupakan Beban Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.18 Rincian Beban

Kode	Uraian	2023		2022		Perubahan Fungsional	%
		Rp	JRp	Rp	JRp		
1	Beban Pegawai - LO	378.003.820.339,44	380.287.158.587,34	(1.283.378.222,93)	(0,34)		
2	Beban Persediaan	37.698.937.320,48	92.071.298.284,75	(54.324.639.666,71)	(19,04)		
3	Beban Jasa	104.885.115.711,00	86.079.381.312,52	(19.788.734.398,48)	(23,26)		
4	Beban Pemeliharaan	2.471.497.487,00	6.488.731.757,00	(4.095.234.220,00)	(64,01)		
5	Beban Perjalanan Dinas	36.500.721.389,00	41.087.206.641,00	(5.586.485.242,00)	(13,60)		
6	Beban Hibah	27.774.142.546,00	5.965.116.904,00	(21.809.025.642,00)	(365,61)		
7	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	167.247.009.682,39	137.472.897.465,09	(29.974.112.217,30)	(21,80)		
9	Beban Penyisihan Piutang	4.998.578.653,05	799.337.113,85	(4.199.542.569,20)	(525,58)		
10	Beban Transfer	50.819.233.213,00	49.467.550.012,00	(1.151.683.201,00)	(2,33)		
11	Beban Lain-lain	3.085.333.836,00	4.392.878.904,72	(1.507.843.068,72)	(32,82)		
	Jumlah	873.461.391.766,34	793.698.394.937,27	(79.762.996.829,07)	(10,05)		

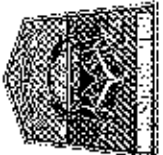
Berdasarkan tabel diatas dapat dirinci Beban Operasi sebagai berikut :

A. BEBAN PEGAWAI-LO

Beban Pegawai Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp379.003.820.339,44 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp380.297.198.562,34 terjadi penurunan sebesar Rp1.293.378.222,90 atau (0,34%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.4.19 Rincian Beban Pegawai-LO

No	Uraian	2023		2022		Perubahan Fungsional	%
		Rp	JRp	Rp	JRp		
1	Beban Gaji dan Tunjangan	283.360.779.630,00	224.046.480.925,00	6.314.318.765,00	2,82		
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	67.539.314.767,00	73.980.762.813,50	(6.541.448.046,50)	(9,85)		
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	71.381.384.770,00	72.217.621.931,21	(836.237.181,14)	(1,16)		
4	Beban Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.107.343.370,00	6.323.666.803,00	(2.783.706.567,00)	(2,82)		
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/MKDH	304.121.742,37	317.890.089,63	(13.768.347,26)	(4,39)		
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta	510.876.000,00	510.876.000,00	0,00	0,00		



No	Uraian	2022		Kendaraan Perjalanan	
		(Rp)	(Rp)		
	KDH/WKDH				
Jumlah		379.003.820.339,44	380.297.198.562,34	(1.293.378.222,90)	(0,34)

Dari tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Rincian beban Gaji dan Tunjangan - LO

Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan - LO Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp230.360.779.690,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp224.046.460.925,00 terjadi kenaikan sebesar Rp6.314.318.765,00 atau 2,82% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.20 Rincian Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan - LO

No	Uraian	2023	2022	Kendaraan Perjalanan	
1	Beban Gaji PNS / Warga Represenasi - LO	159.215.144.344,00	160.433.004.644,00	(917.860.300,00)	(0,57)
2	Beban Gaji Pokok PPPK	9.922.984.800,00	5.715.086.200,00	4.206.995.400,00	73,81
3	Beban Tunjangan Keluarga - LO	15.747.741.845,00	15.892.598.438,00	(54.854.293,00)	(0,35)
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.009.548.070,00	563.947.776,00	425.600.294,00	72,85
5	Beban Tunjangan Jabatan - LO	3.731.514.505,00	3.757.580.900,00	(86.046.395,00)	(1,74)
6	Beban Tunjangan Fungsional - LO	0.459.483.800,00	19.455.039.400,00	4.454.400,00	0,04
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	2.571.285.866,00	2.675.055.000,00	(103.769.134,00)	(3,89)
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	620.430.000,00	364.310.000,00	256.170.000,00	70,32
9	Beban Tunjangan Beras - LO	9.633.989.369,00	10.087.526.840,00	(163.527.271,00)	(1,62)
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	736.149.300,00	434.737.280,00	301.412.040,00	69,83
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	194.573.498,00	207.434.089,00	(112.860.391,00)	(6,20)
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	8.838.745,00	0,00	18.938.746,00	100,00
13	Beban Pembulatan Gaji - LO	2.453.911,00	2.425.159,00	28.772,00	1,19
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	173.351,00	96.807,00	76.544,00	79,67
15	Beban Luran Jaminan Kesehatan - LO	14.581.103.468,00	11.718.590.031,00	2.624.513.438,00	22,74
16	Beban Luran Jaminan Kesehatan PPPK	428.651.426,00	239.525.008,00	189.126.418,00	78,96
17	Beban Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	326.000.080,00	695.087.717,00	(369.087.717,00)	(53,10)
18	Beban Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	20.412.980,00	54.396.035,00	(33.983.053,00)	(62,17)
19	Beban Luran Jaminan Kematian PNS	879.338.906,00	995.905.297,00	(116.516.391,00)	(11,67)
20	Beban Luran Jaminan Kematian PPPK	61.684.704,00	86.056.846,00	(24.372.142,00)	(26,32)
	Jumlah	230.360.779.690,00	224.046.460.925,00	6.314.318.765,00	2,82



2. Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

Beban Pegawai Tambahan Penghasilan PNS - LO Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp67.339.314,767,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp73.880.762.813,50,00 terjadi penurunan sebesar Rp6.541.448.046,50 atau (8,85%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.21 Rincian Beban Pegawai Tambahan Penghasilan PNS -LO

No	Uraian	2022		2023		Perubahan Penjumlahan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	67.339.314,767,00	73.795.477,513,50	(6.456.163.046,50)	(8,75)		
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	65.285.000,00	(65.285.000,00)	(100,00)		
	JUMLAH	67.339.314,767,00	73.880.762.813,50	(6.541.448.046,50)	(8,85)		

3. Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Objek Lainnya- LO

Beban Pegawai Tambahan Penghasilan PNS Objek Lainnya- LO Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp71.381.384.770,07 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp72.217.621.931,21 terjadi penurunan sebesar Rp836.237.161,14 atau (1,16%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.22 Rincian Beban Pegawai Tambahan Penghasilan PNS Objek Lainnya -LO

No	Uraian	2022		2023		Perubahan Penjumlahan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.850.000,00	2.737.500,00	912.500,00	33,33		
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	32.500.000,00	128.143.500,00	(92.643.500,00)	(74,33)		
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rukhama	7.270.000,00	4.045.000,00	3.225.000,00	79,73		
4	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	132.297.007,12	282.576.722,88	(150.279.722,75)	(53,18)		
5	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		81.100.000,00	(81.100.000,00)	(100,00)		
6	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.012.762,00	42.340.000,00	(6.327.238,00)	(14,94)		
7	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.300.000,00	18.250.000,00	(10.950.000,00)	(69,00)		



No	URAIAN	2022		KEMERINTAHAN PERUNTUKAN	
		2022 (Rp)	2022 (Rp)		
8	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Paser	10.372.488,00	0,00	10.372.488,00	100,00
9	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pamakaian Kekayaan Daerah	5.429.278,00	4.891.000,00	538.278,00	11,01
10	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga		13.150.000,00	(13.150.000,00)	(100,00)
11	Beban TPG PNSD	54.767.456.700,00	52.158.719.813,00	2.608.737.887,00	5,00
12	Beban TKG PNSD	4.854.852.900,00	4.346.927.100,00	507.925.800,00	11,58
13	Beban Tamsil Guru PNSD	960.000.000,00	1.015.500.000,00	(55.500.000,00)	(6,47)
14	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.945.285.632,95	5.806.542.288,33	(138.743.344,62)	(2,49)
15	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.029.372.500,00	4.047.380.000,00	(18.007.500,00)	(0,44)
16	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	481.135.445,00	672.070.000,00	(190.934.555,00)	(44,83)
17	Beban Jasa Pengeluaran BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	108.350.000,00	386.280.000,00	(287.930.000,00)	(72,86)
	JUMLAH	71.381.384.770,07	72.217.621.981,21	(836.237.161,14)	(1,16)

4. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO

Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.107.343.370,00 sedang tahun 2022 sebesar Rp9.323.586.803,00 terdapat penurunan sebesar Rp.216.243.433,00 atau (2,32%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.23 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO

No	URAIAN	2023		KEMERINTAHAN PERUNTUKAN	
		2023 (Rp)	2023 (Rp)		
1	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	55.771.800,00	55.677.300,00	94.500,00	0,17
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	66.816.080,00	65.577.050,00	1.239.020,00	2,04
4	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00	0,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.232.000,00	814.233.000,00	0,00	0,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	83.559.300,00	83.559.300,00	0,00	0,00
7	Beban Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD-LO	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	0,00



No	URAIAN	2023		Kerugian Keuntungan	%
		Rp	Rp		
8	Beban Tunjangan Rases - LO	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00	0,00
9	Beban Pembesaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.34.198,00	50.033.197,00	101,39	0,20
10	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	49.050.320,00	44.973.032,00	4.102.288,00	8,12
11	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.155.588,00	988.376,00	298.792,00	33,88
12	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	3.465.504,00	2.599.128,00	866.376,00	33,39
13	Beban Tunjangan Pannunahan DPRD	1.771.656.000,00	1.762.291.500,00	8.394.500,00	0,58
14	Beban Tunjangan Transportasi - LO	3.238.500.000,00	3.471.300.000,00	(232.400.000,00)	(6,89)
	JUMLAH	9.107.343.370,00	9.323.596.803,00	(216.243.433,00)	(2,32)

5. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO

Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp304.121.742,37 sedang tahun 2022 sebesar Rp317.890.089,63 terdapat penurunan sebesar Rp13.768.347,26 atau 4,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.24 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO

No	URAIAN	2023		Kerugian Keuntungan	%
		Rp	Rp		
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	6.552.000,00	0,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	39.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
4	Beban Tunjangan Seras KDH/WKDH	6.083.280,00	5.214.240,00	869.040,00	14,87
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	469.086,00	448.414,00	20.642,00	4,80
6	Beban Pembuatan Gaji KDH/WKDH	1.360,00	1.200,00	160,00	12,33
7	Beban Juran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.468.240,00	5.010.720,00	455.520,00	9,10
8	Beban Juran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	102.860,00	9.360,00	9,19
9	Beban Juran Jaminan Kematian KDH/WKDH	339.960,00	308.980,00	28.080,00	9,19
10	Gabian Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	145.562.675,63	(145.562.675,63)	(100,00)
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	1.809.000,00	(1.809.000,00)	(100,00)
12	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00



No	Uraian	2021	2022	Kumulatif Perubahan	
		RP	RP		
13	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
14	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
15	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	72.332.541,37	0,00	72.332.541,37	0,00
16	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Baku Logam dan Batuan	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	0,00
17	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.687.985,00	0,00	14.687.985,00	0,00
18	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Baa Perishan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
19	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha, Pemakaian Kekayaan Daerah	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	JUMLAH	304.121.742,37	317.890.089,53	(13.768.347,26)	(4,33)

6. **Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH - LO**
 Beban Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH - LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp510.876.000,00 sedang tahun 2022 sebesar Rp510.876.000,00 tidak terdapat kenaikan atau penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.25 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO

No	Uraian	2021	2022	Perubahan 2022/2021	
		RP	RP		
1	Beban Pemungutan Operasional KDH/WKDH - LO	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00
2	Beban Dams Operasional Pimpinan DPRD	399.996.000,00	399.996.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	510.876.000,00	510.876.000,00	0,00	0,00

Realisasi belanja pegawai di LRA adalah sebesar Rp375.400.727.878,95 sementara itu realisasi beban pegawai di LO adalah sebesar Rp379.014.155.239,44. Terdapat perbedaan sebesar Rp3.613.427.360,49. Perbedaan belanja pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.



Tabel V.4.26 Perbedaan Belanja Pegawai- LRA dengan
Beban Pegawai-LO

No	Uraian	LRA		SELISIH
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Gaji dan Tunjangan	226.503.687.528,00	230.360.779.680,00	(3.857.092.152,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	87.328.077.982,00	67.339.314.767,00	(11.238.775,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Perubahan Objekif Lainnya ASN	71.635.306.871,95	71.391.384.770,67	253.922.201,98
4	Beban Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.107.343.370,00	9.107.343.370,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	315.436.077,00	304.121.742,37	11.314.274,63
6	Penerimaan Lainnya Pimlhan DPRD serta KDH/WKDH	510.876.000,00	510.876.000,00	0,00
	Jumlah	375.400.727.878,95	379.003.820.339,44	(3.603.092.460,49)

B. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp97.695.937.920,46 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp82.071.298.264,75 terjadi kenaikan sebesar Rp15.624.639.655,71 atau 19,04% dengan rincian sebagai berikut:

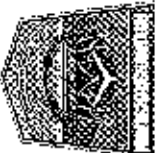
Tabel V.4.27 Rincian Beban persediaan

No	Uraian	2022		2023		Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Beban Bahan Pakai Habis	97.691.974.995,46	82.038.707.735,75	15.583.207.259,71	19,01		
2	Beban Bahan Tak Pakai Habis	64.022.925,00	32.590.529,00	31.432.396,00	96,46		
	Jumlah	97.695.997.920,46	82.071.298.264,75	15.624.639.655,71	19,04		

Dari tabel diatas Rincian Beban persediaan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

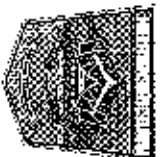
a. Beban Bahan Pakai Habis

Beban Bahan Pakai Habis Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 sebesar Rp97.631.914.995,46 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp82.038.707.735,75 terjadi kenaikan sebesar Rp15.593.207.259,71 atau 19,01% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.4.28 Rincian Beban Bahan Pakai Habis

No	Uraian	2023		2022		Kumulatif Perubahan	%
		Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.299.717,870,00	1.195.723.248,00		103.994.422,00	8,70	
2	Beban Bahan-Bahan Kiriya	545.695.742,55	580.938.877,00		(15.253.234,45)	(2,72)	
3	Beban Bahan-Bahan Sakar dan Pelumas	5.892.891.228,00	4.881.440.925,45		981.450.302,55	10,66	
4	Beban Bahan-Bahan Baku	10.480.000,00	9.045.000,00		1.435.000,00	15,87	
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	139.414.961,00	222.574.000,00		(83.159.039,00)	(37,36)	
6	Beban Bahan-lis Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	1.080.000,00		(1.080.000,00)	(100,00)	
7	Beban Bahan-lis Tabung Gas	718.538.177,00	798.629.400,00		(82.791.223,00)	(10,35)	
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit ikan	82.117.400,00	130.178.000,00		(68.059.200,00)	(62,24)	
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.395.240.588,00	13.112.225.238,00		(10.718.984.652,00)	(82,19)	
10	Beban Suku Cadang Angkutan	2.849.933.527,00	2.825.380.288,00		23.553.239,00	0,83	
11	Beban Suku Cadang-Kedokteran	118.357.056,00	250.649.959,00		(134.192.903,00)	(53,56)	
12	Beban Suku Cadang-Pertanian	28.615.000,00	1.382.800,00		25.282.200,00	1.896,32	
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.431.287,00	3.540.000,00		(2.108.753,00)	(63,57)	
14	Beban Suku Cadang-Laboratorium	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00	100,00	
15	Beban Suku Cadang-Pemeliharaan	2.700.000,00	0,00		2.700.000,00	100,00	
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat dan Komunikasi	650.000,00	0,00		650.000,00	100,00	
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkal	2.999.000,00	0,00		2.999.000,00	100,00	
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.588.626.422,97	3.876.485.037,92		712.141.385,05	18,37	
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.482.858.567,00	1.477.322.168,00		(18.463.601,00)	(1,25)	
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.963.256.432,00	5.396.288.148,00		606.988.286,00	11,33	
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	275.742.189,00	283.615.700,00		(5.473.531,00)	(2,99)	
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.975.400,00	12.398.000,00		4.517.400,00	36,44	



No	JUDUL	RPP		RPP		RPP	
		IBP	IBP	IBP	IBP	IBP	IBP
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persobor Kantor	132.145.698,00	1.0376.273,00	22.070.425,00	22,06		
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	807.117.327,00	785.159.295,90	21.958.031,10	2,80		
25	Gabian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perangkat/Dinas	2.727.000,00	4.197.600,00	1.529.400,00	127,73		
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perangkat/Dinas Pendukung Otsw Raga	267.814.389,00	225.329.348,00	42.484.220,00	18,85		
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendesa Mata	580.562.891,00	120.744.268,00	259.818.623,00	215,73		
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.785.890,00	566.138.941,48	(165.353.251,48)	(29,21)		
29	Beban Obat-Obatan-Obat	16.451.447.075,13	11.118.231.514,00	5.333.215.561,13	47,97		
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.769.876.625,00	1.687.313.041,00	102.563.584,00	6,08		
31	Beban Barang untuk Dijual/Disezatkan kepada Masyarakat	27.410.902.302,81	14.893.894.629,00	12.527.007.673,81	94,16		
32	Beban Barang untuk Dijual/Disezatkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	868.672.220,00	669.792.299,00	168.879.927,00	26,27		
33	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	70.451.632,00	(70.451.632,00)	(100,00)		
34	Beban Natura dan Pakan-Nature	1.165.548.650,00	1.963.397.527,00	(797.848.877,00)	(39,11)		
35	Beban Natura dan Pakan-Pakan	292.523.100,00	176.339.675,00	56.183.425,00	31,86		
36	Beban Natura dan Pakan-Lainnya	59.076.500,00	64.558.000,00	(8.481.500,00)	(10,04)		
37	Seban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	0,00	119.000,00	(118.000,00)	(100,00)		
38	Beban Makanan dan Minuman-Repas	4.397.913.735,00	4.308.890.305,00	91.032.830,00	2,11		
39	Beban Makanan dan Minuman Lainnya	2.583.370.667,00	1.909.228.618,00	674.142.049,00	35,51		
40	Beban Peningkatan Daya Tahan Tubuh	0,00	80.751.000,00	(80.751.000,00)	(100,00)		
41	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.922.320.200,00	1.346.922.092,00	676.398.110,00	42,83		
42	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	1.178.256.404,00	139.533.750,00	1.038.727.654,00	722,40		



No	Uraian	2022	2023	Saldo Awal Belanja (Rp)	Saldo Akhir Belanja (Rp)
		(Rp)	(Rp)		
	Kesehatan				
43	Beban Makanan dan Minuman Aktivas Lapangan	7.132.280,225,00	4.208.416,305,00	2.923.863,920,00	69,49
44	Beban Pakaiat Dinas KDH dan WKDH	354.426.420,00	356.513.000,00	(2.086.580,00)	(0,59)
45	Beban Pakaiat Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	322.500,000,00	424.812.500,00	(102.312.500,00)	(24,05)
46	Beban Pakaiat Dinas Harian (PDH)	213.594.637,00	10.000,000,00	203.594.637,00	2.035,96
47	Beban Pakaiat Dinas Lapangan (PDL)	1.478.627.324,00	672.727.690,00	806.899.634,00	119,94
48	Beban Pakaiat Penyelenggaraan	8.793.801,30	450,000,00	8.349.991,00	1.855,55
49	Beban Pakaiat Pelatihan Kerja	2.160.000,00	7.750,000,00	(89.590,000,00)	(96,99)
50	Beban Pakaiat Kerja Laboratorium	1.050,000,00	0,00	1.050,000,00	100,00
51	Beban Pakaiat Adat Daerah	161.988.803,00	146.049.999,00	16.338.934,00	11,68
52	Beban Pakaiat Batik Tradisional	462.774.545,00	105.400,000,00	357.374.545,00	339,07
53	Beban Pakaiat Olahraga	525.148.837,00	856.950,284,00	(190.801.427,00)	(27,42)
54	Beban Pakaiat Pasakiraka	190.515.835,00	117.000,000,00	63.515.835,00	54,29
55	Beban Pakaiat Jass/Safari	463.315,000,00	1.000,000,00	464.315,000,00	46,231,50
56	Beban Pakaiat Teknik	600,000,00	0,00	600,000,00	100,00
57	Beban Pakaiat Pelatihan Kerja	31.523,000,00	0,00	31.523,000,00	100,00
	Jumlah	97.631.914,995,46	82.038.707,736,75	15.593.207.259,71	19,01

b. Beban Bahan Tak Pakai Habis

Beban Bahan Pakai Habis Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 sebesar Rp64.022.925,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp32.590.529,00 (jadi kenaikan sebesar Rp31.432.296,00 atau 96,45 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.429 Rincian Beban Bahan Tak Pakai Habis

No	Uraian	2022	2023	Saldo Awal Belanja (Rp)	Saldo Akhir Belanja (Rp)
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Korporan- Komponen Peralatan	54.373.300,00	20.458.904,00	33.914.396,00	165,77
2	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	9.649.625,00	11.616.625,00	(1.967.000,00)	(16,93)
3	Beban Pipa-Pipa Lainnya	0,00	515.000,00	(515.000,00)	(100,00)
	Jumlah	64.022.925,00	32.590.529,00	31.432.396,00	96,45

Realisasi belanja Persediaan di LRA adalah sebesar Rp99.475.775.928,33 Sementara itu realisasi bahan Persediaan di LO adalah sebesar Rp97.723.502.419,30. Terdapat persediaan



sebesar Rp1.752.273.509,03 Perbedaan Belanja Persediaan LRA dengan Bahan Persediaan
LO dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel V.4.30 Perbedaan Belanja Persediaan- LRA dengan
Bahan Persediaan-LO

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)	URAIAN BAKI (Rp)	URAIAN PENYEBABAN (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.299.717.670,00	1.299.717.670,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	570.668.344,55	545.895.742,55	24.982.602,00	123.424.424,00	148.407.026,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakercan Pelumas	5.682.833.333,00	5.662.69.278,00	29.999.306,00	32.235.015,00	62.234.920,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bahan- Bahan/Bibit Tanaman	139.414.961,00	139.414.961,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Bahan-lisi Tabung Gas	987.278.577,00	715.838.177,00	270.440.400,00	54.723.000,00	325.169.400,00
7	Belanja Bahan- Bahan/Bibit Tanak/Bibit Ikan	208.445.200,00	62.117.400,00	146.327.800,00	0,00	148.327.800,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.380.044.226,00	2.335.240.586,00	44.803.640,00	9.152.000,00	53.995.640,00
9	Belanja-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.849.933.527,00	2.819.333.527,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	291.303.632,00	115.357.059,00	174.946.576,00	0,00	174.946.576,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Penerca	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Sauda dan Kominikasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	26.515.000,00	26.515.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat	2.999.000,00	2.999.000,00	0,00	0,00	0,00



No	URAIAN	Rp		Rp		Rp		Rp	
		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
	Bengkak								
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.431.297,00	1.431.297,00		0,00		0,00		0,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.560.243.927,97	4.588.626.422,97	(26.412.586,00)		527.064.821,00		498.652.226,00	
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor:- Kertas dan Cover	1.470.569.322,00	1.452.858.667,00	17.710.755,00			9.915.410,00		27.828.765,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor:- Bahan Cetak	6.026.363.744,00	5.969.256.432,00	62.127.312,00			17.878.000,00		80.005.312,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	275.252.169,00	275.142.168,00	110.000,00			2.950.000,00		3.060.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Korpusuler	16.915.400,00	16.915.400,00		0,00				0,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	132.145.698,00	132.145.698,00		0,00				0,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	787.735.660,00	807.117.327,00	(19.381.777,00)			79.858.600,00		60.476.822,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas	2.727.000,00	2.727.000,00		0,00				0,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Lainnya	267.814.185,00	267.814.188,00		0,00				0,00
26	Belanja	380.562.891,00	380.562.891,00		0,00		0,00		0,00



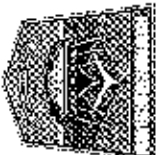
KABUPATEN SOLIK
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN, SOROTAN, SOLIK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	URSAH	RKA (Rp)	LO (Rp)	SEL-SH (Rp)	URUN-AL-BALIK (Rp)	JURNAL P-KONTRADIKSI (Rp)
	Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					
27	Belanja Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ast/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.578.552,00	400.785.590,00	(207.038,00)	207.038,00	0,00
28	Belanja Obat-Obatan-Obat	17.222.513.972,00	16.479.011.573,97	743.502.398,03	1.541.905.047,00	2.285.407.445,03
29	Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya	1.785.257.455,00	1.789.876.625,00	(619.170,00)	619.170,00	0,00
30	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.619.394.798,81	27.410.902.302,81	208.492.496,00	29.164.500,00	243.655.986,00
31	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada pihak Keloga/Pihak lain	897.175.220,00	898.672.220,00	28.505.000,00	0,00	29.509.000,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.221.140.917,00	1.185.548.650,00	25.592.267,00	28.320.885,00	53.913.152,00
33	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	292.523.100,00	292.523.100,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	44.076.500,00	58.076.500,00	(14.000.000,00)	14.000.000,00	0,00
35	Belanja Makanan dan Minuman Rapet	4.397.913.135,00	4.397.913.135,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Taniu	2.582.370.667,00	2.582.370.667,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.922.320.200,00	1.922.320.200,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas	1.202.571.952,00	1.178.266.404,00	24.305.548,00	0,00	24.305.548,00



CATATAN KEPADA LAPORAN KEUANGAN
REKONSILIASI PERALIHAN SOKO-SILAPAN
REVISI ANGGARAN 2023

No	Jenis Akun	Rp		Rp		Rp		Rp	
		DA	DB	DA	DB	SELISIH	JURIAL BALK	REKONSILIASI	
	Pelayanan Urusan Keselamatan								
39	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Larangan	7.145.330.225,00		7.132.220.225,00		13.050.000,00	0,00		13.050.000,00
40	Belanja Pakaian Dinas KCH dan WKDH	354.426.420,00		354.426.420,00		0,00	0,00		0,00
41	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	322.500.000,00		322.500.000,00		0,00	0,00		0,00
42	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	213.591.637,00		213.591.637,00		0,00	0,00		0,00
43	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.479.827.324,00		1.479.827.324,00		0,00	0,00		0,00
44	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.160.000,00		2.160.000,00		0,00	0,00		0,00
45	Belanja Pakaian Pelayanan	8.799.991,00		8.799.991,00		0,00	0,00		0,00
46	Belanja Pakaian Teknik	600.000,00		600.000,00		0,00	0,00		0,00
47	Belanja Pakaian Pelatihan Kele	31.593.000,00		31.593.000,00		0,00	0,00		0,00
48	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1.050.000,00		1.050.000,00		0,00	0,00		0,00
49	Belanja Pakaian Adar Daerah	161.998.993,00		161.998.993,00		0,00	0,00		0,00
50	Belanja Pakaian Batik Tradisional	462.774.546,00		462.774.546,00		0,00	0,00		0,00
51	Belanja Pakaian Olahraga	505.149.837,00		505.149.837,00		0,00	0,00		0,00
52	Belanja Pakaian Pabrik/ra	180.515.835,00		180.515.835,00		0,00	0,00		0,00
53	Belanja Pakaian Jas/Safari	463.315.000,00		463.315.000,00		0,00	0,00		0,00
54	Belanja Komponen- Komponen Peralatan	47.584.500,00		47.584.500,00		0,00	0,00		0,00
55	Belanja Komponen- Komponen	6.818.800,00		6.818.800,00		0,00	0,00		0,00



No	Uraian	2021		2022		Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	(Rp)	Rp	(Rp)		
Lainnya							
56	Beban Pipa- Pipa Plastik PVC (UPVC)	9.649.625,00	9.649.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		99.475.775.928,93	97.723.502.419,30	1.752.273.509,03	2.480.457.910,00	4.292.731.419,03	

C. BEBAN JASA

Beban Jasa Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp104.865.115.711,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp85.078.381.312,52 terjadi penurunan sebesar Rp19.786.734.398,48 atau (23,26%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.31 Rincian Beban Jasa

No	Uraian	2021		2022		Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	(Rp)	Rp	(Rp)		
1	Beban Jasa Kantor	72.102.224.194,00	58.771.290.161,52	12.330.934.032,48	23,95		
2	Beban Premi Asuransi	20.721.632.029,00	18.093.570.500,00	2.628.061.599,00	14,51		
3	Beban Sewa Tanah	0,00	1.950.000,00	(1.950.000,00)	(100,00)		
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.539.925.562,00	1.379.747.025,00	1.459.178.537,00	135,14		
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.418.392.167,00	989.872.884,00	428.519.283,00	48,11		
6	Beban Jasa Konsultasi	3.564.293.543,00	2.609.906.127,00	954.387.416,00	26,57		
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.473.244.584,00	1.082.000.000,00	391.244.584,00	26,16		
8	Beban Kurus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Takris PNS	595.256.000,00	1.394.129.490,00	(798.873.490,00)	(57,30)		
9	Beban Uang yang Dibebankan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Measyrakat	1.114.674.550,00	598.500.000,00	516.174.550,00	96,24		
10	Beban Jasa yang Dibebankan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Measyrakat	1.338.543.023,00	1.033.615.125,00	282.927.898,00	26,80		
Jumlah		104.865.115.711,00	85.078.381.312,52	19.786.734.398,48	23,26		

Dari rincian beban jasa diatas dapat dirinci beban jasa sebagai berikut:

1. Beban Jasa kantor -- LO

Beban Jasa Kantor tahun 2023 sebesar Rp72.102.224.194,00 sedang tahun 2022 sebesar Rp58.171.290.161,52 terdapat kenaikan sebesar Rp13.930.934.032,48 atau 23,95% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.32 Rincian Beban Jasa Kantor

No	Uraian	2021		2022		Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	(Rp)	Rp	(Rp)		
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator	4.637.620.000,00	2.171.863.000,00	2.465.757.000,00	113,93		



No	Uraian	2016		2017		Kumulatif Perhitungan	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
	Pembawa Acara, dan Panitia						
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	1.829.305.523,00	1.200.921.791,12	629.583.731,88	52,45		
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Barabere	32.400.000,00	0,00	32.400.000,00	-0,00		
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Peningkatan	4.2762.880,00	488.261.498,00	(76.498.536,00)	(1,54)		
5	Beban Honorarium Rohnawan	1.176.730.000,00	104.800.000,00	1.071.930.000,00	1.022,83		
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informati dan Pengelola Website	6.160.000,00	350.000,00	5.810.000,00	1.660,00		
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	66.499.000,00	30.992.000,00	35.507.000,00	114,98		
8	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	49.400.000,00	2.040.000,00	47.360.000,00	2.321,57		
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	49.852.000,00	73.100.000,00	(23.248.000,00)	(36,32)		
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	462.000.000,00	442.500.000,00	19.500.000,00	4,38		
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	2.106.791.000,00	2.380.364.000,00	(473.573.000,00)	(19,25)		
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	20.028.888.877,00	20.119.981.253,40	(90.092.376,40)	(0,45)		
13	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	27.727.400,00	24.330.222,00	3.397.178,00	13,96		
14	Beban Jasa Tenaga Pemasangan Prasarana dan Sarana Umum	1.657.955.000,00	1.482.147.000,00	365.808.000,00	24,52		
15	Beban Jasa Tenaga Keperawatan, Keperawatan Umum, dan Perinodangan Masyarakat	240.500.000,00	899.400.000,00	241.100.000,00	92,47		
16	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	622.000.000,00	460.200.000,00	61.800.000,00	19,42		
17	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)		
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	54.000.000,00	26.550.000,00	28.500.000,00	107,69		
19	Beban Jasa Tenaga Anasp dan Perpustakaan	34.800.000,00	29.400.000,00	5.400.000,00	16,37		
20	Beban Jasa Tenaga Keseman dan Kebudayaan	737.423.000,00	394.674.000,00	352.749.000,00	91,70		
21	Beban Jasa Tenaga Administrasi	4.395.640.000,00	3.219.340.000,00	1.176.300.000,00	85,26		
22	Beban Jasa Tenaga	297.470.000,00	279.350.000,00	27.120.000,00	10,09		



No	Uraian	2022		Kenaikan/ Penurunan (%)
		Rp1	Rp2	
51	Beban Penambasin Daya	20.043.400,00	10.123.845,00	9.919.555,00
52	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Porzhan	209.004.083,00	270.145.370,00	(51.137.287,00)
53	Beban Lembur	1.504.898.500,00	1.185.363.543,00	438.477.952,00
54	Beban Medical Check UP	68.841.950,00	37.842.958,00	30.998.994,00
55	Beban Registrasi/Keanggotaan	18.725.000,00	0,00	18.725.000,00
56	Beban Pengolahan Air Limbah	13.360.000,00	0,00	13.360.000,00
57	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atau Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta	600.000,00	0,00	600.000,00
	Jumlah	72.102.224.194,00	56.171.290.161,52	13.930.934.032,48
				28,95

2. Beban Jasa Premi Asuransi – LO

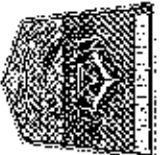
Beban Jasa Premi Asuransi tahun 2023 sebesar Rp20.721.632.088,00 sedang untuk tahun 2022 sebesar Rp18.095.570.500,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.626.061.588,00 atau 14,51% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.33 Rincian Beban Jasa Premi Asuransi – LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Sarangkat Desa	653.734.300,00	564.862.500,00	38.871.800,00	6,88
2	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PPU dan B? Kelas 3	66.290.000,00	0,00	66.290.000,00	100,00
3	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.667.612.245,00	17.515.798.000,00	2.372.224.245,00	13,54
4	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	86.155.304,00	15.000.000,00	71.155.304,00	474,37
5	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	77.540.244,00	0,00	77.540.244,00	100,00
	Jumlah	20.721.632.088,00	18.095.570.500,00	2.626.061.588,00	14,51

3. Beban Sewa Tanah

Beban sewa tanah tahun 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.950.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.950.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:



No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
	Bermotor Beroda Dua				
19	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
20	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
21	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	Jumlah	2.538.925.562,00	1.079.747.025,00	1.459.178.537,00	135,14

5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan – LO

Beban Sewa Gedung dan Bangunan – LO tahun 2023 sebesar Rp1.416.322.167,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp989.672.884,00 terdapat penurunan Rp426.649.283,00 atau (43,11%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.35 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan – LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	132.516.667,00	1.4.000.000,00	18.576.667,00	16,24
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempati Permuan	263.432.500,00	241.785.000,00	21.647.500,00	8,95
3	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempati Kerja Lainnya	600.000,00	1.450.000,00	(850.000,00)	100,00
4	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempati Lainnya	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
5	Beban Sewa Rumah Negara Golongas I	0,00	161.582.384,00	(161.582.384,00)	102,00
6	Beban Sewa Rumah Negara Golongas II	366.620.000,00	373.270.000,00	(16.650.000,00)	(4,46)
7	Beban Sewa Hotel	662.653.000,00	27.686.500,00	585.067.500,00	579,06
	Jumlah	1.416.322.167,00	989.672.884,00	426.649.283,00	43,11

6. Beban Jasa Konsultasi – LO

Beban Jasa Konsultasi – LO tahun 2023 sebesar Rp3.564.293.543,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp2.609.906.127,00 terdapat kenaikan sebesar Rp954.387.416,00 atau 36,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.37 Rincian Beban Jasa Konsultasi- LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	0,00	763.194.000,00	(763.194.000,00)	(100,00)
2	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	0,00	14.893.750,00	(14.893.750,00)	(100,00)
3	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Jasa Pengawas Pekerjaan	0,00	127.567.167,00	(127.567.167,00)	(100,00)



No	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
	Konstruksi Bangunan Gedung					
4	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	79.900.000,00	0,00	79.900.000,00	100,00	
5	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keahlian	0,00	521.963.210,00	(521.963.210,00)	(100,00)	
6	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Perantara dan Perdesasar	0,00	49.800.000,00	(49.800.000,00)	(100,00)	
7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	69.148.396,00	39.677.900,00	28.471.096,00	71,76	
8	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	1.042.910.100,00	(1.042.910.100,00)	(100,00)	
9	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemayanan Pariwisata	0,00	49.900.000,00	(49.900.000,00)	(100,00)	
10	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.259.214.547,00	0,00	2.259.214.547,00	100,00	
11	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.157.030.000,00	0,00	1.157.030.000,00	100,00	
	Jumlah	3.564.293.543,00	2.609.906.127,00	954.397.416,00	36,57	

7. Beban Beasiswa – LO

Beban Beasiswa Pendidikan PNS – LO tahun 2023 sebesar Rp1.473.244.584,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.082.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp391.244.584,00 atau 36,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.38 Rincian Beban Beasiswa Pendidikan PNS- LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
1	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	199.494.584,00	0,00	199.494.584,00	100,00
2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	38.250.000,00	0,00	38.250.000,00	101,00
3	Beban Beasiswa	1.235.500.000,00	1.082.000.000,00	153.500.000,00	102,00
	Jumlah	1.473.244.584,00	1.082.000.000,00	391.244.584,00	36,16

8. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS – LO

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS – LO tahun 2023 sebesar Rp595.256.000,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.394.129.490,00 terdapat penurunan sebesar Rp798.873.490,00 atau (57,30%) dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel V.4.39 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS- LO**

No	URAIAN	2023		2022		Kenaikan Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	142.550.000,00	394.375.490,00	(251.825.490,00)			100,00
2	Beban Bimbingan Teknis	452.706.000,00	294.814.000,00	157.792.000,00			100,00
3	Beban Diklat Kepernipratan	0,00	704.840.000,00	(704.840.000,00)			102,00
	Jumlah	595.256.000,00	1.394.129.490,00	(798.873.490,00)			(57,30)

9. Beban Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat-LO

Beban Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO tahun 2023 sebesar Rp1.114.674.550,00 sedangkan tahun 20231 sebesar Rp598.500.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp516.174.550,00 atau 86,24% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.40 Rincian Beban Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak
lain/Masyarakat- LO**

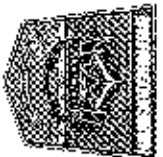
No	URAIAN	2023		2022		Kenaikan Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlimbaban	1.114.674.550,00	328.500.000,00	786.174.550,00			100,00
2	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	270.000.000,00	(270.000.000,00)			101,00
	Jumlah	1.114.674.550,00	598.500.000,00	516.174.550,00			86,24

10. Beban Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO

Beban Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO tahun 2023 sebesar Rp1.338.543.023,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.055.615.125,00 terdapat kenaikan sebesar Rp282.927.898,00 atau 26,80% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.41 Rincian Beban Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat-
LO**

No	URAIAN	2023		2022		Kenaikan Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.318.043.023,00	1.024.815.125,00	273.227.898,00			100,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00			101,00
3	Beban Bantuan Fasilitas Prerem Asuransi/Pertanian	4.500.000,00	10.800.000,00	(6.300.000,00)			102,00
	Jumlah	1.338.543.023,00	1.055.615.125,00	282.927.898,00			26,80



Selisih antara Belanja pada LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dengan beban pada LO (Laporan Operasional) sebagai berikut:

Tabel V.4.42 Rincian selisih anantara LRA dengan LO

No	Uraian	LO (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)	ALTERNATIF (Rp)	ALTERNATIF (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	78.745.181.857,00	72.02.224 - 84,00	8.542.857.863,00	10.184.188.010,00	18.907.145.873,00
2	Beban Personil Aduarte	23.856.342.088,00	20.721.832.088,00	(60.290.000,00)	98.290.000,00	0,00
4	Beban Sewa Fasilitasi dan lain-lain	2.592.060.582,00	2.592.060.582,00	16.875.000,00	5.975.000,00	0,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.418.406.500,00	1.418.422.167,00	2.038.588,00	0,00	2.083.305,00
6	Beban Jasa Konsultansi	3.564.293.543,00	3.564.293.543,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.278.100.000,00	1.473.024.584,00	(196.144.684,00)	196.144.684,00	0,00
8	Beban Biaya Bahan Teknik PNS	730.400.394,00	595.256.000,00	135.144.394,00	0,00	185.144.394,00
9	Beban Jang yang diberikan kepada Pihak Kelola/Pihak Lain/Masyarakat	1.114.074.550,00	1.114.872.550,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Kelola/Pihak Lain/Masyarakat	1.789.825.285,00	1.398.543.883,00	431.282.280,00	0,00	431.282.280,00
~Jumlah		11.1969.273.887,00	104.965.115.711,00	7.303.159.258,00	9.432.497.694,00	17.435.655.860,00

D. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Kabupaten Solik Selain Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.471.497.437,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp6.866.731.757,00 terjadi penurunan sebesar Rp4.395.234.320,00 atau (64,01%) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.4.43 Rincian Beban Pemeliharaan

No	Kategori	2023		2022		Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	(Rp)	Rp	(Rp)		
1	Beban Pemeliharaan Tanah	2.814.900,00	0,00	2.814.900,00	100,00		
2	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	1.822.591.073,00	1.822.731.457,00	122.859.616,00	11,86		
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	497.776.503,00	2.088.897.572,00	1.589.111.069,00	(78,15)		
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jembatan	39.226.982,00	3.137.922.728,00	(3.098.895.746,00)	(98,75)		
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	108.087.888,00	12.180.000,00	95.897.888,00	79,49		
Jumlah		2.471.497.457,00	6.966.731.757,00	(4.395.234.300,00)	(64,01)		

Beban Pemeliharaan diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Beban Pemeliharaan Tanah - LO

Beban Pemeliharaan Tanah - LO tahun 2023 sebesar Rp2.814.900,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.814.900,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.44 Rincian Beban Pemeliharaan Tanah - LO

No	Uraian	2023		2022		Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tetap lasdan	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00	100,00		
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Terasan	1.592.900,00	0,00	1.592.900,00	100,00		
Jumlah		2.814.900,00	0,00	2.814.900,00	100,00		

2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO tahun 2023 sebesar Rp1.822.591.073,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.629.731.457,00 terdapat kenaikan sebesar Rp192.859.616,00 atau 11,83% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.45 Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO

No	Uraian	2023		2022		Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Beban Pemeliharaan Aset Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	113.908.889,00	0,00	113.908.889,00	100,00		
2	Beban Pemeliharaan Aset Besar-Alat Besar Darat-Aer	244.528.788,00	253.178.230,00	(8.649.442,00)	(3,42)		



**REKAPITULASI PERHITUNGAN KEBERANGKASAN
PEMILIHAN ALAT BANTU (BAB 1000) SERTA ALAT
LAINNYA (BAB 1005)**

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Kumulatif Periode 2022- 2023 (Rp)	
	Besar Darat Lainnya				
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	37.080.860,00	(37.080.860,00)	(100,0 %)
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perkampang	560.000,00	105.803.125,00	(105.043.125,00)	(99,47 %)
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	1.302.783,00	(1.302.783,00)	(100,0 %)
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	4.595.000,00	7.301.000,00	(2.706.000,00)	(37,06 %)
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Pengajaran)	28.744.000,00	10.182.400,00	(18.561.600,00)	(182,23 %)
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan dan Pengkayaan Kantor	6.320.000,00	11.070.000,00	(4.750.000,00)	(42,51 %)
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	791.651.010,00	874.273.359,00	(82.622.348,00)	(9,45 %)
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	480.000,00	55.256.000,00	(54.776.000,00)	(99,13 %)
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Perbersih	168.286.457,00	74.037.050,00	(93.899.407,00)	(125,71 %)
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	1.481.000,00	(1.481.000,00)	(100,0 %)
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,0 %)
14	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran-Peralatan Pemasaran Lainnya	0,00	600.000,00	(600.000,00)	(100,0 %)
15	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	2.870.650,00	0,00	2.870.650,00	100,00 %
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	12.394.849,00	0,00	12.394.849,00	100,00 %
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00 %



No	URAIAN	2023	2022	Kerugian Per Unit Year (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
18	Bahan Pemeliharaan Asat Kantor dan Rumah Tangga- Meja dan Kursi Kerja/Papar Pejabar-Lemari dan Aisip Pejabar	5.017.499,00	0,00	5.017.499,00	100,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan- Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Gigit	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
20	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan- Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Urutn	51.050.500,00	0,00	51.050.500,00	100,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan- Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Lainnya	8.993.000,00	88.280.550,00	(79.287.550,00)	(9,89)
22	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan- Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya	287.658.711,00	0,00	287.658.711,00	100,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Paraga Praktik Sekolah- Alat Paraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA, Dasar	0,00	610.000,00	(610.000,00)	(100,00)
24	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Paraga Praktik Sekolah- Alat Paraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesehatan	6.070.000,00	4.350.000,00	1.720.000,00	30,54
25	Beban Pemeliharaan Asat Laboratorium- Alat Paraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: Matematika	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00
26	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Paraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: Agarte	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	100,00
27	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Paraga Praktik Sekolah- Alat Paraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00
28	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Paraga Praktik Sekolah- Alat Paraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	885.000,00	0,00	885.000,00	100,00
29	Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Komputer Jaringan	4.156.000,00	1.100.000,00	3.056.000,00	277,73
30	Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Personal Computer	15.677.340,00	19.975.000,00	(4.297.660,00)	(21,82)
31	Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya	1.300.000,00	800.000,00	400.000,00	44,24
32	Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(100,00)



No	URAIAN	2021	2022	Kerangka Fungsional	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Maintenance				
32	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Wifi Computer	1.750.000,00	2.175.000,00	(425.000,00)	(19,54 %)
34	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.630.000,00	3.000.000,00	7.030.000,00	135,28 %
25	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	1.825.000,00	(1.825.000,00)	(100,0 %)
36	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	46.459.000,00	22.716.800,00	22.721.200,00	86,06 %
37	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	4.640.000,00	10.610.000,00	(5.970.000,00)	(66,27 %)
38	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	540.000,00	793.500,00	(253.500,00)	(31,95 %)
39	Beban Pemeliharaan Peralatan-Peraga Peralatan-Perawatan dan Perawatan-Alat Peraga Peralihan	1.031.500,00	0,00	1.031.500,00	100,00 %
	Jumlah	1.822.591.073,00	1.629.731.457,00	192.859.616,00	11,83 %

3. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO tahun 2023 sebesar Rp497.776.503,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp2.086.887.572,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.589.111.069,00 atau (76,15%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.46 Rincian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – LO

No	URAIAN	2023	2022	Kerangka Fungsional	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	439.727.921,00	1.915.753.714,00	(1.476.025.793,00)	(77,05 %)
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	305.000,00	1.284.000,00	(979.000,00)	(73,91 %)
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	366.000,00	300.000,00	56.000,00	18,67 %



No	Uraian	2022		2023	
		RPJW (Rp)	RPJMD (Rp)	RPJW (Rp)	RPJMD (Rp)
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	1.870.000,00	(1.570.000,00)	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.533.787,00	55.345.000,00	(39.011.213,00)	(39,73)
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	6.280.000,00	(6.280.000,00)	(100,00)
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	17.486.000,00	24.986.000,00	(7.499.000,00)	(30,01)
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	2.900.000,00	1.950.000,00	(9.050.000,00)	(75,73)
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.594.726,00	53.863.000,00	(42.268.203,00)	(78,47)
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.045.000,00	(1.045.000,00)	(100,00)
11	Beban Pemeliharaan Tugu Tilik Kontrol/Pasti- Tugu/Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	13.911.864,00	(13.911.858,00)	(100,00)
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	8.443.000,00	0,00	8.443.000,00	100,00
	Jumlah	497.776.503,00	2.086.887.572,00	(1.589.111.059,00)	(76,15)

4. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan – LO

Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan – LO tahun 2023 sebesar Rp39.226.962,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp3.137.922.728,00 perbandingan penuntaran Rp3.098.695.766,00 atau (98,75%) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.4.47 Rincian Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan – LO

No	JURUAN	2023		2022	
		663 (Rp)	662 (Rp)	663 (Rp)	662 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jasa Kabupaten	0,00	1.635.328.342,00	(1.635.328.342,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	1.435.289.261,00	(1.435.289.261,00)	(100,00)
4	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih-Air Baku-Instalasi Air Pemukiman	7.472.400,00	3.395.000,00	3.477.400,00	87,04
5	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih-Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	11.827.000,00	6.682.000,00	5.138.000,00	79,81
6	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih-Air Baku-Instalasi Air Bersih-Air Baku Lainnya	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
7	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	19.927.552,00	0,00	19.927.552,00	100,00
8	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	54.125,00	(54.125,00)	(100,00)
	Jumlah	39.226.962,00	5.197.922.728,00	(3.098.695.796,00)	(98,75)

5. Beban Pemeliharaan Aset Teap Lainnya – LO

Beban Pemeliharaan Aset Teap Lainnya -- LO tahun 2023 sebesar Rp109.087.999,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp12.190.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp96.897.999,00 atau 794,90% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.48 Rincian Beban Pemeliharaan Aset Teap Lainnya – LO

No	URAIAN	2023		2022	
		663 (Rp)	662 (Rp)	663 (Rp)	662 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak- Buku Umum	54.795.300,00	3.250.000,00	45.545.300,00	482,38
2	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak- Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga	80.000,00	0,00	180.000,00	100,00
4	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik- Musik Lainnya	4.079.999,00	2.940.000,00	1.139.999,00	38,78
5	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Clasr- a- Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	28.030.200,00	0,00	28.030.200,00	100,00



No	Belanja	2022		2023		Belanja Berkas (Rp)	Belanja Berkas (Rp)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
6	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kasenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kasenian-Alat Peraga Kasenian	17.163.000,00	0,00	0,00	17.163.000,00	0,00	100,00
7	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kasenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kasenian-Barang Bercorak Kasenian Lainnya	4.929.500,00	0,00	0,00	4.929.500,00	0,00	100,00
9	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kasenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100,00
9	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi/Non Budaya-Barang Koleksi/Non Budaya-Barang Koleksi/Non Budaya Lainnya	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	109.087.999,00	12.190.000,00	96.897.999,00	794,90		

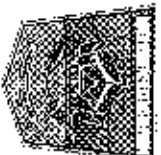
Perbedaan antara Beban Pemeliharaan LO dengan Belanja Pemeliharaan LRA sebagai mana Tabel dibawah ini:

Tabel V.4.49 Perbedaan Beban Pemeliharaan - LO dengan Belanja Pemeliharaan LRA

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)	Belanja Berkas (Rp)	Belanja Berkas (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	2.814.300,00	2.814.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan mesin	1.804.810,072,00	1.822.597,073,00	(17.781,001,00)	19.159,501,00	1.387.500,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Sengkerta	619.267.926,00	457.778.503,00	161.481.423,00	13.522.843,00	135.014.266,00
4	Beban Pemeliharaan Jalar, Injeksi dan Lendiran	30.226.992,00	39.226.992,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Asst. BHP Lainnya	130.087.999,00	109.087.999,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.575.207.859,00	2.471.497.487,00	103.710.422,00	32.681.344,00	135.401.766,00

Dari Tabel diatas terdapat perbedaan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan sebesar Rp 17.781.001,00 karena adanya pengurangan beban pemeliharaan-LO kapitalisasi ke aset Tetap Peralatan dan mesin.
2. Adanya perbedaan sebesar Rp 121.491.423,00 karena adanya pengurangan beban pemeliharaan gedung dan bangunan kapitalisasi ke aset tetap Gedung dan Bangunan.



E. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp35.500.721.399,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp41.087.206.641,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.586.485.242 atau (13,60 %) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.4.50 Rincian Beban Perjalanan Dinas- LO

No	Uraian	2021		Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp		
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.631.273.461,00	9.752.458.636,00	(121.215.205,00)	(1,24)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	448.917.192,00	94.780.000,00	352.137.192,00	37,53
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.412.375.748,00	31.228.357.975,00	(5.815.982.229,00)	(18,92)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.055.000,00	11.580.000,00	(3.525.000,00)	(30,41)
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	Jumlah	35.500.721.399,00	41.087.206.641,00	(5.586.485.242,00)	(13,60)

F. BEBAN HIBAH

Beban Hibah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 sebesar Rp27.774.142.546,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5.965.116.904,00 terjadi kenaikan sebesar Rp21.809.025.642,00 atau 365,61% dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.4.51 Rincian Beban Hibah- LO

No	Uraian	2021		Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp		
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.153.999.345,00	1.215.447.450,00	10.944.551.895,00	900,45
2	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Sosial, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.951.572.000,00	0,00	3.951.572.000,00	100,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Mitra, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.648.107.570,00	1.320.000.000,00	328.107.570,00	24,86
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Mitra, Sukarela Bersifat Sosial	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)



No	Uraian	2022	2022	Kategori Perencanaan	
		RP	RP		
	Kemasyarakatan				
5	Beban Hibah Darang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.877.627.938,00	2.399.420.610,00	4.478.207.328,00	184,14
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	830.248.944,00	830.248.944,00	0,00	0,00
7	Beban Hibah Uang Dana SOS yang Diterima oleh Seldikdas Swasta	1.820.227.100,00	0,00	1.820.227.100,00	100,00
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sandikmen Swasta	548.359.589,00	0,00	548.359.589,00	100,00
	Jumlah	27.774.142.546,00	5.965.116.904,00	21.809.026.842,00	366,61

Perbedaan beban hibah – LO dengan belanja Hibah LRA sebagai mana Tabel dibawah ini:

Tabel V.4.52 Perbedaan Beban Hibah- LO dengan Belanja Hibah – LRA

No	Uraian	RA RP	LO RP	SEKOR RP
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.159.999.345,00	12.159.999.345,00	0,00
2	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.951.572.000,00	3.951.572.000,00	0,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Pendaftaran	1.550.000.000,00	1.248.107.570,00	(301.897.570,00)
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah Berang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	6.817.627.938,00	(6.817.627.938,00)
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	830.248.944,00	830.248.944,00	0,00
7	Beban Hibah Uang Dana SOS yang Diterima oleh Seldikdas Swasta	1.820.230.100,00	1.820.227.100,00	(124.997.000,00)
8	Beban Hibah Uang Dana SOS yang Diterima oleh Sandikmen Swasta	548.359.589,00	548.359.589,00	0,00
	Jumlah	20.739.409.978,00	27.774.142.546,00	(7.040.732.568,00)



Dari tabel diatas terdapat selisih sebesar Rp 7.040.732.568,00 dikarenakan adanya hibah gedung dan pertokoan sebesar Rp98.107.570,00 pada dinas Perincangkop ke Nagari Lubuk Malako, dan adanya hibah dari Dines Pendidikan berupa Hibah Peralatan dan Mesin Sebesar 124.997.000,00 ke Sekolah Swasta, dan adanya Beban Hibah Persediaan Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasayarakatan sebesar Rp6.817.627.998,00 merupakan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum.

G. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Kabupaten Solok Selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp167.447.009.682,39 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp137.472.897.465,09 maka terdapat peningkatan sebesar Rp29.974.112.217,30 atau 21,80% dengan rincian terdiri dari :

Tabel V.453 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	2022		2023		Perubahan Perincian	%
		Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin *)	36.507.343.561,00	31.423.635.568,09	5.083.707.992,91	16,18		
2	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan *)	17.150.503.426,00	15.928.653.174,00	1.250.850.254,00	7,35		
3	Beban Penyusutan Jala, Irigasi dan Jaringan *)	13.287.546.512,89	80.311.224.395,00	23.276.322.176,33	25,86		
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	1.18.586.387,50	108.394.387,00	8.202.000,50	7,57		
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	355.029.733,00	0,00	355.029.733,00	100,00		
	Jumlah	167.447.009.682,39	137.472.897.465,09	29.974.112.217,30	21,80		

H. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.998.579.683,05 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp799.037.113,85 terjadi kenaikan sebesar Rp4.199.542.589,20 atau 525,58%. Rincian Beban penyisihan Piutang sebagai berikut:

Tabel V.454 Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO

No	Uraian	2022		2023		Perubahan Perincian	%
		Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	0,00	(4.276,09)	4.275,03	(100,00)		
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumpster Lain	49.791,30	(235.666,76)	286.458,56	(121,13)		
3	Beban Penyisihan Piutang PBAP2	4.855.402.087,20	200.425.842,30	4.454.976.744,90	2.222,78		
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	231.601.590,00	345.219.472,00	(63.617.882,00)	(18,43)		



No	URAIAN	2022		Keterkaitan Pencapaian	%
		2022 (Rp)	2022 (Rp)		
5	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menera * elektorun kasi	0,00	(948.642,18)	648.642,19	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Ternaced Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	28.124,000,00	(28.124,000,00)	(100,00)
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Kewajiban Paksaan	6.693.436,55	36.699.917,11	(28.066.480,56)	(76,48)
8	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan ALLUD	61.877.090,50	35.825.040,95	16.052.949,52	42,81
9	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	413.444,00	(413.444,00)	(100,00)
10	Beban Penyisihan Bagian Lanjar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Ternaced Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	153.609.579,00	(153.609.579,00)	(100,00)
11	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	1.014.797,00	(81.097,50)	1.105.894,50	(1.213,97)
Jumlah		4.998.579.683,05	799.037.113,65	4.199.542.569,20	525,58

1. BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp50.619.233.213,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp49.467.550.012,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.151.683.201,00 atau 2,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.55 Rincian Beban Transfer

No	URAIAN	2022		Keterkaitan Pencapaian	%
		2022 (Rp)	2022 (Rp)		
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	1.151.829.216,00	976.904.895,00	176.020.522,00	17,32
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Pemerintahan Desa	121.350.995,00	289.881.917,00	(168.300.822,00)	(58,10)
3	Beban Bantuan Keuangan Urutun Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	43.346.027.000,00	42.201.063.500,00	1.124.963.500,00	2,38



No	Uraian	2022	2023	Koridor Pendapatan
		(Rp)	(Rp)	
Jumlah		50.619.233.213,00	49.467.550.012,00	1.151.683.201,00
				2,33

Tabel V.4.56 Perbedaan Beban Transfer-LO dengan Belanja Transfer LRA

No	URAIAN	2022	2023	SISWA
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan desa	1.188.853.383,00	1.151.825.218,00	(37.033.165,00)
2	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	240.750.335,00	121.980.995,00	(119.369.838,00)
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	49.348.027.000,00	49.348.027.000,00	0,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	41.852.235.000,00	0,00	(41.852.235.000,00)
Jumlah		92.627.871.216,00	50.619.233.213,00	(42.008.658.003,00)

J. BEBAN LAIN-LAIN

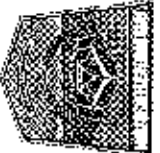
Beban Lain-lain Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.085.333.835,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp4.592.976.904,72 terjadi penurunan sebesar Rp1.507.643.069,72 atau (32,82%). Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.57 Rincian Beban lain-lain

No	URAIAN	2022	2023	Koridor Pendapatan
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	772.276.160,00	(772.276.160,00)
2	Beban Lain-lain	3.085.333.835,00	3.820.700.744,72	(735.366.909,72)
Jumlah		3.085.333.835,00	4.592.976.904,72	(1.507.643.069,72)

31 Des 2023
 Operasional (Rp) 148.711.828.985,11
 31 Des 2022
 Operasional (Rp) 101.136.129.401,85

Surplus/Defisit Operasional adalah jumlah pendapatan-LO setelah dikurangi dengan beban operasional. Surplus/Defisit Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp(48.711.828.985,11) dibandingkan dibandingkan dengan Surplus/Defisit Operasional Tahun 2022 sebesar Rp101.136.129,401,87 terdapat penurunan sebesar Rp(149.888.018.479,18) atau (-48,15 %).



Kategori	2022		2023	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	138.534.992.712,31	90.366.952.008,87	138.901.944.721,31	154.382.000,00

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa tahun 2023 adalah sebesar Rp(48.534.992.712,31) jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp90.366.952.008,87 terjadi penurunan sebesar Rp(138.901.944.721) atau (153,71)%.

Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp150.000.000 dan Pos Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp. 840.000.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp(690.000.000) atau (82,14)% merupakan beban tak terduga

Kategori	2022		2023	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Surplus/Defisit LO	48.684.992.712,31	89.526.952.008,87	48.684.992.712,31	89.526.952.008,87

Surplus/Defisit LO Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 sebesar Rp(48.684.992.712,31) jika dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp89.526.952.008,87 terjadi kenaikan sebesar Rp(138.211.944.721,18) atau (154,38)% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel V.4.58 Surplus/Defisit-LO

Uraian	Tahun 2022		Tahun 2023		Kenaikan/ Penurunan	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
Pendapatan- LO	824.748.892.781,03	894.874.584.431,14	793.888.394.987,27	79.762.988.829,37	(7,94)	
Beban	873.461.391.766,34	793.888.394.987,27	79.762.988.829,37	79.762.988.829,37	10,05	
Surplus / Defisit dari Operasi	(48.711.828.985,31)	101.176.189.493,87	101.176.189.493,87	149.888.018.479,18	(148,15)	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	176.836.273,00	0,00	0,00	176.836.273,00	100	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100
Defisit Penjualan Aset Vin Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	(10.509.237.485,00)	(10.509.237.485,00)	(10.509.237.485,00)	0,00	
Surplus/Defisit Non Operasional	176.836.273,00	(10.809.237.485,00)	(10.809.237.485,00)	10.986.073.758,00	101,64	
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(48.534.992.712,31)	90.366.952.008,87	90.366.952.008,87	(138.901.944.721,31)	(153,71)	
Beban Luar Biasa - LO	(150.000.000,00)	(840.000.000,00)	(840.000.000,00)	(690.000.000,00)	(82,14)	
Surplus / Defisit -LO	(48.684.992.712,31)	89.526.952.008,87	89.526.952.008,87	(138.211.944.721,88)	(154,38)	



5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 disusun berdasarkan basis Laporan Realisasi Anggaran.

5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	798.145.513,191,79	619.801.520,539,10
Arus Kas Keluar	606.479.753,226,28	655.371.333,571,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	191.665.759,965,51	164.430.222,968,00

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp798.145.513.191,79 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp839.801.520.539,10 atau terjadi penurunan arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp41.656.043.347,31 atau turun sebesar 4,96%.

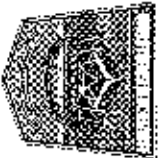
Sementara itu, Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp696.479.753.226,28 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp655.371.333.571,10 atau terjadi kenaikan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp41.108.419.655,18 atau naik 6,27%.

Sehingga Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp101.665.759.965,51 sedangkan Arus Kas Bersih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp184.430.222.968,00 atau terjadi penurunan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp82.764.463.002,49 atau turun sebesar 44,88%.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Sampai dengan 31 Desember 2023 Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas sebesar Rp798.145.513.191,79 sementara realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp840.018.798.191,79 dimana terdapat selisih sebesar Rp41.873.285.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LAKS		SELISIH
		RP	RP	
1	Penerimaan Pajak Daerah	11.176.289.565,00	11.176.289.565,00	2,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.000.036.422,70	2.000.036.422,70	2,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Digisahkan	2.796.556.717,00	2.796.556.717,00	0,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Seln	72.902.649,227,09	72.902.649,227,09	(21.050.000,00)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	26.699.998,977,00	26.699.998,977,00	0,00
6	Penerimaan Dana Sisi Hasil Sumber daya alam	27.148.316,380,00	27.148.316,380,00	0,00



KABUPATEN KARAWANG
DINAS KEUANGAN DAN FISCAL
KABUPATEN KARAWANG
DINAS KEUANGAN DAN FISCAL

No	Uraian	RAK Rp.	LRRA Rp.	Selisih
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	452.753.785,000,00	452.753.785,000,00	0,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	146.651.642,399,00	146.651.642,399,00	0,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
10	Penerimaan Dana Perysłualar	0,00	41.862.235,630,00	(41.862.235,630,00)
11	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	39.025.311,603,00	39.025.311,603,00	0,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7.000.000,000,00	7.000.000,000,00	0,00
13	Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00
14	Penerimaan Lainnya	12.011.920,023,00	10.011.920,023,00	2.000.000,00
	JUMLAH	798.145.513.191,79	840.018.798.191,79	(41.873.285.600,00)

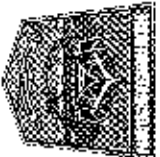
Selisih antara Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas dengan realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp41.873.285.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah di Laporan Arus Kas sebesar Rp72.881.598.227,09 sedangkan Lain-lain PAD yang Sah di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp72.902.648.227,09. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp21.050.000,00. Selisih tersebut disebabkan karena penjualan atas peralatan dan mesin sebesar Rp21.050.000,00.

2. Penerimaan Dana penyesuaian di Laporan Arus Kas sebesar Rp0,00 sementara di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp41.852.235.000,00 dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp41.852.235.000,00. Selisih tersebut adalah pendapatan dana desa sebesar Rp41.852.235.000,00. Selisih tersebut disebabkan karena sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemujuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf C menyatakan bahwa pendapatan dana desa dan belanja bantuan keuangan ke desa disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan Atas laporan Keuangan (CALK).

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp839.997.748.191,79 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp839.801.556.539,10 atau terjadi peningkatan arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp196.191.652,69 atau naik 0,02%. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023 Rp.	2022 Rp.	Perubahan Rp.	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	11.176.289.565,00	11.006.714.870,10	169.574.694,90	1,52
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.000.096.422,70	2.364.215.128,00	(364.118.705,30)	(15,04)
3	Penerimaan Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.796.556.717,00	2.415.762.950,00	380.793.767,00	15,76
4	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	72.881.698.227,09	74.584.228,886,00	(1.702.630.770,91)	(2,28)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	26.693.998,917,00	51.482.886,775,00	(24.782.887.858,00)	(48,14)
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber	27.146.316,318,00	18.897.650,302,00	8.250.665.926,00	43,66



No	Uraian	2021		2022		Keterkaitan Pembayaran	Saldo
		Rp	Rp	Rp	Rp		
	daya alam						
7	Penerimaan Dana Alokasi Urut	452.753.785.000,00	438.897.500.562,00	15.855.284.438,00			3,83
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	146.651.640.999,00	183.261.780.880,00	(16.610.140.481,00)			(10,17)
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00			0,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	41.852.236.000,00	0,00	41.852.236.000,00			100,00
11	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	39.025.311.803,00	59.572.147.878,00	(20.546.836.275,00)			(82,49)
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7.000.000.000,00	11.500.000.000,00	(4.500.000.000,00)			0,00
13	Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00			0,00
14	Penerimaan Lainnya	10.011.820.023,00	7.828.208.06,00	2.183.711.817,00			100,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	839.997.748.191,79	839.801.566.539,10	196.191.652,69			0,02

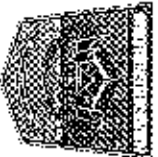
5.5.1.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas sebesar Rp738.331.988.226,28 sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp738.331.988.226,28. Sehingga tidak terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021		2022		Keterkaitan Pembayaran	Saldo
		Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Pembayaran Pegawai	375.400.727.878,95	375.400.727.878,95				0,00
2	Pembayaran Barang	249.419.979.153,33	249.419.979.153,33				0,00
3	Pembayaran Hibah	20.733.409.978,00	20.733.409.978,00				0,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00				0,00
5	Pembayaran Tak Terduga	150.000.000,00	150.000.000,00				0,00
6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.188.858.383,00	1.188.858.383,00				0,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Partibusi	240.750.833,00	240.750.833,00				0,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pendanaan Lainnya	0,00	0,00				0,00
9	Pembayaran Transfer bantuan keuangan ke Desa dan Partai Politik	91.198.262.000,00	91.198.262.000,00				0,00
	Jumlah	738.331.988.226,28	738.331.988.226,28				0,00

Jika dibandingkan dengan arus kas keluar aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp82.960.654.655,18 atau turun sebesar 12,66%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021		2022		Keterkaitan Pembayaran	Saldo
		Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Pembayaran Pegawai	375.400.727.878,95	375.198.146.727,83	202.582.151,12			0,05
2	Pembayaran Barang	249.419.979.153,33	224.250.350.259,27	25.169.628.894,06			11,22
3	Pembayaran Hibah	20.733.409.978,00	3.565.696.404,00	17.167.713.574,00			481,47
4	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00			100,00
5	Pembayaran Tak Terduga	150.000.000,00	3.061.054.001,00	(2.911.064.001,00)			(96,10)
6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.188.858.383,00	928.276.367,00	260.582.016,00			28,77
7	Pembayaran Bagi Hasil Partibusi	240.750.833,00	177.747.312,00	63.003.521,00			40,18
9	Pembayaran Transfer	91.198.262.000,00	48.201.063.600,00	42.997.198.300,00			89,20



No	Keterangan	2023	2022	Perbandingan	
		Rp1	Rp2	2023/2022	2022/2023
	Bantuan Keuangan ke				
	Desa				
	Jumlah Arus Kas Keluar	738.331.988.226,28	656.371.333.571,10	82,98%	65,4,65%
					12,66

5.5.1.3 Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp101.665.759.965,51 sedangkan Arus Kas Bersih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp184.430.222.968,00 atau terjadi penurunan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp82.764.463.002,49 atau turun sebesar 44,88%.

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Perbandingan	
	Rp1	Rp2	2023/2022	2022/2023
Arus Kas Masuk	21.050.000,00	1.764.126.100,00	1,23%	100%
Arus Kas Keluar	(140.442.004.418,00)	(202.577.207.541,67)	(100,32%)	(100,00%)
Aktif Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(119.392.004.418,00)	(200.812.107.541,67)	(100,32%)	(100,00%)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penertimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat cinema yang akan datang.

Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp21.050.000,00, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.760.126.100,00 atau terjadi penurunan arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp1.739.076.100,00 atau turun naik sebesar 98,80%.

Sementara itu, Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp140.442.064.438,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp202.572.297.511,67 atau terjadi penurunan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp62.130.233.073,67 atau turun 0,00%.

Sehingga, Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp140.421.014.438,00) sedangkan Arus Kas Bersih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp200.812.171.411,67) atau terjadi penurunan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sebesar Rp60.391.156.973,67 atau turun sebesar 30,07%.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas sebesar Rp21.050.000,00 sementara realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp0,00. Dimana tidak terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2023	2022	Selisih	
		Rp1	Rp2	2023/2022	2022/2023
1	Penjualan Atas Tanah	21.050.000,00	0,00	100%	0,00%
2	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	0,00	21.050.000,00	0,00%	100%



No	Uraian	1.000 Rp	1.500 Rp	SELISIH
3	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		21.050.000,00	0,00	21.050.000,00

Jika dibandingkan dengan arus kas keluar aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas Tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp1.760.126.100,00 atau turun sebesar 98,80%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	1.000 Rp	1.500 Rp	SELISIH
1	Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	21.050.000,00	1.733.201.100,00	(1.714.151.100,00)
3	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Penjualan Aset Lainnya	0,00	24.925.000,00	(24.925.000,00)
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permenen	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		21.050.000,00	1.760.126.100,00	(1.739.076.100,00)

5.5.2.2 Arus Keluar Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas sebesar Rp140.442.064.438,00 sama halnya dengan realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp140.442.064.438,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	1.000 Rp	1.500 Rp	SELISIH
1	Perolehan Tanah	19.108.000,00	19.108.000,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	26.339.182.991,00	26.339.182.991,00	0,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	33.431.528.257,00	33.431.528.257,00	0,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jembatan	77.154.111.140,00	77.154.111.140,00	0,00
5	Zeroberah Aset Tetap Lainnya	2.789.134.050,00	2.789.134.050,00	0,00
6	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	729.000.000,00	729.000.000,00	0,00
JUMLAH		140.442.064.438,00	140.442.064.438,00	0,00

Jika dibandingkan dengan arus kas keluar aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas Tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp62.130.233.073,67 atau naik sebesar 30,67%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 1.000 Rp	2023 1.000 Rp	SELISIH
1	Perolehan Tanah	19.108.000,00	11.111.952.077,00	(11.092.844.077,00)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	26.339.182.991,00	31.337.296.900,00	(4.998.313.909,00)
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	33.431.528.257,00	89.288.671.660,08	(35.857.143.403,08)
4	Pokoklahn Jalan, Irigasi dan Jaringan Lainnya	77.154.111.140,00	89.128.228.899,69	(11.974.117.699,59)
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.789.134.050,00	1.206.948.175,00	1.583.185.875,00
6	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	729.000.000,00	500.000.000,00	229.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		140.442.064.438,00	202.572.297.511,67	(62.130.233.073,67)



5.5.2.3 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp)40.421.014.438,00) sedangkan Arus Kas Bersih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp)200.812.171.411,67) atau terjadi penurunan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sebesar Rp60.391.156.973, 67 atau turun 30,07%.

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus Kas Mula	(Rp) 0,00	(Rp) 0,00
Arus Kas Akhir	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari		
Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pembertian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutupi defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah selisih antara Arus kas masuk dan Arus kas keluar. Selama tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sokol Selatan tidak melaksanakan aktivitas pendanaan, baik penerimaan maupun pengeluaran aktivitas pendanaan.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Perubahan Demiwoon	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pinjaman dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pinjaman dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pinjaman dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pinjaman dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

No	Jumlah	2023		2022	
		(Rp)	(Rp)		
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pembayaran Pinjaman Kepada Perusahaan Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pembayaran Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pembayar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00	0,00

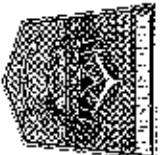
5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus Kas Masuk	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Mula	15.691.265.652,00	55.709.715.503,54
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	15.691.265.652,00	55.709.715.503,54
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	570.200,00	117.495.774,00

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan. Beban, dan pencapaian penerima. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik ketiga.

5.5.4.1. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp45.639.263.652,00 jika dibandingkan dengan arus kas masuk aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas 31 Desember 2022 sebesar Rp55.709.715.503,54 terdapat penurunan sebesar Rp10.070.451.851,54 atau turun sebesar 18,08%, dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	2022	2023	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Perenerimaan: Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	45.638.684.452,00	56.672.597.974,54	(10.033.912.922,54)	(18,02)
2	Perenerimaan Sisa Lebih Salur S/O	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Perenerimaan Jasa Giro BCS Swasta Yang Harus Dikembalikan	0,00	2.866.179,00	(2.866.179,00)	0,00
4	Perenerimaan Jasa Giro Pemerintah, Negara dan Entitas Lain Yang Harus Dikembalikan	579.200,00	34.251.950,00	(93.672.750,00)	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	45.638.684.452,00	56.709.715.503,54	(10.070.451.851,54)	(18,08)

Adapun rincian penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan	Pengaliran	Selisih Akhir
1	W/P (1%) Iuran Wajib Pegawai	3.328.377.586,00	3.328.377.586,00	0
2	W/P (8%) Iuran Wajib Pegawai	11.385.768.646,00	11.385.768.646,00	0
4	BPJS Kesehatan PNS	44.469.951,00	44.469.951,00	0
7	PPH Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	943.121.569,00	943.121.569,00	0
8	PPH Pasal 21 Honorarium Pelabur/PNS/TNI/Polri/Pensiun	1.335.216.282,00	1.335.216.282,00	0
9	PPH Pasal 22 Pengungkutan oleh Bendaharawan APBD	818.413.954,00	818.413.954,00	0
10	PPH Pasal 23 Jasa	195.649.701,00	195.649.701,00	0
12	PPH Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	0
13	PPH Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	56.804.140,00	56.804.140,00	0
14	PPH Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	2.157.525.984,00	2.157.525.984,00	0
17	PPN Permungutan oleh Bendaharawan APBD	16.292.421.470,00	16.292.421.470,00	0
19	Lainnya	152.858.037,00	152.858.037,00	0
22	PPH Pasal 21 Gaji&Tunjangan ASN	8.605.968.730,00	8.605.968.730,00	0
23	PPH Pasal 21 Mase	319.088.402,00	319.088.402,00	0
	Jumlah	45.638.684.452,00	45.638.684.452,00	0,00

Pada tahun 2022 terdapat utang jangka pendek lainnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp37.118.129,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan dari Jasa Giro BOS Sekolah Swasta. Dimana pada tahun 2022 terdapat jasa giro BOS Sekolah Swasta disetorkan ke kas daerah sebesar Rp2.866.179,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan kembali ke rekening sekolah swasta tersebut. Adapun rincian jasa Giro BOS Sekolah Swasta tersebut sebagai berikut:

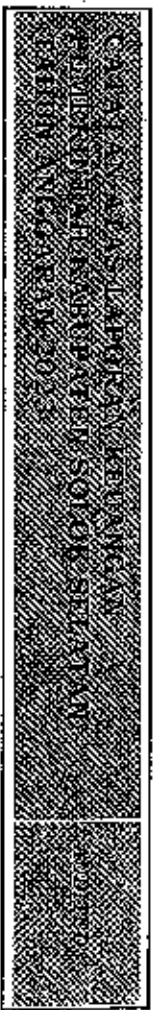
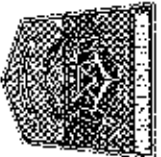


No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	SD IT MARHAMAH	432.354,00	
2	BD YPTSS SUNGAI KUNYIT	904.192,00	
3	SD YPTSS SUNGAI KUNYIT	683.972,00	
4	SD01 YTKA	141.148,00	
5	SD01 YTKA	311.182,00	
6	SMP YTKA	178.410,00	
7	SMP YTKA	154.946,00	
8	SMP IT MARHAMAH	81.973,00	
	JUMLAH	2.866.179,00	

2. Penyerahan Jasa Giro Kepada Pemerintahan Nagari yang berasal dari Jasa Giro Rek. Pemerintahan Nagari sebesar Rp32.985.597,00 yang dipotong oleh pihak Bank Nagari dan disetorkan ke kas daerah pada periode Januari sampai dengan Maret 2022, dimana per 31 Desember 2023 Jasa Giro tersebut belum disetorkan kembali ke rekening Pemerintahan Nagari.

Adapun jasa giro rekening Pemerintahan Nagari yang dipotong oleh Bank Nagari periode Januari sampai dengan Maret 2022 dan belum disetorkan kembali ke rekening Pemerintahan Nagari sebagai berikut:

No	NO REK	NAMA SINGKAT	JASA GIRO	PIHAK MASUK	KEBERKASAS	TOTAL
1	300101000172	LUBUK GADANG	218.808,00	225.045,00	626.656,00	1.070.538
2	30010101000693	LUBUK GADANG TITUP	60.893,00	57.228,00	320.784,00	488.982
3	30010101000907	LUBUK GADANG SELATAN	115.541,00	127.240,00	571.261,00	741.342
4	30010101000101	LUBUK GADANG UTARA	134.624,00	143.958,00	461.485,00	730.367
5	300201010000046	LUBUK MALAKO	51.296,00	241.040,00	926.804,00	918.313
6	300301010000051	BIDAR ALAY	351.232,00	365.668,00	833.768,00	1.353.728
7	300301010000062	PADANG AIR DINGK	131.982,00	215.119,00	385.181,00	792.261
8	300301010000098	PADANG LIMAU SUNDAL	74.716,00	76.372,00	243.510,00	394.682
9	300301010000025	PADANG GARITANG	283.706,00	305.593,00	242.674,00	899.629
3	300301010000291	ASAI	127.825,00	191.729,00	242.674,00	662.228
11	300301010001128	DUSUN LANGGAH	132.703,00	134.661,00	429.735,00	697.405
12	300101010003019	LUSUK ULANG ALING	233.088,00	872.302,00	479.920,00	1.085.290
12	300301010000965	SELATAN	318.525,00	461.224,00	478.693,00	1.256.942
14	300101010002904	LUSUK ULANG ALING TENGAH	112.189,00	234.692,00	409.471,00	776.642
15	300301010000086	RAMAH PATAI CERMIN	129.053,00	260.012,00	366.132,00	755.197
16	300301010000074	SITAPUS	49.846,00	119.727,00	158.192,00	326.787
17	300301010000137	SUNGAI KUNYIT	1.81.893,00	306.671,00	926.509,00	1.014.213
18	30030101000104	TALAO SUNGAI KUNYIT	64.976,00	102.676,00	403.022,00	570.674
18	300301010000219	SUNGAI KUNYIT BARAT	135.744,00	312.467,00	539.486,00	679.657
20	300301010000037	TALUNAN MAJU	79.175,00	125.069,00	441.348,00	641.592
21	300301010000341	PASIR TALANG	133.632	46.268	603.347	793.947
22	300301010000363	PASIR TALANG BAHAT	301.372	389.463	494.473	1.181.208
23	300301010000350	PASIR TALANG TIJUH	323.765	412.377	693.357	1.426.096
24	300301010000375	PASIR TALANG SELATAN	237.856	214.948	517.369	670.572
25	300301010000397	SAKO PASIA TALANG	34.803	445.922	171.288	402.093
26	300301010000431	SAKO UTARA PASIA TALANG	436.927	346.375	590.487	1.373.719
27	300301010000442	SAKO SELATAN PASIA TALANG	58.034	99.029	126.085	285.066
28	300301010000399	KOTO BARU	78.721	146.472	288.532	514.726
29	300301010000405	PULAKUK KOTO BARU	183.623	136.757	398.073	727.357
30	300301010000417	PASIR KULARA LABUH	534.380	475.951	735.874	1.745.905
31	300301010000429	BOMAS	28.964	198.610	352.411	639.968
32	300301010000392	PAKAN BARAY	67.123	273.437	296.405	636.982
33	300301010000338	PAKAN BARAY TIMULIS	64.611	101.200	316.596	476.305
34	300301010000314	PAKAN BARAY JIYARA	33.785	272.905	518.079	722.740
35	300301010000326	PAKAN BARAY TERGAMI	84.936	110.090	435.063	630.081
36	300301010000454	ALAY PALIH DUO	222.898	198.247	576.362	898.487
37	300301010000481	KAPAU ALAY PAUI DUO	137.324	213.078	408.775	760.778
38	300301010000478	LAK KAPAU ALAM PAUH DUO	873.922	467.850	731.626	1.573.377
39	300301010000466	PAJH DUO NAN BAHISO	232.719	317.900	477.652	1.019.971



No.	NO.BEK	NAMA SIWA/KAS	UNSA BHRQ PER 2022 MWS	UKURAN PERIKAS BK
TOTAL			JAN FEB MAR	APR MEI JUN
KESELURUHAN		6.651.499,00	9.080.324,00	17.053.774,00
				32.685.597,00

3. Selain itu, terdapat jasa giro rekening entitas lainnya yang dipotong oleh Bank Nagari periode Januari sampai dengan Desember 2022 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan kembali ke rekening entitas tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Zakat Dinkes Solasi	954.022,00
2.	DAK SMKN 3 Solok Selatan	25.341,00
3.	Kwarcab	286.990,00
	Jumlah	1.266.353,00

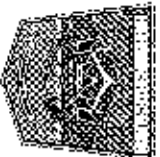
5.5.4.2. Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp45.638.684.452,00. Jika dibandingkan dengan arus kas keluar aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.883.671.277,54, terdapat penurunan sebesar Rp10.244.986.825,54 atau turun sebesar 18,33%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2023	Perubahan
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)	45.638.684.452,00	55.883.667.641,54	(10.212.973.189,54)
2	Pengeluaran Sisa Lebih Salur BOS	0,00	32.013.636,00	(32.013.636,00)
3	Pengeluaran Jasa Giro BOS Yang Harus Dikembalikan	0,00	0,00	0,00
4	Pengeluaran Kelebihan Pembayaran BPJS Yang Harus Dikembalikan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	45.638.684.452,00	55.893.671.277,54	(10.244.986.825,54)

a. Pengeluaran PFK sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp45.638.684.452,00 terdiri dari:

No	Uraian	Perkiraan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	IWP (1%) Iuran Wajib Pegawai	3.328.377.586,00	3.328.377.586,00	0
2	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	11.385.768.646,00	11.385.768.646,00	0
4	BPJS Kesehatan PNS	44.469.951,00	44.469.951,00	0
7	PPH Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	943.121.569,00	943.121.569,00	0
8	PPH Pasal 21 Honor/dili Pelajar/PNS/TNI/Polri/Pensiun	1.335.216.282,00	1.335.216.282,00	0
9	PPH Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	818.413.954,00	818.413.954,00	0
10	PPH Pasal 23 Jasa	195.649.701,00	195.649.701,00	0
12	PPH Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	0



No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
13	Pph Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	56.804.140,00	56.804.140,00	0
14	Pph Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	2.157.525.984,00	2.157.525.984,00	0
17	PPN Pemungutan di atas Bendaharawan APBD	16.292.421.470,00	16.292.421.470,00	0
19	Lainnya	152.858.037,00	152.858.037,00	0
22	Pph Pasal 21 Gaji&Tunjangan ASN	8.605.968.730,00	8.605.968.730,00	0
23	Pph Pasal 21 Masa	319.088.402,00	319.088.402,00	0
	Jumlah	45.638.684.452,00	45.638.684.452,00	0,00

b. Pada tahun 2023 tidak terdapat pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Sisa Lebih Selur BOS sementara pada tahun 2022 telah disorokkan sisa salur BOS tahun 2011 yang disorokkan ke kasda berdasarkan Laporan Pelaksanaan Monitoring Sisa BOS Tahun Anggaran 2011 pada Kabupaten Solok Selatan oleh BPPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 September 2014 sebesar Rp32.013.636,00.

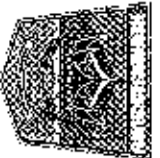
5.5.5.3. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp579.200,00. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris pada Laporan Arus Kas 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp173.955.774,00) terdapat kenaikan sebesar Rp174.534.974,00 atau naik sebesar 100,33%.

Sisa	Kemungkinan Penurunan Kas	31 Desember 2021	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		(38.534.025.271,19)	(16.555.904.217,67)

Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2023 sebesar Rp38.754.675.272,49. Sementara pada Tahun 2022 sebesar Rp16.555.904.217,67. Terdapat penurunan kas sebesar Rp22.198.771.054,82 atau turun sebesar 134,08%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi realisasi APBD tahun 2023 dibanding tahun 2022. Penurunan kas tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2023		
		(Rp)	(Rp)		
1.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	101.885.758.965,51	184.430.222.968,00	(82.784.463.502,49)	(44,86)
2.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(140.421.014.438,00)	(200.312.171.411,67)	60.391.156.973,67	(30,07)
3.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	579.200,00	(173.955.774,00)	174.534.974,00	(100,33)
	Kenaikan/Penurunan Kas Bersih	(38.754.675.272,49)	(16.555.904.217,67)	(22.198.771.054,82)	134,08



5.5.6. Saldo Awal Kas di KASDA	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	59.143.345.993,74	106.618.873.069,00

Saldo Awal Kas Daerah sebesar Rp79.143.345.993,74 merupakan saldo Kas di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang per 1 Januari 2023. Sementara itu saldo awal Kas Daerah per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp106.618.873.069,00.

5.5.7. Saldo Akhir Kas di BUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	54.037.472.513,78	92.792.228.072,27

Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.037.472.513,78. Sedangkan Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp92.792.228.072,27 atau mengalami penurunan sebesar Rp38.754.755.558,49 atau turun sebesar 41,77%.

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2023/2022 (%)	2023/2022 (%)
1	Saldo Awal Kas di Kasda	79.143.345.993,74	106.618.873.069,00	(27.475.527,075,26)	(25,77)
2	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	167.208.586,69	13.741.468,00	153.467.157,69	1116,92
3	Saldo Awal Kas di Bendahara Perencanaan	37.220.678,00	33.456.756,00	6.763.922,00	22,21
4	Saldo Awal Kas BUD	12.198.379.820,62	1.908.618.457,94	10.289.761.362,68	839,53
5	Saldo Awal BOS	701.982.844,00	495.668.011,00	206.314.833,00	41,82
6	Saldo Awal Kas Bendahara BPPD	0,00	38.080.855,00	(38.080.855,00)	100,00
7	Saldo Awal Kas Bendahara Kapitasi JKN	549.090.169,22	0,00	549.090.169,22	100,00
8	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Seta:ra Kas	0,00	211.073.903,00	(211.073.903,00)	100,00
9	Saldo Awal Kas BUD (- sd 8)	92.792.228.072,27	109.314.512.480,94	(16.522.284.388,67)	(15,11)
10	Kenaikan/Penurunan Kas bersih	(38.754.675.272,49)	(16.555.304.217,67)	(22.198.771.064,92)	134,09
11	Saldo Akhir Kas di BUD Sebelum Koreksi Saldo Awal (9+10)	54.037.552.793,78	92.758.808.243,27	(38.721.055.443,49)	(41,74)
12	Koreksi Saldo Awal BUD (11+12)	(38.286,00)	38.519.826,00	(38.766.115,00)	(100,00)
	Saldo Akhir Kas di BUD (11+12)	54.037.472.513,78	92.792.228.072,27	(38.754.755.558,49)	(41,77)



	31 Desember 2022	31 Desember 2023
5.6 Saldo Akhir Kas	(Rp) 54.057.472.513,78	(Rp) 92.792.228.072,27

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.037.472.513,78. Sedangkan Saldo akhir kas di BUID per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp92.792.228.072,27 atau mengalami penurunan sebesar Rp38.754.755.558,49 atau turun sebesar 41,77% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Kontribusi Perubahan	%
1	Saldo Akhir Kas di Kas	27.746.132.233,89	78.143.345.895,74	(41.397.213.729,85)	(52,31)
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	3.212.712.840,55	187.208.566,89	3.245.504.279,31	1.821,38
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penunjaan	17.499.253,00	37.220.873,00	(19.721.625,00)	(62,98)
4	Saldo Akhir Kas di BUID	11.133.995.004,82	12.193.379.820,82	(1.059.384.816,00)	(8,69)
5	Saldo Akhir Kas Bendahara BOS	161.435.545,00	701.882.244,00	(540.487.299,00)	(78,99)
6	Saldo Akhir Kas Bendahara EPEB	0,00	0,00	0,00	100,00
7	Saldo Akhir Kas Bendahara Kapitasi JKN	1.765.637.607,27	549.090.169,22	1.216.547.438,05	100,00
8	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Sewa Kas	0,00	0,00	0,00	100,00
	Jumlah Kas	54.057.472.513,78	92.792.228.072,27	(38.754.755.558,49)	(41,77)

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan Penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca, yang merangkai kenajikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat ditunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

	31 Des 2022	30 Des 2022
5.6.1 Saldo Awal Ekuitas	(Rp) 2.024.726.747.023,88	(Rp) 1.905.604.753.152,30

Saldo Ekuitas Awal sebesar Rp2.024.726.747.023,88 yang sama dengan saldo ekuitas akhir tahun 2022. Jika dibandingkan saldo awal ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1.915.664.775.152,30 terjadi peningkatan saldo awal ekuitas sebesar Rp109.061.971.871,58 atau meningkat sebesar 5,69%.



KABUPATEN SOLOK SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

5.6.2 Surplus Defisit - (Rp)

31 Des 2022
(Rp)

31 Des 2023
(Rp)

(Rp8.684.992.712,31) 395.569.534,088,87

Nilai Defisit-LO tahun 2023 sebesar Rp48.684.992.712,31 merupakan defisit atas Kegiatan Operasional yang mengurangi Nilai Ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan nilai surplus sebesar Rp138.211.944.721,18 atau turun sebesar 154,38%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar
Perubahan Kebijakan
Kesalahan Mendasar

31 Des 2023
(Rp)

31 Des 2022
(Rp)

(Rp1.350.870.107,00) (Rp5.510.802,71)

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2023 sebesar (Rp1.350.870.107,00) merupakan akumulasi koreksi yang mengurangi Nilai Ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp19.535.019.862,71 terjadi penurunan sebesar Rp20.885.889.969,71 atau turun sebesar 106,92%.

Adapun rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2023 sebagai berikut:

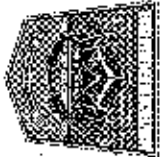
NO	URAIAN	a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan		b. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		Mulaiah
		1. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Ekuitas	1. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Ekuitas	2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Ekuitas	
1	KAS	0,00	0,00	0,00	107.047,00	130.047,00
2	PERSEDIaan	72.293.804,00	211.806.404,00	0,00	0,00	1.36.521.804,00
3	PIUTANG	0,00	0,00	72.277.503,00	7.779.300,00	58.458.500,00
4	PENYISIHAN PIUTANG	0,00	0,00	481.422.880,00	0,00	451.422.980,00
5	ASET TETAP	0,00	0,00	0,00	276.390.000,00	1275.390.000,00
6	PENYUSUTAN ASET TETAP	0,00	0,00	1.260.899.549,00	2.326.918.596,00	11.354.052.310,00
7	ASET LAINNYA	0,00	0,00	0,00	2.326.918.596,00	12.325.918.596,00
8	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0,00	0,00	8.267.128.635,52	3.527.249.546,52	2.739.870.039,00
9	KEWAJIBAN	0,00	0,00	1381.320.890,00	9.431.497.048,52	113.370.340,00
	JUMLAH	72.293.804,00	211.806.404,00	8.220.149.541,52	9.431.497.048,52	13.358.870.107,00

31 Des 2023
(Rp)

31 Des 2022
(Rp)

(Rp1.071.001.551,204,51) (Rp5.510.802,71)

Saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah Rp1.971.081.028.203,97 jika dibandingkan dengan ekuitas akhir 2022 sebesar Rp2.024.726.747.023,88 terdapat penurunan nilai sebesar Rp50.035.862.819,31 atau turun sebesar 2,47%. Penghitungan nilai ekuitas akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:



REKAPITULASI PERUBAHAN SALDO SALAJARAN
KEMISKINAN AKHIR TAHUN 2012

NO	ISU/SAJARAN	2011	2012	PERUBAHAN	PERUBAHAN
	ESKUISAS AMTAS	2.024.324.707.024.868	1.814.666.776.142.920	109.657.927.881.948	2.21
2	SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	(448.084.902.712.311)	89.526.382.008,87	(138.211.344.721,18)	(154,38)
3	KEBUJUKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(1.350.870.107,00)	19.595.019.862,71	(30.885.889.969,71)	(105,92)
4	a. Dampak Kumulatif Perubahan Keselakan	(139.522.600,00)	32.013.636,00	(77.536.236,00)	(53,82)
5	b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(1.211.347.507,00)	19.508.008.226,71	(20.714.341.733,71)	(106,21)
6	ESKUISAS AKHIR	314.890.864.204,87	2.024.024.024.024,00	1.709.133.159.719,13	2.21



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI AND KEMUNGKINAN

6.1 Domisili dan Operasional Entitas

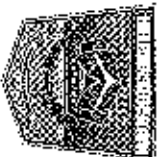
Kabupaten Solok Selatan merupakan Kabupaten yang berada di ujung selatan Sumatera Barat dengan ketinggian 300-950 m di atas permukaan air laut terletak diantara 01° 17' 13" - 01°45" *Lintang Selatan* dan 100° 53' 24" - 101° 26' 27" Bujur Timur yang wilayah darutannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi hasil pertanian. Batas wilayah Kabupaten Solok Selatan meliputi:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Solok
Sebelah Timur	:	Kabupaten Dharmasraya
Sebelah Selatan	:	Propinsi Jambi
Sebelah Barat	:	Kabupaten Pesisir Selatan

dengan luas wilayah 3.346,20 kilometer persegi yang meliputi kawasan hutan mencapai 212.821 hektar, lahan sawah 9.490 hektar dan lahan lainnya 112.809 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 156.901 jiwa sebagaimana data Solok Selatan Dalam Angka Tahun 2025, bertempel tanggal tersebut di 7 kecamatan yang terbagi dalam 39 nagari dan 269 jorong.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mencakup urusan:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Sosial;
- g. Tenaga Kerja;
- h. Pembudayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Pangan;
- j. Administrasi kependudukan dan capil;
- k. Pengendalian penduduk dan KB;
- l. Perhubungan;
- m. Komunikasi dan informatika;
- n. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- o. Perananan modal;



perkara perbuatan melawan hukum, CV. Gusri Family selaku penyedia atas Pengadaan Benih/Bibit Temak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain pada Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan mengajukan gugatan pendana terhadap 1). Bapak Bupati Solok Selatan selaku Kepala Daerah sebagai Tergugat 1, 2). Kepala Dinas Pertanian selaku Penggugat Anggaran sebagai Tergugat II, serta 3) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tergugat III ke Pengadilan Negeri Kota Buni Solok. Gugatan tersebut diajukan karena CV. Gusri Family tidak pernah atas penghentian kontrak secara permancen yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan. Penghentian kontrak secara permancen yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Solok selain didesan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penyakit Maut dan Kuku (PMK) adalah wabah penyakit non alara yang disebabkan oleh virus yang belum bisa diperkirakan/ diprediksi kapan akan berakutirnya, serta dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi, sosial, dan politik yang sangat besar.
- 2) Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Menerangkan bahwa penghentian kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kondisi kahar dapat bersifat permancen apabila tidak memungkinkan dilanjutkannya/ diselesaikannya pekerjaan.
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mempunyai kewenangan terhadap fungsi anggaran yang dapat merugikan ketersediaan anggaran untuk Tahun Anggaran 2023, apabila proses kontrak ini dilanjutkan dengan menggunakan hasil tender yang sama.

Sampai saat ini, status perkara berada dalam putusan sela dengan lama proses 154 hari.



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian peripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antispasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penerapan kebijakan keuangan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2023 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis aktual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dari seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang lebih baik.

Padang Aro, 29 Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
 REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AWAL PENGAKUAN PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak Daerah	2016	18.018.014.063,00	2.084.743.248,00	6.079.246.536,00	13.723.511.675,00
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2016	17.546.961.546,00	1.803.671.478,00	6.408.133.119,00	12.742.499.897,00
	Piutang Pajak Penjualan Atas	2018	471.113.417,00	481.071.778,00	471.113.417,00	481.071.778,00
	Piutang Pajak Reklame	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi	2017	1.070.109.750,00	92.715.680,00	0,00	2.082.825.350,00
	Piutang Retribusi Pengendalian Monera Telekomunikasi	2015	82.817.900,00	0,00	0,00	82.817.900,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2017	8.375.000,00	0,00	0,00	8.375.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	2016 sd 2023	1.853.670.600,00	92.715.680,00	0,00	1.946.386.280,00
	Piutang Retribusi SML	2020	75.446.250,00	0,00	0,00	25.446.250,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Bagan Laba atas Penjualan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		30.212.352.832,38	4.049.399.370,00	6.948.461.982,76	28.342.289.419,62
	Piutang BLUD	2022 dan 2023	5.747.915.543,00	4.049.399.370,00	5.747.915.543,00	4.049.399.370,00
	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2019	18.402.559,67	0,00	0,00	18.402.559,67
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2017	21.700.261.271,00	0,00	280.745.463,00	21.520.415.808,00
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap PNS Non Bendahara	2019	453.333.548,00	0,00	0,00	453.333.548,00
	Dana Revolving	2006	2.319.737.734,00	0,00	0,00	2.319.737.734,00
	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	2022	1.300.976,76	0,00	1.300.976,76	0,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2022	3.534.765.320,00	16.107.026.723,00	3.534.765.320,00	16.107.026.723,00
	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2022	3.534.765.320,00	16.107.026.723,00	3.534.765.320,00	16.107.026.723,00
6	Piutang Lainnya	2022	155.055.500,00	358.014.900,00	155.055.500,00	358.014.900,00
	Piutang Pendapatan Kepitai NKIP Puskostnas	2022 dan 2023	155.055.500,00	358.014.900,00	155.055.500,00	358.014.900,00
	JUMLAH		53.920.297.565,38	22.891.899.841,00	18.518.529.830,76	60.093.666.067,62

Padang Aro, 29 Juli 2024
 BUPATI SOLOK SELATAN,

 KIM RUSNAS

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
 REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AWAL PENGAKUAN PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGUPANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak Daerah		(10.881.831.529,09)	(49.791,80)	(1.752.731.031,80)	(8.829.250.289,09)
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2014 sd 2023	(10.379.575.962,00)	0,00	(1.752.731.031,80)	(8.626.844.930,20)
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	2022 sd 2023	(2.355.567,09)	(19.791,80)	0,00	(2.405.358,89)
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2021	0,00	0,00	0,00	
2	Piutang Retribusi		(1.926.103.288,00)	88.895,00	(169.732.505,00)	(1.756.201.888,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2015	(82.817.900,00)	0,00	0,00	(82.817.900,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi Perumahan Kelayaan Daerah	2017	(8.375.000,00)	0,00	0,00	(8.375.000,00)
	Penyisihan Retribusi Pelayanan Pasar	2016-2023	(1.809.454.138,00)	88.895,00	(169.732.505,00)	(1.639.642.738,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi IMB	2016	(25.446.250,00)	0,00	0,00	(25.446.250,00)
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(24.375.046.000,09)	(242.245.006,47)	(272.522.966,22)	(24.344.768.040,34)
	Penyisihan Piutang BLUD	2022 dan 2023	(72.277.503,22)	(51.877.990,72)	(72.277.503,22)	(51.877.990,72)
	Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2019	(9.769.123,07)	(8.633.436,55)	0,00	(18.402.559,62)
	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2017	(21.700.661.271,00)	0,00	(200.245.463,09)	(21.500.415.808,00)
	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap PNS Non Bendahara	2019	(222.600.368,80)	(181.733.579,20)	0,00	(454.333.948,00)
	Penyisihan Dana Revolving	2006	(2.319.737.734,00)	0,00	0,00	(2.319.737.734,00)
	Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Deposito		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Lainnya		(775.277,50)	(1.790.074,50)	(775.277,50)	(1.790.074,50)
	Penyisihan Piutang Pendapatan Kapitalis FKTP Puskesmas	2022 dan 2023	(775.277,50)	(1.790.074,50)	(775.277,50)	(1.790.074,50)
	JUMLAH		(36.683.858.091,68)	(243.995.977,77)	(2.195.761.780,52)	(34.732.090.291,93)

Padang Aro, 29 Juli 2024
 BUPATI SOLOK SELATAN,

 KIMARUNAS

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
 REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AWAL PENGAKUAN PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Dana Bergulir - Dana Revolving		14.136.191.804,00	0,00	11.816.454.070,00	2.319.737.734,00
	Piutang Pokok Dana Bergulir BPM, PPr&KB 2006	2006	1.847.681.700,00	0,00	0,00	1.847.681.700,00
	Piutang Denda Dana Bergulir BPM, PPr&KB 2006	2006	11.063.949.170,00	0,00	11.063.949.170,00	0,00
	Piutang Pokok Dana Bergulir Koperindag 2006	2006	50.763.400,00	0,00	8.000.000,00	42.763.400,00
	Piutang Pokok Dana Bergulir Koperindag 2008	2006	131.305.667,00	0,00	(8.600.000,00)	130.905.667,00
	Piutang Pokok Dana Bergulir PDAM	2006	636.803.900,00	0,00	636.803.900,00	0,00
	Piutang Bunga Dana Bergulir BPM, PPr&KB 2006	2006	266.793.700,00	0,00	0,00	266.793.700,00
	Piutang Bunga Dana Bergulir Koperindag 2006	2006	7.429.100,00	0,00	1.701.000,00	5.728.100,00
	Piutang Bunga Dana Bergulir Koperindag 2008	2006	16.865.167,00	0,00	0,00	16.865.167,00
	Piutang Bunga Dana Bergulir PDAM	2006	114.600.000,00	0,00	114.600.000,00	0,00
	Piutang Lain-lain	2006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan piutang lainnya - Revolving	2006	(14.136.191.804,00)	0,00	(11.816.454.070,00)	(2.319.737.734,00)
	JUMLAH		14.136.191.804,00	0,00	11.816.454.070,00	2.319.737.734,00

Padang Aro, 29 Juli 2024
 BUPATI SOLOK SELATAN



KHAIRUNAS

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG

PERTANGGUNGJAWARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tahun	Nama Badan/Lembaga	Detail Rincian Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal	Jumlah Modal yang sudah di serahkan saat Awal Tahun	Penyerahan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang sudah di serahkan saat Akhir Tahun Ini	Dana Modal yang Dalam Diserahkan	Tipe Penyerahan Modal (Prosentasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (prosentasi) yang diserahkan pada Tahun Ini	Jumlah Saat Modal (Investasi) yang diserahkan SA Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2015	Bumi Negeri	Pondok No 100010	Sawon	500.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00				
	2016				1.000.000.000,00	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00				
	2017				2.000.000.000,00	4.000.000.000,00		4.000.000.000,00				
	2018				933.000.000,00	4.933.000.000,00		4.933.000.000,00				
	2019				1.365.000.000,00	6.298.000.000,00		6.298.000.000,00				
	2020				2.000.000.000,00	8.298.000.000,00		8.298.000.000,00				
	2021				3.000.000.000,00	11.298.000.000,00		11.298.000.000,00				
	2022				1.000.000.000,00	12.298.000.000,00	1.000.000.000,00	12.298.000.000,00				
	2023				2.000.000.000,00	14.298.000.000,00	2.000.000.000,00	14.298.000.000,00				
	2024				500.000.000,00	14.798.000.000,00	500.000.000,00	14.798.000.000,00				
	2025				500.000.000,00	15.298.000.000,00	500.000.000,00	15.298.000.000,00				
	2026				750.000.000,00	16.048.000.000,00	750.000.000,00	16.048.000.000,00				
	Jumlah							16.228.000.000,00	16.228.000.000,00	720.000.000,00	16.228.000.000,00	0,00
2	2007	Leopang Jakarta			800.000.000,00	800.000.000,00		800.000.000,00				
	2008				500.000.000,00	1.300.000.000,00		1.300.000.000,00				
	Jumlah				1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00
3	2009	PMDA			3.028.527.978,00	3.028.528.528,00		3.028.528.528,00				
	2010				3.624.544.000,00	6.653.072.528,00		6.653.072.528,00				
	2011				5.445.000.000,00	12.098.072.528,00		12.098.072.528,00				
	2012				2.490.400.000,00	14.588.472.528,00		14.588.472.528,00				
	2013				3.000.000.000,00	17.588.472.528,00		17.588.472.528,00				
	2014				0,00	17.588.472.528,00		17.588.472.528,00				
	2015				1.554.910.000,00	19.143.382.528,00		19.143.382.528,00				
	2016				2.870.000.000,00	22.013.382.528,00		22.013.382.528,00				
	2017				1.500.000.000,00	23.513.382.528,00		23.513.382.528,00				
	2018				1.000.000.000,00	24.513.382.528,00		24.513.382.528,00				
	2019				1.200.000.000,00	25.713.382.528,00		25.713.382.528,00				
	2020				1.000.000.000,00	26.713.382.528,00		26.713.382.528,00				
	2021				1.000.000.000,00	27.713.382.528,00		27.713.382.528,00				
	2022				1.000.000.000,00	28.713.382.528,00		28.713.382.528,00				
	2023				1.000.000.000,00	29.713.382.528,00		29.713.382.528,00				
	2024				1.000.000.000,00	30.713.382.528,00		30.713.382.528,00				
	Jumlah							42.228.000.000,00	42.228.000.000,00	170.000.000,00	42.228.000.000,00	0,00
				64.428.000.000,00	64.428.000.000,00	890.000.000,00	64.428.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.428.000.000,00	

Padang Aro, 29 Juli 2024
 BUPATI SOLOK SELATAN,

 KH AIRUNAS

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
 DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
		2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	366.709.927,859,00	124.816.750,00	0,00	366.834.744.609,00
2	Peralatan dan Mesin	343.963.123.810,99	31.130.860.908,00	5.605.507.472,00	369.488.477.246,99
3	Gedung dan Bangunan	757.522.080.597,20	43.824.640.839,00	9.295.751.086,00	792.050.970.350,20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.410.782.448.374,04	77.796.945.275,00	4.344.289.928,00	1.484.235.103.721,04
5	Aset Tetap Lainnya	46.007.519.047,04	5.542.804.216,00	151.552.268,00	51.398.770.995,04
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	67.015.563.293,00	7.133.454.048,00	7.552.059.582,00	66.596.957.759,00
JUMLAH		2.992.000.662.981,27	165.553.522.036,00	26.949.160.336,00	3.130.605.024.681,27

Padang Aro, 29 Juli 2024
 BUPATI SOLOK SELATAN,

 KHAIRUNAS

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
		2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	366.709.927.859,00	124.816.750,00	0,00	366.834.744.609,00
2	Peralatan dan Mesin	343.963.123.810,99	31.130.860.908,00	5.605.507.472,00	369.488.477.246,99
3	Gedung dan Bangunan	757.522.080.597,20	43.824.640.839,00	9.295.751.086,00	792.050.970.350,20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.410.782.448.374,04	77.796.945.275,00	4.344.289.928,00	1.484.235.103.721,04
5	Aset Tetap Lainnya	46.007.519.047,04	5.542.804.216,00	151.552.268,00	51.398.770.995,04
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	67.015.563.293,00	7.133.454.048,00	7.552.059.582,00	66.596.957.759,00
	JUMLAH	2.992.000.662.981,27	165.553.522.036,00	26.949.160.336,00	3.130.605.024.681,27

Padang Aro, 29 Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2023	PENAMBAHAN 2023	PENGURANGAN 2023	SALDO AKHIR 2023
1	2	3	4	5	6
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	67.015.563.293,00	7.133.454.048	7.552.059.582	66.596.957.759,00
	JUMLAH	67.015.563.293,00	7.133.454.048,00	7.552.059.582,00	66.596.957.759,00

Padang Aro, 29 Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

 KHAYRUNAS

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
 DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2023	PENAMBAHAN 2023	PENGURANGAN 2023	SALDO AKHIR 2023
1	2	3	4	5	6
1	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aset Tidak Berwujud	1.458.943.875,00	82.020.000,00	0,00	1.540.963.875,00
3	Aset Lain-lain	27.677.715.899,24	4.099.683.997,00	4.350.103.290,00	27.427.296.606,24
4	Aset yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.364.179.953,00	13.238.462.000,00	5.364.179.953,00	13.238.462.000,00
	JUMLAH	34.500.839.727,24	17.420.165.997,00	9.714.283.243,00	42.206.722.481,24

Padang Aro, 29 Juli 2024
 BUPATI SOLOK SELATAN,

 KHAIRUNAS

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					

Paolang Aro, 29 Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,
KIMIRUNAS



LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2023	PENAMBAHAN 2023	PENGURANGAN 2023	SALDO AKHIR 2023
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	44.512.023,00	13.006.653,00	26.303.841,00	31.214.835,00
3	Utang Beban	23.220.835.631,51	18.772.533.227,97	23.220.835.631,51	18.772.533.227,97
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	37.118.129,00	579.200,00	0,00	37.697.329,00
5	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	23.302.465.783,51	18.786.119.080,97	23.247.139.472,51	18.841.445.391,97

Padang, Angg. 29 Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	BASAR HUKUM PINJAMAN DAERAH	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN/ NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH REALISASI TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

NIHIL

Pulang Ahm, 29 Juli 2024
 BUPATI SOLOK SELATAN,

 KHAIRUNAS



LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN BERIKUTNYA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KODE KEGIATAN	JUMLAH REALISASI TAHUN n-1, TAHUN n-1, TAHUN n			JUMLAH AKUMULASI REALISASI S.D AKHIR TAHUN n	JUMLAH YANG DI ANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
		Tahun n -2 2021	Tahun n -1 2022	Tahun n 2023		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
JUMLAH						

NIHIL

Padang Aro, 29 Juli 2024
 BUPATI SOLOK SELATAN,


LAMPIRAN XX.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SARIBU SUNGAI

LAPORAN NERACA

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM
TIRTA SARIBU SUNGAI KABUPATEN SOLOK SELATAN
NERACA**

31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rinciah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	2.e.3	563.864.389	122.049.313
Piutang usaha - Bersih			
(Setelah dikurangi penyisihan piutang usaha)	2.f.4	1.734.303.715	717.408.223
Persediaan	2.g.5	888.490.881	924.969.162
Biaya dibayar dimuka	2.h.6	17.250.000	15.468.324
Jumlah Aset Lancar		3.178.908.985	1.779.895.022
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap			
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp14.271.130.780 (2022 : Rp12.429.734.044)	2.i.7	38.960.360.645	40.772.948.552
Jumlah Aset Tidak Lancar		38.960.360.645	40.772.948.552
JUMLAH ASET		42.139.269.630	42.552.843.574

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM
 TIRTA SARIBU SUNGAI KABUPATEN SOLOK SELATAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	2023	2022
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Utang usaha	8	-	244.915.000
Utang lain-lain	9	-	268.496.000
Utang pajak	10	-	12.439.217
Utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun	11	34.560.000	64.560.000
Jumlah Kewajiban Lancar		64.560.000	590.410.217
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11	43.040.000	-67.600.000
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		43.040.000	107.600.000
Jumlah Kewajiban		107.600.000	698.010.217
EKUITAS			
Modal disetor	12	50.627.606.864	50.627.606.864
Saldo rugi		(8.595.937.234)	(8.772.773.507)
Jumlah Ekuitas		42.031.669.630	41.854.833.357
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		42.139.269.630	42.552.843.574

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha MIlk Daerah/ Perusahaan Daerah
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SARIBU SUNGAI**

LAPORAN LABA RUGI

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM
TIRTJA SARIBU SUNGAI KABUPATEN SOLOK SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022
	2023	2022	2023	2022
Pendapatan Usaha				
Perjualan air	7.780.828.700	5.814.445.600		
Perjualan non air	773.480.712	769.185.675		
Jumlah Pendapatan Usaha	8.554.309.412	6.583.631.275		
Beban Usaha				
Beban sumber air	62.149.500	35.059.500		
Beban pengolahan air	752.849.003	755.869.758		
Beban transmisi dan distribusi	1.564.175.661	1.125.241.055		
Beban administrasi dan umum	6.124.895.399	6.225.930.425		
Beban penyusutan dan amortisasi instalasi non pabrik	123.357.900	152.453.521		
Jumlah Beban Usaha	8.627.427.464	8.294.554.259		
RUGI USAHA	(73.118.052)	(1.710.922.984)		
Pendapatan (Beban) Lain-Lain				
Pendapatan Lain-Lain	249.954.325	8.168.348		
LABA (RUGI) BERSIH	176.836.273	(1.702.754.636)		